2016
Laporan Tahunan

BNI Syariah

Komitmen Mewujudkan Prinsip Hidup Berhasanah

IDX:BBSY

PT Bank BNI Syariah

PERISTIWA PENTING

November

BNI Syariah mendukung gerakan literasi keuangan syariah yang diinisiasi OJK melalui kegiatan *Branch Manager* (BM) *Teaching* di 33 sekolah seluruh Indonesia

4 November

Board of Management BNI Syariah bersama Pemimpin Redaksi Republika berdiskusi tentang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia saat Media Visit ke Kantor Republika

9 November

Launching Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Palu merupakan penutup pembentukan JES di tahun 2016, keseluruhan sebanyak 10 kota sudah terbentuk JES (Jakarta, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Makassar, Aceh, Padang dan Palu)

19 November

Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah tentang pengembangan wakaf produktif, BNI Syariah meluncurkan *website* Wakaf Hasanah (*wakafhasanah.bnisyariah.co.id*) dengan menggandeng 5 lembaga wakaf (Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Global Wakaf, Yayasan Al Azhar, dan Badan Wakaf Indonesia)

22-25 November

Sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan bisnis umrah dan travel, SEVP Bisnis Komersial BNI Syariah, Dhias Widhiyati hadir sebagai pembicara dalam forum yang dihadiri oleh 300 anggota Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dari seluruh Indonesia.

10 Desember

Untuk memfasilitasi besarnya animo masyarakat dalam ibadah umrah, BNI Syariah bekerja sama dengan 12 travel haji dan umrah mengadakan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair Hasanah (GAUTFH)

14-18 Desember

Business Meeting bersama seluruh Komisaris, BOM, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi dalam menetapkan strategi bisnis 2017 dihadiri oleh Walikota Padang dan Gubernur Nusa Tenggara Barat

20-21 Desember

Gathering 13 Duta Hasanah bersama Direksi BNI Syariah dalam rangka evaluasi dan rencana program Hasanah Empowerment 2017 bagi binaan Duta Hasanah

PERISTIWA PENTING

23 Desember

Launching Kantor Wilayah Barat BNI Syariah yang dihadiri oleh Direktur Operasional BNI Syariah, Junaidi Hisom sekaligus serah terima jabatan pemimpin cabang di wilayah barat

23 Desember

Penandatanganan kerja sama BNI Syariah dan PT Pegadaian (Persero) dalam layanan transaksi pencairan non tunai yang dihadiri oleh Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono

BNI Syariah
BNI Syariah

02 LAPORAN MANAJEMEN

"Sinergi yang baik antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai BNI Syariah menjadikan BNI Syariah dapat meraih kinerja yang cukup membanggakan di tengah perlambatan pertumbuhan industri perbankan."

Laporan Dewan Pengawas Syariah	40
Laporan Dewan Komisaris	42
Laporan Direksi	48
Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank BNI Syariah 2016	56

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Operasional BNI Syariah pada tahun 2016 telah sesuai dengan prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI, dan opini DPS.

KH Ma'ruf Amin
Ketua

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa melimpah atas Rasul-Nya, Muhammad SAW. Semoga taufiq dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurah bagi kita semua.

Alhamdulillahirabbilalamin dan selamat kepada manajemen dan seluruh karyawan PT Bank BNI Syariah. Itulah kalimat pertama yang saya atas nama Dewan Pengawas Syariah (DPS) sampaikan atas pencapaian kinerja BNI Syariah tahun buku 2016 yang sangat membanggakan. Patut kita syukuri bersama bahwa BNI Syariah dapat mempertahankan kinerja yang unggul di tengah kondisi perekonomian dan industri perbankan yang penuh tantangan.

DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan operasional BNI Syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.* Untuk memastikan kedua hal tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat, baik rapat internal, rapat Dewan Komisaris, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi.

Di samping melakukan *review* terhadap produk, SOP dan kebijakan di BNI Syariah, DPS juga melakukan uji petik atas transaksi penyaluran dana dan pelayanan di Kantor Cabang sebagai salah satu bahan penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi dan opini syariah.

Secara singkat, kegiatan yang dilakukan DPS sepanjang tahun 2016 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan prinsip syariah.
2. Memberikan masukan bahwa produk dan layanan BNI Syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
4. Menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan DSN MUI, yang antara lain memuat:
    a. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI.
    b. Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank.
    c. Opini Umum DPS terhadap operasional Bank.
    d. Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank.
5. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil pengawasan DPS, secara umum operasional BNI Syariah pada tahun 2016 telah sesuai dengan prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Namun demikian, DPS selalu mengingatkan agar BNI Syariah terus melakukan upaya perbaikan pada beberapa elemen operasional yang masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Upaya perbaikan ini menjadi sangat penting karena terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang dibukukan oleh BNI Syariah. Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional BNI Syariah harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku, khususnya pemenuhan prinsip syariah.

DPS juga merekomendasikan untuk dilakukan penguatan dalam hal akad dan pengembangan produk perbankan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang sangat pesat merupakan peluang bagi BNI Syariah. Namun, DPS mengingatkan bahwa dalam hal pengembangan produk, BNI Syariah harus selalu berlandaskan pada pemenuhan prinsip syariah. Tidak semua produk perbankan konvensional dapat dijadikan produk syariah.

Menyongsong tahun 2017, DPS berharap agar BNI Syariah dapat terus menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. DPS bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik. Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat periodik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional BNI Syariah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip Syariah

Sekali lagi DPS turut bersyukur atas pencapaian kinerja BNI Syariah yang menggembirakan di tahun ini. Pada kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen BNI Syariah agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhir kata, DPS berharap agar BNI Syariah dapat mewujudkan visinya untuk menjadi bank syariah terbaik di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KH Ma'ruf Amin
Ketua

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

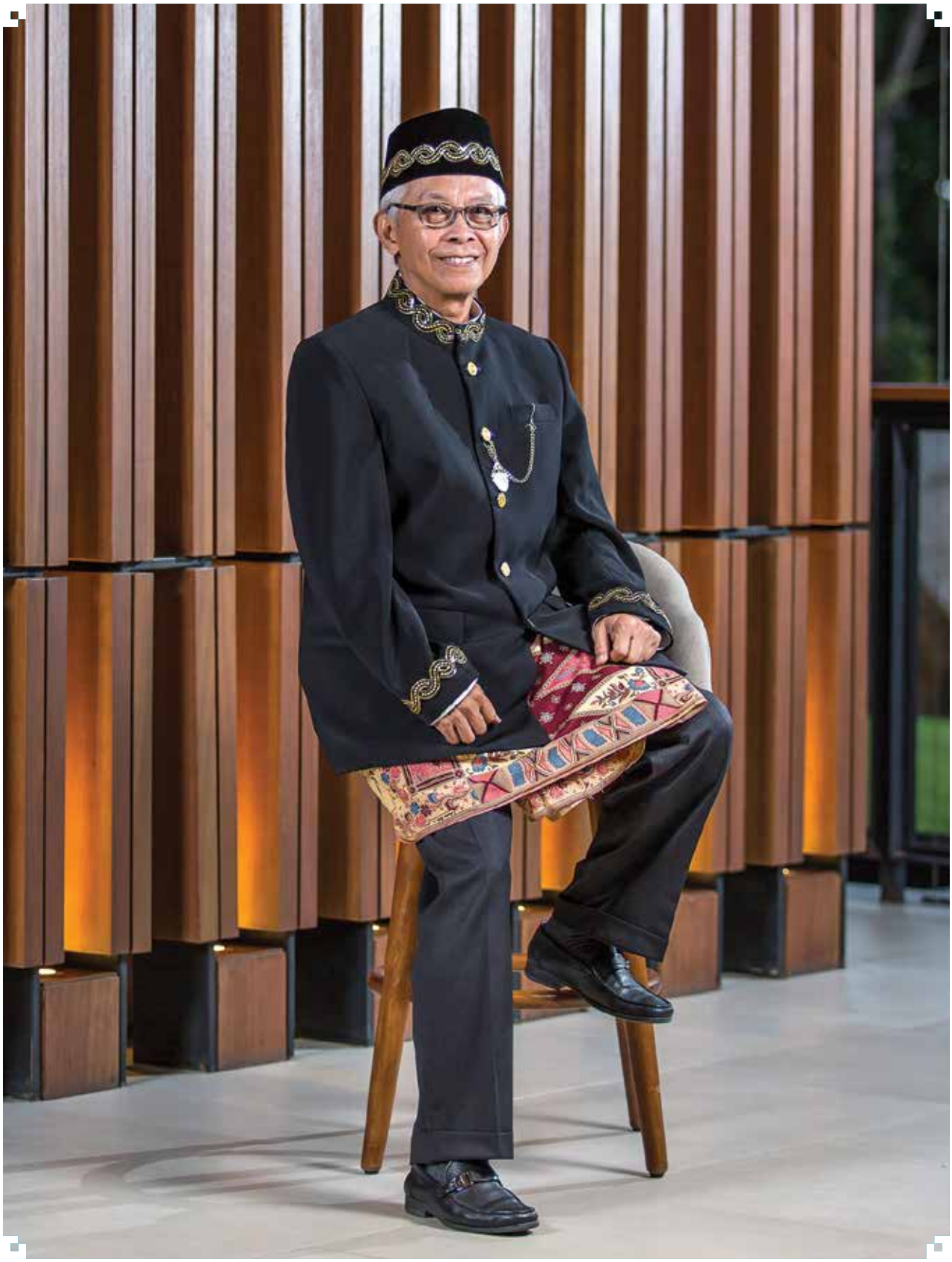

BNI Syariah senantiasa berusaha menciptakan tata kelola Perusahaan yang sehat dan kokoh, serta senantiasa memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Fero Poerbonegoro
Komisaris Utama

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para pemegang saham yang terhormat, ijinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-nya kepada kita semua. Dan atas seijinnya pula PT Bank BNI Syariah dapat melalui tahun 2016 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup membanggakan.

Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah untuk menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional Perseroan di tahun buku 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun demikian kondisi makro ekonomi Indonesia mulai menunjukkan titik cerah. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 tercatat sebesar 5,02% (posisi Desember 2016), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%.

Membaiknya perekonomian nasional tidak lepas dari upaya Pemerintah untuk terus melanjutkan program pengembangan ekonomi yang berbasiskan pada pengembangan infrastruktur dan penguatan sektor maritim. Selain itu, membaiknya harga komoditas global juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, membaiknya kondisi makro ekonomi belum serta merta diikuti oleh sektor riil. Pertumbuhan sebagian besar sektor industri masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan para pelaku usaha masih menerapkan kebijakan yang konservatif dalam melakukan ekspansi usaha. Hal tersebut berdampak pada kinerja industri perbankan nasional sepanjang tahun 2016.

Menurut data OJK, kinerja industri perbankan nasional tahun 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan pada penyaluran kredit yang hanya terealisasi sebesar 7,85% (posisi Desember 2016), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit tahun 2015 yang sebesar 10,40%. Sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 9,60% (posisi Desember 2016) yang meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan DPK tahun sebelumnya sebesar 7,26%.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Di tengah perlambatan pertumbuhan industri perbankan nasional, Perseroan masih dapat membukukan kinerja yang baik. Secara umum, kinerja Perseroan tahun 2016 berada di atas rata-rata industri, baik industri perbankan secara keseluruhan maupun di industri perbankan syariah. Hal ini patut kita syukuri bersama.

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Perseroan semakin menguatkan posisinya sebagai pemimpin di antara *peers group* bank syariah nasional.

Permodalan dan CAR

Dilihat dari struktur permodalan, Dewan Komisaris menilai bahwa permodalan Perseroan masih cukup baik, dengan adanya peningkatan modal secara berkelanjutan sejalan dengan kenaikan profitabilitas yang berkesinambungan. Pada tahun 2016 modal meningkat sebesar Rp.277,38 miliar yang berasal dari laba, sehingga total modal menjadi Rp2,48 Triliun. Tingkat kecukupan modal Perseroan tahun 2016 berdasarkan rasio kecukupan modal (CAR) berada pada tingkat 14,92% atau lebih tinggi dari batasan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

GCG

Dalam hal pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris berpandangan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian tujuan Perseroan.

Implementasi prinsip GCG di Perseroan secara umum selama ini telah berjalan dengan baik. Tahun 2016, Perseroan terus meningkatkan fokus pada pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus yang mengandung unsur *fraud* melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Perseroan masih menghadapi tantangan didalam mewujudkan sasaran *zero fraud* dimasa yang akan datang.

Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi, berintergritas dan berdedikasi merupakan kunci bagi pelaksanaan operasional Perseroan yang sehat. Oleh karenanya Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala telah melakukan *review* terhadap sistem nominasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sebagai acuan bagi pengembangan dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi dan prestasinya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi terhadap struktur, sistem, dan besaran remunerasi. Rekomendasi berdasar evaluasi yang dilakukan telah menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pemberian imbalan kerja sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.

Kepatuhan

Dalam hal pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama periode tahun 2016 Dewan Komisaris memandang pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perseroan secara umum telah dilakukan dengan baik. Secara khusus, mengingat Perseroan adalah lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, maka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah oleh Perseroan dan segenap pegawai agar dapat menjadi perhatian serius pada masa mendatang.

Profil Risiko

Pengelolaan Risiko Perseroan secara umum telah dilakukan dengan baik. Perseroan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya pembiayaan korporasi/ komersial sehingga Perseroan dapat menekan kewajiban pencadangan yang pada gilirannya dapat menekan profitabilitas.

Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan keempat *variable* pengukuran (Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan), Perseroan secara keseluruhan dapat mempertahankan peringkat Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko, Perseroan di peringkat 2 (sehat) sepanjang tahun 2016. Diharapkan agar kondisi ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan baik secara kuantitias maupun kualitas di masa yang akan datang.

Rekomendasi

Berdasarkan laporan pengawasan yang telah kami sampaikan, Dewan Komisaris memberikan sejumlah rekomendasi dan nasihat kepada Direksi antara lain:

1. Membangun Budaya Sadar Risiko, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk membangun budaya sadar risiko di lingkungan Perseroan, mengingat industri perbankan merupakan industri yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi.

   Dewan Komisaris memandang, jika budaya sadar risiko tersebut sudah menjadi bagian dari keseharian seluruh pegawai Perseroan, maka tingkat risiko Perseroan dapat terus ditekan ke level yang sangat baik.

2. Seluruh anggota Perseroan wajib menyadari bahwa potensi risiko akan muncul di setiap aktifitas, sehingga perlu kiranya untuk selalu berhati-hati dan secara sadar melakukan aktifitas dengan tetap berpedoman pada SOP, kode etik serta aturan internal lainnya dan menyadari sepenuhnya bahwa potensi risiko yang muncul akan dapat berdampak secara langsung ataupun tidak langsung pada peringkat profil risiko, tingkat kesehatan bank, dan berujung pada kemampuan permodalan Perseroan.

3. Memperkuat aspek pendanaan, Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk memperhatikan aspek pendanaan Perseroan. Kendati pencapaian DPK Perseroan sudah sangat baik dan berada di atas bank syariah lainnya, namun menurut pandangan Dewan Komisaris dibutuhkan struktur pendanaan yang betul-betul kuat dan matang untuk menunjang pertumbuhan Perseroan ke depan.

4. Meningkatkan kualitas SDM, Dewan Komisaris memandang bahwa di tengah pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia persaingan tidak hanya terjadi dalam hal memperebutkan pasar, tapi juga dalam hal memperebutkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Karena itu, peningkatan kualitas dan program retensi pegawai harus menjadi perhatian serius Direksi.

5. Meningkatkan *rating* layanan, walaupun hingga saat ini Perseroan telah memiliki kualitas layanan yang cukup baik, namun Dewan Komisaris memandang bahwa peningkatan layanan harus terus dilakukan mengingat salah satu marwah dari industri jasa perbankan adalah pelayanan.

6. Terkait kepatuhan kepada regulasi, pada kesempatan ini Dewan Komisaris mengharapkan Direksi dapat merancang program yang aplikatif dan terstruktur dalam rangka memenuhi ketentuan prosentase pembiayaan produktif minimal 60% dari total portofolio pembiayaan sebagaimana amanah POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti dengan tetap senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian.

7. Melakukan identifikasi terhadap penyebab ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang masih terjadi, baik ketentuan otoritas, ketentuan syariah dan ketentuan Perseroan sendiri serta melakukan upaya perbaikan secara tuntas untuk menghindari risiko finansial dan risiko reputasi.

Rekomendasi dan nasihat yang diberikan Dewan Komisaris tersebut diterima dengan baik oleh Direksi melalui mekanisme rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris dan atau melalui surat menyurat.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif terhadap implementasi strategi yang dijalankan Direksi. Fungsi tersebut dijalankan dengan baik oleh Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Berdasarkan temuan, masukan dan rekomendasi yang diberikan Komite, Dewan Komisaris mengkonfirmasi secara langsung kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Melalui forum rapat tersebut, Dewan Komisaris meminta penjelasan dari Direksi terkait dengan implementasi strategi yang dijalankan Direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menjalankan strategi yang sesuai dengan rencana pengembangan usaha Bank jangka menengah dan jangka panjang.

Prospek tahun 2017

Untuk prospek tahun 2017, Dewan Komisaris memberikan catatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penetrasi di Sektor Ritel, populasi penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar membuat sektor ritel memiliki potensi yang sangat besar. *Awareness* masyarakat akan perbankan syariah harus terus ditingkatkan.

2. Inovasi produk dan layanan, dibandingkan industri perbankan konvensional, industri perbankan syariah terbilang baru berkembang di Indonesia. Karena itu, produk dan layanan di perbankan syariah masih lebih terbatas dibandingkan perbankan konvensional. Untuk itu, inovasi produk dan layanan harus menjadi perhatian utama untuk mengejar ketertinggalan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional. Namun demikian, patut diperhatikan bahwa tidak semua produk dan layanan di industri perbankan konvensional bisa dijadikan produk dan layanan syariah.
3. Penguatan teknologi informasi, untuk mendukung pengembangan produk dan layanan, dibutuhkan dukungan teknologi informasi. Karena itu, pembenahan dan penguatan teknologi informasi harus menjadi perhatian utama untuk menunjang perkembangan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas pencapaian kinerja dan kerja sama yang baik selama tahun 2016, dengan harapan agar hal tersebut dapat lebih baik lagi di tahun 2017 ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

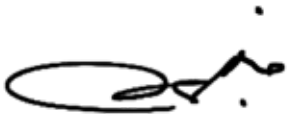

Fero Poerbonegoro
Komisaris Utama

LAPORAN DIREKSI

BNI Syariah mencatat pertumbuhan usaha yang cukup baik selama tahun 2016. Hampir pada semua indikator, pertumbuhan BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. Laba bersih BNI Syariah tahun 2016 tercatat sebesar Rp277,38 miliar, tumbuh sebesar 21,38%.

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan Salam semoga senantiasa melimpah atas Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat Allah SWT, BNI Syariah berhasil melalui tahun 2016 dengan baik. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan BNI Syariah untuk tahun buku 2016.

Kondisi perekonomian tahun 2016 sangatlah menantang. Masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global, berdampak cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian di tanah air. Jatuhnya harga komoditas dunia membuat industri komoditas di Indonesia menghadapi situasi yang cukup berat. Pemain di industri komoditas memperlambat laju usahanya, bahkan beberapa pemain memilih untuk menghentikan usahanya untuk sementara.

Di tengah kondisi tersebut, melalui sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%, dengan tingkat inflasi yang terjaga di level cukup rendah 3,02%.

Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang dijalankan Pemerintah pada tahun 2016 mendapat sambutan yang sangat baik dari wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Hingga 31 Desember 2016, tercatat jumlah deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.143 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.013 triliun dan repatriasi Rp141 triliun dengan jumlah dana tebusan mencapai Rp103,3 triliun. Hal ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

Disamping itu, kebijakan Pemerintah untuk lebih mendorong pengembangan infrastruktur dan sektor maritim juga memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut belum sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan. Tahun 2016, industri perbankan nasional mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan kredit perbankan hanya terealisasi sebesar 7,85% (posisi Desember 2016), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit tahun 2015 sebesar 10,40%. Sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 9,60% (posisi Desember 2016), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK tahun sebelumnya sebesar 7,26%.

LAPORAN DIREKSI

Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Hingga akhir tahun 2016 pertumbuhan industri perbankan syariah mencapai 20,33% (posisi Desember 2016) dengan pangsa pasar sebesar 5,30%. Hal ini salah satunya disebabkan keberhasilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang melakukan konversi secara menyeluruh menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada September 2016.

Inisiatif Strategis

Untuk mencapai tujuan Perusahaan maka inisiatif strategis yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan serta target tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

1. BNI Syariah mengusung tema Bisnis "*Surviving The Turbulance*" sebagai cerminan semangat untuk mengejar pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Permodalan yang kuat dengan menjaga rasio CAR diatas ***minimum requirement regulator*** serta diiringi dengan peningkatan kontribusi laba ditahan *(retained earning)*.
3. Pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan melalui :
   - Peningkatan dana murah.
   - Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan produktif.
   - Penguatan pengelolaan manajemen risiko.
   - Meningkatkan sinergi dengan BNI Induk.
4. Meningkatkan profitabilitas
   - Optimalisasi pendapatan bisnis dengan strategi *front loading* pembiayaan..
   - Menjaga kualitas seluruh segmen pembiayaan dengan peningkatan kualitas pemantauan sehingga mencegah terjadinya NPF dan meminimalkan hapus buku untuk meningkatkan profitabilitas.
   - Meningkatkan efisiensi dan produktifitas.

Untuk melaksanakan inisiatif strategis tersebut maka dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain :

1. *Remapping* Portofolio
   Menyikapi kondisi ekonomi yang dinamis sepanjang tahun 2016, BNI Syariah melakukan pemetaan ulang terhadap porto folio bisnisnya. Sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi untuk sementara waktu dihentikan.
2. Penguatan Kemampuan Analisa Pembiayaan
   BNI Syariah melakukan *refreshment* terhadap seluruh *Relationship Manager* (RM), sehingga mereka mendapatkan kemampuan untuk menganalisa di tengah kondisi ekonomi yang mengalami turbulensi.
3. Membentuk Kantor Wilayah
   Agar dapat menjalankan strategi *go to market* yang lebih cepat, tahun 2016 BNI Syariah membentuk 3 Kantor Wilayah. Selain itu, dengan keberadaan Kantor Wilayah ini juga memungkinkan BNI Syariah untuk melakukan penyebaran supervisi dan delegasi kewenangan.
4. Penguatan *Positioning*
   Di industri perbankan, secara umum BNI Syariah juga bersaing dengan pemain di industri perbankan konvensional. Karena itu, BNI Syariah mengubah pola komunikasi dengan tidak lagi menitik beratkan pada fitur produk, tapi lebih pada *value* dan *benefit* dengan mengusung nilai-nilai syariah. Salah satu langkah yang dijalankan BNI Syariah ini adalah dengan meluncurkan program ***Riba Amnesty*** yang akhirnya menjadi program nasional.
5. Inovasi Produk
   Inovasi produk merupakan hal yang terus menerus dilakukan BNI Syariah. Tahun 2016 BNI Syariah meluncurkan Kartu Haji Umroh, yaitu kartu yang dapat mengeluarkan menu dalam bahasa Indonesia pada mesin ATM di Arab Saudi.
6. Pembentukan unit khusus yaitu Divisi Haji Umroh untuk pengembangan bisnis haji dan umrah, serta strategi *one stop hajj & umrah services*.

Tantangan 2016

Turunnya harga komoditas dunia membuat industri yang terkait dengan komoditas menghadapi persoalan yang cukup serius. Hal ini juga berdampak pada BNI Syariah yang memiliki portofolio di industri tersebut, khususnya di segmen mikro yang terkait dengan pembiayaan petani karet dan sawit. Demikian juga di segmen komersial yang berkaitan dengan pembiayaan alat berat dan industri turunan *oil and gas*.

Meskipun demikian, hal yang patut kita syukuri bersama ditengah persoalan yang cukup serius tersebut, BNI Syariah masih bisa menjaga kualitas pembiayaan (NPF) di atas industri.

Kinerja BNI Syariah 2016

Tahun 2016, BNI Syariah sekali lagi berhasil membukukan kinerja yang membanggakan. Secara umum, pertumbuhan BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah nasional.

Posisi aset BNI Syariah pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp28,31 triliun, meningkat 23,01% dibandingkan posisi aset pada akhir tahun 2015 yang sebesar Rp23,02 triliun. Pencapaian posisi aset tersebut juga berada di atas RBB tahun 2016 sebesar Rp26,25 triliun. Demikian juga halnya dengan Dana Pihak Ketiga yang tercatat sebesar Rp24,23 triliun pada akhir tahun 2016. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 25,41% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19,32 triliun dan berada di atas target sebesar Rp22,11 triliun.

Laba bersih BNI Syariah tahun 2016 tercatat sebesar Rp277,38 miliar, tumbuh sebesar 21,38% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya Rp228,53 miliar. Pencapaian laba bersih tersebut berada di bawah target di awal tahun yang ditetapkan sebesar Rp290,11 miliar.

Rasio keuangan utama secara keseluruhan juga menunjukkan pencapaian yang positif di atas target yang telah ditetapkan. Beberapa rasio tersebut antara lain *Return on Asset* (ROA) sebesar 1,44% dibandingkan target 1,57%, BOPO yang berhasil ditekan di angka 87,81% dari target 86,55%, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tercapai sebesar 14,92% di atas ketentuan regulator. Secara keseluruhan, BNI Syariah berhasil menunjukkan kinerja yang lebih baik di mana sebagian besar indikator utama melampaui target.

Terlepas dari kinerja yang baik tersebut, tahun 2016 *buttom line* BNI Syariah mengalami tekanan. Hal ini tidak lepas dari kondisi makro ekonomi nasional dan kebijakan Pemerintah yang menekan angka suku bunga menjadi *single digit*.

Prospek Usaha

Tahun 2017 masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan. Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi hanya akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,2%-5,5%. Menghadapi kondisi tersebut, BNI Syariah akan tetap fokus menjaga kualitas pembiayaan terutama untuk pembiayaan produktif.

Pengembangan usaha yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian tetap menjadi strategi utama BNI Syariah. Karena itu, BNI Syariah akan fokus pada segmen yang memiliki potensi yang besar dengan tingkat risiko yang terkendali. Beberapa segmen yang akan menjadi fokus BNI Syariah antara lain segmen Pengolahan Agribisnis, Manufaktur yang berbasis pada bahan baku dan permintaan domestik, Perumahan non subsidi, Haji umrah dan segmen Mikro untuk perdagangan dan *home industri*.

BNI Syariah akan tetap optimis dengan angka proyeksi pengembangan usaha tahun 2017. BNI Syariah menetapkan target pertumbuhan usaha pada kisaran 17%-20%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 9%-12%.

Memperkuat Sumber Daya Insani (SDI)

Untuk menghadapi situasi perekonomian yang masih penuh tantangan, ketersediaan sumber daya insani yang handal dan mumpuni merupakan kunci penting. Salah satunya adalah ketersediaan tenaga *Relationship Manager* (RM) yang berdedikasi tinggi dan cakap di bidangnya. Keberadaan mereka sangat strategis dari sisi bisnis komersial untuk memelihara hubungan baik bank dengan nasabah. Di tangan merekalah, produk dan jasa Perseroan akan disampaikan kepada para nasabah melalui komunikasi yang baik. Harapannya, para nasabah bisa menerima dan mengapresiasi produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah.

Bercermin pada posisi penting RM, pada awal tahun 2017, BNI Syariah melepas 36 RM baru untuk ditempatkan di cabang-cabang untuk memperkuat RM yang sudah ada. Di waktu yang bersamaan, BNI Syariah merekrut 55 orang calon RM dan kini sedang dalam proses pendidikan. Sejalan dengan proses mematangkan calon-calon RM, kami berharap bahwa tiga kantor wilayah yang diluncurkan pada tahun 2016 sudah bisa efektif beroperasi. Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, kantor-kantor baru tersebut niscaya akan mempercepat ekspansi dan pembiayaan yang tengah gencar dijalankan oleh BNI Syariah.

Tak hanya itu, untuk menopang ekspansi dan pembiayaan, BNI Syariah juga melakukan kebijakan untuk menaikkan status kantor cabang pembantu yang memiliki aset besar menjadi kantor cabang. Dengan peningkatan status itu, kantor cabang pembantu yang semula hanya fokus untuk memfasilitasi masuknya dana pihak ketiga (DPK), kini sudah diberikan target *booking* pembiayaan. Supaya target tersebut terpenuhi, sekali lagi, kemampuan dan kepiawaian sumber daya insani menjadi faktor penting. Sebab itulah, BNI Syariah bertekad untuk terus memperkuat dan membekali sumber daya insani yang ada agar semakin piawai di bidangnya.

Aspek Tata Kelola Perusahaan

Implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di BNI Syariah bukanlah sebuah sebuah keharusan. Lebih dari itu, prinsip GCG merupakan kebutuhan bagi BNI Syariah, karena sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dikembangkan di lingkungan BNI Syariah. Kompleksitas dan tingkat risiko industri perbankan yang tinggi menjadikan penerapan prinsip GCG merupakan hal wajib yang tidak dapat ditawar.

Berlandaskan pada kesadaran tersebut, BNI Syariah terus berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan struktur, mekanisme dan infrastruktur GCG yang dimilikinya. BNI Syariah melakukan pembaharuan terhadap *standar operation procedure* (SOP) dan sertifikasi yang dimiliki untuk memastikan sistem dan prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan *best practice*.

Salah satu langkah yang dilakukan BNI Syariah adalah meningkatkan status Unit Kepatuhan yang sebelumnya berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan. Peningkatan status ini dimaksudkan agar fungsi kepatuhan di BNI Syariah memiliki kewenangan dan infrastruktur yang lebih kuat.

BNI Syariah juga menjalankan program *know your employee*. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa potensi terjadinya *fraud* lebih banyak karena faktor internal. Sejalan dengan program tersebut, BNI Syariah juga menjalankan program pemberian *reward* terhadap kepada karyawan yang melakukan pelaporan melalui jalur *whistleblowing system* jika laporannya terbukti mengandung unsur *fraud*.
BNI Syariah juga melakukan integrasi pengawasan di bawah Divisi Internal Audit. Pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah pada setiap segmen usaha, diintegrasikan dalam satu pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang utuh terhadap berbagai potensi pelanggaran yang ada di BNI Syariah.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan Direksi dibantu oleh Komite-komite di bawah Direksi, yaitu: Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Sumber Daya Manusia (KSDM), Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT) dan Komite Asset, Liabilities, Management (KALMA). Keberadaan Komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan PBI tentang GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

Di sepanjang tahun 2016, Komite-komite tersebut telah menjalankan perannya dengan baik dan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, antara lain :

Komite Kebijakan Risiko

Telah me-*review* kebijakan pembiayaan SME dan kewenangan yang harus diputus Pejabat Pemutus Pembiayaan atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*

- Telah me-*review* Kebijakan Pembiayaan Komersial dan Kewenangan yang harus diputus Komite atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*
- Telah me-*review* Kebijakan Pembiayaan Konsumer dan Kewenangan yang harus diputus Komite atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*
- Telah me-*review* Kebijakan Pembiayaan Mikro dan Kewenangan yang harus diputus Pejabat Pemutus Pembiayaan atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*
- Telah me-*review* AvR dan SR ideal.

Komite Sumber Daya Insani

- Memutus sanksi administrasi kepada pegawai yang terlibat dalam kasus di beberapa cabang, dan Divisi/Unit.
- Memutus pengisian formasi *Branch Manager* Cabang Banjarmasin dan rangkaian turutannya.
- Memutuskan rotasi/mutasi beberapa posisi jabatan di wilayah dan cabang.
- Memutus pengangkatan/pendefinitifan pimpinan di beberapa cabang

Komite Modal, Investasi dan Teknologi

- Menetapkan Kebijakan Umum Direksi (KUD).
- Kebijakan *Information Technology & Strategic Planning* (ITSP).
- Menetapkan mengenai Target Bisnis dan Anggaran tahun 2017.
- Merumuskan Target unit bisnis tahun 2017.
- Alokasi anggaran CAPEX dan OPEX tahun 2017 & Penambahan SDM tahun 2017.

Komite Aset, *Liabilities Management*

- Penetapan *Financing Pricing Model*;
- *Review* Tarif Pembiayaan;
- *Review* Tarif Dana;
- Penetapan *Fund Transfer Pricing;*
- *Review Fund Transfer Pricing*;
- Penyempurnaan formula penetapan *Fund Transfer Pricing*;
- Penyempurnaan *poling* bagi hasil;
- Penetapan pagu kas valas;
- Membuat rumusan dan usulan terkait manajemen likuiditas, forex, *earning investment* & risiko suku bunga.

Direksi mengapresiasi kinerja Komite-komite yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik yang bersifat taktis maupun jangka panjang.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

BNI Syariah sangat bersyukur bahwa kinerja ekonomi pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ungkapan syukur juga sepatutnya kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena di luar pencapaian kinerja ekonomi tersebut, BNI Syariah juga mampu mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepedulian itu ditunjukkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR). Pada tahun 2016, sekadar gambaran, BNI Syariah mengalokasikan dana CSR sebesar Rp8,32 miliar, naik 10,21% dibanding tahun 2015, sebesar Rp7,55 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program-program yang di adakan BNI Syariah melalui empat pilar utama, yakni bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan lingkungan serta sosial dakwah.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan CSR, BNI Syariah menganut konsep tanggung jawab sosial Perusahaan dengan mengalihkan anggaran sosial menjadi anggaran zakat Perusahaan. Pengelolaan konversi dana CSR menjadi zakat Perusahaan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dengan keputusan itu, BNI Syariah melimpahkan Dana Zakat Perusahaan tahun 2015 kepada Yayasan Hasanah Titik untuk dikelola melalui program-program pemberdayaan tahun 2016. Dalam menjalankan program, Yayasan bersinergi dengan Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan yang membawahi CSR.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada periode tahun 2016, komposisi Direksi BNI Syariah mengalami perubahan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan PT Bank BNI Syariah yang diselenggarakan pada 25 Februari 2016, dengan rincian sebagai berikut :.

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 25 Februari 2016 :

Dinno Indiano - **Direktur Utama**
Imam Teguh Saptono - **Direktur Bisnis**
Junaidi Hisom - **Direktur Operasional**
Acep Riana Jayaprawira - **Direktur Risiko Dan Kepatuhan**

Komposisi Direksi periode 25 Februari – 31 Desember 2016 :

Imam Teguh Saptono - **Direktur Utama**
Junaidi Hisom - **Direktur Operasional**
Kukuh Rahardjo - **Direktur Bisnis Konsumer**
Tribuana Tunggadewi - **Direktur Risiko dan Kepatuhan**
Dhias Widhiyati - **SEVP Bisnis Komersial & Menengah**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Dinno Indiano dan Sdr. Acep Riana Jayaprawira atas dedikasi yang diberikan kepada BNI Syariah selama menjabat sebagai Direksi. Kepada Sdr. Kukuh Rahardjo, Sdri. Tribuana Tunggadewi dan Sdri. Dhias Widhiyati, kami ucapkan selamat bertugas, semoga semakin memperkuat jajaran Direksi BNI Syariah untuk menghadapi tantangan usaha ke depan.

Apresiasi

Akhir kata, atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan BNI Syariah atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan sehingga BNI Syariah dapat melalui tahun 2016 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup membanggakan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas kearifan, kepercayaan dan nasihat yang diberikan.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh nasabah, mitra bisnis, dan regulator di Indonesia, atas dukungan dan kontribusi sepanjang tahun 2016. Kami terus berkomitmen untuk maju mencapai pertumbuhan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi Perusahaan bersama-sama dengan para Pemangku Kepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa bersama kita, mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya serta melindungi kita semua dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama

Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan 2016 PT Bank BNI Syariah telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2017

DEWAN KOMISARIS

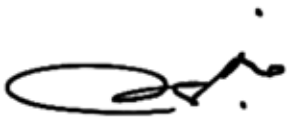

Fero Poerbonegoro
Komisaris Utama

Rizqullah Thohuri
Komisaris Independen

Max R. Niode
Komisaris*

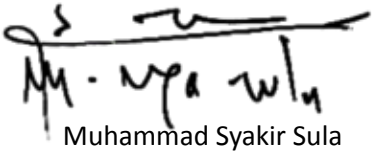

Muhammad Syakir Sula
Komisaris Independen*

(* Belum efektif)

Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan 2016 PT Bank BNI Syariah telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2017

DIREKSI

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama

Kukuh Rahardjo
Direktur Bisnis Konsumer

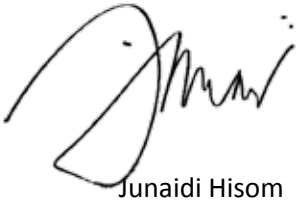

Junaidi Hisom
Direktur Operasional

03 PROFIL PERUSAHAAN

> BNI Syariah semakin memantapkan posisinya sebagai Hasanah Life Style Bank yang ditunjang dengan budaya Amanah dan Jamaah.

Data Perusahaan	60
Sekilas BNI Syariah	62
Jejak Langkah BNI Syariah	64
Bidang Usaha BNI Syariah	66
Segmen Usaha	67
Produk Dan Jasa	69
Visi dan Misi	74
Tata Nilai BNI Syariah	75
Struktur Organisasi	76
Struktur Dan Komposisi Pemegang Saham	94
Wilayah Operasional BNI Syariah	98

DATA PERUSAHAAN

DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	PT Bank BNI Syariah
Bidang Usaha	Usaha perbankan syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010.
Segmen Usaha Pembiayaan	▪ Bisnis Komersial ▪ Bisnis Konsumen & Ritel ▪ Bisnis Mikro ▪ Bisnis Tresuri dan Internasional
Tanggal Efektif Operasional	19 Juni 2010
Dasar Hukum Pendirian	Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor : AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010
Modal Dasar	Rp4.004.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp1.501.500.000.000
Kepemilikan	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk : 99,90% PT BNI LIFE INSURANCE : 0,10%
Jumlah Karyawan	4.450
Jaringan Kantor	326 *Outlet* DI SELURUH INDONESIA
Alamat Kantor Pusat	Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6 Jakarta 12950, Indonesia Telepon: +62 21 2970-1946 Faksimili: +62 21 2966-7947 E-mail: info@bnisyariah.co.id
Website	www.bnisyariah.co.id Berisikan antara lain : ▪ Profil Perusahaan ▪ Profil Dewan Pengawas Syariah, Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi ▪ Produk dan Layanan Perusahaan ▪ Struktur Pemegang Saham ▪ Laporan Keuangan 5 Tahun Terakhir ▪ Informasi Sukuk ▪ dll PT. Bank BNI Syariah @bnisyariah

SEKILAS BNI SYARIAH

PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI Induk) yang beroperasi sejak 29 April 2000.

Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan *spin off* pada 2009 dan selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan usaha yang sangat baik. Setiap tahun, pertumbuhan usaha BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2016, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp28,3 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar diantara pemain di industri perbankan syariah nasional.

Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (*equivalent rate*) sebesar 9,25% per tahun. Sukuk ini telah mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo.

BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik di setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.450 pegawai di mana proses pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008.

Hingga kini, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 1 kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 171 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 29 *Payment Point*. Selain itu, nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Induk (*Sharia Channelling Office*/SCO) yang tersebar di 1.490 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset.

JEJAK LANGKAH BNI SYARIAH

2000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Semarang, dan Banjarmasin.

2002

UUS BNI menghasilkan laba pertama sebesar Rp875 juta mencetak laba positif dengan dukungan tujuh kantor cabang.

2003
2004

UUS BNI secara berturut-turut mendapatkan penghargaan The Most Profitable Bank di antara dua Bank Umum Syariah (BUS) dan delapan UUS.

2009

Pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah.

2010

BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan aset Rp6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.

2011

BNI Syariah membukukan laba Rp66 miliar dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, serta lebih dari 1.000 *Syariah Channelling Outlet* BNI (SCO BNI) dengan total aset Rp8,5 triliun pada akhir Desember 2011.

2012

Outlet mikro mulai beroperasi dengan penambahan untuk *outlet regular* sejumlah 10 cabang. Selain itu BNI Syariah berhasil membukukan pencapaian aset Rp10 triliun pada 10 November 2012 dan memperoleh 16 penghargaan selama tahun 2012. Satu di antara penghargaan signifikan yang diterima oleh BNI Syariah adalah CASA terbaik 2012 di antara seluruh perbankan syariah.

2013

Peresmian kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di Gedung Tempo Pavillion 1 sebagai Kantor Pusat yang terpadu.

Juara 1 pada Annual Report Awards yang diselenggarakan OJK, dengan kategori "Private Keuangan Non Listed"

2014

BNI Syariah meluncurkan Corporate Campaign "HASANAH Titik" yang bertempat di Gedung Tempo Pavilion 1 Kav.11, Kuningan, Jakarta.

Juara 1 pada Annual Report Awards yang diselenggarakan OJK, dengan kategori "Private Keuangan Non Listed"

2015

Penerbitan Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 2015 sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun.

2016

BNI Syariah meluncurkan Wakaf Hasanah untuk mendukung identitas BNI Syariah menjadi Hasanah Lifestyle Bank.

Juara 1, *Sustainable Finance Awards* 2016 yang diselenggarakan OJK, dengan kategori Buku 1 dan 2

KEGIATAN USAHA

Populasi penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar merupakan potensi bagi industri perbankan syariah untuk terus berkembang.

Landasan Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir kali dilakukan perubahan pada 7 Januari 2016, yang tertuang dalam Akta No.4 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta. Pada pasal 3 disebutkan bahwa maksud dan tujuan BNI Syariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BNI Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik* atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *Ijarah*, musyarakah, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BNI Syariah dapat pula:

a. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah;
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Segmen Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, kegiatan usaha BNI Syariah terbagi menjadi beberapa segmen usaha sebagai berikut:

Bisnis Komersial

BNI Syariah mendukung kebutuhan dunia usaha segmen menengah atau komersial dengan memberikan solusi pembiayaan yang nyaman dan memadai. Fasilitas pembiayaan BNI Syariah meliputi pembiayaan investasi dan modal kerja, bank garansi dan *stand by letter of credit*, serta fasilitas pembiayaan lain yang diperlukan. Dengan persyaratan yang mudah dan cepat, berjalannya seluruh pembiayaan usaha produktif dilaksanakan dalam naungan akad syariah sehingga nilai, sifat dan jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, proses pengembalian dan bagi hasil akan berjalan dengan fleksibel dan seimbang sesuai dengan realisasi usaha.

Bisnis Konsumer dan Ritel

BNI Syariah menghadirkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan, baik produk simpanan maupun produk pembiayaan. Produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai

dari produk simpanan untuk anak, mahasiswa, pegawai sampai dengan simpanan untuk rencana menunaikan ibadah haji atau umrah. Selain produk simpanan, BNI Syariah juga menawarkan berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti produk kepemilikan rumah, kendaraan, perencanaan ibadah umrah bersama keluarga dan berbagai kebutuhan lainnya.

BNI Syariah juga memiliki produk BNI iB Hasanah *Card* yang ditujukan untuk menunjang gaya hidup syariah berupa kenyamanan bertransaksi dengan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai *merchant* pilihan bertanda Master Card dan Cirrus di seluruh dunia. Dengan tiga jenis kartu yaitu *Classic, Gold* dan *Platinum*, BNI iB Hasanah *Card* diterapkan berdasarkan sistem perhitungan yang bersifat tetap, adil, transparan dan tanpa bunga namun tetap kompetitif.

Bisnis Mikro

Segmen Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) telah terbukti mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. UKMK juga terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik di kancah persaingan dunia usaha nasional.

BNI Syariah ingin ikut berperan dalam memajukan UKMK di tanah air melalui berbagai produk pembiayaan mikro BNI Syariah. Pembiayaan mikro BNI Syariah adalah pembiayaan produktif dengan *range* plafon luas yang dapat mengatasi kebutuhan usaha mikro sesuai nilai pembiayaan yang diinginkan, jangka waktu yang memadai dan sesuai prinsip syariah.

Bisnis Tresuri & Internasional

BNI Syariah turut mengaktifkan Pasar Uang antar Bank Syariah (PuaS) dengan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) dan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan komoditi berdasarkan Prinsip Syariah antar bank (SIKA). Selain itu BNI Syariah juga aktif melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder.

Produk yang menjadi unggulan BNI Syariah dalam segmen ini adalah anjak Piutang, solusi bagi kebutuhan likuiditas nasabah korporat, Saat ini BNI Syariah terus mengembangkan terutama dalam hal pemenuhan *cash flow* nasabah dan demi mendukung kebutuhan dunia usaha berbasis syariah.

PRODUK DAN JASA

Inovasi untuk menghasilkan produk dengan fitur dan benefit yang dibutuhkan nasabah merupakan langkah yang mutlak harus dilakukan.

Produk Simpanan

Tabungan BNI iB Hasanah
Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.

Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa
Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP dan/ atau keperluan lainnya.

Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai/ Anggota)
Tabungan dengan akad *mudharabah* atau akad *wadiah* dari para pegawai/anggota Perusahaan/ Lembaga/ Assosiasi/ Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan BNI Syariah.

Tabungan BNI iB Hasanah (Classic)
Tabungan dengan akad *mudharabah* untuk menampung setoran *cash collateral/ goodwill* nasabah pada setiap penerbitan Hasanah *Card Classic*.

Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah
Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang dilengkapi dengan detil mutasi debet dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan.

Tabungan BNI Prima iB Hasanah
Tabungan dengan akad *mudharabah* dan/ *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah *segmen high networth individuals* secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dengan berbagai fasilitas dan keuntungan yang lainnya.

BNI Tabunganku iB Hasanah
Tabungan nasional dengan akad *wadiah* dan setoran awal ringan untuk menabung, sehingga menabung menjadi sesuatu habit/kebiasaan di masyarakat.

Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah
Tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah
Tabungan perencanaan haji maupun umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* dengan sistem setoran bebas atau bulanan. Bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIh) reguler maupun khusus dengan besar biaya ditentukan oleh Kementerian Agama. Produk ini dilengkapi dengan kartu Haji dan Umrah Indonesia yang berfungsi sebagai kartu transaksi belanja maupun penarikan tunai di tanah suci, sehingga mengurangi kebutuhan uang tunai yang harus dibawa. Produk ini memiliki produk turunan berupa Tabungan iB Baitullah Anak Hasanah yang memberikan manfaat tabungan perencanaan Haji maupun Umrah untuk anak berusia di bawah 17 tahun, Kartu HUI juga dapat terus digunakan ditanah air sebagai kartu debit dan kartu belanja pada *merchant-merchant* Master Card.

Tabungan BNI Tunas iB Hasanah
Tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

Tabungan BNI Simple iB Hasanah
Tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Tabungan BNI iB Dollar Hasanah
Tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

BNI Giro iB Hasanah
Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad *mudharabah* maupun akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan.

BNI Deposito iB Hasanah
Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan.

Produk Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah
Dengan prinsip *murabahah* (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah indent, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah
Pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli properti atau rumah tinggal dengan menggunakan konsep kongsi kepemilikan rumah antara Nasabah dan Bank yang secara bersama-sama menyerahkan modalnya untuk membeli properti tersebut dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* yang selanjutnya nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan Akad *Ijarah*.

Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah
Dengan prinsip *murabahah* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.

Pilihan produk yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan nasabah merupakan salah satu keunggulan BNI Syariah.

Pembiayaan BNI Rahn Emas iB Hasanah
Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas, baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.

Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif barang atau pemanfaatan jasa dengan agunan berupa *fix asset* sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah
Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu Perusahaa/instansi yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah untuk pembelian barang atau pemanfaatan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing iB Hasanah
Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

BNI Mikro 2 iB Hasanah
Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

BNI Rahn Mikro
Pembiayaan Rahn yang ditujukan untuk modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya.

BNI Mikro 3 iB Hasanah
Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperlua lainnya yang bersifat konsumtif.

BNI Griya Swakarya iB Hasanah
Adalah proses pembelian aset/objek terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi/ pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli/penyewa (*end-user*)

iB Hasanah Card
Merupakan kartu Pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya tetap ,adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

Produk Pembiayaan Komersial

Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah
Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah).

Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

Pembiayaan Koperasi Karyawan/ Koperasi Pegawai iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan *mudharabah* di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) kemudian disalurkan secara prinsip syariah kepada *end user*/karyawan.

Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.

Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah

Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan serta dokumen yang berlaku sama kepada seluruh peserta sindikasi dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

Pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah

Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah

Pembiayaan produktif yang diberikan kepada *developer* untuk membangun perumahan dan/atau fasilitas umum/sosial serta dilarang digunakan untuk pengadaan dan/atau pengolahan tanah secara langsung/tidak langsung sesuai dengan prinsip syariah.

Anjak Piutang iB Hasanah

Jasa pengalihan penyelesaian piutang baik L/C maupun non L/C dari korporat/*Seller* kepada BNI Syariah yang kemudian menagih piutang tersebut kepada *issuing bank* atau pihak yang berutang (mitra korporat/*buyer*). Dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada korporat (nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

Penjaminan iB Hasanah

Pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra korporat sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh bank kepada mitra korporat tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada korporat. Pada saat mitra korporat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada korporat, maka bank memberikan pembiayaan talangan kepada mitra korporat yang dibayarkan langsung kepada korporat sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan Kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau Travel Agen untuk modal kerja.

Jasa

Jasa Bisnis

- Garansi Bank
- Kliring
- Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKB-DK)
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- Surat Keterangan Bank (SKB)

Jasa Keuangan

- Penerimaan Setoran
- Transaksi *Online*
- Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG)
- *Payment Center*
- MPN G2 melalui ATM & Teller

Jasa Kelembagaan

- Pembayaran Biaya Pendidikan (SPP) *Online*
- *Cash Management* BNI Syariah
- *Payroll* Gaji

Jasa *e-Banking*

- ATM BNI/BNI Syariah
- *Mobile Banking*
- *Phone Banking*
- *Internet Banking*
- *SMS Banking*

Jasa Bisnis Internasional

- *Letter of Credit* (L/C) Impor Suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C Impor.
- *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Layanan Tresuri

- Transaksi *Forex Value Today* maupun *Spot*
- Transaksi *Banknotes*

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No.BNISy/DIR/403.

TATA NILAI BNI SYARIAH

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jama'ah.

Tata Nilai Amanah dan Jama'ah BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No.BNISy/DIR/403.

Amanah

- Jujur dan menepati janji
- Bertanggung jawab
- Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
- Melayani melebihi harapan

Jama'ah

- Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif
- Membangun sinergi secara profesional
- Membagi pengetahuan yang bermanfaat
- Memahami keterkaitan proses kerja
- Memperkuat kepemimpinan yang efektif

Hasanah

Merupakan Tata Nilai Perusahaan (*Corporate value*) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal.

Tata Nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai – nilai, baik pada setiap Produk, Jasa serta perilaku keseharian Insan hasanah. Sosok Insan hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar – pilar Amanah dan Jamaah.

STRUKTUR ORGANISASI

SK DIR NO.KP/047/DIR/R , Tgl.28 September 2016.

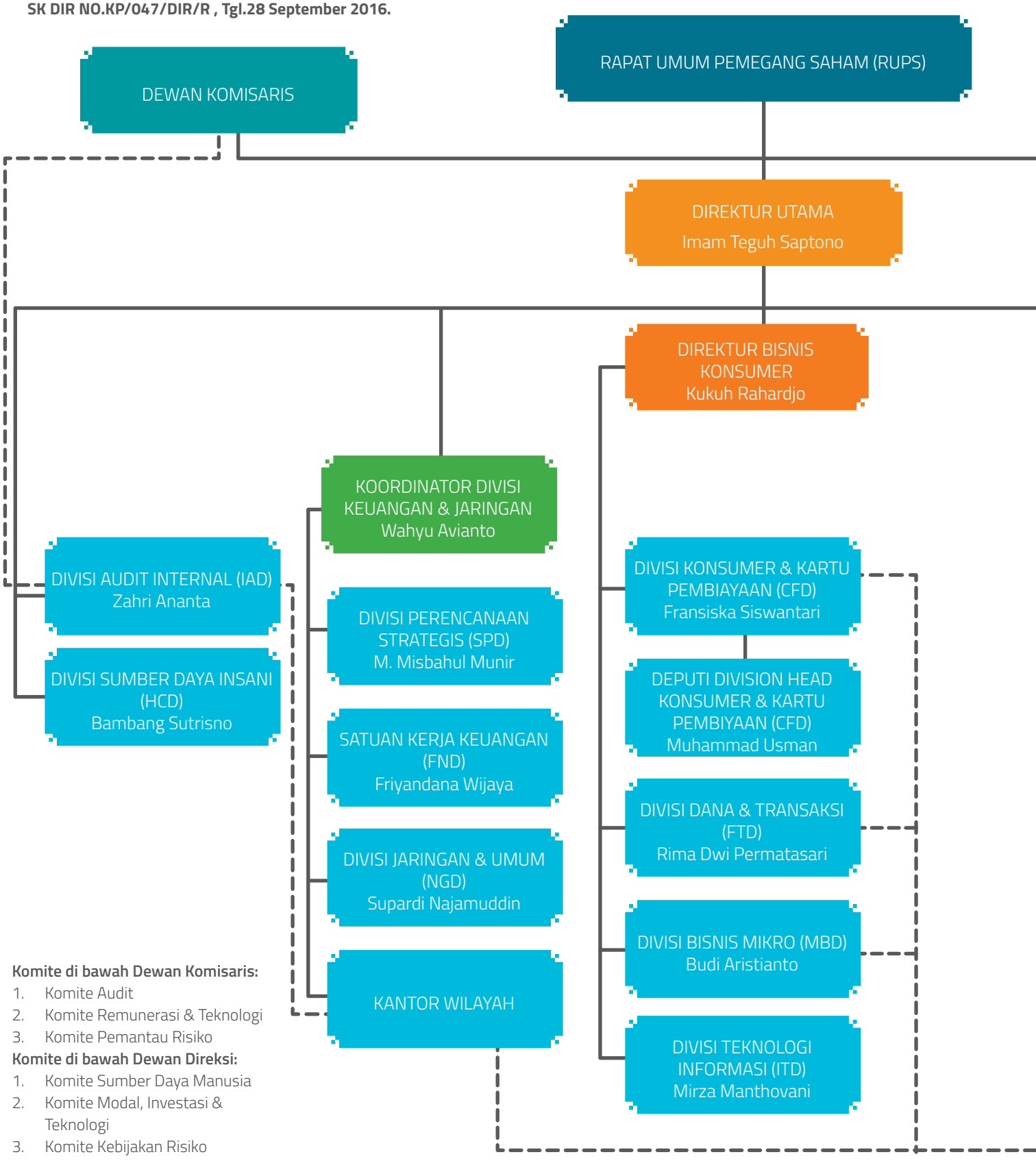

- **Komite di bawah Dewan Komisaris:**
  1. Komite Audit
  2. Komite Remunerasi & Teknologi
  3. Komite Pemantau Risiko
- **Komite di bawah Dewan Direksi:**
  1. Komite Sumber Daya Manusia
  2. Komite Modal, Investasi & Teknologi
  3. Komite Kebijakan Risiko
  4. Komite Asset, Liability Management

* (Non-Efektif)

STRUKTUR ORGANISASI

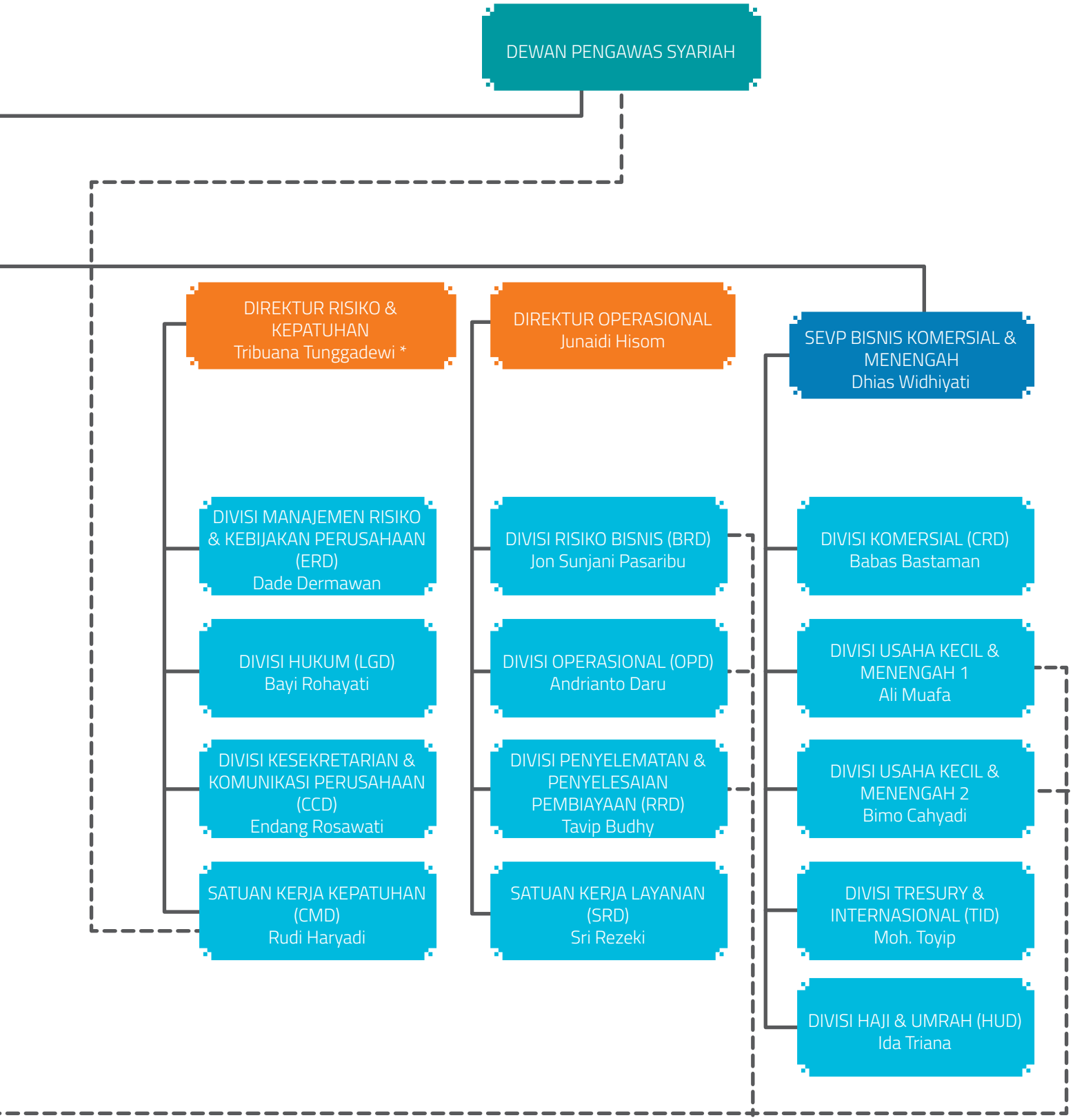

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KH Ma'ruf Amin
Ketua

Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, Banten, 11 Maret 1943, berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta tahun 1967. Sebelumnya beliau mengenyam pendidikan di beberapa pesantren ternama di Indonesia.

Beliau memulai karir sebagai pengajar sejak tahun 1966 dan pernah menjadi anggota BAZIS DKI Jakarta pada tahun 1971, Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta tahun 1971-1982, Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad tahun 1976, anggota Pleno Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1990, anggota MPR RI tahun 1997 – 2004, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tahun 2007 – 2014, anggota Komite Perbankan Syariah (KPS) tahun 2008, Wakil Ketua Umum MUI tahun 2010 – 2015, Ketua Bidang Fatwa MUI tahun 2010 – 2015.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Syekh Nawani Al-Bantani sekaligus sebagai Pengasuh Pesantren An-Nawawi sejak tahun 2001, Ketua Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sejak tahun 2014, Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) sejak tahun 2014, Ketua Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) sejak tahun 2015 dan Ketua Umum MUI sejak tahun 2015.

Beliau menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah sejak 19 Juni 2010 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No.160 tanggal 22 Maret 2010. Kemudian diangkat kembali melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 Agustus 2015

DR. Hassanudin M.Ag
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, Jawa Barat, 4 Maret 1961 berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Muda Fakultas Syariah dari Universitas Islam Tribhakti, Kediri tahun 1985, Sarjana Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1989, Magister Agama dalam studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah) dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1997, dan menyelesaikan program Doktor dalam studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah) dari universitas yang sama pada tahun 2008.

Memulai karir sebagai anggota Tim Ahli LP.POM – MUI tahun 2006, beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Akuntansi Syariah (KAS) – IAI tahun 2006, Dekan Fakultas Syariah IIQ, Jakarta tahun 1993 – 1997 dan 1999 – 2002.

Saat ini, beliau masih aktif sebagai tenaga pengajar bidang Hukum Islam di UIN dan IIQ dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH – DSN).

Beliau menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah sejak 19 Juni 2010 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No.160 tanggal 22 Maret 2010. Kemudian diangkat kembali melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 Agustus 2015

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2016 - 25 Februari 2016

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris periode 25 Februari 2016 - 31 Desember 2016

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Fero Poerbonegoro
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, 27 Agustus 1955, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya tahun 1981 dan Master di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995.

Beliau mengawali karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai staff di Divisi Internasional dan Divisi Tresuri (1981 – 1986). Dalam perjalan karirnya beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain Pemimpin Divisi Tresuri Bank BNI (1997 – 1998), Direktur Tresuri & Internasional Bank BCA (1998 – 2002), Project Manager New Core Banking System Bank BNI (2002 – 2003), Direktur Tresuri & Internasional (2003 – 2008) dan kemudian menjabat sebagai Komisaris Independen Bank BNI (2008 – 2015).

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama BNI Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015 sejak 25 Februari 2016 setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris BNI Syariah

Rizqullah Thohuri
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Serang, 16 Februari 1957, berdomisili di Tangerang, Banten. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 1982, gelar MBA di bidang Bisnis Internasional dari Baldwin Wallace College, Ohio, USA tahun 1986 dan gelar Doktor di bidang Ekonomi & Keuangan Islam dari Universitas Trisakti, Jakarta tahun 2013.

Karirnya dimulai sebagai Analis Kredit di Bank BNI Cabang Wonogiri tahun 1980. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis di grup Bank BNI, antara lain Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah Bank BNI (2002-2005), Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (2005-2007), Pemimpin Divisi Risiko Kredit Bank BNI (2007-2008), Pemimpin Proyek pendirian Bank BNI Syariah (2008-2010) dan Direktur Utama BNI Syariah (2010-2012). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Program S2 Ilmu Ekonomi & Keuangan Islam Universitas Trisakti, Jakarta (2013-2015).

Saat ini beliau masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Graha 165 (sejak Juni 2015) dan Komisaris Independen PT Asuransi Tripakarta (sejak Januari 2016). Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen BNI Syariah sejak 25 Februari 2016 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Max R. Niode
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Gorontalo, 3 Mei 1957, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1983 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1999.

Beliau mengawali karir sebagai Trainee ODP di Bank BNI tahun 1984. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain sebagai Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Non Ritel Bank BNI Kantor Wilayah Bandung (2003-2004), Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Bandung (2004), Pemimpin Divisi Hukum Bank BNI (2004-2011) dan Pemimpin Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit) Bank BNI (2011-2014). Beliau juga pernah ditugaskan sebagai Komisaris PT Swadharma Surya Finance (2000-2003), Komisaris Utama PT Swadharma Surya Finance (2003-2006) dan Komisaris PT Asuransi Tri Pakarta (2014-2015).

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BNI (sejak Nopember 2010). Beliau diangkat sebagai Komisaris BNI Syariah sejak 25 Februari 2016 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015.* (belum efektif)

Muhammad Syakir Sula
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Poso, 12 Pebruari 1964, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Sosial Ekonomi Pertanian tahun 1990.

Beliau memulai karir di PT Asuransi Keluarga sebagai Kepala Cabang Bandung tahun 1995 kemudian menjadi Manager Pemasaran di PT Asuransi Takaful Keluarga (1996-1997) hingga akhirnya menjadi Direktur di PT Asuransi Takaful Umum (2000-2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Advisor Direksi di PT Bank Muamalat Indonesia (2005-2006), Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008-2010), Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (2010-2015), Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Nasional Reasuransi (2013-2016).

Saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (sejak 2014), Komisaris Independen PT Jamkrindo Syariah (sejak 2014) dan Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Jiwa Central Asia Raya (sejak 2013). Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen BNI Syariah sejak 25 Februari 2016 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015. *(belum efektif)

PROFIL DIREKSI

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2016 - 25 Februari 2016

Komposisi Direksi periode 25 Februari 2016 - 31 Desember 2016

PROFIL DIREKSI

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 18 Nopember 1969, berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Konsentrasi Agribisnis tahun 1992, gelar Magister Management Agribusiness dari Institut Pertanian Bogor tahun 1994 dan gelar Doctor Management Business (DMB-Program – Institut Pertanian Bogor) tahun 2011.

Memulai karier sebagai Trainee for Management Instructor di PT Garuda Indonesia tahun 1992, beliau mulai bergabung dengan Bank BNI tahun 1996 pada Divisi Perencanaan Strategis (1996). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain Manager Investor Relation Division (1998-2003), menjabat sebagai Head of Investor Relations Bank Permata (2003-2005) dan Corporate Secretary Bank Permata (2007), Deputy Coordinator untuk non organic growth project Bank BNI (2007-2010), Risk & Compliance Director Bank BNI Syariah (2010-2012) dan Business Director BNI Syariah (2012-2016).

Beliau diangkat sebagai Direktur Utama BNI Syariah sejak 25 Februari 2016 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015.Efektif 11 Juli 2016.

Junaidi Hisom
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, lahir di Semangus, Sumatera Selatan, 1 Januari 1958, berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Sriwijaya tahun 1989 dan Magister Manajemen dari STIE IPWI, Jakarta tahun 1998.

Beliau Beliau memulai karirnya di Bank BNI tahun 1992 sebagai Koordinator Kredit Cabang Palembang, beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain Pemimpin Kantor Wilayah 9 Banjarmasin (2009-2010), Pemimpin Divisi *Human* Capital (2010-2012) dan Chief Operation and Financial Officer BNI Syariah (2012-2013).

Beliau diangkat sebagai Direktur Operasional BNI Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2012 dan efektif menjabat sejak 9 Desember 2013.

PROFIL DIREKSI

Kukuh Rahardjo
Direktur Bisnis Konsumer

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 24 Nopember 1968, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta jurusan Sosial Ekonomi tahun 1991.

Bergabung dengan BNI pada April 1992 pada program Credit Analyst Angkatan IV. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Assistance Vice President BNI Griya, Divisi Kredit Konsumen (2004-2005), Assistance Vice President Consumer Business Strategy, Divisi Kredit Konsumen (2005-2008), Senior Assistance Vice President, Head of Jakarta Consumer Loan Center (2008-2011), Head of Consumer and Retail, Kantor Wilayah 12 Jakarta (2011) dan Executive Vice President Bank BNI Syariah (2011-2016).

Beliau diangkat sebagai Direktur Bisnis Konsumer sejak sejak 25 Februari 2016 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015 dan efektif menjabat sejak 27 Oktober 2016

Tribuana Tunggadewi*
Direktur Risiko dan Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31 Juli 1967, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarja Hukum dari Universitas Indoensia, Jakarta tahun 1986, menyelesaikan pendidikan profesi Notaris dan PPAT dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1990 dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2000.

Bergabung dengan Bank BNI tahun 1994 pada Divisi Hukum. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Assistant Vice President (AVP)-Pemimpin Kelompok Hukum dan Pemantauan Good Corporate Governance (2005-2009), Vice President (VP) – Wakil Pemimpin Divisi – Bidang Good Corporate Governance dan Biro Direksi (2009-2011), Senior Vice President (SVP) - Corporate Secretary dan Pemimpin Divisi KMP (2011-2015) dan Senior Executive Vice President (SEVP) Risk & Compliance BNI Syariah (2015-2016).

Beliau diangkat sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan sejak 25 Februari 2016 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015.

* Non efektif

PROFIL SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)

Dhias Widhiyati

SEVP Bisnis dan Komersial Menengah

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang 15 Juli 1970, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, tahun 1992 dan gelar Magister Managemen di bidang Keuangan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2005.

Memulai karir di Bank BNI sejak tahun 1994 di Divisi Sumber Daya Manusia. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis antara lain sebagai Pemimpin Business Banking-Kantor Wilayah Bandung (2011), Pemimpin Wilayah-Kantor Wilayah Bandung (2011-2013), Pemimpin Wilayah-Kantor Wilayah Jakarta-BSD (2013-2014), DGM Commercial Remedial & Recovery (2014-2015) dan Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan (2015-2016) di PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

Beliau diangkat sebagai Senior Executive Vice President Bisnis dan Komersial Menengah dan ditugaskan di BNI Syariah sejak 7 Maret 2016 berdasarkan SK Direksi NO.KP/32/DIR/R, Tanggal 12 Maret 2016

PEJABAT SENIOR

Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan
Wahyu Avianto

Pemimpin Divisi Audit Internal
Zahri Ananta

Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani
Bambang Sutrisno

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
M. Misbahul Munir

Pemimpin Satuan Kerja Keuangan
Friyandana Wijaya

Pemimpin Divisi Jaringan & Umum
Supardi Najamuddin

Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan
Fransiska Siswantari

Pemimpin Divisi Dana & Transaksi
Rima Dwi Permatasari

Pemimpin Divisi Bisnis Mikro
Budi Aristianto

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Mirza Manthovani

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko & Kebijakan Perusahaan
Dade Dermawan

Pemimpin Divisi Hukum
Bayi Rohayati

Pemimpin Divisi Kesekretarian & Komunikasi Perusahaan
Endang Rosawati

Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan
Rudi Haryadi

Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
Jon Sunjani Pasaribu

Pemimpin Divisi Operasional
Andrianto Daru

Pemimpin Divisi Penyelematan & Penyelesaian Pembiayaan
Tavip Budhy

Pemimpin Satuan Kerja Layanan
Sri Rezeki

Pemimpin Divisi Komersial
Babas Bastaman

Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1
Bimo Cahyadi

Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2
Ali Muafa

Pemimpin Divisi Tresury & Internasional
Moh. Toyip

Pemimpin Divisi Haji & Umrah
Ida Triana

Pemimpin Kantor Wilayah 1
Muhammad Syarif

Pemimpin Kantor Wilayah 2
Adjat Djatnika Basarah

Pemimpin Kantor Wilayah 3
Edwin Fitrianto

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

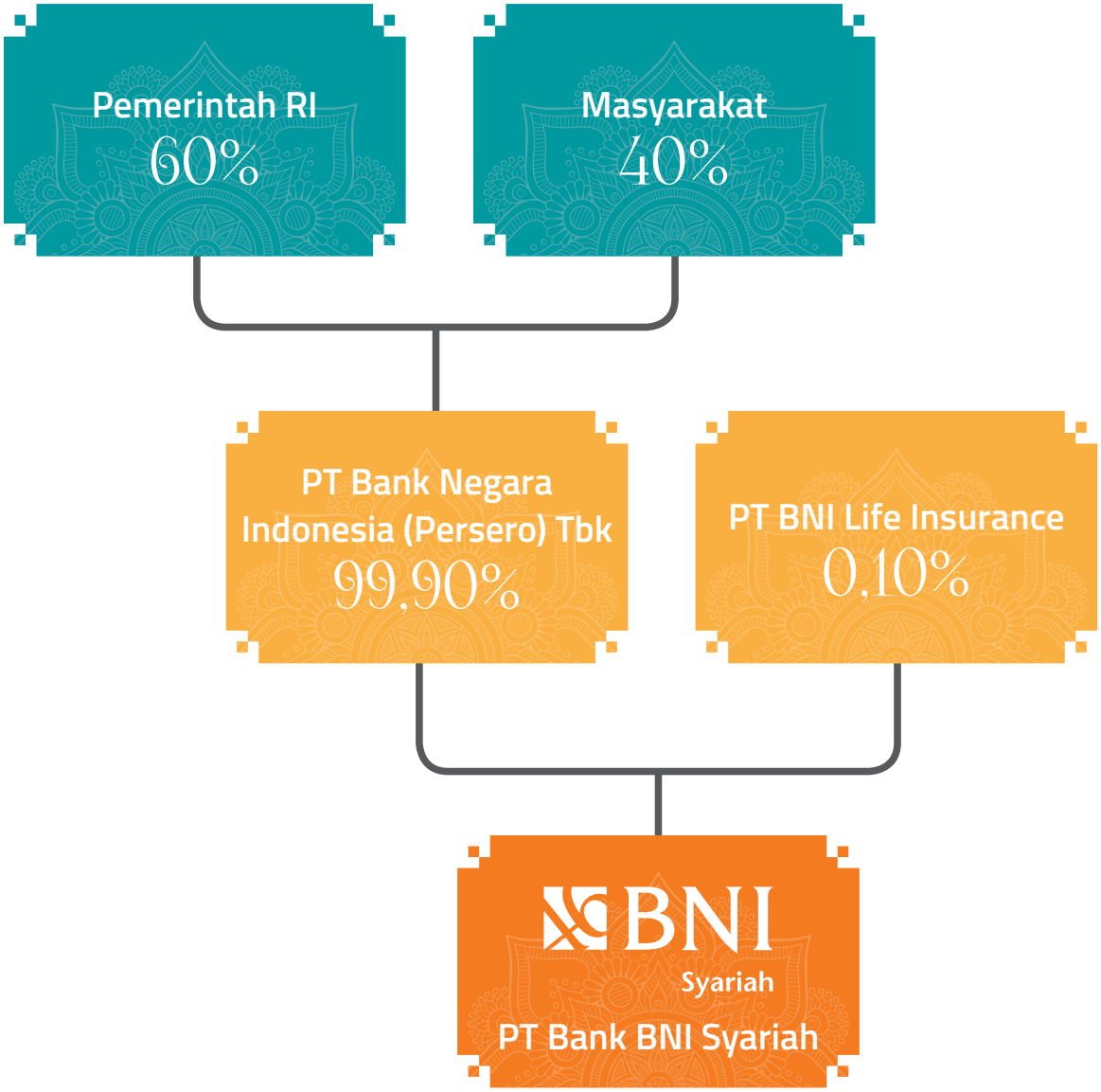

ENTITAS ANAK

Hingga 31 Desember 2016, BNI Syariah tidak memiliki entitas anak.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Hingga 31 Desember 2016, PT Bank BNI Syariah tidak memiliki anak perusahaan, sehingga tidak ada laporan terkait struktur grup perusahaan yang dapat dilaporkan pada laporan ini.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Hingga 31 Desember 2016, PT Bank BNI Syariah belum mencatatkan saham di Bursa manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan saham, *corporate action*, perubahan jumlah saham dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

KRONOLOGIS PENCATATAN SUKUK

Penerbitan Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 2015

Nama	Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 2015
Emisi	Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Tanggal Terbit	26 Mei 2015
Tanggal Jatuh Tempo	26 Mei 2018
Tingkat Bagi Hasil	9,25%
Nisbah Pemegang Sukuk	15,35% (lima belas koma tiga lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
Pencatatan	Kustodian Sentral Efek Indonesia
Peringkat	idAA+(sy) oleh PEFINDO
Penggunaan	Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah Rupiah

KRONOLOGIS PENCATATAN SUKUK

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 2015.

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Penawaran Umum		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah 1 Tahun 2015	15 Mei 2015	500.000.000.000	2.780.000.000	497.220.000.000
Jumlah		**500.000.000.000**	**2.780.000.000**	**497.220.000.000**

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Sisa Dana Hasil Penawaran
		Pembiayaan	Total	Realisasi Pembiayaan	Total	
Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah 1 Tahun 2015	15 Mei 2015	497.220.000.000	497.220.000.000	497.220.000.000	497.220.000.000	-
Jumlah		**497.220.000.000**	**497.220.000.000**	**497.220.000.000**	**497.220.000.000**	**-**

Rincian Biaya Penawaran Umum

Jenis Penawaran Umum	Kode Nama Efek	Tanggal Efektif	Rencana List				
			Hasil Realisasi Bersih	Uraian	Jumlah	Persentase	Action
Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah 1 Tahun 2015	BBSY	15 Mei 2015	497.220.000.000	Dana hasil Penawaran Umum digunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah mata uang Rupiah secara keseluruhan meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif dan pembiayaan mikro yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	497.220.000.000	100%	Dana sukuk seluruhnya telah habis digunakan untuk ekspansi pembiayaan Syariah BNI Syariah per Nov 2015

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Uraian	Jumlah (satuan mata uang)	Persentase	Action
Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah 1 Tahun 2015	15 Mei 2015	a. Biaya Jasa Penjaminan *(Underwriting fee)*	125.000.000	0,025%	-
		b. Biaya Jasa Penyelenggaraan *(Management fee)*	500.000.000	0,100%	
		c. Biaya Jasa Penjualan *(selling fee)*	125.000.000	0,025%	
		d. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal	370.000.000	0,074%	
		e. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal	201.500.000	0,040%	
		f. Biaya Jasa Konsultasi Keuangan *(financial advisory fee)*	515.000.000	0,103%	
		g. Biaya Lain-Lain	930.000.000	0,186%	

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Kantor Akuntan Publik

Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. HR. Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta 12940,
P.O. Box 2473 JKP 10001
Telepon: +6221 - 5212901
Faks: +6221 – 52905555, 52905050
www.pwc.com/id

Lembaga Pemeringkat Efek

PT Pefindo
Panin Tower Senayan City lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: +6221-7278-2380
Faks: +6221-7278-2370
Website: www.pefindo.com

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.
Graha Irama Lantai 6-C
Jl. HR. Rasuna Said Kav 1-2 Bl X-1 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta 12950
Telepon: (021) 52907304, (021) 52907305, (021) 52907306
Faks: (021) 5261136

WILAYAH OPERASIONAL BNI SYARIAH

KC Reguler	KCP Reguler	KC Mikro	KCP Mikro	Kantor Kas
49	101	19	70	17

Kantor fungsional	Payment Point	Mobil Layanan Gerak	ATM BNI
17	29	23	16.977

WILAYAH OPERASIONAL BNI SYARIAH

Dari tahun ke tahun, bisnis BNI Syariah terus mengalami perkembangan. Seiring berkembangnya bisnis syariah di Indonesia, wilayah operasional dan jaringan kantor BNI Syariah semakin bertambah luas agar nasabah dapat terlayani dengan baik dan prima. Hal tersebut membuat efektivitas pengendalian perlu dijaga karena kendala letak geografis, keterbatasan sumber daya serta luasnya cakupan bisnis.

Manajemen BNI Syariah memandang bahwa keberadaan kantor wilayah, yang menjalankan fungsi administrasi dan koordinasi beberapa kantor cabang di wilayah tertentu menjadi sangat penting sebagai kendali strategis dari semua unit kerja yang dibawahinya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tahun 2016 melalui SK Direksi No.KP/005/DIRBS/R tanggal 30 Desember 2015 ditetapkan Tim Project implementasi Kantor Wilayah BNI Syariah untuk menyusun ketentuan dan persiapan operasional wilayah. Dari hasil kajian tim tersebut, telah diputuskan pembagian Kantor Wilayah BNI Syariah yang membawahi *outlet* jaringan kantor Reguler dan Mikro menjadi 3 wilayah (*region*) sebagai berikut:

Rencana Kantor Wilayah BNI Syariah

No	Nama Kantor	Rencana Lokasi Kantor Wilayah
1	Kanwil Jabodetabek Plus	Jakarta
2	Kanwil Barat	Bandung
3	Kanwil Timur	Surabaya

Berdasarkan pembagian tersebut, pembagian cakupan provinsi dan cabang-cabang yang dibawahinya adalah:

Rencana Cakupan Wilayah Kantor Wilayah BNI Syariah

Nama Wilayah	Wilayah Jabodetabek Plus	Wilayah Barat	Wilayah Timur
Cakupan Provinsi	Lampung, Banten, Jabodetabek, Karawang	Sumatera (kecuali Lampung), Jawa Barat (kecuali Bogor, Depok, Bekasi, Karawang), Jawa Tengah, DI Yogyakarta	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua
Cabang yang Dibawahi	Tanjung Karang Mikro Teluk Betung Cilegon Tangerang Bumi Serpong Damai Bendungan Hilir Fatmawati Jakarta Timur Jakarta Utara Jakarta Barat Depok Bogor Mikro Bogor Bekasi Karawang	Banda Aceh Lhokseumawe Medan Pekanbaru Mikro Pekanbaru Batam Padang Bukittinggi Jambi Mikro Jambi Bengkulu Mikro Bengkulu Palembang Mikro Palembang Mikro Baturaja Mikro Lubuk Linggau Bandung Mikro Bandung Cirebon Tasikmalaya Sukabumi Semarang Kudus Pekalongan Solo Purwokerto Yogyakarta	Surabaya Surabaya Dharmawangsa Mikro Surabaya Malang Mikro Malang Kediri Jember Mikro Jember Denpasar Mataram Mikro Mataram Mikro Bima Balikpapan Samarinda Banjarmasin Banjarbaru Palangkaraya Pontianak Palu Makassar Mikro Makassar Mikro Palopo Mikro Pare-Pare Kendari Mikro Kendari Mikro Ternate

Maksud dan Tujuan Pembentukan Kantor Wilayah

Maksud dan tujuan pendirian Kantor Wilayah adalah :

1. Membantu fungsi koordinasi antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat dalam *planning process*, pemenuhan *resources* serta penyelarasan bisnis dan program pemasaran.
2. Peningkatan produktivitas bisnis melalui penguatan kerja sama bisnis dan koordinasi pemasaran di daerah sehingga menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya yang berdampak menurunkan BOPO dan menaikkan *Net Operating Margin* (NOM).
3. Penguatan aktivitas pengawasan operasional dengan mempertimbangkan jumlah *outlet* BNI Syariah sebanyak yang tersebar di seluruh Indonesia.
4. Penguatan sinergi dengan Kantor Wilayah BNI dan jaringan Kantor Cabang BNI yang menjadi *Sharia Chaneling Outlet* (SCO).

Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Tujuan pembentukan Kantor Wilayah dijalankan oleh fungsi-fungsi dalam struktur organisasi yang dibentuk sebagai berikut:

Fungsi	Struktur Organisasi yang Melaksanakan
Membantu fungsi koordinasi antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat dalam planning process, pemenuhan *resources* serta penyelarasan bisnis dan program pemasaran.	Regional Head (RH), Strategic & Support
Peningkatan produktivitas bisnis melalui penguatan kerja sama bisnis dan koordinasi pemasaran di daerah sehingga menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya yang berdampak menurunkan BOPO dan menaikkan *Net Operating Margin* (NOM).	SME BD, Consumer BD, Funding & transactional BD, Finance Risk, Recovery & remedial, Appraisal Center
Penguatan aktivitas pengawasan operasional dengan mempertimbangkan cakupan *outlet* BNI Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.	RH, Internal Control
Penguatan sinergi dengan Kantor Wilayah BNI dan jaringan Kantor Cabang BNI yang menjadi *Sharia Chaneling Outlet* (SCO).	RH, Funding & Transactional BD

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah

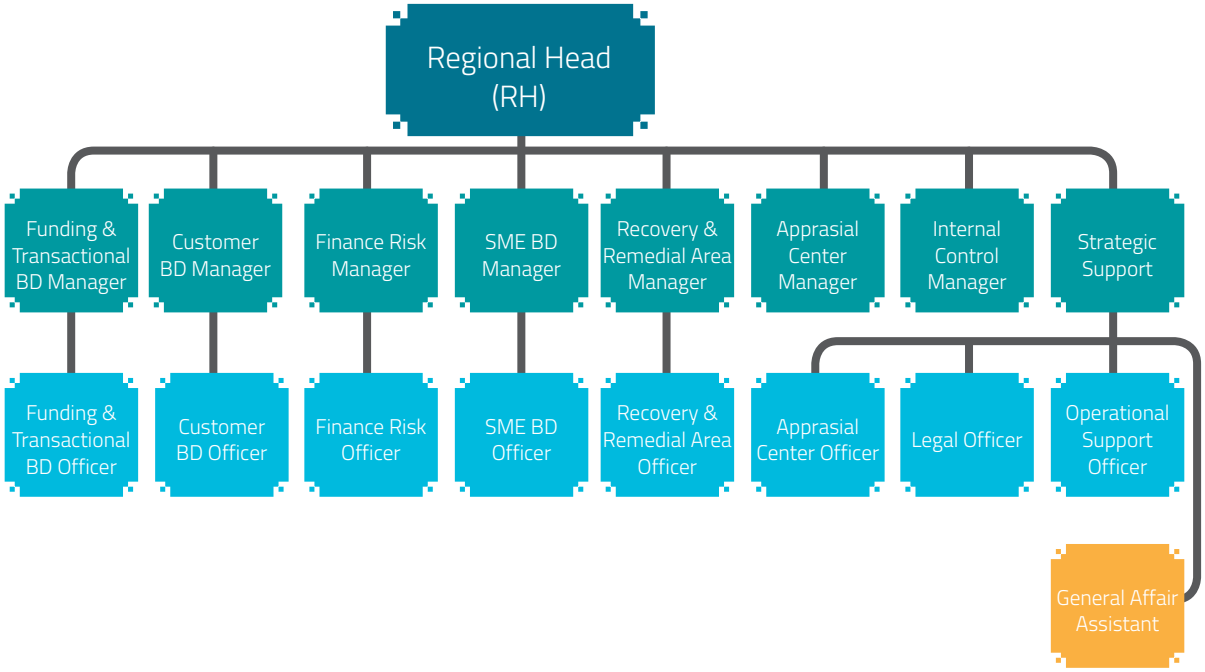

Progress Pembentukan Kantor Wilayah

Sampai dengan Desember 2016, dari 3 (tiga) Kantor Wilayah yang diajukan pendiriannya, 2 (dua) di antaranya telah mendapatkan perijinan dari regulator yaitu Kantor Wilayah Barat dan Kantor Wilayah Timur. Sedangkan perijinan Kantor Wilayah Jabodetabek Plus masih dalam proses di regulator.

Operasional Kantor Wilayah

Ketiga kantor wilayah secara resmi beroperasi penuh pada bulan Maret 2017 setelah diperolehnya perijinan regulator dan terpenuhi seluruh fungsi yang ada.

Profil Pemimpin Wilayah

Muhammad Syarif, SE

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 26 Desember 1967. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Taman Siswa Palembang tahun 1992. Beliau memulai karir di PT Bank BNI Syariah pada tahun 2011 sebagai Pemimpin Cabang Fatmawati dan terakhir ditugaskan sebagai menjadi Pemimpin Cabang Koordinator Wilayah Barat pada tahun 2016.

Adjat Djatnika Basarah, SE., MM.

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 12 April 1971. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Padjajaran tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen di bidang Investasi Sekolah Tinggi Manajemen IPMI tahun 2004. Beliau memulai karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1995 di Kantor Cabang Bekasi sebagai Asisten Pemasaran, dan ditugaskan sebagai pengelola pemasaran pada tahun 2000 dan penyelia penjualan tahun 2002. Kemudian berpindah ke Divisi Usaha Syariah pada tahun 2006 sebagai AMGR Perencanaan dan Analisis Pasar, Manager Perencanaan dan Analisis Pasar pada tahun 2008 dan ditugaskan menjadi Pemimpin Cabang Semarang pada tahun 2008, Pemimpin Cabang Bendungan Hilir pada tahun 2010, dan terakhir menjadi Pemimpin Wilayah Jabodetabek Plus pada tahun 2016.

Edwin Fitrianto, ST, MM

Warga negara Indonesia, lahir di Sragen, 28 Desember 1967. Meraih gelar Sarjana Teknik di bidang Elektro dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 1991 dan gelar Magister Manajemen di bidang Keuangan dan Perbankan Universitas Airlangga tahun 199. Beliau memulai karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1995 di Divisi Sumber Daya Manusia, dan ditugaskan sebagai pengelola pemasaran pada tahun 1996, kemudian menjabat Pemimpin Bidang Operasional Cabang Syariah Banjarmasin pada tahun 2000. Kemudian ditugaskan Pemimpin Cabang Syariah Yogyakarta pada tahun 2002, Pemimpin Cabang Syariah Jakarta Selatan tahun 2007, Kantor Cabang Syariah Surabaya tahun 2008 dan terakhir menjadi Pemimpin Cabang Koordinator Wilayah Timur pada tahun 2016.

04 FUNGSI PENUNJANG BISNIS

"Sebagai perwujudan budaya Jamaah, semua lini organisasi BNI Syariah bahu membahu bergerak untuk mendukung positioning BNI Syariah sebagai Hasanah Life Style Bank."

Teknologi Informasi	104
Pengembangan Operasional	110
Strategi, Keuangan Dan Jaringan	114

TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi (TI) semakin mengambil peran stategis di industri perbankan. TI menjadi instrumen yang sangat diandalkan industri perbankan khususnya dalam menjaga keamanan, kelancaran dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, BNI Syariah senantiasa memberikan perhatian yang besar dalam melakukan pengembangan di bidang TI mengingat hampir semua layanan perbankan saat ini sangat bergantung pada kemampuan TI.

Selain itu, BNI Syariah terus menerus melakukan pengembangan di bidang TI dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan perubahan teknologi di masa depan. BNI Syariah sangat menyadari bahwa salah satu aspek penting yang menunjang kemampuannya dalam melayani nasabah dengan handal dan efisien adalah sistem TI yang baik. Untuk itu, BNI Syariah melakukan banyak hal terkait pengembangan di bidang TI, termasuk di antaranya pengembangan aplikasi, produk dan layanan serta jaringan untuk mendukung operasional layanan perbankan yang aman, cepat dan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan setiap transaksi perbankan.

Divisi Teknologi & Informasi

Penanggungjawab pengelolaan TI di BNI Syariah adalah Divisi Teknologi & Informasi yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi dan berada di bawah supervisi Direktur Bisnis Konsumer.

Peranan Divisi Teknologi & Informasi sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan melalui pengembangan inovatif guna menghadapi persaingan bisnis antar perbankan syariah, memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah dan meningkatkan produk dan layanan operasional yang lebih kompetitif, lebih baik dan lebih cepat. Divisi Teknologi & Informasi merupakan divisi yang berada di bawah dukungan Direktur Bisnis Konsumer, mempunyai 8 (delapan) unit yang meliputi *Plan & Project Management, Core System & Management Information System, Transactional & Payment System, Quality Assurance, Hardware & Network, Office Automation, IT Services dan Production Support & Security.*

TI sebagai penggerak bisnis Perusahaan harus fleksibel dan dapat diandalkan sehingga dapat mengikuti perkembangan berbagai produk perbankan syariah serta mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan. BNI Syariah sebagai anak Perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui pengembangan produk dan jasa perbankan syariah agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Sebagai salah satu bank syariah terbaik di Indonesia, BNI Syariah berupaya untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi.

Komposisi Sumber Daya Manusia Divisi Teknologi Informasi selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Unit	Jumlah		Keterangan
		2016	2015	
1	*Plan & Project management (PPM)*	8	7	Terdapat penambahan 1 (satu) *personnel* baru
2	*Core System & Management Information System (CMS)*	9	9	Tetap
3	*Transactional & Payment System (TPS)*	8	10	Penamaan unit berubah dari *Non-Core System (NCS)* menjadi *Transactional & Payment System (TPS)* Terdapat 2 (dua) *personnel* yang berpindah ke unit OFA
4	*Quality Assurance (QAS)*	8	7	Terdapat penambahan 2 (dua) *personnel* unit QAS Terdapat 1 (satu) *personnel* yang berpindah ke unit PSS
5	*Hardware & Network (HNE)*	10	10	Tetap
6	*Office Automation (OFA)*	7	4	a. Penamaan unit berubah dari *Origination, Sales Monitoring & HR System (OSH)* menjadi *Office Automation (OFA)* b. Terdapat penambahan 2 (dua) *personnel* dari unit TPS c. Terdapat penambahan 1 (satu) personnel baru

No	Unit	Jumlah		Keterangan
		2016	2015	
7	*IT Services (ITS)*	10	10	Tetap
8	*Production Support & Security (PSS)*	3	-	Merupakan unit baru di tahun 2016

Profil Pimpinan Divisi Teknologi Informasi

Mirza Manthovani, SKom, MM.

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 30 Januari 1969. Meraih gelar Sarjana Komputer di bidang Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen di bidang Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2001. Beliau memulai karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1994 di Divisi Teknologi Informasi. Kemudian berpindah ke Divisi Usaha Syariah pada tahun 2006 sebagai IT Manajer, ditugaskan menjadi IT Manajer *core banking* dan MIS pada tahun 2010 di Bank BNI Syariah dan terakhir menjadi Pimpinan Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2014. Selain itu, ia juga menjabat sebagai komisaris di PT Sejahtera Bersama Sharia pada masa periode 2014 sampai dengan 2015.

Program Kerja Divisi Teknologi Informasi 2016

Fokus program kerja Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2016 merupakan kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan tahun sebelumnya, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan *sharing Core Banking System* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Induk dari BNI Syariah. Selain itu, sepanjang tahun 2016 Divisi TI menjalankan program yang secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. *Project* Pemenuhan Kepatuhan Bank Indonesia - OJK
2. *Project* Peningkatan Layanan
3. *Project* Peningkatan Operasional

Project Pemenuhan Kepatuhan Bank Indonesia - OJK

- Pengembangan Kartu *Debit Chip*
  Kendati Bank Indonesia sudah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.17/52/DKSP pada 30 Desember 2015 untuk menggantikan aturan yang sudah diterbitkan sebelumnya, yang menunda batas waktu kewajiban penggunaan *chip* pada kartu debit hingga akhir tahun 2019, namun BNI Syariah ingin segera dapat memenuhi aturan tersebut. Proses pengembangan kartu *Debit chip* di BNI Syariah telah dijalankan sejak tahun 2015. Tahun 2016, pengembangan terus dilakukan dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2017.
- BNI Syariah juga menerbitkan produk Simpanan Pelajar (SimPel) sebagai implementasi dari program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *Generic* Model Tabungan Siswa.

Project Peningkatan Layanan

- Pengembangan Jaringan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah
  Divisi Teknologi Informasi memberikan dukungan dalam pembukaan 3 Kantor Wilayah, dan 5 *Payment Point*. Selain itu, Divisi Teknologi Informasi juga memberikan dukungan dalam relokasi 2 Kantor Cabang dan 4 Kantor Cabang Pembantu.
- Peremajaan perangkat seluruh BLG (BNI Layanan Gerak) sebanyak 22 unit juga telah dilakukan sepanjang tahun 2016, hal ini juga akan terus dilakukan pada tahun berikutnya.
- *Maintenance* Kantor Cabang Pembantu yang meliputi pembaruan antivirus, pemeliharaan infrastruktur dan jaringan serta perangkat *hardware*, PC dan server untuk seluruh wilayah Jabodetabek juga telah selesai dilakukan pada tahun 2016, sedangkan untuk wilayah di luar Jabodetabek akan dilakukan *maintenance* pada tahun 2017.
- *Studen Payment*
  Pengembangan *Sharia Link (Sharlink)* masih terus ditingkatkan sebagai *middleware system* untuk kebutuhan transaksional BNI Syariah terkait dengan kerja sama pihak ketiga guna peningkatan *fee based income* dan digunakan untuk mendukung layanan transaksional seperti layanan *Student Payment Center* (SPC) dan *virtual Account*. Untuk layanan *Student Payment Center*, *Sharlink* mendukung penyediaan SPC *host-to-host* untuk otomasi layanan pendaftaran maupun pembayaran uang kuliah. Beberapa instansi yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah diantaranya adalah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Indonesia Timur Makassar dan Universitas NU Surabaya. Saat ini, *Sharia Link* juga telah diintegrasikan melalui *channel* ATM BNI untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah BNI Syariah.
- BNI Syariah telah mendapat izin dari Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan Layanan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk dirilisasikan pada awal tahun 2017, nasabah pertama BNI Syariah yang akan menggunakan sistem aplikasi SPAN ini adalah Mahkamah Agung (MA).

Project Peningkatan Operasional

- Pengembangan *Electronic Financing Origination* (EFO) secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan otomasi pemrosesan pembiayaan serta pengembangan otomasi pelaporan baik internal maupun eksternal untuk mendukung kinerja bisnis Perusahaan.

- Hasanah *Payment*
  Divisi Teknologi Informasi juga mengembangkan IT Hasanah *Payment* yang merupakan produk PPOB dengan tujuan memenuhi kebutuhan transaksional *retail* rumah tangga antara lain: pembayaran rekening (PLN, TELKOM, PDAM, dan pembayaran lainnya); pembelian (token, pulsa elektrik, pembayaran lainnya) dan *Multifinances* (BPJS, Asuransi).

- Kartu Derivatif
  Sepanjang tahun 2016 BNI Syariah juga telah menjalin kerja sama dengan instansi dan universitas mengenai pelayanan jasa perbankan, khususnya penerbitan dan pengelolaan kartu derivatif, diantaranya adalah RS Muhammadiyah Lamongan, PT GS Battery, dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Kartu Anggota PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Untuk mewujudkan pengembangan aplikasi tersebut diatas, maka diperlukan pengembangan struktur organisasi serta penambahan jumlah

personnel di Divisi Teknologi Informasi dalam upaya meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan menjamin kelangsungan pertumbuhan bisnis BNI Syariah dalam aspek ketersediaan dan kehandalan sistem teknologi informasi. Pelatihan-pelatihan personil Divisi Teknologi Informasi juga selalu dilakukan guna mempersiapkan keahlian sumber daya manusia. Sinergi *co-working* yang dilakukan bersama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BNI Induk dan BNI Syariah terbukti dapat meningkatkan dukungan dan kapabilitas sistem teknologi informasi.

Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi

Seperti banyak diketahui bahwa pengertian sistem informasi manajemen adalah suatu sumber daya atau seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam menyediakan informasi atau data yang bermanfaat untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan Teknologi Informasi adalah sumber daya informasi yang berupa seperangkat komputer (*hardware* dan *software*) dengan segala fasilitasnya sehingga mampu menyajikan data atau informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Sehingga mendukung tujuan strategis bisnis bank maka BNI Syariah selalu melakukan pengembangan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi agar dapat memecahkan suatu permasalahan secara cepat dan akurat terkait dengan proses pengambilan keputusan baik untuk Direksi maupun Manajemen.

BNI Syariah telah melakukan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) dengan menggunakan metode *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Implementasi ini mengharuskan BNI Syariah untuk melakukan perubahan metode pelaporan yang semula berbasis *format text file* menjadi berbasis formal XML dengan menggunakan metode XBRL. Selain itu, Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan unit bisnis selalu berupaya untuk melakukan penambahan dan optimalisasi fitur-fitur pelaporan internal pada aplikasi *Business Intelligence System* (BIS), dan aplikasi *Report Delivery Channel* (RDC) guna mendukung penyediaan data baik untuk pihak internal divisi maupun pihak eksternal BNI Syariah.

Selain itu, BNI Syariah juga telah mengembangkan aplikasi *Dashboard* untuk kebutuhan Pemimpin Cabang untuk memantau dan memonitor kondisi secara harian maupun bulanan. BNI Syariah juga telah mengembangkan proses rekonsiliasi transaksi untuk pencocokan transaksi yang terjadi kepada beberapa pihak ketiga yang memiliki perjanjian kerja sama yaitu Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Pegadaian, dan berbagai instansi yang terkait dengan pembayaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk mengelola sistem informasi yang berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran Strategis TI BNI Syariah tahun 2017

Pada tahun 2017, pengembangan TI BNI Syariah untuk mendukung *Corporate Plan* bisnis BNI Syariah "pertumbuhan berkelanjutan" masih menggunakan sistem bersama *(IT sharing)* dan fokus pada kapabilitas teknologi informasi, hal ini sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, meliputi mempertahankan *service level* BNI Syariah kepada nasabah dengan pemanfaatan bersama (*sharing*) Data *Center, Disaster Recovery Center, core banking system dan selective surrounding system* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; membangun pondasi teknologi yang andal dengan mempersiapkan keahlian sumber daya manusia teknologi informasi dengan cara *co-working* dengan bank induk untuk sistem yang digunakan secara bersama *(sharing);* mengembangkan sistem aplikasi independen secara selektif dalam rangka memberikan dukungan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh unit bisnis dengan lebih baik dan lebih cepat; membangun *Management Information System* untuk mempersiapkan *Business Intelligence* untuk memenuhi kebutuhan sistem pelaporan informasi yang cepat dan akurat yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan dan mengamankan aset teknologi informasi untuk menjamin kesinambungan operasional Perusahaan.

BNI Syariah akan melakukan penyelesaian Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan,

pengembangan aplikasi *Trade Finance* untuk mendukung pengembangan bisnis *Trade Finance*, pengembangan fitur-fitur produk pembiayaan, serta pengembangan sistem pembayaran dan pengelolaan tagihan (GPS/ *General Payment System*) sebagai sistem pembayaran tagihan melalui *channel Teller* dan ATM Bersama, pembangunan data *center* mandiri milik BNI Syariah dengan memanfaatkan sinergi dari Perusahaan induk sebagai rilisasi dari Peraturan BI.

Aplikasi *Mobile Banking* dan *SMS Banking* juga akan dikembangkan dalam rangka memenuhi aspek inovasi, kemudahan transaksi dan kerja sama dengan pihak ketiga dengan *time to market* yang lebih cepat, dan juga menambah *fee based income*. Pengembangan *Hasanah Lifestyle* sebagai ekosistem *market place* semua produk dan *marketing tools* BNI Syariah. BNI Syariah telah mendapatkan izin Bank Indonesia (BI) untuk bergabung dalam ATM Bersama dengan kode 427 dan akan dirilisasikan pada tahun mendatang. AML atau Anti *Money Laundering* adalah aplikasi yang diwajibkan oleh Regulator sebagai *tools* untuk anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme. BNI Syariah bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan meluncurkan produk kartu ATM *Debit chip* untuk setiap tabungan yang dimiliki.

Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*)

Kebijakan teknologi disusun dan diimplementasikan untuk menghasilkan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) yang efektif dalam penggunaan TI sehingga dapat mendukung strategi dan tujuan bisnis Bank BNI Syariah. Tata Kelola TI yang efektif dapat merubah tantangan menjadi peluang sekaligus meningkatkan kemampuan BNI Syariah dalam mengelola risiko. Kompleksitas kegiatan usaha BNI Syariah semakin meningkat sejalan dengan perkembangan TI, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, yang memberikan dampak sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh BNI Syariah sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha BNI Syariah.

Direksi dan Manajemen Eksekutif memahami benar bahwa penggunaan teknologi baru dan perubahan dalam TI dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan. Konektivitas dengan sistem eksternal, ketergantungan kepada pihak ketiga, pengembangan *internet banking*, atau penerapan sistem pembayaran yang baru adalah contoh yang dapat menimbulkan atau meningkatkan risiko operasional terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan informasi. Perubahan dalam penggunaan teknologi tidak hanya menimbulkan risiko reputasi, dengan demikian manajemen TI merupakan komponen penting dalam Tata Kelola TI dan manajemen risiko operasional di BNI Syariah.

Dengan adanya risiko yang dihadapi tersebut, maka BNI Syariah menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan penetapan Kebijakan Penggunaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi. Hal ini tentunya mengacu pada ketentuan OJK terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi. Ketentuan dan Ketetapan kebijakan prosedur TI di BNI Syariah meliputi kebijakan umum manajemen TI, kebijakan pengembangan dan pengadaan sistem, kebijakan pengelolaan operasional TI, kebijakan jaringan komunikasi, kebijakan pengamanan informasi, kebijakan *business continuity plan*, kebijakan pengelolaan *End User Computing (EUC)*, kebijakan *E-Banking* dan kebijakan penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi.

Tata Kelola TI adalah usaha mensinergikan peran TI dan *Corporate Governance* dalam mencapai sasaran dan tujuan BNI Syariah yang merupakan tanggung jawab Direksi dan Manajemen Eksekutif. Tata Kelola TI adalah suatu bagian utuh dari tata kelola Perusahaan yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan proses-proses yang menjamin keberlanjutan teknologi informasi BNI Syariah, mengembangkan serta memperluas strategi dan tujuan BNI Syariah. Dukungan Tata Kelola TI terhadap penciptaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat dilakukan melalui penerapan prinsip dan cara kerja yang baik pada berbagai bidang yang berhubungan dengan layanan TI; sistem pengelolaan aset; berbagai aspek sistem pelayanan dan kegiatan operasional bisnis BNI Syariah; dan untuk membangun sistem pengukur pencapaian kinerja dan efisiensi Perusahaan pada aspek kritis tertentu.

Pelaksanaan Tata Kelola TI yang Baik diselaraskan dengan Rencana Strategis TI atau *Information Technology Strategic Plan* (ITSP) dengan strategi bisnis yang ada dalam *Corporate Plan* dengan 5 (lima) fokus utama yaitu IT *Strategic Alignment, Value Delivery, Risk Management, Resource Management* dan *Performance Measurement*. Dalam penerapan Tata Kelola TI yang baik diperlukan prosedur operasi standar (*standar operating procedure*) sebagai acuan agar penggunaan dan pengelolaan TI selaras dengan visi, misi dan tujuan BNI Syariah yang meliputi kebijakan-kebijakan TI (*IT Policies*), prosedur TI (IT *Procedures*), petunjuk teknis, dan catatan/rekaman.

Proses Tata Kelola TI dilaksanakan melalui hubungan kerja yang saling terkait antara satuan kerja dalam organisasi manajemen TI yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pengarah TI, Satuan Kerja Penyelenggara TI, Satuan Kerja Pengguna TI dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

PENGEMBANGAN OPERASIONAL

Kegiatan pengembangan operasional di BNI Syariah berada di bawah Division Operational (OPD) yang dipimpin oleh Andrianto Daru yang berada di bawah supervisi Direktur Operasional. Divisi Operasional bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas Operasional dari seluruh Unit.
2. Mengelola administrasi pembiayaan sesuai tanggung jawabnya.
3. Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan pembayaran terkait bisnis *E-Banking* dan transaksional.
4. Mengerahkan dan mengendalikan proses pencairan.

Profil Pemimpin Divisi Operasional Andrianto Daru Kurniawan, Skom,MM.

Warga negara Indonesia, lahir di Surakarta, 31 Maret 1970. Meraih gelar Sarjana Ilmu Komputer di Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta tahun 1994 dan gelar Megister Manajemen di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2000. Beliau memulai karir di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1995 di Divisi Tresuri. Pada tahun 2010 saat BNI Syariah sudah menjadi Bank Umum Syariah, beliau menjabat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia dan pernah sebagai Pgs.Pemimpin Divisi *Enterprise Risk Management* tahun 2011 serta Pemimpin Divisi Operasional tahun 2012 - 2016, dan per Januari 2017 menjabat sebagai Pemipin Divisi Tresuri dan Internasional.

Program Kerja Divisi Operasional 2016

Pada tahun 2016, aktivitas operasional dalam upaya mengelola risiko operasional sehingga menunjang kinerja bisnis meliputi :

a. Aktivitas operasional terkait pembiayaan meliputi proses taksasi, analisis yuridis, aspek pembiayaan, pemantauan syarat pencairan pembiayaan serta booking, administrasi dan dokumentasi pembiayaan.
b. Aktivitas *E-Banking* dan transaksional *Banking* termasuk penanganan *fraud* terkait transaksi elektronik.
c. Aktivitas penunjang operasional meliputi pengelolaan Kas, sistem pembayaran data *governance* serta penunjang aktivitas transaksi.
d. Evaluasi dan pengembangan sistem dan prosedur operasional.
e. Pengelolaan rekanan penunjang bisnis seperti Lembaga Penjaminan, Asuransi, dan Notaris.

Implementasi Rencana dan Strategi Operasional

Tujuan strategis dari Operational Division tahun 2016 dituangkan dalam Rencana Implementasi dan Strategi Operasional, yang pelaksanaannya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan *System*

   Pengembangan *system* yang terkait pembayaran antar Bank yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi 2 dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) Generasi 2 yang sudah berlaku sejak tahun 2015.

   Selain pembayaran terdapat juga pengembangan sistem Penerimaan Negara atau yang dikenal dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi 2 bahkan di akhir tahun 2016 pengembangan layanan untuk penerimaan biaya pembuatan *passport* dan penerimaan Negara terkait *Tax Amnesty*.

   Selain itu juga di akhir Tahun 2016 sudah dibuat Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang akan beroperasi awal tahun 2017.

   Pengembangan sistem lain dalam mendukung unit Bisnis selama tahun 2016 yaitu :

   a. *Tap Cash*
   b. *Auto Debet* Asuransi
   c. Pengembangan *Payment Point Online Bank* (PPOB) *Hasanah Payment*

2. Penambahan rekanan penunjang bisnis dan penyesuaian fitur Asuransi pembiayaan dan penjaminan terkait perkembangan bisnis, diantaranya penyesuaian fitur Asuransi untuk meng-*cover* Produk Pembiayaan BNI Syariah, antara lain :
   a. Asuransi Jiwa Pembiayaan *Joint income*
   b. Asuransi Jiwa Pembiayaan Restrukturisasi
   c. Asuransi Jiwa Pembiayaan Angsuran *fleksible*
   d. Penyesuaian Asuransi Jiwa Pembiayaan untuk jangka waktu 20 tahun
   e. Kafalah Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah

3. Penyempurnaan Implementasi Sistem Pemantauan Dokumen Pembiayaan dengan Sistem EFO –SDN (*Electronic Financing Origination*-Sistem Dokumentasi Nasabah). Merupakan sistem berbasis *workAlur* untuk melakukan proses pencatatan/registrasi dokumen jaminan, asuransi dan Bank Garansi sehingga bisa tercapai keakuratan antara data sistem aplikasi dan fisik dokumen pembiayaan.

   Progres Penyempurnaan aplikasi EFO SDN sebagai berikut :

Periode	Target	Riliasi per Nov 2016
Thn 2014-2016	100 %	93 %

Pencapaian Divisi Operasional 2016

Berlandaskan pada program kerja yang telah disusun dengan baik, pada tahun 2016 kinerja Divisi Operasional menunjukkan hasil yang sangat baik. Pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Perkembangan transaksi *E-Banking*
   a. Modul Penerimaan Negara (MPN)
      BNI Syariah baru kali pertama sebagai penerima setoran penerimaan Negara dengan aplikasi MPN Generasi 2 pada bulan Februari 2016, berbeda dengan Bank - Bank BUMN lain yang sudah jauh sebelumnya sebagai bank penerima MPN sejak aplikasi MPN Generasi 1.

      Maka dari itu pertumbuhan BNI Syariah untuk penerimaan Negara mengalami kenaikan jumlah transaksi yang cukup tinggi yaitu 344% dibanding tahun lalu, dengan kenaikan pada nominal transaksi dari tahun lalu sebesar 85.2% atau Rp221.517.008.043.

Periode	Nominal Transaksi	Jumlah Transaksi
Tahun 2015	259.940.396.540	9211
Tahun 2016 (data s/d Oktober 2016)	481.457.404.583	40.896

   b. *Auto Debet* Premi Asuransi
      Layanan *auto debet* Premi asuransi merupakan transaksi pemindahan dana secara otomatis dari rekening pemegang polis /peserta asuransi kepada rekening penerima, dalam hal ini pihak Asuransi yang sudah membuka rekening giro di BNI Syariah. Transaksi ini mulai dijalankan sejak bulan Oktober 2016.

   c. Kartu *Tapcash* Syariah
      Kartu *Tapcash* baru diluncurkan pada bulan September 2016, permintaan *Tapcash* dari masyarakat cukup tinggi tercermin dari peningkatan yang cukup besar sejak awal peluncuran seperti data dibawah ini :

Periode	Jumlah Unit
September 2016	3
Oktober 2016	375
November 2016	1370

2. Perkembangan Transaksi RTGS dan SKNBI
   a. Perkembangan Transaksi RTGS tahun 2016
      Transaksi antar Bank dengan RTGS membantu masyarakat dalam transfer secara tepat dan cepat. Dengan penerapan RTGS Gen 2 memberikan peningkatan layanan, yang semula transfer dana antar satu rekening ke satu rekening di Bank lain, maka tambahan layanan RTGS Gen 2 yaitu transfer dana antar satu rekening ke beberapa rekening di Bank lain.

      Selama tahun 2016 tren peningkatan transaksi melalui RTGS Gen 2 cukup stabil, dengan rata-rata transaksi per bulan sebanyak 750 slips.

Bulan	Jumlah slip
Januari	329
Februari	313
Maret	339
April	331
Mei	431
Juni	479
Juli	647

Bulan	Jumlah slip
Agustus	1234
September	1257
Oktober	1390
November	1498
Total	**8248**
Rata-rata	750

b. Perkembangan Transaksi SKNBI

Rekapitulasi Transaksi Sknbi Pt Bank Bni Syariah2015 dan Bulan Januari - November 2016								
Tahun	Kliring Kredit				Kliring Penyerahan			
	Kredit Keluar		Kredit Masuk		Penyerahan Keluar		Penyerahan Masuk	
	DKE	Jumlah	DKE	Jumlah	DKE	Jumlah	DKE	Jumlah
2015	34.413	1.147.995.831.146	148.698	1.964.040.462	10.113	537.711.661.782	39.624	901.051.783.642
2016	61.282	2.600.150.536.652	253.775	3.634.997.098.282	9.992	914.034.340.510	39.194	925.360.914.664

Berdasarkan perkembangan jumlah transaksi kliring tahun 2015 dengan tahun 2016, terjadi peningkatan transaksi kliring kredit keluar sebesar 78%, dan peningkatan traksaksi kliring kredit masuk sebesar 41%.

Rencana Strategis 2017

Dalam rangka mendukung rencana bisnis BNI Syariah tahun 2017, Divisi Operasional telah menyusun program kerja dan rencana strategis tahun 2017, antara lain :

1. Pembentukan Sentra Pencairan Pembiayaan
   Pada tahun 2017, akan dibentuk Sentra Pencairan Pembiayaan yang bertujuan :
   - Menjaga kualitas pembiayaan.
   - Meningkatkan SLA Pencairan pembiayaan.
   - Efisiensi biaya Sumber Daya Insani.
   - Menertibkan administrasi pembiayaan
   - Standarisasi proses serta minimalisasi proses *defect*.
   - Pelaksanaan Sistem Penggajian melalui Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
2. Diharapkan dengan ikut serta BNI Syariah dalam SPAN dapat menangkap peluang untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan dari instansi Pemerintah.
3. Kerja sama *Auto Debet* pembayaran premi asuransi Lain
   Dalam meningkatkan jumlah rekening dan DPK, dibuat kerja sama dengan pihak Asuransi berupa pendebetan rekening nasabah secara *auto debet* Hal ini memberikan kemudahan baik bagi nasabah maupun pihak Asuransi dalam pembayaran premi asuransi nasabah. Kerja sama sudah terjalin adalah dengan BNI Life dan berikutnya Asuransi Prudential.
4. Membuat kebijakan terkait kegiatan operasional.
   Pengembangan kebijakan dan sistem operasional BNI Syariah dan penyusunan konsep kebijakan untuk ketentuan Operasional yang baru. Sehingga diharapkan adanya standarisasi proses operasional
5. *Debit chip*
   Migrasi kartu ATM dari magnetic menjadi *Debit chip* mengalami penundaan dikarenakan infra struktur pada Bank lain belum bisa digunakan, artinya kartu *chip* yang akan diterbitkan belum disupport oleh ATM/EDC pada bank lain. Penundaan sampai tahun 2017, masih masuk dalam peraturan dari SE BI No SEBI 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 bahwa implementasi kartu *chip* mulai tahun 2017 sampai 2021.

6. Sertifikasi Pegawai
   Dalam upaya melakukan standarisasi kompetensi pegawai, beberapa level jabatan pegawai bidang operasional dipersyaratkan memiliki *standard* sertifikasi tertentu sehingga memudahkan Perusahaan untuk memetakan level kompetensi pegawai serta memudahkan program pengembangan kompetensi pegawai.

Data pegawai bidang Operasional yang telah lulus sertifikasi yang dipersyaratkan serta target pegawai yang lulus sertifikasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jabatan	2015	2016	Target 2017
Operasional Manager *	-	-	49 orang
Financing Administration Head (FAH)**	48 orang	27 orang	49 orang
Back Office Head (BOH) & POM ***	-	62 orang	68 orang

Catatan :
* Sertifikasi OM baru akan diadadakan tahun 2017 (khusus Cab. Regular)
** FAH khusus Cab. Regular
***Sertifikasi BOH & POM mulai diadakan tahun 2016. POM adalah Back Office Head untuk Cabang Mikro

STRATEGI, KEUANGAN DAN JARINGAN

Berdasarkan ketetapan organisasi No.ORG/22/IX/2016 tanggal 26 September 2016, fungsi perencanaan strategis dan pengendalian keuangan berada di bawah supervisi Divisi Keuangan dan Jaringan (KKJ) yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi dan disupervisi langsung oleh Direktur Utama.

Perencanaan strategis dan pengendalian keuangan sebelumnya berada dalam 1 (satu) Divisi yakni Divisi Strategi dan Keuangan, kemudian dipecah menjadi Divisi Perencanaan Strategis yang dipimpin oleh M. Misbahul Munir dan Satuan Kerja Keuangan yang dipimpin oleh Friyandana Wijaya. 2 Unit organisasi ini dipisah agar dapat lebih fokus terhadap fungsinya masing-masing dan secara langsung tetap disupervisi oleh Kordinator Keuangan & Jaringan.

Fungsi satuan kerja strategis
adalah memastikan kelangsungan usaha BNI Syariah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang yang didukung dengan kinerja bisnis yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan serta untuk menghadapi lingkungan usaha yang semakin bervariasi dan kompleks. Divisi Perencanaan Strategis menjadi *think tank* bagi Perusahaan dan berfungsi untuk memberikan *guidance* mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.

Fungsi Pengendalian Keuangan
adalah memastikan proses pembukuan, pencatatan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan angka yang ril yang dapat dijadikan referensi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Fungsi Jaringan
Dalam rangka mendukung rencana bisnis BNI Syariah tahun 2016 dan untuk menghadapi persaingan bisnis perbankan di masa mendatang yang semakin menantang, BNI Syariah melakukan optimalisasi peran dan fungsi jaringan dengan melakukan penggabungan fungsi jaringan yang sebelumnya berada di bawah Divisi Pembiayaan Konsumer ke Divisi Jaringan dan Umum di bawah supervisi Koordinator Keuangan dan Jaringan sehingga koordinasi jaringan menjadi terpusat.

Fungsi jaringan adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan sesuai dengan strategi Perusahaan serta memantau produktivitas jaringan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.

Perencanaan dan Pengembangan Jaringan

- Merencanakan, menganalisa dan mengusulkan pengembangan jaringan yang meliputi pembukaan, penutupan, perpanjangan sewa, pembelian aset maupun perubahan status *outlet*
- Mengevaluasi efektivitas keberadaan *outlet* dan mengambil keputusan untuk perpanjangan sewa atau relokasi
- Memantau jumlah seluruh jaringan *outlet* BNI Syariah
- Mensupervisi aktivitas Wilayah dan Cabang terkait dengan pengelolaan jaringan

Pemantauan Kinerja Jaringan

- Mengevaluasi produktivitas *outlet*
- Mengkoordinasikan proses dan penetapan penilaian Wilayah/Cabang dan Pejabat Wilayah/Cabang
- Mengkoordinasikan usulan dan penetapan target bisnis Wilayah dan Cabang
- Menyusun, memonitor dan mendistribusikan data kinerja Wilayah dan Cabang
- Mengkoordinasikan pengisian SDM Wilayah/Cabang dan penyusunan target individual SDM Wilayah/Cabang

Profil Pemimpin Kordinator Keuangan dan Jaringan

Wahyu Avianto, ST, MM

Warga Negara Indonesia, lahir di Palangkaraya 7 Juli 1972. Meraih gelar Sarjana Teknik dibidang Planologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen dibidang Keuangan dari Universitas Indonesia tahun 2004. Beliau memulai karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1996 di Divisi Umum, dan ditugaskan sebagai *Change Management Officer* di Divisi Perencanaan Strategis pada tahun 1998. Pada tahun 2010 saat BNI Syariah sudah menjadi Bank Umum Syariah, beliau menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan pernah ditugaskan merangkap jabatan sekaligus sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko serta Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan. Saat ini Beliau menjabat sebagai Koordinator Divisi Keuangan dan Jaringan, yang membawahi Divisi Perencanaan Strategis, Unit Pengendalian Keuangan, Divisi Jaringan dan Umum serta membawahi Kantor Wilayah.

Profil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

M. Misbahul Munir ST.MM

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang, 6 Mei 1971. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gajah Mada dan gelar Magister Manajemen di bidang Manajemen dari Universitas Gajah Mada. Pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai VP *Marketing Communication* di Divisi *Customer Management and Marketing*. Saat ini beliau ditugaskan di BNI Syariah sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dimulai dari tahun 2016.

STRATEGI, KEUANGAN DAN JARINGAN

Profil Pemimpin Satuan Kerja Keuangan

Friyandana Wijaya, SE. Ak. MM, CA

Warga negara Indonesia, lahir di Samarinda, 15 Januari 1971. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Jember tahun 2002, dan pada tahun 2014 beliau mengikuti Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) di bidang *Chartered Accountant*. Beliau memulai karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1995 di Cabang Bondowoso dan ditugaskan sebagai Pengelola Akuntansi, kemudian menjabat sebagai Analis tim Implementasi *Core Banking* di Divisi Teknologi pada tahun 2004. Pada tahun 2010 saat BNI Syariah sudah menjadi Bank Umum Syariah, beliau menjabat sebagai Divisi Keuangan dan Operasional sebagai Manajer Operasional pada tahun 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Pemimpin Satuan Kerja Keuangan dimulai dari bulan September 2016..

Profil Pemimpin Jaringan dan Umum

Supardi Najamuddin, SE, Ak, MSi, CA

Warga Negara Indonesia, lahir di Bulukumba Sulawesi Selatan, Tgl. 04 Oktober 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dibidang Akutansi dari Universitas Hasanuddin tahun 1995 dan gelar Master of Science dengan Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Keuangan dari Universitas Indonesia tahun 2007. Memulai karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Mei 2002 – Juni 2003 sebagai Analis di unit Sistem Akuntansi dan Perpajakan, di Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan. Kemudian pada Juni 2010 - April 2011 ditugaskan Divisi Usaha Syariah sebagai Pemimpin Cabang Fatmawati di Cabang kelas A, tahun 2012 sbagai Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional, lalu tahun 2013 sebagai Pemimpin Divisi Komunikasi, Jaringan dan Logistik. Pada tahun 2014 beliau menjabat sebagai Staff Khusus Direksi BNI Syariah, pada tahun 2015 menjabat kembali sebagai Pemimpin Divisi Dana & Transaksi, di tahun 2016 dirotasi sebagai Pemimpin Divisi Jaringan dan Umum.

Fokus Utama Perencanaan Strategis

Dalam rangka untuk memastikan fungsi perencaan strategis berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, maka fungsi perencanaan strategis difokuskan pada 2 (dua) aktivitas kunci yang saling menunjang dan berkaitan, yaitu :

1. *Change Management*
   - Aktivitas *Change Management* awalnya difokuskan untuk mengawal proses transformasi BNI Syariah pasca *Spin-Off* dan selanjutnya diarahkan untuk mengembangkan proses bisnis dan operasional dengan fundamental yang kokoh melalui kegiatan: Riset makro ekonomi dan dampak strategisnya bagi Perusahaan. *Benchmarking* dan pengembangan proses bisnis dan operasional berdasarkan *best practices*.
   - *Project Management* untuk aktivitas yang bersifat *major changes*. Penguatan sinergi bisnis dan optimalisasi pemanfaatan shared services yang dimiliki PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BNI induk.
   - Pengembangan *dashboard* kinerja berbasis *online*
   - Pengembangan *outlet – outlet* meliputi wilayah dan optimalisasi KCP.

2. *Corporate Plan*ning
   - Aktivitas *Corporate Planning* difokuskan untuk menyusun strategi BNI Syariah secara *bankwide*, penyusunan sasaran keuangan, alokasi dan pengendalian anggaran serta pengendalian kinerja Perusahaan melalui kegiatan: Integrasi proses perencanaan secara *top-down* dan *bottom-up* dengan Unit Bisnis dan Unit Penunjang.
   - Penyusunan laporan kinerja unit bisnis secara periodik dalam rangka evaluasi dan monitoring terhadap target yang telah ditetapkan.
   - Pengendalian kinerja dengan mengantisipasi perubahan kondisi eksternal maupun internal dengan menyusun prognosa bulanan, triwulanan dan akhir tahun, agar dapat segera diambil tindakan untuk setiap permasalahan.
   - Penyusunan *corrective action* secara kontinyu sebagai masukan bagi manajemen apabila terjadi deviasi kinerja.
   - Memastikan bahwa realisasi beban operasional dan beban modal tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, dengan memantau penggunaan beban secara periodik serta menginisiasi penggunaan formulir kontrol anggaran pada setiap Divisi/Unit.

Fokus Utama Satuan Kerja Keuangan

Untuk mendukung perencanaan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, maka fungsi Satuan Kerja Keuangan difokuskan pada fungsi *Financial Control*.

Aktivitas *Financial Control* ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan Perusahaan telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan:

- Penyusunan desain sistem akuntansi yang akurat dan sesuai dengan PSAK (Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan) dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) dan tetap berpedoman pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan PBI/POJK yang berlaku.
- Pelaksanaan pembukuan secara tertib dan sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan.
- Pengawasan terhadap buku besar dan neraca Perusahaan secara harian untuk memastikan kualitas laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- Pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan perpajakan pada seluruh lini Perusahaan.
- Sinkronisasi pelaporan data keuangan Perusahaan kepada regulator dan pihak-pihak eksternal terkait lainnya dengan selalu menjaga kualitas data secara terus menerus.

Fokus Utama Jaringan

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, maka fungsi jaringan difokuskan pada fungsi *Network Optimalization*.

Aktivitas *Network Optimalization* ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh jaringan yang dimiliki BNI syariah dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai *end state* Perusahaan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Merencanakan, menganalisa dan mengusulkan pengembangan jaringan yang meliputi pembukaan, penutupan, perpanjangan sewa, pembelian aset maupun perubahan status *outlet* untuk mengoptimalkan peran Kantor Cabang sebagai sentra pengembangan pangsa pasar dan pusat layanan kepada nasabah
- Mengevaluasi efektivitas keberadaan dan produktivitas *outlet* sebagai sarana penetrasi bisnis pada area yang belum terjamah untuk memperbesar ekspansi peluang bisnis di setiap jaringan
- Memantau pertumbuhan jumlah seluruh jaringan *outlet* BNI Syariah
- Mensupervisi aktivitas Wilayah dan Cabang terkait dengan pengelolaan jaringan
- Melakukan klasifikasi *Outlet* sesuai dengan potensi bisnis dan *coverage area* bisnis untuk menghasilkan kinerja *outlet* secara maksimal.
- Mengkoordinasikan proses dan penetapan penilaian Wilayah/Cabang dan Pejabat Wilayah/Cabang
- Mengkoordinasikan usulan dan penetapan target bisnis Wilayah dan Cabang
- Menyusun, memonitor dan mendistribusikan data kinerja Wilayah dan Cabang
- Mengkoordinasikan pemenuhan *enabler* untuk mendukung pencapaian bisnis

Pencapaian 2016

Sesuai dengan tema kinerja pada tahun 2016 yaitu "*Surviving the Turbulance : Quality and Sustainable Growth*", maka *deliverables* yang ada pada Divisi Perencanaan Strategis & Satuan Kerja Keuangan diarahkan untuk mempertahankan kinerja unggul Perusahaan dalam situasi industri yang bergejolak dengan fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkualitas. Beberapa *deliverables* yang utama selama tahun 2016 tersebut antara lain adalah:

A. Perencanaan Strategis
   1. *Change Management*
      - *Econ*omic *Review* Q1-Q4 2016 yang mencakup identifikasi perubahan indikator makro ekonomi Indonesia dan proyeksinya serta dampak dan antisipasi yang harus dilakukan oleh Perusahaan.
      - Implementasi *Dashboard* Kinerja berbasis *online* level 1 (*bankwide*) dan level 3 (cabang) dalam rangka standarisasi laporan
      - Evaluasi program sinergi bisnis dan pemanfaatan *shared services* yang dimiliki BNI induk secara periodik.
      - Melakukan pelatihan dan asistensi kepada beberapa Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah dalam penyusunan rencana *Spin-Off* ataupun konversi melalui kerja sama dengan Hasanah *Knowledge Center* (HKC).
      - Implementasi pembukaan 3 kantor wilayah meliputi : Kantor Wilayah Jabodetabek Plus (WJP), Kantor Wilayah Barat (WBA) dan Kantor Wilayah Timur (WTI)

   2. *Corporate Planning*
      - Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017 – 2019 dengan memperhatikan kondisi eksternal dan kapabilitas internal yang sejalan dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang Perusahaan.
      - Menyusun kajian yang bersifat strategis dalam rangka mengantisipasi kondisi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan Perusahaan
      - Berkoordinasi dengan anak Perusahaan BUMN lainnya yang bergerak di perbankan syariah dalam rangka penguatan industri syariah di Indonesia
      - Pengembangan standar kompetensi *Business Sense* yang menjadi salah satu *core competency* bagi setiap pegawai terutama untuk pegawai baru melalui program pelatihan yang mengasah *analytical thinking* dan *financial modeling*.

B. Satuan Kerja Keuangan
   1. *Financial Control*
      - Penyempurnaan Kebijakan Proses Perencanaan dan Pengendalian Keuangan BNI Syariah yang terdokumentasi sebagai bagian dari proses untuk memastikan kelangsungan aktivitas Strategi & Keuangan dapat berjalan secara konsisten.

- Penyempurnaan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK (Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan) dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) terbaru yang menyangkut *impairment earning asset*, *employee benefit* dan kebijakan revaluasi aset tetap dengan tetap berpedoman pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan PBI/POJK yang berlaku.
- Implementasi sistem monitoring realisasi *opex* dan *capex* terhadap alokasi *budget* secara bulanan, monitoring yang lebih ketat terhadap penggunaan *suspend account* secara bulanan serta monitoring harian akurasi pembukuan.
- Implementasi sentralisasi LSMK (Laporan Sistem Moneter dan Keuangan) XBRL dan sentralisasi laporan SID (Sistem Informasi Debitur) untuk seluruh Cabang se-Indonesia.
- Asistensi dan pendampingan terhadap pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) sehingga *disclosure* laporan keuangan tahun 2016 telah memenuhi standar yang diharapkan.
- Penyempurnaan *tax compliance* dan *tax planning* agar dapat menunjang kinerja Perusahaan.

C. Jaringan
1. Pembentukan 3 kantor wilayah yaitu: Kantor Wilayah Barat (WBA), Kantor Wilayah Timur (WTI) dan Kantor Wilayah Plus (WJP), dengan tujuan memudahkan koordinasi, meningkatkan produktivitas bisnis, meningkatkan pengawasan, serta optimalisasi sinergi dengan BNI induk sehingga cabang di bawah kelola masing-masing wilayah dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.
2. Pembukaan 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), Pembukaan 8 *Outlet* Kegiatan Pelayanan Kas (*payment point*), peningkatan 3 *outlet* status dari Kantor Fungsional menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP), relokasi 2 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 1 Kantor Kas (KK).
3. Pembelian 2 aset gedung yang berada di Bandung dan Bekasi.

Prioritas 2017

Sesuai dengan tema kinerja pada tahun 2017 yaitu ***Lillah, Fillah, Billah***, maka beberapa prioritas utama pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian kinerja keuangan yang lebih baik, khususnya dalam pemantauan kinerja unit bisnis dan anggaran biaya operasional masing-masing Divisi/Unit.
2. *Inisiasi project strategis* terutama yang berdampak langsung dengan kegiatan bisnis, agar dapat dilakukan penyempurnaan proses bisnis sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.
3. Penguatan sinergi dengan BNI induk, khususnya terkait pembiayaan *supply chain* dan pemasaran produk-produk konsumer dengan memanfaatkan jaringan relasi BNI yang luas. Selain itu, juga dilakukan optimalisasi pemanfaatan jaringan BNI melalui SCO (*Sharia Channeling Office*) dan Kolokasi pada BNI *Financial Center* (BFC) serta pemanfaatan IT BNI agar dapat terus bersaing di era *Financial Technology*.
4. Inisiasi penguatan permodalan untuk percepatan Perusahaan masuk BUKU-3 sehingga terbuka peluang yang lebih luas dalam menggarap potensi bisnis.
5. Melakukan resegmentasi internal pembiayaan produktif.
6. Implementasi laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
7. *Roll Out* Implementasi Kantor Wilayah untuk memberikan kewenangan penuh kepada Kantor Wilayah menjalankan peran dan fungsinya.
8. *Service Quality Assurance*
9. *Re-grouping* Kantor Cabang Pembantu untuk menyetarakan jangkauan kendali masing-masing Kantor Cabang yang membawahi Kantor Cabang Pembantu sesuai area bisnisnya.
10. Reklasifikasi Kantor Cabang untuk me-*review* potensi dan kinerja Kantor Cabang sesuai *size*-nya.

05 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

"Di tengah tantangan perlambatan ekonomi Indonesia, BNI Syariah pada tahun 2016 menunjukkan kinerja yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang dengan pengelolaan kualitas aset yang terpelihara dengan baik."

Analisa Makro dan Industri Perbankan Syariah	122
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	133
Tinjauan Keuangan	154
Prospek Pengembangan Usaha	189

ANALISA MAKRO DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi Indonesia sebagai akibat lesunya perekonomian global, BNI Syariah pada tahun 2016 mampu menunjukkan kinerja yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Desember 2016 aset BNI Syariah tumbuh sebesar 23,01% (yoy) atau meningkat sebesar Rp5.297 miliar menjadi Rp28.314 miliar dibanding tahun 2015. Demikian juga dengan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), masing-masing tumbuh sebesar Rp2.729 miliar atau 15,36% pada pembiayaan dan sebesar Rp4.910 miliar atau 25,41% pada DPK. Dari segi profitabilitas, BNI Syariah mampu mencatat kenaikan laba bersih sebesar Rp49 miliar atau 21,38% (yoy) menjadi Rp277 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah terus membaik dan meningkat secara konsisten.

Perekonomian Dunia

Ekonomi dunia hingga saat ini masih tumbuh meski terbatas disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih melambat di negara-negara maju dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat misalnya sampai dengan kuartal ketiga tahun 2016 tumbuh rata-rata sebesar 1,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,8%. Disisi lain, penguatan ekonomi Eropa juga tertahan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi Yunani dan keputusan keluarnya Inggris dari koalisi ekonomi Uni-Eropa, atau dikenal dengan British Exit (Brexit). Khusus Brexit, selain dapat memicu keluarnya anggota Uni-Eropa lainnya, juga menjadikan koalisi ekonomi di beberapa regional mengkaji ulang kebijakannya. Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama Eropa masih mencari momentum untuk tumbuh ditengah dampak Brexit terhadap ekonomi global yang masih terbatas.

Faktor utama pelemahan ekonomi dunia juga disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Tiongkok menghadapi beberapa permasalahan ekonomi yang diantaranya disebabkan oleh *structural imbalances,* menurunnya tingkat imbal hasil investasi, ekspor yang melemah di tengah aliran investasi yang melambat, serta menggelembungnya harga properti. Proses *re-balancing* ekonomi Tiongkok ini sebenarnya terlihat sejak tahun 2011 dengan tren penurunan pertumbuhan ekonomi setelah mampu membukukan pertumbuhan PDB dua *digit* pada tahun 2010 sebesar 10,6%. Kondisi tersebut mempengaruhi harga komoditas yang juga masih rendah, kecuali harga minyak dunia yang mulai meningkat seiring kesepakatan OPEC untuk menurunkan produksinya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara telah membuat otoritas moneter di negara tersebut mengeluarkan kebijakan terutama terkait dengan suku bunga acuan. *European Central Bank* (ECB) atau Bank Sentral Eropa telah memangkas suku bunga acuan menjadi 0,0% sejak bulan Maret 2016 untuk menggerakkan perekonomian di kawasan Uni Eropa. Sebaliknya, ekspektasi atas penguatan ekonomi di masa mendatang menyebabkan *The Fed* akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 0,75 pada bulan Desember 2016.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 menurut Bank Dunia diperkirakan akan membaik dan tumbuh menjadi 2,8% dibandingkan estimasi pertumbuhan PDB dunia sebesar 2,4% tahun 2016**.** Motor penggerak ekonomi dunia diperkirakan berasal dari perbaikan ekonomi negara maju yang diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada kontribusi negara-negara sedang berkembang. Bank Dunia memperkirakan perekonomian Amerika Serikat membaik menjadi 2,2% pada tahun mendatang sementara perekonomian di kawasan Uni Eropa tumbuh stabil di level 1,6% dan *re-balancing* ekonomi Tiongkok terus berlanjut dan tumbuh sekitar 6,5%.

Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga. Perekonomian Indonesia relatif tumbuh lebih baik diantara negara-negara sedang berkembang. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih baik menjadi 5,02% pada tahun 2016 dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 sebesar 4,88%. Pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut didukung oleh konsumsi dan investasi khususnya bangunan yang tercatat cukup kuat. Pengeluaran konsumsi memiliki konstribusi rata-rata sekitar 64,24% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi signifikan rata-

rata sebesar 84,62% dalam periode yang sama. Pengeluaran konsumsi tumbuh sebesar 4,3% menjadi Rp6.006,10 triliun tahun 2016 ditopang dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 5,01% menjadi Rp5.126,50 triliun pada periode yang sama.

Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian ini didukung oleh relatif terkendalinya harga-harga barang terefleksi oleh tingkat inflasi yang terkendali selama tahun 2016 dan masih berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi yaitu 4±1%. Tingkat inflasi pada tahun 2016 turun menjadi 3,02% dibandingkan 3,35% pada tahun sebelumnya. Inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi, serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Seiring dengan terkendalinya tingkat inflasi, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan sepanjang tahun ini. BI *rate* telah mengalami penurunan dari posisi bulan Januari sebesar 7,25% menjadi 6,50% pada bulan Juli, penurunan sebesar 75bps selama 7 bulan. Sejak 19 Agustus 2016, BI memperkenalkan suku bunga acuan BI baru yakni Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan baru yang memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Suku bunga acuan baru ini juga mengalami penurunan secara *gradual* menjadi 4,75% pada bulan Desember dari posisi bulan April sebesar 5,50% pada tahun 2016 ditopang oleh tekanan inflasi yang semakin rendah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh perbaikan investasi, baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi sepanjang tahun 2016 tumbuh sebesar 12,36% menjadi sekitar Rp612,80 triliun. Peningkatan realisasi investasi ini ditopang oleh pertumbuhan realisasi PMDN dan PMA masing-masing sebesar 20,45% dan 8,39% menjadi Rp216,20 triliun dan Rp396,60 triliun.

Perbaikan realisasi investasi ini juga turut memberikan andil atas perbaikan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang membukukan surplus pada kuartal IV tahun 2016 sebesar US$4,50 miliar. Secara kumulatif surplus NPI mencapai US$12,09 miliar pada tahun 2016. Selain itu, kenaikan NPI ini juga ditopang oleh surplus investasi portofolio didukung oleh sentimen positif terkait implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang berjalan dengan baik. Besarnya surplus NPI terutama ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2015. Sementara itu defisit transaksi berjalan yang terkendali ditopang oleh surplus non migas yang cukup besar dan menurunnya defisit migas.

Dampak positif atas membaiknya NPI tersebut adalah posisi cadangan devisa Indonesia yang lebih besar. Hal ini dapat memberikan kelonggaran kepada bank sentral untuk intervensi ke pasar jika diperlukan terutama untuk meredam gejolak fluktuasi mata uang Rupiah terutama akibat meningkatnya ketidakpastian perekonomian global pasca Pemilu AS dan ekspektasi kenaikan *Fed Fund Rate*. Posisi cadangan devisa Indonesia per Desember 2016 mencapai sekitar US$116,4 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2015 yang mencapai sekitar US$ 105,9 miliar.

Penguatan rupiah berlangsung hingga oktober dan tertahan di bulan November 2016 paska pemilu AS. Secara *point to point*, rupiah menguat 1,70% (ytd) pada level Rp13.550 per dollar AS pada akhir November 2016. Penguatan rupiah didukung oleh sentimen positif terhadap perekonomian domestik, seiring dengan kondisi stabilitas makro ekonomi yang terjaga dan implementasi UU pengampunan pajak yang berjalan dengan baik. Namun pada bulan November, penguatan rupiah tertahan akibat meningkatnya ketidak pastian perekonomian global paska pemilu AS dan ekspektasi kenaikan *Fed Fund Rate*.

ANALISA MAKRO DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2017 diharapkan membaik seiring dengan ekspektasi perbaikan ekonomi global. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3%, sedikit membaik dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2%. Selain itu, inflasi diharapkan tetap terkendali di level 4,0% dan Rupiah ditransaksikan menguat sebesar Rp13.300 per US$. Perbaikan ekonomi global juga diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kenaikan harga komoditas khususnya minyak mentah yang diproyeksikan naik menjadi US$45,0/barel pada tahun 2017. Secara lengkap proyeksi indikator-indikator ekonomi dapat dilihat di tabel berikut ini.

Indikator Perekonomian

Indikator	Satuan	2016	2017 (Proyeksi)
Pertumbuhan ekonomi	(%, yoy)	5,2	5,3
Inflasi	(%)	4,0	4,0
Nilai tukar Rupiah	(Rp/US$)	13.500	13.300
Suku bunga SPN 3 bulan	(%)	5,5	5,3
Harga Minyak	(USD/barel)	40,0	45,0
Lifting minyak	(ribu barel/hari)	820	780
Lifting gas	(ribu barel setara minyak/hari)	1.150	1.150

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Perkiraan pertumbuhan GDP Indonesia yang membaik pada tahun 2017 ditopang oleh kontribusi konsumsi yang meningkat baik oleh rumah tangga maupun pemerintah. Perkiraan inflasi yang stabil diharapkan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1% sedangkan konsumsi pemerintah akan naik sebesar 5,4% seiring dengan berlanjutnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran pemerintah untuk infrastruktur pada tahun 2017 diperkirakan mencapai sekitar Rp346,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran infrastruktur untuk tahun 2016 sebesar Rp317,1 triliun.

Sementara itu, dilihat dari sisi sektoral, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% tersebut terutama akan ditopang oleh industri informasi dan komunikasi dengan estimasi pertumbuhan sebesar 10,6%. Sektor lain yang diharapkan mampu tumbuh diatas 8% adalah jasa keuangan & asuransi (8,9%), jasa perusahaan (8,5%), jasa kesehatan & kegiatan lainnya (8,4%), jasa lainnya (8,4%), dan jasa pendidikan (8,3%). Di sisi lain, seiring dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, industri konstruksi di Indonesia diharapkan tumbuh sebesar 8,1%.

Industri Perbankan Nasional

Kondisi industri perbankan nasional dinilai cukup stabil ditopang oleh ketahanan sistem yang terjaga. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia pada Desember 2016, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*) perbankan tercatat sebesar 22,93%, jauh diatas ketentuan minimum 8%. Sementara itu rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) tetap rendah dan berada dikisaran 2,93%. Dari fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 7,85% (yoy), menurun jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 10,40% (yoy).

Fungsi intermediasi bank memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aktivitas perekonomian nasional yang berkembang memerlukan dukungan pembiayaan khususnya yang berasal dari sektor perbankan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang melambat akan berpengaruh kepada kinerja intermediasi perbankan nasional. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pertumbuhan kredit perbankan nasional mampu meningkat signifikan 22,97% menjadi Rp2.725,67 miliar pada tahun 2012 ketika perekonomian tumbuh sebesar 6,03%. Sebaliknya ketika pertumbuhan PDB melambat menjadi 4,79% pada tahun 2015, pertumbuhan kredit bank hanya sebesar

10,40%. Di tengah perlambatan perekonomian global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 5,02% sampai dengan kuartal IV tahun 2016, kredit perbankan hanya tumbuh *single digit* sebesar 7,85%.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit perbankan, total aset perbankan nasional juga tumbuh melambat hanya 13,34% menjadi Rp5.615,15 triliun pada tahun 2014, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aset sebesar 16,69% pada tahun 2012 ketika PDB naik sebesar 6,03%. Perlambatan perekonomian global yang berdampak kepada penurunan pertumbuhan PDB sebesar 4,79% pada tahun 2015 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan akibat fungsi intermediasi perbankan yang tidak berjalan optimal. Pertumbuhan aset perbankan nasional melambat menjadi sebesar 9,21% menjadi Rp6.132,58 triliun pada tahun 2015. Namun seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016, aset perbankan nasional mampu tumbuh lebih baik sebesar 10,40% menjadi Rp6.729,80 triliun.

Aset, Kredit dan DPK Perbankan Nasional

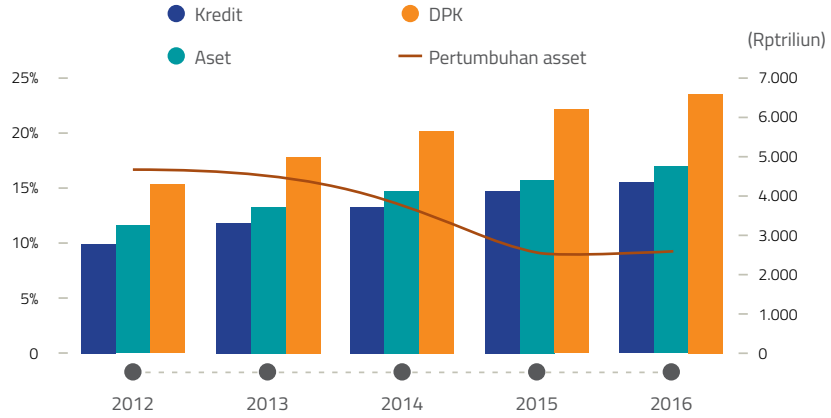

Sumber: OJK, Bank Indonesia

Dari sisi penyaluran kredit kepada pihak ketiga, terdapat tiga penerima kredit perbankan yakni lapangan usaha, rumah tangga, dan bukan lapangan usaha lainnya. Porsi penyaluran kredit untuk ketiga jenis debitur ini relatif tidak berubah masing-masing sebesar 72,52%; 22,40%; dan 5,08% dari total penyaluran kredit kepada pihak ketiga sebesar Rp4.377,19 triliun pada tahun 2016. Peran rumah tangga sebagai penerima kredit bank sangat penting khususnya untuk kredit kepemilikan rumah tangga (KPR), apartemen (KPA), ruko, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga lainnya. Pada tahun 2016, kredit yang diberikan kepada rumah tangga tumbuh sebesar 6,99% menjadi Rp980,34 triliun. Sementara itu kredit kepada lapangan usaha meningkat lebih tinggi sebesar 7,53% menjadi Rp3.174,55 triliun sedangkan bukan lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,31% menjadi Rp222,31 triliun.

Dari sisi penggunaan, sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2014 pertumbuhan kredit untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi juga tumbuh lebih rendah. Kredit modal kerja dan konsumsi pada tahun 2015 tumbuh di bawah 10,00% sedangkan kredit investasi mampu membukukan kenaikan pertumbuhan sebesar 14,69%. Pada tahun 2016, tantangan perlambatan pertumbuhan PDB di Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap penyaluran ketiga jenis kredit ini. Kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi tumbuh lebih rendah masing-masing sebesar 6,93% menjadi Rp2.049,10 triliun; 8,65% menjadi Rp1.125,47 triliun; dan 8,76% menjadi Rp1.202,63 triliun.

Sementara itu, perolehan dana pihak ketiga juga mengalami penurunan seiring dengan aktivitas penyaluran kredit perbankan yang secara bertahap juga mengalami perlambatan. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan hanya tumbuh sebesar 7,26% menjadi Rp4.413,06 miliar pada tahun 2015 sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit perbankan yang hanya tumbuh 10,40%. Pencapaian DPK ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK sebesar dua digit selama bertahun-tahun hingga 2014. Pada tahun 2016, perbankan nasional mampu membukukan pertumbuhan DPK lebih baik sebesar 9,60% menjadi Rp4.836,76 triliun di tengah perlambatan penyaluran kredit perbankan yang hanya mampu tumbuh sebesar 7,85% menjadi Rp4.413,41 triliun.

Dilihat dari komposisi DPK, simpanan berjangka masih memberikan kontribusi terbesar di antara sumber DPK perbankan. Porsi simpanan berjangka di bank umum pada tahun 2015 sebesar 45,99% atau lebih besar dibandingkan kontribusi tabungan dan giro yang masing-masing sebesar 31,63% dan 22,38%. Pada tahun 2016, mayoritas dana nasabah masih berupa simpanan berjangka dengan porsi terhadap total DPK sebesar 44,67% menjadi Rp2.160,72 triliun yang diikuti oleh tabungan (32,08%) dan giro (23,24%) yang masing-masing mencapai Rp1.551,81 triliun dan Rp1.124,24 triliun.

Perbankan Syariah

Di tengah melambatnya perekonomian nasional akibat ekonomi dunia yang masih tumbuh terbatas, industri perbankan syariah masih mampu menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2016. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pembiayaan, aset dan DPK perbankan syariah mampu melampaui pertumbuhan pembiayaan, aset dan DPK industri perbankan nasional yang merefleksikan antusiasme pasar untuk merespon produk-produk perbankan syariah yang terus berkembang.

Pertumbuhan Pembiayaan, Aset dan DPK Bank Syariah

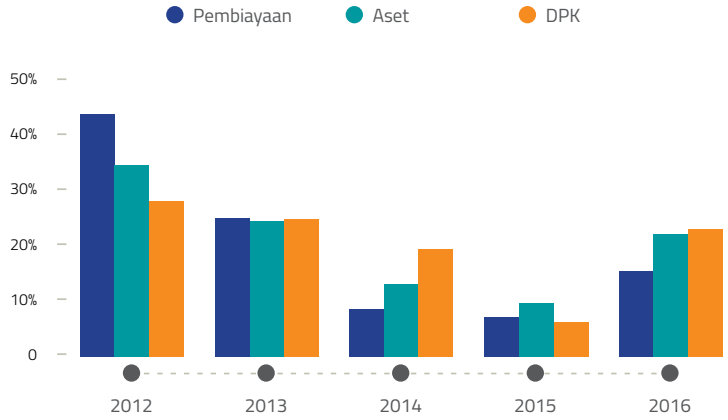

Sumber: OJK, Bank Indonesia

Pertumbuhan Kredit, Aset dan DPK Perbankan Nasional

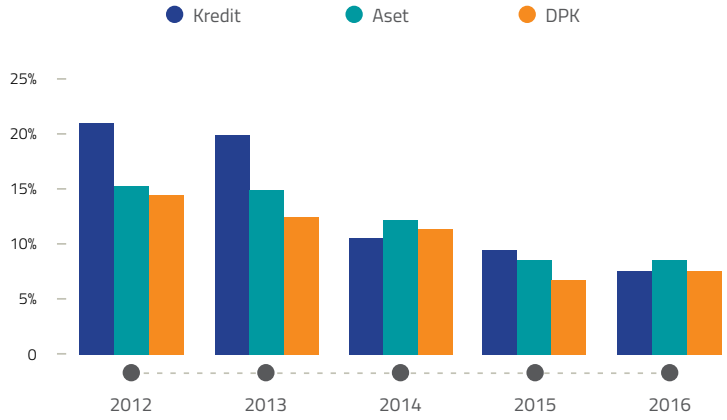

Sumber: OJK, Bank Indonesia

Setelah mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2015, perbankan syariah mampu membukukan pertumbuhan pembiayaan, aset dan DPK yang lebih baik pada tahun 2016. Di tengah tantangan perekonomian Indonesia yang tumbuh melambat, pembiayaan, aset dan DPK bank syariah mampu tumbuh lebih baik dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional masing-masing sebesar 16,44%,, 20,33%, dan 20,83%. Pertumbuhan bank syariah yang lebih tinggi tersebut menunjukkan permintaan terhadap produk-produk perbankan syariah sangat besar di tengah-tengah kontribusi bank syariah terhadap industri perbankan nasional yang masih rendah saat ini. Industri perbankan syariah sejak September 2016 untuk pertama kalinya menembus *market share* 5% dengan adanya konversi Bank Aceh dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Langkah strategis tersebut diharapkan dapat memicu beberapa bank yang mempunyai potensi syariah untuk menempuh langkah serupa. Pangsa pasar pembiayaan, aset dan DPK bank syariah masing-masing sebesar 5,62%; 5,30%; dan 5,78% terhadap total kredit, aset dan DPK industri perbankan nasional pada tahun 2016.

Dalam perkembangannya perbankan syariah menghadapi tantangan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014. Pembiayaan yang hanya tumbuh sebesar 6,86% pada tahun 2015 menyebabkan pertumbuhan aset bank syariah hanya mampu membukukan kenaikan sebesar 8,78% menjadi Rp296,26 triliun. Tekanan atas perlambatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh penyerapan DPK yang hanya naik sebesar 6,11%, level terendah dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, di tengah tantangan perlambatan ekonomi pada tahun 2016 bank syariah mampu membukukan pertumbuhan pembiayaan lebih baik sebesar 16,44% menjadi Rp248,01 triliun yang turut mendorong pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 20,33% menjadi Rp356,50 triliun. Selain itu, pertumbuhan DPK perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 20,83% menjadi Rp279,34 triliun pada tahun 2016.

ANALISA MAKRO DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Aset, Pembiayaan dan DPK Perbankan Syariah

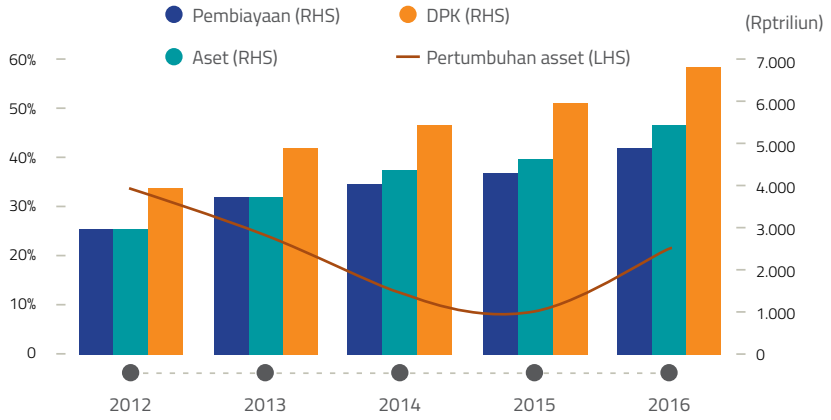

Sumber: OJK, Bank Indonesia

Dilihat dari penyaluran pembiayaan perbankan syariah, segmen rumah tangga memiliki peran signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Pada tahun 2016, pembiayaan kepada rumah tangga naik tajam sebesar 26,68% menjadi Rp97,60 triliun dengan kontribusi yang meningkat menjadi 39,35% dari total pembiayaan. Pembiayaan kepada rumah tangga masih memiliki peran dominan ditunjang oleh peran pengeluaran rumah tangga sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembiayaan untuk kepemilikan rumah menjadi fokus utama pembiayaan perbankan syariah untuk segmen rumah tangga ditopang oleh kebutuhan perumahan yang meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan kepemilikan rumah tumbuh sebesar 17,93% menjadi Rp51,20 triliun pada tahun 2016 atau lebih baik dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 10,69% ditopang oleh kebijakan regulator untuk melonggarkan pembiayaan rumah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor properti. Secara kumulatif, porsi pembiayaan untuk rumah tangga meningkat menjadi sekitar 39,35% pada tahun 2016 dibandingkan sebesar 36,17% pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, dilihat dari jenis lapangan usaha, pembiayaan yang diberikan perbankan syariah masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sekitar 12,23%. Sektor ini juga memiliki porsi dominan dalam kredit yang diberikan oleh perbankan nasional. Sementara itu sektor lainnya memiliki porsi yang lebih rendah dengan kontribusi dibawah 10,00%. Pada tahun 2016, pembiayaan perbankan syariah kepada berbagai lapangan usaha tumbuh sebesar 11,98% menjadi Rp147,41 triliun ditopang oleh peningkatan pembiayaan kepada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,64% menjadi Rp30,32 triliun.

Peran penting sektor rumah tangga sebagai penerima pembiayaan perbankan syariah juga ditunjukkan oleh dominannya pinjaman konsumsi terhadap pembiayaan perbankan syariah berdasarkan penggunaannya. Kontribusi pinjaman konsumsi meningkat menjadi 40,56% dari total pembiayaan sebesar Rp248,01 triliun. Pinjaman ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 23,66% menjadi Rp100,60 triliun pada tahun 2016. Sementara itu, peningkatan realisasi investasi di Indonesia juga ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan untuk investasi. Meski melambat, jenis pembiayaan ini mampu tumbuh sebesar 16,16% menjadi Rp60,04 triliun pada tahun 2016. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan modal kerja sedikit membaik sebesar 9,27% menjadi Rp87,36 triliun.

Untuk mengimbangi fungsi intermediasi bank syariah dalam penyaluran pembiayaan, penyerapan DPK terus dilakukan secara berkelanjutan. Dari total DPK yang diperoleh bank syariah pada tahun 2016 sebesar Rp279,34 triliun, dana investasi *non profit sharing* masih memiliki peran sangat vital yang mencakup 86,27% dari total DPK. Jenis DPK tersebut mengalami kenaikan sebesar 22,03% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, dana simpanan wadiah relatif tidak berubah dengan kontribusinya sebesar 13,73% dari total DPK, atau sebesar Rp38,36 triliun. DPK yang berasal dari dana investasi *non profit sharing* masih didominasi oleh deposito yang menawarkan jangka waktu yang beragam kepada nasabah. Nasabah menginvestasikan sekitar 68,96% dari total dana *investasi non profit* sharing di perbankan syariah dalam bentuk deposito.

Kinerja Perbankan Syariah

Di tengah tantangan ekonomi sepanjang tahun 2016, Perbankan Syariah relatif mampu mempertahankan kinerja dengan *Non Performance Financing* (NPF) turun menjadi 4,16% pada tahun 2016, lebih rendah dari NPF tahun 2015 sebesar 4,34%. Perbaikan kinerja NPF ini ditopang oleh penurunan pertumbuhan pembiayaan bermasalah sebesar 11,36% menjadi Rp10,30 triliun pada tahun 2016. Sebagai perbandingan, pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 naik sebesar 7,13% menjadi Rp9,25 triliun. Dilihat dari jenis penggunaan pembiayaan bank syariah, NPF pada pembiayaan modal kerja mengalami penurunan menjadi sebesar 2,01% pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,31% terutama disebabkan oleh penurunan NPF yang berasal dari non UMKM. Meski demikian, pembiayaan untuk investasi mengalami peningkatan dengan NPF naik menjadi sebesar 1,36% dibandingkan NPF sebesar 1,09% pada tahun 2015. NPF untuk pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing mencapai Rp4,99 triliun dan Rp3,37 triliun pada tahun 2016. NPF untuk pembiayaan konsumsi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1,94 triliun pada tahun 2016 dibandingkan Rp2,01 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi lapangan usaha, perbaikan pengelolaan NPF dapat dilihat dari penurunan NPF pada sektor perdagangan besar dan eceran. NPF sektor ini turun menjadi sebesar 0,86% dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,00%. Meski demikian, tantangan pengelolaan NPF terdapat pada pembiayaan untuk sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan yang naik menjadi sebesar 0,40% pada 2016 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,22%. Secara kumulatif NPF turun sebesar 0,19% menjadi 4,16% pada tahun 2016.

Penurunan NPF tersebut membuat beban cadangan kerugian penurunan nilai perbankan syariah menurun yang berdampak positif terhadap khususnya pada posisi permodalan dan rentabilitas perbankan syariah. CAR Bank Umum Syariah naik menjadi 15,95% pada tahun 2016 dibandingkan 15,02% pada tahun 2015. Selain itu, ROA dan NOM perbankan syariah juga mengalami perbaikan menjadi 0,94% dan 1,04% terutama ditopang oleh efisiensi operasional yang ditunjukkan dengan penurunan rasio BOPO menjadi sebesar 93,63%. Sementara itu, pertumbuhan DPK perbankan syariah sebesar 20,83% yang melebihi kenaikan pembiayaan sebesar 16,44% menyebabkan rasio FDR lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 88,78%.

Kinerja Perbankan Syariah (%)

	2014	2015	2016
CAR BUS	15,74	15,02	15,95
ROA	0,79	0,84	0,94
NOM	0,90	0,88	1,04
NPF	4,33	4,34	4,16
BOPO	94,16	94,38	93,63
FDR	91,50	92,14	88,78

Sumber: OJK, Bank Indonesia

ANALISA MAKRO DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Posisi BNI Syariah di Industri

BNI Syariah tercatat sebagai bank dengan aset, pembiayaan dan DPK terbesar ketiga di industri perbankan syariah. BNI Syariah mencatat pertumbuhan aset, pembiayaan, DPK dan laba yang senantiasa berada diatas rata-rata pertumbuhan industri pada periode Desember 2016, di mana aset tumbuh 23,01% (yoy), pembiayaan tumbuh 15,36% (yoy), DPK tumbuh 25,41% (yoy), dan laba tumbuh 21,38% (yoy). BNI Syariah adalah salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, yang termasuk di dalam 13 Bank Umum Syariah sejak tahun 2010 setelah dilakukan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Posisi terbesar ketiga dalam hal aset ditopang oleh 68 kantor cabang BNI Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kantor cabang yang dimiliki BNI Syariah merupakan yang terbanyak ketiga di Indonesia setelah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia (Statistik Perbankan Syariah per Desember 2016, OJK).

Pangsa Pasar BNI Syariah

Bank BNI Syariah adalah Bank Umum Syariah terbesar ketiga berdasarkan aset di Indonesia dengan total aset per Desember 2016 mencapai sebesar Rp28,31 triliun. Total aset ini mencapai sebesar 7,94% dari total aset perbankan syariah atau meningkat dari pangsa pasar tahun 2015 sebesar 7,77% seiring dengan peningkatan aktivitas pembiayaan BNI Syariah. Selain itu, pertumbuhan aset BNI Syariah sebesar 23,01% pada tahun 2016 atau mampu melebihi pertumbuhan aset perbankan syariah yang tumbuh lebih rendah sebesar 20,33%.

Pangsa Pasar Berdasarkan Aset

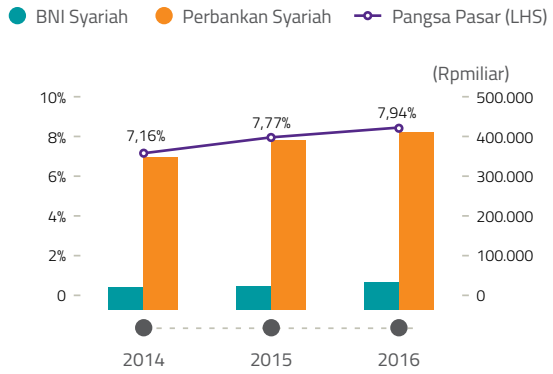

Sumber: OJK, Bank Indonesia

Dari segi pembiayaan, BNI Syariah mampu membukukan pembiayaan sebesar Rp20,49 triliun atau tumbuh sebesar 15,36% pada tahun 2016. Pangsa pasar pembiayaan BNI Syariah terhadap pembiayaan perbankan syariah adalah sebesar 8,26% pada tahun 2016. Sedikit menurun dibanding tahun 2015 sebesar 8,34%.

Pangsa Pasar Berdasarkan Pembiayaan

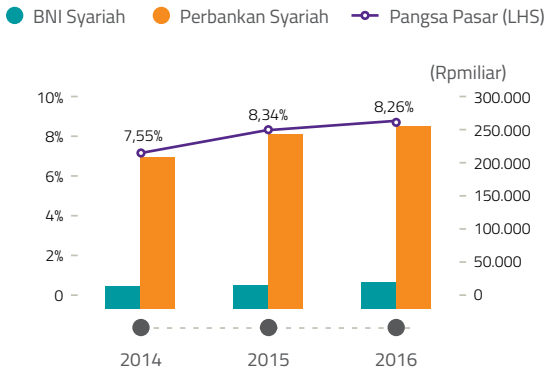

Sumber: OJK, Bank Indonesia

Peningkatan aktivitas pembiayaan BNI Syariah ini ditopang oleh perbaikan penyerapan dana pihak ketiga (DPK) untuk mendukung aktivitas pembiayaan tersebut. DPK BNI Syariah pada tahun 2016 mampu tumbuh sebesar 25,41% menjadi Rp24,23 triliun atau melebihi pertumbuhan DPK perbankan syariah yang tumbuh sebesar 20,83%. Ditopang oleh pertumbuhan DPK yang cukup signifikan, pangsa pasar DPK BNI Syariah membaik menjadi 8,68% pada tahun tersebut atau lebih baik dari pangsa pasar tahun sebelumnya sebesar 8,36%.

Pangsa Pasar Berdasarkan Dana Masyarakat

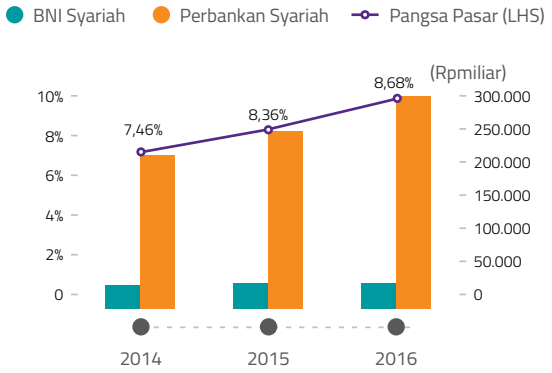

Sumber: OJK, Bank Indonesia

ANALISA MAKRO DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

BNI Syariah mampu mempertahankan kualitas kinerja di tengah peningkatan aset seiring dengan aktivitas pembiayaan yang terus tumbuh secara konsisten. Rasio kecukupan modal BNI Syariah masih terjaga dengan baik ditopang dengan peningkatan permodalan khususnya yang berasal dari modal inti utama (CET 1) dengan rasio CAR sebesar 14,92% pada tahun 2016. Secara umum CAR BNI Syariah masih berada diatas CAR minimum *requirement* yaitu 9,38%.

Selain itu, kualitas pembiayaan BNI Syariah juga dikelola dengan sangat baik di tengah peningkatan aktivitas pembiayaan sepanjang tahun 2016. NPF *gross* mampu bertahan di level 2,94% atau jauh lebih rendah dibandingkan NPF gross perbankan syariah sebesar 4,16%. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pembiayaan BNI Syariah yang mampu diimbangi dengan penyerapan DPK yang lebih besar menyebabkan rasio FDR BNI Syariah berada di bawah level industri perbankan syariah yakni sebesar 84,57%. Selain itu, ditopang dengan tingkat BOPO yang relatif lebih baik pengelolaannya dibandingkan industri perbankan syariah yakni sebesar 87,67% turut membuat ROA Bank BNI Syariah membaik menjadi 1,44% atau melebihi kinerja industri bank syariah yang hanya mencapai 0,94%.

Perbandingan Kinerja

	BNI Syariah	Perbankan Syariah
CAR	14,92%	15,95%
FDR	84,57%	88,78%
NPF Gross	2,94%	4,16%
BOPO	87,67%	93,63%
ROA	1,44%	0,94%

Sumber: OJK, Bank Indonesia

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Fokus Pengembangan Bisnis Perbankan Tahun 2016

Bank BNI Syariah sebagai salah satu Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai produk perbankan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan semua nasabah. Peran penting BNI Syariah diwujudkan dengan mempertajam fokus bisnis dengan menyediakan berbagai produk perbankan yang lebih inovatif dan berkualitas di samping memperkuat jaringan distribusi untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan produktivitas. Secara umum, segmen operasi BNI Syariah dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk yakni Komersial, Konsumer dan Ritel, Mikro & Tresuri sebagai berikut:

Segmen Bisnis	Keterangan
Komersial	Pembiayaan yang diberikan dan transaksi-transaksi perbankan lainnya atas nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala menengah/komersial
Konsumer dan Ritel	Pembiayaan konsumer dan ritel produktif antara lain pembiayaan kepemilikan rumah, kartu pembiayaan, serta termasuk pembiayaan yang diberikan kepada individu dengan skala kecil dan menengah, dan produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah
Mikro	Pembiayaan konsumtif dan produktif kepada nasabah dengan skala mikro, termasuk pula produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah
Tresuri dan Internasional	Pada kegiatan Tresuri termasuk transaksi valuta asing, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Antar Bank (SIKA), serta aktif dalam melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder termasuk antara lain bisnis perbankan internasional

I. Bisnis Komersial & Menengah

Pertumbuhan bisnis BNI Syariah hingga kini ditopang oleh segmen bisnis komersial sebagai salah satu segmen usaha penting BNI Syariah. Segmen bisnis ini menyalurkan produk pembiayaan produktif komersial yang terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi dengan *akad murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan signifikan selama tahun 2016 adalah:

A. Konstruksi
Meningkat 165% dari Rp248 miliar tahun 2015 menjadi Rp695 miliar di tahun 2016

B. Pengangkutan ,Pergudangan dan Telekomunikasi
Meningkat 46,2% di tahun 2016 menjadi sebesar Rp312,6 miliar yang sebelumnya di tahun 2015 Rp214 miliar

C. Perdagangan , Restoran dan Hotel
Meningkat 31,4% menjadi sebesar Rp1,8 triliun di tahun 2016 dibanding tahun 2015 menjadi Rp1,36 triliun

Segmentasi Nasabah	Segmentasi Nasabah	Segmentasi Nasabah
Nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala komersial	Pembiayaan kepada sektor infrastruktur	Disalurkan dengan pola Supply Chain Financing dengan menggunakan akad Anjak Hutang atau Anjak Piutang
	Pembiayaan kepada sektor Pengangkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	Disalurkan baik untuk pembiayaan modal kerja atau investasi
	Pembiayan kepada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	Disalurkan baik untuk pembiayaan modal kerja atau investasi
	Pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha	Pembiayan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan dengan jumlah besar yang sulit dibiayai oleh suatu bank

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih melambat akibat perekonomian dunia yang masih lesu menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembiayaan komersial. Di tengah kondisi tersebut, BNI Syariah berusaha untuk membukukan pembiayaan komersial yang sehat dengan strategi pemilihan dan pemilahan nasabah yang akan dibiayai serta fokus pembiayaan pada industri-industri yang prospektif.

Secara kumulatif nilai *outstanding* pembiayaan komersial masih mampu membukukan pertumbuhan sebesar 11,11% pada tahun 2016. Total *outstanding* pembiayaan komersial meningkat menjadi Rp3,40 triliun di tahun 2016. Sementara itu, dari sisi kualitas pembiayaan, NPF (*Non-Performing Financing*) pembiayaan produktif komersial BNI Syariah meningkat menjadi sebesar 5,10% dibandingkan NPF tahun sebelumnya sebesar 1,91% pada tahun 2015 akibat tekanan eksternal terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan BNI Syariah untuk dapat mempertahankan pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan ditopang oleh berbagai strategi bisnis yang dijalankan dengan terukur dan dikelola dengan baik sebagai berikut:

No	Strategi Bisnis	Realisasi 2016
1	Antisipasi memburuknya kondisi nasabah yang dilakukan melalui pengawasan IKRA (Indeks Kerentanan) dan melakukan langkah pencegahan untuk nasabah-nasabah yang menunjukkan tanda-tanda penurunan kinerja	1. Intensif monitor & melakukan *early restructuring* untuk nasabah-nasabah yang berada dalam *watch list* (memiliki kerentanan dalam penurunan kualitas pembiayaan). 2. Penurunan konsentrasi pembiayaan dan rendahnya ekspansi pada sektor industri tertentu yang berkualitas rendah
2	Penyempurnaan *career path* untuk marketing produktif	Telah melakukan penajaman fokus bisnis dengan menyusun kembali struktur organisasi peningkatan kapabilitas SDM serta penyempurnaan *career path management* di sektor komersial.

Segmen bisnis komersial menjalankan kegiatan pemasaran pada tahun 2016 berupa:

1. Fokus pada pertumbuhan selektif dengan meningkatkan sinergi dengan BNI Induk antara lain dengan menggarap *supply chain* dari nasabah-nasabah korporat BNI.
2. Meningkatkan *profit fee based income* (*trade finance*) dengan memberikan fasilitas pembiayaan anjak piutang/anjak hutang kepada BUMN dan vendor-vendor maupun sub kontraktor proyek-proyek pemerintah.
3. Fokus pada pembiayaan *linkage* dengan pola *executing* maupun *chanelling* dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi tahun 2016.

Implementasi strategi bisnis yang terukur dan dikelola dengan baik yang dikombinasikan dengan kegiatan pemasaran yang beragam sepanjang tahun 2016 memberikan dampak positif atas pencapaian kinerja bisnis komersial pada tahun 2016. BNI Syariah mampu membukukan pertumbuhan pendapatan margin bersih sebesar 4,02% menjadi Rp296,37 miliar ditopang oleh peningkatan aset sebesar 5,37% menjadi Rp3,12 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan pendapatan margin bersih dan total aset asing-masing sebesar Rp284,92 miliar dan Rp2,96 triliun.

Kinerja Segmen Bisnis Komersial

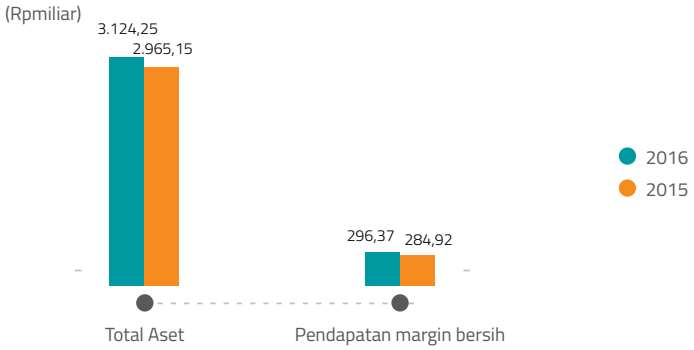

Strategi 2017

BNI Syariah telah menyiapkan beberapa strategi utama untuk segmen bisnis komersial memasuki tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. *Selective growth* pada *selective player*.
2. *Sinergy* pembiayaan dengan BNI Induk dengan menggarap *Supply Chain Financing* (SCF) nasabah-nasabah Korporasi BNI Induk.
3. Ekspansi dengan fokus pada komunitas bisnis, antara lain komunitas pengusaha muslim, asosiasi pengusaha-pengusaha pada sektor industri *prospective* dan asosiasi himpunan pengusaha *travel* Haji dan Umrah.
4. Mengoptimalkan potensi *Fee Based Income* (FBI) dengan cara mendorong *Trade Finance* di BNI Syariah, antara lain mendorong pembiayaan anjak hutang/piutang dari nasabah-nasabah BUMN.
5. Melakukan pemantauan dan penagihan *intensif* kepada nasabah yang termasuk dalam *watch list*.
6. Melakukan Restrukturisasi, *Reschedule* dan *Recondition* (R3) secara dini untuk nasabah yang masih memenuhi syarat 3 Pilar restrukturisasi pembiayaan.
7. Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pembiayaan serta penyempurnaan dan pengembangan fitur produk-produk eksisting.
8. Pemberian pembekalan melalui pelatihan pembiayaan kepada *Branch Manager* dan perangkatnya

II. Bisnis Konsumer dan Ritel

Nasabah individu mendapatkan perhatian lebih oleh BNI Syariah karena nasabah ini merupakan target pasar untuk produk-produk pembiayaan yang dikembangkannya. Pembiayaan untuk segmen bisnis konsumer dan ritel mencakup diantaranya pembiayaan kepemilikan rumah, kartu pembiayaan, dan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada individu dengan skala kecil dan menengah. Selain itu, di saat yang bersamaan, berbagai produk simpanan dan layanan perbankan lainnya dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masing-masing nasabah individu ini.

Segmentasi Nasabah	Kriteria Utama	Keterangan
Nasabah individu	Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan (BNI Multiguna iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp50 juta dan maksimum Rp2 Miliar

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Segmentasi Nasabah	Kriteria Utama	Keterangan
Nasabah individu	Fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* untuk pembelian kendaraan bermotor (BNI Oto iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp5 Juta dan maksimum Rp1 Miliar
	Pembiayaan yang dijamin dengan simpanan yang diterbitkan BNI Syariah (BNI CCF iB Hasanah)	Maksimum pembiayaan sebesar 95% (untuk Simpanan Rupiah) dan 60% (untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal Deposito/ Tabungan/Giro atas nama yang dijaminkan
	Pembiayaan konsumtif untuk Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umrah (BNI Fleksi Umrah iB Hasanah)	Maksimum pembiayaan Rp200 juta
	Kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah (Hasanah *Card*)	Terdiri dari 3 jenis kartu : *classic*, *gold* dan *platinum*
	Pembiayaan konsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent (BNI Griya iB Hasanah)	Maksimum Pembiayaan Rp5 Miliar
Nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala kecil dan menengah	Pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif untuk modal kerja dan investasi) (BNI Syariah Wirausaha)	*Plafond* pembiayaan minimal Rp50 Juta dan maksimum Rp1 (satu) Miliar
	Pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dalam negeri dalam bentuk mata uang valuta asing (BNI Syariah Valas)	Minimal pembiayaan sebesar US$ 25,000.00
Nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala kecil dan menengah	Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai (BNI Syariah Kopkar/Kopeg)	Disalurkan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai
	Pembiayaan kepada *dealer* dengan cara penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank (BNI Syariah *Dealer* iB Hasanah)	*Main Dealer* dari Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau *Dealer* resmi yang memiliki Surat Penunjukan *Dealer* dari Main *Dealer*/ ATPM
	Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* (BNI Syariah Tunas Usaha)	Plafond pembiayaan minimal Rp20 Juta dan maksimum RpRp500 Juta
	Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil (BNI Syariah Usaha Kecil)	*Plafond* pembiayaan sampai dengan Rp10 (sepuluh) Miliar
	Pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah (BNI Syariah *Linkage* Program)	Diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah)

Bisnis Konsumer

Pembiayaan bisnis konsumer masih mendominasi portepel pembiayaan BNI Syariah dengan proporsi sekitar 53,26% pada tahun 2016. Di tengah tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016, bisnis pembiayaan konsumer BNI Syariah di tahun 2016 tetap tumbuh dengan penyaluran pembiayaan yang meningkat sebesar 16,56% menjadi Rp10,92 triliun dari sebelumnya sebesar Rp9,36 triliun pada tahun 2015.

BNI Griya iB Hasanah yang merupakan produk unggulan BNI Syariah selama beberapa tahun terakhir masih menjadi produk yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyaluran pembiayaan konsumer di tahun 2016, yaitu sebesar 85,53% dari total pembiayaan konsumer. Pembiayaan rumah ini memprioritaskan pada pembiayaan rumah pertama. Secara keseluruhan, BNI Syariah tetap perhatian terhadap kualitas pembiayaan konsumer yang telah disalurkannya, hal tersebut dapat terlihat dari tingkat pembiayaan konsumer yang bermasalah masih dapat terjaga di kisaran angka 1,84%. Uraian lebih jelas atas produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah pada segmen ini beserta persentase kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Produk	Persentase Portofolio terhadap Total Produk Konsumer				
	2012	2013	2014	2015	2016
BNI Griya iB Hasanah	70,52%	77,81%	82,37%	83,67%	85,53%
BNI Multiguna iB Hasanah	1,44%	2,12%	3,44%	6,14%	8,58%
BNI Fleksi iB Hasanah	2,12%	1,53%	1,29%	1,17%	1,14%
BNI Fleksi Umrah iB Hasanah	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%
BNI *Murabahah* Emas iB Hasanah	0,00%	1,40%	0,59%	0,23%	0,09%
BNI THI iB Hasanah	17,81%	12,97%	7,24%	3,45%	0,81%
BNI *Rahn* iB Hasanah	4,64%	0,72%	0,36%	0,14%	0,00%
Lainnya	3,46%	3,45%	4,71%	5,20%	3,79%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Untuk menunjang pertumbuhan pembiayaan konsumer, BNI Syariah melakukan beberapa kegiatan pemasaran produk pembiayaan konsumer yang dilaksanakan selama tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pemasaran melalui marketing eksternal yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah yang dioptimalkan dengan pemberian insentif atas penjualan produk-produk pembiayaan BNI Syariah. Selain itu, nasabah juga akan diberikan *reward-reward* yang bertujuan untuk menarik perhatian nasabah pembiayaan BNI Syariah.
2. Pemasaran langsung ke institusi – institusi besar yang berkembang di Indonesia sebagai nasabah yang potensial. Dalam hal ini, Divisi Konsumer dan Pembiayaan Kartu telah membuat program-program pemasaran langsung ke institusi-institusi tersebut. Hal ini dapat memudahkan bagi calon nasabah yang ingin menjadi nasabah di BNI Syariah.

Strategi 2017 (Pembiayaan Konsumer)

Sebagai salah satu kontributor utama bisnis BNI Syariah, pembiayaan konsumer akan menghadapi tantangan di tahun 2017 dengan fokus pada ekspansi pembiayaan yang *prudent* serta kualitas pembiayaan yang terkendali. Strategi-strategi yang telah disiapkan antara lain :

1. BNI Syariah melakukan penyesuaian fitur serta mengembangkan produk – produk pembiayaan pada BNI Syariah. BNI Syariah akan melakukan aktivitas pembelian aset langsung yang akan menjadi objek yang akan dijual dalam produk Griya iB Hasanah. Hal ini bertujuan agar BNI Syariah mampu menawarkan kepada nasabah yaitu aset-aset yang memiliki harga kompetitif, serta

memberikan keamanan dan kenyamanan mengenai kepastian dalam pembangunan rumah.

2. BNI Syariah CFD akan menjalin kerja sama dengan *partner* professional dalam bidang properti untuk memasarkan BNI Griya iB Hasanah untuk merespon pertumbuhan bisnis prosperti khususnya di kota-kota besar di Indonesia.
3. Unit Pembiayaan Konsumer akan memaksimalkan pemasaran Umrah tersebut dengan cara mengoptimalkan kerja sama dengan *travel – travel agent* yang ada. Peluang dari bisnis umrah sangat besar karena peminat Umrah di Indonesia terus meningkat sekitar 20% tiap tahunnya.
4. Dari sisi pemantauan dan kualitas pembiayaan, Unit Pembiayaan Konsumer akan meningkatkan mitigasi risiko kepada nasabah – nasabah yang memiliki potensi besar terjadinya *Non Performance Finance (NPF)* dengan cara melakukan pembatasan – pembatasan kepada nasabah yang berisiko lebih tinggi.

Bisnis Kartu Pembiayaan

BNI Syariah telah menyediakan pembiayaan kepada para pelanggan individu melalui kartu pembiayaan atau BNI iB Hasanah *Card* (Kartu Hasanah). Kartu Hasanah ini berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. Terdapat tiga akad yang dipakai dalam pembiayaan Kartu Hasanah yakni akad *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Kartu Hasanah terdiri dari 3 jenis kartu yakni *classic*, *gold* dan *platinum*.

Perkembangan bisnis pembiayaan kartu Hasanah juga tidak terlepas dari berbagai tantangan di tahun 2016. Oleh karena itu, BNI Syariah melakukan terobosan dengan melakukan penggabungan fungsi bisnis pengelolaan kartu pembiayaan yang sebelumnya dikelola oleh Divisi Bisnis Kartu digabung dengan Divisi Pembiayaan Konsumer menjadi Divisi Konsumer dan Kartu Pembiayaan. Strategi ini dijalankan untuk tujuan efisiensi strategi bisnis yang sama-sama membidik bisnis konsumer.

Terobosan ini terbukti efektif di tengah persaingan bisnis kartu kredit yang begitu ketat dan adanya penerapan regulasi baru dari Bank Indonesia mengenai pembatasan kepemilikan kartu pembiayaan. BNI Syariah mampu melampaui target akuisisi kartu pembiayaan di tahun 2016. Dari target akuisisi kartu baru sebanyak 20.000 kartu, BNI Syariah berhasil memperoleh kartu baru sebanyak 21.133 kartu sehingga total jumlah kartu iB Hasanah *Card* sampai akhir tahun 2016 mencapai 262.189 kartu. Pada tahun 2016, bisnis Kartu Hasanah mencapai 93,27% dari target yang ditetapkan di awal tahun 2016 yaitu dengan volume penjualan menunjukkan Rp1,29 triliun. Secara keseluruhan, *outstanding* pembiayaan kartu Hasanah mencapai Rp367,60 miliar.

Strategi yang telah dijalankan sepanjang tahun 2016 adalah *Launching CoBranding* Kartu iB Hasanah dengan beberapa perusahaan Travel penyelenggara Haji dan Umrah untuk memberikan benefit tambahan kepada para jamaah umrah untuk memudahkan transaksi di tanah suci. Selain itu, program dukungan kepada dunia pendidikan melalui program beasiswa kepada anak didik (Program donasi pemegang Hasanah *Card* bekerja sama dengan pihak ketiga) untuk implementasi strategi dengan konsep *non-excessive spending*.

Dalam hal pemasaran Kartu iB Hasanah, BNI Syariah memiliki beberapa strategi yakni:

1. Fokus kepada target segmen pasar dengan risiko yang lebih baik diantaranya nasabah eksisting baik dana maupun pembiayaan, calon nasabah dari Institusi pemerintah, perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta yang sudah mempunyai nama besar dan berkualitas baik.
2. Berafiliasi dengan perusahaan induk yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bentuk sinergi dan efisiensi serta percepatan pencapaian jumlah kartu di awal tahun melalui tenaga pemasarnya.
3. Pemasaran juga difokuskan kepada komunitas-komunitas antara lain majelis taklim perkantoran, komunitas travel haji dan umrah, dan asosiasi perbankan syariah.
4. Melakukan pemasaran kartu iB Hasanah Card melalui 5 kanal akuisisi (*direct sales, tele sales,* kantor cabang, *corporate/ community* dan sinergi dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNI Induk.

5. Membidik target pembiayaan terbesar adalah untuk keperluan konsumtif seperti: *supermarket* dan toko swalayan, alat telekomunikasi termasuk penjualan ponsel, agen travel dan tur, serta toko busana keluarga.

Selain itu, pengembangan dari sisi transaksi kartu Hasanah adalah penggunaan PIN 6 digit baik di seluruh *merchant* dan ATM untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Pemegang Kartu sehingga dapat memitigasi penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara pengembangan dari sisi produk-produk *derivative*, yaitu *CoBranding* dan *Customisation/Community* Hasanah *Card* yang bertujuan untuk membuka kanal-kanal baru dalam melakukan proses akuisisi, serta memberikan solusi terhadap kebutuhan para komunitas serta institusi yang menginginkan kartu yang bersifat ekslusif.

Strategi 2017 (Pembiayaan Kartu Hasanah)

BNI Syariah telah menyusun beberapa strategi untuk mewujudkan pertumbuhan yang optimal di 2017 yaitu

1. Meningkatkan *customer base* dengan lebih fokus pada *captive market* yang berasal dari nasabah dana dan pembiayaan BNI Syariah serta pengembangan kerja sama kepada komunitas, asosiasi dan instansi.
2. Meningkatkan *skill* dan *knowledge* tenaga pemasar Hasanah *Card* yang berada di kantor pusat maupun di Cabang sehingga diharapkan para pemasar yang ada saat ini dapat lebih mengedepankan "*da'wah first*" dibandingkan dengan "*product first*".
3. Meningkatkan kerja sama bisnis dengan pihak ketiga terutama dengan partner penyedia *e-commerce* sehingga hasanah *card* dapat memberikan solusi atas kebutuhan nasabah sehingga memberikan *user experience* yang baik.
4. Meningkatkan nasabah yang aktif bertransaksi menggunakan hasanah *card* dengan memberikan program dan fitur yang dibutuhkan kemudian mengkomunikasikan dengan media yang secara efektif dan efisien dapat diterima oleh nasabah.
5. Mengoptimalkan fungsi jaringan Kantor Cabang BNI Syariah, dalam melakukan pemasaran, proses analisa dan penagihan hasanah *card*.

Bisnis Ritel Produktif

Para pelaku segmen usaha kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki peran penting di Indonesia. Oleh karena itu, BNI Syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada para nasabahnya yang memiliki usaha produktif dengan skala kecil dan menengah. Pembiayaan syariah yang diberikan oleh BNI Syariah digunakan oleh para nasabahnya untuk tujuan produktif baik modal kerja maupun investasi. Untuk para pelaku bisnis ritel produktif yang berorientasi ekspor, BNI Syariah juga menyediakan fasilitas pembiayaan kepada eksportir untuk tujuan ekspor.

Faktor eksternal terkait aktivitas perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan juga memberikan pengaruh kepada pembiayaan segmen ritel produktif. Pertumbuhan pembiayaan segmen ritel produktif *netto* sebesar 16,41% pada tahun 2016 merefleksikan kondisi perekonomian yang melemah dibandingkan dengan pertumbuhan yang lebih besar pada tahun sebelumnya sebesar 21,75%. BNI Syariah mengupayakan pertumbuhan yang sehat dengan strategi pemilihan dan pemilahan nasabah yang akan dibiayai (*selektif player*) serta fokus pembiayaan hanya memasuki industri yang prospektif untuk menghadapi tantangan eksternal tersebut.

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi, BNI Syariah menjalankan beberapa strategi untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk pembiayaan segmen ritel dan produktif. Secara internal, BNI Syariah menerapkan strategi diantaranya *close monitoring*, *assessment* yang lebih fokus pada industri yang berprospek baik dengan mengkombinasikan peran *Area Manager* untuk meningkatkan bisnis pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. Secara ringkas strategi yang dijalankan pada tahun 2016 dan realisasinya diringkas dalam tabel berikut:

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

No	Strategi 2016	Realisasi 2016
1	Memperbaiki kualitas pembiayaan dengan penerapan pola *close monitoring*.	▪ Melakukan kebijakan konsolidasi pada cabang-cabang dengan NPF & Pra NPF yang tinggi. ▪ Pemantauan secara intensif kepada nasabah yang berada dalam *watch list*
2	Melakukan proses *assessment* dengan lebih dalam	Memberikan pelatihan *soft skill* untuk meningkatkan kapabilitas SDM terkait pembiayaan ritel produktif kepada Pemimpin Cabang dan Perangkatnya.
3	Pengendalian pembiayaan Pra *Non Performing Financing*	Pemantauan secara intensif dan penyelamatan dini terhadap nasabah-nasabah yang masuk dalam kategori *watch list*.
4	Memperkuat fungsi dan tugas *Area Manager* untuk meningkatkan bisnis pembiyaan Usaha Kecil dan Menengah	Telah ditetapkan *Business Development Manager* yang bertanggung jawab melakukan supervisi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah per area kerja, serta bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan kualitas pembiayaan.
5	Penyesuaian *Grading* Petugas pembiayaan cabang untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan produktif	Penyempurnaan *career path* dengan jenjang karir yang lebih pasti.

Segmen bisnis ritel produktif menjalankan kegiatan pemasaran pada tahun 2016 berupa:

1. Melakukan ekspansi pembiayaan fokus pada industri berprospek baik dengan membiayai usaha nasabah yang bergerak di sektor-sektor tertentu yang dipilih dan memberikan pembiayaan *Trade Finance*, antara lain anjak hutang/piutang
2. Melakukan *cross-selling* nasabah ritel produktif dengan peningkatan *product holding* pada nasabah-nasabah BNI Syariah dan peningkatan utilisasi *product and services* bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah

Strategi 2017

Beberapa strategi utama telah disiapkan oleh BNI Syariah untuk segmen bisnis usaha ritel produktif untuk menghadapi tantangan di tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. *Selective growth* pada *selective player*.
2. Sektor-sektor unggulan disetiap cabang yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
3. *Sinergy* pembiayaan dengan BNI Induk dengan menggarap *Supply Chain Financing* (SCF) nasabah-nasabah Korporasi BNI Induk.
4. Ekspansi dengan fokus pada komunitas bisnis, antara lain komunitas pengusaha muslim, asosiasi pengusaha-pengusaha pada sektor industri *prospective* dan asosiasi himpunan pengusaha *travel* Haji dan Umrah.
5. Mengoptimalkan potensi *Fee Based Income* (FBI) dengan cara mendorong *Trade Finance* di BNI Syariah, antara lain mendorong pembiayaan anjak hutang/piutang dari nasabah-nasabah BUMN.
6. Melakukan pemantauan dan penagihan *intensif* kepada nasabah yang termasuk dalam *watch list*.
7. Melakukan Restrukturisasi, *Reschedule* dan *Recondition* (R3) secara dini untuk nasabah yang masih memenuhi syarat 3 Pilar restrukturisasi pembiayaan.
8. Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pembiayaan serta penyempurnaan dan pengembangan fitur produk-produk eksisting.

9. Pemberian pembekalan melalui pelatihan pembiayaan kepada Pemimpin Cabang dan perangkatnya

Secara kumulatif, segmen bisnis konsumer dan ritel mampu menunjukkan perbaikan kinerja secara konsisten setiap tahunnya. Selain itu, aset dari bisnis konsumer dan ritel tumbuh sebesar 16,70% menjadi Rp16,15 triliun pada tahun 2016. BNI Syariah mampu membukukan pertumbuhan pendapatan margin bersih sebesar 24,89% menjadi Rp1.072,10 miliar pada tahun 2016, lebih baik dari pencapaian tahun 2015 sebesar Rp858,41 miliar.

Kinerja Segmen Konsumer dan Retail

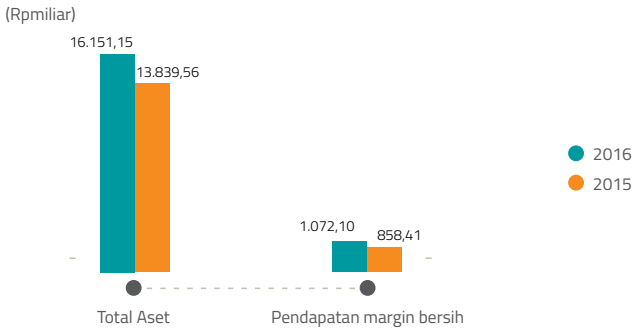

Bisnis Dana

Divisi Dana & Transaksi BNI Syariah memiliki peran aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pengelolaan dana pihak ketiga bank. Divisi Dana & Transaksi memfokuskan diri terhadap pengembangan bisnis penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BNI Syariah. Selama tahun 2016, BNI Syariah berhasil menghimpun dana pihak ketiga senilai Rp24,23 triliun atau meningkat Rp4,91 triliun atau tumbuh 25,41% dari pencapaian tahun lalu. Dari ketiga jenis produk DPK, peningkatan nominal tertinggi pertama diraih oleh deposito sebesar Rp2,28 triliun atau tumbuh 21,97%, kedua diraih produk tabungan sebesar Rp2.01 triliun atau tumbuh 27,16% dan terakhir produk giro sebesar Rp611,25 miliar atau tumbuh 40,56%.

Dana pihak ketiga pada rekening giro dan tabungan (*Current Account Saving Account*/CASA) meningkat Rp2,62 triliun menjadi Rp11,54 triliun dari posisi Rp8,91 triliun atau tumbuh 29,42% dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif, kontribusi CASA terhadap total DPK meningkat 1,48% menjadi 47,63% dibandingkan kontribusi tahun 2015 sebesar 46,15%.

(dalam Juta rupiah)

	2015		2016		Pertumbuhan	
	Nominal	NoA	Nominal	NoA	Nominal	NoA
Giro	1.507.193	15.759	2.118.443	19.490	40,56%	23,68%
Tabungan	7.410.669	1.767.492	9.423.380	2.143.419	27,16%	21,27%
Deposito	10.404.894	33.860	12.691.187	38.572	21,97%	13,92%
Total	19.322.756	1.817.111	24.233.010	2.201.481	25,41%	21,15%

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Peran produk simpanan sangat penting bagi BNI Syariah untuk mendapatkan DPK dari para nasabah. Produk simpanan nasabah berupa giro dan tabungan mendominasi profil nasabah DPK BNI Syariah dengan kontribusi sekitar 98,25% dari perkiraan total nasabah DPK tahun 2016. Untuk Komposisi produk tabungan, produk simpanan tabungan iB Hasanah mendominasi nominal pertumbuhan sebesar Rp1,29 triliun menjadi Rp6,35 triliun atau tumbuh 25,45%. Peningkatan nominal kedua disusul oleh produk simpanan Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah sebesar Rp269 miliar menjadi Rp1,55 triliun atau tumbuh 21,04% dan peningkatan nominal ketiga disusul oleh produk simpanan tabungan BNI Baitullah iB Hasanah sebesar Rp249 miliar atau tumbuh 34,48%.

(dalam Juta rupiah)

	2015		2016		Pertumbuhan	
	Nominal	NoA	Nominal	NoA	Nominal	NoA
iB Hasanah	5.063.377	1.269.255	6.352.120	1.502.912	25,45%	18,41%
iB Bisnis Hasanah	1.279.376	19.220	1.548.547	21.887	21,04%	13,88%
iB *Baitullah* Hasanah	722.072	364.648	971.055	420.614	34,48%	15,35%
iB Prima Hasanah	125.834	1.885	239.122	1.409	90,03%	(25,25%)
iB Tunas Hasanah	114.721	96.286	179.083	179.058	56,10%	85,96%
iB Tapenas Hasanah	105.290	16.198	133.452	17.539	26,75%	8,28%
Total	7.410.669	1.767.492	9.423.379	2.143.419	27,16%	21,27%

Peran signifikan atas produk simpanan nasabah dalam hal ini tabungan iB Hasanah juga dapat dilihat dari jumlah pemegang kartu debit sepanjang tahun 2016. Pemegang kartu debit Hasanah mampu melonjak ke level 2.363.817 pelanggan, atau tumbuh sebesar 49,6%.

(dalam Juta rupiah)

	2015	2016	Pertumbuhan
iB Hasanah	1.580.084	2.363.817	49,6%
iB Tunas Hasanah	56.458	75.108	33,0%
iB Bisnis Hasanah	26.960	38.567	43,1%
iB *Baitullah* Hasanah	3.215	8.065	150,9%
iB Prima Hasanah	-	284	-
Total	1.666.717	2.485.841	49,1%

Strategi 2016	Realisasi 2016
Fokus pada pemasaran produk Tabungan iB Hasanah	Kerja sama dengan komunitas-komunitas dan asosiasi serta instansi yang memiliki potensi bisnis
Pengembangan *sharia link* (sistem pembayaran dengan fitur yang sama dengan BNI Induk)	Kerja sama dengan institusi pendidikan, kesehatan dan swasta dengan penggunaan produk *Student Payment Center (SPC)*, host to host dan *virtual Account*
Kerja sama *co branding*	Kerja sama dengan berbagai institusi di antaranya adalah RS Muhammadiyah Lamongan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, PT GS Battery dan AJB Bumiputera.

Pengembangan produk baru uang tunai dalam bentuk kartu	Peluncuran *TapCash* Hasanah bekerja sama dengan BNI Induk dan dapat digunakan juga pada *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan BNI Induk.
Kerja sama level corporate	Pengembangan bisnis dana melalui metode *supply chain* dengan pemanfaatan layanan dan produk perbankan BNI Syariah dengan berbagai institusi BUMN.
Inisiasi program Wakaf Hasanah	Mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk donasi wakaf (Wakaf Hasanah dan Wakaf Al Quran)
Bersinergi dengan BNI Induk	Pembukaan rekening dan layanan transaksi melalui outlet BNI Induk dan menempatkan pegawai BNI Syariah

Kegiatan Pemasaran 2016

Berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. BNI Syariah berperan aktif dalam kegiatan pemasaran yang diadakan untuk nasabah BNI Syariah yang sudah ada ataupun aktivitas komunitas yang memiliki potensi bisnis yang besar seperti komunitas butik, komunitas pengusaha, komunitas pekerja migran.
2. Pemberian dana *sponsorship* pada *event-event* tertentu yang memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat seperti berpartisipasi dalam kegiatan bersama maskapai Garuda untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah Haji dan Umrah,
3. Berpartisipasi dalam *event* regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memajukan ekonomi syariah di Indonesia dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama LPPOM MUI untuk mendukung aktivitas bisnis halal berskala internasional dan mendorong terwujudnya gaya hidup tanpa riba melalui promosi Riba *Amnesty* bersama Universitas Trisakti.
4. BNI Syariah juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama bisnis melalui pemanfaatan layanan dan produk dengan beberapa instansi BUMN dan Kementerian, dan BUMN.
5. BNI Syariah juga telah menginisiasikan dan meluncurkan program sosial masyarakat bekerja sama dengan 5 lembaga *Nazhir* berupa program Wakaf Hasanah, di mana BNI Syariah memberikan dukungan fasilitas menerimaan dana Wakaf Produktif dan Wakat Al Quran yang manfaat dan nilainya dapat dikelola oleh *Nazhir* yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah.
6. Sosialisasi Produk Dana ke seluruh *Customer Service* BNI Induk dan menggerakkan *mystery shopper* ke seluruh SCO di Wilayah Jakarta dan Wilayah Bandung guna menjaga kualitas dan aksesibilitas layanan.

Selain itu BNI Syariah juga meluncurkan berbagai program dalam rangka meningkatkan minat masyarakat akan pentingnya menabung sejak dini dengan menggunakan berbagai produk Tabungan BNI Syariah.

Strategi 2017

Tahun 2017 merupakan tahun yang cukup menantang untuk perkembangan penghimpunan dana dan transaksi bagi BNI Syariah. Untuk itu, terdapat beberapa strategi yang dipersiapkan untuk pengembangan bisnis dana sebagai berikut

- Melakukan perbaikan pada *transactional tools* diantaranya seperti aplikasi mobile banking, pengembangan produk Hasanah *Payment* (produk PPOB) dan optimalisasi penjualan produk BNI *Direct* dan *Virtual Account/E-Collection.*
- Meningkatkan *value proposition* BNI Syariah sebagai bank pilihan masyarakat dalam transaksi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf) yang tidak terlepas dari Hasanah *Lifestyle* lewat berbagai macam program ZISWAF seperti Wakaf hasanah, Tabungan Qurban, Infaq Hasanah, Kalkulator Zakat dan Wakaf Al Quran.

- Modifikasi maupun inovasi fitur dan fasilitas produk akan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan trend produk di pasar perbankan, seperti peningkatan fitur ATM Kartu Haji dan Umroh.
- Kemudian juga pembentukan unit bisnis baru yang menangani *bancassurance* dan DPLK sebagai upaya untuk memperlengkap kebutuhan masyarakat akan adanya produk asuransi dan dana pensiun sehingga dapat menambah *fee based income* BNI Syariah.
- Memperluas dan meningkatkan pasar bisnis dana dengan memperbanyak jumlah Customer *revamping Payroll Account/Payroll Loan* (kombinasi fasilitas *payroll* dengan pembiayaan) dengan menyasar kepada institusi-institusi besar.
- Mengimplementasikan konsep *dakwah first business follow* melalui peluncuran program pemberdayaan masjid dan dapat sekaligus dimanfaatkan sebagai sosialisasi perbankan syariah dan sosialiasi produk BNI Syariah.

Bisnis Haji dan Umrah

BNI Syariah merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai BPS BPIH sejak 28 Desember 2010 dan ditunjuk kembali sejak tanggal 2 Januari 2014. Selain itu, pada tahun 2015 BNI Syariah juga ditunjuk sebagai salah satu Bank Syariah Pengelola Dana Abadi Umat sesuai dengan KMA No.405 tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah calon jamaah haji yang telah mendaftar dan mendapat porsi melalui BNI Syariah di tahun 2016 untuk Haji Reguler adalah sejumlah 330.418 calon jamaah dan Haji Khusus sejumlah 13.509 calon jamaah. Adapun jumlah dana setoran haji yang dikelola oleh BNI Syariah per 31 Desember 2016 telah mencapai Rp6,52 triliun dengan pertumbuhan jumlah jamaah haji terus meningkat setiap tahunnya. Selain dana haji BNI Syariah juga mengelola Dana Abadi Umat sejumlah Rp523 miliar.

Untuk mengantisipasi besarnya potensi bisnis haji dan umrah, BNI Syariah pada tahun 2016 telah membentuk Divisi Haji dan Umrah dan mencanangkan bisnis haji dan umrah sebagai salah satu *champhion product* sebagai *entry gate* bagi bisnis perbankan syariah lainnya. Dengan demikian tidak hanya penyiapan layanan dari sisi *funding* tapi juga dari sisi *financing* maupun operasional penunjangnya.

Melalui produk dana, BNI Syariah memilki Tabungan BNI iB *Baitullah* Hasanah yang berfungsi sebagai tabungan perencanaan haji atau umrah. Di mana salah satu kelebihan tabungan tersebut karena telah dilengkapi oleh Kartu Haji dan Umrah sebagai pelengkap untuk bertransaksi di tanah suci. Adapun total nasabah sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai 420.614 orang dengan *outstanding* senilai ±Rp1 triliun dan total pengguna kartu sebanyak 8.154 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk para jamaah BNI Syariah menyediakan produk pembiayaan Fleksi Umrah iB Hasanah dengan *outstanding* Rp6,20 miliar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan para Pengusaha Haji dan Umrah, BNI Syariah telah memberikan pembiayaan produktif kepada travel haji dan umroh dengan *outstansding* sebesar Rp151,88 miliar.

Selain itu BNI Syariah memberikan berbagai layanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk calon jamaah haji antara lain mencakup:

1. Memberikan "Kartu Haji & Umrah Indonesia" sebagai sarana tarik tunai dan berbelanja selama di tanah suci.
2. Membuat aplikasi *android* bagi pengguna

Kartu Haji & Umrah untuk memperbarui informasi yang dibutuhkan seperti peta, lokasi rumah sakit, lokasi masjid serta waktu shalat.
3. Melakukan sosialisasi kepada nasabah Ex BPS BPIH (sebelumnya di bank konvensional) yang akan berangkat ke tanah suci dalam rangka proses migrasi ke BNI Syariah.
4. Memberikan *souvenir* haji berupa batik haji, mukena, ihram, tas selempang, masker dan sajadah.
5. Mengembangkan *outlet* BNI untuk penerimaan setoran haji BNI Syariah (SCO Haji).

BNI Syariah telah menjalankan beberapa strategi untuk pencapaian target tahun 2016:

Strategi Bisnis	Realisasi bisnis Haji dan Umrah 2016
Meningkatkan *customer base* melalui pengembangan kerja sama dengan komunitas, asosiasi dan instansi.	BNI Syariah telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pendukung bisnis haji dan umrah antara lain Garuda Airlines (*Booking Seat*), Pegadaian Syariah dan Kopnus (Layanan Setoran BPIH Reguler), PPIU dan PIHK (Layanan & Promosi bersama), AMPHURI (asosiasi *travel* haji dan umrah), dan KORPRI (Flexi Umrah).
Optimalisasi pemasaran pada produk unggulan; 1. Tabungan BNI iB *Baitullah* Hasanah, 2. Fleksi Umrah iB Hasanah 3. Kartu Haji & Umrah	Selama tahun 2016 diantara produk unggulan BNI Syariah, produk dana (Tabungan BNI iB *Baitullah* hasanah) merupakan produk yang paling agresif pertumbuhannya yakni mencapai sebesar 58.5% jika dibandingkan tahun 2015.
Optimalisasi fungsi jaringan BNI	Untuk memperluas jaringan penerimaan pendaftaran BPIH reguler BNI Syariah memanfaatkan 138 *outlet Sharia Chaneling Office* (SCO) yang didalamnya termasuk 32 *outlet* kolokasi. Tahun 2017 akan ditambah pembukaan jaringan SCO di daerah yang belum terdapat BNI Syariah, terutama di daerah Indonesia timur.
Melakukan kerja sama bisnis melalui *joint promotion* berbagai *event*	Dalam rangka meningkatkan *brand awareness* ***joint promotion*** yang telah dilakukan: ▪ Umrah Keluarga Hasanah sebagai *Signature Event* yang memberangkatkan jamaah umrah 1 pesawat menjelang milad BNI Syariah ▪ GAUTFH (Garuda Umrah *Travel Fair Hasanah*) di Solo merupakan pameran haji dan umrah yang disponsori oleh BNI Syariah dan Garuda sebagai puncak kegiatan akhir tahun 2016
Pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mengantisipasi perkembangan pasar .	*Co Branding* dengan *Travel* Haji dan Umrah untuk anggota ataupun alumnus : ▪ NRA, Maktour dan Patuna (Kartu Haji & Umrah) ▪ Alia dan Aerohajj (Hasanah *Card Co Branding*)

Segmen bisnis haji dan umrah menjalani kegiatan pemasaran pada tahun 2016, berupa:
1. Optimalisasi Kerja sama dan *cross selling* dengan *Travel* Nasional dan Lokal.
2. Promo Kartu Haji dan Umrah: Sebelum keberangkatan haji, pada saat Haji (di tanah suci) dan setelah pelaksanaan haji
3. *Signature Event Program* "Umrah Keluarga Hasanah" dan "Garuda Umrah *Travel Fair* Hasanah"
4. Penerimaan layanan pendaftaran haji reguler di *outlet* SCO, melalui kerja sama dengan institusi baik pemerintah/swasta
5. Layanan penukaran Saudi Arabia Riyal (SAR) di beberapa embarkasi

Strategi 2017

Pada tahun 2017 bisnis haji dan umrah masih menjadi salah satu bisnis unggulan BNI Syariah dan menuntut kerja sama yang tinggi antar unit pendukung antara lain Divisi Konsumer & Pembiayaan kartu, Divisi Dana & Transaksi, Divisi Kecil & Menengah dan Divisi Komersial. Dalam rangka menghadapi tahun 2017, strategi

bisnis haji dan umrah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kerja sama dengan *travel* dan asosiasi haji umrah untuk pengembangan produk pembiayaan konsumer maupun produktif.
2. Meningkatkan *awareness* sebagai bank yang dapat melayani kebutuhan ibadah haji dan umrah di masyarakat, dengan prioritas bisnis sebagai leader umrah diantara bank-bank syariah.
3. Memaksimalkan *customer base* penerimaan produk dana melalui pengembangan kerja sama dengan komunitas, asosiasi dan instansi serta jaringan BNI.
4. Mengembangkan aplikasi *online* sebagai *channeling* pengembangan bisnis umrah dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk meningkatkan *fee based income*.
5. Mengembangkan sistem *switching* dan perbaikan sistem pendaftaran haji khusus.

III. Bisnis Mikro

Pembiayaan mikro BNI Syariah terdiri dari tiga produk yang dibagi berdasarkan *plafondnya* yaitu *Rahn* Mikro, Mikro 2 iB hasanah, dan Mikro 3 iB Hasanah. *Rahn* Mikro memiliki *plafond* mulai dari Rp500.000 hingga Rp50 juta untuk jangka waktu pembiayaan 3, 6, 9, hingga 12 bulan. Mikro 2 iB Hasanah memiliki *plafond* mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan hingga 36 bulan. dan mikro 3 iB Hasanah memiliki *plafond* >Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan sampai 60 bulan.

Sebagai bentuk komitmen BNI Syariah yang peduli terhadap sektor riil terutama sektor UMKM, maka pada tahun 2011 didirikanlah Divisi Bisnis Mikro untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mikro di BNI Syariah. Bisnis mikro BNI Syariah telah didukung 106 Kantor layanan mikro yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan utama BNI Syariah dalam mengembangkan ekspansi pembiayaan mikro adalah untuk membantu masyarakat/pengusaha kecil yang saat ini kesulitan melakukan akses ke lembaga perbankan (karena dinilai *unbankable*) dan membebaskan masyarakat/pengusaha kecil dari jeratan bunga (*riba*) lembaga keuangan non-formal (*maqasid syariah*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan standar kehidupan masyarakat/pengusaha kecil berpenghasilan rendah (*lower middle income*).

Pembiayaan mikro BNI Syariah terdiri dari tiga produk yang dibagi berdasarkan *plafondnya* yaitu *Rahn* Mikro, Mikro 2 iB hasanah, dan Mikro 3 iB Hasanah. *Rahn* Mikro memiliki *plafond* mulai dari Rp500.000 hingga Rp50 juta untuk jangka waktu pembiayaan 3, 6, 9, hingga 12 bulan. Mikro 2 iB Hasanah memiliki *plafond* mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan hingga 36 bulan. dan mikro 3 iB Hasanah memiliki *plafond* >Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan sampai 60 bulan.

Segmentasi Nasabah	Kriteria Utama	Keterangan
Nasabah individu	Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan (BNI Multiguna iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp50 juta dan maksimum Rp2 Miliar
	Fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* untuk pembelian kendaraan bermotor (BNI Oto iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp5 Juta dan maksimum Rp1 Miliar
	Pembiayaan yang dijamin dengan simpanan yang diterbitkan BNI Syariah (BNI CCF iB Hasanah)	Maksimum pembiayaan sebesar 95% (untuk Simpanan Rupiah) dan 60% (untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijaminkan
	Pembiayaan konsumtif untuk Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umrah (BNI Fleksi Umrah iB Hasanah)	Maksimum pembiayaan Rp200 juta
	Kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah (Hasanah *Card*)	Terdiri dari 3 jenis kartu : *classic*, *gold* dan *platinum*
	Pembiayaan konsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah *indent* (BNI Griya iB Hasanah)	Maksimum Pembiayaan Rp5 Miliar

Strategi yang dijalankan BNI Syariah untuk mengembangkan bisnis mikro adalah dengan menjadikan tahun 2016 sebagai masa transisi untuk memperluas layanan dan optimalisasi cabang menuju *one stop financial service*, menjadikan kantor layanan mikro Bank BNI Syariah tidak hanya melayani nasabah mikro, namun seluruh segmen masyarakat di sekitar lokasi cabang. Untuk merealisasikan hal tersebut maka layanan unit mikro membuka berbagai produk layanan perbankan selain pembiayaan mikro, diantaranya pembiayaan kepemilikan rumah (iB Griya Hasanah), pembiayaan Umrah dan lainnya. Bisnis mikro BNI Syariah juga telah mengubah status Kantor Fungsional Operasional (KFO) sebanyak 3 (tiga) KFO menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu KCP Dompu, KCP Belopa dan KCP Labuha.

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi Indonesia di tahun 2016, BNI Syariah mampu menyalurkan pembiayaan mikro menjadi sebesar Rp1.204,38 miliar atau tumbuh 20,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini mampu mengungguli rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,40% dan turut meningkatkan pangsa pasar pembiayaan mikro BNI Syariah terhadap penyaluran kredit bank umum menjadi 0,54% dari 0,50 %. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun juga naik sebesar 71,09% menjadi Rp504,56 miliar di tahun 2016. Peningkatan dari sisi penyaluran pembiayaan mikro dan DPK ini sejalan dengan pertumbuhan NOA *(number of account)* sebesar 55,57% dengan total jumlah nasabah meningkat menjadi 129.654 dari posisi tahun 2015 sebesar 83.343.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Posisi Pembiayaan dan DPK Cabang Mikro
(dalam Jutaan rupiah)

Tahun	OS Pembiayaan	NOA Pembiayaan	Saldo DPK	NOA DPK
2012	264.921	5.338	37.123	8.136
2013	877.938	14.708	118.594	27.796
2014	1.047.476	18.717	163.528	48.144
2015	1.000.823	19.033	294.914	83.343
2016	1.204.381	20.280	504.557	129.654

NOA Per Produk DPK
(dalam Jutaan rupiah)

Produk	2012	2013	2014	2015	2016
Deposito	99	288	438	886	1.355
Tabungan	8.037	27.508	47.706	82.455	128.134
Giro	-	-	-	2	165

Strategi pemasaran yang dijalankan selama tahun 2016 dilakukan dengan sinergi dalam hal pemasaran produk pembiayaan mikro. Dalam hal ini, BNI Syariah melakukan sinergi pemasaran produk pembiayaan mikro di cabang-cabang BNI Induk, pemasaran produk pembiayaan mikro 3 secara selektif pada sektor generik yang memiliki resiko rendah, mengikuti berbagai *event* pameran yang bersinergi dengan cabang regular, menjalin kerja sama dengan komunitas-komunitas usaha dan optimalisasi cabang-cabang mikro di dalam memasarkan produk dana.

Strategi 2017

Tantangan utama dalam bisnis mikro adalah persaingan pangsa pasar pembiayaan mikro yang cukup ketat apalagi dengan rencana direalisasikannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan program pemerintah yang akan menurunkan Margin KUR dari level 9% menjadi 7%. Kondisi ini menuntut BNI Syariah mampu memberikan produk pembiayaan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan masyarakat. Dalam hal ini strategi utama yang akan dijalankan BNI Syariah adalah sebagai berikut:

- Mengkolaborasikan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada baik infrastruktur, produk, serta SDM agar tercipta sinergi dan arah dalam bisnis Mikro BNI Syariah.
- *Fine tuning* organisasi KC dan KCP untuk mengakselerasi pertumbuhan pembiayaan mikro, pembiayaan konsumer dan Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan tujuan menjadikan cabang-cabang mikro menjadi *one stop financial service* untuk masyarakat di sekitar kantor cabang.
- Peningkatan status beberapa Kantor Fungsional (KF) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan melakukan relokasi KCP yang akan jatuh tempo sewa (dengan potensi terbatas) ke daerah yang memiliki potensi bisnis mikro, konsumer, dan DPK.
- Pendekatan terhadap komunitas, instansi, yayasan, masjid, dan sekolah sebagai mitra BNI Syariah dipilih menjadi strategi di dalam mengembangkan DPK.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mempengaruhi kinerja bisnis mikro yang ditandai dengan tekanan pada pendapatan margin bersih meski aset segmen bisnis ini mengalami kenaikan sebesar 17,99% menjadi Rp1,21 triliun.

Pendapatan margin bersih sedikit turun 0,12% menjadi Rp256,06 miliar pada tahun 2016, lebih rendah dari pencapaian tahun 2015 sebesar Rp256,37 miliar.

Kinerja Segmen Mikro

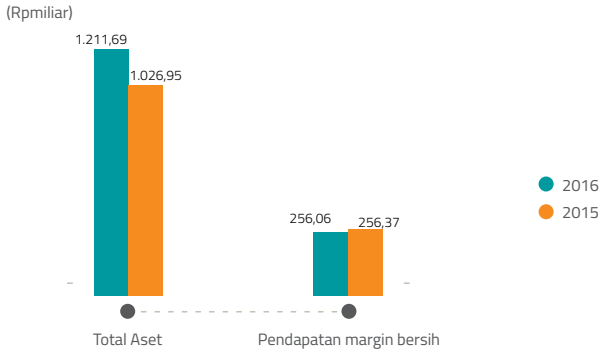

IV. Bisnis Tresuri dan Internasional

A. Bisnis Tresuri

BNI Syariah melalui segmen bisnis tresuri bertanggung jawab menjaga terpenuhinya likuiditas bank dan menginvestasikan kelebihan dana untuk mendapatkan pendapatan yang paling optimal. Pada tahun 2016 BNI Syariah fokus pada peningkatan kualitas aset dan peningkatan pendapatan yang diwujudkan dengan menetapkan strategi sebagai berikut:

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Strategi Bisnis	Realisasi
Investasi instrumen *treasury* dilakukan secara *front* loading	Pembelian SBSN pada awal tahun dengan *yield* yang cukup tinggi Pembelian Sukuk korporat pada awal tahun baik di *primary* maupun *secondary market*
Diversifikasi investasi Tresuri	Posisi investasi *treasury* pada beragam instrumen investasi seperti Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA), *Reverse Repo* Bank Indonesia, *Term Deposit Valas* Bank Indonesia, Surat berharga syariah pemerintah, Surat berharga syariah korporasi, dan Reksadana.
Penerapan implementasi PSAK 110 Revisi berjalan lebih baik	Pemenuhan SDM untuk pengelolaan surat berharga menempatkan pembukuan surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai perolehan dan nilai wajar dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan kondisi pasar
Lebih aktif dalam transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)	Melakukan *placement* ke bank syariah dengan mekanisme Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) tetap mengoptimalkan kelebihan Giro Wajib Minimum (GWM) pada instrumen FASBIS melakukan mekanisme penerimaan dana investasi antar bank (IMA) dengan *underlying reverse repo* BI dengan sistem nisbah bagi hasil

Tresuri juga aktif dalam transaksi *foreign exchange* dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada nasabah. *Fee Based Income* dari transaksi jual beli valas tahun 2016 sebesar Rp4,59 Miliar atau meningkat sebesar 53,50% dibandingkan pendapatan 2015 sebesar Rp2.99 miliar.

Strategi Bisnis	Realisasi
Pemberian spesial kurs yang kompetitif	Kurs spesial yang diberikan kepada nasabah korporat maupun individu untuk transaksi minimal tertentu dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas dan PDN
Mengoptimalkan *Fee Based Income* melalui transaksi fisik *banknotes* (USD & SAR).	Berkoordinasi dengan cabang dan divisi operasional dalam penetapan pagu kas valas yang optimal Peningkatan pengadaan SAR dalam rangka pemenuhan haji dan umrah sebesar ± 15% lebih tinggi dibandingkan pengadaan 2015 Kerja sama dengan beberapa *money changer* untuk kebutuhan *banknotes* di cabang
Bekerja sama dengan bank lain dalam transaksi jual beli valas	Melakukan sinergi dengan BNI induk Menambah *counterpart* untuk transaksi jual beli valas antar bank
Memelihara Posisi Devisa *Netto*	Selama tahun 2016 posisi PDN BNI Syariah selalu terjaga sesuai ketentuan eksternal dan internal dengan nilai revaluasi kurs positif sebesar Rp2.63 Miliar

Target pendapatan bisnis Tresuri adalah sebesar Rp289.45 Milliar pada tahun 2016 dengan pencapaian per 31 Desember 2016 pendapatan segmen bisnis tresuri sudah mencapai Rp320,90 Miliar atau tercapai sebesar 110,80% dari target. Jika dibandingkan dengan pencapaian pendapatan investasi pada 2015 sebesar Rp217,00 Miliar maka pencapian tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 47,50%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan strategi 2016 yang telah ditetapkan walaupun kondisi pasar yang kurang mendukung di mana pada tahun 2016 terjadi penurunan *yield* surat berharga sehubungan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 125 bps.

Strategi 2017

Segmen bisnis tresuri akan melakukan beberapa strategi pada tahun 2017 yang tetap fokus untuk

- menjaga likuiditas pada tingkat yang aman
- peningkatan *fee base income* melalui investasi transaksi, surat berharga dan Reksadana
- optimalisasi ekses likuiditas melalui instrumen-instrumen yang memberikan *yield* yang paling optimal

Target pendapatan investasi pada tahun 2017 mencapai Rp331 Miliar, naik sebesar 4.1% dari pencapaian pendapatan investasi 2016 dan *fee based income* sebesar Rp9.87 Miliar atau naik sebesar 114% dibandingkan pencapaian 2016. Untuk pencapaian tersebut maka strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Pengelolaan likuiditas yang optimal dengan memanfaatkan instrumen investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Peningkatan volume investasi pada instrumen jangka pendek yang memberikan imbal hasil lebih baik dibanding FASBIS.
3. Investasi di awal tahun (*front loading*) pada *instrument* jangka menengah dan panjang yang memberikan tingkat *yield* optimal sehingga penerimaan pendapatan dapat dibuku lebih awal.
4. Mengembangkan transaksi jual beli surat berharga (sukuk) dalam rangka peningkatan pendapatan *capital* gain (FBI).
5. Sinergi dengan BNI *Incorporated* dalam pengelolaan transaksi surat berharga baik dalam proses pembelian dan penjualan surat berharga
6. Memperluas dan memperdalam hubungan institusional terutama dengan perusahaan sekuritas untuk memperluas transaksi surat berharga.
7. Penambahan SDM *treasury sales* untuk mengembangkan bisnis *forex* nasabah di cabang maupun kantor pusat.
8. Bekerja sama dengan unit internasional untuk mengoptimalkan transaksi *remmitance* nasabah sehingga transaksi jual beli *forex* dapat tumbuh dengan optimal.
9. Mengembangkan transaksi *hedging* dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah serta untuk meningkatkan *fee based income.*
10. Pengembangan dan penyempurnaan fitur produk untuk mengikuti perkembangan pasar dan memberikan solusi terhadap kebutuhan nasabah atau *counterpart.*

B. Bisnis Internasional

BNI Syariah didukung oleh induk perusahaan yakni PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang mempunyai *Desk* dan kantor cabang di luar negeri, yaitu Kantor Cabang Singapura, Hong Kong, Tokyo, Osaka, London, New York dan Seoul untuk melayani berbagai transaksi perbankan internasional. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh 1.657 jaringan bank koresponden di 105 negara.BNI Syariah melayani berbagai transaksi perbankan internasional seperti: layanan *Trade Finance* (Impor, Ekspor, SKBDN, *Standby* L/C dan *Bank Guarantee*, Anjak Piutang iB Hasanah, Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah), layanan remitansi internasional dan *Financial Institution* (FI).

Bisnis internasional berkembang sangat positif pada tahun 2016 terutama dari transaksi *trade finance* dengan produk unggulan Wakalah Bil Ujrah (Anjak Piutang) dan Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah (Anjak Utang). Meskipun masih didominasi oleh transaksi *trade finance* dalam negeri, potensi transaksi *trade finance* sangat besar karena hampir semua perusahaan selalu melakukan transaksi jual beli baik berupa barang maupun jasa. Keberhasilan tersebut ditunjang oleh berbagai inisiatif penyempurnaan bisnis, baik dalam bidang pengembangan produk, pengembangan layanan dan pengembangan infrastuktur, maupun kegiatan pemasaran yang berkesinambungan.

BNI Syariah menjalankan berbagai strategi untuk mengembangkan bisnis internasional sepanjang tahun 2016 yang dapat diringkas dalam tabel berikut:

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Strategi Bisnis	Realisasi
Pengembangan Organisasi	Telah dibentuk unit yang khusus menangani bisnis international, sebagai berikut: ▪ Pemasaran Trade (*Marketing Representative Officer*) ▪ *Trade Processing Center* ▪ *Financial Institution* ▪ *Remittance*
Pengembangan Produk *Trade Finance*	Pengembangan Produk *Wakalah bil Ujrah* (Anjak Piutang) antar bank (dikenal dengan *discounting* atau *factoring*) dan produk Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah (Anjak Utang) antar bank (dikenal dengan *refinancing*). Saat ini siap untuk dilaporkan kepada OJK dan diharapkan dapat mulai dipasarkan pada Semester 1 tahun 2017
Pengembangan Infrastruktur	Proses pengembangan infrastruktur dibagi dalam 2 tahap, yaitu: Tahap pertama, pengembangan *system* aplikasi *remittance* yang telah memasuki tahap pengetesan (*quality assurance*) dan diharapkan mulai diimplementasikan pada *quarter 1* tahun 2017. Tahap kedua, pengembangan *system* aplikasi *trade finance* yang diharapkan akan selesai pada pertengahan Tahun 2017
Peningkatan kualitas tenaga pemasaran melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi	Telah dilaksanakan pelatihan untuk tenaga pemasaran dan pegawai operasional cabang pada bulan Februari dan Maret 2016. Kepada tenaga pemasaran diberikan pelatihan mengenai pemahaman transaksi *trade finance,* cara mengidentifikasi kebutuhan *trade* nasabah, dan keterampilan dalam memberikan *advisory* kepada nasabah. Sedangkan untuk tenaga operasional diberikan pelatihan mengenai cara pemeriksaan awal dokumen *trade finance* dan kegiatan operasional di cabang terkait dengan penyelesaian transaksi *trade finance.*
Melakukan perluasan kerja sama	Telah dilakukan kerja sama dengan Citibank dan sedang dalam tahap pemenuhan dokumen dengan beberapa bank di Timur Tengah dan Malaysia.
Kegiatan Pemasaran	Kegiatan pemasaran terutama untuk produk *trade finance* telah dilakukan secara intensif oleh Tim Pemasaran *trade finance* (*Marketing Representative Officer*) dengan bertemu dan berdiskusi dengan nasabah potensial untuk memberikan masukan dan solusi atas kebutuhan transaksi *trade finance.* Program *synergy* dan *cross selling* juga telah dijalankan dengan unit terkait seperti, Divisi Komersial, Divisi Dana dan Transaksi, Divisi Usaha Kecil & Menengah dan Cabang.
Kegiatan TPC (*Trade Processing Center*)	*One day service* transaksi *trade finance* secara signifikan telah dapat direalisaikan dengan telah terbentuknya unit *Trade Processing Centre* (TPC). BNI Syariah terus berupaya melakukan penyempurnaan terutama layanan *front liner* di cabang dalam melakukan pemeriksaan awal dokumen *trade finance*

Kinerja transaksi *trade finance* pada tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan yang ditunjukkan oleh pendapatan *fee/ujrah* yang naik tajam lebih dari 125% menjadi Rp23,32 miliar dengan kenaikan volume sebesar 304,30% menjadi Rp1.112,55 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Profil pendapatan *fee/ujrah trade finance* ini masih didominasi oleh produk *Wakalah Bil Ujrah* (Anjak Piutang) dan Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah (Anjak Utang).

Transaksi LC/SBLC/SKBDN juga memiliki kinerja yang memuaskan dengan adanya kenaikan pendapatan *fee/ujrah* meskipun terjadi penurunan pada volume. Pendapatan *fee/ujrah* mengalami kenaikan sebesar 58.40% menjadi Rp969,57 juta pada tahun 2016 dengan volume mencapai Rp73,02 miliar atau lebih rendah dibandingkan volume tahun sebelumnya sebesar Rp85,08 miliar. Penurunan volume ini disebabkan oleh nilai/nominal per transaksi yang terjadi pada tahun 2016 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari jumlah transaksinya, pada tahun 2016 terdapat 66 transaksi dibandingkan hanya 24 transaksi pada tahun sebelumnya.

Mengacu kepada perkembangan bisnis *trade finance* yang sangat baik ini, bisnis internasional diharapkan menjadi lini bisnis dengan kontribusi *fee based income* yang signifikan kepada BNI Syariah pada tahun 2017. Dengan demikian, strategi pengembangan bisnis internasional ke depannya akan lebih difokuskan pada pemasaran *trade finance* secara lebih efektif, terarah dan memperluas jangkauan akan kebutuhan transaksi *trade finance* di seluruh Indonesia.

Kinerja Tresuri dan Internasional

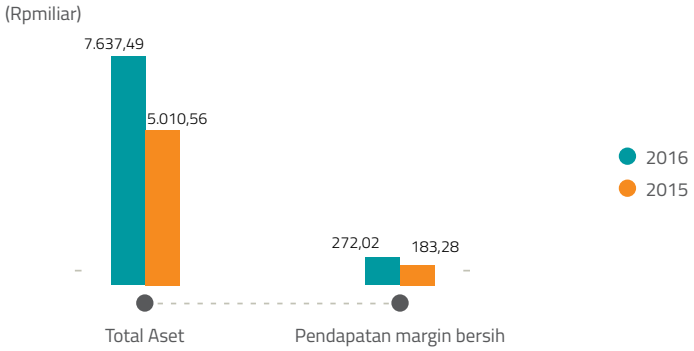

Secara kumulatif, segmen bisnis tresuri dan internasional mampu menunjukkan perbaikan kinerja secara konsisten setiap tahunnya. Aset bisnis tresuri dan internasional tumbuh sebesar 52,43% menjadi Rp7,64 triliun adalah faktor kunci yang mendukung perbaikan berkelanjutan bisnis ini pada tahun 2016. Pertumbuhan pendapatan margin bersih sebesar 48,42% menjadi Rp272,02 miliar pada tahun 2016, lebih baik dari pencapaian tahun 2015 sebesar Rp183,45 miliar.

TINJAUAN KEUANGAN

BNI Syariah mampu meningkatkan kinerja keuangan di tahun 2016 di tengah tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum membaik. BNI Syariah mampu membukukan pertumbuhan aset sebesar 23,01% menjadi Rp28.314 miliar ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 15.36% menjadi Rp20.494 miliar dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp24.233 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 25,41%. Selain itu, laba bersih mampu tumbuh sebesar 21,38% menjadi Rp277 miliar ditopang terutama oleh peningkatan aktivitas pembiayaan BNI Syariah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah mampu secara konsisten memperbaiki kinerjanya di tengah tantangan perekonomian domestik dan global. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai analisis dan pembahasan kinerja keuangan BNI Syariah untuk tahun buku 2016.

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini audit tanpa modifikasian (*partner* penanggungjawab: Yasir).

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan
(dalam miliar rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset	23.018	28.314	5.297	23,01%
Aset produktif	20.286	24.773	4.487	22,12%
Pembiayaan yang diberikan	17.765	20.494	2.729	15,36%
Liabilitas	3.311	4.685	1.374	41,51%
Simpanan nasabah	2.781	4.079	1.298	46,69%
Giro *wadiah*	1.071	1.533	462	43,16%
Tabungan *wadiah*	1.710	2.546	836	48,90%
Jumlah dana syirkah temporer	17.492	21.143	3.651	20,87%
Jumlah dana *syirkah* temporer-bukan bank	16.542	20.154	3.612	21,83%
Jumlah dana *syirkah* temporer bank	449	489	39	8,77%
Sukuk *Mudharabah*	500	500	-	0,00%
Ekuitas	2.216	2.487	271	12,23%
Pendapatan	2.429	2.802	372	15,33%
Laba Usaha	288	368	80	27,84%
Laba bersih	229	277	49	21,38%

Aset

Komponen aset BNI Syariah yang memiliki kontribusi terbesar diantaranya adalah giro pada Bank Indonesia, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Peningkatan berkelanjutan atas komponen-komponen aset tersebut menjadi faktor utama atas pertumbuhan aset BNI Syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 27,31%. BNI Syariah berhasil membukukan total aset sebesar Rp28.314 miliar per 31 Desember 2016 ditengah tantangan perlambatan ekonomi nasional atau tumbuh 23,01% dibandingkan total aset pada tahun sebelumnya sebesar Rp23.018 miliar.

Tabel Aset
(dalam miliar rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas	146	160	14	9,56%
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.584	3.060	476	18,43%
Giro pada bank lain - neto	90	173	83	92,85%
Penempatan pada bank lain - neto	-	51	51	100,00%
Investasi pada surat berharga - neto	2.299	3.924	1.625	70,68%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	339	339	100,00%
Piutang *murabahah* - neto	13.218	14.821	1.603	12,13%
Pinjaman *qardh* - neto	559	907	347	62,13%
Pembiayaan *mudharabah* - neto	1.259	1.182	(77)	(6,12%)
Pembiayaan *musyarakah* - neto	2.100	2.907	807	38,44%
Tagihan Akseptasi - neto	-	5	5	100,00%
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	248	116	(132)	(53,27%)
Biaya dibayar dimuka	121	161	41	33,69%
Pajak dibayar dimuka	8	-	(8)	(100,00%)
Aset tetap - neto	160	215	55	34,32%
Aset pajak tangguhan - neto	35	52	17	50,14%
Aset lain-lain	192	242	50	25,94%
Jumlah aset	23.018	28.314	5.297	23,01%

Kas

Posisi kas Bank mencapai Rp160 miliar per 31 Desember 2016, tumbuh sebesar 9,56% dibandingkan posisi kas bank per 31 Desember 2015 sebesar Rp146 miliar. Posisi kas terhadap total aset Bank pada tahun 2016 adalah sebesar 0,56% atau lebih rendah dibandingkan kontribusi kas terhadap total aset sebesar 0,63% pada tahun 2015.

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

BNI Syariah mampu mempertahankan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di atas ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar 5,00% dan 1,00%. Rasio GWM BNI Syariah dalam rupiah dan valas masing-masing sebesar 5,19% dan 1,46% pada tahun 2016. Rasio GWM ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,15% dan 3,27%.

Seiring dengan bertambahnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank, giro dan penempatan pada Bank Indonesia meningkat menjadi Rp3.060 miliar pada tahun 2016 dibandingkan sebesar Rp2.584 miliar pada tahun 2015. Kontribusi giro dan penempatan pada Bank Indonesia naik menjadi 10,81% pada tahun 2016 dibandingkan posisi komponen aset ini terhadap total aset sebesar 11,23% pada tahun sebelumnya.

Giro pada bank lain

Posisi giro pada bank lain terhadap total aset mencapai sebesar 0,62% pada tahun 2016 ditopang oleh peningkatan komponen aset ini yang mencapai Rp173 miliar pada tahun tersebut. Giro pada bank lain pada tahun 2016 mampu tumbuh sebesar 92,85% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp90 miliar.

Penempatan pada bank lain

Per Desember 2016 penempatan pada bank lain mencapai Rp51 miliar. Pada tahun 2015, BNI Syariah tidak melakukan penempatan pada bank lain.

Investasi pada surat berharga

BNI Syariah membukukan kenaikan investasi pada surat berharga sebesar 70,68% menjadi Rp3.928 miliar per 31 Desember 2016. Seiring dengan kenaikan investasi pada surat berharga ini, posisi komponen aset ini terhadap total aset meningkat signifikan menjadi 13,87% pada tahun 2016 dibandingkan sebesar 10,00% pada tahun 2015. Porsi investasi surat berharga lebih terdiversifikasi dengan *portfolio* investasi pada surat berharga dengan tenor lebih dari 10 tahun dan 1-5 tahun memiliki porsi dominan sebesar 4,47% dan 6,51% dari total aset. *Portfolio* investasi pada tahun 2015 didominasi oleh surat berharga dengan tenor lebih dari 10 tahun sebesar 5,50% dari total aset pada tahun 2015.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
< 1 tahun	343	461	118	34,37%
1 - 5 tahun	372	1.842	1.470	395,11%
5 - 10 tahun	320	359	38	11,89%
> 10 tahun	1.266	1.267	1	0,04%
Total	2.302	3.928	1.627	70,68%

Piutang *Murabahah*

Piutang *murabahah* memiliki posisi yang sangat strategis terhadap aset Bank BNI Syariah karena posisi komponen aset ini terhadap total aset mencapai 53,79% per 31 Desember 2016. Piutang *murabahah* (*gross*) meningkat sebesar 12,93% menjadi Rp15.230 miliar pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.486 miliar. Secara sektoral, posisi piutang *murabahah* kepada sektor perdagangan, restoran dan hotel serta jasa usaha memiliki kontribusi masing-masing 5,57% dan 2,43% terhadap total aset pada tahun 2016. Piutang *murabahah* dari kedua sektor ini masing-masing sebesar Rp1.577 miliar dan Rp689 miliar, dengan nilai pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.493 miliar dan Rp1.183 miliar. Di tengah peningkatan jumlah piutang *murabahah* ini BNI Syariah menghadapi tantangan pengelolaan NPF yang naik menjadi 3,38% (*gross*) dan 1,95% (net) dari 2,26% dan 1,35% di tahun 2015.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Perdagangan, restoran dan hotel	1.493	1.577	84	5,62%
Jasa usaha	1.183	689	(493)	(41,72%)
Sosial/masyarakat	578	679	101	17,41%
Pertanian	278	252	(26)	(9,24%)
Industri	519	579	60	11,50%
Pengangkutan, pergudangan dan transportasi	178	241	63	35,56%
Pertambangan	124	172	48	38,25%
Konstruksi	78	96	17	22,23%
Listrik, gas dan air	44	42	(3)	(5,94%)
Lainnya	9.010	10.903	1.893	21,01%

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Jumlah	13.486	15.230	1.744	12,93%

Pinjaman *Qardh*

BNI Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengembangkan Kartu Hasanah kepada para pelanggannya sebagai salah satu gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sesuai dengan syariah. Di sisi lain, Bank juga mengembangkan produk lainnya seperti *Rahn* yang tumbuh pesat sebesar 344% menjadi Rp501 miliar sehingga menjadi faktor utama kenaikan pinjaman *qardh* sebesar 60,25% menjadi Rp930 miliar pada tahun 2016. Secara umum, peningkatan pinjaman qardh ini juga diikuti dengan pengelolaan yang relatif baik dengan NPF *gross* dan NPF net sebesar 2,21% dan 0,79% dibandingkan 3,83% dan 1,43% pada tahun sebelumnya.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kartu Hasanah	383	368	(15)	(3,93%)
Qardh	85	61	(24)	(27,96%)
Rahn	113	501	388	344,11%
Total (*gross*)	580	930	350	60,25%

Pembiayaan *Mudharabah*

Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang menurun sebesar 6,37% menjadi Rp1.198 miliar per 31 Desember 2016. Sektor jasa usaha masih menjadi sektor andalan dengan posisi pembiayaan *mudharabah* terhadap total pembiayaan *mudharabah* mencapai 79,56% pada tahun 2016. BNI Syariah menghadapi tantangan pengelolaan jenis pembiayaan ini karena NPF *gross* dan NPF net naik menjadi 1,18% dan 0,78% di tahun 2016 dibandingkan posisi tahun sebelumnya dengan NPF *gross* sebesar 0,76% dan NPF net sebesar 0,16%.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Perdagangan, restoran dan hotel	13	53	39	297,40%
Jasa usaha	1.027	953	(73)	(7,14%)
Sosial/masyarakat	217	165	(52)	(23,83%)
Pertanian	1	-	(1)	(100,00%)
Industri	9	10	1	11,81%
Pengangkutan, pergudangan dan transportasi	3	10	7	262,11%
Pertambangan	1	-	(1)	(100,00%)
Konstruksi	2	1	(1)	(62,31%)
Listrik, gas dan air	8	6	(2)	(20,34%)
Jumlah	1.280	1.198	(82)	(6,37%)

Pembiayaan *Musyarakah*

Di tengah tantangan perekonomian nasional yang tumbuh relatif melambat, BNI Syariah masih mampu membukukan perbaikan pembiayaan *musyarakah* yang tumbuh 38,91% menjadi Rp3.013 miliar (*gross*) pada tahun 2016. Penyaluran pembiayaan jenis ini lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain dengan 4 (empat) sektor yang memiliki kontribusi pembiayaan lebih dari 10% yakni jasa usaha (28,63%); perdagangan, restoran dan hotel (21,91%); industri (15,01%); dan

konstruksi (12,40%). Kualitas atas pembiayaan *musyarakah* ini juga dikelola dengan baik dengan rasio NPF *gross* dan NPF *nett* membaik menjadi 1,59% dan 0,63% di tahun 2016 dibandingkan kedua rasio tersebut sebesar 5,05% dan 2,94%.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Perdagangan, restoran dan hotel	474	660	186	39,25%
Jasa usaha	535	863	328	61,28%
Sosial/masyarakat	153	248	94	61,47%
Pertanian	47	18	(30)	(62,26%)
Industri	326	452	127	38,92%
Pengangkutan, pergudangan dan transportasi	63	84	22	34,90%
Pertambangan	118	107	(12)	(9,94)
Konstruksi	318	374	56	17,65%
Listrik, gas dan air	115	140	25	22,15%
Lainnya	20	68	47	231,55%
Jumlah	2.169	3.013	844	38,91%

Aset yang diperoleh untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* mengalami penurunan sebesar 53,27% menjadi Rp116 miliar per 31 Desember 2016. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* terdiri dari jenis pembiayaan multijasa yang sebagian besar terdiri dari pembiayaan *ijarah* untuk tujuan pendidikan, talangan haji, dan lain-lain. Kontribusi aset untuk *ijarah* pada tahun 2016 sebesar 0,41% terhadap total aset.

Aset Tetap

BNI Syariah memiliki aset tetap sebesar Rp215 miliar per 31 Desember 2016, meningkat sebesar 34,32% dari posisi aset pada tahun sebelumnya. Peningkatan aset tetap di dominasi oleh peningkatan kepemilikan tanah senilai 54 miliar.

Aset Lain-lain

Aset lain-lain BNI Syariah per 31 Desember 2016 mencapai Rp242 miliar, tumbuh sebesar 25,94% dibandingkan posisi aset pada tahun sebelumnya sebesar Rp192 miliar.

Analisa Tentang Aset Produktif

Pertumbuhan aset BNI Syariah sebesar 23,01% pada tahun 2016 terutama ditopang oleh peningkatan aset produktif. Peran vital dari aset produktif dapat dilihat dari komposisi aset produktif terhadap total aset yang mencapai 87,49%. Pada saat bersamaan, aset produktif mampu tumbuh sebesar 22,12% menjadi Rp24.773 miliar pada tahun 2016 dibandingkan posisi tahun 2015 yang mencapai Rp20.286 miliar. Apabila dilihat secara mendalam, pembiayaan BNI Syariah terutama yang berupa piutang *murabahah* memiliki posisi strategis terhadap aset produktif bank karena memiliki kontribusi sebesar 61,48% pada tahun 2016. Piutang *murabahah* ini juga mampu membukukan pertumbuhan sebesar 12,93% atau setara dengan Rp1.744 miliar menjadi Rp15.230 miliar per 31 desember 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro pada Bank Lain	135	171	35	26,16%
Penempatan pada bank lain	-	51	51	100,00%

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Investasi pada surat berharga	2.302	3.978	1.677	72,85%
Piutang *murabahah*	13.486	15.230	1.744	12,93%
Pinjaman *qardh*	580	930	350	60,25%
Pembiayaan *mudharabah*	1.280	1.198	(82)	(6,37%)
Pembiayaan *musyarakah*	2.169	3.013	844	38,91%
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*-bersih	250	122	(127)	(51,08%)
Tagihan Akseptasi	-	5	5	100,00%
Komitmen & kontijensi	85	75	(10)	(12,03%)
Jumlah	20.286	24.773	4.487	22,12%

Liabilitas

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Liabilitas segera	19	33	14	74,79%
Bagi hasil yang belum dibagikan	46	40	(7)	(14,20%)
Simpanan nasabah	2.781	4.079	1.298	46,69%
Giro *wadiah*	1.071	1.533	462	43,16%
Tabungan *wadiah*	1.710	2.546	836	48,90%
Simpanan dari bank lain	53	31	(22)	(40,82%)
Beban akrual	31	42	11	36,85%
Utang pajak	23	34	11	45,99%
Provisi	5	2	(2)	(51,85%)
Liabilitas lainnya	71	105	34	47,53%
Kewajiban imbalan pasca kerja	282	319	37	12,98%
Jumlah liabilitas	3.311	4.685	1.374	41,51%

Jumlah liabilitas BNI Syariah mencapai sekitar Rp4.685 miliar per 31 Desember 2016, tumbuh 41,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan liabilitas ini ditopang oleh kemampuan BNI Syariah untuk mendapatkan dana pihak ketiga lebih besar dengan simpanan nasabah naik sebesar 46,69% menjadi Rp4.079 miliar untuk menopang pertumbuhan pembiayaan yang diberikan kepada para nasabahnya.

1. Liabilitas Segera

BNI Syariah mampu membukukan kenaikan liabilitas segera sebesar 74,79% menjadi Rp33 miliar pada tahun 2016. Kenaikan liabilitas segera ini seiring dengan peningkatan titipan dana nasabah (simpanan sementara) yang belum dapat diproses lebih lanjut oleh bank. Simpanan sementara memiliki kontribusi signifikan sebesar 70,44% terhadap total liabilitas segera yang mencapai Rp23 miliar.

2. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.* Posisi bagi hasil yang belum dibagikan sebesar Rp40 miliar pada tahun 2016, turun sebesar 14,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi hasil yang belum dibagikan ini merupakan bagi hasil untuk deposito *mudharabah* yang dikelola oleh BNI Syariah.

3. Simpanan Nasabah

BNI Syariah mampu membukukan kenaikan simpanan nasabah sebesar 46,69% menjadi Rp4.079 miliar per 31 Desember 2016. Giro dan tabungan *wadiah* adalah dua jenis simpanan nasabah yang menjadi andalan bank untuk mendapatkan dana pihak ketiga. Giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* masing-masing mengalami kenaikan sebesar 43,16% dan 48,90% per 31 Desember 2016 menjadi Rp1.533 miliar dan Rp2.546 miliar. Posisi kedua jenis simpanan nasabah ini terdiversifikasi dengan baik dengan kontribusi masing-masing mencapai sekitar 37,59% dan 62,41% dari total simpanan nasabah.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro *wadiah*	1.071	1.533	462	43,16%
Tabungan *wadiah*	1.710	2.546	836	48,90%
Simpanan nasabah	2.781	4.079	1.298	46,69%

4. Simpanan dari Bank Lain

BNI Syariah memiliki simpanan dari bank lain sejumlah Rp31 miliar pada tahun 2016, turun sebesar 40,82% dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh fokus bank yang lebih mengutamakan penghimpunan dana pihak ketiga yang berasal dari non bank. Bonus untuk simpanan dari bank lain Rupiah sebesar 0,00%.

5. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

BNI Syariah membukukan kenaikan kewajiban imbalan pasca kerja sebesar Rp37 miliar atau naik sebesar 12,98% pada tahun 2016. Penilaian aktuarial atas manfaat pensiun dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria) pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

6. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain terdiri dari provisi dan liabilitas lainnya. Jumlah liabilitas lainnya BNI Syariah mencapai Rp100 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 40,71% pada tahun 2016.

Dana *Syirkah* Temporer

BNI Syariah mampu membukukan kenaikan dana *syrikah* temporer sepanjang tahun 2016 untuk menopang penyaluran pembiayaan kepada para nasabah. Dana *syirkah* temporer meningkat sebesar 20,87% menjadi Rp21.143 miliar pada tahun 2016. Dominasi dana *syirkah* temporer dari non-bank menunjukkan fokus BNI Syariah untuk menghimpun dana tersebut yang berasal dari segmen ini. Posisi dana *syirkah* temporer dari non-bank mencapai sekitar 95,32% terhadap jumlah dana *syirkah* temporer pada tahun 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Bukan bank	16.542	20.154	3.612	21,83%
Giro *mudharabah*	436	585	149	34,15%
Tabungan	5.701	6.877	1.177	20,64%
Deposito *mudharabah*	10.405	12.691	2.286	21,97%
Bank	449	489	39	8,77%
Giro *mudharabah*	12	15	4	29,59%
Tabungan *mudharabah* (*ummat*)	139	187	48	34,93%
Deposito berjangka *mudharabah*	299	286	(13)	(4,19%)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Sukuk *mudharabah*	500	500	-	0,00%
Jumlah dana syirkah temporer	17.492	21.143	3.651	20,87%

Dana *Syirkah* Temporer Non Bank

Peningkatan dana *syirkah* temporer non bank yang berhasil dihimpun oleh BNI Syariah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan bank tersebut meningkatkan deposito *mudharabah* dari nasabah. Posisi deposito *mudharabah* mencapai sekitar 62,97% terhadap total dana *syirkah* temporer non bank dengan pertumbuhan sebesar 21,97% menjadi Rp12.691 miliar pada tahun 2016. Selain itu, pertumbuhan dana *syirkah* temporer non bank juga ditunjang oleh peningkatan tabungan *mudharabah* yang mampu tumbuh sebesar 20,64% atau setara dengan Rp1.177 miliar pada tahun 2016. Meski memiliki porsi terkecil, giro *mudharabah* juga mengalami kenaikan sebesar 34,15% menjadi Rp585 miliar.

Dana *Syirkah* Temporer Bank

Sejalan dengan kenaikan dana *syirkah* temporer non bank, BNI Syariah juga mampu meningkatkan dana *syirkah* temporer yang berasal dari bank. Deposito *mudharabah* dari perbankan juga memiliki posisi strategis dengan kontribusi 58,57% dari total dana *syirkah* temporer non bank. Deposito mudharabah ini mengalami penurunan sebesar 4,19% menjadi Rp286 miliar pada tahun 2016. Sementara itu, tabungan *mudharabah* dan giro *mudharabah* mencapai Rp187 miliar dan Rp15 miliar, masing-masing tumbuh 34,93% dan 29,59% dibandingkan posisi tahun 2015.

Analisa Mengenai Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga BNI Syariah terdiri dari simpanan nasabah dan dana *syirkah* temporer non bank. Secara keseluruhan, DPK dari kedua sumber ini pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp4.910 miliar atau tumbuh 25,41% dari posisi tahun 2015. Posisi dana *syirkah* temporer non bank masih memiliki peran dominan atas struktur DPK bank dengan kontribusi sebesar 83,17% sedangkan simpanan nasabah memiliki porsi lebih rendah sebesar 16,83% pada tahun 2016.

Pertumbuhan berkelanjutan DPK BNI Syariah terutama ditopang oleh peningkatan dana mahal terutama yang berasal dari deposito *mudharabah* yang mencapai Rp12.691 miliar pada tahun 2016, lebih tinggi dari pencapaian tahun 2015 sebesar Rp10.405 miliar. Namun demikian, secara keseluruhan, struktur DPK BNI Syariah terdiversifikasi dengan baik dengan posisi deposito *mudharabah* terhadap total DPK bank mencapai 52,37% ditambah dana murah giro dan tabungan sebesar 8,74% dan 38,89% pada tahun 2016 dibandingkan komposisi tahun 2015 masing-masing sebesar 7,80%: 38,35%.

Surat Berharga yang Diterbitkan

BNI Syariah menerbitkan sukuk *mudharabah* bertenor 5 (lima) tahun senilai Rp500 miliar pada tanggal 25 Mei 2015. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini digunakan untuk pengembangan kegiatan pembiayaan syariah yang mencakup pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan pembiayaan mikro.

Ekuitas

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal saham	1.502	1.502	-	0,00%
Keuntungan revaluasi aktiva tetap	44	44	-	0,00%
(kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(7)	(3)	5	(69,96%)
Cadangan umum dan wajib	70	93	23	32,65%
Unrealized loss on securities	-	(11)	(11)	100,00%

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	607	862	255	41,93%
Jumlah Ekuitas	2.216	2.487	271	12,23%

Pada tahun 2016 total ekuitas BNI Syariah mencapai sebesar Rp2.487 miliar atau tumbuh sebesar 12,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas ini terutama ditunjang oleh peningkatan saldo laba dan cadangan umum & wajib yang masing-masing naik sebesar 41,93% dan 32,65% menjadi Rp862 miliar dan Rp93 miliar pada tahun 2016.

Laporan Laba Rugi

BNI Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp277 miliar atau naik sebesar 21,38% dibandingkan dengan posisi laba bersih tahun sebelumnya. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan peningkatan penjualan terutama yang berasal dari pendapatan dari jual beli BNI Syariah. Secara umum, sumber pendapatan BNI Syariah mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan atas aktivitas pembiayaan. Selain itu, pendapatan BNI Syariah juga terdiversifikasi dengan beragam sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan dari jual beli, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan dari *ijarah* bersih dan pendapatan usaha utama lainnya. Dengan perolehan laba bersih tersebut, laba per saham (EPS) untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp184.732 (angka penuh) atau lebih tinggi dibandingkan dengan EPS tahun lalu sebesar Rp152.198 (angka penuh).

Laporan laba rugi

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan atas pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*				
Pendapatan dari jual beli	1.754	1.891	137	7,83%
Pendapatan dari bagi hasil	308	419	110	35,72%
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	66	64	(2)	(2,93%)
Pendapatan usaha utama lainnya	301	428	127	42,16%
	2.429	2.802	372	15,33%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer	(846)	(905)	(59)	6,97%
Hak bagi hasil milik bank	1.583	1.897	313	19,79%
Pendapatan operasional lainnya	119	102	(17)	(14,39%)
Beban operasional				
Gaji dan tunjangan	(670)	(751)	(81)	12,15%
Umum dan administrasi	(397)	(420)	(23)	5,71%
Beban bonus *wadiah*	(1)	-	1	-
Lain-lain	(126)	(136)	(10)	7,83%
Jumlah beban operasional	(1.193)	(1.306)	(113)	9,49%
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif	(221)	(324)	(103)	46,55%
Laba Usaha	(288)	368	80	27,84%

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan/(Beban) non-operasional - bersih	20	6	(14)	(72,55%)
Laba sebelum pajak penghasilan	308	373	65	21,26%
Beban pajak				
Kini	(89)	(111)	(22)	24,31%
tangguhan	10	15	5	51,03%
	(79)	(96)	(17)	20,92%
Laba bersih	229	277	49	21,38%
Pendapatan Komprehensif Lain				
Pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti	(9)	6	15	(115,86%)
Selisih penilaian kembali aset tetap	44	-	(44)	(100,00%)
Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain	2	(2)	(4)	(169,98%)
Kerugian atas perubahan nilai wajar investasi pada surat berharga tersedia untuk dijual	-	(15)	(15)	(100,00%)
Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain	-	4	4	100,00%
Jumlah pendapatan komprehensif lain setelah pajak	37	(7)	(44)	(117,42%)
Jumlah pendapatan komprehensif	266	271	5	1,98%
Laba bersih per saham dasar & dilusian (Rupiah penuh)	152.198	184.732	32.534	21,38%

Pendapatan Margin

Bank BNI Syariah mampu menyediakan pembiayaan dalam jumlah lebih besar kepada para nasabah di tengahan tantang perekonomian nasional. Hal ini merupakan langkah yang ditempuh BNI Syariah untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan di tengah gairah atas kebutuhan layanan perbankan syariah yang terus berkembang. Seiring dengan kenaikan pembiayaan tersebut, pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *Mudharib* atau pendapatan margin BNI Syariah mengalami peningkatan sebesar 15,33% atau Rp372 miliar menjadi Rp2.802 miliar pada tahun 2016. Pendapatan yang berasal dari jual beli masih mendominasi komposisi pendapatan BNI Syariah dengan kontribusi sebesar 67,51%.

Perincian Pendapatan Margin

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan dari jual beli	1.754	1.891	137	7,83%
- Pendapatan *murabahah*	1.754	1.891	137	7,83%
Pendapatan dari bagi hasil	308	419	110	35,72%

TINJAUAN KEUANGAN

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	169	267	98	57,77%
- Pendapatan bagi hasil *mudharabah*	139	152	12	8,96%
Pendapatan dari *ijarah*	66	64	(2)	(2,93%)
- Pendapatan dari *ijarah muntahiyah bittamlik*	75	36	(38)	(51,62%)
- Pendapatan dari *ijarah multijasa*	64	64	-	0,53%
- Beban penyusutan	(72)	(36)	36	(50,09%)
Pendapatan usaha utama lainnya	301	428	127	42,16%
- Pendapatan bagi hasil investasi surat berharga	132	246	115	87,32%
- Pendapatan operasional hasanah *card*	80	84	4	4,83%
- Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	76	63	(13)	(17,06%)
- Pendapatan kas bagi hasil *fee ujroh anjak utang piutang*	10	24	14	135,72%
- Pendapatan *fee rahn*	3	2	(1)	(44,55%)
- Pendapatan lain-lain	-	9	9	100,00%
Pendapatan atas pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*	2.429	2.802	372	15,33%

Pendapatan *murabahah* dari aktivitas pembiayaan jual beli BNI Syariah mengalami peningkatan sebesar 7,83% menjadi Rp1.891 miliar pada tahun 2016 ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan yang tumbuh signifikan sepanjang tahun. Selain itu, peningkatan pendapatan margin juga ditopang oleh kenaikan pendapatan dari bagi hasil dan pendapatan usaha lain yang masing-masing tumbuh sekitar 35,72% dan 42,16% menjadi Rp419 miliar dan Rp428 miliar. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan bagi hasil *musyarakah*, *mudharabah* dan pendapatan dari hasil investasi surat berharga yang mencapai Rp98 miliar, Rp12 miliar dan Rp115 miliar pada tahun 2016.

Komposisi pendapatan margin 2016

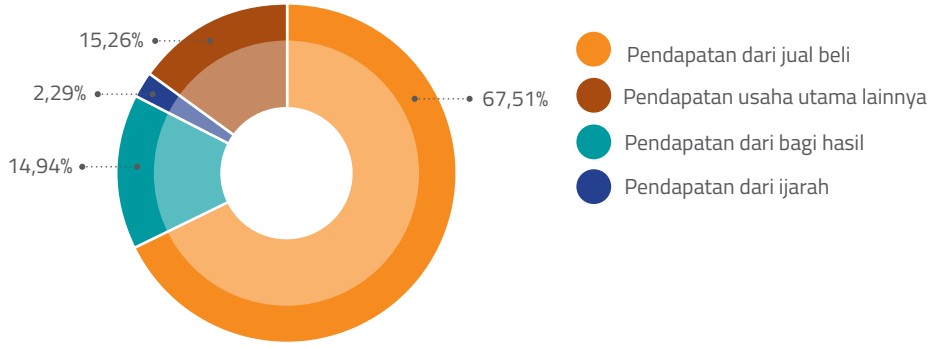

Beban Bagi Hasil

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Deposito *mudharabah*	684	719	35	5,05%
Tabungan *mudharabah*	130	136	5	4,08%
Sukuk *mudharabah*	27	45	18	65,85%
Giro *mudharabah*	3	4	1	24,20%
Lain-lain	1	1	-	35,68%
Giro *mudharabah* bank	-	-	-	-
Jumlah	846	905	59	6,97%

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL
Periode 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

INDIKATOR	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Porsi Pemillik Dana Nisbah (%)	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
	A	B	C	D	E=(D/A x 100%) x 12
A. PEMBIAYAAN					
1. Bank	17,025	177			
2. Non Bank	20,383,373	211,867			
B. PENGHIMPUNAN DANA					
1. Giro wadiah					
a. Bank	8,848	-		-	0.00%
b. Non Bank	1,357,897	-		-	0.00%
2. Giro mudharabah					
a. Bank	8,047	64	3%	2	0.29%
b. Non Bank	664,896	5,296	3%	159	0.29%
3. Tabungan wadiah					
a. Bank	30	-		-	0.00%
b. Non Bank	2,415,732	-		-	0.00%
4. Tabungan mudharabah					
a. Bank	182,090	1,640	28%	459	3.03%
b. Non Bank	6,725,668	59,035	28%	16,530	2.95%
5. Deposito mudharabah					
a. Bank					
- 1 Bulan	130,716	969	46%	446	4.96%
- 3 Bulan	142,274	1,249	47%	587	4.95%

	- 6 Bulan	5,100	37	49%	18	4.31%
	- 12 Bulan	23,984	234	50%	117	5.85%
b.	Non Bank					
	- 1 Bulan	9,172,618	67,412	46%	31,010	4.66%
	- 3 Bulan	715,797	6,380	47%	2,999	4.37%
	- 6 Bulan	417,565	2,966	49%	1,453	5.06%
	- 12 Bulan	3,512,511	30,763	50%	15,381	5.36%
TOTAL		25,483,773	176,045		69,161	

Beban margin deposito *mudharabah* memiliki porsi terbesar pada tahun 2016 dengan porsi sebesar 79,42% dari jumlah beban margin. Seiring dengan peningkatan dana pihak ketiga pada tahun tersebut, beban margin deposito *mudharabah* naik sebesar 5,05% atau Rp35 miliar menjadi Rp719 miliar. Selain itu, komposisi beban margin terbesar kedua berasal dari tabungan *mudharabah* yang mencapai Rp136 miliar, tumbuh sebesar 4,08% pada saat bersamaan. BNI Syariah terus berupaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan DPK dalam bentuk tabungan dan giro supaya dapat menekan beban margin. Selain itu, BNI Syariah berusaha mempertahankan porsi dari deposito *mudharabah* tetapi dengan biaya margin yang dikelola dengan baik.

Pendapatan Margin Bersih

Hak bagi hasil milik Bank atau pendapatan margin bersih BNI Syariah mengalami kenaikan sebesar 19,79% menjadi Rp1.897 miliar. Peningkatan margin bersih ini terutama ditopang oleh peningkatan aktivitas pembiayaan yang dikombinasikan dengan upaya BNI Syariah dalam menyeimbangkan komposisi dana pihak ketiga yang dapat menekan biaya margin.

Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Jasa administrasi layanan bank	64	68	4	6,95%
Jasa administrasi pembiayaan	26	19	(7)	(28,17%)
Pendapatan administrasi lain-lain	5	7	2	42,40%
Laba selisih kurs - neto	24	7	(16)	(68,42%)
Jumlah	119	102	(17)	(14,39%)

Pendapatan operasional lainnya mengalami penurunan sebesar 14,39% atau sebesar Rp17 miliar pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh laba selisih kurs sebesar Rp16 miliar menjadi Rp7 miliar pada tahun 2016.

Beban Operasional Lainnya

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Gaji dan tunjangan	(670)	(751)	(81)	12,15%
Umum dan administrasi	(397)	(420)	(23)	5,71%
Beban bonus *wadiah*	(1)	–	1	-

Lain-lain	(126)	(136)	(10)	7,83%
Jumlah beban operasional	(1.193)	(1.306)	(113)	9,49%

Beban operasional lainnya terdiri dari gaji & tunjangan, umum & administrasi, beban bonus wadiah, dan lain-lain. Secara kumulatif beban operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar 9,49% menjadi Rp1.306 miliar pada tahun 2016. Kenaikan beban operasional ini terutama disebabkan oleh peningkatan gaji & tunjangan seiring dengan bertambahnya karyawan untuk keperluan ekspansi bisnis. Faktor kunci lain dibalik kenaikan beban opersional lainnya adalah peningkatan beban umum & administrasi sebesar 5,71% menjadi Rp420 miliar pada tahun 2016. Peningkatan beban umum & administrasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan *outsourching* dan sewa menjadi sebesar Rp92 miliar dan Rp110 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp81 miliar dan Rp106 miliar. Selain itu, untuk menopang kegiatan ekspansi bisnis BNI Syariah juga mengeluarkan biaya promosi dalam jumlah yang lebih tinggi menjadi sebesar Rp79 miliar pada tahun 2016 dibandingkan beban promosi tahun 2015 sebesar Rp76 miliar.

Beban Penyisihan Aktiva Produktif

BNI Syariah mengalokasikan beban penyisihan aktiva produktif lebih besar pada tahun 2016 di tengah tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Beban penyisihan aktiva produktif tumbuh sebesar 46,44% atau sebesar Rp103 miliar menjadi Rp324 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp221 miliar. Peningkatan beban penyisihan ini sejalan dengan ekspansi pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah pada tahun 2016. BNI Syariah memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga diharapkan mampu menopang pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro pada bank lain	(1)	1	2	(226,18%)
Penempatan pada bank lain	(2)	1	3	(124,27%)
Investasi pada surat berharga	1	2	1	86,75%
Piutang *murabahah*	111	151	39	35,25%
Pinjaman *qardh*	34	43	9	27,29%
Pembiayaan *mudharabah*	20	45	25	129,61%
Pembiayaan *musyarakah*	53	83	30	56,88%
Piutang pendapatan *ljarah*	1	1	-	28,66%
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	4	(2)	(6)	(159,75%)
Jumlah	221	324	103	46,44%

Laba Sebelum Pajak

Sejalan dengan peningkatan pendapatan pengelolaan dana di tengah ekspansi pembiayaan, BNI Syariah mampu membukukan pendapatan sebelum pajak sebesar Rp373 miliar. Posisi laba sebelum pajak ini naik sebesar Rp65 miliar atau tumbuh 21,26% dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp308 miliar. Sebagai catatan, pada tahun 2016 BNI Syariah mampu membukukan pendapatan non operasional sebesar Rp6 miliar yang turut memberikan pengaruh positif pada perbaikan laba sebelum pajak.

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan mencapai Rp96 miliar pada tahun 2016 atau mengalami kenaikan sebesar 20,92% atau Rp17 miliar. Beban pajak yang lebih tinggi ini sejalan dengan pembukuan pendapatan yang lebih tinggi pada tahun 2016

dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Laba Bersih

Laba bersih BNI Syariah naik signifikan sebesar 21,38% atau setara dengan Rp49 miliar menjadi Rp277 miliar setelah memperhitungkan beban pajak pada tahun 2016. Seiring dengan peningkatan laba bersih ini, laba bersih per saham yang diperoleh BNI Syariah meningkat secara signifikan menjadi Rp184.732 (angka penuh) pada tahun 2016 dibandingkan sebesar Rp152.198 (angka penuh) pada tahun 2015.

Jumlah Pendapatan Komprehensif

Pendapatan komprehensif lain setelah pajak BNI Syariah pada tahun 2016 terdiri dari keuntungan aktuarial program manfaat pasti, kerugian atas perubahan nilai wajar investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual dan pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain. Secara kumulatif, terdapat kerugian komprehensif lain sejumlah Rp6 miliar sehingga mengakibatkan jumlah pendapatan komprehensif sebesar Rp271 miliar. Meski demikian, jumlah pendapatan komprehensif tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp266 miliar.

Laporan Arus Kas

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Arus kas dari aktivitas operasi	375	2.333	1.958	522,07%
Arus kas dari aktivitas investasi	(443)	(1.700)	(1.257)	283,48%
Arus kas dari aktivitas pendanaan	497	-	(497)	-
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	429	633	204	47,50%
Kas dan setara kas arus kas, awal periode	2.363	2.820	457	19,33%
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	28	(7)	(35)	(126,11%)
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode	2.820	3.446	625	22,17%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp2.333 miliar atau naik sebesar 522,07% atau setara dengan Rp1.958 miliar dibandingkan tahun 2015. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasional ini sejalan dengan kenaikan penerimaan pendapatan pengelolaan dana di tengah peningkatan aktivitas pembiayaan sepanjang tahun 2016.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi selama tahun 2016 adalah sebesar minus Rp1.700 miliar, yang terutama berasal dari pembelian surat berharga dan perolehan aset tetap yang masing-masing mencapai Rp2.944 miliar dan Rp92 miliar. Dibandingkan dengan posisi tahun 2015, arus kas dari kegiatan investasi mampu tumbuh sebesar 283,48% atau setara dengan minus Rp1.257 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada pembukuan arus kas pendanaan pada BNI Syariah tahun 2016.

Komitmen dan Kontijensi

BNI Syariah memiliki komitmen penyediaan fasilitas pembiayaan kepada nasabah maupun kontijensi diantaranya dalam bentuk pendapatan dalam penyelesaian dan garansi bank yang diterima. BNI Syariah memiliki liabilitas komitmen sebesar Rp969 miliar pada tahun 2016, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.036 miliar. Secara kumulatif, liabilitas kontijensi BNI Syariah juga mengalami penurunan menjadi Rp73 miliar pada tahun 2016 dibandingkan Rp85 miliar pada

tahun 2015.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	1.036	967	(69)	(6,68%)
Irrevocable L/C yang masih berkalan	-	2	2	100,00%
Kewajiban komitmen	1.036	969	(67)	(6,48%)
Pendapatan dalam penyelesaian	50	71	21	42,11%
Garansi bank yang diterima	4	5	1	38,76%
Lainnya	6	9	3	45,09%
Tagihan kontijensi	59	84	25	42,20%
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:				
Standy letters of credit	1	42	41	5.517,20%
Performance bonds	62	22	(40)	(63,99%)
Bid bonds	18	4	(14)	(79,71%)
Advance payment bonds	2	-	(2)	(90,95%)
Garansi bank lainnya	2	5	3	120,65%
	85	73	(12)	(14,40%)
Performance bonds - pihak terakait	-	-	-	-
Kewajiban kontijensi	85	73	(12)	(14,43%)

Rasio Keuangan

Sebagai bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah BNI Syariah secara konsisten berupaya menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta Perundang-undangan yang berlaku. BNI Syariah mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator meskipun Bank secara konsiten melakukan ekspansi pembiayaan yang berkelanjutan di tengah tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

RASIO KEUANGAN PENTING					
KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
Coverage Ratio	76.88%	91.27%	90.73%	84.51%	92.57%
Tingkat Pengembalian Aset	1.48%	1.37%	1.27%	1.43%	1.44%
Tingkat Pengembalian Ekuitas	9.31%	9.65%	10.83%	11.39%	11.94%
Rasio Kecukupan Modal dengan Memperhitungkan Risiko Kredit	19.29%	16.54%	18.76%	18.16%	17.81%
Rasio Kecukupan Modal dengan memperhitungkan Risiko Kredit/ Penyaluran Dana dan Risiko Pasar	19.07%	16.23%	18.43%	18.11%	17.81%

TINJAUAN KEUANGAN

RASIO KEUANGAN PENTING					
KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Kecukupan Modal dengan memperhitungkan Risiko Kredit/ Penyaluran Dana, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	-	-	16.26%	15.48%	14.92%
Aset Tetap Terhadap Modal	12.79%	13.46%	10.96%	13.26%	15.46%
Aset Produktif Bermasalah	1.58%	1.53%	1.61%	2.35%	2.43%
Pembiayaan Bermasalah Kotor	2.02%	1.86%	1.86%	2.53%	2.94%
Pembiayaan Bermasalah Bersih	1,42%	1,13%	1,04%	1,46%	1,64%
PPA Produktif terhadap Aset Produktif	1.33%	1.45%	1.50%	1.90%	2.28%
Pemenuhan PPA Produktif	100.46%	101.72%	110.35%	108.01%	108.83%
Margin Pendapatan Bersih	11.03%	9.51%	8.15%	8.25%	8.32%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	88.79%	88.11%	89.80%	89.63%	87.67%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	184.10%	294.22%	158.18%	149.41%	188.40%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	20.53%	26.10%	15.82%	14.38%	16.55%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	84.99%	97.86%	92.60%	91.94%	84.57%

KEPATUHAN					
KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pelanggaran BMPD					
a.1. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a.2. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD					
a.1. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a.2. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)					
a. GWM Rupiah	5,57%	5,12%	5,21%	5,15%	5,19%
b. GWM Valuta Asing	6,26%	7,15%	3,96%	3,27%	1,46%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	6,05%	11,62%	8,86%	3,52%	0,38%

LAPORAN RASIO KEUANGAN Periode 31 Desember 2016 dan 2015			
RASIO		31 Des 2016	31 Des 2015
Rasio Kinerja			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)	14.92%	15.48%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2.43%	2.35%
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2.44%	2.23%

4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2.28%	1.90%
5.	NPF gross	2.94%	2.53%
6.	NPF net	0.22%	0.39%
7.	Return On Assets (ROA)	1.44%	1.43%
8.	Return On Equity (ROE)	11.94%	11.39%
9.	Net Imbalan (NI)	8.32%	8.25%
10.	Net Operating Margin (NOM)	0.90%	0.67%
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87.67%	89.63%
12.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	20.55%	19.41%
13.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	84.57%	91.94%
Kepatuhan (Compliance)			
1. a.	Persentase Pelanggaran BMPD		
	a.1. Pihak Terkait	0.00%	0.00%
	a.2. Pihak Tidak Terkait	0.00%	0.00%
b.	Persentase Pelampauan BMPD		
	b.1. Pihak Terkait	0.00%	0.00%
	b.2. Pihak Tidak Terkait	0.00%	0.00%
2.	GWM Rupiah		
a.	GWM rupiah	5.19%	5.15%
b.	GWM valuta asing	1.46%	3.27%
3.	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0.28%	3.52%

Berdasarkan rasio-rasio tersebut diatas, BNI Syariah mampu memenuhi ketentuan yang berlaku untuk rasio permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas dan kepatuhan.

Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar hutang

Kemampuan BNI Syariah dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio solvabilitas, rasio rentabilitas and rasio likuiditas. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur solvabilitas, kolektabilitas dan profitabilitas.

Solvabilitas Bank

Dalam mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank, BNI Syariah memastikan kecukupan modal Bank supaya dapat memenuhi risiko penyaluran dana dan risiko pasar yang tercermin dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BNI Syariah dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana, risiko pasar dan risiko operasional adalah sebesar 14,92%. Rasio ini berada di atas batas minimum yang ditentukan oleh OJK sebesar 9,39%.

Rentabilitas Bank

Kinerja rentabilitas BNI Syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio antara lain *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Income Margin* (NIM), dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BNI Syariah mampu membukukan ROA dan ROE lebih baik sebesar 1,44% dan 11,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, NIM juga mengalami perbaikan menjadi 8,32% ditopang oleh rasio BOPO yang membaik menjadi 87,67%. Rasio NIM dan BOPO pada tahun 2015 sebesar 8,25% dan 89,63%.

Likuiditas Bank

Pengelolaan likuiditas bank sangat diperlukan karena dipengaruhi oleh struktur pendanaan,

likuiditas aset, liabilitas kepada *conterparty* dan komitmen memberikan pembiayaan kepada debitur. BNI Syariah melakukan pengukuran risiko likuiditas dalam pengelolaan likuiditasnya dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Posisi FDR BNI Syariah pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 84,57% atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena pertumbuhan penghimpunan DPK yang melebihi pertumbuhan pembiayaan.

Kepatuhan Bank

Berdasarkan rasio kepatuhan, BNI Syariah tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). Rasio GWM mampu dijaga dengan baik dengan selalu berada di atas rasio yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 5,00% (Rupiah) dan 1,00% (Valas). Selain itu, BNI Syariah mampu mengelola rasio Posisi Devisa Neto (PDN) dibawah 20,00% yakni sebesar 0,38%.

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Desember 2016					
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah
I.	PIHAK TERKAIT						
1.	Penempatan pada bank lain						
	a. Rupiah	146,185	-	-	-	-	146,185
	b. Valuta asing	74,421	-	-	-	-	74,421
2.	Tagihan spot dan forward						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga dimiliki						
	a. Rupiah	3,499,105	-	-	-	-	3,499,105
	b. Valuta asing	135,113	-	-	-	-	135,113
4.	Tagihan akseptasi	4,855	-	-	-	-	4,855
5.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa						
	a.1 Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah						
	i. Rupiah	26	-	-	-	-	26
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	a.2 Bukan nasabah UMKM						
	i. Rupiah	328,074	39	-	-	-	328,113
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi						
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Lancar	16.568	18.798	2.230	13,46%
Dalam Perhatian Khusus	747	1.094	347	46,38%
Kurang Lancar	135	247	112	83,03%
Diragukan	72	66	(6)	(7,82%)
Macet	244	289	45	18,55%
Total	17.765	20.494	2.729	15,36%
Gross NPF	2,53%	2,94%	0,41%	15,85%
PPAP	191	265	73	46,39%
Net NPF	1,46%	1,64%	0,18%	12,81%

	31 Desember 2015					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
	47,616	-	-	-	-	47,616
	87,610	-	-	-	-	87,610
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1,974,264	-	-	-	-	1,974,264
	138,313	-	-	-	-	138,313
	-	-	-	-	-	-
	6,035	-	-	-	-	6,035
	-	-	-	-	-	-
	37,888	-	-	-	-	37,888
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

	ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-
c.		Pembiayaan properti	33,544	-	-	-	-	33,544
6.		Pembiayaan bagi hasil						
a.1		Nasabah UMKM						
	i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-
a.2		Bukan nasabah UMKM						
	i.	Rupiah	2,715	-	-	-	-	2,715
	ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-
b.		Pembiayaan yang direstrukturisasi						
	i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-
c.		Pembiayaan properti	-	-	-	-	-	-
7.		Penyertaan	-	-	-	-	-	-
8.		Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-
9.		Komitmen dan kontinjensi						
a.		Rupiah	2,037	-	-	-	-	2,037
b.		Valuta asing	-	-	-	-	-	-
10.		Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-
II.		PIHAK TIDAK TERKAIT						
1.		Penempatan pada bank lain						
a.		Rupiah	1,000	-	-	-	-	1,000
b.		Valuta asing	-	-	-	-	-	-
2.		Tagihan spot dan forward						
a.		Rupiah	-	-	-	-	-	-
b.		Valuta asing	-	-	-	-	-	-
3.		Surat berharga dimiliki						
a.		Rupiah	344,238	-	-	-	-	344,238
b.		Valuta asing	-	-	-	-	-	-
4.		Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
5.		Pembiayaan berbasis piutang dan sewa						
a.1		Nasabah UMKM						
	i.	Rupiah	2,429,168	146,929	19,059	14,218	103,542	2,712,916
	ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-
a.2		Bukan nasabah UMKM						
	i.	Rupiah	12,062,759	682,764	217,382	35,918	149,513	13,148,336
	ii.	Valuta asing	52,359	40,704	-	-	-	93,063

	-	-	-	-	-	-
	32,060	-	-	-	-	32,060
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	93,089	-	-	-	-	93,089
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	189,110	-	-	-	-	189,110
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2,104,125	167,682	25,836	26,533	82,011	2,406,187
	-	-	-	-	-	-
	11,054,099	475,289	42,799	38,872	114,930	11,725,989
	140,243	-	-	-	-	140,243

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi						
	i. Rupiah	884,975	397,364	199,448	8,463	74,366	1,564,616
	ii. Valuta asing	12,016	40,704	-	-	-	52,720
	c. Pembiayaan properti	9,109,089	526,245	31,126	27,671	132,798	9,826,929
6.	Pembiayaan bagi hasil						
	a.1 Nasabah UMKM						
	i. Rupiah	1,107,839	39,604	10,193	16,031	35,805	1,209,472
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	a.2 Bukan nasabah UMKM						
	i. Rupiah	2,656,875	134,551	-	-	-	2,791,426
	ii. Valuta asing	158,181	49,362	-	-	-	207,543
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi						
	i. Rupiah	162,019	149,428	4,457	9,815	11,338	337,057
	ii. Valuta asing	-	49,362	-	-	-	49,362
	c. Pembiayaan properti	362,428	420	922	5,731	11,567	381,068
7.	Penyertaan	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-
9.	Komitmen dan kontinjensi						
	a. Rupiah	30,830	150	-	-	-	30,980
	b. Valuta asing	16,082	25,463	-	-	-	41,545
10.	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-
III.	INFORMASI LAIN						
1.	Total aset bank yang dijaminkan:						
	a. Pada Bank Indonesia						-
	b. Pada pihak lain						-
2.	Total CKPN aset keuangan atas aset produktif						563,667
3.	Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif						517,770
4.	Persentase pembiayaan kepada UMKM terhadap total pembiayaan						19.14%
5.	Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total pembiayaan						5.18%
6.	Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah						14.52%
7.	Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah						11.62%
8.	Lainnya						
	a. Aset produktif yang dihapus buku						970,927
	b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih						193,144
	c. Aset produktif yang dihapustagih						-
	d. Penerusan dana investasi terikat						-

	846,598	159,901	20,798	14,494	43,691	1,085,482
	20,754	-	-	-	-	20,754
	7,749,528	421,450	35,758	29,503	104,408	8,340,647
	1,243,578	38,101	7,595	6,377	43,721	1,339,372
	-	-	-	-	-	-
	1,668,937	66,238	58,222	-	3,003	1,796,700
	219,593	-	-	-	-	219,593
	273,605	71,161	514	1,924	16,885	364,089
	1,159	-	-	-	-	1,159
	328,303	6,338	1,290	1,288	14,975	352,194
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	38,989	642	-	-	-	39,631
	19,073	-	26,055	-	-	45,128
	-	-	-	-	-	-
						-
						-
						383,964
						355,168
						21.12%
						6.44%
						15.89%
						13.09%
						816,453
						185,283
						-
						-

Dari sisi kolektibilitas, BNI Syariah pada tahun 2016 mampu mengelola rasio pembiayaan bermasalah bersih (NPF Net) sebesar 1,64% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 1,46%. Sementara itu, meski mengalami kenaikan menjadi 2,94% per Desember 2016 dari posisi tahun sebelumnya sebesar 2,53%, rasio NPF *gross* BNI Syariah masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata NPF industri perbankan. BNI Syariah akan terus melakukan peningkatan kualitas sistem pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, dan memperbaiki sistem pengelolaan kredit.

Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Modal

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Komponen Modal				
A. Modal Inti				
1. Modal Disetor	1.502	1.502	-	-
2. Cadangan umum dan tujuan	70	93	23	32,65%
3. Laba bersih periode berjalan	114	277	163	142,75%
4. Laba tahun lalu setelah pajak	378	584	206	54,34%
5. Pendapatan Komprehensif lain	-	(11)	(11)	(100,00%)
6. Saldo surplus revaluasi aset teap	44	44	-	-
	2.064	2.489	425	20,56%
Faktor pengurang modal inti utama				
1. Perhitungan pajak tangguhan	-	(52)	(52)	(100,00%)
2. Aset tidak berwujud lainnya	-	(9)	(9)	(100,00%)
	-	(61)	(61)	(100,00%)
Jumlah Modal Inti	2.064	2.428	364	17,63%
B. Modal Pelengkap				
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif	146	154	8	5,73%
Faktor pengurang: *inv instrument tier* 2	-	(96)	(96)	(100,00%)
Jumlah Modal Pelengkap	146	58	(88)	(59,98%)
Jumlah Modal	2.210	2.487	276	12,50%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)				
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	12.447	13.964	1.517	12,19%
Risiko Operasi	2.112	2.702	590	27,94%
Total Aset Tertimbang	14.559	16.666	2.107	14,47%
Rasio KPMM Bank	15.48%	14,92%	(0.56%)	(3.62%)
Rasio KPMM yang diwajibkan	9.38%	9,39%	0.01%	0.11%

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan)

KETERANGAN			31 Des 2016	31 Des 2015
KOMPONEN MODAL				
I	Modal Inti (Tier 1)			
1	Modal Inti Utama (CET 1)		2,428,121	2,064,262
1.1	Modal disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)		1,501,500	1,501,500
1.2	Cadangan Tambahan Modal		987,079	562,762
	1.2.1	Agio (Disagio) Saham Biasa	-	-
	1.2.2	Modal sumbangan	-	-
	1.2.3	Cadangan umum	92,853	70,000
	1.2.4	Laba (Rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	584,172	378,499
	1.2.5	Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	277,375	114,263
	1.2.6	Selisih karena penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.7	Dana setoran modal	-	-
	1.2.8	Waran yang diterbitkan	-	-
	1.2.9	Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	-	-
	1.2.10	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	(11,159)	-
	1.2.11	Saldo surplus revaluasi aset tetap	43,838	43,838
	1.2.12	Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	-	-
	1.2.13	PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung	-	-
	1.2.14	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	-
1.3	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan			
1.4	Faktor Pengurang Modal Inti Utama		60,458	-
	1.4.1	Perhitungan pajak tangguhan	51,875	-
	1.4.2	Goodwill	-	-
	1.4.3	Aset tidak berwujud lainnya	8,583	-
	1.4.4	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
	1.4.5	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi		
	1.4.6	Eksposur sekuritisasi	-	-
	1.4.7	Faktor Pengurang modal inti lainnya	-	-
	1.4.8	Investasi pada instrumen AT1 dan TIER 2 pada bank lain	-	-
2	Modal Inti Tambahan (AT-1)		-	-
2.1	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1		-	-
2.2	Agio (disagio) (+/-)		-	-
2.3	Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain		-	-
II	Modal Pelengkap (Tier 2)			

TINJAUAN KEUANGAN

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan)		
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan	-	-
2 Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap	-	-
3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)	154,458	146,081
4 Cadangan tujuan	-	-
5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-
5.1 Sinking Fund	-	-
5.2 Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain	96,000	-

	31 Des 2016	31 Des 2015	KETERANGAN		31 Des 2016	31 Des 2015
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO			RASIO KPMM			
ATMR RISIKO KREDIT	13,957,921	12,414,816	Rasio CET 1		14.57%	-
ATMR RISIKO PASAR	6,320	32,478	Rasio Tier 1		14.57%	-
ATMR RISIKO OPERASIONAL	2,701,744	2,111,736	Rasio Tier 2		0.35%	-
TOTAL ATMR	16,665,985	14,559,030		Rasio total	14.92%	15.48%
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	9.39%	9.38%	CET 1 UNTUK BUFFER		5.53%	-
ALOKASI PEMENUHAN KPMM			PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK			
Dari CET 1	9.04%	-		Capital Conservation Buffer	0.00%	-
Dari AT 1	0.00%	-		Countercyclical Buffer	0.00%	-
Dari Tier 2	0.35%	-		Capital Surcharge untuk D-SIB	0.00%	-

Struktur permodalan BNI Syariah meningkat secara berkelanjutan ditopang oleh kenaikan modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) selama tiga tahun berturut-turut. Total modal meningkat sebesar 12,50% atau setara dengan Rp276 miliar menjadi Rp2.487 miliar. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko bagi Bank Umum Syariah di mana hasil perhitungan profil risiko untuk tingkat Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar 9,39%. Tingkat kecukupan modal BNI Syariah tahun 2016 berdasarkan rasio kecukupan modal (CAR) berada pada tingkat 14,92% atau lebih tinggi dari batasan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Struktur permodalan BNI Syariah memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional di mana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal BNI Syariah sudah memenuhi peraturan OJK.

Struktur Modal

Kebutuhan permodalan BNI Syariah didukung dengan strategi perencanaan yang kuat , untuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014,

Dalam praktiknya, modal BNI Syariah terdiri dari :

a. Modal Inti
b. Modal Pelengkap

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mempertimbangkan 3 risiko sesuai dengan peraturan BASEL II yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Berikut tabel yang menjelaskan perbandingan antara Realisasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BNI Syariah periode 31 Desember 2015 dengan Realisasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BNI Syariah periode 31 Desember 2016 (audited) :

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2015, rasio KPMM BNI Syariah posisi Desember 2016 mengalami penurunan, yang disebabkan oleh laju peningkatan ATMR yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan modal BNI Syariah.

Peningkatan modal sebesar 10.31% dengan peningkatan terbesar pada modal inti sebesar 17.63%, termasuk peningkatan net profit sebesar 142.75% Year on Year (YoY). Namun disisi lain, terjadi peningkatan dari segi ATMR sebesar 14.47% dengan peningkatan terbesar pada ATMR Risiko Operasional yang meningkat sebesar 27,94% diikuti peningkatan pada ATMR Kredit sebesar 12.43%.

Peningkatan persentase ATMR yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan modal, menyebabkan penurunan terhadap rasio KPMM dari tahun 2015 ke tahun 2016. Realisasi KPMM Periode Desember 2016, masih jauh diatas modal minimum sesuai profil risiko periode Desember 2016 sebesar 9,37% dan mempertimbangkan countercyclical Buffer sebesar 0% pada tahun 2016, sehingga persentase KPMM yang dimiliki BNI Syariah masih memenuhi kriteria tersebut.

Internal Capital Adequency Assessment process (ICAAP)

BNI Syariah telah menerapkan ICAAP atau Internal Capital Adequency Assesment Process yaitu proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.BNI Syariah telah menetapkan besarnya modal minimum sesuai profil risiko menggunakan metode internal yang telah ditetapkan oleh segenap manajemen BNI Syariah.

Penetapan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko telah disusun oleh Direksi BNI Syariah secara semesteran dan dilaporkan kepada regulator, Dewan Komisaris dan BNI selaku perusahaan induk. Selama tahun 2016, besarnya Rasio KPMM BNI Syariah melebihi besarnya Modal minum yang wajib disediakan bank sesuai profil risiko. Posisi CAR BNI Syariah bulan Desember 2016 sebesar 14,92% jauh diatas modal minimum yang harus disediakan oleh BNI Syariah.

BNI Syariah telah memiliki limit-limit internal terhadap 4 risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas, dimana besarnya limit-limit tersebut dilakukan review secara berkala oleh satuan kerja manajemen risiko yang berkoordinasi dengan unit-unit terkait

Kecukupan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sisem informasi Manajemen risiko

a. Identifikasi : Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisisi seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas BNI Syariah
b. Pengukuran :Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas BNI Syariah sehingga BNI Syariah dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan memperkecil risiko yang akan ditimbulkan
c. Pemantauan :Sistem dan prosedur pemantauan mencakup antara lain pemantauan terhadap realisasi eksposure risiko dibandingkan dengan limit risiko internal maupun eksternal
d. Pengendalian: Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposire risiko maupun tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko.
e. Sistem Informasi Manajemen Risiko :Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki

BNI Syariah meliputi laporan-laporan yang disusun oleh risk owner maupun satuan kerja manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris maupun BNI.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

BNI Syariah belum pernah memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal sejak Bank didirikan pada tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2016.

Kebijakan Deviden

Pada tahun 2010 BNI Syariah mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham secara proposional sebesar Rp30.481.970.000 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. BNI Syariah tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham sejak tahun 2012 hingga 2016 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam rangka meningkatkan struktur permodalan bank.

Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen Dan/Atau Karyawan

BNI Syariah tidak menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan/manajerial (ESOP/MSOP) seperti yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 pasal 43 ayat (3) butir (a) karena penawaranpenambahan modal saat ini hanya diberikan kepada pemerintah di aktas pendirian.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Sukuk)

BNI Syariah mencatatkan di Bursa Efek Indonesia Obligasi Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi tersebut telah disampaikan BNI Syariah kepada OJK dengan perincian sebagai berikut

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Sisa Dana Hasil Penawaran
		Jumlah hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pembiayaan	Total	Realisasi Pembiayaan	Total	
Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015	15 Mei 2015	500.000	2.780	497.220	497.220	497.220	497.220	497.220	-
Jumlah		500.000	2.780	497.220	497.220	497.220	497.220	497.220	-

Informasi & Fakta Material yang terjadi setelah tanggal Neraca

Tidak ada hal-hal atau kejadian penting yang mempunyai pengaruh signifikan atau memerlukan pengungkapan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan Laporan Keuangan diaudit dan diterbitkan yakni pada tanggal 29 Januari 2016 maupun hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan.

Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan penilaian Manajemen terkait tingkat kesehatan bank posisi 31 Desember 2016 PT BNI Syariah memiliki peringkat komposit 2, yaitu "Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK, dengan demikian Bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik.

Investasi, Ekspansi, Diverstasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang

Pada tahun 2016, tidak terdapat transaksi Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang.

Informasi Material yang Mengandung benturan kepentingan

Selama tahun 2016 tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dalam transaksi yang material dengan pihak afiliasi.

Peningkatan/Penurunan yang Material Dari Penjualan Bersih

Selama tahun 2016, peningkatan signifikan pada pendapatan bersih berasal dari Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* terutama dari pendapatan *murabahah* sebesar Rp137,32 miliar atau 7,83%. Di sisi lain, terdapat penurunan yang berasal dari Pendapatan *Ijarah* Bersih sebesar Rp1,94 miliar atau penurunan sebesar 2,93%.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank

Peraturan	Keterangan	Dampak Terhadap Bank
Surat Edaran Bank Indonesia No.18/19/DKMP tanggal 6 September 2016	Rasio *Loan to Value* untuk Pembiayaan Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Pembiayaan atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.	SEBI ini adalah peraturan pelaksana dari PBI No.18/16/PBI/2016 sehingga dampak dari ketentuan ini sama dengan PBI tsb
PBI No.18/16/PBI/2016	Rasio *Loan to Value* untuk Pembiayaan Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Pembiayaan atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	PBI ini memberikan pelonggaran atau stimulus bagi Bank dalam menyalurkan pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor diantaranya melalui penyesuaian *tiering* LTV/FTV, dan penyesuaian persyaratan NPF sehingga dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan Bank
POJK Nomor 65/POJK.03/2016	Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Pada POJK ini terdapat penambahan jenis risiko yang diperhitungkan dalam penilaian risiko bank yaitu : Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*); dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Sehingga berdampak terhadap bertambahnya risiko yang harus diperhitungkan bank
POJK Nomor 32/POJK.03/2016	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	sudah dicantumkan pada draft ARA 2016 yang dikirimkan CMD
POJK Nomor 2/POJK.03/2016	Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank	sudah dicantumkan pada draft ARA 2016 yang dikirimkan CMD
POJK Nomor 64/POJK.03/2016	POJK tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	POJK ini merupakan pedoman bagi BUK yang akan mengubah jenis usahanya dari bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga tidak memiliki dampak terhadap BNI Syariah.

Informasi dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha, BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Pihak-pihak berelasi terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaannya, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Sepanjang tahun 2016, BNI Syariah melakukan

transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi *Related Parties*	Jenis Hubungan *Type of Relationships*
Manajemen Kunci	Karyawan yang terdiri dari Direksi, Pejabat Eksekutif dan Komisaris
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang Saham Pengendali Utama
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT. Danareksa	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Induk Perusahaan Langsung
PT Bank Syariah Mandiri	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT BNI Life Insurance	Sesama Anak Perusahaan Induk
PT Bank BRI Syariah	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Asuransi Tripakarta	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Pertamina Gas	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Angkasa Pura	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI (YKP BNI)	Sesama Anak Perusahaan Induk
BNI Aset Management	Sesama Anak Perusahaan Induk
PT DPLK BNI	Sesama Anak Perusahaan Induk
PT Jamsostek	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Jasa Raharja (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Bumi putera	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Pegadaian (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Istaka Karya	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Waskita Karya	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
Perusahaan Umum Percetakan Negara RI	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
Perum Produksi Film Negara	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama
PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang sama

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Efektif sejak bulan Agustus 2016, Bank melakukan perubahan batasan nilai nominal piutang murabahah yang dilakukan penilaian secara individual menjadi lebih besar dari Rp15 milyar (nilai penuh) per nesabah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan segmentasi pembiayaan di BNi Syariah. Namun atas perubahan ini tidak menyebabkan adanya nasabah yang keluar dari metode *assessment* CKPN Individual.

b. Standar yang berlaku pada efektif tanggal berjalan

PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan kerja"

Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan kerja" mengakibatkan perubahan kebijakan Akuntansi Bank sebagai berikut:

1. Seluruh biaya jasa lalu diakui langsung di laporan laba rugi. Sebelumnya, biaya jasa lalu diakui berdasarkan metode garis lurus sepanjang periode *vesting* jika perubahan bersifat kondisional terhadap sisa jasa pekerja untuk periode waktu tertentu (periode *vesting*).
2. Biaya bunga dan imbal hasil yang diharapkan dari aset program diganti dengan nilai bunga bersih yang dihitung berdasarkan tingkat diskonto terhadap kewajiban (aset) imbalan pasti bersih.
3. Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan pasca kerja diakui sekaligus dalam penghasilan komprehensif lain. Sebelumnya, keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan pasca kerja diamortisasi ke dalam laba rugi dengan pendekatan koridor.
4. Revisi standar ini juga mensyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif.
5. Pengungkapan tersebut telah diterapkan di Catatan 42.

Dampak penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) tidak berdampak secara material terhadap laporan keuangan sehingga tidak diterapkan secara retrospektif.

PSAK 16 – Aset Tetap

Bank melakukan penerapan dini atas PSAK 16 Aset Tetap (Penyesuaian 2015) terkait dengan penyajian nominal aset tetap yang direvaluasi. Terkait dengan penerapan PSAK ini, akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset tetap.

c. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016 adalah:

1. PSAK 30, "Pungutan", merupakan interpretasi atas PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain daripada pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46 "Pajak Penghasilan" serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.
2. Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi", memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK 16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.
3. Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
4. PSAK 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi", menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
5. PSAK 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
6. PSAK 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", memberikan klarifikasi pada paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
7. PSAK 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
8. PSAK 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham", mengklarifikasi definisi kondisi *vesting* dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.
9. PSAK 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar", mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.
10. PSAK No.110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", terdapat penambahan kategori "Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dalam klasifikasi

akuntansi investasi sukuk yang disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal Sukuk diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk.
- Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat dari investasi Sukuk diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lain.

Adanya klaisfikasi baru ini dimanfaatkan oleh bank untuk melakukan penempatan sebesar Rp 529.008 juta per Desember 2016.

Pengungkapan investasi surat berharga dengan klasifikasi "Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain" atau "Tersedia Untuk Dijual" dapat dilihat pada Catatan No.7

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan tahunan ini, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi terhadap laporan keuangan.

d. Standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017

- Amandemen PSAK No.2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, mensyaratkan agar entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- Amandemen PSAK No.46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, memberikan klarifikasi atas perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari aset keuangan berupa instrumen utang yang diukur pada nilai wajar. Rugi yang belum direalisasi (misal : dalam hal nilai wajar instrumen utang tersebut turun) yang menimbulkan perbedaan temporer, tanpa mempertimbangkan intensi Entitas untuk memulihkan nilai tercatat instrumen tersebut dan menerima arus kas kontraktual saat jatuh tempo.
- Amandemen PSAK No.3: Laporan Keuangan Interim (Penyesuaian 2016), yang mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama
- Amandemen PSAK No.24: Imbalan Kerja (Penyesuaian 2016), yang mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada
- PSAK No.60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Penyesuaian 2016) yang mengklarifikasi bahwa (1) Entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi. (2) "*Offsetting disclosures*" tidak perlu diterapkan pada "*condensed interim financial statements*" (Par 44R, tidak diadopsi dan menjadi Perbedaan dengan IFRSs).
- PSAK Syariah No.101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2016)** merupakan revisi terhadap ilustrasi laporan keuangan asuransi syariah sebagai dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Asuransi Syariah. Penyisihan manfaat polis masa depan disajikan dilaporan posisi keuangan sebagai liabilitas. Revisi PSAK ini menggabungkan "Laporan Perubahan Dana Tabarru' " dengan "Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'", sehingga perubahan dana tabarru' dan surplus defisit underwriting dana tabarru' disajikan di Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru'.
- PSAK Syariah 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2016)* ; PSAK Syariah 104: Akuntansi Istishna (Revisi 2016)** dan PSAK Syariah 107: Akuntansi Ijarah (Revisi 2016), di mana terdapat perubahan definisi nilai wajar mengikuti definisi nilai wajar pada PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

- PSAK Syariah No.108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (Revisi 2016), memberikan perubahan pengaturan terkait akuntansi asuransi syariah seperti pengakuan awal kontribusi peserta, perhitungan penyisihan teknis manfaat polis masa depan, serta penyajian atas revisi PSAK 108 pada laporan keuangan.

Perbandingan Proyeksi dan Hasil yang Dicapai

Pencapaian Target 2016

Faktor eksternal terutama perlambatan perekonomian nasional akibat perekonomian global yang masih lesu masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pencapaian target bisnis BNI Syariah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi selama tahun 2016 sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah) kecuali dinyatakan lain

Perbandingan Target dan Realisasi			
Uraian	**Target 2016**	**Realisasi 2016**	**Keterangan**
Aset	26.252	28.314	Tercapai
Pembiayaan	20.665	20.494	Tidak Tercapai
Dana Pihak Ketiga	22.113	24.233	Tercapai
Rasio KPMM	14,73%	14,92%	Tercapai
Rasio ROA	1,57%	1,44%	Tidak Tercapai
Rasio ROE	12,52%	11,94%	Tidak Tercapai
Rasio NI	8,31%	8,32%	Tercapai
Rasio NOM	1,83%	0,90%	Tidak Tercapai
Rasio BOPO	86,55%	87,67%	Tidak Tercapai
Rasio NPF	2,97%	2,94%	Tercapai
Rasio FDR	93,45%	84,57%	Tidak Tercapai
Pertumbuhan Laba	26,95%	21,38%	Tidak Tercapai

Target 2017

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kapabilitas internal yang dimiliki serta realisasi kinerja periode sebelumnya maka pada tahun 2017 BNI Syariah menetapkan target sebagai berikut:

1. Penyaluran pembiayaan kepada debitur selektif dan tetap memegang prinsip kehati-hatian dengan pertumbuhan pada kisaran 16-18%.
2. Menjaga kualitas pembiayaan dikisaran 3,2% - 3,5%
3. Pertumbuhan DPK melalui strategi peningkatan CASA dengan pertumbuhan di kisaran 17-19%.
4. Pertumbuhan laba bersih perusahaan pada 2017 pada kisaran 20% - 25%
5. Meningkatkan *fee based income* dan menjaga efisiensi operasional melalui perbaikan rasio BOPO dikisaran 85% - 87%
6. Menjaga agar rasio-rasio penting tetap terkendali.

Rencana Produk dan Aktivitas Tahun 2017

Produk

Saat ini produk bank syariah sudah sangat bervariasi. Menyasar seluruh lapisan masyarakat, dari yang sangat peduli dengan kesyariahan suatu produk, hingga mereka yang tidak peduli sama sekali. Masyarakat Indonesia terdiri dari 5 segmen. Yang pertama harus syariah, kedua terpaksa syariah karena memang kerja di bank atau tempat yang syariah, ketiga ikut-ikutan syariah, keempat masyarakat yang hanya mencari untung, dan kelima mereka yang konvensional. Dengan kelengkapan dan kenyamanan produk yang disediakan,

diharapkan perbankan syariah dapat menjadi *way of life/lifestyle*/bagian dari hidup. OJK sendiri telah memberikan beberapa kelonggaran kepada bank syariah untuk mengembangkan bisnisnya dengan memberikan produk-produk yang menarik bagi masyarakat.

Pengembangan produk – produk BNI Syariah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut ;

1. Pembiayaan Griya HOP iB Hasanah/ *House Ownership Program*
   Program fasilitas pembiayaan griya dengan pola kerja sama perusahaan/ instansi di mana perusahaan/instansi tersebut telah memiliki ketentuan internal terkait pemberian fasilitas kesejahteraan kepegawaian yang berlaku kepada semua pegawai sesuai jenjangnya untuk pembelian dan renovasi rumah/tempat tinggal, apartemen, rumah susun; pembangunan rumah/tempat tinggal dan pembelian tanah kavling; *take over* kredit properti Bank Konvensional / pembiayaan properti Bank Syariah (selain rumah toko (Ruko)/rumah kantor (Rukan)
2. Pembiayaan OTO COP iB Hasanah/ *Car Ownership Program*
   Program fasilitas pembiayaan dengan pola kerja sama perusahaan/instansi di mana perusahaan/instansi tersebut telah memiliki ketentuan internal terkait pemberian fasilitas kesejahteraan kepegawaian yang berlaku kepada semua pegawai sesuai jenjangnya untuk pemilikan kendaraan baru.
3. Griya Swakarya
   Aktivitas penjualan, penyewaan dan pembiayaan properti melalui kepemilikan langsung oleh bank di mana Bank akan membeli secara langsung dari penjual atau bekerja sama dengan mitra Bank sehingga properti yang akan dijual tersebut menjadi aset/barang persediaan Bank yang kemudian akan dijual atau disewakan kepada Nasabah.
4. Pembiayaan *Musyaraqah Mutanaqisah* (MMQ) Produktif iB Hasanah
   Pembiayaan diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang-barang investasi dan alat-alat produksi baik *second* maupun baru dengan prinsip *Musyarakah* dan *Ijarah*.
   Merupakan pembiayaan dengan sistem *musyarakah* dalam perolehan aset. Aset tersebut menjadi milik Bank dan Nasabah pembiayaan di mana atas kesepakatan antara Bank dan Nasabah aset tersebut disewakan kepada Nasabah pembiayaan pembiayaan. Atas pendapatan sewa dibagi hasilkan antara pihak Bank dan Nasabah pembiayaan. Bagi hasil hak nasabah diserahkan oleh Nasabah Pembiayaan kepada pihak Bank untuk menurunkan *share* Bank dalam musyarakah. Harga/tarif sewa dapat di-*review* oleh bank minimal 1 tahun sekali.
5. Penggunaan Akad *Hawalah* untuk pengalihan utang atau Pembiayaan
   Pemindahan utang / Nasabah dari Lembaga Keuangan Konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan Nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah ke Bank.
6. Reposisi Tabungan iB Prima Hasanah
   Tabungan Prima akan mengalami reposisi, dengan melakukan perbaikan di sisi fitur yang akan disesuaikan dengan hasil perubahan segmen nasabah yang dilayani.
7. Tabungan Pandai iB Hasanah
   Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki karakteristik *basic saving account (BSA)* dan dapat dibuka melalui Kantor Cabang Bank mapun melalui Agen.
8. Transaksi Lindung Nilai Syariah
   Transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah merupakan cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Transaksi lindung nilai syariah harus didahului dengan *forward agreement* yaitu saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.

Aktivitas

Aktivitas yang dikembangkan BNI Syariah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. *General Payment System*
   Layanan *Point to Host* antara BNI Syariah dengan nasabah Institusi/Komunitas untuk sistem pembayaran tagihan anggota Institusi/Komunitas tersebut.
2. Laku Pandai
   Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif, di mana layanan

keuangan akan menggunakan jasa pihak ke-3, di Agen Badan Hukum yang bekerja sama dengan BNI Syariah.

3. *e-Money Hasanah Payment*
   Pelayanan nasabah dan non nasabah dana dalam rangka bertransaksi di *merchant* atau *outlet* mikro BNI Syariah. BNI Syariah akan mendapatkan manfaat baik financial (*fee based*) maupun *nonfinancial*. Inisiasi penerbitan produk jasa *e-money* ini merupakan bagian dari upaya mensukseskan gerakan *cashless society*, dengan mengembangkan model bisnis yang berbasis *e-money*.
4. *Co-branding Tap Cash (E-Money chip Based)* dengan BNI
   Tap *Cash Hasanah* merupakan kartu pembayaran elektronik *co-branding* yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di *merchant* yang telah berkerja sama dengan BNI. Penerbit adalah BNI, BNI Syariah hanya sebagai agen penjual.
5. *Bancassurance* Model Bisnis Referensi
   Aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi syariah dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.

Prospek Pengembangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi global masih berada dalam tekanan ketidakpastian yang cukup besar. Pasca keputusan Brexit oleh Inggris Raya, stagnansi global terus berlanjut dan belum ada perbaikan yang signifikan khususnya di negara zona Eropa. Perekonomian Inggris masih mampu tumbuh diatas 2% karena ditopang sektor jasa, sedangkan ekonomi Amerika Serikat tumbuh di atas prediksi secara kuartalan dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen dan pengeluaran pemerintah. Perbaikan data ekonomi AS, mendorong kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) pada bulan Desember dengan kecenderungan kenaikan pada tahun 2017 yang lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan *cost of borrowing* di pasar keuangan global. Ke depan, risiko global tetap perlu diwaspadai, terutama terkait dengan kebijakan fiskal dan perdagangan internasional AS, serta proses penyeimbangan ekonomi dan penyehatan sektor keuangan di Tiongkok.

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang positif dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,02% (yoy), indikator inflasi yang rendah, permintaan domestik yang relatif kuat, kurs dan pasar modal yang relatif stabil. Tahun 2017 kondisi ekonomi diproyeksikan akan terus membaik, yang dipengaruhi oleh peningkatan kepercayaan pelaku pasar dan investor atas stabilitas ekonomi yang terjaga, *recovery* dari sebagian harga komoditas, stabilitas makro yang lebih kuat dan realisasi proyek infrastruktur. Stabilitas yang terjadi di tengah kondisi ekonomi yang melambat, situasi politik yang bergejolak, dan stagnansi perekonomian global, mendorong keyakinan lebih besar bahwa perekonomian Indonesia telah menjadi lebih kuat di banding kondisi di tahun 1998 maupun 2008.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi diperkirakan hanya akan berbeda tipis dari realisasi di 2016. Sedangkan suku bunga akan memiliki keseimbangan baru. Kurs akan melanjutkan penguatan meski di akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 masih akan bertengger di posisi yang lebih lemah akibat pasar masih belum mengetahui arah yang pasti sebagai efek hasil pemilihan presiden Amerika Serikat. Perekonomian akan memasuki fase pemulihan yang ditandai dengan kondisi sektor korporasi yang membaik dan dukungan pembiayaan yang diperkirakan kembali meningkat, baik kredit perbankan maupun pembiayaan pasar modal. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 meningkat pada kisaran 5,0%-5,4% ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat, dan pulihnya kinerja ekspor sejalan dengan membaiknya harga-harga komoditas ekspor Indonesia. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mengupayakan pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Di tengah rendahnya pertumbuhan kredit/ pembiayaan dan peningkatan tren NPL/NPF,

perbankan masih mampu *survive* dengan ditopang dari efisiensi dan biaya dana yang menurun. Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial, pertumbuhan kredit/pembiayaan dan DPK di tahun 2017 diperkirakan masing-masing sebesar 10%-12% dan 9%-11%. Prospek perbankan syariah sendiri di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Walaupun pada rentang 2013-2015 menunjukkan kinerja pertumbuhan *YoY* dengan tren perlambatan, namun selama rentang tahun tersebut perbankan syariah tetap memperlihatkan nilai pertumbuhan yang positif dalam hal aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan. Pertumbuhan perbankan syariah dalam enam tahun terakhir menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.

Untuk tahun 2017 diperkirakan laju pertumbuhan bank syariah akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Upaya pemerintah untuk melibatkan perbankan syariah dalam transaksi-transaksi APBN, BUMN, dsb, diharapkan mampu membuka segmen baru. Industri haji dan umrah masih akan menjadi tumpuan pertumbuhan diikuti oleh belanja pegawai/*payroll* dan bisnis UKM. Keberpihakan pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh presiden diharapkan dapat mulai menjalankan fungsinya dalam mengatasi sejumlah kendala seperti aspek perpajakan, regulasi dan pengawasan.

Dibutuhkan inovasi dan strategi agar upaya pengembangan bank syariah bisa berhasil. Berbagai strategi dan inovasi dilancarkan oleh semua pelaku perbankan syariah tak terkecuali ekspansi bisnis BNI Syariah. Untuk dapat menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan syariah yang semakin kompetitif, dengan memperhatikan kondisi internal, dinamika regulasi, dan kondisi makro saat ini, BNI Syariah telah merumuskan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan ke depan. Sesuai dengan keunggulan kompetitif BNI Syariah yang mampu menjaga kualitas bisnis serta peningkatan bisnis secara berkesinambungan, arah pengembangan BNI Syariah ke depan adalah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terbaik dengan memberikan nilai investasi yang optimal. *Branding Hasanah Lifestyle Bank* akan digunakan sebagai *vehicle* untuk menajamkan *positioning* BNI Syariah sebagai bank *Ritel-Komersil* yang memenuhi kebutuhan finansial segmen pasar muslim di seluruh kelompok usia (*life stage*) dengan keunggulan *value* & *benefit* yang menyasar pada bisnis & produk halal seperti *food, fashion, education & tourism.*

Upaya untuk mencapai rencana kebijakan tersebut akan didukung dengan pertumbuhan bisnis secara moderat dengan menjaga rasio KPMM perusahaan minimal 13-14%. Sejalan dengan hal tersebut, BNI Syariah akan terus meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan membuka peluang adanya strategi *unorganic growth* serta peningkatan kapabilitas teknologi secara berkelanjutan mengikuti kebutuhan bisnis dengan target jangka panjang untuk independensi *core banking* sesuai dengan perencanaan *Information Technology Strategic Plan (ITSP)* 2014-2018.

Untuk menunjang pengembangan bisnis BNI Syariah jangka panjang secara optimal, dan untuk mencapai tujuan perusahaan maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan serta target tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

Menjaga pertumbuhan bisnis secara optimal dan berkelanjutan melalui:

1. Peningkatan pertumbuhan pembiayaan produktif sesuai dengan arahan regulator yang didukung dengan kualitas yang baik
   - Peningkatan pertumbuhan dana melalui optimalisasi dana murah untuk mencapai rasio CASA diatas industri
   - Penguatan pengelolaan permodalan dengan menjaga rasio KPMM sesuai dengan pemenuhan regulasi saat ini serta diiringi dengan peningkatan kontribusi laba ditahan (*retained earning*)
2. Optimalisasi fungsi *outlet* melalui reklasifikasi Kantor Cabang Pembantu (KCP) serta peningkatan Kantor Fungsional (KF) menjadi Kantor Cabang (KC) atau Kantor

Cabang Pembantu (KCP) dalam rangka menangkap peluang bisnis yang lebih luas
3. *Enhancement* pada kapabilitas IT sehingga dapat menunjang kebutuhan bisnis perusahaan
4. Optimalisasi hubungan sinergi baik dengan induk perusahaan maupun anak perusahaan induk lainnya dalam melakukan pemasaran bisnis maupun kerja sama operasional
5. *Hasanah Lifestyle Bank* sebagai identitas BNI Syariah harus dapat menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi dan karakteristik masyarakat *mass-affluent*. Oleh karena itu, produk dan jasa yang ditawarkan menunjukkan persepsi bank syariah yang sebenarnya untuk menjadi *lifetime partner* layanan keuangan Islami bagi masyarakat yang disesuaikan dengan *life cycle* nasabah

Strategi Bisnis 2017

Dalam rangka mendukung kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk tahun 2017, maka telah dirumuskan beberapa strategi dan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan usaha, antara lain :

A. *Business Strategy*

1. Penyaluran Dana

- Optimalisasi potensi bisnis *supply chain* nasabah korporat BNI yang telah terukur eksposur risiko dan telah memiliki *relationship* yang kuat dengan induk. Melakukan sinergi dengan BNI Induk, baik melalui pembiayaan secara *Club Deal* ataupun Sindikasi dengan nasabah korporasi dan BUMN.
- Menjaga pertumbuhan pembiayaan menengah dan kecil (SME) dengan adanya pembentukan 2 Divisi dan fokus kepada pembiayaan dibawah Rp15 Miliar dalam rangka pengelolaan nasabah secara konsisten.
- Pertumbuhan pembiayaan konsumer difokuskan pada segmen *fixed income* dan professional sehingga diharapkan kualitas pembiayaan akan terjaga.
- Peningkatan *usage* serta *outstanding* Hasanah *Card* yang saat ini menjadi kartu pembiayaan syariah yang *exist* di industri serta *recovery* yang optimal untuk memastikan kontribusi laba yang berkelanjutan.
- Menjadikan Fleksi Umrah dan iB Multiguna sebagai produk unggulan selain iB Griya Hasanah, kerja sama pemasaran Fleksi Umrah dengan *Travel Agent* serta BNI Induk, kerja sama dengan institusi untuk pembiayaan pegawai (HOP, COP, dan Umrah), serta optimalisasi profitabilitas melalui *Property Desk* (Griya Swakarya).
- Strategi peningkatan kualitas pembiayaan dilakukan melalui pemberian pembiayaan kepada debitur secara selektif; peningkatan pemantauan dan kualitas monitoring pembiayaan melalui *traffic light*; mempercepat proses pembiayaan dan keputusan pembiayaan melalui *origination system*, memperketat persyaratan pada nasabah *takeover*, peningkatan pelaksanaan *early warning system* atas pembiayaan berkategori lancar (kolektibiliti 1 dan 2).

2. Penghimpunan Dana

- Optimalisasi migrasi rekening haji dari BNI ke BNI syariah, serta memperbanyak bekerja sama dengan *travel* haji umrah untuk meningkatkan rekening dan kartu haji
- Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi *mass funding* dengan cara kerja sama dengan induk dalam bentuk kerja sama keagenan/Layanan Syariah Bank (LSB) di cabang-cabang BNI induk, serta mengoptimalkan BNI *Financial Center* (BFC)
- Optimalisasi transaksi ZISWAF sebagai *value proposition* bank syariah pilihan dalam transaksi ZISWAF
- Fokus dalam peningkatan akuisisi nasabah-nasabah di Hongkong dan Taiwan dengan menawarkan berbagai marketing program dan *event-event*.
- Memperkuat posisi BNI Syariah sebagai bank syariah pilihan institusi korporasi (BUMN,swasta) yang mau berhijrah
- Menggali potensi *Fee Based Income* melalui pengembangan *mobile banking & sms banking*.

- Inovasi produk perbankan untuk mempersiapkan pembentukan BPKH antara lain *hedging* syariah dan *Mudharabah muqayyadah*, *CoBranding Tap cash*, program pemasaran (retensi, akuisisi, penetrasi).

3. Optimalisasi Bisnis Mikro
- Penjualan produk reguler pada *outlet-outlet* mikro untuk peningkatan aset dan optimalisasi cabang
- Optimalisasi *outlet* dengan peningkatan status Kantor Fungsional.
- Meningkatkan kapabilitas *sales* dalam menjual produk reguler

B. *Functional Strategy*

1. Mengembangkan jaringan dalam rangka optimalisasi *outlet*
2. Meningkatkan peran Kantor Wilayah dan revitalisasi KCP Reguler
3. Mulai membangun kemandirian IT dengan *data center*
4. Menyiapkan infrastuktur transaksional dimulai dari *Mobile Banking* dan *SMS Banking*
5. Mengelola *human capital* berbasis kompetensi
6. Mengoptimalkan penggunaan *Sales Activity & Performance Monitoring* (SAPM)
7. Peningkatan Sinergi dengan BNI

C. *Synergy Optimization*

Sinergi tersebut meliputi sinergi bisnis dan *shared service* baik BNI Syariah ke BNI maupun perusahaan anak lainnya. Diharapkan melalui optimalisasi *shared services*, nasabah BNI Syariah dapat menggunakan fasilitas teknologi digital yang dimiliki BNI seperti mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), EDC (*Electronic Data Capture*), dan kemudahan bertransaksi finansial melalui *E-Banking* BNI meliputi *sms banking*, *mobile banking* dan *internet banking* dalam rangka pelayanan BNI Syariah yang setara dengan bank induk. Berikut detil dari bentuk sinergi meliputi:

1. Kerja sama keagenan (*Sharia Channeling Outlet*/SCO), yaitu salah satu bentuk sinergi dengan memanfaatkan jaringan *outlet* BNI induk dalam memberikan pelayanan syariah yang tersebar di 1.490 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pembiayaan *Supply Chain* dengan nasabah komersial BNI, yaitu kerja sama BNI Syariah dan BNI yang memungkinkan *business opportunity* terhadap nasabah pembiayaan BNI yang memiliki jaringan *supply chain* (vendor, sub kontraktor, dsb).
3. Pemasaran produk Hasanah *Card* melalui jaringan BNI.
4. Pembiayaan Mikro, yaitu dengan menempatkan petugas *sales* mikro BNI Syariah di cabang BNI Kolokasi.
5. Pemasaran Griya iB Hasanah. Kerja sama BNI Syariah dan BNI yang memungkinkan dipasarkannya pembiayaan Griya iB Hasanah secara *referral* oleh petugas SCO BNI, baik kepada institusi kelolaan, nasabah perseorangan eksisting, maupun walk *in customer.*
6. Pengelolaan Dana Haji (Transito) melalui kerja sama BNI Syariah dan BNI dengan pelimpahan dana haji dari rekening cabang BNI transito ke BNI Syariah.
7. Pendampingan Teknis (*Service Level Aggrement*), yakni kegiatan pendampingan teknis dari BNI kepada BNI Syariah untuk pelaksanaan kegiatan operasional perbankan, termasuk penggunaan infrastruktur BNI oleh BNI Syariah selaku anak perusahaan, yang dituangkan dalam bentuk SLA antara BNI Syariah dengan masing-masing Divisi terkait di BNI.
8. Pemanfaatan *fitur Cash Management* (BNI *Direct*) oleh nasabah BNI Syariah dalam rangka peningkatan *fee based* serta pengelolaan nasabah *prime* BNI Syariah.
9. Pemanfaatan fasilitas *e-channel* BNI oleh nasabah BNI Syariah dalam rangka peningkatan *fee based*.
10. Pemanfaatan sistem *remittance* dan *trade finance* BNI oleh nasabah BNI Syariah dalam rangka optimalisasi bisnis internasional.
11. Selain sinergi bisnis dan *shared service*, BNI Syariah juga melakukan sinergi dengan Perusahaan Anak BNI lainnya (BNI Life, BNI Multifinance, BNI Securitas,

BNI Aset Management) seperti asuransi kesehatan syariah BNI Life untuk pegawai, pemasaran *Bancassurance* di *outlet* BNI Syariah, pemasaran Fleksi Umrah, Asuransi Jiwa Pembiayaan nasabah, penempatan reksadana terproteksi, transaksi surat berharga di BNI sekuritas, serta pembiayaan investasi vendor di BNI Multifinance.

Sinergi dengan BNI diharapkan akan meningkat sejalan dengan perkembangan bisnis BNI Syariah di mana pada tahun 2017 BNI Syariah mengupayakan peningkatan sinergi sebesar minimal 20% dari sisi bisnis. Diharapkan dengan adanya sinergi antara BNI dengan BNI Syariah akan terdapat signifikansi dalam kontribusi laba dan aset BNI Syariah kepada BNI induk.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Sampai saat ini inovasi menjadi salah satu kunci sukses dalam memenangkan persaingan pasar. Oleh karena itu, di tahun 2016, BNI Syariah berkomitmen untuk terus menggencarkan inovasi produk maupun layanan perbankan bagi kepuasan nasabah. Kesuksesan bisnis yang diraih pada tahun 2015, tidak membuat BNI Syariah berpuas diri dan berpangku tangan. Namun sebaliknya, prestasi itu menjadi spirit momentum untuk terus tumbuh dan berinovasi baik dari sisi produk, layanan, dan *corporate* untuk menghadapi tahun 2016.

BNI Syariah tetap optimis dan fokus pada kompetensinya di sektor *retail consumer banking* bersifat *basic need* dengan didukung teknologi *E-Banking* mumpuni melalui kecanggihan SMS dan *internet banking* terintegrasi dengan BNI. Berbagai strategi dan inovasi dilancarkan oleh semua pelaku perbankan syariah tak terkecuali ekspansi bisnis dari perbankan syariah. Dalam hal ini BNI Syariah bersinergi melalui optimalisasi *shared services* dan *shared business* dengan BNI induk

Melalui optimalisasi *shared services*, nasabah BNI Syariah dapat menggunakan fasilitas teknologi digital yang dimiliki BNI seperti mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), EDC (*Electronic Data Capture*), dan kemudahan bertransaksi finansial melalui *E-Banking* BNI meliputi *sms banking*, *mobile banking* dan *internet banking*. Tak hanya itu, untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah melalui layanan syariah *Sharia Chanelling Outlet* atau SCO.

Sementara itu, BNI Syariah juga melakukan *shared business* dengan BNI meliputi pembiayaan *supply chain* dengan nasabah komersial, kartu pembiayaan Hasanah *Card*, kartu migran, kartu haji dan umrah serta transaksi luar negeri/ SKBDN. Spesialisasi produk yang hanya dimiliki Bank Syariah adalah salah satu strategi dan inovasi yang dilakukan Bank Syariah untuk meningkatkan *market share*, diantaranya adalah produk Haji dan Umrah. Setiap tahun minat masyarakat Indonesia mendaftar umrah ke Baitullah sangat tinggi. Berdasarkan data Kemenag tahun 2015 diperkirakan lebih dari satu juta calon jamaah/tahun yang akan menunaikan ibadah umrah di tahun 2016.

Melihat potensi tersebut, BNI Syariah berinovasi dengan mengembangkan produk bisnis haji dan umrah melalui program Umrah Hasanah Keluarga. Selain itu, BNI Syariah bersama *MasterCard* Indonesia *melaunching* Kartu Migran Hasanah yang ditujukan untuk para pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Dengan adanya Kartu Migran Hasanah, BNI Syariah berupaya memberikan kemudahan transaksi finansial baik di dalam dan diluar negeri. BNI Syariah juga memperkenalkan fasilitas pembiayaan untuk korporasi dan transaksi luar negeri seperti pembiayaan produktif dengan anjak piutang, bank garansi, *linkage* program, pembiayaan koperasi dan sindikasi dll. dan transaksi melalui *Letter of Credit* atau LC, transaksi ekspor impor dan *cash management*.

Konsep yang diusung adalah "*One stop banking*" yaitu dengan memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari segmen personal maupun korporasi, sehingga nasabah tidak perlu repot-repot mencari di bank lain. Harapan kedepan BNI Syariah akan terus tumbuh dan berkembang baik dan menjadi *leading* menuju Hasanah *Lifestyle* Bank, artinya Bank Syariah bukan lagi

sebagai bank muslim melainkan sudah menjadi gaya hidup bagi kebutuhan finansial masyarakat.

Komunikasi Pemasaran

Komunikasi Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki peran sangat penting dalam mendekatkan BNI Syariah kepada nasabah. Komunikasi pemasaran yang dijalankan BNI Syariah adalah untuk menerjemahkan, menyampaikan tujuan bisnis kepada target *market* BNI Syariah dan mendukung tercapainya target bisnis BNI Syariah. Melalui program komunikasi pemasaran yang efektif, nasabah akan semakin mengenal dan merasa dekat dengan BNI Syariah dan sekaligus dapat memposisikan citra BNI Syariah di hadapan nasabah pada khususnya dan industri perbankan syariah pada umumnya.

Untuk mendukung tercapainya target bisnis BNI Syariah dalam hal pengumpulan dana masyarakat (DPK) yang sebesar Rp2.790 miliar BNI Syariah menjalankan sejumlah strategi komunikasi pemasaran yang tujuannya adalah untuk meningkatkan *brand awareness* masyarakat terhadap BNI Syariah dan produk-produknya, memperkuat *positioning* BNI Syariah di industri perbankan syariah nasional dan membangun *brand image* yang baik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNI Syariah terus meningkat.
Pada tahun 2016, strategi komunikasi pemasaran yang terkait dengan pendanaan yang dijalankan BNI Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan *Marketing Communication* dalam peningkatan *Awareness*
   Dalam rangka meningkatkan *awareness* di masyarakat, BNI Syariah kembali berpartisipasi dalam kegiatan *exhibition* edukasi, literasi dan inklusi OJK diantaranya *event* Keuangan Syariah *Fair* (KSF), expo iB Vaganza dan kegiatan inklusi keuangan OJK lainnya. *Event* KSF di tahun 2016 dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, Tangerang, Banda Aceh dan Makassar sementara untuk expo iB Vaganza sukses diadakan di Palembang, Bekasi, Padang dan Samarinda sebagai kota penutup.

   Selain itu turut diadakan juga *event* pemasaran bertajuk "*Roadshow* Seminar 7 Keajaiban Rezeki" yaitu kegiatan seminar motivasi yang dibawakan oleh Ippho Santosa bertema 7 Keajaiban Rezeki di mana peserta seminar diberikan edukasi tentang bagaimana memperoleh rezeki melalui sedekah sehingga dari sedekah tersebut dapat menebarkan nilai-nilai hasanah yang sejalan dengan *corporate campaign* BNI Syariah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 24 kota di wilayah Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, BNI Syariah juga hadir dalam kegiatan-kegiatan *mandatory* berskala internasional seperti *Islamic Finance News Forum* 2016, *World Islamic Economic Forum* 2016, Mini Expo OJK International *Conference on Islamic Finance*.

   Digital Media juga berperan aktif dalam meningkatkan *awareness* di masyarakat melalui *Website*, *Facebook* dan *Twitter* BNI Syariah secara berkala menginformasikan hal-hal terkait produk, program, kegiatan serta informasi yang bermanfaat untuk membangun citra positif BNI Syariah di dunia digital.

2. Kegiatan *Marketing Communication* dalam memperkuat *Positioning*
   Produk Haji dan Umrah merupakan salah satu produk unggulan BNI Syariah. Di tahun 2016, BNI Syariah memperkuat *positioning* sebagai Bank pilihan utama untuk mempermudah ibadah Haji dan Umrah melalui kesuksesan kegiatan Umrah Keluarga Hasanah, menginisiasi kegiatan expo Garuda Indonesia Umrah Travel Fair Hasanah di Solo, berpartisipasi dalam *annual event* International Islamic Expo 2016 dan pertama kali join di kegiatan HIMPUH Travelmart Makassar sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan lebih dari 300 peserta yang merupakan travel haji dan umrah kenamaan. Untuk memperkuat *positioning* BNI Syariah yang mengusung nilai-nilai Hasanah (kebaikan) serta mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkesinambungan, BNI Syariah bekerja sama dengan

'Yukbisnis' telah melaksanakan kegiatan Kopdar Akbar yang telah dilaksanakan di Denpasar 16-18 Agustus 2016. Kegiatan ini merupakan kegiatan seminar edukasi kepada pengusaha dan calon pengusaha UMKM untuk mengembangkan bisnis yang dimilikinya secara *online*, sehingga kedepan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekitar yang pada akhirnya dapat menggerakkan sektor riil perekonomian Indonesia.

3. Kegiatan *Marketing Communication* dalam menciptakan *Customer Experience*
   BNI Syariah dalam menciptakan *customer experience* melalui kegiatan *opentable* yang rutin diadakan setiap bulan seperti kegiatan RaBu (Rajin Menabung) di sekolah / institusi yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah. Melalui beberapa kegiatan expo dengan membuka *booth*, BNI Syariah hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menciptakan *customer experience* seperti pada kegiatan rutin Keuangan Syariah *Fair* dan iB Vaganza yang umumnya diadakan di mall atau pusat perbelanjaan ternama di setiap kota penyelenggaraan. Di lain sisi, BNI Syariah bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti hotel syariah, lembaga filantropi dalam mewujudkan gaya hidup Halal. Dengan gaya hidup Halal, diharapkan nasabah mendapatkan pengalaman langsung untuk melakukan transaksi secara hasanah dan halal. Media sosial juga merupakan sarana menciptakan *costumer experience* melalui komitmen BNI Syariah untuk cepat tanggap dalam hal menjawab pertanyaan atas persoalan atau hal-hal lain terkait dengan pengalaman masyarakat dengan BNI Syariah.

4. Kegiatan *Marketing Communication* dalam mempertajam Brand *Image* produk, jasa dan layanan BNI Syariah dalam hal mempertajam brand *image produk*, jasa dan layanan haji dan umrah melalui sosialisasi berkelanjutan terkait produk Haji dan Umrah disetiap kegiatan / *event* BNI Syariah. Selain itu, BNI Syariah selama tahun 2016 banyak aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan / expo terkait haji dan umrah. BNI Syariah mengadakan beberapa kegiatan pameran diantaranya melalui sinergi *event* dengan BNI selaku induk perusahaan melalui layanan 'BNI Financial Center' yang telah diwujudkan dalam beberapa kegiatan pameran diantaranya Inacraft, BNI Subsidiaries Expo, REI Expo, GATF 2016. Pameran tersebut merupakan ajang terbesar untuk mempertajam akuisisi produk, jasa dan layanan BNI Syariah sebab melalui kegiatan tersebut dapat dipasarkan seluruh produk BNI Syariah baik dana, pembiayaan maupun layanan.

Penghargaan Marketing Communication

Tahun 2016 BNI Syariah berhasil meraih beberapa penghargaan yang terkait dengan *Marketing Communication* diantaranya :

1. *The Best Website* dan *The Best Social Media* dari Majalah Marketing bekerja sama dengan *Surveyone Research*.
   Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada merek-merek yang berhasil meraih kinerja yang baik dalam dunia digital dari berbagai institusi dengan kriteria penilaian content, *commerce* dan aktivitas di sosial media perusahaan seperti *website*, *facebook* dan *twitter* yang diadakan oleh..
2. *The Best Indonesia Digital Popular Brand Award* 2016 kategori tabungan syariah dari *Transco Research* (Grup bisnis update.com, IMFocus)
   Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap institusi baik perbankan, multinasional dan swasta.
3. *Infobank Digital Brand of The Year Award* Peringkat 1 digital brand KPR Syariah dari Majalah Infobank.

Program Marketing Communication 2016 untuk Produk Dana dan Pembiayaan

Dalam hal memasarkan produk dana, BNI Syariah secara aktif berkoordinasi dengan divisi bisnis untuk membuat program pemasaran produk dana. Selama 2016, BNI Syariah telah menjalankan beberapa program diantaranya Program Pilih Hasanahmu untuk mempertahankan penempatan dana nasabah

dengan nominal tertentu, mempercepat target pembukaan rekening melalui program Ayo ke Bank Syariah dengan memberikan *fee* kepada institusi / perusahaan / sekolah yang membuka rekening secara kolektif, bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam program Tabungan Qurban Progresif, program hadiah langsung untuk nasabah yang membuka tabungan secara *online* melalui *website* BNI Syariah, program promosi Kartu Haji dan Umrah Indonesia di tanah suci, dan program kerja sama *MasterCard* Halal. Sementara itu, Program Marketing Komunikasi dalam Pemasaran segmen Ritel untuk Produk pembiayaan di tahun 2016, difokuskan pada pembentukan komunitas UMKM yang ke depan diharapkan dapat mengembangkan pengusaha-pengusaha baru, sehingga pada akhirnya dapat memutar roda perekonomian rakyat.

Rencana dan Strategi *Marketing Communication* BNIS tahun 2017

Dalam rangka mendukung pencapaian target bisnis, BNI Syariah telah menyusun rencana kerja dan strategi yang akan diterapkan pada tahun 2017, antara lain :

1. Melanjutkan dan mengembangkan kegiatan komunikasi pemasaran *existing* seperti pengembangan Program Umrah Keluarga Hasanah jilid 2.
2. Menginisiasi sebuah *signature event* sebagai salah satu aktivitas pemasaran khas BNI Syariah guna mempercepat target bisnis perusahaan.
3. Lebih berperan aktif dalam mendukung kegiatan *wakaf* dengan melakukan pengembangan wakaf baik penghimpunan dana melalui *website* wakaf maupun pemberdayaan *wakaf* melalui program *wakaf* produktif.
4. Penambahan *channel* media sosial resmi BNI Syariah misalnya '*instagram*' sesuai dengan perkembangan dunia digital sebagai sarana untuk memperkenalkan *values* Hasanah serta meningkatkan engagement yang lebih efektif dan tepat sasaran.

BNI Syariah juga bertekad untuk mengembangkan pemasaran pada sektor UMKM sebagai kelanjutan program komunikasi pemasaran di tahun 2016 melalui pengembangan komunitas-komunitas yang telah dibangun di 2016. Kegiatan pengembangan UMKM tersebut diantaranya melalui kegiatan Kopdar Komunitas dengan adanya kegiatan tersebut dapat dilakukan *sharing* ilmu untuk mengembangkan usaha yang dimiliki yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompetisi global tahun 2017. Disamping itu, BNI Syariah juga telah menyusun strategi Komunikasi Pemasaran dalam menghadapi pertumbuhan berkelanjutan. Antara lain dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan / forum *marketing communication* baik nasional maupun internasional untuk menjaga eksistensi, referensi dan peningkatan mutu strategi *marketing communication* guna mempercepat pencapaian bisnis BNI Syariah.

06 SUMBER DAYA INSANI

"Hanya Sumber Daya Insani yang terampil dan produktif dapat menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah"

BJ Habibie

Kebijakan Pengelolaan SDI	200
Roadmap Pengembangan SDI	201
Struktur Pengelolaan SDI	202
Program Pengembangan SDI Berkelanjutan	204
Pelatihan dan Pengembangan 2016	212
Statistik Pegawai	218
Rencana Pengembangan Organisasi	220

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDI

Bagi BNI Syariah, Sumber Daya Insani (SDI) merupakan aset yang sangat penting yang akan menentukan keberlanjutan usaha. Selain itu, SDI juga merupakan Pemangku Kepentingan yang harus mendapat perhatian yang besar. Untuk mendukung kedua hal tersebut, BNI Syariah menegakkan komitmen kuat untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas SDI secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai perwujudan dari komitmen tersebut, BNI Syariah menerapkan pola pengelolaan Sumber Daya Insani yang berbasiskan kompetensi (*competency based human management*). Pola ini dianggap sebagai pola yang paling sesuai dengan karakter Perusahaan dan memenuhi aspek keadilan, baik bagi Perusahaan maupun bagi pegawai.

Pada tahun 2016, BNI Syariah melakukan penyusunan dan penataan kembali model dan kamus kompetensi sehingga sesuai dengan visi, misi dan nilai budaya kerja BNI Syariah. Kamus kompetensi yang disusun terdiri dari kompetensi teknis dan non teknis yang telah ditentukan untuk setiap posisi jabatan. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan atas kamus kompetensi yang memuat indikator perilaku untuk masing-masing level. BNI Syariah membuat matriks rumpun jabatan (*job family matrix*) untuk memudahkan manajemen dalam melakukan rotasi/mutasi dan pengembangan pegawai sesuai dengan profil dan *career path* masing-masing posisi.

Seluruh siklus pengelolaan SDI, yang meliputi *man power planning*, *rekrutmen*, *training & development*, *performance management system*, *career path* serta sistem *reward* pegawai di BNI Syariah selanjutnya akan mengacu pada model kompetensi yang telah disesuaikan dengan peta ranah jabatan (*job family matrix*) yang ada di BNI Syariah.

Dengan menerapkan pengelolaan *human capital* berbasis kompetensi , BNI Syariah dapat menetapkan standar perilaku minimal yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, sehingga seluruh standar perilaku mengacu pada tuntutan visi, misi, budaya kerja serta sasaran jangka panjang Perusahaan. Selanjutnya pengelolaan SDI berbasis kompetensi ini juga berdampak pada perbaikan sistem pengembangan pegawai dan sistem pengelolaan kinerja.

Program Kerja yang dilaksanakan di Tahun 2016 adalah :

1. Penyusunan kamus kompetensi BNI Syariah (*Soft Competency & Hard Competency*)
2. *Updating* mekanisme dan kurikulum pelaksanaan *Officer Development Program*
3. Pelaksanaan *Assessment* pegawai yang dikategorikan sebagai *talent*
4. Pengembangan organisasi berdasarkan *Competency Based Human Resources* (CBHRM)
5. Perekrutan *future leader* pada progam *Officer Development* (ODP 2017)

ROADMAP PENGEMBANGAN SDI

Pengembangan SDI menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian visi dan misi BNI Syariah. Untuk itu, BNI Syariah telah menyusun *roadmap* pengembangan SDI 2015-2017 sebagai acuan dalam menyusun program pengembangan. Adapun *roadmap* pengembangan SDI BNI Syariah 2015-2017 adalah sebagai berikut :

No	Transformasi SDI BNI Syariah	2015	2016	2017
1	Organization	Penataan organisasi dengan mengutamakan kebutuhan proses bisnis, di mana terbentuknya Divisi Dana & Transaksi yang bertanggung jawab terhadap bisnis *funding* BNI Syariah	Penataan organisasi dengan mengoptimalkan fungsi jaringan sebagai garda terdepan bisnis ritel dengan dibentuknya struktur organisasi Kantor Wilayah	Penataan organisasi yang difokuskan kepada pengembanagan bisnis dan optimalisasi kualitas layanan kepada *costumer* BNI Syariah
2	Learning and Development	Melaksanakan pelatihan berdasarkan *Competency Based Human Resources* (CBHRM)	Internalisasi model kompetensi terhadap sistem mekanisme pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan program *future leader* BNI Syariah	*Individual development plan* TNA basis kompetensi Penyusunan modul kompetensi (teknis) utama
3	HC Engagement	Implementasi jalur karir fungsional dan struktural berdasarkan *Job Family Matriks*	Inisiasi *Talent Pool* berdasarkan *Job Family Matriks*	Implementasi *Talent Pool* yang efektif Implementasi *Career Path*
4	HC Reward	*Updating* fasilitas pegawai	*Positioning* remunerasi (*base salary*) Q-10	Inisiasi remunerasi *pay for person*
5	HC Information System	Implementasi pengembangan program HCIS terkait dengan kompetensi pegawai	Implementasi pengembangan program HCIS terkait dengan *Learning & Development*	Implementasi pengembangan program HCIS terkait dengan *Performance Management System*

STRUKTUR PENGELOLAAN SDI

Sejalan dengan perkembangan usaha BNI Syariah, maka tantangan dalam pengelolaan SDI juga semakin besar. Organisasi Perusahaan pun menjadi semakin kompleks seiring dengan penambahan fungsi-fungsi baru untuk menunjang pertumbuhan Perusahaan.

Pada tahun 2016 Divisi Sumber Daya Insani membentuk unit dan fungsi baru untuk menunjang operasional Perusahaan, antara lain:

1. Unit *People Development*
   Unit ini fokus untuk menjalankan program khusus untuk mempersiapkan *future leader* (*talent management*) serta mengembangkan sistem *knowledge management* di BNI Syariah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai serta mendukung program retensi pegawai agar dapat memberikan performa terbaik untuk mencapai visi dan misi serta target yang diembannya.
2. Unit *Industrial Relation*
   Unit ini fokus pada aktivitas hubungan ketenagakerjaan, kasus kepegawaian, dan permasalahan sanksi serta kedisiplinan pegawai untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian kinerja.
3. *Liaison Officer*
   Ini adalah fungsi yang bertujuan untuk memfasilitasi, memberikan rekomendasi, program pengembangan dan solusi kepegawaian terkait permasalahan bisnis dalam rangka mendukung pencapaian target-target Perusahaan.

Pembentukan unit dan fungsi baru tersebut diyakini tidak membuat organisasi Perusahaan menjadi semakin gemuk, tapi penambahan unit dan fungsi baru tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pencapaian tujuan usaha Perusahaan.

Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Insani

Seiring dengan pengembangan organisasi Perusahaan, struktur organisasi Divisi Sumber Daya Insani juga mengalami pengembangan. Struktur organisasi Divisi Sumber Daya Insani tahun 2016 adalah sebagai berikut:

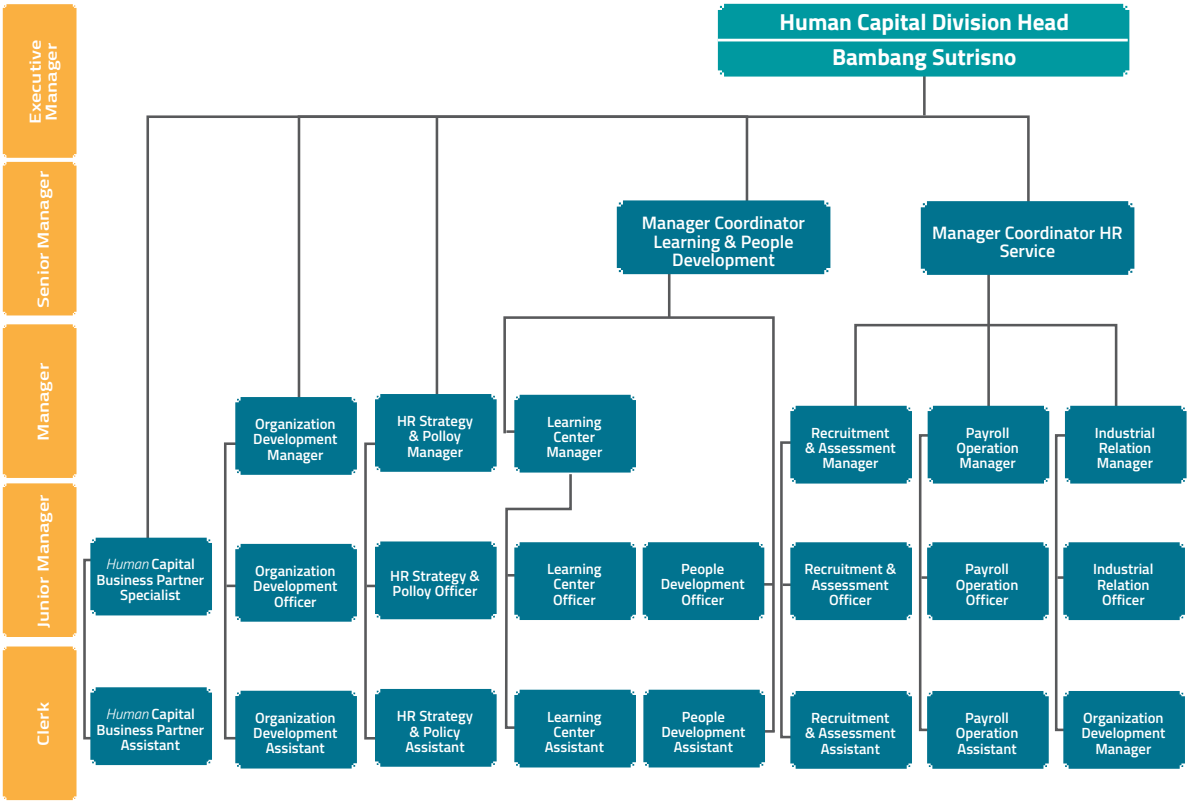

Profil Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani

Bambang Sutrisno
46 tahun. Beliau merupakan lulusan S1 Psikologi dan S2 Manajemen Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum menjabat Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani beliau merupakan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2012-2014).

Fungsi & Ruang Lingkup Tugas Divisi SDI

SDI merupakan salah satu aset strategis BNI Syariah yang berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja bisnis. Divisi Sumber Daya Insani dibawah supervisi langsung Direktur Utama menjalankan fungsi dan ruang lingkup antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Organisasi
   Fungsi dan ruang lingkup terkait analisa dan implementasi seluruh aktivitas terkait pengembangan organisasi, desain dan restrukturisasi organisasi, pengembangan model karir, analisa jabatan, evaluasi jabatan, analisa beban kerja, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan *performance management system*.
2. Strategi dan peraturan SDI
   Fungsi dan ruang lingkup terkait penetapan strategi dan kebijakan SDI, pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian dan pengembangan program budaya kerja Perusahaan.
3. Rekrutmen & Asesmen
   Fungsi dan ruang lingkup terkait pemenuhan pegawai, *assessment*, rotasi dan mutasi pegawai BNI Syariah untuk mendapatkan dan menempatkan Sumber Daya Insani yang memiliki kompetensi yang sesuai.
4. Pelatihan dan pengembangan
   Fungsi dan ruang lingkup terkait pelaksanaan program pengembangan pegawai dan calon pegawai dalam rangka membangun dan meningkatkan kompetensi para pegawai.
5. *Talent Management*
   Mengembangkan sistem dan kebijakan terkait pelatihan pegawai, program manajemen pegawai potensial (*talent management*) serta sistem *knowledge management* di BNI Syariah.
6. Sistem Remunerasi
   Menjalankan fungsi pembayaran & administrasi remunerasi untuk memastikan seluruh operasional kepegawaian & pemberian fasilitas pegawai berjalan lancar akurat dan tepat waktu.
7. Hubungan Industri
   Menjalankan aktivitas hubungan ketenagakerjaan, mengendalikan pelaporan internal & eksternal terkait kepegawaian dan mengendalikan penyelesaian kasus kepegawaian serta mengendalikan proses penyusunan, *review* dan evaluasi Perjanjian Kerja Bersama BNI Syariah (dengan pegawai) dan Perjanjian Kerja sama BNI Syariah (dengan vendor kepegawaian).

PROGRAM PENGEMBANGAN SDI BERKELANJUTAN

Pada tahun 2016, BNI Syariah melakukan program untuk pengelolaan *talent* melalui pembentukan *talent pool* dan pemetaan *career path* pegawai, serta pembenahan atas program *Officer Development Program* (ODP). Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan kandidat *future leader* BNI Syariah yang handal dan kompeten dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Di tahun 2016 ini, BNI Syariah juga kembali melakukan internalisasi perilaku pegawai yang sesuai dengan tata nilai Amanah dan Jamaah memanfaatkan pegawai yang terpilih sebagai *Agent Of Change* (AOC) yang bertindak sebagai *role model* dalam implementasi budaya Amanah dan Jamaah, serta pengukuran penerapan budaya kerja di lingkungan kerja. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kerja Amanah dan Jamaah untuk menciptakan insan yang Hasanah, sebagai perwujudan dari visi misi BNI Syariah.

Adapun dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dari sisi pengelolaan SDI, BNI Syariah melakukan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerapan manajemen pengelolaan SDI berbasis kompetensi
2. Dalam hal *man power planning*, BNI Syariah melakukan analisa atas *capacity plan* sesuai dengan target kerja 2017. Selanjutnya pemenuhan atas rencana pemenuhan pegawai dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Insani dengan unit kerja terkait.
3. Pengembangan organisasi agar sesuai dengan tuntutan dan sasaran jangka Perusahaan
4. Sehubungan dengan kegiatan asesmen pegawai, pada tahun 2017, akan dilakukan pemetaan kompetensi pada seluruh jenjang pegawai.
5. Penerapan *individual performance management*, sehingga pengukuran kinerja individu lebih objektif serta dalam rangka implementasi pengelolaan *reward* pegawai berdasarkan prinsip 3P (*pay for position, pay for performance, dan pay for person*)
6. Pembenahan program pengembangan pegawai untuk peningkatan produktivitas pegawai berdasarkan kompetensi jabatan.
7. Program internalisasi budaya dengan pembentukan *Agent Of Change* (AOC), pembentukan tim internalisasi budaya, dan evaluasi internalisasi budaya kerja.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Budaya kerja BNI Syariah dirumuskan dengan menggali nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh insan pegawai sebagai nilai unggul yang dapat mendukung visi, misi dan sasaran Perusahaan, yakni *integritas, sense of business*, fokus pada kualitas, serta kepuasan pelanggan yang tertuang dalam tata nilai Amanah dan Jamaah.

Dalam rangka penyelarasan budaya kerja Amanah dan Jamaah dengan *Corporate Brand* BNI Syariah yakni Hasanah, BNI Syariah melakukan sosialisasi kembali tata nilai Amanah dan Jamaah pada pegawai. Hal ini dilakukan dengan membumikan nilai-nilai Amanah dan Jamaah sebagai standar perilaku seluruh pegawai untuk mewujudkan insan yang hasanah. Adapun pokok-pokok tata nilai Amanah dan Jamaah adalah sebagai berikut:

Amanah	Jamaah
▪ Jujur dan menepati janji ▪ Bertanggung jawab ▪ Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik ▪ Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah ▪ Melayani melebihi harapan	▪ Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif ▪ Membangun sinergi secara profesional ▪ Membagi pengetahuan yang bermanfaat ▪ Memahami keterkaitan proses kerja ▪ Memperkuat kepemimpinan yang efektif

Hal ini menjadi sistem nilai (*belief system*) dan nilai-nilai rujukan bagi seluruh pegawai BNI Syariah dalam menunjang pencapaian kinerja Perusahaan dalam jangka panjang. Budaya Amanah dan Jamaah ditunjang oleh 3 (tiga) pilar budaya *Risk & Compliance, Performance,* dan *Service.*

Pilar *Risk & Compliance*	Merupakan landasan dalam bekerja dengan menegakkan sikap patuh kepada regulasi dan prinsip syariah dan selalu bekerja dengan prinsip kehati-hatian untuk memperoleh hasil yang berkualitas
Pilar *Performance*	Merupakan landasan dalam bekerja dengan menegakkan sikap melakukan perbaikan terus menerus untuk mencapai hasil yang optimal
Pilar *Service*	Merupakan landasan dalam bekerja dengan menegakkan sikap pelayanan melebihi harapan

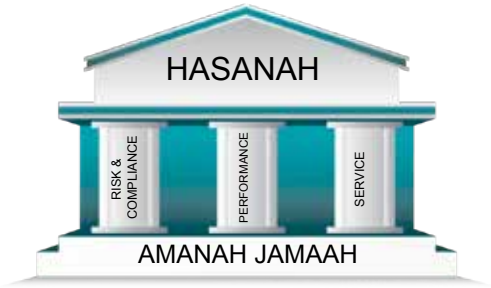

"Budayakan Amanah dan Jamaah Untuk Menciptakan Insan yang Hasanah"

Pada tahun 2016, Divisi Sumber Daya Insani fokus pada program budaya kerja berada dalam taraf sosialisasi tata nilai dengan pemanfaatan artefak-artefak media sosialisasi internal, internalisasi perilaku pegawai yang sesuai dengan tata nilai Amanah dan Jamaah memanfaatkan pegawai yang terpilih sebagai *Agent Of Change* (AOC) yang bertindak sebagai *role model* dalam implementasi budaya Amanah dan Jamaah, serta pengukuran penerapan budaya kerja di lingkungan kerja.

Adapun program kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan komunikasi nilai budaya Perusahaan yang berkelanjutan.
2. Internalisasi nilai budaya Perusahaan pada lingkungan kerja.
3. Penunjukkan tim penggerak budaya (*change agent*).
4. Peningkatan efektivitas peran jajaran pimpinan dan pegawai terpilih sebagai *Agent Of Change* (AOC).
5. Melaksanakan pengukuran efektivitas program sosialisasi dan internalisasi menggunakan *person organizational fit.*
6. Melakukan inisiasi tim internalisasi budaya kerja BNI Syariah yang terdiri atas perwakilan dari segenap organisasi.
7. Membentuk *club-club* pegawai yang bertujuan sebagai sarana komunitas kepegawaian sebagai salah satu bentuk internalisasi budaya Perusahaan.

Sementara sosialisasi tata nilai atau budaya kerja pada pihak eksternal dilakukan dengan sosialisasi C*orporate Brand* serta implementasi nilai Amanah dan Jamaah dalam kehidupan sehari-hari.

Survey Penerapan Budaya Kerja

Pada tahun 2016, BNI Syariah untuk kali pertama mengadakan survey Budaya Kerja. Survey ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengimplementasian Budaya Kerja Amanah dan Jamaah dalam aktivitas operasional. Dalam pelaksanaan *survey*, BNI Syariah bekerja sama dengan Karim Consulting. *Survey* ini melibatkan seluruh jenjang jabatan di BNI Syariah dengan sebaran masa kerja beragam.

Berdasarkan hasil survey, diperoleh kesimpulan bahwa 85% responden memandang positif terhadap penerapan sikap Amanah dan Jamaah di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai BNI Syariah sudah memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap budaya kerja yang dikembangkan BNI Syariah.

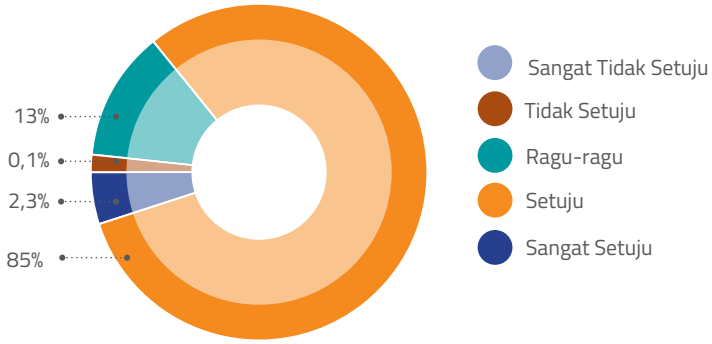

Dari data survey diketahui bahwa pada setiap jenjang jabatan memiliki persepsi yang positif terhadap sikap Amanah dan Jamaah dengan penekanan terhadap budaya Amanah sedikit lebih kuat dibandingkan budaya Jamaah. Selain itu, penerapan budaya Amanah sudah cukup kuat (dominan) di lingkungan kerja BNI Syariah.

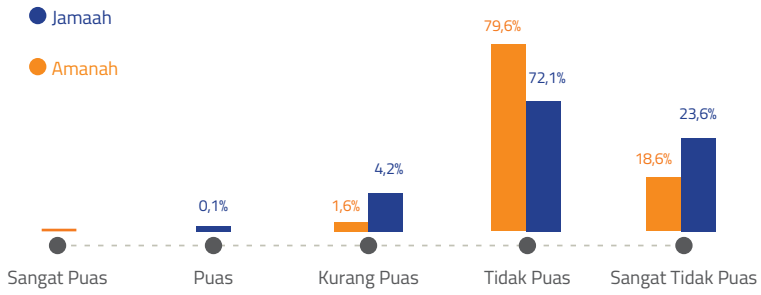

Berdasarkan hasil *survey* bahwa media informasi yang dinilai efektif dalam sosialisasi budaya Amanah dan Jamaah adalah disampaikan melalui kegiatan rutin pegawai di setiap Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada saat *Morning Briefing* dan pada Kegiatan *Amanah Day*, yang bertujuan sebagai salah satu media sosialisasi atas informasi/ kebijakan khusus pada pegawai yang dilakukan secara rutin setiap bulannya menjadi media informasi bagi setiap pegawai terhadap budaya kerja.

Pengembangan Organisasi 2016

Pada tahun 2016, BNI Syariah mengalami perubahan organisasi yang cukup signifikan. Hal ini merupakan penerapan strategi Perusahaan untuk pengoptimalan kinerja dengan tentu mempertimbangkan kondisi global perekonomian dan dinamika industri perbankan Indonesia. Terdapat beberapa perubahan besar terkait organisasi antara lain:

1. Pembentukan Struktur Organisasi Kantor Wilayah untuk mengoptimalkan fungsi jaringan sebagai garda terdepan bisnis ritel yang berdampak pada perubahan struktur organisasi pada beberapa divisi.
2. Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat yang berdampak pada perubahan struktur organisasi pada beberapa divisi dengan penjelasan perubahan sebagai berikut:
   a. Inisiasi pemisahan lini bisnis SME dan Komersial menjadi dua Divisi yaitu Divisi Komersial dan Divisi Usaha Kecil & Menengah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas portofolio bisnis produktif.
   b. Membentuk jabatan Koordinator Divisi yang mensupervisi Divisi Perencanaan Strategis, Satuan Kerja Keuangan, Divisi Jaringan dan Umum dan Kantor Wilayah, untuk mengoptimalkan supervisi bisnis di jaringan BNI Syariah.
   c. Melebur lini bisnis Konsumer dengan Kartu Pembiayaan untuk strategi efisiensi dan *cross utilization* pada kedua *segmen* tersebut.

d. Mendudukkan Divisi Teknologi Informasi pada direktorat bisnis konsumer, untuk mengantisipasi tuntutan bisnis saat ini sangat tergantung pada teknologi informasi.
e. Membentuk Divisi Haji & Umrah sebagai upaya menjemput potensi besar pengembangan bisnis Haji dan Umrah.
f. Fokus pada peningkatan peran layanan sebagai langkah mendukung kinerja bisnis dengan membentuk unit Satuan Kerja Layanan.
g. Pemecahan Divisi Strategi & Keuangan menjadi Divisi Perencanaan Strategis dan Satuan Kerja Keuangan, dalam rangka mengakselerasi perencanaan strategi Perusahaan dan pengawalan proses transformasi Perusahaan BNI Syariah.

Manajemen Karir

Manajemen karir merupakan salah satu strategi Perusahaan untuk mengembangkan potensi pegawai dan untuk mewujudkan visi dan misi perusahan. Proses pengembangan pegawai mempertimbangkan pemenuhan gap kompetensi dan peta karir. BNI Syariah telah memiliki desain sistem karir Perusahaan dalam bentuk *job family matrix*. Penggunaan *job family matrix* adalah sebagai acuan dalam melakukan perpindahan pegawai dengan tujuan memetakan karir pegawai tersebut.

1. Pola Karir
   BNI Syariah saat ini, menggunaan prinsip *Competency Based Human Resource Management* (CBHRM), sehingga dalam melakukan pengelolaan karir berdasarkan kompetensi. Dalam pelaksanaannya pola karir Perusahaan didasari oleh kompetensi dan *capacity plan.* Saat ini BNI Syariah memiliki metode *dual career path* yaitu *specialist* dan generalis. Proses pola karir BNI Syariah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui *Lateral Movement* (rotasi) dan *Job Enrichment* (promosi).
2. Jalur Karir
   Jalur karir yang diterapkan di Perusahaan merupakan suatu perpindahan karyawan terhadap suatu posisi jabatan ke jabatan lain atau yang biasa disebut mutasi. Pelaksanaan mutasi terhadap karyawan terbagi kedalam 3 (tiga) jenis perpindahan diantaranya:

a. Rotasi
   Rotasi merupakan perpindahan posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang berada pada satu *band* atau jenjang. Mekanisme rotasi dilaksanakan kepada pegawai sebagai bentuk *refreshment* posisi jabatan ke posisi jabatan lain untuk mengembangkan kemampuan pegawai dengan harapan dapat memperluas pengetahuan terhadap suatu tugas atau pekerjaan sehingga dapat menunjukkan potensi pegawai.
   Rotasi posisi jabatan dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan dalam suatu posisi jabatan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu atau dapat terjadi karena perubahan organisasi untuk menunjang pengembangan Perusahaan.
b. Promosi
   Promosi merupakan perpindahan posisi suatu jabatan ke posisi jabatan lain yang memiliki nilai jabatan lebih tinggi dari posisi jabatan sebelumnya. Promosi pada pegawai bertujuan untuk mengembangkan potensi, karier, kreativitas, dan inovasi pegawai yang lebih baik sehingga produktifitas meningkat. Periode promosi dilaksanakan sesuai dengan masa penilaian kinerja. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan promosi adalah masa kerja pegawai, yudisium penilaian dan tidak sedang dalam proses sanksi.
c. Demosi
   Demosi merupakan perpindahan posisi suatu jabatan ke posisi jabatan lain yang memiliki nilai jabatan lebih rendah dari posisi jabatan sebelumnya. Penurunan posisi jabatan disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.

PROGRAM PENGEMBANGAN SDI BERKELANJUTAN

Human Capital Engagement 2016

Strategi pengembangan bisnis Perusahaan dapat didukung oleh karyawan yang memiliki *engage* terhadap Perusahaan. Internalisasi budaya Perusahaan menjadi faktor pendukung dalam menciptakan *engage* karyawan terhadap Perusahaan, kondisi tersebut tercermin dari nilai budaya kerja Perusahaan yang telah dimiliki karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut secara berkala Perusahaan melakukan *Survey* terhadap karyawan mengenai kepuasan karyawan dan penerapan nilai budaya kerja pada karyawan.

Dari pelaksanaan *survey* kepuasaan karyawan tahun 2016, diperoleh hasil dengan skor 99,6% yang menyatakan bahwa karyawan telah merasa puas atas *Work environment* dan *Work Value* yang dimiliki oleh Perusahaan. Selain itu, BNI Syariah melaksanakan *survey* mengenai penerapan budaya kerja pada karyawan sebagai bentuk *engage* terhadap Perusahaan. Hasil *survey* tersebut menunjukkan skor sebesar 85% yang menunjukkan bahwa karyawan telah memiliki persepsi positif atas nilai budaya kerja BNI Syariah.

Berdasarkan hasil *survey* tersebut Perusahaan menindaklanjuti dengan melakukan pelaksanaan sosialisasi dan merancang rencana program yang diperlukan Perusahaan sebagai perbaikan pada periode berikutnya. Perbaikan tersebut dituangkan dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank dan Anggaran Perusahaan pada periode berikutnya.

Performance Management System

BNI Syariah menjalankan manajemen kinerja melalui *Performance Management System* (PMS) sebagai awal dari proses pengembangan pegawai. PMS merupakan tolak ukur kinerja Perusahaan secara umum dan pegawai secara khusus sebagai landasan pemetaan pengembangan pegawai serta penghargaan kinerja pegawai. PMS BNI Syariah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Setting Key Performance Indicator* (KPI) dan target individu pegawai di mana pada tahapan ini KPI antar seluruh pegawai BNI Syariah disusun sedemikian rupa agar saling berkolerasi dan selaras dengan KPI Perusahaan.
2. *Monitoring* Tengah Tahun di mana pada tahapan ini kinerja tengah tahun pegawai untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan dilakukan evaluasi.
3. Penilaian Kinerja Akhir Tahun yaitu tahapan terakhir dari proses PMS di mana penilaian kinerja pegawai untuk 1 kali periode dilakukan evaluasi.

Human Capital Information System (HCIS)

BNI Syariah melaksanakan implementasi *Human Capital Information System* (HCIS) untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dengan tersedianya sarana (*tools*) yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu mengenai *Human Capital* dalam pengambilan segala keputusan terhadap perencanaan bisnis dan proses pengelolaan *Human Capital.*

Implementasi HCIS dilaksanakan dalam 3 fase, dengan detail sebagai berikut:

Pada tahun 2016 ini penggunaan HCIS diarahkan untuk optimalisasi modul strategis terkait kepegawaian, seperti pembenahan manajemen kompetensi dan piloting pelaksanaan *performance management*, dan *talent management* (termasuk di dalamnya adalah pembenahan *career path* dan *succession planning*). Selain itu, penggunaan HCIS pada tahun 2016 ini juga melakukan optimalisasi kegiatan operasional kepegawaian, seperti proses rotasi/mutasi/promosi pegawai dan inisiasi *pay for person*. HCIS merupakan sarana penunjang dalam implementasi rencana pengelolaan pegawai berdasarkan kompetensi, serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana monitoring remunerasi, pengembangan, dan karir pegawai.

Rekrutmen Pegawai

Rekrutmen internal dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di suatu unit kerja melalui proses promosi maupun rotasi pegawai. Apabila pemenuhan kebutuhan pegawai tidak dapat dipenuhi secara internal maka dilaksanakan pemenuhan secara eksternal, yang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu memasang iklan melalui media koran maupun elekronik dan website BNI Syariah www.bnisyariah.co.id/karir, *job fair*, *talent scouting* atau *job searching* melalui universitas/kampus-kampus.

Proses pelaksanaan rekrutmen dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Adanya pembagian ini bertujuan sebagai acuan Perusahaan dalam proses rekrutmen dan memudahkan pelaksanaan rekrutmen di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Kewenangan proses rekrutmen yang dapat dilakukan pada Kantor Cabang adalah untuk jenjang *Clerk*, sedangkan untuk jenjang *Junior Manager* ke atas berada pada Divisi Sumber Daya Insani.

Tahapan rekrutmen untuk jenjang *Clerk* adalah sebagai berikut:

Tahapan Rekrutmen *Clerk*

Tahapan rekrutmen untuk Jalur ODP adalah sebagai berikut:

Tahapan Rekrutmen
"Officer Development Program"

Tahapan rekrutmen untuk Jalur *Professional Hire* adalah sebagai berikut:

Tahapan Rekrutmen Professional Hire

Selama tahun 2016 proporsi jumlah pegawai antara pegawai *prohire* dengan *fresh graduate*, baik untuk jenjang *clerk* maupun program *Junior Manager* adalah sebagai berikut :

Proporsi Rekrutmen BNI Syariah 2016

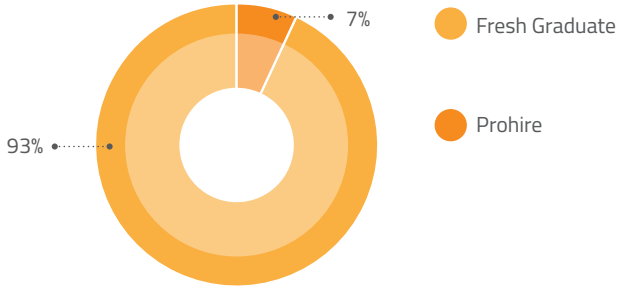

Data Rekrutmen

Adapun metode pelaksanaan rekrutmen eksternal dilakukan dengan *Direct Hire* (rekrutmen dilakukan secara langsung oleh pihak BNI Syariah) maupun dengan Alih Daya (Rekrutmen pegawai dilakukan menggunakan pihak ketiga) Selama tahun 2016, BNI Syariah menerima pegawai dengan status *Prohire* dan *Freshgraduate*, sesuai dengan kebutuhan kekosongan pada unit organisasi.

Penerimaan pegawai kategori *Prohire* :

NO	Jabatan	Gender	
		Pria	Wanita
1	EXECUTIVE MANAGER	1	2
2	MANAGER	1	2
3	JUNIOR MANAGER	2	21
Jumlah Pegawai		4	25

Penerimaan Pegawai berdasarkan *Freshgraduate*:

NO	Jabatan	Gender	
		Pria	Wanita
1	JUNIOR MANAGER	23	13
2	CLERK	190	187
Jumlah Pegawai		213	200

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 2016

Perkembangan dan kondisi perekonomian selama tahun 2016 memberikan tantangan dan peluang bagi BNI Syariah. Sehubungan dengan kondisi tersebut Perusahaan melakukan strategi pengembangan pegawai. Untuk mengubah keduanya menjadi keuntungan bagi Perusahaan, diperlukan strategi yang jitu serta Sumber Daya Insani (SDI) yang handal dan berkompeten.

Unit *Learning Center* BNI Syariah, memiliki mekanisme dalam menyusun program pengembangan yang berkelanjutan. Berdasarkan *Training Need Analysis* (TNA) dari setiap unit kerja di BNI Syariah, unit *Learning Center* BNI Syariah menyusun program pengembangan yang berkelanjutan dengan mengacu kepada rencana strategis Perusahaan dan kompetensi yang diperlukan.

BNI Syariah telah menerapkan CBHRM beberapa tahun belakangan. Semua bentuk pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Insani berdasarkan kepada kompetensi, termasuk aktivitas pelatihan dan pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai BNI Syariah akan memfokuskan *ke job competencies* posisi saat ini dan posisi di masa yang akan datang sesuai dengan rencana pengembangan karirnya. Dengan demikian setiap pegawai akan memiliki rencana pengembangan inidividu serta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh program pengembangan.

Talent Management

BNI Syariah menyusun beberapa program khusus terkait dengan pengelolaan *talent* untuk mempersiapkan *future leader* di masa yang akan datang, untuk menunjang tujuan tersebut dilakukan proses asesmen kepada pegawai dengan *level* manajerial serta pegawai yang terkategori sebagai pegawai berbakat. Proses asesmen tersebut diselenggarakan oleh BNI Syariah dengan bekerja sama dengan konsultan independen untuk mendapatkan kompetensi masing-masing pegawai sebagai salah satu syarat dalam melakukan identifikasi *talent*.

Pada dasarnya, tujuan *Talent Management* adalah:

a. Mencari, mengembangkan dan mempertahankan pegawai "*talent*" untuk mendukung pencapaian strategi bisnis Bank
b. Membentuk calon pemimpin di masa depan (*future leader*) yang siap untuk menempati jabatan-jabatan *key position* yang berpengaruh terhadap performa Perusahaan secara umum.
c. Mengelola perencanaan suksesi (*succession plan*) secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang.

Program *Talent Management* BNI Syariah yang telah dilaksanakan untuk mendukung tujuan tersebut adalah:

a. *Talent Identification*
   BNI Syariah telah melakukan identifikasi *talent* dengan menggunakan 2 kriteria yaitu, kinerja dan potensi. Hasil proses identifikasi *talent* tersebut adalah *mapping* pegawai berdasarkan 9 *box matrix*. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan administratif di atas (kinerja dan potensi) serta mendapatkan validasi oleh komite *talent*, dikelompokkan ke dalam *talent pool*.
b. *Talent Acquisition*
   BNI Syariah telah menerapkan program ODP (*Officer Development Program*), yaitu program pengembangan kepemimpinan melalui jalur rekrutment eksternal dengan menjaring alumni-alumni terbaik *fresh graduate* dari universitas-universitas *targeted* di Indonesia.
c. *Talent Development*
   1. *Job Rotation*
   2. *Special Assignment*
   3. *Promotion*

Program tersebut dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pengembangan pegawai. Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani melakukan pemantauan berkala berdasarkan laporan hasil *coaching* yang diberikan oleh *coach* (komite talent) terhadap masing-masing pegawai *talent*.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 2016

Jumlah pelatihan yang diberikan BNI Syariah kepada karyawan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 25 pelatihan dibandingkan tahun 2015, menjadi 283 pelatihan.

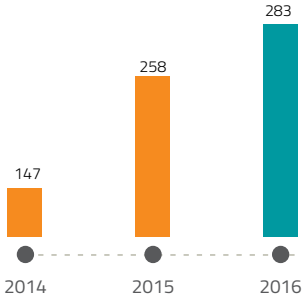

Secara umum kategori pelatihan di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	Jumlah Pelatihan
Pelatihan *Hard Skill*	266
Pelatihan *Soft Skill*	17
Jumlah Pelatihan	283

Adapun jumlah penyelenggaraan pelatihan selama tahun 2016 diikuti oleh 4352 peserta pelatihan dengan keterangan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Peserta Pelatihan
Januari	879
Februari	327
Maret	154
April	343
Mei	448
Juni	49
Juli	295
Agustus	524
September	383
Oktober	204
November	312
Desember	434
Total	4352

Berdasarkan Jabatan, peserta pelatihan sebagai berikut :

Jenjang Jabatan	Jumlah Peserta Pelatihan
Clerk	1945
Junior Manager	1741
Manager	465
Senior Manager	163
Executive Manager	38
Jumlah	4.352

Berikut terlampir jenis-jenis pelatihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016. Dalam pelaksanaan pelatihan 2016, Perusahaan memberikan fasilitas pelatihan kepada seluruh pegawai dalam bentuk:

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 2016

Jenis Pelatihan	Kompetensi yang Diharapkan	Jumlah Pelatihan	Jenjang Jabatan Peserta						Jumlah
			1	2	3	4	5	6	
Pelatihan Management Risiko		17	2	127	38	5	-		172
Pelatihan Bidang Tresuri & Internasional		15	9	154	12	-	-		175
Pelatihan & Sertifikasi bidang Teknologi		20	3	19	7	2	1		21
Pelatihan bidang SDI		16	6	26	8	2	1		43
Pelatihan Soft Skill		13	3	28	56	10	3		100
Asisten Development Program 2016		15	182	-	-	-	-		182
Officer Development Program		7	-	152	-	-	-		152
Communication, Selling & Negotiation Skill		18	316	158	12	-	-		486
Pelatihan / Seminar / Workshop Bidang Hukum dan Kepatuhan		20	25	76	10	-	4		120
Pelatihan Perbankan Syariah		1	-	-	-	2	1		3
Pelatihan Collection Leadership & Management		6	161	79	44	10	-		294
Pelatihan Bidang Recovery & Remedial		4	62	6	-	-	1		70
Pelatihan Back Office Head		2	7	63	-	-	-		70
Pelatihan Administrasi Pembiayaan		4	50	85	1	-	-		136
Front Liner Development Program 2016		7	385	48	-	-	-		433
Training for Trainers		10	20	129	52	16	-		217
Pelatihan / Seminar / Workshop Bidang Audit Audit Training/Seminar/ Workshop		2	-	3	2	-	-		5
Refreshment Auditor		2	-	2	3	-	-		5
Refreshment Branch Internal Control		2	4	29	-	-	-		33
Pelatihan / Seminar / Workshop Bidang Risiko (Risiko Kredit, Risiko Hukum, Risiko Operasional, dll)		11	2	46	19	-	8		75
Sertifikasi Wealth Management		2	-	5	-	-			5

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 2016

Jenis Pelatihan	Kompetensi yang Diharapkan	Jumlah Pelatihan	Jenjang Jabatan Peserta						Jumlah
			1	2	3	4	5	6	
Pelatihan Bidang Akuntansi, Perpajakan dan Laporan Keuangan		9	45	55	22	7	3		132
Management Aset		1	1	-	-	-	-		1
Pelatihan Marketing and Corporate Communication & Public Relation		6	4	1	1	-	-		6
Pelatihan BOD & BOC		6	-	-	-	-	-	9	9
Pelatihan Risiko Bisinis		1	-	-	1	47	-	-	48
Pelatihan / Refreshment Unit SME		4	-	50	19	8	-	-	77
Sukuk Accounting, Financial & Reporting Aspect		2	17	70	17	10	-	-	114
Economic & Bussines Projection in Banking		4	-	-	1	-	1	-	2
Corporate & Capital Budgeting		1	-	1	2	-	-	-	3
Capital Regulation & Operational Impact		3	1	1	-	-	-		2
Pelatihan Pembiayaan (Linkage, Sektor Industri)		4	17	8	-	-	-	1	26
Pelatihan/Sertifikasi/ Workshop Network & GA		3	1	1	-	-	-	-	2
Pelatihan Pembiayaan Konsumer		22	307	268	125	42	-	-	742
Project Management		2	-	1	2	-	-	-	3
Pelatihan Produk Dana		6	213	26	-	-	-	-	239
Pelatihan Bidang Design & Corporate Branding		4	24	15	12	-	-		51
Pelatihan Bidang Perencanaan & Strategi Perusahaan		12	3	8	-	1	-	-	12
Pelatihan / Seminar / Workshop bidang Card Business		3	-	1	2	1	-	-	4
Pelatihan Excell, powerpoint & Access		4	75	1	-	-	-	-	76

Keterangan
1 = Assistant
2 = Officer
3 = Manager
4 = Senior Manager
5 = Executive Manager
6 = BOC & BOD

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 2016

Dalam pelaksanaan pelatihan 2016, Perusahaan memberikan fasilitas pelatihan kepada seluruh pegawai dalam bentuk :

No	Fasilitas	Keterangan
1	Transportasi Pegawai s.d. Tempat Pelatihan	Transportasi s.d. tempat pelatihan
2	Akomodasi	
	Penginapan	Bagi peserta di luar domisili tempat pelatihan
	Konsumsi Sarapan	Bagi peserta yang menginap
	Konsumsi Istirahat Pagi & Sore	Peserta mendapatkan *coffe break* dan konsumsi ketika Break.
	Konsumsi Makan Siang	Peserta pelatihan mendapatkan konsumsi Makan siang
	Konsumsi Makan Malam	Jika pelatihan s.d. malam
3	Instruktur yang kompeten di bidangnya	Peserta bebas melakukan tanya jawab atau diskusi
4	Tempat Pelatihan yang memadai	Tempat pelatihan diadakan menggunakan pelatihan yang memadai seperti sarana ruang pertemuan di Hotel.
5	Daftar Ongkos Perjalanan	Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan pelatihan dengan jarak melebihi 80KM
6	Uang Transportasi bila pelatihan di hari libur	Bagi pegawai yang mendapatkan pelatihan di hari libur, mendapatkan uang penggantian transportasi.
7	Training Kit	Peserta Pelatihan mendapatkan Modul atau *handbook*
8	Sertifikat	Pelatihan khusus

Jenis pelatihan *unit learning center* terbagi menjadi 2 yaitu pelatihan *hardskil* dan *softskill*. Tahun 2016, titik berat pelatihan yang diberikan adalah pelatihan *hardskill* dengan porsi sebanyak 81% dan pelatihan *softskill* dengan porsi sebanyak 9%. Hal ini dimaksudkan karena sebagian besar pegawai BNI Syariah adalah di usia range 25 – 30, sehingga diperlukan pelatihan *hardskill* untuk menunjang pekerjaan. Tahun 2017 ditargetkan porsi pelatihan hardskil sebanyak 80% dan pelatihan *softskill* sebesar 20% , komposisi pelatihan *hardskill* masih lebih besar presentasinya, hal ini masih sama dengan tahun 2016, karena pegawai yang *range* usianya di 25 – 30 lebih banyak, sehingga perlu diadakan pelatihan *hardskill* untuk menunjang pekerjaan.

Investasi Pengembangan SDI

BNI Syariah menyadari bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan dibutuhkan pegawai dengan skill dan komptensi yang tinggi. Untuk itu, BNI Syariah terus melaksanakan program pelatihan dan pengembangan pegawai secara berkesinambungan. Pada tahun 2016 investasi yang dikeluarkan BNI Syariah untuk program pengembangan dan pelatihan pegawai mencapai Rp25.840.000.000,- jumlah tersebut setara dengan 5% dari jumlah biaya tenaga kerja yang pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp486.492.133.982,- . Dengan demikian, BNI Syariah sudah memenuhi Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/310/ KEP/DIR Tahun 1999 Tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum yang menyebutkan bahwa Bank wajib menganggarkan 5% dari Biaya Tenaga Kerja untuk program pengembangan karyawan.

Bagi BNI Syariah, program pengembangan dan pelatihan pegawai merupakan investasi yang *return*-nya akan dirasakan secara berkelanjutan oleh Perusahaan.

Tahun Year	Biaya Tenaga Kerja Labor Cost	Biaya Pengembangan Pegawai	% Biaya Pengembangan Terhadap Biaya Tenaga Kerja
2015	Rp486.492.133.982	Rp640.777.132.253	4%
2016	Rp556.405.975.799	Rp567.775.547.299	5%

Program Pensiun

BNI Syariah menerapkan program pensiun yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, program pensiun pegawai dengan jenjang *Clerk* dan program pensiun pegawai dengan jenjang Junior Manager ke atas. Program pensiun untuk jenjang *junior manager* berlaku saat pegawai memasuki ulang tahun ke-56 (lima puluh enam), sementara untuk jenjang *Clerk* program tersebut berlaku saat pegawai memasuki ulang tahun ke-35 (tiga puluh lima), program ini berlaku bagi seluruh pegawai yang bergabung dengan BNI Syariah setelah bulan Juni 2008.

Bank memberikan imbalan kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal untuk program pensiun jenjang *junior manager* ke atas, atau 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia pensiun untuk jenjang *Clerk*.

Bentuk manfaat yang diterima oleh pegawai adalah program pensiun imbalan pasti adalah hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Perusahaan dengan memperhatikan faktor jenjang jabatan pegawai, masa kerja, dan penghasilan bulanan pegawai. Program dana pensiun pegawai BNI Syariah, untuk saat ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI).

Besar iuran pensiun untuk masing-masing pegawai diatur di dalam ketentuan Perusahaan, yang terdiri atas iuran karyawan dan iuran Bank. Besar iuran karyawan adalah sebesar 3,5% dan kontribusi Perusahaan yaitu sebesar 11,5%. Besar iuran tersebut dihitung dari nilai total cash (TC) masing-masing pegawai.

Di tahun 2016, total terdapat 5 (lima) orang pegawai yang telah pensiun dari BNI Syariah, berikut kami sampaikan data pegawai yang telah pensiun.

No.	NPP	Nama Pegawai	Tahun Pensiun	Keterangan
1	73014	RETNO WIDIASTUTININGSIH	2016	Pensiun Normal
2	73007	ADIMAR	2016	Pensiun Normal
3	73006	MOHAMMAD IKHBAL	2016	Pensiun Dini
4	73039	TEUKU TRISNA VISKA	2016	Pensiun Dini
5	73000	RACHMAT SUTOMO	2016	Pensiun Normal

STATISTIK PEGAWAI

Sejalan dengan perkembangan usaha dan jaringan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan, jumlah pegawai BNI Syariah terus mengalami pertambahan. Penambahan jumlah pegawai tersebut telah dilakukan berdasarkan kebutuhan dan analisa yang mendalam, sehingga pengembangan organisasi tidak menjadi beban tambahan bagi Perusahaan.

Sepanjang tahun 2016, penambahan pegawai baru mencapai 5% dari tahun sebelumnya. Total jumlah pegawai BNI Syariah sampai dengan Desember 2016 mencapai 4450 orang. Penambahan pegawai tersebut didominasi untuk pemenuhan pegawai sebagai dampak dari pengembangan struktur organisasi pada beberapa unit bisnis dan pengembangan organisasi kantor wilayah. Secara lebih detail, penambahan pegawai lebih banyak diisi oleh pegawai dengan jenjang jabatan *clerk*.

Perkembangan jumlah pegawai BNI Syariah dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

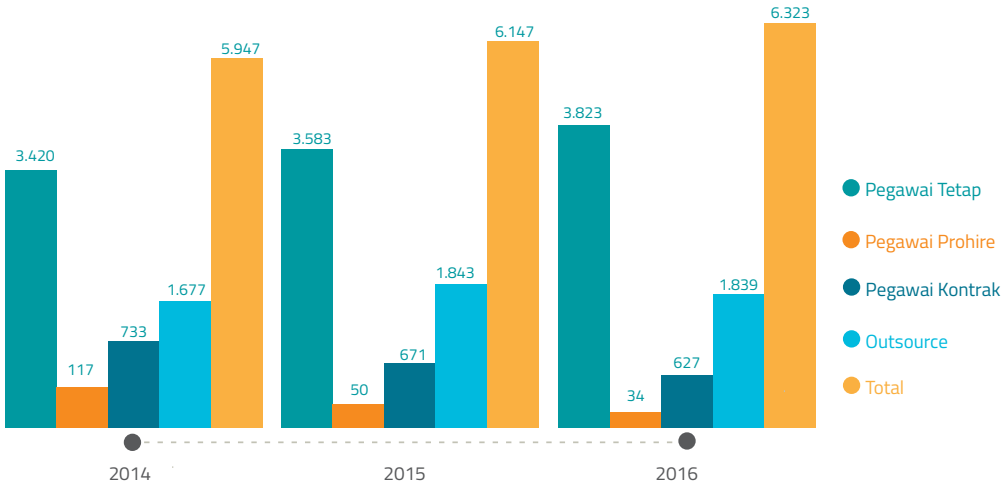

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah pegawai BNI Syariah terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Jumlah pegawai tetap terus bertambah sementara untuk pegawai kontrak dan *outsource* relatif tetap. Penambahan pegawai tetap seiring dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah, selain memperluas jaringan kantor, BNI Syariah juga menambah jumlah pegawainya.

Penambahan jumlah pegawai didasarkan pada perhitungan kebutuhan bisnis Perusahaan. Berikut Perkembangan jumlah pegawai selama 3 (tiga) tahun terakhir termasuk dengan data pegawai alih daya (tenaga *outsource*).

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap (Pegawai Tetap) Berdasarkan Level Organisasi

Demografi pegawai tetap berdasarkan level organisasi (jenjang jabatan) diluar data pegawai status kontrak dan alih daya (*outsource*) dapat dilihat pada komposisi sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Jenjang Jabatan	2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Clerk	1,851	51.7%	1,961	51.3%
Junior Manager	1,313	36.6%	1,421	37.2%
Manager	300	8.4%	321	8.4%
Senior Manager	104	2.9%	99	2.6%
Executive Manager	15	0.4%	21	0.5%
Jumlah	3,583	100.0%	3823	100.0%

Dari tahun ke tahun Jumlah pegawai terbanyak berada pada *Level Clerk* sampai dengan *Junior Manager*, hal tersebut disebabkan jabatan-jabatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dan pelaksana operasional di BNI Syariah berada pada level tersebut. Untuk tahun 2016 pegawai pada level *Clerk* sampai dengan *Junior Manager* mencapai 3.382 pegawai, atau mencapai 49% dari jumlah total pegawai.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada komposisi sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan				
Jenjang Pendidikan	2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	1	0.0%	1	0.0%
S2	180	4.2%	186	4.2%
S1	3,119	73.3%	3,334	74.9%
Akademi	937	22.0%	908	20.4%
SMA	18	0.4%	21	0.5%
Jumlah	4,255	100.0%	4,450	100.0%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Komposisi pegawai pada tahun 2016, mayoritas berada pada usia di bawah 30 tahun, yaitu mencapai 69% dari total pegawai. Berikut detail dari data yang dimaksud.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia				
Rentang Usia	2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
>50 tahun	11	0.3%	12	0.3%
>45 - 50 tahun	114	2.7%	146	3.3%
>40 - 45 tahun	156	3.7%	166	3.7%
>35 - 40 tahun	402	9.4%	428	9.6%
>30 - 35 tahun	552	13.0%	611	13.7%
>25 - 30 tahun	1,974	46.4%	2,076	46.7%
≤ 25 tahun	1,046	24.6%	1,011	22.7%
Jumlah	4,255	100.0%	4,450	100.0%

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin/*gender* dapat dilihat pada komposisi sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender				
Gender	2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pria	2,440	57.3%	2,579	58.0%
Wanita	1,815	42.7%	1,871	42.0%
Jumlah	4,255	100.0%	4,450	100.0%

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan lokasi kerja dapat dilihat pada komposisi sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja				
Lokasi	2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	1,011	23.8%	934	21.0%
Jawa	2,471	58.1%	2,733	61.4%
Kalimantan	181	4.3%	184	4.1%
Bali & Nusa Tenggara	213	5.0%	192	4.3%
Sulawesi	379	8.9%	407	9.1%
Jumlah	4,255	100.0%	4,450	100.0%

Berdasarkan lokasi kerja	Des 2015	Des 2016
Sumatera	1011	934
Jawa	2471	2733
Kalimantan	181	184
Bali & Nusa Tenggara	213	192
Sulawesi	379	407
Jumlah Pegawai	4255	4450

RENCANA PENGEMBANGAN ORGANISASI

Rencana pengembangan organisasi di tahun 2017 masih berpedoman pada peningkatan produktivitas, menciptakan sinergi antar unit bisnis untuk mengoptimalkan ekspansi bisnis dengan optimalisasi produktivitas pegawai *eksisting*.

1. Memperbanyak *sales people* yang dilengkapi dengan target bisnis individual masih menjadi fokus utama saluran pemasaran bisnis di BNI Syariah. Target individual akan tetap disesuaikan dengan target Cabang/ *Business Unit*. Dengan demikian diharapkan BNI Syariah dapat melampaui target bisnis yang telah ditetapkan.

2. Memperkuat sinergi antar Divisi Bisnis, khususnya bisnis yang menjadi portofolio terbesar di BNI Syariah, khususnya bisnis konsumer ritel. Sinergi diperkuat dengan menetapkan *crossing* target antar bisnis unit berikut:
   a. Bisnis Konsumer
   b. Bisnis *Funding*
   c. Bisnis Mikro

   Terkait dengan strategi tersebut, peningkatan sinergi dijalankan melalui penetapan KPI Individual berupa *Cross Selling* seluruh produk dana dan pembiayaan pada seluruh petugas *sales* di Cabang dan Cabang Mikro. Dalam lingkup pengembangan struktur organisasi, Cabang Mikro direncanakan berkembang menjadi Cabang yang mengarah pada *general business banking*, di mana produk-produk yang dijual di Cabang Mikro tidak hanya terbatas pada produk Pembiayaan Mikro, namun juga produk pendanaan serta pembiayaan konsumer sehingga perubahan yang dilakukan akan mengarah pada strategi tersebut. Pengembangan organisasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan *one stop services* bagi nasabah dan calon nasabah.

3. Fokus peningkatan CASA di BNI Syariah selain dijalankan dengan penguatan sinergi bisnis dan pertumbuhan jumlah petugas *sales*, juga diperkuat pada strategi pengembangan bisnis transaksional berbasis *Electronic Channel* serta pengembangan bisnis berbasis kerja sama dengan pihak ketiga terkait potensi pengelolaan harta (*wealth management*). Dalam lingkup pengembangan organisasi terkait dengan hal tersebut, Divisi Dana dan Transaksi akan dikembangkan tidak hanya pada bisnis *E-Banking*, namun juga bisnis *Bancassurance* dan pengelolaan kerja sama dengan Perusahaan DPLK.

4. Terkait dengan pengembangan bisnis dana, maka layanan operasional (*back office*) pada Divisi Operasional juga akan diperkuat seiring meningkatnya volume transaksi pada bisnis transaksional dengan rencana pengembangan organisasi Divisi Operasional.

5. Seiring dengan strategi penguatan bisnis berbasis *electronic channel* dan strategi pada ekspansi bisnis pembiayaan berbasis *skoring*, agar berjalan dengan efektif perlu dikembangkan pula organisasi Divisi Teknologi Informasi. Rencana pengembangan terfokus pada 2 hal, yaitu:
   a. Pengembangan unit-unit dalam rangka persiapan pemisahan *core banking system* dari BNI Induk.
   b. Restrukturisasi unit-unit terkait pengembangan aplikasi pendukung bisnis dan *office automation*.

6. Seiring dengan rencana ekspansi di bisnis Griya Swakarya dan Wakaf Hasanah, maka akan disusun organisasi dan SDI yang mendukung.

7. Mengubah Satuan Kerja Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan dan memindahkan APPU PPT dari Divisi Hukum ke Divisi Kepatuhan.

RENCANA PENGEMBANGAN ORGANISASI

Seluruh strategi tersebut akan diaplikasikan dalam bentuk pengembangan organisasi 2017 melalui pembentukan unit-unit baru dalam organisasi.

Secara lebih detail, Perubahan Struktur Organisasi yang akan dikembangkan di 2017 adalah sebagai berikut:

No	Divisi	Keterangan
1	Divisi Bisnis Mikro	Perubahan organisasi Cabang Mikro, mengakomodir fungsi *sales funding* dan *consumer financing*
2	Divisi Dana & Transaksi	Penyesuaian unit baru, *bancassurance business development* dan fokus pada peran *transactional banking*
3	Divisi Operasional	Pembentukan sentralisasi operasional dan penambahan petugas *E-Banking operation*
4	Divisi Teknologi & Informasi	Penambahan unit – unit *core & non core system*
5	Divisi Internal Audit	Spesialisasi fungsi Audit & Internal Control
6	Satuan Kerja Kepatuhan	Mengubah Satuan Kerja Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan dan memindahkan APPU PPT dari Divisi Hukum ke Divisi Kepatuhan.
7	Divisi Konsumer dan Pembiayaan Kartu	Pengembangan bisnis Griya Swakarya

07 TATA KELOLA PERUSAHAAN

"Sejalan dengan identitas sebagai Hasanah Life Style Bank, BNI Syariah terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dalam operasional Perusahaan."

Latar Belakang Good Corporate Governance (GCG)	224
Pencapaian GCG 2016	225
Manfaat Penerapan GCG Bagi BNI Syariah	227
Landasan Penerapan GCG BNI Syariah	228
Roadmap Tata Kelola Perusahaan	234
Sosialiasi GCG	236
Rencana Penerapan GCG 2017	236
Asesmen Penerapan GCG	237
Struktur GCG	243
Rapat Umum Pemegang Saham	244
Dewan Pengawas Syariah	250
Dewan Komisaris	259
Komisaris Independen	275
Direksi	267
Komite-Komite dibawah Komisaris	284
Komite di Bawah Direksi	300
Sekretaris Perusahaan	325
Penanganan Benturan Kepentingan	337
Internal Audit	338
Manajemen Risiko	346
Sistem Pengendalian Intern	359
Anti Gratifikasi	382
Sistem Pelaporan Pelanggaran	398

LATAR BELAKANG *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki komitmen untuk senantiasa berhasanah, yaitu berusaha memberikan manfaat yang luas bagi banyak pihak khususnya para *stakeholders*. Komitmen ini sudah tertanam sejak pertama kali BNI Syariah didirikan.

Demikian juga halnya dengan komitmen terhadap implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan Kesataraan, dalam operasional Perusahaan sehari-hari. BNI Syariah menilai prinsip GCG sejalan dengan prinsip syariah, sehingga mengimplementasikan prinsip GCG merupakan sebuah kebutuhan.

Komitmen BNI Syariah terhadap implementasi prinsip GCG dapat dilihat dari kesungguhan dalam melakukan penyempurnaan struktur dan proses implementasi GCG secara berkelanjutan, dengan prinsip selalu ada ruang untuk perbaikan. BNI Syariah meyakini bisnis yang dijalankan dengan kesempurnaan implementasi GCG (GCG *Excellence*) akan lebih memungkinkan untuk tetap kokoh dan *sustain* dalam jangka panjang.

Tahun 2016, BNI Syariah melaksanakan program GCG *Sounding* yang tujuannya untuk meningkatkan kepekaan insan BNI Syariah dalam hal niat, pemahaman, kesungguhan, dan konsistensi dalam praktik GCG di Perusahaan. Layaknya sebuah mesin, mekanisme GCG di BNI Syariah tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran pergerakan dari setiap lini organisasi. Pada akhirnya kesadaran GCG tersebut diharapkan dapat bertransformasi menjadi budaya yang tertanam pada setiap insan BNI Syariah.

Skema Penerapan GCG BNI Syariah

PENCAPAIAN GCG 2016

Sejak pendiriannya di tahun 2010, BNI Syariah terus berupaya menyempurnakan dan menerapkan pratik *Good Corporate Governance* (GCG) selaras dengan tuntutan regulasi dan *best practice* yang berlaku di bidang perbankan. Manajemen tidak pernah bosan menyampaikan pesan kepada setiap insan BNI Syariah agar konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dan menjadikannya sebagai budaya kerja bersandingan dengan usaha dalam menegakkan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Usaha yang secara konsisten dilakukan BNI Syariah dalam menerapkan prinsip GCG telah mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal. Tahun 2016 BNI Syariah memperoleh sejumlah penghargaan di bidang GCG, antara lain:

Trusted Company
Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Diselenggarakan oleh IICG dan SWA

GCG Terbaik Bank Syariah Indonesia
Predikat Sangat Baik (A)
Ajang Indonesia GCG Award II-2016
Diselenggarakan Economic Review dan IPMI

Peringkat 1 GCG V-2016 Buku 2 Syariah Aset>10T
Anugerah Perbankan Indonesia V-2016
Diselenggarakan Economic Review dan Perbanas

The Best Quick Minded Corporate Secretary for Indonesia Syariah
Indonesia Corporate Secretary . Communication Award 2016
Diselenggarakan Economic Review

Sustainable Finance Award 2016
Pemenang Kategori Perbankan Syariah
Diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan

Penghargaan-penghargaan yang diterima tahun 2016 tersebut menunjukkan efektifitas penerapan prinsip-prinsip GCG di BNI Syariah, termasuk usaha-usaha perbaikan keberlanjutan yang dilakukan oleh manajemen. Pencapaian ini diikuti dengan peningkatan kinerja BNI Syariah secara keseluruhan.

Alhamdulillah, di tahun 2016 BNI Syariah berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 21,38% dari Rp228,53 Miliar di tahun 2015 menjadi Rp277,38 Miliar pada tahun 2016.

Adapun pokok-pokok laporan kinerja keuangan BNI Syariah 2016 lainnya adalah sebagai berikut:

- Total Aset mengalami pertumbuhan sebesar 23,01% sehingga mencapai Rp28.314 Miliar
- Pembiayaan yang diberikan naik sebesar 15,36% atau mencapai Rp20.494 Miliar
- Total Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 25,41% menjadi Rp24.233 Miliar
- Rasio Dana murah (CASA) yang terdiri dari Giro dan Tabungan meningkat dari 46,15 % menjadi 47,63%.

- Investasi meningkat 49,96% menjadi Rp6.036 Miliar
- Total ekuitas meningkat 12,23% menjadi Rp2.487 Miliar
- Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 14,92%. Pencapaian CAR tersebut masih di atas persyaratan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 9,39%
- Rasio NPF gross 2,94%
- ROE 11,94%
- ROA 1,44%
- FDR 84,57%
- Nett Imbalan 8,32%
- BOPO 87,67%
- Coverage 92,57%%.

Pefindo

Keberhasilan penerapan prinsip GCG juga tercermin dalam penilaian *rating* sukuk dan *rating corporate* yang dilakukan oleh Pefindo, yaitu:

- *Rating* Sukuk Mudharabah I Tahun 2016 PT Bank BNI Syariah senilai Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) untuk periode 1 Februari 2016 sampai dengan 1 Februari 2017 mendapat nilai idAA+ (sy) (*Double A Plus* Syariah). Penilaian ini menunjukkan kemampuan BNI Syariah untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas kontrak pendanaan syariah relatif dibanding emiten Indonesia lainnya adalah sangat kuat.

- Rating BNI Syariah mendapat nilai id AA+ *(Double A Plus; Stable Outlook).* Nilai ***rating*** ini menandakan BNI Syariah memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang relatif dibandingkan obligor Indonesia lainnya.

Rating Tingkat Kesehatan Bank

Hasil *self assessment* 2016 terhadap tingkat kesehatan BNI Syariah adalah peringkat PK 2, mencerminkan kondisi fisik yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

MANFAAT PENERAPAN GCG BAGI BNI SYARIAH

Prinsip-prinsip umum *Good Corporate Governance* sejalan dengan prinsip Syariah. Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama yaitu *Shidiq* (benar), *Fathonah* (cerdas), *Amanah* (dapat dipercaya) dan *Tabligh* (menyampaikan) atau disingkat ShiFAT. Dari keempat kesatuan ShiFAT nabi dan rasul dapat diturunkan asas *Good Governance* Bisnis Syariah yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku umum dalam dunia usaha yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan GCG (prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran) berdasarkan *standard* yang ditetapkan regulasi atau *best practice* secara konsisten dan dibarengi perbaikan berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BNI Syariah, yaitu:

- Perusahaan akan memiliki pondasi dan mekanisme tata kelola Perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga Peraturan Perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja Perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan Bank yang *sustainable*.
- Meningkatnya nilai Perusahaan *(corporate value)* yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada Pemegang Saham. Kepercayaan Pemegang Saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BNI Syariah ke depan.
- Membentuk citra yang baik bagi BNI Syariah sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikatkan kerjasama dengan BNI Syariah. Selain itu secara tidak langsung BNI Syariah akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia.
- Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong:
  - √ Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat, dan keberkahan dalam berbisnis.
  - √ Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
  - √ Kesinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah Saw.
  - √ Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ kelembagaan dari entitas bisnis syariah yang bersangkutan.
  - √ Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
  - √ Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi Pemangku Kepentingan.
  - √ Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.

LANDASAN PENERAPAN GCG BNI SYARIAH

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BNI Syariah mengacu pada:

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola Perusahaan yang amanah.

Nilai

Amanah: Salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti "dapat dipercaya". Dalam budaya kerja BNI Syariah, Amanah didefinisikan sebagai "Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal".

Jamaah: Perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, Jamaah didefinisikan sebagai "Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban"

Lima Prinsip GCG

Transparansi

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat Al Baqarah/2:282 yang artinya *"....Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi..."* dan berdasarkan hadits yang menyatakan *"...barang siapa melakukan ghisy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami"*, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan.

Transparansi mengandung unsur pengungkapan *(disclosure)* dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara obyektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat Al Isra/17:84 yang artinya *"Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian"*. dan dalam Al Isra ayat 36 yang artinya *"...Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban"*. Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermati nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Isra/17:14 yang artinya "*Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.*"

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan Pemangku Kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pertanggungjawaban (Responsibilitas)

Dalam hubungannya dengan prinsip responsibiltas (pertanggungjawaban), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana firman Nya dalam surat An

Prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran & Kesetaraan sejalan dengan prinsip Syariah yang melandasi operasional BNI Syariah.

Nisa/4:59: yang artinya *"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri diantara kamu..."*. Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*).

Independensi/Profesional

Dalam hubungannya dengan prinsip independensi bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap Istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*uul al bab*) yang dalam Al Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantaranya adalah "*Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik(sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)*" (Az Zumar /39:18).

Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah/5:8, yang artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan*".

Fairness atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.

LANDASAN REGULASI DAN KEBIJAKAN

Regulasi dan Kebijakan Ekstenal

- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Penilaian penerapan GCG BNI Syariah sesuai Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*
- Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis *Governance* diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2012.

Kebijakan Internal

a. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan SKB No.KP/DIR/397 & KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman GCG No.PP/S02/002-00/2016 tanggal 26 Juli 2016.

   BNI Syariah dalam rangka menjalankan penerapan GCG sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka membentuk Pedoman GCG ini. Hal ini juga dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada Industri perbankan syariah.

   Pedoman ini mengatur 11 (aspek) GCG sebagaimana *standard* peraturan OJK serta mengatur hal lainnya seperti prosedur pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di BNI Syariah.

b. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No.KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No.PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016.

   Dalam rangka mengatur pedoman tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta untuk menegakkan penerapan GCG maka dibentuk pedoman ini. Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi sekaligus petunjuk pelaksanaannya juga mengatur tentang hubungan Direksi dan Dewan Komisaris serta prosedur pelaksanaan tugas Komite-komite.

c. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan DPS No.BNISy/DPS/SK/XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014.

   Dalam menjalankan usahanya, PT Bank BNI Syariah berpegang teguh kepada prinsip syariah dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas memastikan prinsip-prinsip syariah dijalankan oleh Perusahaan. Dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai prinsip-prinsip GCG, maka dibuat Buku Pedoman Tata Tertib Kerja DPS ini.

d. *Internal Audit Charter* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KP/002/DIR/R tanggal 2 Juni 2014 tentang *Internal Audit Charter* PT Bank BNI Syariah.

   Internal Audit Charter PT Bank BNI Syariah adalah dokumen tertulis yang memuat visi dan misi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, pelaporan dan dokumentasi, perlindungan hukum, larangan dan sanksi kepada pemimpin dan pegawai *Internal Audit Division* PT Bank BNI Syariah.

e. Kebijakan Umum Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KP/005/DIR/R, tanggal 21 September 2015.

   Tujuan implementasi Manajemen Risiko adalah untuk memelihara kesehatan Bank, menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan. Dengan implementasi manajemen risiko yang baik Bank dapat melakukan pengendalian terhadap pengambilan risiko, pengelolaan portofolio dan pengoptimalan *risk-return trade off* sehingga Bank mampu memelihara reputasi baik, tumbuh dan berkembang.

   Dengan implementasi manajemen risiko PT Bank BNI Syariah dapat memberikan pelayanan yang baik, dapat menutup biaya bagi hasil dan biaya operasional sehingga dapat memberikan hasil. Di samping hal tersebut Bank harus dapat melakukan fungsi intermediasi keuangan dengan baik dalam kondisi perekonomian yang terjadi.

f. Kode Etik Insan BNI Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.BNISy/DIR/403, tanggal 23 Desember 2010.
   Untuk mendukung tercapainya visi BNI

Syariah dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen BNI Syariah telah menyusun kode etik insan BNI Syariah yang merupakan tuntunan dan perilaku bagi Insan BNI Syariah yang islami dengan berpedoman pada *akhlakul kharimah* (budi pekerti yang mulia) sebagai tuntunan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bersikap dan berprilaku baik terhadap mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya.

Kode etik ini mengatur beberapa hal seperti:

1. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara *kaffah* dan *istiqomah*;
2. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan *kemaslahatan* (maslahah) dan berlaku universal;
3. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar;
4. Larangan penyalahgunaan jabatan;
5. Menghindari benturan kepentingan;
6. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan Cindera mata (*Risywah*);
7. Menjaga nama baik BNI Syariah;
8. Menjaga kerahasiaan Bank;
9. Penggunaan *Corporate Identity*;
10. Kompetensi;
11. Menjadi panutan;
12. Adil;
13. Pengungkapan informasi;
14. Menjaga hubungan baik (*ukhuwah*) antar insan BNI Syariah;
15. Pekerjaan menjadi pembicara;
16. Sumbangan dan keikutsertaan dalam partai politik;
17. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja;
18. Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab;
19. Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial.

g. Kebijakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Kebijakan Program Penerapan APU-PPT).

   BNI Syariah sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum wajib berkontribusi dan bekerja sama dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh adanya dinamika nasional, regional maupun global serta diikuti dengan perkembangan produk aktivitas dan teknologi informasi Bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasiitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang canggih.

h. Strategi Anti *Fraud* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KP/006/DIR/R tanggal 26 Oktober 2015; dan berbagai kebijakan operasional bank sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan.

   Pedoman ini dibentuk untuk mencegah terjadinya *fraud* yang menimbulkan kerugian *financial* maupun *non financial* bagi Bank, nasabah dan atau pihak lain. Sistem atau strategi pengendalian internal yang baik akan efektif meminimalkan risiko *fraud*. Pedoman ini juga bertujuan untuk memberikan arahan bagi segenap insan BNI Syariah dalam melakukan pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki *system* sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.

i. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No.PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember 2016.

   Kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan interaksi antar Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya yang mungkin menimbulkan potensi benturan kepentingan. Benturan Kepentingan dapat diidentifikasi sebagai situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan BNI Syariah memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi,

keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan Perusahaan.

Untuk mencegah terjadinya potensi kerugian Perusahaan tersebut, serta mengurangi potensi terjadinya *fraud*, dan atau tindakan-tindakan KKN, maka dibentuk kebijakan/ pedoman ini. Dalam pedoman ini diatur ruang lingkup benturan kepentingan yang wajib dicegah, mekanisme penanganan benturan kepentingan, serta kewajiban internal pelaporan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

KOMITMEN IMPLEMENTASI PRINSIP GCG

Transparansi *(Transparency)*

Perusahaan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang diisyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan serta informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. Komitmen dalam mewujudkan prinsip Transparansi ditunjukkan oleh BNI Syariah melalui:

a. Memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi Perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada Pemangku Kepentingan, termasuk Pemegang Saham dan masyarakat.
b. Memiliki *website* resmi Perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Badan Regulator.
c. Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan Perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada Pemangku Kepentingan.
d. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan dan Perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.
e. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

Akuntabilitas *(Accountability)*

Pengelolaan BNI Syariah harus dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lain. Perwujudan dari prinsip akuntabilitas di BNI Syariah tercermin melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ Perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
b. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, dan strategi Perusahaan.
c. Meyakini bahwa semua organ Perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
d. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan.
e. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya.

f. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

Responsibilitas *(Responsibility)*

Pengelolaan usaha Bank harus dipastikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, termasuk juga prinsip-prinsip Syariah. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini BNI Syariah mewujudkan prinsip Pertanggungjawaban melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
b. Memiliki sistem teknologi informasi internal yaitu *Electronic Corporate Guideline* yang menjadi panduan bagi pegawai mengenai kebijakan internal BNI Syariah.
c. Memiliki Divisi Internal Audit, selain itu Bank memiliki Satuan Kerja Kepatutan yang berfungsi sebagai *second line of defense (ex ante)* yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta memastikan kepatuhan Bank terhadap Komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
d. Memiliki Divisi Kepatuhan yang memastikan kepatuhan Bank terhadap regulasi OJK dan badan regulator lain.

Profesionalisme *(Professional)*

Dalam mewujudkan prinsip Profesional, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah. Prinsip ini dipegang teguh oleh BNI Syariah dalam hal:

a. Komposisi Direksi, Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali.
c. Telah memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Insan BNI Syariah.

Kewajaran & Kesetaraan *(Fairness)*

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh BNI Syariah yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada Pemegang Saham minoritas dan Pemangku Kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, perwujudan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di BNI Syariah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Memperhatikan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
b. Memberikan kesempatan kepada seluruh Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan melalui mekanisme RUPS (bagi Pemegang Saham) serta mekanisme lainnya seperti surat menyurat ke alamat Perusahaan Gedung Tempo Pavilion I Lt 3-6, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10.11, Jakarta Selatan 12950, dan email: clean@bnisyariah.co.id.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Roadmap disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas berbagai aspek Tata Kelola Perusahaan yang perlu ditingkatkan pada setiap tahap.

Demi menjaga kesinambungan penerapan prinsip GCG, manajemen BNI Syariah telah menetapkan rencana jangka panjang implementasi GCG berdasarkan *roadmap* sebagai berikut:

Internalisasi prinsip GCG dalam operasional BNI Syariah merupakan perwujudan komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip *good governance*.

Tahun 2010-2011

Di awal pendirian BNI Syariah tahun 2010-2011, manajemen membangun *Governance Structure* yang terdiri dari struktur organisasi dan kebijakan-kebijakan internal sesuai kebutuhan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa usaha tersebut adalah pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris beserta piagam-piagamnya, kebijakan pedoman tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta Kebijakan Pedoman GCG. Pemenuhan struktur dan infrastruktur diharapkan dapat mendorong efektivitas pelaksanaan prinsip GCG di Bank secara keseluruhan.

Tahun 2012-2015

Dari tahun 2012-2015 manajemen melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap struktur, infrastruktur serta proses pelaksanaan GCG didasarkan kepada hasil *self assessment* setiap semester sebagai bagian dari laporan penilaian tingkat kesehatan Bank ke OJK. Penyempurnaan tersebut antara lain:

1. BNI Syariah senantiasa melaksanakan keterbukaan dalam pengelolaan Perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan tepat waktu kepada *stakeholders*.
2. BNI Syariah senantiasa melaksanakan pengungkapan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris, benturan kepentingan dan penyampaian laporan keuangan kepada *stakeholders* dan pihak lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. BNI Syariah senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak terkait lainnya sebagaimana ketentuan Bank Indonesia, OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu.
4. BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai *2nd line of defence (ex ante)* yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
5. BNI Syariah memiliki Unit Anti *Fraud* yang senantiasa menjalankan strategi anti *fraud* antara lain dengan:
   a. Penanganan *fraud* dan pelaporan kejadian *fraud* kepada otoritas yang berwenang secara rutin dan tepat waktu;
   b. Penandatanganan pakta integritas oleh segenap Insan BNI Syariah;
   c. Pelaksanaan strategi pengendalian *fraud* melalui program *Monday Reminder* (MORE), program *Anti Fraud Sharing Session* (AFSS), program *Alert System* (PAS), program Buku Saku BNI Syariah (BAS) serta Forum Anti *Fraud* (FAF);

d. Sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan penyimpangan/pelanggan yang bersifat rahasia dan memiliki mekanisme perlindungan pelapor.

6. BNI Syariah memiliki Kode Etik Insan BNI Syariah yang merupakan tuntunan dan prilaku bagi segenap Insan BNI Syariah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bersikap dan berprilaku baik terhadap mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya.
7. BNI Syariah memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
8. BNI Syariah melakukan penyempurnaan terhadap pedoman pelaksanaan program APU & PPT yang ditujukan bagi cabang/unit/divisi.
9. BNI Syariah telah memiliki aturan mengenai larangan menerima dan/atau memberi hadiah dalam rangka pelaksanaan GCG melalui Surat Edaran Direksi dan senantiasa mensosialisasikan larangan memberi dan/atau menerima hadiah tersebut kepada segenap cabang/unit/divisi setiap tahunnya.
10. *Fine Tuning* organisasi BNI Syariah yaitu dengan:
    a. Pembentukan unit/satuan/divisi yang berfungsi sebagai Sekretaris Perusahaan untuk memastikan pemenuhan penerapan ketentuan GCG serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
    b. Pemisahan antara Unit dana dengan unit yang melaksanakan pembiayaan konsumtif yang sebelumnya tergabung dalam satu unit guna terciptanya pengelolaan bisnis dan pengelolaan risiko yang lebih baik.
11. Memiliki dan mensosialisasikan *Compliance Information System* (CIS) yang berfungsi sebagai pusat data-data/dokumen terkait dengan organisasi, regulasi eksternal dan internal yang dapat mendukung pemenuhan ketentuan internal dan eksternal tepat waktu.
12. Penentuan pejabat-pejabat di kantor cabang BNI Syariah yang memiliki kompleksitas usaha tinggi untuk menjalankan fungsi APU & PPT pada cabang-cabang tersebut.

Tahun 2016

1. Tahun 2016, BNI Syariah melaksanakan penilaian GCG secara eksternal (*Corporate Governance Perception Index*/CGPI) melalui lembaga *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Berdasarkan penilaian tersebut BNI Syariah berhasil mendapatkan CGPI Award untuk kategori *Trusted Company*.
2. BNI Syariah melakukan *update* kebijakan seperti pedoman tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta pedoman Pelaksanaan GCG. Selain itu juga dilakukan penerbitan pedoman benturan kepentingan yang diharapkan dapat menciptakan budaya anti benturan kepentingan bagi pengurus dan pegawai BNI Syariah, serta mengurangi potensi terjadinya *fraud*.
3. Tahun 2015-2016 BNI Syariah melakukan sinergi tata kelola terintegrasi dengan BNI Induk selaku Pemegang Saham mayoritas melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI Induk.
4. Usaha-usaha manajemen dalam GCG *sounding* kepada setiap pegawai juga terus dilakukan guna meningkatkan GCG *awareness*. Usaha ini dilakukan melalui berbagai media seperti:
    a. Surat Direksi kepada segenap pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah salah satunya mengenai perihal anjuran untuk tidak menerima dan memberikan hadiah di masa lebaran;
    b. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan melalui sistem *Compliance Information System* (CIS);
    c. Sosialisasi kebijakan internal melalui sistem *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).

SOSIALIASI GCG

Untuk mewujudkan implementasi GCG yang merata di seluruh elemen Perusahaan, BNI Syariah melakukan sosialisasi GCG yang menyeluruh. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kampanye GCG khususnya terkait benturan kepentingan dan anjuran tidak menerima hadiah termasuk di masa lebaran melalui media internal BNI Syariah secara berkala melalui *e-mail blast*, stiker, *sheco* (email internal) kepada pegawai BNI Syariah di seluruh Indonesia.
2. Penyediaan *Electronic Corporate Guidelines* (ECG) di portal BNI Syariah sebagai aplikasi internal bagi setiap pegawai untuk mengakses kebijakan-kebijakan internal Perusahaan termasuk kebijakan terkait GCG.
3. Penyediaan *Compliance Information System* (CIS) di portal BNI Syariah sebagai aplikasi internal bagi setiap pegawai untuk mengakses Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan badan regulator serta untuk membaca *compliance opinion* yang dibuat secara berkala oleh satuan kerja kepatuhan BNI Syariah.

BNI Syariah terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas penerapan GCG agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

RENCANA PENERAPAN GCG 2017

Rencana GCG tahun 2017 berdasarkan Rencana Bisnis Bank, BNI Syariah akan melakukan perbaikan keberlanjutan yang bertujuan untuk meningkatan GCG *Awareness* seluruh insan BNI Syariah, antara lain:

a. Di awal tahun 2017, semua anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh pegawai BNI Syariah menandatangani "Komitmen GCG".
b. Menyusun juklak Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi (penetapan hari rapat rutin, panggilan rapat, materi rapat, mekanisme *dissenting opinion,* pemantauan pelaksanaan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Keputusan Rapat Direksi).
c. Me*review* BPP Tata Persuratan khusus untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengenai kewenangan tanda tangan, *counter sign,* format surat Dewan Komisaris & Direksi, format Surat Keputusan, rubrik surat, rubrik surat keputusan, bekerja sama dengan Divisi terkait.
d. Menyusun juklak pelaporan kepada pihak eksternal dengan tujuan menekan terjadinya keterlambatan pelaporan dan denda.
e. Menyusun juklak pelaksanaan GCG terkait kewenangan-kewenangan divisi seperti kewenangan pembentukan kebijakan dan sosialisasi GCG di unit fungsi kesekretariatan, kewenangan pengawasan/*monitoring* di unit fungsi kepatuhan, dan kewenangan menetapkan sanksi terkait pelanggaran GCG di unit fungsi pengelolaan sumber daya insani.
f. Menyusun pedoman CSR (mekanisme dan hubungan hukum antara BNI Syariah dan Yayasan Hasanah Titik).
g. Menyusun *tools* evaluasi GCG Internal.

ASESMEN PENERAPAN GCG

BNI Syariah secara berkala melakukan pengukuran penerapan prinsip-prinsip GCG dalam operasional Perusahaan sehari-hari. Pengukuran ini adalah untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.

Tahun 2016, selain melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan bahwa Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment)* terhadap pelaksanaan GCG, BNI Syariah juga melaksanakan pengukuran kualitas penerapan GCG oleh pihak eksternal.

Adapun hasil dari kedua asesmen GCG tersebut adalah sebagai berikut:

Penilaian Eksternal

BNI Syariah tahun 2016 pertama kali mengikuti penilaian GCG secara eksternal yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan melalui lembaga independen *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Dalam *event* CGPI *Award* dalam rangka penilaian dimaksud, BNI Syariah mampu meraih *award* kategori *Trusted Company*.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

A. Mekanisme Penilaian
   Program Riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Percepon Index* (disingkat dengan CGPI) dengan tema "*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Keberlanjutan, dilaksanakan pada bulan Juli s/d Oktober 2016, dengan tahapan sebagai berikut:
   1. *Self assessment* (SA) yaitu mengetahui persepsi *stakeholders* Perusahaan baik internal dan eksternal tentang implementasi GCG dalam bentuk kuisioner yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan seputar GCG yang perlu dijawab oleh responden. Responden meliputi seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) Perusahaan. Pertanyaan kuisioner SA mencakup beberapa aspek penilaian mulai dari komitmen, prinsip TARIF (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran), dll.
   2. Sistem dokumentasi, merupakan penilaian terhadap sistem dokumentasi Perusahaan diantaranya terkait dengan dokumentasi kebijakan, mekanisme, dan hasil dari implementasi sistem, konsep CG, dan hal-hal lain yang terkait dengan pencapaian kinerja, akuntabilitas, responsibilitas, serta penegakan prinsip-prinsip GCG.
   3. Makalah merupakan paparan manajemen/Perusahaan terkait dengan implementasi GCG yang dilakukan Perusahaan pada periode tahun penilaian.
   4. Observasi, merupakan konfirmasi informasi dengan tinjauan tim penilai ke Perusahaan dalam sebuah forum diskusi

bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen terkait dengan aspek penilaian. Observasi berupaya meyakinkan tim penilai atas informasi yang didapat pada 3 tahapan penilaian selanjutnya sebelum memberikan skor akhir penilaian.

Aspek Penilaian GCG dalam Perspektif Organisasi Pembelajar adalah:
1. Komitmen
2. Transparasi
3. Akuntabilitas
4. Responsibilitas
5. Independensi
6. Keadilan
7. Kepemimpinan
8. Strategi
9. Visi,Misi, Nilai & Makna
10. Etika
11. Budaya
12. Organisasi Pembelajaran

B. Hasil Penilaian
Berdasarkan Hasil Penilaian CGPI, BNI Syariah mendapatkan Skor sebesar **83, 91** dengan predikat "Terpercaya" dan Pencapaian Peringkat "***The Most Trusted Company***" sebagai berikut:

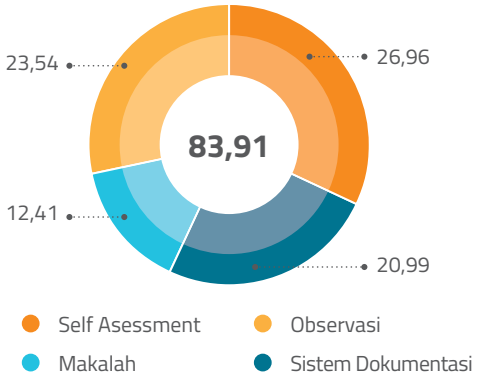

Penilaian Sendiri/Internal

BNI Syariah setiap semester melakukan penilaian sendiri pelaksanaan GCG di Perusahaan sebagai salah satu faktor laporan penilaian tingkat kesehatan Bank yang wajib disampaikan kepada OJK.

Pada akhir semester 1 tahun 2016 berdasarkan penilaian sendiri tersebut, BNI Syariah mendapatkan peringkat 2, dan pada semester 2 tahun 2016 mendapatkan peringkat 2, definisi peringkat 2 yaitu "Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **BAIK**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BNI Syariah."

Secara rinci pemenuhan 11 Aspek Pelaksanaan GCG di BNI Syariah berdasarkan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) semester 2 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

A. *Governance Structure*
1. Faktor-faktor positif aspek *Governane Structure*:
   a.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
   Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2016 (tahun buku 2015) telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan BNI Syariah dan *stakeholders*.
   b.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
   Bahwa komposisi dan kriteria Direksi yang diangkat berdasarkan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2016 (tahun buku 2015) telah sesuai

dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan BNI Syariah dan *stakeholders*.

c.) **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**
Komposisi Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi belum memenuhi ketentuan karena beberapa anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui RUPS Tahunan 2016 (tahun buku 2015) sedang menjalani *Fit and Proper test* namun hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas komite.

d.) **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**
Komposisi, kompetensi reputasi dan independensi DPS BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS BNI Syariah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

e.) **Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa.**
Secara umum BNI Syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS BNI Syariah yang memadai.

f.) **Penanganan Benturan Kepentingan.**
BNI Syariah telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Di tahun 2016 BNI Syariah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No.PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember 2016.

g.) **Penanganan Fungsi Kepatuhan Bank.**
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan BNI Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

h.) **Penerapan Fungsi Audit Intern.**
Struktur organisasi Audit Internal BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah juga telah memiliki Piagam Internal Audit, panduan internal audit, SDM Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.

i.) **Penerapan Fungsi Audit Ekstern.**
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

j.) **Batas Maksimum Penyaluran Dana.**
BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.

k.) **Transparansi Kondiri Keuangan**
BNI Syariah telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, yang dituangkan dalam:

a. Kebijakan Akuntansi dalam Laporan Keuangan yang di*review* oleh Direksi setiap tahun;
b. Prosedur yang dituangkan dalam BPP: Jurnal Akuntansi Syariah, Stelsel Rekening Syariah dan Penjelasannya, Kebijakan Akuntansi Syariah, HB Aktiva dan Pasiva Selain Aktiva Produktif dan Tetap, Rekonsiliasi dan Kebijakan Pos Terbuka, Operasional dan Sentra Akuntansi.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*

a.) **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
Dua dari anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Muhammad Syakir Sula sebagai Komisaris Independen dan Bapak Max Niode sebagai Komisaris sedang menjalani proses *fit and proper test*. Proses pengajuan berkas *fit and proper test* Dewan Komisaris ke OJK sudah dilakukan, dan diharapkan

dalam waktu dekat kedua anggota Dewan Komisaris akan segera efektif menjabat.

b.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pengangkatan Ibu Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan belum efektif. Untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Risiko dan Kepatuhan, maka Komisaris melalui surat keputusannya telah mengangkat Bapak Junaidi Hisom sebagai Pelaksana Tanggung Jawab Direktur Risiko dan Kepatuhan. Hal ini untuk menunjang tata kelola internal Perusahaan dan berlaku sampai pejabat yang diangkat RUPS telah efektif atau posisi kosong Direktur Risiko dan Kepatuhan telah terisi.

c.) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Komisaris Independen Bapak Muhammad Syakir Sula dan komisaris Bapak Max Niode yang menjadi anggota dan ketua di beberapa Komite belum efektif menjabat atau sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan OJK.

B. *Governance Process*

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process*

a.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pengangkatan/penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sudah melalui proses nominasi di Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah. Selain itu, kondisi 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang belum efektif, tidak mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perusahaan sehari-hari.

b.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Bahwa dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Pengangkatan/penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap GCG telah dioptimalkan, temuan hasil audit telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi pihak terkait, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

Pengangkatan anggota Direksi sudah melalui proses nominasi di Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah. Selain itu, Direktur Risiko dan Kepatuhan yang belum efektif, tidak mengganggu pelaksanaan tugas pengurusan Direksi terhadap Perusahaan sehari-hari.

c.) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Komite Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan/penggantian anggota DPS BNI Syariah serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik, dimana DPS BNI Syariah telah diangkat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e.) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

DPS BNI Syariah telah melakukan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa dengan melakukan diskusi dan *review* terhadap rencana kebijakan serta menilai pelaksanaannya

dengan memberikan opini syariah.

f.) Penanganan Benturan Kepentingan
Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan khususnya yang disebabkan adanya pihak terafiliasi atau pihak tertentu telah dilakukan keterbukaan informasi yaitu melalui pendataan oleh divisi yang berwenang.

g.) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan fungsi kepatuhan BNI Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai.

h.) Penerapan Fungsi Audit Intern
Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, BNI Syariah telah menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan BNI Syariah. Audit Internal BNI Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i.) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, BNI Syariah telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan serta mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.

j.) Batas Maksimum Penyaluran Dana
Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka BNI Syariah telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

k.) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
BNI Syariah telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* BNI Syariah
Tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance process* BNI Syariah

C. Governance Outcome
1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:

a.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Setiap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah optimal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan, salah satunya adalah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja BNI Syariah dengan perbandingan Semester II tahun 2015 ke Semester II tahun 2016.

b.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Governance outcome pada kriteria ini adalah dengan telah dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab Direksi secara optimal, maka efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut adalah memadai.

c.) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.

d.) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Komposisi, kompetensi, dan kriteria DPS BNI Syariah yang memadai, maka tugas dan tanggung jawab

sebagai DPS BNI Syariah dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

e.) **Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa**
Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

f.) **Penanganan Benturan Kepentingan**
Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada kriteria ini, maka BNI Syariah tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset BNI Syariah atau mengurangi keuntungan BNI Syariah dan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional BNI Syariah bebas dari intervensi Pemegang Saham /pihak terkai/pihak lainnya.

g.) **Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank**
Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada kriteria ini, maka penerapan terhadap fungsi kepatuhan BNI Syariah memberikan hasil yang memadai.

h.) **Penerapan Fungsi Audit Intern**
Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal BNI Syariah secara memadai. Audit Internal BNI Syariah dalam melaksanakan auditnya telah memenuhi ketentuan independensi dan obyektivitas pelaksanaan audit.

i.) **Penerapan Fungsi Audit Ekstern**
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BNI Syariah yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

j.) **Batas Maksimum Penyaluran Dana**
BNI Syariah telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh BNI Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

k.) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**
BNI Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* BNI Syariah

a.) **Penerapan Fungsi Kepatuhan**
Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan fungsi kepatuhan pada posisi 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda bagi BNI Syariah yaitu sebesar Rp555.000. Nilai denda tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai denda periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 yaitu sebesar Rp26.063.750. Penurunan terjadi sebesar Rp25.508.750 atau menurun sebesar 98%. Nominal denda tersebut masih termasuk ke dalam kategori *low* (rendah), dimana batas ambang denda kategori *low* maksimum sebesar Rp200 juta.

STRUKTUR GCG

Segenap lini insan BNI Syariah diharapkan menyadari perannya dan berkontribusi dalam penyelenggaraan GCG, serta melaksanakan tanggung jawabnya dengan semangat amanah dan jamaah. Adapun berikut diuraikan struktur GCG di BNI Syariah yaitu Organ, Divisi, Desk (Satuan Kerja) Perusahaan yang memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam menjaga penerapan GCG di BNI Syariah.

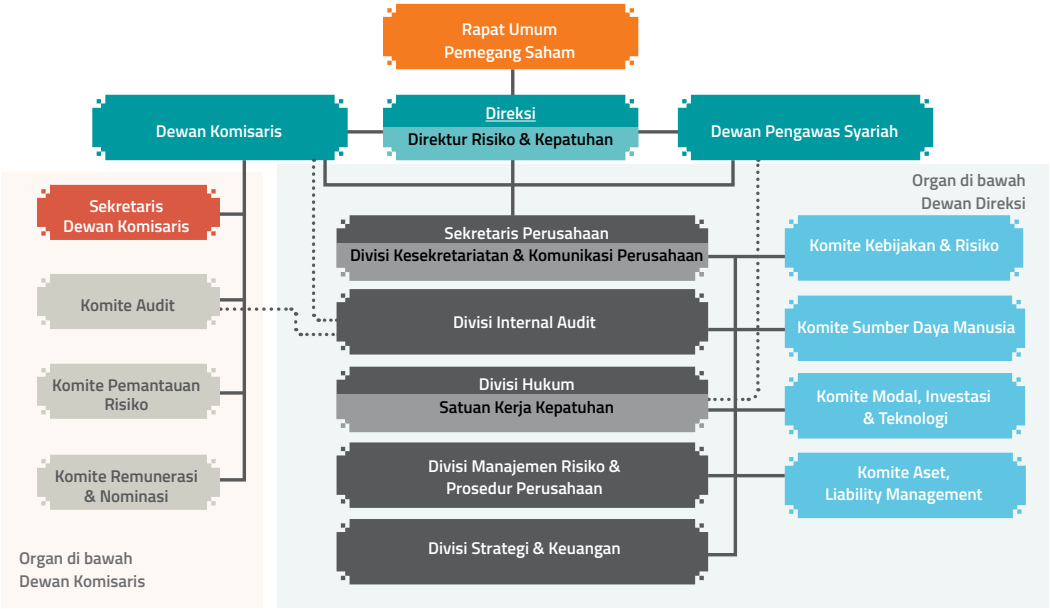

Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ pendukung yaitu:

- Organ Pendukung Dewan Komisaris:
  1. Komite Audit
  2. Komite Pemantau Risiko
  3. Komite Remunerasi dan Nominasi
- Organ Pendukung Direksi
  1. Komite di Bawah Direksi:
     a. Komite Kebijakan dan Risiko
     b. Komite Sumber Daya Manusia
     c. Komite Modal, Investasi dan Teknologi
     d. Komite Aset, Liabiliti Manajemen
  2. Sekretaris Perusahaan
  3. Internal Audit

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS merupakan forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan bertanggungjawab atas kinerja mereka terhadap Pemegang Saham. Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

BNI Syariah mempunyai beberapa keputusan penting yang hanya dapat diambil melalui RUPS diantaranya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Menentukan penggunaan keuntungan Perusahaan.
3. Penunjukan Akuntan Publik.
4. Pengangkatan dan persetujuan atas pengunduran/pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
5. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Perusahaan.
8. Penggabungan, peleburan, atau memisahkan Perusahaan.
9. Keputusan atas dilakukannya transaksi yang melebihi nilai tertentu, atau kriteria tertentu.
10. Dan lain-lain yang wajib memerlukan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

a. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.
b. Pemberitahuan rencana RUPS Tahunan disertai usulan mata acara RUPS kepada Para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
c. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dikeluarkan dapat menyampaikan usulan mata acara RUPS Tahunan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemanggilan.
d. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan dengan didahului pemanggilan RUPS melalui surat tercatat atau dengan surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
e. Pemanggilan RUPS wajib mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat serta laporan tahunan tersedia di kantor Perusahaan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
f. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka RUPS kedua dan ketiga dapat diselenggarakan sesuai mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar.
g. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lain, atau salah satu anggota Direksi, atau Pemegang Saham sesuai ketentuan anggaran dasar.
h. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS sebagai bukti sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
i. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana diatur di anggaran dasar.
j. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.Keputusan RUPS dibuat berita acara RUPS sebagai bukti sah tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Kuorum dan Keputusan RUPS

	RUPS Pertama		RUPS Kedua		RUPS Kedua	
	Kuorum	Keputusan	Kuorum	Keputusan	Kuorum	Keputusan
RUPS	Dihadiri lebih dari ½ dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari ½ jumlah seluruh saham yang hadir	Dihadiri paling sedikit 1/3 dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari ½ jumlah seluruh saham yang hadir	Ditetapkan ketua pengadilan negeri	Ditetapkan ketua pengadilan negeri
RUPS Mengalihkan Kekayaan atau Menjadikan Jaminan Hutang Kekayaan Perseroan Lebih dari 50% dari Seluruh Kekayaan Bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau lebih	Dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari 3/4 jumlah seluruh saham yang hadir	Dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari 3/4 jumlah seluruh saham yang hadir	Ditetapkan ketua pengadilan negeri	Ditetapkan ketua pengadilan negeri
RUPS Perubahan Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pengeluaran/ Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor	Dihadiri lebih dari ½ dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari ½ jumlah seluruh saham yang hadir	Dihadiri paling sedikit 1/3 dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari ½ jumlah seluruh saham yang hadir	Ditetapkan ketua pengadilan negeri	Ditetapkan ketua pengadilan negeri
RUPS Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari 2/3 jumlah seluruh saham yang hadir	Dihadiri paling sedikit 3/5 dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari 1/2 jumlah seluruh saham yang hadir	Ditetapkan ketua pengadilan negeri	Ditetapkan ketua pengadilan negeri
RUPS Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan, Pemisahan, Pengajuan Pailit, Pembubaran	Dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh saham	Disetujui paling sedikit ¾ dari jumlah seluruh saham yang hadir	Dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham	Disetujui lebih dari ¾ dari jumlah seluruh saham yang hadir	Ditetapkan ketua pengadilan negeri	Ditetapkan ketua pengadilan negeri

RUPS TAHUN 2016

Pada tahun 2016, BNI Syariah hanya menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 di Ruang Rapat Dar Ar Rahman Kantor Pusat BNI Syariah Lt. 3, Gedung Tempo Paviliun 1, Jakarta.

RUPS dimaksud dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 1.501.500 (satu juta lima ratus satu ribu lima ratus) lembar saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan.

RUPS Tahunan tahun 2016 dihadiri oleh perwakilan Pemegang Saham dan pihak-pihak terkait seperti Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, *Corporate Secretary* dan Notaris, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1	Abdullah Firman Wibowo	Perwakilan/Kuasa dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pemegang Saham Mayoritas)
2	Geger Nuryaman M	Perwakilan/Kuasa dari PT BNI Life Insurance (Pemegang Saham)
3	Dinno Indiano	Anggota Direksi (digantikan berdasarkan keputusan RUPS-T 2016)
4	Acep Riana Jayaprawira	Anggota Direksi (digantikan berdasarkan keputusan RUPS-T 2016)
5	Imam Teguh Saptono	Anggota Direksi
6	Junaidi Hisom	Anggota Direksi
7	Subarjo Joyosumarto	Anggota Dewan Komisaris (masa jabatannya berakhir pada RUPS-T 2016)
8	Harisman	Anggota Dewan Komisaris (masa jabatannya berakhir pada RUPS-T 2016)
9	Fero Poerbonegoro	Anggota Dewan Komisaris

Adapun agenda dan keputusan RUPS Tahunan 2016 adalah sebagai berikut:

Agenda	Keterangan
Mata Acara Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan – Firma anggota jaringan global PwC sebagaimana laporannya Nomor A160129003/DC2/MJW/2016 tanggal 29 Januari 2016, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Zakat Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan – Firma anggota jaringan global PwC sebagaimana laporannya No.A160129003/DC2/MJW/2016 tanggal 29 Januari 2016. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang: a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Zakat Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Mata Acara Kedua	Laporan realisasi penggunaan dana sukuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I tahun 2015 *listing* pada tanggal 15 Mei 2015 dengan dana Sukuk yang berhasil dihimpun senilai Rp50 Miliar dan hasil realisasi bersih senilai Rp497,22 Miliar setelah dikuarangi biaya penawaran umum senilai Rp2,78 Miliar. Adapun penggunaan dana sukuk telah seluruhnya digunakan pada tanggal 15 November 2015 dengan rincian 39,11% untuk pembiayaan produktif, 52,83% untuk pembiayaan konsumtif, 5,86% untuk pembiayaan mikro, 2,20% untuk pembiayaan kartu.

Agenda	Keterangan
Mata Acara Ketiga	Menyetujui penggunaan "Laba Bersih Tahun Buku 2015" sebesar Rp228.526.042.619 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sebagai berikut: 1. Cadangan wajib sebesar Rp22.852.604.262 (dua puluh dua Miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) atau setara 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun buku 2016 sesuai Pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Perseroan tidak membagikan dividen tahun buku 2015. 3. Laba bersih Perseroan setelah dikurangi butir 1 di atas, digunakan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan dalam rangka pengembangan bisnis.
Mata Acara Keempat	1. Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria Independen yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Perusahaan induk untuk tahun buku 2016, dengan pertimbangan bahwa laporan keuangan Perseroan akan dikonsolidasikan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya biaya jasa Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria Independen tahun buku 2016 dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemegang Saham mayoritas.
Mata Acara Kelima	Menyetujui tugas manajemen perseroan untuk tahun buku 2016 sebagai berikut: Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah; 1. Mencapai target-target bisnis Perusahaan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 2016 antara lain laba minimal Rp290 miliar dan CASA minimal 47,10%. 2. Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif dengan menjaga *Non Performing Financing* di bawah rata-rata industri yaitu maksimal 2,97% dan *coverage* minimal 85,07% serta melakukan ekspansi pembiayaan secara sehat. 3. Melakukan optimalisasi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 4. Permodalan yang kuat dengan menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) di atas minimum *requirement regulator* serta diiringi peningkatan kontribusi laba ditahan (*retained earning*).
Mata Acara Keenam	Menetapkan Tantiem untuk Tahun Buku 2015 akan ditentukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (BNI) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditutupnya Rapat, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-04/MBU/2014, tanggal 10-03-2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Mata Acara ketujuh	Menetapkan Remunerasi untuk tahun buku 2016, akan ditentukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (BNI) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditutupnya Rapat, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-04/MBU/2014 tanggal 10-03-2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Mata Acara kedelapan	Menyetujui pengangkatan pengurus baru yaitu Bapak Imam Teguh Saptono selaku Direktur Utama, Bapak Kukuh Rahardjo selaku Direktur Bisnis Konsumer, Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Risiko dan Kepatuhan, Bapak Fero Poerbonegoro selaku Komisaris Utama, Bapak Rizqullah sebagai Komisaris Independen, Bapak Max Niode sebagai Komisaris, dan Bapak Muhammad Syakir sebagai Komisaris Independen, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris setelah anggota Direksi dan Komisaris yang diangkat melalui RUPS ini lulus fit and proper test OJK adalah sebagai berikut: Direksi ▪ Direktur Utama: Imam Teguh Saptono ▪ Direktur Operasional: Junaidi Hisom ▪ Direktur Bisnis Konsumer: Kukuh Rahardjo ▪ Direktur Risiko dan Kepatuhan: Tribuana Tunggadewi Dewan Komisaris ▪ Komisaris Utama: Fero Poerbonegoro ▪ Komisaris Independen: Rizqullah ▪ Komisaris: Max Niode ▪ Komisaris Independen: Muhammad Syakir

REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun buku 2016, Direksi BNI Syariah telah merealisasikan keputusan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2015, yaitu antara lain:

Keputusan RUPST Tahun Buku 2015	Keterangan
▪ Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria Independen yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Perusahaan induk untuk tahun buku 2016, dengan pertimbangan bahwa laporan keuangan Perseroan akan dikonsolidasikan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; ▪ Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya biaya jasa Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria Independen tahun buku 2016 dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemegang Saham mayoritas.	▪ Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Ernst Young Sebagai Akuntan Publik BNI Syariah untuk tahun buku 2016. ▪ Dewan Komisaris BNI Syariah telah menetapkan besarnya biaya jasa KAP dan Konsultan Aktuaria untuk tahun buku 2016.
Menyetujui tugas manajemen perseroan untuk tahun buku 2016 sebagai berikut: 1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah; 2. Mencapai target-target bisnis Perusahaan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 2016 antara lain laba minimal Rp290 miliar dan CASA minimal 47,10%. 3. Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif dengan menjaga *Non Performing Financing* di bawah rata-rata industri yaitu maksimal 2,97% dan *coverage* minimal 85,07% serta melakukan ekspansi pembiayaan secara sehat. 4. Melakukan optimalisasi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 5. Permodalan yang kuat dengan menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) di atas minimum *requirement regulator* serta diiringi peningkatan kontribusi laba ditahan *(retained earning).*	Direksi selama tahun 2016 telah melaksanakan tugas Manajemen sebagai berikut: 1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah; 2. Mencapai laba sebesar Rp277,38 Miliar dengan CASA sebesar 47,63%. 3. Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif dengan menjaga *rasio Non Performing Financing* per 31 Desember 2016 sebesar 2,94% dan *Coverage* sebesar 92,57% serta melakukan ekspansi pembiayaan secara sehat. 4. Melakukan optimalisasi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai sinergi sebesar Rp15.088 Miliar atau sekitar 103,92% dari target Rp14.519 Miliar. 5. Permodalan yang kuat dengan menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) di atas minimum requirement regulator sebesar 14,92% serta diiringi peningkatan kontribusi laba ditahan *(retained earning).*
Menetapkan Tantiem untuk Tahun Buku 2015 akan ditentukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (BNI) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditutupnya Rapat, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-04/MBU/2014, tanggal 10-03-2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.	Pemegang Saham Mayoritas (BNI) telah menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2015.

REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Keputusan RUPST Tahun Buku 2015	Keterangan
Menetapkan Remunerasi untuk tahun buku 2016, akan ditentukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (BNI) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditutupnya Rapat, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-04/MBU/2014 tanggal 10-03-2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.	Pemegang Saham Mayoritas (BNI) telah menetapkan besarnya Remunerasi Tahun Buku 2016.
Menyetujui pengangkatan pengurus baru yaitu Bapak Imam Teguh Saptono selaku Direktur Utama, Bapak Kukuh Rahardjo selaku Direktur Bisnis Konsumer, Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Risiko dan Kepatuhan, Bapak Fero Poerbonegoro selaku Komisaris Utama, Bapak Rizqullah sebagai Komisaris Independen, Bapak Max Niode sebagai Komisaris, dan Bapak Muhammad Syakir sebagai Komisaris Independen	Bapak Imam Teguh Saptono (Direktur Utama), Kukuh Rahardjo (Direktur Bisnis Konsumer), Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama), dan Rizqullah (Komisaris Independen) yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan 2016 telah lulus fit and proper test dan efektif menjabat. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yang diangkat RUPS Tahunan 2016 masih menjalani proses *fit and proper test* atau belum efektif.
	Per tanggal 31 Desember 2016 beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris efektif adalah: Direksi ▪ Direktur Utama: Imam Teguh Saptono ▪ Direktur Operasional: Junaidi Hisom ▪ Direktur Bisnis Konsumer: Kukuh Rahardjo ▪ Direktur Risiko dan Kepatuhan: Tribuana Tunggadewi (belum efektif) Dewan Komisaris ▪ Komisaris Utama: Fero Poerbonegoro ▪ Komisaris Independen: Rizqullah ▪ Komisaris: Max Niode (belum efektif) ▪ Komisaris Independen: Muhammad Syakir (belum efektif)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Komitmen DPS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional BNI Syariah adalah melakukan *review* terhadap kegiatan BNI Syariah selama tahun 2016 dalam upaya meningkatkan pengawasan praktik syariah. Keseluruhan temuan hasil uji petik langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan DPS No.BNISy/DPS/SK/XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014. Pedoman telah diunggah pada situs web Perusahaan dan media sosialisasi internal yaitu *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).

Secara garis besar pedoman ini mengatur Tata Tertib Kerja DPS terkait:

1. Persyaratan;
2. Prosedur Pengangkatan dan/atau Penggantian;
3. Komposisi;
4. Etika Jabatan;
5. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan;
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas;
7. Staf dan Unit Asistensi Dewan Pengawas Syariah;
8. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban;
9. Waktu Kerja, Rapat, dan Pendapat Syariah;
10. Hubungan Kerja.

Kriteria dan Persyaratan Anggota DPS

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPS yaitu persyaratan umum yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan khusus yang merupakan persyaratan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan sebagai badan usaha yang bergerak di sektor perbankan.

a. Persyaratan Umum
   Anggota DPS adalah orang perseorangan yang:
   i. Memiliki Integritas yang paling kurang mencakup:
      - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
      - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan yang sehat dan tangguh;
      - Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan yang ditetapkan oleh OJK.
   ii. Memiliki kompetensi yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
   iii. Memenuhi reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
      - Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
      - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Persyaratan Khusus
   Persyaratan khusus merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi DPS sesuai kebutuhan Perusahaan. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk disahkan termasuk namun tidak terbatas pada:
   i. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
   ii. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

iii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
iv. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota DPS lainnya.
v. Mampu bekerja sama dengan anggota DPS lainnya.
vi. Memiliki integritas mencakup:
   - Komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
   - Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
   - Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

vii. Memiliki kompetensi mencakup:
   - Kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban DPS.
   - Kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
   - Kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan menajemen.

Komposisi DPS

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk BNI Syariah terdiri atas 2 (dua) orang termasuk 1 (satu) orang ketua dan 1 (orang) anggota. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan DPS BNI Syariah hingga 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama & Jabatan	Masa Jabatan				
		Pengangkatan	Rekomendasi DSN-MUI	Persetujuan OJK/BI	Pengangkatan Kembali	Masa Berlaku
1	KH Ma'ruf Amin (Ketua)	Pendirian BNI Syariah	Surat No.U-260/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009	Persetujuan Izin Prinsip Pendirian No.12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Februari 2010	RUPS Luar Biasa tanggal 12 Agustus 2015	Sampai RUPS-T 2018
2	Hasanudin (Anggota)	Pendirian BNI Syariah	Surat No.U-260/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009	Persetujuan Izin Prinsip Pendirian No.12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Februari 2010	RUPS Luar Biasa tanggal 12 Agustus 2015	Sampai RUPS-T 2018

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin pada 3 (tiga) fungsi, yaitu:

Fungsi	Tugas dan Tanggung Jawab	Mekanisme
Koordinasi	1. Melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah. 2. Mewakili dan mendampingi Bank untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.	1. Melakukan rapat dan diskusi internal DPS atau bersama Direksi atau jajaran di bawah Direksi atau bersama Dewan Komisaris dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem kepatuhan pada Prinsip Syariah. 2. Memberikan pendapat syariah atau rekomendasi kepada Direksi terkait implementasi Prinsip Syariah pada produk dan kegiatan Perseroan; 3. Mewakili Perseroan untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terbatas pada regulator, auditor, organisasi profesi, untuk kepentingan pemenuhan Prinsip Syariah pada Perseroan.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Fungsi	Tugas dan Tanggung Jawab	Mekanisme
Pengawasan	1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; 2. Mengawasi proses pembangunan produk baru dan pengembangan fitur produk Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; 3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; 4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 6. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Perseroan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Meminta penjelasan dari pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan; b. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk baru berdasarkan Fatwa DSN-MUI. c. Melakukan review terhadap sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. 2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan; b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan; c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain, seperti: d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Perseroan dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan; e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud; f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
Laporan	1. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN-MUI. 3. Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Menyampaikan Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	1. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara semesteran. 2. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Hasil Pengawasan DPS memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain: a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Perseroan; dan b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Perseroan.

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama 2016:

No	Direksi	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan Lain
1	KH Ma'ruf Amin (Ketua)	Ketua	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
		Ketua	PT Bank Mega Syariah
		Ketua	PT Asuransi Jiwa Bringin Life (Unit Usaha Syariah)
		Ketua	PT BNI Life Insurance (Unit Usaha Syariah)

No	Direksi	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan Lain
2	Hasanudin (Anggota)	Anggota	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Unit Usaha Syariah)
		Anggota	PT Tugu Pratama Indonesia (Unit Usaha Syariah)
		Anggota	PT Reasuransi Internasional Indonesia (Unit Usaha Syariah)
		Ketua	PT Toyota Astra Finance Services (Unit Usaha Syariah)

Rapat DPS

a. Tingkat kehadiran

Selama tahun 2016, DPS BNI Syariah mengadakan 12 kali rapat DPS dan 1 kali rapat gabungan (bersama Dewan Komisaris dan atau Direksi), sehingga total Direksi mengadakan rapat sebanyak 13 kali. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat DPS		
		Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Presentasi Tingkat Kehadiran (%)
KH Ma'ruf Amin	Ketua	13	13	100%
Hasanudin	Anggota	13	13	100%

b. Agenda Utama Rapat

DPS BNI Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	19 Januari 2016	Rapat bersama Divisi Audit Internal membahas: 1. Implementasi Koreksi Laba Atas Temuan *Refinancing* dan *Site Streaming* 2. Penyelenggaraan Usaha Hotel dan Pembiayaan Kepada Hotel
2	19 Januari 2016	Rapat bersama *Bussiness Risk Division* membahas konsep penentuan nisbah bagi hasil dan realisasinya.
3	19 Januari 2016	Rapat bersama Divisi Tresuri membahas: 1. Investasi Reksa Dana Terproteksi Syariah dan Pasar Uang Syariah; 2. Biaya penempatan *Banknotes Banking* di Rekening BNI Syariah di BNI
4	26 Januari 2016	Rapat bersama *Consumer Financing Division* membahas finalisasi pembiayaan griya konstruksi
5	15 Februari 2016	Rapat bersama *Consumer Financing Division* membahas *Bank Assurance Model* Bisnis Referensi
6	29 Februari 2016	Rapat bersama Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan membahas Sosialisasi, Sponsorship, dan Komunikasi Korporat Tahun 2016
7	4 Maret 2016	Rapat bersama cabang Yogyakarta membahas pemenuhan prinsip syariah di cabang Yogyakarta
8	15 Maret 2016	Rapat bersama *Consumer Financing Division* membahas: 1. Pengalihan Hutang KTA 2. Pembiayaan Fleksi untuk Kepemilikan Paket Asuransi Unit Link
9	8 April 2016	Pemenuhan prinsip syariah di cabang Bukittinggi
10	26 April 2016	Rapat bersama Divisi Kepatuhan dan Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan membahas Laporan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal di OJK Pasar Modal
11	28 April 2016	Rapat bersama cabang Sukabumi membahas pemenuhan prinsip syariah di cabang Sukabumi
12	3 Maret 2016	Pengalihan hutan kredit modal kerja dengan Jaminan Aset Tetap

Realisasi Kegiatan DPS

Kegiatan Pada Fungsi Koordinasi

No.	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
1	Melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.	1. Pada Tahun 2016, Rapat DPS dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali. Rapat dilakukan bersama Divisi dan bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil Rapat DPS tertuang dalam Risalah Rapat DPS, yaitu: a. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/I/2016/001 tanggal 19 Januari 2016. b. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/I/2016/002 tanggal 19 Januari 2016. c. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/I/2016/003 tanggal 26 Januari 2016. d. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/II/2016/004 tanggal 15 Februari 2016. e. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/II/2016/005 tanggal 29 Februari 2016. f. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/III/2016/006 tanggal 4 Maret 2016. g. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/III/2016/007 tanggal 15 Maret 2016. h. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/IV/2016/008 tanggal 8 April 2016. i. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/IV/2016/009 tanggal 26 April 2016. j. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/IV/2016/010 tanggal 28 April 2016. k. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/V/2016/011 tanggal 3 Mei 2016. l. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/V/2016/012 tanggal 16 Mei 2016. m. Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/XI/2016/013 tanggal 1 November 2016. 2. Pada Tahun 2016, pelayanan Konsultasi Syariah diberikan pada setiap hari kerja untuk memenuhi kebutuhan BNI Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya agar tetap konsisten dan sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Pada tahun 2016, DPS atau *Staff* DPS terlibat dalam kegiatan pelatihan sebagai instruktur pelatihan Prinsip Dasar Perbankan Syariah (PDPS) dan *Refreshment* Pengetahuan Syariah untuk pegawai BNI Syariah dalam berbagai kelas, baik oleh DPS atau *Staff*. a. PDPS Pegawai Kelas ADP di Jakarta. b. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Bukittinggi dan Cabang Padang. c. PDPS Pegawai Kantor pusat di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. d. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Kediri.
2	Melaksanakan rapat, diskusi, dan konsultasi dengan pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Bank.	Pada 2016, DPS turut serta dalam kegiatan: 1. Ijtima' Sanawi DPS tahun 2016 di Jakarta. 2. Diskusi Hasil Audit KAP di KP BNI Syariah. 3. Diskusi Hasil Audit OJK di OJK. 4. Diskusi Pengembangan Produk Griya Swakarya Di OJK

Kegiatan Pada Fungsi Pengawasan

No.	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
1	Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;	1. Pada Tahun 2016, DPS me*review* rencana ketentuan internal produk baru yaitu produk Produk Griya Swakarya, MMQ Produktif iB Hasanah iB Hasanah, Produk Tabungan Pandai iB Hasanah dan *CO Branding Tapcash* Hasanah dengan BNI Induk. 2. Pada Tahun 2016, DPS me*review* rencana perubahan/pengembangan fitur produk/ rencana usulan pengembangan produk/fitur, yaitu: a. Skema Pengambangan *Financial Institution.* b. Investasi Reksadana Terproteksi Syariah. c. Pembiayaan dengan Skema Margin *during construction.* d. Skema Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah. e. Pemberian Potongan tagihan *murabahah* sebagai penghargaan. f. Penyelenggaran usaha hotel dan pembiayaan kepada hotel. g. Pembiayaan *Murabahah Linkage Executing* dengan skema *Refinancing* Syariah kepada *End user* h. Pembiayaan *Murabahah* dengan skema *reimbursment.*

No.	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
2	Mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;	1. Pada tahun 2016, DPS meminta data melalui diskusi dan dokumen-dokumen terkait dari pejabat yang berwenang mengenai tujuan, konsep, akad, dan ketentuan internal atas rencana pengembangan produk baru. Data diperoleh dari: a. *Funding and Transactional Division* (FTD) terkait Tabungan Laku Pandai iB Hasanah. b. *Consumer Financing Division* (CFD) terkait Produk Griya Swakarya iB Hasanah. c. TID terkait Skema Pengembangan *Financial Institution*. d. TID terkait Repo Surat berharga syariah (SBS) e. SMD 2 terkait Pembiayaan MMQ Produktif iB Hasanah. 2. Pada tahun 2016, DPS meminta data melalui diskusi dan dokumen-dokumen terkait dengan/dari unit yang berwenang mengenai fitur yang berlaku beserta usulan perubahan/pengembangannya, model bisnis dan karakteristik yang berlaku beserta usulan perubahan/pengembangannya. Diskusi dilakukan secara internal bersadarkan surat atau dokumen yang disampaikan kepada DPS, atau bersama dengan CMD (*Compliance Desk*) atau Divisi/Unit kerja lainnya, diantaranya adalah: a. *Legal Division* (LGD) Form Akad Musyarakah Perorangan dan Badan Hukum. b. *Legal Division* (LGD) Form Akad Qardh Perorangan dan Badan Hukum. c. TID terkait Skema Pengembangan *Financial Institution*. d. TID terkait Produk Repo Surat Berharga Syariah (SBS). e. CFD terkait Aktivitas Griya Swakarya.
3	Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;	Pada tahun 2016, DPS merekomendasikan agar BNI Syariah mengkonsultasikan kepada DSN-MUI melalui surat resmi terkait dengan rencana pengembangan produk griya swakarya di mana BNI Syariah melakukan aktivitas pembelian asset properti terlebih dahulu secara riil, kemudian asset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi atau pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli atau penyewa (*end user*) baik secara tunai atau angsur.
4	Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;	Pada Semester I Tahun 2016 1. Meminta data dari IAD mengenai hasil audit bidang syariah pada seluruh kegiatan perbankan baik pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan. 2. Melakukan *review* syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa perbankan melalui kegiatan pengambilan uji petik transaksi dengan fokus kajian terhadap kualitas pelaksanaan akad yang digunakan berdasarkan Prinsip Syariah. 3. Melakukan *review* syariah terhadap draft Surat Edaran, Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, dan Kebijakan yang rencananya akan diterapkan. 4. Kegiatan Pengambilan uji petik transaksi yang dilaksanakan dikantor cabang Bukittinggi. 5. *Review* terhadap draft surat edaran, Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, dan Kebijakan yang Rencananya akan diterapkan di BNI Syariah. Semester II Tahun 2016 1. Pada semester II tahun 2016, IAD melakukan proses audit (termasuk aspek syariah) terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan baik pada pelaksanaan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan. Kegiatan Audit terdiri dari: a. 12 Audit Umum Kantor Cabang Reguler; Cab. Tasikmalaya, Malang, Surakarta, Medan, Jakarta Barat, Yogyakarta, Bandung, Jambi, Bekasi, Fatmawati, Jakarta Utara, Bendungan Hilir. b. 6 Audit Umum Kantor Cabang Mikro; Mikro Makassar, Mikro Tanjung Jember, Mikro Lubuk Linggau, Mikro Kendari, Mikro Bengkulu, Mikro Pare-pare. c. 6 Audit Umum Kantor Pusat; FTD, CMD, CRD, CFD, LGD, MBD. d. 1 Audit Tematik. e. 18 Audit Tindak Lanjut. f. 4 Audit Tindak Lanjut WBS. g. Pada semester 2 tahun 2016, DPS melakukan *review* terhadap mekanisme pelaksanaan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa perbankan melalui kegiatan pengambilan uji petik transaksi dengan fokus penilaian terhadap kualitas pelaksanaan akad yang digunakan berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Cabang Padang dengan fokus penilaian mengenai kualitas pelaksanaan produk berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
		a. Tabungan: ▪ Tabungan iB Hasanah (IDR/Wadiah/Mudharabah) ▪ Tapenas iB Hasanah (IDR/Mudharabah) ▪ Tunas iB Hasanah (IDR/Wadiah) ▪ Haji iB Hasanah (IDR/Mudharabah) b. Deposito: ▪ Deposito iB Hasanah (IDR/Mudharabah) c. Pembiayaan: ▪ Wira Usaha Syariah iB Hasanah (Murabahah) ▪ Wira Usaha Syariah iB Hasanah (Musyarakah) ▪ Tunas Usaha Syariah iB Hasanah (Murabahah) ▪ Tunas Usaha Syariah iB Hasanah (Musyarakah) ▪ Griya iB Hasanah (Murabahah) d. Jasa: ▪ Rahn Emas iB Hasanah (Rahn)
5	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.	Pada tahun 2016, DPS terlibat aktif dalam proses pengawasan aspek syariah pada setiap lini kegiatan. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPS tentu memerlukan data dan informasi yang akurat dari satuan kerja atau unit kerja terkait. Alhamdulillah, *support* dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek syariah dapat dipahami dan disadari oleh semua satuan kerja atau unit kerja sehingga dalam menjalankan tugas pengawasannya DPS dapat bersinergi dengan satuan kerja atau unit kerja BNI Syariah dan seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Data dan informasi yang dibutuhkan DPS dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, dokumen kerja, data transaksi, dll.
6	Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Pada tahun 2016, DPS melakukan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan melaksanakan fungsi kontrol pada pra pengambilan keputusan (*ex-ante*) dan setelah pelaksanaan (*ex-post*). Pendapat syariah yang disampaikan oleh DPS dalam melaksanakan fungsi kontrol dapat berbentuk Opini atau Rekomendasi. Berikut Opini dan Rekomendasi yang dapat menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan baik terkait dengan produk, transaksi, maupun operasional: 1. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/I/2016/002 tentang Investasi Reksadana terproteksi syariah. 2. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/II/2016/005 tentang Pemberian potongan tagihan *murabahah* sebagai penghargaan. 3. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/III/2016/006 tentang Penyelenggaran usaha hotel dan pembiayaan kepada hotel. 4. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/III/2016/007 tentang Perlakuan pembiayaan Musyarakah ketika nasabah meninggal dunia. 5. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/III/2016/008 tentang Pembiayaan *Murabahah Linkage Executing* dengan skema *refinancing* syariah kepada *end user*. 6. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/VI/2016/012 tentang Pembiayaan Murabahah dengan skema *reimbursment*. 7. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/VI/2016/014 tentang Penghapusan denda dan pengenaan *ta'widh*. 8. Opini DPS Nomor: BNISy/ DPS/OPINI/VI/2016/015 tentang Penggunaan Akad Musyarakah untuk pembiayaan pengalihan hutang modal kerja mikro.
7	Mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Pada tahun 2016, DPS juga terlibat dalam Rapat Kinerja. DPS dapat mengetahui gambaran/potret capaian kinerja termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan Prinsip Syariah. Risalah Rapat disusun dan didokumentasi oleh Dewan Komisaris.

Kegiatan Pada Fungsi Pelaporan

No.	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
1	Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	Pada semester 2 tahun 2016, DPS melaporkan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut berisi tentang hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama semester 2 tahun 2016, yang meliputi antara lain: 1. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BNI Syariah; 2. Kertas kerja pengawasan terhadap proses perubahan/pengembangan fitur produk BNI Syariah; dan 3. Kertas kerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional BNI Syariah.
2	Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN-MUI.	Pada semester 2 tahun 2016, DPS menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN-MUI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir yaitu terakhir pada tanggal 29 Februari 2017.
3	Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	Pada semester 2 tahun 2016, DPS melaksanakan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan melaksanakan fungsi kontrol. Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada fungsi *ex-ante* disampaikan kepada Direksi ketika dianggap cukup sebagai bahan kajian dan perbaikan, sementara Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada fungsi *ex-post* disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara semesteran sebagai bahan perhatian.
4	Menyampaikan Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	Pada semester 2 tahun 2016, DPS juga terlibat dalam Rapat Kinerja Perseroan. Sehingga DPS juga mengetahui gambaran/potret kinerja termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan secara triwulanan yang memuat hasil kajian DPS terhadap kinerja Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan dapat disampaikan dalam bentuk Opini atau Rekomendasi mengenai Kinerja Direksi yang dapat diterbitkan sesuai dengan permintaan/kebutuhan unit kerja yang berada di bawah Direksi pada setiap periode (setelah Laporan Kinerja disampaikan, atau setelah Rapat Kinerja). Pada tahun 2016, DPS terlibat aktif dalam proses pengawasan aspek syariah pada setiap lini kegiatan. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPS tentu memerlukan data dan informasi yang akurat dari satuan kerja atau unit kerja terkait. Alhamdulillah, *support* dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek syariah dapat dipahami dan disadari oleh semua satuan kerja atau unit kerja sehingga dalam menjalankan tugas pengawasannya DPS dapat bersinergi dengan satuan kerja atau unit kerja BNI Syariah dan seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Data dan informasi yang dibutuhkan DPS dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, dokumen kerja, data transaksi, dll.

Rekomendasi DPS

1. Terhadap temuan hasil audit internal dan hasil *review* syariah secara umum, maka DPS menilai bahwa ketidak sesuaian tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:
   a. Kategori ringan (tidak signifikan) yang harus segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan syariah.
   b. Kategori berat (Siginifikan) di mana keuntungan yang diperoleh dari akad yang batal harus dibukukan sebagai pendapatan non-halal Bank dan harus diakui sebagai dana sosial.
2. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak boleh diulang atau terjadi lagi di masa mendatang.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPS merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk segera:
   a. Mengkaji ulang ketentuan internal mengenai pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah, mudharabah*, dan *musyarakah*.

b. Melakukan sosialisasi dengan *review* ketentuan internal dan pelatihan kepada pegawai-pegawai terkait dengan produk yang sudah dimiliki oleh Bank yang diikuti dengan evaluasi dan penilaian untuk mengukur pemahaman pegawai.
c. Memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada pegawai yang melakukan pelanggaran syariah.
d. Mengenakan sanksi kepada pegawai yang masih melakukan pelanggaran setelah di beri peringatan.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2016, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional tidak mengarah pada kesalahan dalam membuat kebijakan, melainkan lebih kepada pemahaman individu atas suatu Produk dan Pedoman Operasional Bank. Atas kesalahan/kekurangan tersebut DPS merekomendasikan agar setelah kesalahan/kekurangan diketahui, maka harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat Prinsip Syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada *punishment*.

Laporan DPS terkait Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Tahun 2016, DPS BNI Syariah kembali melakukan *review* pemenuhan prinsip syariah terhadap Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 1015 yang *listing* tanggal 15 Mei 2015 dengan dana sukuk yang berhasil dihimpun sebesar Rp500 Miliar dan hasil realisasi bersih senilai Rp497,22 Miliar setelah dikurangi biaya penawaran umum senilai Rp2,78 Miliar.

DPS berpendapat bahwa dana hasil Penawaran Umum yang digunakan untuk pembiayaan syariah mata uang rupiah, meliputi pembiayaan produktif (39,11%), pembiayaan konsumtif (52,83%), pembiayaan mikro (5,86%) dan pembiayaan kartu (2,2%) telah memenuhi prinsip syariah di pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas pengurusan Bank oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dasar Hukum

Pembentukan Dewan Komisaris BNI Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

a. Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
b. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah Organ Emiten atau Perusahaan Publik.
d. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 23.
e. POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
g. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.4 tanggal 7 Januari 2016.
h. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No.KEP/01/DK/2015

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No.KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No.PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diunggah pada situs web Perusahaan dan media sosialisasi internal yaitu *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).

Adapun isi pengaturan terkait tata tertib kerja Dewan Komisaris menurut pedoman ini antara lain:

1. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;
2. Komisaris Independen;
3. Komposisi Anggota;
4. Masa Jabatan;
5. Pengangkatan dan Pemberhentian;
6. Etika Jabatan;
7. Hak dan Wewenang;
8. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab;
9. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan;
10. Tantiem;
11. Program Orientasi;
12. Program Peningkatan Kapabilitas;
13. Sekretaris Dewan Komisaris;
14. Komite di Bawah Dewan Komisaris.

Kriteria dan Persyaratan anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah melalui mekanisme nominasi dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan melalui RUPS efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun persyaratan seorang anggota Dewan Komisaris BNI Syariah adalah:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit.
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau angota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (i) pernah tidak menyelengarakan RUPS tahunan; (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau aggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan (iii) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/

atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
f. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat.
g. 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan.
h. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dan memiliki integritas dan reputasi yang tinggi, serta memiliki komitmen penyediaan waktu yang memadai.
i. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir.
j. Tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.
k. Tidak termasuk daftar orang tercela di bidang perbankan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
l. Tidak terdaftar dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Surat pernyataan di atas materai sebagaimana persyaratan tersebut telah dibuat oleh setiap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah sebagai salah satu dokumen persyaratan uji kemampuan dan kepatutan di OJK, serta telah didokumentasikan oleh Perusahaan.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahan dan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.

Wewenang:

a. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
b. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
c. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris;
d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
f. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
h. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya.
i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan

Kewajiban:

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
c. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
d. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksanaan atas buku-buku Perseroan;
f. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
h. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
k. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
l. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 25 PBI No.11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa jumlah angota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Per tanggal 31 Desember 2016, BNI Syariah memiliki 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris yang telah melalui proses nominasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah dan diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 50% (lima puluh persen) di antaranya adalah Komisaris Independen. Rincian komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Dewan Komisaris Periode Januari 2016 – 25 Februari 2016

No.	Nama & Jabatan	Domisili	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Pengangkatan Kembali	Masa Berlaku
1	Subarjo Joyosumarto (Komisaris Utama)*	Indonesia	RUPS-LB 30 Juni 2013	Tahun 2013	-	RUPS-T 2016
2	Harisman*	Indonesia	RUPS-T 20 Juni 2012	Tahun 2012	-	RUPS-T 2016
3	Fero Poerbonegoro (Komisaris)**	Indonesia	RUPS-LB 12 Agustus 2015	Tahun 2015	-	RUPS-T 2018

*masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan 25 Februari 2016
**diangkat sebagai Komisaris Utama di RUPS Tahunan 25 Februari 2016

DEWAN KOMISARIS

Tabel Komposisi Dewan Komisaris Periode 25 Februari 2016 – 31 Desember 2016

No.	Nama & Jabatan	Domisili	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Pengangkatan Kembali	Masa Berlaku
1	Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama)	Indonesia	RUPS Tahunan 25 Februari 2016	Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-46/D.03/2016, 8 Sep 2016	25 Februari 2016 dari sebelumnya Komisaris	Sampai RUPS Tahunan 2019
2	Rizqullah (Komisaris Independen)	Indonesia	RUPS Tahunan 25 Februari 2016	Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-45/D.03/2016, 6 Sep 2016	-	Sampai RUPS Tahunan 2019
3	Max Niode* (Komisaris)	Indonesia	RUPS Tahunan 25 Februari 2016	-	-	Sampai RUPS Tahunan 2019
4	Muhammad Syakir Sula* (Komisaris Independen)	Indonesia	RUPS Tahunan 25 Februari 2016	-	-	Sampai RUPS Tahunan 2019

*masih menjalani proses fit and proper test OJK (belum efektif)

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Secara khusus pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Periode	Nama	Bidang Tugas
Komisaris Utama	Januari – 31 Desember 2016	Fero Poerbonegoro	Membawahi Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi
Komisaris Independen	25 Februari 2016 – 31 Desember 2016	Rizqullah	Membawahi Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi
Komisaris Independen	25 Februari 2016 – 31 Desember 2016	Muhammad Syakir*	Membawahi Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi
Komisaris	25 Februari 2016 – 31 Desember 2016	Max Niode*	Membawahi Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi
Komisaris Utama	Januari 2016 – 25 Februari 2016	Subarjo Joyosumarto**	Membawahi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
Komisaris Independen	Januari 2016 – 25 Februari 2016	Harisman**	Membawahi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi

*Masih menjalani proses *fit and proper test* di OJK, selama belum efektif maka kewenangan dipegang oleh Komisaris Utama

**masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan 25 Februari 2016

Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib bebas dari pengaruh manajemen Perusahaan, Pemegang Saham, maupun pihak-pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dipilih berdasarkan proses nominasi selayaknya melakukan tugas mereka dengan tidak mengutamakan kepentingan dari pihak-pihak yang menominasikannya.

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Dewan Komisaris	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan Lain
1	Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama)	Tidak ada	Tidak ada
2	Rizqullah (Komisaris Independen)	Tidak ada	Tidak ada
3	Max Niode* (Komisaris)	Tidak ada	Tidak ada
4	Muhammad Syakir Sula* (Komisaris Independen)	Anggota KPJKS (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah)	Otoritas Jasa Keuangan
		Komisaris Independen	PT Jamkrindo Syariah
		Ketua DPS	PT Nasional Reasuransi
		Ketua DPS	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR Syariah)

*Masih menjalani proses *fit and proper test* OJK, Bapak Syakir telah menandatangani surat pernyataan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap yang dilarang ketentuan perundang-undangan jika lulus *fit and proper test*.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya baik dalam Perusahaan maupun perusahan lain, yang dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan atau setiap ada perubahan. Pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 informasi kepemilikan saham dimaksud adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Nurani Sulastri	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Rakhmat Mogar Poerbonegoro	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Rizqullah	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Yusroh Muhammad	Istri	Tidak ada	Rp100 juta di Graha 165	2014
3	Hanna Azkiya	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
4	Muhammad Muftah	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
5	Ahmad Haris	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
6	Aulia Rahmah	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
7	Syifa Ramadhani	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Komisaris (masih menjalani proses *fit and proper test* OJK)

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Max Niode	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Dian Mardianawati	Istri	Tidak ada	PT Persona Prima Utama (75 lembar/1,50%)	2005
3	Zahra Aldila Niode	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
4	Alvin Akbar Niode	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Komisaris Independen (masih menjalani proses *fit and proper test* OJK)

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Muhammad Syakir Sula	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Lukita Amelia	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Hanna Nurul Izza	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Rapat Dewan Komisaris

a. Etika Rapat

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dalam praktiknya, rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal sekali seminggu dan diantaranya sekali dalam sebulan melakukan rapat gabungan dengan seluruh anggota Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sesuai ketentuan dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris, diatur bahwa materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.

b. Tingkat kehadiran
Selama tahun 2016, Dewan Komisaris BNI Syariah mengadakan 22 kali rapat Dewan Komisaris dan 13 kali rapat bersama Direksi, dan 1 kali rapat gabungan, sehingga total Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 36 kali. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat

Nama	Jumlah Kehadiran			Total	Persentase (%)
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Dengan Direksi	Rapat Gabungan		
Fero Poerbonegoro	21	12	1	34	94
Rizqullah*	19	10	0	29	81
Max Niode*	20	10	0	30	83
Muhammad Syakir Sula*	18	10	0	28	78
Subarjo Joyosumarto**	4	1	1	6	17
Harisman**	3	1	1	5	14

*Diangkat RUPS Tahunan 25 Februari 2016
**Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan 25 Februari 2016

c. Agenda Utama Rapat
Dewan Komisaris BNI Syariah telah membahas berbagai agenda baik dalam rapat internal Dewan Komisaris, Rapat bersama Direksi, serta Rapat gabungan bersama Direksi dan DPS, selama tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal		Agenda Utama Rapat	Fero P	Rizqullah	M. Niode	Syakir	Subarjo J	Harisman
1	Selasa. 5 Januari 2016	Rakom	Audiensi Kandidat Direksi Perseroan	√	X	X	X	√	√
2	Selasa, 12 Januari 2016	Radikom bersama DPS	Rapat gabungan dengan Direksi dan DPS membahas (Radikom): Presentasi Direksi mengenai kinerja Perseroan Desember 2015; Presentasi SPI mengenai Rencana Audit 2016	√	X	X	X	√	√

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal		Agenda Utama Rapat	Fero P	Rizqullah	M. Niode	Syakir	Subarjo J	Harisman
3	Selasa, 19 Januari 2016	Rakom	Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko 2015; Laporan Profil Risiko Desember 2015; Rencana Kerja Satuan Manajemen Risiko 2016 & Komite Kebijakan Manajemen Risiko 2016	√	X	X	X	√	√
4	Selasa, 2 Februari 2016	Rakom	Pembahasan Internal Komisaris mengenai Usulan Remunerasi 2016 & Tantiem Manajemen Perseroan 2015; Presentasi CCD mengenai agenda RUPS tahun buku 2015; Presentasi ERD mengenai profil risiko perseroan Desember 2015	√	X	X	X	√	√
5	Selasa, 16 Februari 2016	Rakom	Presentasi CCD mengenai skenario RUPS tahun buku 2015; Presentasi CSD mengenai Pembiayaan Koperasi Telkom & Koperasi Telkomsel.	√	X	X	X	√	√
6	Selasa, 23 Februari 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas Presentasi Direksi mengenai kinerja Januari 2016; Gladiresik RUPS Tahun Buku 2015; Presentasi CSD mengenai pembiayaan Koperasi Telkomsel.	√	X	X	X	√	√
7	Selasa, 15 Maret 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas: Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan Februari 2016; Keanggotaan Dewan Komisaris pada Komite.	√	√	√	√	X	X

No.	Tanggal		Agenda Utama Rapat	Fero P	Rizqullah	M. Niode	Syakir	Subarjo J	Harisman
8	Selasa, 22 Maret 2016	Rakom	Rapat KPR berupa Presentasi CSD mengenai pembiayaan kepada Perum PNRI; Rapat KRN berupa Presentasi HCD mengenai Pelaksanaan Kegiatan Alih Daya.	√	√	√	√	X	X
9	Selasa, 29 Maret 2016	Rakom	Rapat Komite Nominasi & Remunerasi berupa presentasi HCD mengenai Pelaksanaan Kegiatan Alih Daya Rapat Komite Audit berupa Presentasi IAD mengenai: Laporan & Hasil Analisis Hasil Audit Triwulan 1/2016 Laporan Kasus Fraud pada KC Kendari	√	√	√	√	X	X
10	Selasa, 5 April 2016	Rakom	Presentasi Divisi Tresuri & Internasional Pengelolaan Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar; Presentasi Divisi Operasional mengenai Pengelolaan Risiko Operasional Perseroan.	√	√	√	√	X	X
11	Selasa, 12 April 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas: Trend Perbankan Syariah; Kinerja Perseroan Maret 2016 dan RBB; Corporate Plaen & Road Map BNI Syariah; Corporate Culture (Fraud, WBS) & SDM Lain-lain dalam rangka intensive strategic session	√	√	√	√	X	X
12	Selasa, 3 Mei 2016	Rakom	Rapat Komite Pemantau Risiko Presentasi Divisi Enterprise Risk & Policy (ERD) mengenai Profil Risiko Perseroan Triwulan 1/2016	X	√	√	X	X	X

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal		Agenda Utama Rapat	Fero P	Rizqullah	M. Niode	Syakir	Subarjo J	Harisman
13	Selasa, 10 Mei 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas: Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan April 2016; Update Direksi mengenai Hasil Presentasi kepada Pemegang Saham pada 4 Mei 2016 Presentasi Direksi mengenai *Financing Exposure Limit*	√	√	√	√	X	X
14	Selasa, 17 Mei 2016	Rakom	Rapat Komite berupa presentasi IAD mengeni tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal dan tindaklanjut sanksi administrasi; Rapat Komite Pemantau Risiko berupa Presentasi Periskop.	√	√	√	√	X	X
15	Selasa, 24 Mei 2016	Rakom	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi berupa presentasi HCD mengenai tindak lanjut sanksi administrasi kepegawaian; Lain-lain.	X	√	√	√	X	X
16	Selasa, 7 Juni 2016	Rakom	Presentasi Bidang Komersial mengenai Pembiayaan Komersial yang Bermasalah dan Berpotensi Bermasalah; Presentasi Bidang Mikro mengenai Kinerja & Tantangan Pembiayaan Mikro	√	√	√	√	X	X
17	Selasa, 14 Juni 2017	Radikom	Rapat Bersama Direksi membahas: Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan Mei 2016; Presentasi Bidang Mikro mengenai Kinerja & Tantangan Pembiayaan.	√	√	√	√	X	X
18	Selasa, 21 Juni 2017	Rakom	Presentasi Bidang Komersial mengenai Laporan Pembiayaan kepada: Permodalan BMT Ventura; KSPPS Tamzis Bina Utama; KSPPS BMY Bina Umat Sejahtera; Bumi Jasa Utama.	√	√	√	√	X	X

No.	Tanggal		Agenda Utama Rapat	Fero P	Rizqullah	M. Niode	Syakir	Subarjo J	Harisman
19	Selasa, 26 Juli 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas: Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan Juni 2016; Presentasi mengenai profil Risiko Perseroan Juni 2016.	√	√	√	√	X	X
20	Selasa, 2 Agustus 2016	Rakom	Presentasi RRD mengenai *Recovery*, Penanganan Akun-Akun Pembiayaan Bermasalah dan Prospek Penyelesaiannya; Presentasi ERD mengenai profil Risiko, KPMM, dan TKB Perseoan Juni 2016.	√	√	√	√	X	X
21	Selasa, 9 Agustus 2016	Rakom	Presentasi IAD mengenai Laporan Hasil Audit Semester 1/2016 Presentasi OPD mengenai Evaluasi terhadap Penilaian Taksasi Jaminan Pembiayaan	√	√	√	√	X	X
22	Selasa, 20 Agustus 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas: Presentasi Direksi Pembahasan dan Pendalaman Materi mengenai Kinerja Agustus 2016; Presentasi Direksi, pembahasan dan pendalaman Materi mengenai Prognosa Kinerja 2016 dan Proyeksi 2017-2018.	√	√	√	√	X	X
23	Selasa, 23 Agustus 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas: Presentasi Direksi mengenai Kinerja Juli 2016; Presentasi pelaksanaan & permasalahan manajemen risiko terkait pengelolaan portofolio treasury; Pemaparan Strategic Issues oleh masing-masing Direktur Sektor.	√	√	√	√	X	X

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal		Agenda Utama Rapat	Fero P	Rizqullah	M. Niode	Syakir	Subarjo J	Harisman
24	Selasa, 30 Agustus 2016	Rakom	Presentasi pelaksanaan & permasalahan manajemen risiko terkait pengelolaan portfolio treasury; Pelaporan SEVP & Divisi Bisnis Komersial mengenai Keputusan Pembiayaan PT Perkebunan Nusantara X Pelaporan SEVP & Divisi Bisnis Komersial perihal Keputusan Penambahan Pembiayaan PT Braja Mukti Chakra.	√	√	√	√	X	X
25	Selasa, 13 September 2016	Rakom	Presentasi HCD mengenai POJK No. 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Sebagian Pekerjaan Kepada Pihak lain; Presentasi HCD dan review mengenai sistem nominasi pegawai.	√	√	√	√	X	X
26	Selasa, 27 September 2016	Rakom	Pelaporan dari SEVP dan Divisi Bisnis Komersial mengenai keputusan pembiayaan nasabah a.n. Waskita Karya, Totalindo, Nusa Surya Cipta Dana, RS Mitra Medika, dan Koperasi HIK; Lain-lain	√	X	√	X	X	X
27	Selasa, 4 Oktober 2016	Rakom	Presentasi dari Direktur Risiko dan Kepatuhan mengenai: Kebijakan Umum Manajemen Risiko; Mekanisme & Pelaksanan GCG; Review Pelaksanaan Strategi Anti Fraud.	√	√	√	√	X	X
28	Selasa, 11 Oktober 2016	Radikom	Rapat bersama Direksi membahas: Presentasi Direksi dan Pembahasan mengenai Kinerja Perseroan September 2016; Presentasi Direksi dan Pembahasan mengenai RBB 2017-2019.	√	√	√	√	X	X

No.	Tanggal		Agenda Utama Rapat	Fero P	Rizqullah	M. Niode	Syakir	Subarjo J	Harisman
29	Selasa, 18 Oktober 2016	Rakom	Pelaporan dari SEVP dan Divisi Bisnis Komersial mengenai keputusan pembiayaan nasabah a.n Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat, PT Era Prima Cipta Kreasindo, dan Induk Harta Insan Karimah.	√	√	√	√	X	X
30	Selasa, 25 Oktober 2016	Rakom	Presentasi IAD mengenai Laporan & Tindak Lanjut Hasil Audit Triwulanan 3/2016	√	√	√	√	X	X
31	Selasa, 8 November 2016	Rakom	Presentasi HUD mengenai Peluang & Tantangan serta program yang telah dilaksanakan oleh HUD pada 2016 dan yang direncanakan pada 2017; Presentasi Divisi Hukum mengenai permasalahan dan kasus hukum yang sedang dihadapi perseroan beserta proposal penyelesaiannya.	√	√	√	√	X	X
32	Selasa, 15 November 2016	Radikom	Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan Oktober 2016, Realisasi Program Kerja 2016 serta Update Issue Aktual	√	√	√	√	X	X
33	Selasa, 29 November 2016	Rakom	Presentasi HCD dalam Rapat KNR mengenai review remunerasi pegawai. Presentasi ERD dalam Rapat KPR mengenai evaluasi terhadap efektifitas penilaian risiko berdasarkan self assessment periskop	√	√	√	√	X	X
34	Selasa, 6 Desember 2016	Rakom	Presentasi Divisi Komersal pada Rapat KPR mengenai laporan pembiayaan PT Dwidaya Mega Jaya dan PT Cahata Megah Foamindo Pertemuan Komite Audit dan KAP EY	√	√	√	√	X	X
35	15 Desember 2016	Radirkom	Pembahasan operasionalisasi jargon BNI Syariah	√	√	√	√	X	X
36	20 Desember 2016	Radikom	Presentasi Direksi mengenai Kinerja	√	√	√	√	X	X

Rekomendasi Program Kerja dan Pelaksanaan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016.

Program Kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, maupun Persereoan.

Dalam menjalankan program kerjanya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan program kerja ketiga Komite dibawah Dewan Komisaris tersebut.

Pelaksanaan program kerja selama tahun 2016 menghasilkan beberapa, pendapat, persetujuan, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut:

1. BNI Syariah masih dapat membukukan kinerja yang baik di tengah perlambatan pertumbuhan industri perbankan nasional. Kinerja BNI Syariah tahun 2016 dapat dikatakan berada di atas rata-rata industri, baik industri perbankan secara keseluruhan maupun industri perbankan syariah. Dapat digambarkan bahwa tahun 2016 BNI Syariah berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 23,01% menjadi Rp28.314 miliar. Jumlah pembiayaan tahun 2016 mencapai Rp20.494 miliar tumbuh 15,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,76 triliun, sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp24.233 miliar naik 25,41% dibandingkan Rp19,32 triliun pada tahun 2015. Laba setelah pajak tahun 2016 tercatat sebesar Rp277,38 miliar tumbuh 21,38% dibandingkan laba setelah pajak tahun 2015 sebesar Rp228,53 miliar. Kinerja aspek finansial lain yang juga tidak kalah penting yang dibukukan BNI Syariah tahun 2016 adalah pada rasio keuangan Perusahaan yang secara umum berada pada level yang sangat baik, yaitu ROA sebesar 1,44%, ROE sebesar 11,94%, CASA berada pada posisi 47,63%, BOPO sebesar 87,67%, sedangkan NPL *gross* berada pada angka 2,94% lebih baik/sedikit meningkat dibandingkan NPL *gross* tahun sebelumnya yang sebesar 2,53%.

2. Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh pegawai BNI Syariah telah bekerja dengan sangat baik sehingga BNI Syariah dapat membukukan kinerja yang membanggakan, juga atas hubungan yang dibina Direksi dengan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

3. Terlepas dari kinerja BNI Syariah Dewan Komisaris memberikan sejumlah rekomendasi dan nasihat kepada Direksi, antara lain:
   a. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk membangun budaya sadar risiko di lingkungan BNI Syariah, mengingat industri perbankan merupakan industri yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Dewan Komisaris memandang, jika budaya sadar risiko tersebut sudah menjadi bagian dari keseharian seluruh pegawai BNI Syariah, maka tingkat risiko Perusahaan dapat terus ditekan ke *level* yang sangat baik.
   b. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memperhatikan aspek pendanaan Perusahaan. Kendati saat pencapaian DPK BNI Syariah sudah sangat baik dan berada di atas bank syariah lainnya, namun menurut pandangan Dewan Komisaris dibutuhkan struktur pendanaan yang betul-betul kuat dan matang untuk menunjang pertumbuhan BNI Syariah ke depan.
   c. Dewan Komisaris memandang bahwa di tengah pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia, persaingan tidak hanya terjadi dalam hal memperebutkan pasar, tapi juga dalam hal memperebutkan tenaga kerja yang

memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Karena itu, peningkatan kualitas dan program retensi pegawai harus menjadi perhatian serius bagi Direksi.

d. Dewan Komisaris memandang bahwa peningkatan layanan harus terus dilakukan mengingat salah satu marwah dari industri jasa perbankan adalah pelayanan.

4. Terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk periode tahun 2017-2019, BNI Syariah masih memiliki prospek bisnis yang bagus. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Direksi, antara lain:
   a. Meningkatkan Penetrasi di Sektor Ritel. Populasi penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar membuat sektor ritel memiliki potensi yang sangat besar. *Awareness* masyarakat akan perbankan syariah harus terus ditingkatkan.
   b. Melakukan inovasi Produk dan Layanan untuk mengejar ketertinggalan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.
   c. Penguatan Teknologi Informasi untuk menunjang perkembangan usaha BNI Syariah.
5. BNI Syariah senantiasa berusaha menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang sehat dan kokoh, serta senantiasa memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan dengan terus mendorong terciptanya kesadaran seluruh jenjang organisasi akan pentingnya GCG bagi pertumbuhan dan keberlanjutan Perseroan. Implementasi prinsip GCG di BNI Syariah yang selama ini telah berjalan dengan baik terus diperbaiki dan disempurnakan. Tahun 2016, BNI Syariah terus meningkatkan fokus pada pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus yang mengandung unsur *fraud* melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Diharapkan sasaran untuk menciptakan *zero fraud* dapat terwujud.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, anggota Dewan Komisaris secara independen telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Beberapa pelatihan tersebut antara lain adalah:

Dewan Komisaris	Tahun	Jenis Seminar/Pelatihan	Penyelenggara
Fero Poerbonegoro	2016	*Legal Risk Srategy for Credit Recovery and mitigation*	BARA *(Asosiation Banker for Risk Management)*
Rizqullah	2016	Workshop "Restrukturisasi & Penyelamatan Kredit yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Max Niode*	2016	Seminar *Macro Economic Outlook* 2016	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
	2016	Workshop "Restrukturisasi & Penyelamatan Kredit yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
	2016	*Certificate of Completion: "Executive Training on Islamic Banking"*	Karim Consulting Indonesia
	2016	*Certificate of Attendance: "Executive Training on Islamic Banking"*	Karim Consulting Indonesia

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris	Tahun	Jenis Seminar/Pelatihan	Penyelenggara
Muhammad Syakir Sula*	2016	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan (level 2 Komisaris)	BNSP/LSPP
	2016	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan (level 1 Komisaris)	BNSP/LSPP
	2016	*Executive Training on Islamic Banking*	Karim Consulting Indonesia
	2016	IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam)	*The Role and Function of Commissioner, Directors and Sharia Supervisor Board in Managing Islamic Banking & Finance*

*Masih menjalani proses *fit and proper test* OJK

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Perusahaan senantiasa memberikan program orientasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program tersebut meliputi perkenalan anggota Dewan Komisaris baru kepada anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, *General Manager, Corporate Secretary,* anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, sekretaris Dewan Komisaris, serta pejabat lainnya. Materi pembekalan anggota Dewan Komisaris yaitu terkait:

a. Struktur organisasi Perusahaan serta fungsinya masing-masing;
b. Hak (termasuk remunerasi dan fasilitas yang didapat), tugas utama, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
c. Kinerja keuangan;
d. Kondisi Perusahaan terkini, Rencana Bisnis Bank, serta prospek Perusahaan ke depan;
e. Perangkat kebijakan internal yang dimiliki Perusahaan;
f. Praktik manajemen risiko Perusahaan.
g. Hal lainnya yang sekiranya diperlukan untuk membekali anggota Dewan Komisaris baru.

KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, BNI Syariah memiliki komposisi 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Komisaris Independen BNI Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BNI Syariah, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen BNI Syariah juga sudah membuat surat pernyataan terkait independensi dimaksud di atas, telah ditandatangani di atas materai sebagai bagian dari pengajuan *fit and proper test* ke OJK serta didokumentasikan oleh Perusahaan.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen telah memenuhi syarat utama, mencakup:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan dengan anggota Direksi dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham BNI Syariah ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/ Perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
4. Tidak mempunyai hubungan atau ikatan langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
5. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
6. Diusulkan oleh Pemegang Saham, melalui proses nominasi di Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah, dan dipilih dalam RUPS
7. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya: tidak pernah dinyatakan pailit
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
10. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh Ketentuan Internal BNI Syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sebagai mana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Komisaris Independen BNI Syariah telah membuat Surat Pernyataan Independen pada tanggal 27 April 2016 dan telah disampaikan kepada Otorisasi Jasa Keuangan dengan Nomor Surat BNISy/DIR.RC/1187 tanggal 28 April 2016.

KOMISARIS INDEPENDEN

Tabel Pernyataan Independen

Komisaris Independen BNI Syariah telah menandatangani surat pernyataan independen yang kontennya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait *fit and proper test* OJK yaitu:

No	Pernyataan	Checklist
1	Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank	v
2	Menyatakan bahwa saya bersedia bertindak independen terhadap pemilik Bank	v
3	Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank sehingga dapat mendukung kemampuan saya untuk bertindak independen.	v

DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ utama GCG. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan, serta bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi BNI Syariah terdiri dari Direktur Utama, dan Direktur lainnya yang bertugas sesuai masing-masing bidang kerja. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan. Direksi BNI Syariah dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan transparansi, sikap profesional, kesungguhan dalam mengedepankan kepentingan Bank dan *stakeholders*, berpikir strategis serta memastikan pencapaian target dan keberlanjutan usaha.

Dasar Hukum

Pembentukan Direksi BNI Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

a. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
b. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah Organ Emiten atau Perusahaan Publik.
d. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 23.
e. POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
g. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.4 tanggal 7 Januari 2016.
h. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No.KEP/01/DK/2015

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No.KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No.PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah diunggah pada situs web Perusahaan dan media sosialisasi internal yaitu *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).

Adapun isi pengaturan terkait tata tertib kerja Dewan Komisaris menurut pedoman ini antara lain:

1. Persyaratan Anggota Direksi;
2. Komisaris Independen;
3. Komposisi Anggota;
4. Masa Jabatan;
5. Pengangkatan dan Pemberhentian;
6. Etika Jabatan;
7. Hak dan Wewenang;
8. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab;
9. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan;
10. Tantiem;
11. Program Orientasi;
12. Program Peningkatan Kapabilitas;

Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

Anggota Direksi BNI Syariah telah melalui mekanisme nominasi dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan RUPS tersebut efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun persyaratan seorang anggota Direksi BNI Syariah adalah:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   1.) Tidak pernah dinyatakan pailit.
   2.) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
   3.) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
   4.) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau angota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (i) pernah tidak menyelengarakan RUPS tahunan; (ii) pertanggungjawabannya sebagai

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan (iii) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
f. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat.
g. 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan.
h. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dan memiliki integritas dan reputasi yang tinggi, serta memiliki komitmen penyediaan waktu yang memadai.
i. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir.
j. Tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.
k. Tidak termasuk daftar orang tercela di bidang perbankan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
l. Tidak terdaftar dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Surat pernyataan demikian telah dibuat oleh setiap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah sebagai salah satu dokumen persyaratan uji kemampuan dan kepatutan di OJK, serta telah didokumentasikan oleh Perusahaan.Komposisi Direksi

Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan Pasal 28 PBI No.11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa jumlah angota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan dipimpin oleh Direktur Utama.

Per tanggal 31 Desember 2016, BNI Syariah memiliki 4 (empat) orang anggota Direksi yang telah melalui proses nominasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah dan diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Dari anggota Direksi diangkat seorang Direktur Utama dan seorang Direktur Risiko & Kepatuhan. Rincian komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Direksi Periode Januari 2016 – 25 Februari 2016

No.	Nama & Jabatan	Domisili	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Pengangkatan Kembali	Masa Berlaku
1	Dinno Indiano (Direktur Utama)	Indonesia	RUPS 24 Mei 2012	Tahun 2012	-	RUPS-T 2016
2	Imam Teguh Saptono (Direktur Bisnis)	Indonesia	Pendirian BNI Syariah 22 Maret 2010	Izin Prinsip BI No.12/2/ DPG/DPbS, 8 Februari 2010	RUPS-LB 12 Agustus 2015 jabatan diperpanjang	RUPS-T 2015
3	Acep Riana Jayaprawira (Direktur Risiko & Kepatuhan)	Indonesia	RUPS-LB 4 Oktober 2012	Tahun 2012	-	RUPS-T 2016

Tabel Komposisi Direksi Periode Januari 2016 – 25 Februari 2016

No.	Nama & Jabatan	Domisili	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Pengangkatan Kembali	Masa Berlaku
4	Junaidi Hisom (Direktur Operasional)	Indonesia	RUPS-T 1 Mei 2013	Surat Bank Indonesia No.15/2073/ DPbS tanggal 9 Desember 2013	-	RUPS-T 2018

Tabel Komposisi Direksi Periode 25 Februari 2016 – 31 Desember 2016

No.	Nama & Jabatan	Domisili	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Pengangkatan Kembali	Masa Berlaku
1	Imam Teguh Saptono (Direktur Utama)	Indonesia	RUPS Tahunan 25 Februari 2016	Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-27/D.03/2016, 11 Juli 2016	RUPS-T 25 Februari 2016 dari sebelumnya Direktur Bisnis	Sampai RUPS Tahunan 2019
2	Junaidi Hisom (Direktur Operasional)	Indonesia	RUPS Tahunan 1 Mei 2013	Surat Bank Indonesia No.15/2073/DPbS tanggal 9 Desember 2013	-	Sampai RUPS Tahunan 2018
3	Kukuh Rahardjo (Direktur Bisnis Konsumer)	Indonesia	RUPS Tahunan 25 Februari 2016	Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-61/D.03/2016, 27 Okt 2016	-	Sampai RUPS Tahunan 2019
4	Tribuana Tunggadewi* (Direktur Risiko dan Kepatuhan)	Indonesia	RUPS Tahunan 25 Februari 2016	Non Efektif	-	

*non efektif

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas utama Direksi adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Wewenang:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan;
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai

DIREKSI

Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*);
f. Menghapus bukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
g. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian pembiayaan namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keutusan RUPS.

Kewajiban:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
d. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terntang Dokumen Perusahaan;
e. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
f. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar;
g. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
i. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perusahaan lainnya;
j. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
k. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
l. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya seyiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
m. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
n. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
o. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
p. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Sektor Direksi

a. Direktur Utama
   1.) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana korporasi dan rencana binis untuk dibicarakan dan disetujui Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
   2.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengawasan internal, serta Perencanaan Strategis.
   3.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Perubahan, Manajemen Modal Manusia, dan Manajemen Pembelajaran Organisasi.
   4.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Penganggaran dan Pengendalian Keuangan, Pengelolaan Aset.
   5.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengelolaan Jaringan, Pengadaan Barang

b. Direktur Bisnis
   1.) Merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Produk, Manajemen Pemasaran dan Penjualan Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Kartu.
   2.) Merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Bisnis Mikro.
   3.) Merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Produk, Manajemen Pemasaran dan Penjualan produk dana dan transaksional.
   4.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Operasional, Teknologi Informasi dan Tata Kelola Data

c. Direktur Risiko & Kepatuhan
   Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum pasal 10 ayat 1 (satu), tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:
   1.) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
   2.) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
   3.) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
   4.) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
   5.) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
   6.) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   7.) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan;
   8.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Risiko Bank dan Tata Kelola Kebijakan;
   9.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Kepatuhan, Hukum dan Kesekretariatan;
   10.) Mengkoordinasikan Komunikasi Perusahaan dan program pemasaran;
   11.) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengembangan Produk Manajemen agar sesuai dengan ketentuan.

d. Direktur Operasional
   1.) Merencanakan dan mengarahkan fungsi Pengelolaan Rekomendasi terkait Risiko Bisnis Pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan bisnis komersial dan usaha menengah & kecil untuk memitigasi risiko bisnis atas ekspansi pembiayaan BNI Syariah

2.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan Jasa serta Kualitas Layanan, serta Pusat Layanan Pelanggan.
3.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Operasional Pembiayaan dan Operasional Transaksional
4.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Komersil & Usaha Kecil Menengah, Risiko Bisnis Konsumer & Ritel.

e. SEVP Bisnis
1.) Merencanakan strategi, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis segmen SME
2.) Merencanakan strategi, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis segmen komersial
3.) Merencanakan strategi, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi bisnis tresuri dan bisnis perdagangan internasional,
4.) Merencanakan strategi, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi bisnis haji & umrah.

Mekanisme Direktur Pengganti

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan. Setiap Direktur Perusahaan berhak mengambil keputusan berdasarkan sektor/ bidang masing-masing menurut ketentuan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Dalam hal salah satu atau beberapa anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka kewenangannya bertindak dapat dialihkan kepada anggota Direksi lain melalui mekanisme yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Berdasarkan SK Direksi No.KP/017/DIR/R tanggal 18 Desember 2013 tentang Susunan Direktur Pengganti, maka mekanisme Direktur Pengganti adalah sebagai berikut:

No.	Direktur Sektor	Direktur Pengganti 1	Direktur Pengganti 2
1	Direktur Utama	Direktur Bisnis	Direktur Operasional
2	Direktur Bisnis	Direktur Utama	Direktur Operasional
3	Direktur Operasional	Direktur Bisnis	Direktur Utama
4	Direktur Risiko & Kepatuhan	Direktur Operasional	Direktur Bisnis

Catatan:
a. Direktur Pengganti 1 hanya dapat melimpahkan tanggung jawabnya sebagai Direktur Pengganti kepada Direktur 2, apabila Direktur Pengganti 1 tidak dapat menjalankan fungsinya (cuti, dinas, atau sakit) selama 2 hari kerja atau lebih.
b. Dalam hal Direktur Operasional dan Direktur Bisnis menjalankan fungsinya sebagai pengganti Direktur Risiko dan Kepatuhan, maka pada saat yang bersamaan wewenang memutus bisnis yang ada pada Direktur Operasional dan Direktur Bisnis menjadi kewenangan Direktur Utama.

Independensi Direksi

Independensi anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Direksi Perseroan haruslah:
1. Bertindak independen, tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali sampai dengan derajat kedua atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
3. Tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Perseroan,

Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau Perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan catatan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya baik dalam Perusahaan maupun Perusahaan lain, yang dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan atau setiap ada perubahan. Pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 informasi kepemilikan saham dimaksud adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Imam Teguh Saptono	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Suzana Fitri	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Rania Qatrunnada	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Direktur Operasional

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Junaidi Hisom	Direktur Operasional	Tidak ada	PT BPR Yaspis Dana Prima (10%)	5 Oktober 2008
2	Susriati	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Andri Satria	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
4	Rama Mahardika Islam	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
5	Saka Rezka Islam	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
6	Dupa Utama Islam	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Direktur Bisnis Konsumer

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Kukuh Rahardjo	Direktur Bisnis Konsumer	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Sofia Kusumaningrum	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Luthfi Ghazian Akbar	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
4	Muhammad Gibran Abrisam Akbar	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
5	Ghazawan Sulaiman Akbar	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Direktur Risiko dan Kepatuhan*

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Tribuana Tunggadewi	Direktur Risiko & Kepatuhan*	Tidak ada	PT BNI Tbk 96.547 lembar saham (Program MESOP)	Maret 2012
2	Ir. Prayudi Widyanto	Suami	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Rr. Luthfia Gita Wardani	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Direktur Risiko dan Kepatuhan*

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
4	R. Maheswara Rikza Adityawarman	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
5	R. Maheswira Adityawardhana	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

*non efektif

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Direksi sebagai berikut:

No.	Direksi	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan Lain
1	Imam Teguh Saptono (Direktur Utama)	Tidak ada	Tidak ada
2	Junaidi Hisom (Direktur Operasional)	Tidak ada	Tidak ada
3	Kukuh Rahardjo (Direktur Bisnis Konsumer)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tribuana Tunggadewi* (Direktur Risiko dan Kepatuhan)	Tidak ada	Tidak ada

*non efektif

Direktur Risiko dan Kepatuhan

a. Bank memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS. Pengangkatan demikian berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Direktur kepatuhan BNI Syariah tidak membawahi fungsi-fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, *treasury*, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, dan audit internal.

b. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BNI Syariah adalah memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
   1.) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
   2.) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
   3.) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan lembaga otoritas yang berwenang.
   4.) Mencegah Direksi Perusahaan agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   5.) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
   6.) Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
   7.) Memastikan penerapan APU PPT sesuai ketentuan yang berlaku;
   8.) Mengusulkan Laporan *action Plan* dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK;
   9.) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank termasuk dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank, serta menurunkan tingkat pelanggaran;
   10.) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
   11.) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
   12.) Memastikan bahwa seluruh kebijakan,

ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

13.) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

14.) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

15.) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

c. Selain itu tugas Direktur Kepatuhan adalah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/ OJK tentang APU dan PPT dan peraturan perundangundangan lainnya.

d. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya.

Rapat Direksi

a. Tingkat kehadiran

Selama tahun 2016, Direksi BNI Syariah mengadakan 37 kali rapat Direksi dan 12 kali rapat bersama Dewan Komisaris, sehingga total Direksi mengadakan rapat sebanyak 49 kali. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi dalam Rapat

Nama	Periode	Rapat Direksi			Rapat dengan Komisaris		
		Jumlah Radisi	Tingkat Kehadiran Rapat	Presentasi (%)	Jumlah Radisi	Tingkat Kehadiran Rapat	Presentasi (%)
Imam Teguh Saptono (Direktur Utama)	Januari 2016 – Desember 2016	37	36	97%	12	12	100%
Junaidi Hisom (Direktur Operasional)	Januari 2016 – Desember 2016	37	32	86%	12	12	100%
Kukuh Rahardjo (Direktur Bisnis Konsumer)	25 Februari 2016 – Desember 2016	37	30	81%	12	12	100%
Tribuana Tunggadewi* (Direktur Risiko & Kepatuhan)	25 Februari 2016 – Desember 2016	37	30	81%	12	12	100%
Dinno Indiano** (Direktur Utama)	Januari 2016 – 25 Februari 2016	37	4	11%	12	12	100%
Acep R Jayaprawira** (Direktur Risiko & Kepatuhan)	Januari 2016 – 25 Februari 2016	37	2	5%	12	12	100%

*) Belum Efektif menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 25 Februari 2016
**) Diberhentikan dengan hormat sesuai hasil keputusan RUPST tanggal 25 Februari 2016

b. Agenda Utama Rapat Direksi

Direksi BNI Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	12 Januari 2016	Penilaian Kinerja dan Pengembangan Pegawai 2015
2	17 Februari 2016	Implementasi Pioloting Kantor Wilayah Bak BNI Syariah Mei 2016
3	18 Februari 2016	Tantiem Direksi
4	24 Februari 2016	*Annual Increment 2016*

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
5	26 Februari 2016	1. Pembagian Fungsi Divisi Sektor 2. Pengurusan Dokumen Direksi & Komisaris 3. Penyesuaian Komite
6	29 Februari 2016	Pembagian Bidang Direksi & Struktur Organisasi Kantor Pusat
7	1 Maret 2016	Pembagian Bidang Direksi & Struktur Organisasi Kantor Pusat (lanjutan)
8	1 Maret 2016	1. Orientasi BOD, BOC yang baru 2. Persiapan Pisah Sambut BOD, BOC 3. Pemberian Cindera Mata
9	2 Maret 2016	Persiapan Milad ke 5
10	17 Maret 2016	Program Umrah Hasanah dan MBB
11	28 Maret 2016	Rencana Pembelian Aset Kantor Cabang, Relokasi & Pembukaan Cabang 2016
12	8 April 2016	Tindak Lanjut Pengelolaan *Scoring* EFO
13	13 April 2016	Persetujuan Laporan Profil Risiko Periode Maret 2016
14	22 April 2016	Insentif *Reward* 2016
15	29 April 2016	Proses Perizinan Kantor Wilayah
16	18 Mei 216	*Finetunning* Organisasi & *Man Power Planning* 2016
17	30 Mei 2016	*Perfomance* Manajemen Sistem
18	31 Mei 2016	Hasil Keputusan Komite SDM TMTPD
19	14 Juni 2016	*Alignment* Strategi Bisnis dan Strategi Komunikasi Hasanah *Lifestyle Banking*
20	28 Juni 2016	Hasil Keputusan Komite SDM No.3
21	20 Juli 2016	Kinerja Wilayah & Cabang PT Bank BNI Syariah
22	20 Juli 2016	Presentasi Persetujuan Laporan Profil Individu dan Terintegrasi Periode Juni 2016
23	11 Agustus 2016	Program ODP 2017
24	16 Agustus 2016	Pembahasan Pencapaian Sinergi BNI Syariah dalam grup Juli 2016
25	31 Agustus 2016	Reklasifikasi KCP
26	14 September 2016	Presentasi Kinerja Agustus serta Prognosa Akhir Tahun & *action* Plan Pencapaian Target
27	14 September 2016	Pembelian Aset dan Progres *Outlet*
28	22 September 2016	Strategi Komunikasi Hasanah Lifestyle Banking
29	27 September 2016	*Talent Management Program*
30	5 Oktober 2016	Persetujuan Kebijakan & Prosedur *BUSINESS CONTINUETY MANAGEMENT*
31	7 Oktober 2016	Finalisasi RBB 2017 – 2019
32	13 Oktober 2016	Laporan Profil Risiko Periode Oktober 2016
33	26 Oktober 2016	*Storyline Webseries* Hasanah Lifestyle
34	21 November 2016	Sanksi SDM 2016
35	29 November 2016	Kajian Pengelolaan Bisnis Komersial (Migrasi Nasabah > 15 M)
36	7 Desember 2016	*Perfomance Management System* (PMS) BOM, Divisi Bisnis
37	8 Desember 2016	1. Mutasi Pemimpin Divisi 2. Perubahan Organisasi

c. Agenda Utama Rapat Direksi dan Komisaris

Direksi juga melakukan rapat dengan Dewan Komisaris, serta Rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dan DPS, selama tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	Selasa 23 Februari 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas 1. Presentasi Direksi mengenai kinerja Januari 2016; 2. Gladiresik RUPS Tahun Buku 2015; 3. Presentasi CSD mengenai pembiayaan Koperasi Telkomsel.
2	Selasa 15 Maret 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas: 1. Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan Februari 2016; 2. Keanggotaan Dewan Komisaris pada Komite.
3	Selasa 12 April 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas: 1. *Trend* Perbankan Syariah; 2. Kinerja Perseroan Maret 2016 dan RBB; 3. *Corporate Plan & Road Map* BNI Syariah; 4. *Corporate Culture (Fraud,* WBS) & SDM 5. Lain-lain dalam rangka *intensive strategic session*
4	Selasa 10 Mei 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas: 1. Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan April 2016; 2. Update Direksi mengenai Hasil Presentasi kepada Pemegang Saham pada 4 Mei 2016 3. Presentasi Direksi mengenai *Financing Exposure Limit*
5	Selasa 14 Juni 2017	Rapat Bersama Dewan Komisaris membahas: 1. Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan Mei 2016; 2. Presentasi Bidang Mikro mengenai Kinerja & Tantangan Pembiayaan.
6	Selasa 26 Juli 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas: 1. Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan Juni 2016; 2. Presentasi mengenai profil Risiko Perseroan Juni 2016.
7	Selasa 20 Agustus 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas: 1. Presentasi Direksi Pembahasan dan Pendalaman Materi mengenai Kinerja Agustus 2016; 2. Presentasi Direksi, pembahasan dan pendalaman Materi mengenai Prognosa Kinerja 2016 dan Proyeksi 2017-2018.
8	Selasa 23 Agustus 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas: 1. Presentasi Direksi mengenai Kinerja Juli 2016; 2. Presentasi pelaksanaan & permasalahan manajemen risiko terkait pengelolaan portofolio *treasury*; 3. Pemaparan *Strategic Issues* oleh masing-masing Direktur Sektor.
9	Selasa 4 Oktober 2016	Presentasi dari Direktur Risiko dan Kepatuhan kepada Dekom mengenai: 1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko; 2. Mekanisme & Pelaksanan GCG; 3. *Review* Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud.*
10	Selasa 11 Oktober 2016	Rapat bersama Dewan Komisaris membahas: 1. Presentasi Direksi dan Pembahasan mengenai Kinerja Perseroan September 2016; 2. Presentasi Direksi dan Pembahasan mengenai RBB 2017-2019.
11	Selasa 15 November 2016	Presentasi Direksi kepada Dekom mengenai Kinerja Perseroan Oktober 2016, Realisasi Program Kerja 2016 serta *Update Issue* Aktual
12	20 Desember 2016	Presentasi Direksi kepada Dekom mengenai Kinerja

Peningkatan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2016, anggota Direksi secara independen telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi. Beberapa pelatihan tersebut antara lain adalah:

Direksi	Tanggal	Jenis Seminar/Pelatihan	Penyelenggara
Imam Teguh Saptono	Mei 2016 di Graha Tirtadi B1, Jakarta	Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah	Karim Consultant
	14 Mei 2016 di Auditorium Andi Hakim Nasution, Gd Rektorat IPB Dramaga, Bogor	Seminar on Islamic Microfinance for Poverty Alleviation in OIC Member Countries	OJK
	29 September 2016 di Hotel Fairmont, Jakarta	Revitalizing Islamic Finance in the New Normal Era Conference	OJK
	22 September di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta	Seminar Challenges to Global Economy	LPS
	3 November 2016 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta	*Workshop* Building a Culture of Innovation through Gamification	KUBIK
	10 November 2016 di World Trade Centre, Jakarta	Menyongsong Kinerja di tahun 2017	
	23 November 2016 di Trans Luxuri Hotel, Bandung	Seminar Hasil Riset Perbankan Syariah	Asbisindo
Junaidi Hisom	3 Februari 2016 di Parkland 7, Lantai Dasar	*Workshop* Strategi Komunikasi 2016, bersama Kraftig	Kraftig
	7 April 2016 di Kantor Pusat BNI, Gedung BNI	Seminar Optimalisasi Fungsi Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BNI dan Perusahaan Anak	UPPA-BNI
	3 November 2012 di Gotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta	Seminar Prospek Perekonomian Nasional 2017 Peluang dan Tantangan Industri Perbankan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
Kukuh Rahardjo		BSMR – Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 5 untuk eksposur risiko yang lebih kompleks	BSMR
Tribuana Tunggadewi* (*non efektif)	Januari 2016 di Graha Tirtadi, Ruang B-01 Jl Pangeran Antasari No.18 A – Jakarta	*Executive Training on Islamic Banking* PT Bank BNI Syariah	Karim Consulting Indonesia
	Maret 2016 di Graha Tirtadi, Ruang B-01 Jl Pangeran Antasari No.18 A – Jakarta	*Executive Training on Islamic Banking* PT Bank BNI Syariah	Karim Consulting Indonesia
	7 April 2016 di BNI lantai 25	Seminar Optimalisasi Fungsi Pengawasan aktif Direksi & Dekom atas Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme di BNI dan Perusahaan Anak	BNI
	16 April 2016 di BSMR	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 5 untuk eksposur risiko yang lebih kompleks	BSMR

Direksi	Tanggal	Jenis Seminar/Pelatihan	Penyelenggara
	27 April 2-16 di Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UNPAD	Seminar Nasional Kesiapan Sumber Daya Insani untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri keuangan syariah	Universitas Padjajaran Bandung
	9 – 11 Agustus 2016 di Nusa Dua Bali	*Counter* – Terorism Financing Sumit	PPATK
	11-12 Mei 2016 di PT DDI	BNI-*Assessment Centre* 2016	BNI
	15-16 September 2016 di Plaza Bapindo	*Workshop* dan Uji Sertifikasi Kepatuhan dan AML Level 3 Batch 2 bagi seluruh Direktur Kepatuhan Bank Umum	FKDKP
	Plaza Bapindo	Sertifikasi Kepatuhan & AML Level 3 Batch 2 bagi seluruh Direktur Kepatuhan Bank Umum	FKDKP

Program Orientasi bagi Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi yang baru diangkat senantiasa diberikan program orientasi meliputi perkenalan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, *General Manager, Corporate Secretary*, anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, sekretaris Dewan Komisaris, serta pejabat lainnya. Materi pembekalan anggota Direksi yaitu terkait:

a. Struktur organisasi Perusahaan serta fungsinya masing-masing;
b. Hak (termasuk remunerasi dan fasilitas yang didapat), tugas utama, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi;
c. Kinerja keuangan;
d. Kondisi Perusahaan terkini, Rencana Bisnis Bank, serta prospek Perusahaan ke depan;
e. Perangkat kebijakan internal yang dimiliki Perusahaan;
f. Praktik manajemen risiko Perusahaan.
g. Hal lainnya yang sekiranya diperlukan untuk membekali anggota Direksi baru.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan mengenai suksesi anggota Direksi BNI Syariah diatur sesuai dengan pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan suksesi Direksi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap persiapan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang.

BNI Syariah secara internal memiliki kebijakan yang tercermin dalam program *Talent Management System* yang telah diselaraskan PBI No.14/6/PBI/2012 pasal 17 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Syariah yang mengatur bahwa Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan. Dalam program ini, BNI Syariah melakukan penilaian dalam hal kepemimpinan pada karyawan potensial yang mengikuti program tersebut. *Human Capital Division* akan memberi prioritas pada karyawan terpilih yang memiliki talenta, keahlian khusus dan kompetensi tinggi bagi pencapaian misi BNI Syariah, serta membuat program suksesi bagi *Top Performers* sebagai calon pemimpin di masa depan.

Selanjutnya, di saat BNI Syariah membutuhkan penggantian kepemimpinan, *Human Capital Division* akan mengajukan kandidat internal dari peserta *Talent Pool* yang difasilitasi oleh Direksi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian akan diajukan pada rapat komite.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris												
Fero Poerbonegoro		v		v		v		v		v		v
Rizqullah		v		v		v		v		v		v
Max Niode*		v		v		v		v		v		v
Muhammad Syakir Sula*		v		v		v		v		v		v
Subarjo Joyosumarto**		v		v		v		v		v		v
Harisman**		v		v		v		v		v		v

*Masih menjalani *fit and proper test* OJK
**Masa jabatan berakhir pada RUPS-T 25 Februari 2016

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direksi												
Imam Teguh Saptono		v		v		v		v		v		v
Junaidi Hisom		v		v		v		v		v		v
Kukuh Rahardjo		v		v		v		v		v		v
Tribuana Tunggadewi*		v		v		v		v		v		v
Dinno Indiano**		v		v		v		v		v		v
Acep R. Jayaprawira**		v		v		v		v		v		v

*non efektif
**Masa jabatan berakhir pada RUPS-T 25 Februari 2016

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian Kinerja

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.
2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, anggaran Dasar serta capaian terhadap tugas manajemen yang disampaikan dalam RUPS Tahunan sebelumnya. Kriteria-kriteria ini disampaikan Perusahaan kepada Dewan Komisaris pada saat program orientasi di awal pengangkatan RUPS anggota Dewan Komisaris.
3. Hasil penilaian Pemegang Saham terhadap kinerja Dewan Komisaris merupakan faktor yang menentukan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian dimaksud juga menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria-kriteria yang menjadi dasar penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pencapaian kinerja BNI Syariah;
2. Tingkat keberhasilan anggota Dewan Komisaris atas terselenggaranya pelaksanaan GCG pada setiap kegiatan usaha BNI Syariah; dan
3. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, serta rapat-rapat komite Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Penilaian Kinerja

1. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.
2. Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan serta pencapaian tugas manajemen yang telah ditetapkan dalam RUPS Tahunan sebelumnya.
3. Sistem Penilaian Kinerja Direksi maupun Komisaris dikaji oleh Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Unit Kerja Sumber Daya Insani dan Unit Kerja terkait.
4. Dewan Komisaris membahas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tentang penilaian kinerja Direksi dan kemudian memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi untuk disampaikan dalam RUPS.
5. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan usulan persetujuan atas pencapaian kinerja Direksi dalam RUPS dan RUPS akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria-kriteria yang menjadi dasar penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan dalam Penciptaan Nilai pada ruang lingkup/perspektif pegawai, nasabah, tata kelola, dan aspek Syariah, dengan rincian *Key Performance Index* (KPI):
   - *Employment Opinion Survey* (EOS)
   - Kualitas Layanan
   - GCG
   - DPS *Statement*
2. Keberhasilan Pencapaian RBB pada ruang lingkup kuantitatif dan kualitatif mencakup perspektif:
   - Keuangan, dengan KPI: EAT, NI, ROE, & ROA;
   - *Peer Group*, dengan KPI: BOPO BI (*peers*);
   - Pertumbuhan, dengan KPI: DPK, (excl dana bank), pembiayaan, aset, CASA, & FBI.
   - *Risk*, dengan KPI: NPF *Gross & Coverage Ratio*;
   - *Process*, dengan KPI: CIR
   - Kualitatif, dengan KPI: Strategi Bisnis dan TKB

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimana pertimbangan penilaian tersebut diambil

berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurusan Direksi serta Pengawasan Dewan Komisaris baik yang ternyatakan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan langsung oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan. Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris juga mengaju kepada laporan kinerja keuangan tahunan serta laporan indikator KPI yang dinyatakan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Direksi & Dewan Komisaris

Tahun 2016 Direksi BNI Syariah mendapatkan skor penilaian KPI secara kolegial yang membanggakan sesuai dengan kinerja BNI Syariah. Penilaian KPI ini juga mencerminkan keberhasilan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Hal tersebut terlihat dari tabel skor KPI terkait kinerja Direksi berikut ini:

Penilaian	Perincian		Perspektif	KPI	Pencapaian
Kolegial	Penciptaan Nilai	Pegawai	Pegawai	EOS	100%
		Nasabah	Nasabah	Kualitas Layanan	100%
		Tata Kelola		GCG	100%
		Aspek Syariah		Statement DPS	150%
	Pencapaian RBB	Kuantitatif	Keuangan	EAT	96%
				NI	100%
				ROE	94,81%
				ROA	92%
			Group/Peer	BOPO BI (peers)	94%
			Pertumbuhan	DPK (exck dana bank)	110%
				Pembiayaan	99%
				Aset	108%
				CASA	101%
				FBI	103%
			Risiko	NPF Gross	99%
				Coverage Ratio	109%
			Proses	CIR	98%
		Kualitiatif		Strategi Bisnis	100%
				TKB	100%

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank serta perundang-undangan yang berlaku. Komposisi tersebut didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, dan latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta tugas pengurusan Direksi. BNI Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaji serta dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, maupun sumber rekomendasi awal.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Usia	Pengalaman
Fero Poerbonegoro	Laki-laki	Magister Manajemen	62	Komisaris BNI Syariah (2016), Komisaris Independen BNI (2006-2015), Direktur Tresuri & Internasional (2003-2006), *Project Manajer New Core Banking System* BNI (2002-2003), Direktur Tresuri & International Bank BCA (1998-2002), dst
Rizqullah	Laki-laki	S3 Ekonomi & Keuangan Islam	60	Komisaris Independen PT Grha 185 (2015), Direktur Program Universitas Trisakti Program S2 (2013-2016), Direktur Utama BNI Syariah (2010-2012), Pemimpin Proyek Pendirian Bank Syariah di BNI (2008-2010), Pemimpin Divisi Risiko Kredit BNI (2007-2008), dst
Muhammad Syakir Sula*	Laki-laki	S1 Pertanian/ Sosial	52	Anggota KPJKS OJK (2014 s/d sekarang), Komisaris Independen PT Jamkrindo Syariah (2014 s/d sekarang), Ketua DPS PT Nasional Reasuransi (2013 – 2016)
Max Niode*	Laki-laki	S2 Hukum	59	*Senior Advisor (Part Time)* di Rahmad Irwan & Partners (Januari – sekarang), Komisaris PT Asuransi Tripakarta (2014-2015), Komisaris Utama PT Swadharma Surya Finance (2003-2006), Pemimpin Satuan Pengawas Internal BNI (2011-2014), Pemimpin Divisi Hukum BNI (2004-2011)

*Masih menjalani *Fit and Proper Test* Ojk Belum Efektif

Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Usia	Pengalaman
Imam Teguh Saptono	Laki-laki	S3 Manajemen Bisnis	47	Direktur Bisnis BNI Syariah (2012-2014), Direktur Risiko Kepatuhan BNI Syariah (2010-2012), *Deputy Un Organic Growth Project* PT Bank Permata Tbk (2005-2007), *Head of Investor Relations* PT Bank Permata Tbk (2003-2005), Manager Divisi Hubungan Investor dan Kesekretariatan BNI (1998-2003)
Junaidi Hisom	Laki-laki	S2 Manajemen	59	Beliau memulai kariernya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1992 sebagai Koordinator Kredit Cabang Palembang hingga diangkat sebagai *Vice President* Divisi *Human Capital* tahun 2010. Selanjutnya beliau menjabat sebagai *Vice President* Divisi *Organizational Learning* merangkap sebagai pemimpin Divisi *Human Capital* pada tahun 2011.
Kukuh Rahardjo	Laki-laki	S2 Manajemen UMKM	48	*GM Consumer Financing* BNI Syariah (2015-2016), GM *Consumer & Funding* BNI Syariah (2014), GM Retail Bisnis BNI Syariah (2012-2013), EVP Bisnis Retail (2011-2012), AVP Pengembangan Strategi Bisnis BNI (2005-2008), dst
Tribuana Tunggadewi*	Perempuan	S2 Hukum	49	*Senior Vice President – Corsec* dan Pemimpin Divisi KMP BNI (2011-2015), *Vice President* Bidang GCG dan Biro Direksi BNI (2009-2011), *Assistant Vice President* Pemimpin Kelompok Hukum dan Pemantauan GCG BNI (2006-2009), Manager Pengelola Hukum dan Pelaporan pada Kelompok Hubungan Investor Divisi KMP (2000-2005), dst

* non efektif

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BNI Syariah membentuk Komite Dewan Komisaris yang fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, adapun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Komite-Komite Dewan Komisaris di BNI Syariah terdiri dari (1) Komite Audit; (2) Komite Pemantau Risiko, serta (3) Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE AUDIT

Dasar Pembentukan & Piagam Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Komite Audit menjalankan tugasnya berdasarkan mandat Piagam Komite Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Piagam Komite Audit dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BNI Syariah terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Komite Audit dilakukan pada tahun 2014 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris nomor KEP/01/DK/2014 tanggal 10 September 2014.

Struktur dan Keanggotaan

Komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komite Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, dan lainnya adalah seorang yang ahli dalam akuntansi keuangan dan seorang lainnya ahli dalam perbankan syariah.

Adapun keanggotaan Komite Audit BNI Syariah sebagai berikut:

No	Jabatan	Keterangan
1	Ketua	Muhammad Syakir Sula* (Komisaris Independen)
2	Anggota	Max Niode*(Komisaris)
3	Anggota	Alexander Zulkarnain
4	Anggota	Vivin Haryadi
5	Ketua	Harisman**
6	Anggota	Subarjo Joyosumarto**

*Diangkat sebagai komisaris pada RUPS Tahunan 25 Februari 2016 dan sedang menjalani proses *fit and proper test* OJK, selama belum efektif maka kewenangannya diwakili Komisaris Utama
**menjabat komisaris sampai RUPS Tahunan 25 Februari 2016

Kualifikasi dan Profil Pihak Independen Anggota Komite Audit

Muhammad Syakir Sula

Ketua
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Max Niode

Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Alexander Zulkarnain

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit BNI Syariah sejak tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota Komite Audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2001-2010). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup gelar Doktoral (S3) di Universitas Negeri Jakarta (2013), Magister Manajemen (S2) jurusan Manajemen Keuangan STIE IPWI Jakarta, dan Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Beliau juga seorang *Chartered Accountant*-Indonesia

Vivin Haryadi

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit BNI Syariah semenjak April 2013. Sebelumnya beliau adalah Wakil Pemimpin Divisi Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2011). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor jurusan Finansial Agribisnis (2001-2002) serta Sarjana jurusan Administrasi Niaga, Spesialisasi *Financial Management* dari Universitas Brawijaya (1976-1981).

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota komite audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Komite Audit												
Muhammad Syakir Sula		v		v		v		v		v		v
Max Niode		v		v		v		v		v		v
Alexander Zulkarnain		v		v		v		v		v		v
Vivin Haryadi		v		v		v		v		v		v

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris atau mekanisme lainnya terkait tugas-tugasnya yaitu:

1.) Komite Audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian

intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2.) Komite Audit melakukan *review* terhadap pelaksanaan tugas Unit kerja pengelola audit internal (Satuan Pengawas Internal), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Unit kerja pengelola audit internal, Akuntan Publik, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

3.) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP sebagai usulan Dewan Komisaris di RUPS Tahunan.

4.) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern

5.) Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Unit kerja pengelola audit internal.

6.) Menyetujui *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit *Intern* dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor *Intern* serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Unit kerja pengelola audit internal, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

7.) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan Unit kerja pengelola audit internal.

8.) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9.) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan Standar *Auditing* yang berlaku.

10.) Memastikan independensi dan obyektifitas akuntan publik.

11.) Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

12.) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.

13.) Menilai efektifitas pelaksanaan fungsi Unit kerja pengelola audit internal.

14.) Menaati peraturan-peraturan yang tercantum dalam Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) ataupun perundang-undangan terkait lainnya.

15.) Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus.

16.) Menelaah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

Sepanjang 2016, Komite Audit telah melakukan berbagai aktivitas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas aktivitas dan operasional BNI Syariah. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hal-hal sebagai berikut:
   a. Rencana kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI);
   b. Pelaksanaan rencana kerja SPI dan pokok-pokok hasil audit;
   c. Tindak lanjut manajemen atas laporan SPI, Otoritas Jasa Keuangan, *Management Letter* Kantor Akuntan Publik dan Dewan Pengawas Syariah;
   d. Efektivitas pelaksanaan auditor ekstern.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
3. Menelaah hal-hal sebagai berikut:
   d. Laporan tahunan 2016 (tahun buku 2015);
   e. Informasi keuangan triwulan I, II dan II 2016;
   f. Independensi dan objektivitas auditor ekstern;
   g. Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan
4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
5. Membuat pengungkapan Komite Audit pada laporan tahunan.

6. Melakukan *review* Piagam Komite Audit.
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.
8. Kunjungan ke Divisi/Unit Perusahaan dan Cabang.
9. Mengikuti Pelatihan.
10. Menyusun Rencana Kerja 2017.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Tingkat kehadiran

Selama tahun 2016, Komite Audit BNI Syariah mengadakan 23 kali rapat. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kehadiran dalam Rapat

Nama	Kehadiran
Harisman Sidi (s.d. 25 Februari 2016)	5
Subarjo Joyosumarto (s.d. 25 Februari 2016)	4
Muhammad Syakir Sula (sejak 26 Februari 2016)	16
Max Niode (sejak 26 Februari 2016)	17
Alexander Zulkarnain	22
Vivin Haryadi	22

Agenda Utama Rapat

Komite Audit BNI Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	Selasa 12 Januari 2016	Pembahasan Kinerja BNI Syariah s/d Bulan Desember 2015
2	Selasa 12 Januari 2016	1. Rapat Pembahasan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester II/2015 2. Program Kerja *Internal Audit Division* (IAD) Tahun 2016
3	Selasa 19 Januari 2016	1. Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko 2015 2. Rencana Kerja Satuan Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Manajemen Risiko 2016 3. Laporan Profil Risiko Desember 2015 4. Laporan Komite Audit atas angka Laporan Keuangan 31 Desember 2015
4	Rabu 2 Februari 2016	Pembahasan *Audited Report* 2015
5	Selasa 23 Februari 2016	1. Presentasi Direksi mengenai Kinerja Perseroan s/d 31 Januari 2016 2. Laporan IAD dan OPD tentang *fraud* pada KCP Panglima Polim
6	Selasa 15 Maret 2016	1. Pembahasan Kinerja BNI Syariah s/d Bulan Februari 2016; 2. Keanggotaan Komite-komite
7	Selasa 29 Maret 2016	Rapat pembahasan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan 1/2016
8	Selasa 5 April 2016	1. Presentasi Divisi TID mengenai Pengelolaan Risiko Pasar dan Likuidator 2. Presentasi Divisi OPR tentang Risiko Operasional.
9	Maret 2016	Kinerja Maret 2016 + Koreksi RBB 2016
10	Selasa 10 Mei 2016	1. Pembahasan Kinerja BNI Syariah s/d Bulan Apri 2016 2. Update Direksi mengenai Hasil Presentasi kepada Pemegang Saham
11	Selasa 17 Mei 2016	Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal tahun 2015
12	Selasa 24 Mei 2016	Presentasi Divisi HCD mengenai sanksi administratif
13	14 Juni 2016	Kinerja Mei 2016
14	27 Juli 2016	Kinerja Juni 2016
15	Selasa 9 Agustus 2016	Rapat Pembahasan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan II/2016
16	Selasa 23 Agustus 2016	Pembahasan Kinerja BNI Syariah s/d Bulan Juli 2016

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
17	Agustus 2016	Kinerja Agustus 2016
18	Selasa 27 September 2016	Pelaporan SEVP dan Divisi Bisnis Komersial tentang pembiayaan nasabah Waskita Karya, Totalindo, Nusa Surya Cipta Dana, RS. Mitra Medika dan Harta Insan Karimah
19	Selasa 25 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan III 2016 (dengan laporan tindak lanjut hasil audit auditor internal dan eksternal)
20	Selasa 8 November 2016	1. Presentasi Haji dan Umrah Division mengenai Peluang dan Tantangan serta Prohram HUD tahun 2016 dan rencana tahun 2017. 2. Presentasi Divisi Hukum tentang Permasalahan dan Kasus yang sedang Dihadapi oleh Perseroan dan Proposal penyelesaiannya
21	Selasa 15 November 2016	Pembahasan kinerja PT BNI Syariah sampai dengan bulan Oktober 2016.
22	Senin 6 Desember 2016	*Kick-off meeting* dalam rangka audit atas Laporan Keuangan tahun 2016 dengan KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya.
23	Selasa 13 Desember 2016	Pembahasan Kinerja Sampai dengan November 2016

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris memandang pada tahun 2016 Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan Piagam Komite Audit.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Audit adalah sebagai berikut

Uraian	Frekwensi	Keterangan
Rapat	23 kali	Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat cukup baik.
Laporan	1 laporan	Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	23 rekomendasi	Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan dan review terkait beberapa aspek operasional Perseroan.
Program Kerja	1 kali	Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit 2017

Rencana Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Audit merencanakan kegiatan antara lain:

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Divisi Audit Internal dan Pokok-Pokok Hasil Audit.
2. Evaluasi tindak lanjut Manajemen atas Divisi Audit Internal ,OJK, *Management Letter* KAP, dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan AP dan KAP
4. Menelaah Laporan Tahunan 2016.
5. Menelaah Informasi Keuangan Triwulan tahun 2016.
6. Koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal.
7. Melakukan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit dari Auditor Eksternal.
8. Menelaah Independensi dan Objektivitas Auditor Eksternal risiko yang penting telah dipertimbangkan.
9. Menelaah Laporan Pelaksanaan GCG Perseroan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Pembentukan & Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui dokumen KEP/08/DK/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen.

Adapun keanggotaan Komite Pemantau Risiko BNI Syariah sebagai berikut:

No	Jabatan	Keterangan
1	Ketua	Rizqullah* (Komisaris Independen)
2	Anggota	Fero Poerbonegoro* (Komisaris Utama)
3	Anggota	Bambang Eko Priyantono
4	Anggota	Ibrahim Husain
5	Ketua	Harisman**
6	Anggota	Subarjo Joyosumarto**

*Diangkat sebagai komisaris pada RUPS Tahunan 25 februari 2016 dan telah efektif.
**menjabat komisaris sampai RUPS Tahunan 25 Februari 2016

Kualifikasi dan Profil Anggota KPR

Rizqullah

Ketua
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Fero Poerbonegoro

Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Ibrahim Husain

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup gelar Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Bambang Eko Priyantono

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Unit *Policy Governance*. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris. Semua anggota ini adalah independen terhadap Direksi, dan secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para professional yang memiliki kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.

Latar belakang para anggota Komite Pemantau Risiko beragam, yakni manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksud untuk menjamin kualitas rekomendasi serta menjadi nara sumber perbaikan pelaksanaan manajemen risiko BNI Syariah.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Komite Pemantau Risiko												
Rizqullah		v		v		v		v		v		v
Fero Poerbongoro		v		v		v		v		v		v
Bambang E Priyantono		v		v		v		v		v		v
Ibrahim Husain		v		v		v		v		v		v

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait tugas-tugasnya yaitu:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit kerja pengelola Manajemen Risiko.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perusahaan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal Perusahaan berdasarkan namun tidak terbatas pada laporan pemeriksaan Unit kerja pengelola audit internal dan Direktur Kepatuhan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

Sepanjang 2016 Komite Pemantau Risiko telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan review BP Kebijakan yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Presentasi dan evaluasi rencana kerja satuan kerja manajemen risiko tahun 2016.
3. Evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko tahun 2016.
4. Evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank.
5. Melakukan monitoring kualitas pembiayaan,
6. Melakukan monitoring pengelolaan risiko pasar terhadap divisi dan unit terkait
7. Melakukan evaluasi pengelolaan risiko likuiditas terhadap divisi dan unit terkait
8. Melakukan evaluasi pengelolaan risiko operasional terhadap divisi dan unit terkait

9. Melakukan *review* piagam komite pemantau risiko
10. Monitoring terhadap kebijakan dan implementasi *limit* konsentrasi portfolio pembiayaan (*financing exposure limit)*
11. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas penilaian risiko berdasarkan *self assessment* periskop
12. Melakukan evaluasi terkait kebijakan penilaian taksasi jaminan untuk pembiayaan.
13. Kunjungan ke unit Perseroan dan cabang
14. Mengikuti pelatihan
15. Menyusun rencna kerja komite 2017
16. Melakukan tugas lain yang diberikan komisaris

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Tingkat kehadiran

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko BNI Syariah mengadakan 17 kali rapat. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kehadiran dalam Rapat

Nama	Kehadiran
Rizqullah	4
Fero Poerbonegoro	4
Bambang Eko Priyantono	16
Ibrahim Husain	17
Subarjo Joyosumarto	1
Harisman	3

Agenda Utama Rapat

Komite Pemantau Risiko BNI Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	Selasa, 12 Januari 2016	Perkembangan pembiayaan dan aset BNI Syariah per 31 Desember 2015
2	Selasa, 19 Januari 2016	1. Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko 2015 2. Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko 2016 & Komite Manajemen Risiko 2016
3	Selasa, 9 Februari 2016	Evaluasi Profil Risiko Desember 2015
4	Selasa, 15 Maret 2016	Perkembangan aset, Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan sampai dengan Februari 2016.
5	Selasa, 22 Maret 2016	Presentasi CSD tentang Pembiayaan kepada Perum Percetakan Negara RI
6	Selasa, 5 April 2016	Likuiditas BNI Syariah
7	Selasa, 5 April 2016	Pengelolaan Risiko Operasional pada Divisi Operasional
8	Selasa, 26 April 2016	Pembiayaan a.n PT Transportasi Jakarta
9	Selasa, 3 Mei 2016	Evaluasi Profil Risiko Maret 2016
10	Selasa, 10 Mei 2016	Evaluasi *Financing Exposure Limit* Tahun 2016
11	Selasa, 17 Mei 2016	Laporan *Self Assessment* Periskop Triwulan 1/2016

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
12	Selasa, 2 Agustus 2016	1. *Recovery*, penanganan akun pembiayaan bermasalah dan prospek penyelesaiannya 2. Penilaian Profil Risiko Individu dan Terintegrasi untuk periode Juni 2016
13	Selasa, 9 Agustus 2016	Penilaian Taksasi Jaminan Pembiayaan
14	Selasa, 30 Agustus 2016	1. Pelaksanaan dan Permasalahan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan *Portfolio Treasury* 2. Pelaporan SEVP & Commercial Business Division tentang Keputusan Pembiayaan kepada PT Perkebunan Nusantara X dan PT Braja Mukti Cakra
15	Selasa, 20 September 2016	1. Pembahasan Perkembangan Aset, Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan sampai dengan Agustus 2016; 2. Pembahasan Prognosa Kinerja 2016.
16	Selasa, 27 September 2016	Pembiayaan kepada PT Waskita Karta (Persero) Tbk, PT Nusa Surya Cipta Dana, PT Totalindo Eka Persada dan PT Mitra Insani Medan
17	Selasa, 18 Oktober 2016	Pembiayaan kepada PT Pegadaian (Persero), PT Era Prima Adi Cipta Kreasindo dan Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memandang pada tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko. Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut

Uraian	Frekwensi	Keterangan
Rapat	17 kali	Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat cukup baik.
Laporan	1 laporan	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	17 rekomendasi	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan.
Program Kerja	1 kali	Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2017

Rencana Tahun 2017

Tahun 2017 Komite Pemantau Risiko akan melaksanakan:

1. Melakukan pembahasan Fasilitas Pembiayaan Korporasi.
2. Melakukan pembahasan Pelaksanaan Program
3. Melakukan pembahasan Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Risiko.
4. Melakukan pembahasan pencapaian Kinerja Keuangan tahun 2017.
5. Melakukan pembahasan *Traffic Light* Pembiayaan tahun 2017.
6. Melakukan pembahasan Kinerja Keuangan tahun 2017.
7. Melakukan pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018.
8. Melakukan pembahasan Kinerja Pembiayaan Nasabah segmen *Commercial*.
9. Melakukan pembahasan Kondisi dan Kinerja Pembiayaan 2017
10. Melakukan pembahasan profil risiko dan manajemen risiko terintegrasi 2017.
11. Melakukan pembahasan perkembangan *recovery* NPF dan kasus-kasus hukum.
12. Melakukan pembahasan portofolio pembiayaan, perkembangan penanganan NPF dan *Early Warning Signals* (EWS).

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Dasar Pembentukan & Piagam Komite Remunerasi & Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi BNI Syariah didasarkan pada:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi & Nominasi didasarkan kepada Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui dokumen KEP/01/DK/2015 tanggal 22 September 2015. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perusahaan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia. Adapun keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah sebagai berikut:

No	Jabatan	Keterangan
1	Ketua	Muhammad Syakir Sulla* (Komisaris Independen)
2	Anggota	Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama)
3	Anggota	Rizqullah** (Komisaris Independen)
4	Anggota	Max Niode* (Komisaris)
5	Anggota	Munifah Syanwani
6	Anggota	Idayu Nilawati
7	Anggota	Arief Adhi Sanjaya
8	Anggota	Bambang Sutrisno
9	Ketua	Subarjo Joyosumarto***
10	Anggota	Harisman***

*Diangkat sebagai komisaris pada RUPS Tahunan 25 Februari 2016 dan sedang menjalani proses *fit and proper test* OJK selama belum efektif maka kewenangan diwakili Komisaris Utama
** diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 25 Februari 2016 dan telah efektif.
***menjabat Komisaris sampai RUPS Tahunan 25 Februari 2016

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Muhammad Syakir Sulla

Ketua

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Fero Poerbonegoro

Anggota

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Rizqullah

Anggota

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Arief Adhi Sanjaya

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Remunerasi & Nominasi pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup Magister Administrasi Umum dari National University of Singapore (2007) serta Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2005).

Idayu Nilawati

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Remunerasi & Nominasi pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota independen Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain merupakan lulusan S2 MMBAT dari Institut Teknologi Bandung.

Munifah Syanwani

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Remunerasi & Nominasi pada tahun 2016. Sebelumnya beliau adalah Tenaga Ahli di DPR RI tahun 2008-2014. Riwayat pendidikan beliau antara lain merupakan lulusan S2 PHI-KTTI dari Universitas Indonesia.

Bambang Sutrisno

Anggota

Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Remunerasi & Nominasi pada tahun 2014. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2012–2014). Riwayat pendidikan beliau antara lain merupakan lulusan S1 Psikologi dan S2 *Management Accounting* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota KRN memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KRN tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Komite Remunerasi dan Nominasi												
Muhammad Syakir Sula		v		v		v		v		v		v
Fero Poerbonegoro		v		v		v		v		v		v
Rizqullah		v		v		v		v		v		v
Max Niode		v		v		v		v		v		v
Munifah Syanwani		v		v		v		v		v		v
Idayu Nilawati		v		v		v		v		v		v
Arief Adhi Sanjaya		v		v		v		v		v		v
Bambang Sutrisno		v		v		v		v		v		v

Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Remunerasi	Fungsi Nominasi
1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui evaluasi kebijakan remunerasi bagi (1) Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS; serta (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi 2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut huruf a di atas. 3. Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memperhatikan Kinerja Keuangan Perusahaan, Kebutuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva, Kewajaran dengan *Peer Group*, pertimbangan dan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.	1. Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. 5. Mempersiapkan proposal penunjukan atau penunjukan ulang calon Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham 6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

Sepanjang 2016, Komite Remunerasi & Nominasi telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Me-*review* kebijakan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai secara keseluruhan.
2. Memastikan bahwa sistem remunerasi pegawai yang digunakan telah sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memenuhi hak-hak pegawai serta setara dengan pasar.
3. Me-*review* nominasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan tersedianya sistem nominasi yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*.
4. Memastikan bahwa sistem nominasi pegawai telah mememuhi prinsip-prinsip keadilan dan menunjang ketersediaan pegawai yang berkualitas untuk menjamin pencapaian kinerja yang unggul.
5. Me-*review* sistem parameter penilaian kinerja Direksi agar tersedianya penilaian kinerja Direksi yang objektif dan transparan.
6. Memberikan rekomendasi untuk anggota Komite Dewan Komisaris.
7. Melakukan Simulasi Penilaian Kinerja untuk memantau efektifitas Strategi & Kinerja Perseroan secara berkala dan sebagai *Early Warning System* Perseroan sesuai dengan RBB 2015.
8. Me-*review* Piagam Komite Renumerasi & Nominasi.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Tingkat kehadiran

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah mengadakan 5 kali rapat. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kehadiran dalam Rapat

Nama	Kehadiran
Muhammad Syakir	3
Rizqullah	3
Max Niode	3
Fero Poerbonegoro	5
Bambang Sutrisno	5
Arief Adhie Sanjaya	5
Idayu Nilawati	5
Munifah Syanwani	2
Subarjo Joyosumarto	2
Harisman	2

Agenda Utama Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	Selasa, 26 Januari 2016	Masa Kerja Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite di Bawah Dekom yang berasal dari pihak independen
2	Selasa, 2 Februari 2016	1. Penilaian kinerja Direksi tahun 2015 2. Usul tantiem kinerja tahun 2015 yang akan dibayar tahun 2016 3. Usul gaji/honorarium Direksi dan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
3	Selasa, 13 September 2016	1. Review Kebijakan Alih Daya 2. Sistem Nominasi Pegawai
4	Selasa, 18 Oktober 2016	*Review* Remunerasi Direksi dan Komisaris
5	Selasa, 29 November 2016	1. Hasil *Employee Opinion Survey* (EOS) 2. Tantangan dalam pengelolaan SDI BNI Syariah

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memandang pada tahun 2016 Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut

Uraian	Frekwensi	Keterangan
Rapat	5 kali	Tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat sangat baik.
Laporan	1 laporan	Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	5 rekomendasi	Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan dan review terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Program Kerja	1 kali	Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2017

Rencana Tahun 2017

Bidang Tugas	Jadwal	Hasil Yang Diharapkan
A. NOMINASI		
1. Membantu Dewan Komisaris melakukan Penilaian Kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dekom berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.	Januari	▪ Nilai kinerja Perusahaan dan manajemen kolegial. ▪ Nilai kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dekom.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai Program Pengembangan Kemampuan anggota Direksi dan Dekom.	Januari	Usul daftar /jadwal serta jenis Seminar dan/ atau *short course.*
3. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem nominasi Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Februari	▪ Sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan/ atau anggota Dekom. ▪ Komposisi jabatan anggota Direksi dan atau anggota Dekom; ▪ Kebijakan dan kriteria yg dibutuhkan dalam proses nominasi
4. *Update database* manajemen	September	Tersedianya daftar calon kandidat Direksi yang kompeten dari pegawai talent (sumber internal)
5. Memberi usulan/rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dekom kepada Dekom untuk disampaikan kepada RUPS	Setiap diperlukan	Daftar kandidat calon anggota Direksi dari internal BNI Syariah

Bidang Tugas	Jadwal	Hasil Yang Diharapkan
6. Melakukan penilaian calon anggota Direksi dan/atau anggota Dekom untuk keperluan pengajuan *Fit and Proper Test*.	Setiap diperlukan	Formulir Penilaian KNR antara lain mengenai Integritas, Reputasi Keuangan, Kompetensi.
7. Review sistem nominasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan.	Mei	Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia secara efektif.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau anggota Komite Pemantau Risiko	Setiap diperlukan	Anggota Komite Audit dan/atau anggota Komite Pemantau Risiko yang memiliki integritas dan kapabilitas sesuai ketentuannya.
B. REMUNERASI		
1. Melakukan evaluasi atas Sistem/Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.	Februari	Kebijakan Remunerasi telah didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai: struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Direksi dan Dekom untuk disampaikan kepada RUPS.	Februari	Usul Remunerasi Direksi dan anggota Dekom untuk tahun 2017 kepada Pemegang Saham.
3. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi atas Sistem/Kebijakan Remunerasi kepada Dewan Komisaris	Maret	Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dekom untuk disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Review Sistem dan Kebijakan Remunerasi Pegawai	Maret	Kebijakan Remunerasi telah didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi Pegawai.	Setiap semester	Dewan Komisaris selalu ter *update* dengan dinamika dalam Kebijakan Remunerasi dan implementasinya.
6. Membantu Dekom melakukan Penilaian Kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Juli	Remunerasi yang diterima anggota Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan kinerja individual.
7. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	September	Terpeliharanya penyelenggaraan *Good Corporate Governance* dalam Kebijakan Remunerasi.
C. LAIN-LAIN		
1. Pemantauan terhadap perubahan dan/atau tambahan (baru) baik Undang-Undang maupun POJK, SEOJK dan Permen BUMN serta SE BUMN.	Setiap diperlukan	Up date Piagam KNR Pelaksanaan tugas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	Setiap diperlukan	Pelaksanaan tugas pengawasan Dekom yang effektif.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan Direksi dibantu oleh Komite-komite di bawah Direksi, yaitu: Komite Kebijakan dan Risiko (KKR); Komite Sumber Daya Manusia (KSDM); Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT); serta Komite Asset Liabilities, Management (KALMA). Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

KOMITE KEBIJAKAN RISIKO (KKR)

Piagam Komite

KKR BNI Syariah memiliki Piagam KKR yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/07/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KKR berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KKR sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab KKR diatur dalam Keputusan Direksi No.KP/07/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KKR dan mencakup:

1. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit – unit Bank BNI Syariah.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi *risk metrics* dan indikator – indikator manajemen risiko yang digunakan
3. Membangun mekanisme manajemen risiko di setiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) setiap unit.
4. Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan.
5. Menetapkan *Overall Exposure Limit* di tingkat Perusahaan (*bank wide*).
6. Menetapkan sistem alokasi aktiva berisiko (*risk asset*) dan modal ke setiap unit bisnis.
7. Menetapkan dan menyetujui usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur pembiayaan yang telah ada maupun yang baru.
8. Menetapkan dan menyetujui persetujuan khusus (*exception*) terhadap kebijakan dan prosedur yang dapat diberikan kepada debitur/nasabah dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.
9. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan atas dasar laporan dari Divisi Risiko dan memberikan arahan khususnya yang berkenaan dangan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku.
10. Menetapkan *portfolio/ exposure/ sectoral limit* untuk masing-masing industri.

Independensi Komite Kebijakan dan Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KKR menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Laporan Kerja Komite

Berikut adalah Laporan Kerja KKR selama tahun 2016:

No	Program	Work Plan				Keterangan
		TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Review Kebijakan Pembiayaan SME dan Kewenangan yang harus diputus Pejabat Pemutus Pembiayaan atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*					Realiasasi KKR 37, 39
2	Review Kebijakan Pembiayaan Komersial dan Kewenangan yang harus diputus Komite atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*					Realiasasi KKR 36, 37, 39, 40, 41
3	Review Kebijakan Pembiayaan Konsumer dan Kewenangan yang harus diputus Komite atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*					Realiasasi KKR 36, 37, 39, 40, 41
4	Review Kebijakan Pembiayaan Mikro dan Kewenangan yang harus diputus Pejabat Pemutus Pembiayaan atas dasar masukan dari bisnis unit dan *product owner.*					Realiasasi KKR 38, KKR 40
5	Review VaR dan SR Ideal					Realiasasi KKR 40

Hasil Keputusan KKR Periode 2016

Selama tahun 2016, KKR menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No	No KKR	Tanggal Keputusan	Agenda
1	KKR 36	3-Mar-16	A. Kewenangan Memutus Pembiayaan Masa Transisi: 1. Kewenangan Memutus pembiayaan Produktif Baru/Tambahan PF. 2. Kewenangan Memutus Pembiayaan Konsumtif Agunan *Liquid.* 3. Kewenangan Memutus Pembiayaan Restrukturisasi PF. 4. Kewenangan Memutus Pembiayaan Restrukturisasi NPF
2	KKR 37	23-Mar-16	A. Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan Griya IB Hasanah. B. Penyempurnaan Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa C. Kewenangan Memutus Pembiayaan > 1 Jenis Fasilitas D. Penggunaan Jasa Konsultasi Pengawas, Konsultan Keuangan dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
3	KKR 38	8-Apr-16	A. Penambahan Fitur Pembiayaan Mikro (Produk Griya IB Hasanah)
4	KKR 39	30-May-16	A. Penyempurnaan Segmentasi Pembiayaan dan Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen Medium B. Penyempurnaan Kewenangan Proses dan Pengelolaan Nasabah C. Penyempurnaan Ketentuan *House Limit* D. Penyempurnaan Kewenangan Restrukturisasi Pembiayaan PF E. Perubahan Skema Pembiayaan *Linkage*

KOMITE KEBIJAKAN RISIKO (KKR)

No	No KKR	Tanggal Keputusan	Agenda
5	KKR 40	22-Aug-16	A. Review Limit Kewenangan Unit Tresuri & Unit Bisnis Internasional Divisi TID: 1. Kewenangan Unit Tresuri 2. Kewenangan Unit Bisnis Internasional B. Akad *Musyarakah* Pada Produk Pembiayaan Mikro C. Review Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan D. Ketentuan Pembiayaan Linkage Dengan Pola *Channeling* E. Perubahan Fitur Pembiayaan F. Review Limit Risiko Pasar G. Review Limit Risiko Likuiditas H. Maksimum Pembelian Sukuk dan Reksadana Syariah I. *Bancassurance* Syariah Model Bisnis Referensi J. Penghapusan Denda Tunggakan dan Pengenaan Ta'widh
6	KKR 41	4-Oct-16	Perubahan Kewenangan Diskon Margin/Ujroh/Bagi Hasil Penyelesaian Pembiayaan NPF dan Hapus Buku Perubahan Kewenangan Memutus R3 Perubahan Kebijakan Penetapan Harga Limit Jual Agunan Secara Sekaligus Perubahan Kewenangan Pemutus *Financing Line* Penyempurnaan Kewenangan Komite Pemutus Pembiayaan (KPP) Direksi

Susunan Anggota

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KP/047/DIR/R tanggal 28 September 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Imam Teguh Saptono **(Direktur Utama)**	Ketua
Tribuana Tunggadewi* **(Direktur Risiko & Kepatuhan)**	Ketua Pengganti
Kukuh Rahardjo **(Direktur Bisnis Konsumer)**	Anggota
Junaidi Hisom **(Direktur Operasional)**	Anggota
Dhias Widhiyati **SEVP Bisnis Komersial & Menengah**	Anggota
Wahyu Avianto **Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan**	Anggota
Fransiska Siswantari **Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan**	Anggota
Ida Triana **Pemimpin Divisi Haji & Umrah**	Anggota
Zefri Ananta **Pimpinan Divisi Audit Internal**	Anggota
Misbahul Munir **Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis**	Anggota
Tavip Budhy **Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan**	Anggota
Babas Bastaman **Pemimpin Divisi Komersial**	Anggota
Bimo Cahyadi **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1**	Anggota
Ali Muafa **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2**	Anggota
Bayi Rohayati **Pemimpin Divisi Hukum**	Anggota
Moh. Toyip **Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional**	Anggota
Jon Sunjani Pasaribu **Pemimpin Divisi Risiko Bisnis**	Anggota
Budi Aristianto **Pemimpin Divisi Bisnis Mikro**	Anggota
Adriyanto Daru **Pemimpin Divisi Operasional**	Anggota
Supardi Najamuddin **Pemimpin Divisi Jaringan & Umum**	Anggota

Nama	Jabatan
Rudi Haryadi **Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan**	Anggota
Dade Dermawan **Pemimpin Divisi Manajemen Risiko & Kebijakan Perusahaan**	Sekretaris
*belum efektif	

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2016, berikut frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota KKR:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Direktur Utama	4	4	100%
Direktur Risiko & Kepatuhan	4	4	100%
Direktur Bisnis Konsumer	4	4	100%
Direktur Operasional	4	4	100%
SEVP Bisnis Komersial & Menengah	4	4	100%
Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan	4	4	100%
Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan	4	4	100%
Pemimpin Divisi Haji & Umrah	4	4	100%
Pimpinan Divisi Audit Internal	4	4	100%
Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis	4	4	100%
Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan	4	4	100%
Pemimpin Divisi Komersial	4	4	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1	4	4	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2	4	4	100%
Pemimpin Divisi Hukum	4	4	100%
Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional	4	4	100%
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	4	4	100%
Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	4	4	100%
Pemimpin Divisi Operasional	4	4	100%
Pemimpin Divisi Jaringan & Umum	4	4	100%
Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan	4	4	100%
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko & Kebijakan Perusahaan	4	4	100%

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA (KSDM)

Piagam Komite

KSDM BNI Syariah memiliki Piagam KSDM yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/05/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KSDM berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KSDM sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab KSDM diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/05/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KSDM dan mencakup:

1. Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan *system* manajemen SDM yang meliputi 6 (enam) elemen kunci pengelolaan SDM, sebagai berikut:
   a. Perencanaan SDM
   b. Rekrutmen dan Seleksi
   c. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai
   d. Penilaian Prestasi dan Potensi Pegawai
   e. Manajemen Jalur Karir, dan
   f. Pengelolaan Sistem Penggajian dan Imbalan.
2. Memutuskan persetujuan atas usulan perencanaan SDM, baik usulan program rekrutmen dan seleksi,maupun program pelatihan dan pengembangan pegawai.
3. Mengevaluasi dan memutuskan persetujuan pelaksanaan program mutasi/rotasi/promosi untuk posisi-posisi jabatan strategis dan/atau tenaga pimpinan BNI Syariah.
4. Memutuskan kebijakan dan rumusan mengenai budaya kerja BNI Syariah yang bersifat strategis.
5. Memutuskan hukuman dalam rangka penegakan disiplin.
6. Memutuskan kebijakan, standar dan pengelolaan kualitas layanan.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KSDM meliputi 4 (empat) bidang sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan staf kunci
2. Formulasi kebijakan dan pengelolaan disiplin
3. Formulasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia
4. Formulasi kebijakan dan pengelolaan layanan

Sedangkan pembagian tugas dan tanggung jawab KSDM secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap staf-staf inti.
2. Memastikan *reward dan punishment* dibuat dan dilaksanakan dengan baik dalam me-*review* dan menyetujui sistem komunikasi internal pegawai.
3. Menyetujui dilakukannya survei kepuasan pegawai secara rutin, melakukan dan memberikan arahan atas tindakan perbaikan yang diperlukan.
4. Memastikan implementasi budaya kerja sesuai dengan *corporate culture* yang Islami.
5. Memastikan tidak adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi dalam lingkungan kerja di BNI Syariah.
6. Me-*review Manpower Plan* jangka pendek maupun jangka panjang, serta memutuskan kebijakan terbaik dalam menyelesaikan kekurangan maupun kelebihan pegawai.
7. Me-*review training master plan* dan memprioritaskan implementasinya.
8. Me-*review* pelaksanaan *Succession Plan* dan memilih kandidat yang akan dipromosikan, dimutasi, dirotasi atau diusulkan mengikuti pelatihan dan pengembangan.
9. Me-*review* dan menyetujui Individual *Development Plan* yang akan digunakan dalam penentuan kandidat promosi/mutasi/rotasi/T&D.
10. Me-*review* dan menyetujui mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan lain-lain.
11. Me-review dan menyetujui *Career Path Management* tahunan dan me-*review* kemajuan yang dicapai.
12. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada tingkatan yang sesuai.
13. Me-*review* dan menetapkan standar layanan.
14. Memantau dan menetapkan keputusan strategis terkait dengan peningkatan standar layanan.

Independensi Komite Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KSDM menjaga indepedensinya dengan tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Laporan Kerja Komite

KSDM melalui Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan & Disiplin (TPMTPD) KSDM di tahun 2016 telah memutuskan sanksi, mutasi, rotasi, serta pendefinitifan pejabat sementara para pegawai di kantor pusat, wilayah, dan cabang.

Hasil Keputusan KSDM Periode 2016

Selama tahun 2016, KKR menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No	No.Keputusan	Tanggal	Agenda
1	01/KSDM/2016	18 Februari 2016	Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan & Disiplin (TPMTPD) KSDM: a. Memutus sanksi administrasi kepada pegawai yang terlibat dalam kasus di beberapa cabang, dan Divisi/Unit. b. Memutus pengisian formasi Branch Manager Cabang Banjarmasin dan rangkaian turutannya.
2	02/KSDM/2016	26 Mei 2016	Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan & Disiplin (TPMTPD) KSDM memutuskan rotasi/mutasi beberapa posisi jabatan di wilayah dan cabang.
3	03/KSDM/2016	28 Juni 2016	Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan & Disiplin (TPMTPD) KSDM memutus sanksi administrasi kepada pegawai yang terlibat dalam kasus di beberapa cabang, dan Divisi/Unit.
4	07/KSDM/2016	8 Des 2016	Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan & Disiplin (TPMTPD) KSDM memutus pengangkatan/pendifinitigan pimpinan di beberapa cabang.
5	KP/065/DIR/R	14 Des 2016	Perubahan Mutasi – Promosi Operational Manager

Susunan Anggota

Susunan anggota KSDM berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/047/DIR/R tanggal 28 September 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Imam Teguh Saptono **(Direktur Utama)**	Ketua
Tribuana Tunggadewi* **(Direktur Risiko & Kepatuhan)**	Ketua Pengganti
Kukuh Rahardjo **(Direktur Bisnis Konsumer)**	Anggota
Junaidi Hisom **(Direktur Operasional)**	Anggota
Dhias Widhiyati **SEVP Bisnis Komersial & Menengah**	Anggota
Wahyu Avianto **Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan**	Anggota
Zefri Ananta **Pimpinan Divisi Audit Internal**	Anggota
Junaidi Hisom **(Pemimpin Divisi Operasional)**	Anggota
Fransiska Siswantari **Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan**	Anggota
Rima Dwipermatasari **Pimpinan Divisi Dana & Transaksi**	Anggota
Budi Aristianto **Pemimpin Divisi Bisnis Mikro**	Anggota
Babas Bastaman **Pemimpin Divisi Komersial**	Anggota
Bimo Cahyadi **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1**	Anggota
Ali Muafa **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2**	Anggota
Supardi Najamuddin **Pemimpin Jaringan dan Umum**	Anggota
Bambang Sutrisno **Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani**	Sekretaris

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA (KSDM)

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2016, berikut frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota KSDM:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Direktur Utama	5	5	100%
Direktur Risiko & Kepatuhan	5	5	100%
Direktur Bisnis Konsumer	5	5	100%
Direktur Operasional	5	5	100%
SEVP Bisnis Komersial & Menengah	5	5	100%
Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan	5	5	100%
Pemimpin Divisi Audit Internal	5	5	100%
Pemimpin Divisi Operasional	5	5	100%
Pimpinan Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan	5	5	100%
Pimpinan Divisi Dana & Transaksi	5	5	100%
Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	5	5	100%
Pemimpin Divisi Komersial	5	5	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1	5	5	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2	5	5	100%
Pemimpin Divisi Jaringan & Umum	5	5	100%
Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani	5	5	100%

KOMITE MODAL, INVESTASI DAN TEKNOLOGI (KMIT)

Piagam Komite

KMIT BNI Syariah memiliki Piagam KMIT yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/06/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KMIT berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KMIT sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab KMIT diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/06/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KMIT dan mencakup:

1. Melakukan review pencapaian target pendapatan dan biaya (OPEX dan CAPEX), penyempurnaan dan pengembangan kualitas kebijakan dan system manajemen penganggaran BNI Syariah yang efisien, efektif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha.
2. Merekomendasikan keputusan strategis terutama dalam hal perubahan target maupun OPEX/CAPEX yang tidak/belum diakomodasi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
3. Mengevaluasi pencapaian eksekusi rencana kerja unit, termasuk realisasi anggaran.
4. Merekomendasikan proses perubahan anggaran baik dalam bentuk redistribusi maupun realokasi terutama terhadap hal-hal yang menyangkut perubahan target dan strategi dalam rangka pencapaian kinerja.
5. Memastikan pengembangan sistem, pemeliharaan, prosedur standar operasional teknologi searah/ konsisten dengan strategi bisnis (pengembangan *master plan* IT, *updated master plan* IT, penentuan *standard service level*).
6. Melakukan ***review*** dan diskusi atas permasalahan dukungan IT di segenap unit bisnis dengan bertindak sebagai penengah atas permasalahan yang terjadi antar unit dan *Service Level Agreement* (SLA) yang belum terselesaikan.
7. Memastikan proses pengembangan/ perubahan IT telah terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan *user requirement*

(memonitor jadwal implementasi proyek dan pengembangan MIS).

8. Memastikan *review* dan persetujuan proyek IT yang berdampak besar terhadap alokasi keuangan BNI Syariah.
9. Mengantisipasi pelampauan/pelanggaran risiko teknologi dan penyimpangan pencapaian sasaran dengan menetapkan, menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi.
10. Melakukan *review* atas rencana pengembangan jaringan cabang yang berdampak pada kebutuhan biaya investasi.

Independensi KMIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KMIT menjaga indepedensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Laporan Kerja Komite

Selama tahun 2016, KMIT merencanakan program kerja yang terdiri dari:

1. KMIT 1 No.01/KMIT/2016 tanggal 05 September 2016 mengenai Kebijakan Umum Direksi (KUD).
2. KMIT 2 No.02/KMIT/2016 tanggal 12 Oktober 2016 mengenai kebijakan *Information Technology & Strategic Planning* (ITSP).
3. KMIT 3 No.03/KMIT/2016 tanggal 17 Oktober 2016 mengenai Target Bisnis dan Anggaran tahun 2017.
4. KMIT 4 NO. 04/KMIT/2016 tanggal 14 November 2016 mengenai perumusan Target unit bisnis tahun 2017, Alokasi anggaran CAPEX dan OPEX tahun 2017 & Penambahan SDM tahun 2017.

Hasil Keputusan KMIT Periode 2016

Selama tahun 2016, KMIT menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No	No KKR	Tanggal Keputusan	Agenda
1	KMIT 1 No.01/ KMIT/2016	5 September 2016	Pada KMIT 1 No.01/KMIT/2016 tanggal 05 September 2016 mengenai Kebijakan Umum Direksi (KUD) telah dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut: 1. Menetapkan analisa terkait dengan penurunan kualitas pembiayaan dari bisnis pembiayaan komersial dan pencapaian laba (EAT) sesuai RBB tahun 2016. 2. Menetapkan asumsi perekonomian tahun 2017 (berdasarkan RBB 2017) terkait dengan pertumbuhan PDB. 3. Menetapkan pertumbuhan bisnis pembiayaan tahun 2017. 4. Menetapkan proyeksi Laba (EAT) tahun 2017.
2	KMIT 2 No.02/ KMIT/2016	12 Oktober 2016	Pada KMIT 2 No.02/KMIT/2016 tanggal 12 Oktober 2016 mengenai kebijakan *Information Technology & Strategic Planning* (ITSP) telah dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut: a. Pengembangan Information Technology (IT) Melakukan pegembangkan sistem IT pada tahun 2017 yang meliputi *Data Center, Mobile Banking, SMS Banking, Anti Money Laundering, Trade Finance & Remittance, Sharia Link, Finance One, ATM Bersama & GPS (General Payment System).* b. Penguatan SDM IT Melakukan analisa terkait dengan penambahan SDM pada Divisi ITD.
3	KMIT 3 No.03/ KMIT/2016	17 Oktober 2016	Pada KMIT 3 No.03/KMIT/2016 tanggal 17 Oktober 2016 mengenai Target Bisnis dan Anggaran tahun 2017 telah dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut: a. Menetapkan progonis ekspansi pembiayaan pada Unit Bisnis untuk akhir tahun 2016. b. Menetapkan kebijakan alokasi CAPEX otomasi dan non otomasi tahun 2017, anggaran OPEX teknologi, OPEX Promosi, OPEX Jaringan umum dan OPEX SDM.

KOMITE MODAL, INVESTASI DAN TEKNOLOGI (KMIT)

No	No KKR	Tanggal Keputusan	Agenda
4	KMIT 4 NO. 04/ KMIT/2016	14 November 2016	Pada KMIT 4 NO. 04/KMIT/2016 tanggal 14 November 2016 mengenai perumusan Target unit bisnis tahun 2017 telah dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut: a. Menetapkan target ekspansi Bisnis Unit tahun 2017. b. Menetapakan Alokasi anggaran CAPEX dan OPEX tahun 2017. c. Menetapkan Penambahan SDM tahun 2017.

Susunan Anggota

Susunan anggota KMIT berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/047/DIR/R tanggal 28 September 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Junaidi Hisom **Direktur Operasional**	Ketua
Imam Teguh Saptono **Direktur Utama**	Ketua Pengganti
Kukuh Rahardjo **Direktur Bisnis Konsumer**	Anggota
Tribuana Tunggadewi* **Direktur Risiko dan Kepatuhan**	Anggota
Dhias Widhiyati **SEVP Bisnis Komersial & Menengah**	Anggota
Wahyu Avianto **Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan**	Anggota
Supardi Najamuddin **Pemimpin Divisi Jaringan & Umum**	Anggota
Friandana Wijaya **Pemimpin Satuan Kerja Keuangan**	Anggota
Moh. Toyip **Pimpinan Divisi Tresuri & Internasional**	Anggota
Mirza Mantovani**Pimpinan Divisi Teknologi & Informasi**	Anggota
Fransiska Siswantari **Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan**	Anggota
Babas Bastaman **Pemimpin Divisi Komersial**	Anggota
Bimo Cahyadi **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1**	Anggota
Ali Muafa **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2**	Anggota
Rima Permatasari **Pemimpin Divisi Dana & Transaksi**	Anggota
Endang Rosawati **Pemimpin Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan**	Anggota
Budi Aristianto **Pemimpin Divisi Bisnis Mikro**	Anggota
Ida Triana **Pemimpin Divisi Haji & Umrah**	Anggota
Adriyanto Daru **Pemimpin Divisi Operasional**	Anggota
Sri Rezeki **Pemimpin Divisi Kerja Layanan**	Anggota
Misbahul Munir **Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis**	Sekretaris
*belum efektif	

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2016, berikut frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota KMIT:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Direktur Operasional	4	4	100%
Direktur Utama	4	4	100%
Direktur Bisnis Konsumer	4	4	100%
Direktur Risiko & Kepatuhan	4	4	100%
SEVP Bisnis Komersial & Menengah	4	4	100%
Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan	4	4	100%

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Pemimpin Divisi Jaringan & Umum	4	4	100%
Pemimpin Satuan Kerja Keuangan	4	4	100%
Pimpinan Divisi Tresuri & Internasional	4	4	100%
Pimpinan Divisi Tekonologi &| Informasi	4	4	100%
Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan	4	4	100%
Pemimpin Divisi Komersial	4	4	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1	4	4	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2	4	4	100%
Pemimpin Divisi Dana & Transaksi	4	4	100%
Pemimpin Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan	4	4	100%
Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	4	4	100%
Pemimpin Divisi Haji & Umrah	4	4	100%
Pemimpin Divisi Operasional	4	4	100%
Pemimpin Satuan Kerja Layanan	4	4	100%
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	4	4	100%

KOMITE *ASSET, LIABILITIES, MANAGEMENT* (KALMA)

Piagam Komite

KALMA BNI Syariah memiliki Piagam KALMA yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/08/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KALMA berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KALMA sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab KALMA diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/08/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KALMA dan mencakup:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran Komite Asset, Liabilities, Management (KALMA) BNI Syariah serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.
2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah.
3. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia.
4. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana.
5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui *money market* maupun *capital market*.
6. Menganalisis struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari *exposure* yang dimiliki oleh BNI Syariah berupa risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko likuiditas.
7. Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap: posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, *profit sharing*, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah.
8. Menghitung *cost of fund* dan menetapkan *profit sharing*, giro, tabungan dan deposito.
9. Menetapkan internal *Funds Transfer Price* (FTP).

KOMITE ASSET, LIABILITIES, MANAGEMENT (KALMA)

Independensi KALMA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KALMA menjaga indepedensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Laporan Kerja Komite

Selama tahun 2016, KALMA merencanakan program kerja yang terdiri dari:

1. Penetapan *Financing Pricing Model*;
2. Review Tarif Pembiayaan;
3. Review Tarif Dana;
4. Penetapan *Fund Transfer Pricing*;
5. *Review Fund Transfer Pricing*;
6. Penyempurnaan formula penetapan *Fund Transfer Pricing*;
7. Penyempurnaan poling bagi hasil;
8. Penetapan pagu kas valas;
9. Membuat rumusan dan usulan terkait manajemen likuiditas, forex, *earning investment* & risiko suku bunga.

Hasil Keputusan KALMA Periode 2016

Selama tahun 2016, KALMA menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No	Tanggal	Hasil Keputusan	Agenda Rapat
1	Senin, 25 Januari 2016	No.01/KALMA/2016	a. Penetapan Tarif Pembiayaan Griya Segmen Nasabah Berpenghasilan Tetap (*Fixed Income*) b. Penetapan Tarif Pembiayaan Multiguna Segmen Nasabah Berpenghasilan Tetap (*Fixed Income*) c. Penetapan Tarif Pembiayaan Fleksi Hijrah d. Penetapan Tarif Pembiayaan Multifinance e. Pemberian Kewenangan Keringanan Tarif Pembiayaan Produktif f. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito Institusi g. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito Institusi h. Kewenangan Nisbah Spesial Deposito Perorangan i. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito Bank j. Penetapan Formula FTP IDR k. Penetapan Formula FTP USD
2	Senin, 22 Februari 2016	No.02/KALMA/2016	a. Penetapan Tarif Jasa Surat Keterangan Bank (SKB) b. Penetapan Tarif Jasa Inkaso c. Penetapan Nisbah Produk Tabungan iB Pandai Hasanah d. Kewenangan Pemberian Bagi Hasil Dana Kementerian Agama e. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito Institusi f. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito Bank g. Penetapan Tarif Pembiayaan Multiguna Segmen Nasabah *Non Fixed Income*
3	Senin, 28 March 2016	No.03/KALMA/2016	a. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan b. Penetapan Nisbah bagi Hasil Produk Deposito c. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Rupiah Kementerian Agama d. Penetapan Tarif Pembiayaan Griya Segmen Nasabah Berpenghasilan Tetap (*Fixed Income*) e. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Konsumtif f. Penetapan Tarif Pembiayaan WUS Mikro g. Penetapan Tarif Pembiayaan BNI Fleksi Migran iB Hasanah Mikro h. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Mikro i. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Produktif

No	Tanggal	Hasil Keputusan	Agenda Rapat
4	Jum'at, 22 April 2016	No.04/KALMA/2016	a. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Produktif ▪ Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Produktif *Small & Medium* ▪ Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Produktif Komersial b. Kewenangan Pemberian Diskon Ujroh Anjak Piutang & Anjak Hutang Reguler c. Kewenangan Pemberian Diskon Ujroh Anjak Hutang Khusus
5	Rabu, 11 Mei 2016	No.05/KALMA/2016	a. Penetapan Tarif Pembiayaan Griya iB Hasanah Segmen Nasabah Berpenghasilan Tetap (*Fixed Income*). b. Penetapan Tarif Pembiayaan Griya iB Hasanah Segmen Nasabah Tidak Berpenghasilan Tetap (*Non Fixed Income*). c. Penetapan Tarif Pembiayaan Multiguna Segmen Nasabah Berpenghasilan Tetap (*Fixed Income*). d. Penetapan Tarif Pembiayaan Multiguna Segmen Nasabah Tidak Berpenghasilan Tetap (*Non Fixed Income*). e. Penetapan Tarif Pembiayaan Multiguna Segmen Nasabah Tidak Berpenghasilan Tetap (*Non Fixed Income*). f. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Konsumtif.
6	Kamis, 23 Juni 2016	No.06/KALMA/2016	Penetapan Tarif RTGS
7	Rabu, 22 Juni 2016	No.07/KALMA/2016	a. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito Perorangan. b. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito Institusi di luar Dana Kementerian Agama. c. Kewenangan PemberianNisbah Spesial Deposito Bank (Bank Umum dan BPD). d. Penetapan Nisbah Program Tabungan Keluarga Hasanah
8	Senin, 15 Agustus 2016	No.08/KALMA/2016	a. Penetapan Tarif Griya iB Hasanah dan Tarif Multiguna iB Hasanah b. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Konsumtif c. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Produktif *Small & Medium.* d. Kewenangan Pemberian Keringanan Tarif Pembiayaan Produktif Commercial. e. Penetapan Tarif Produktif MMQ Small & Medium. f. Penetapan Tarif Produktif MMQ Commercial. g. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan
9	Senin, 5 September 2016	No.09/KALMA/2016	Penetapan Proporsi Spread FTP USD
10	Jum'at, 30 Desember 2016	No.10/KALMA/2016	a. Biaya Administrasi Penyetoran Banknotes b. Biaya Administrasi Penarikan Banknotes

Susunan Anggota

Susunan anggota KALMA berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/047/DIR/R tanggal 28 September 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Dhias Widhiyati **SEVP Bisnis Komersial & Menengah**	Ketua
Kukuh Rahardjo **Direktur Bisnis Konsumer**	Ketua Pengganti
Imam Teguh Saptono **Direktur Utama**	Anggota
Junaidi Hisom **Direktur Operasional**	Anggota

KOMITE ASSET, LIABILITIES, MANAGEMENT (KALMA)

Nama	Jabatan
Tribuana Tunggadewi* **Direktur Risiko dan Kepatuhan**	Anggota
Wahyu Avianto **Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan**	Anggota
Fransiska Siswantari **Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan**	Anggota
Rima Permatasari **Pemimpin Divisi Dana & Transaksi**	Anggota
Ida Triana **Pemimpin Divisi Haji & Umrah**	Anggota
Misbahul Munir **Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis**	Anggota
Babas Bastaman **Pemimpin Divisi Komersial**	Anggota
Bimo Cahyadi **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1**	Anggota
Ali Muafa **Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2**	Anggota
Dade Dermawan **Pemimpin Divisi Manajemen Risiko & Kebijakan Perusahaan**	Anggota
Jon Sunjani Pasaribu **Pemimpin Divisi Risiko Bisnis**	Anggota
Budi Aristianto **Pemimpin Divisi Bisnis Mikro**	Anggota
Supardi Najamuddin **Pemimpin Divisi Jaringan & Umum**	Anggota
Moh. Toyip **Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional**	Anggota
*belum efektif	

Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2016, berikut frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota KALMA:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
SEVP Bisnis Komersial & Menengah	10	10	100%
Direktur Bisnis Konsumer	10	10	100%
Direktur Utama	10	10	100%
Direktur Operasional	10	10	100%
Direktur Risiko & Kepatuhan	10	10	100%
Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan	10	10	100%
Pemimpin Divisi Konsumer & Kartu Pembiayaan	10	10	100%
Pemimpin Divisi Dana & Transaksi	10	10	100%
Pimpinan Divisi Haji & Umrah	10	10	100%
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	10	10	100%
Pemimpin Divisi Komersial	10	10	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 1	10	10	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil & Menengah 2	10	10	100%
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko & Kebijakan Perusahaan	10	10	100%
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	10	10	100%
Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	10	10	100%
Pemimpin Divisi Jaringan & Umum	10	10	100%
Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional	10	10	100%

KEBIJAKAN REMUNERASI

Mekanisme Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2016 adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah KEP/03/DK/2016 tentang Penetapan Gaji Direksi & Honorarium Dewan Komisaris dengan sebelumnya melalui mekanisme berikut:

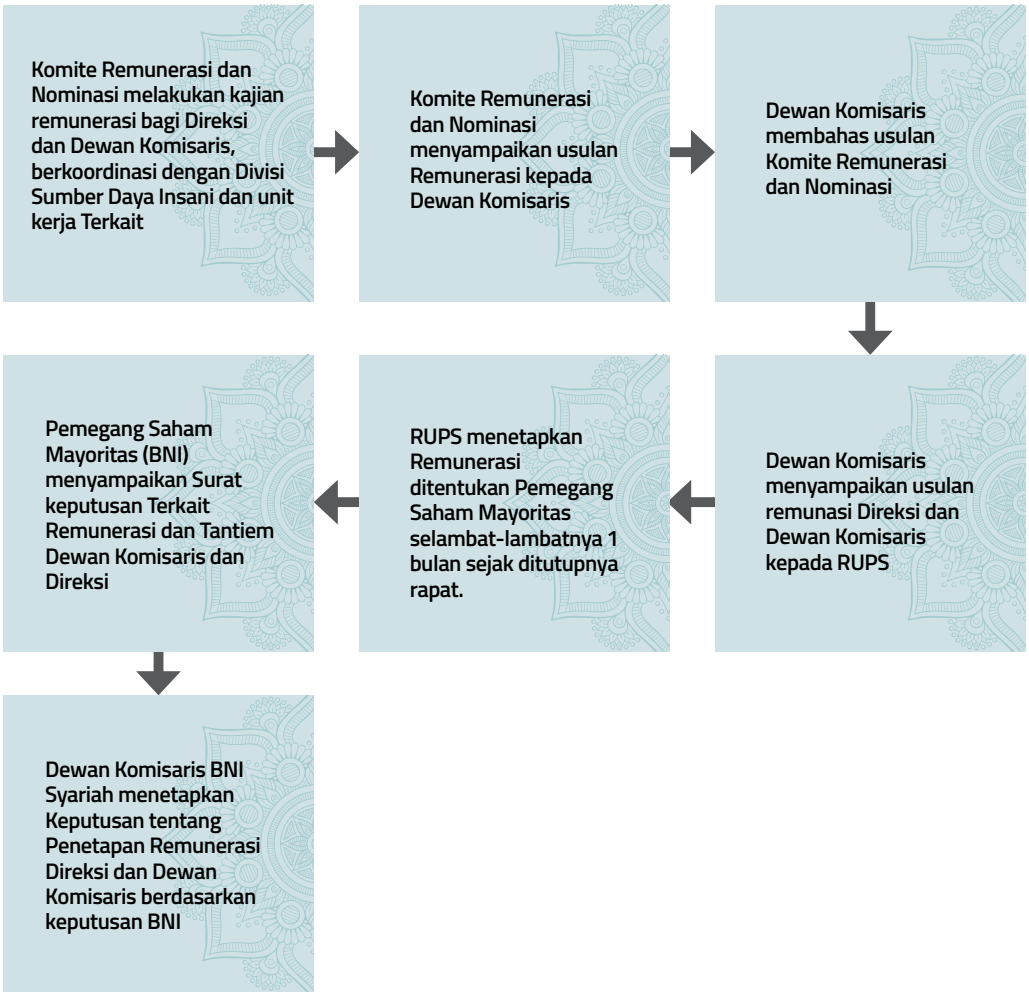

Dasar Penetapan Remunerasi

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, kebijakan Remunerasi yang bersifat tetap selain memperhatikan aspek penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga wajib paling sedikit memperhatikan aspek:

a. Skala usaha;
b. Kompleksitas usaha;
c. *Peer Group*;
d. Tingkat inflasi;
e. Kondisi dan kemampuan keuangan;
f. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan

Khusus Remunerasi bersifat variabel juga wajib memperhatikan *prudent risk taking.*

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Sesuai dengan surat keputusan BNI Induk, rincian atas kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah sebagai berikut:

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

Sesuai dengan surat keputusan BNI Induk, rincian atas kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS BNI Syariah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi	4	2.703	4	7.972	2	547
Fasilitas lainnya: Yang dapat dimiliki; Yang tidak dapat dimiliki	4	3.171	4	11.385	2	75
Total	4	5.874	4	19.357	2	623

Cat: belum termasuk tantiem/bonus

Remunerasi berdasarkan Tingkat Penghasilan

Jumlah Remunerasi (dalam bentuk keuangan/non natura) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	0	4	0
di atas Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	4	0	0
di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 Miliar	0	0	0
Rp 500 juta ke bawah	0	0	2

Rasio Gaji

No.	Deskripsi	Rasio
1	Gaji tertinggi/terendah pegawai	19,67:1
2	Gaji tertinggi/terendah BOD	1,11:1
3	Gaji tertinggi/terendah Komisaris	1,11:1
4	Gaji tertinggi BOD/Pegawai	2,53:1

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Pembentukan

Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)* memiliki posisi strategis untuk memastikan Perusahaan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan, serta melakukan fungsi komunikasi korporat dalam rangka membina hubungan dengan Pemegang Saham, OJK, nasabah, dan *stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Endang Rosawati. Penetapan tersebut telah diumumkan melalui surat ketetapan rapat Direksi dengan surat Ketetapan Organisasi No.ORG/21/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan nama *Corporate Secretary & Communication Division* yang membawahi empat unit kerja yaitu Investor Relations & Secretary, Corporate Communication,Funding Marketing Communication , Financing Marketing Communication.

Profil Ringkas Sekretaris Perusahaan

Endang Rosawati, Ir.,M.AG.ECON lahir 17 Desember 1965, diangkat sebagai Pemimpin *Marketing & Corporate Communication Desk* pada Januari 2014. Beliau diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan integrasi Komunikasi seluruh produk serta menjalankan program komunikasi Perusahaan. Memperoleh gelar Insinyur (Ir) Pertanian dari Institut Pertanian Bogor di tahun 1989 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan Master of Agricultural Economic dari Massey University, New Zealand di tahun 1993. Beliau mengawali karirnya sebagai Analis Kredit di Divisi Korporasi dan analis pada *Customer Analysis* Unit (CAU) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, terakhir bertugas sebagai Manajer Pengelolan Risiko Kredit pada Divisi Management Risiko PT Bank BNI (Persero)Tbk sebelum bergabung pada Divisi Usaha Syariah dengan penugasan sebagai Operational Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta Selatan tahun 2001, serta dilanjutkan sebagai Branch Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta Timur tahun 2004 – 2007. Beliau pernah menjabat sebagai Manager Promosi & Komunikasi Divisi Usaha Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari 2007–2010, Pemimpin Divisi Komunikasi & Umum BNI Syariah dari 2010–2012, Pemimpin *Marketing & Corporate Communication Desk* ditahun 2014, Pemimpin Divisi *Corporate Secretary & Communication* (Januari 2015-sekarang).

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh unit kerja *Investor Relationship & Secretary* yang menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 35/POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain mengacu pada ketentuan regulator fungsi Sekretaris Perusahaan di BNI Syariah dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan *Corporate Secretary and Communication* No.PP/S02/001-00/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang mencakup (1) Fungsi Pelaksanaan RUPS; (2) Fungsi *Investor Relations*; (3) Fungsi Pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); dan (4) Fungsi Kesekretariatan serta Fungsi Komunikasi dan pelaksanaan CSR.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan BNI Syariah terkait dengan Pasar Modal:

SEKRETARIS PERUSAHAAN

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan termasuk di bidang Pasar Modal.
c. Mengarahkan koordinasi internal terkait aspek kepatuhan pasar modal serta kajian peraturan pasar modal dan dampaknya terhadap BNI Syariah untuk memberikan awareness atas kepatuhan terhadap peraturan pasar modal yang berlaku.

2. Pelaksanaan RUPS:
   a. Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan acara RUPS agar dapat berjalan dengan baik;
   b. Menyiapkan materi atau mata acara RUPS dan memastikan kesesuaian materi dan prosedur pelaksanaan RUPS dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, yaitu membantu Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:
   a. Memastikan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di BNI Syariah
   b. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
   c. Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Reputasi BNI Syariah di mata publik dan media:
   a. Menetapkan strategi implementasi program *corporate communication* untuk publik, media, dan internal agar reputasi BNI Syariah dapat terjaga dengan baik di mata Pemangku Kepentingan.
   b. Melaksanakan aktivitas komunikasi pemasaran untuk produk dan jasa Bank BNI Syariah, agar terjadi awareness/ keterkenalan produk dan jasa sehingga akan memudahkan proses penjualan.
   c. Menjalin hubungan baik dengan media.
5. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Perusahaan, OJK, dan *Stakeholder* lainnya.
6. Materi Publikasi:
   a. Menetapkan strategi implementasi atas publikasi non-media BNI Syariah untuk publik nonfinansial, investor dan masyarakat keuangan agar reputasi BNI Syariah dan ekspektasi pasar dapat terjaga dengan baik.
   b. Menetapkan strategi implementasi iklan media massa BNI Syariah terkait aspek finansial dan non-finansial agar reputasi BNI Syariah dan ekspektasi pasar dapat terjaga dengan baik.
   c. Mengarahkan pengelolaan konten situs BNI Syariah untuk memastikan ketersediaan data secara lengkap serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan *Stakeholder*.
7. Komunikasi Internal
   a. Menetapkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan media komunikasi internal untuk berkontribusi dalam penciptaan iklim kerja yang baik.
   b. Mengarahkan dan mengevaluasi pembuatan materi presentasi BNI Syariah terkait aspek keuangan dan non keuangan untuk memastikan keterbukaan informasi yang sesuai dengan ketentuan regulator
   c. Mengarahkan event internal BNI Syariah agar event Perusahaan berjalan baik dan mendapatkan tingkat keterlibatan yang tinggi dari segenap karyawan BNI Syariah serta masyarakat pada umumnya
   d. Melakukan tata laksana dokumentasi Perusahaan termasuk arsip dokumen legal Perusahaan serta menyusun dan menyimpan Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
8. Penyediaan fasilitas penunjang operasional Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Pelaksanaan fungsi protokoler Direksi pada

setiap kegiatan eksternal yang dihadiri oleh Direksi.

10. GCG Manual Building
    a. Melakukan pengkinian GCG manual untuk menjadi pedoman pelaksanaan GCG di tingkat Direksi dan Komisaris
    b. Melaksanakan proses penyelarasan dokumen *charter* Dewan Komisaris dengan *charter* Direksi dan kebijakan manajemen, buku pedoman

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

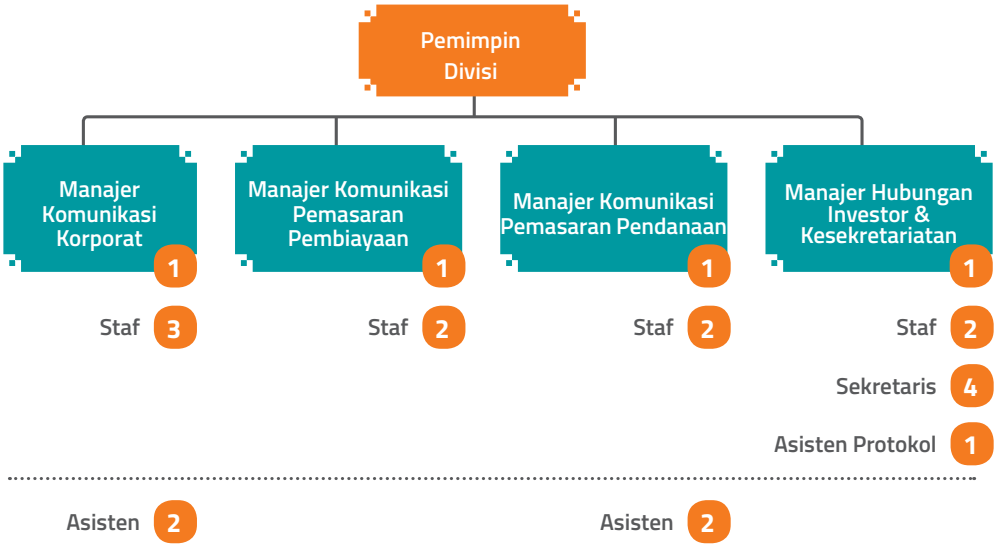

Kegiatan Sekretaris Perusahaan di Tahun 2016

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Adapun kegiatan terkait dengan Pemangku Kepentingan yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan selama thn 2016:

1. Mengikuti Perkembangan dan Peraturan Pasar Modal

   Terkait perkembangan Pasar Modal, Sekretaris Perusahaan telah melakukan revisi Anggaran Dasar BNI Syariah untuk memenuhi ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 (POJK 33/2014). Anggaran Dasar BNI Syariah yang telah disesuaikan dengan POJK 33/2014 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.4 tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat nomor: AHU-AH.01.03-0001121 tanggal 7 Januari 2016.

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Mematuhi Ketentuan Pasar Modal

   Telah menyampaikan Analisa Yuridis kepada Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan perihal Analisa Prosedur Pelaksanaan Fit and Proper Test berdasarkan POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;

SEKRETARIS PERUSAHAAN

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik;
      Bentuk keterbukaan informasi dimaksud adalah:
      - Laporan publikasi keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan dalam *Website* Perusahaan.
      - Laporan publikasi keuangan triwulanan dan tahunan di surat kabar harian nasional.
      - Laporan publikasi bagi hasil sukuk triwulanan di surat kabar harian nasional.
      - Laporan perubahan susunan pengurus serta laporan efektif pengangkatan pengurus di situs web Perusahaan termasuk penambahan *profile* pengurus baru di situs web Perusahaan.
      - Pembuatan *Annual Report* dan *Sustainable Report* yang didistribusikan kepada *Stakeholders* khususnya Pemegang Saham, serta ditampilkan dalam Situs *Web* Emiten.
      - Senantiasa mengupdate konten material lainnya di dalam *Website* seperti penambahan profile pengurus baru, akta anggaran dasar terbaru, kebijakan internal terkait penerapan GCG, dan informasi lainnya.

   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi Lainnya;
      Bentuk Pelaporan tersebut adalah:
      - Laporan Keuangan keuangan triwulanan atau tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan ke OJK, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat.
      - *Annual Report* dan *Sustainable Report* ke Pemegang Saham, OJK, Bursa Efek Indonesia, Pefindo, LPS, dan instansi lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan.
      - Laporan GCG ke OJK, Bursa Efek Indonesia, Pefindo, LPS, dan instansi lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan.
      - Laporan *self assessment* GCG kepada OJK semester 2 tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016 sebagai bagian dari penilaian tingkat kesehatan Bank, berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko.
      - Laporan perubahan susunan pengurus, pengangkatan efektif pengurus, dan laporan fakta material perubahan pengurus ke OJK, Bursa Efek Indonesia, dan LPS.
      - Penyampaian surat pernyataan pribadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru efektif kepada LPS.
      - Laporan bagi hasil sukuk ke KSEI dan Wali Amanat.
      - Laporan hutang valuta asing setiap bulan ke OJK.
      - Laporan *rating* sukuk tahunan ke OJK.
      - Laporan status Direktur Kepatuhan Perusahaan ke OJK.

   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
      1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) BNI Syariah telah melaksanakan RUPS Tahunan di tanggal 25 Februari 2016 yang dituangkan dalam Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BNI Syariah No.28 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.. Salah satu keputusan RUPS adalah pengangkatan pengurus baru yaitu Bapak Imam Teguh Saptono selaku Direktur Utama, Bapak Kukuh Rahardjo selaku Direktur Bisnis Konsumer, Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Risiko dan Kepatuhan, Bapak Fero Poerbonegoro selaku Komisaris Utama, Bapak Rizqullah sebagai Komisaris Independen,

Bapak Max Niode sebagai Komisaris, dan Bapak Muhammad Syakir sebagai Komisaris Independen, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama: Imam Teguh Saptono
Direktur Operasional: Junaidi Hisom
Direktur Bisnis Konsumer: Kukuh Rahardjo
Direktur Risiko dan Kepatuhan: Tribuana Tunggadewi

Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Fero Poerbonegoro
Komisaris Independen: Rizqullah
Komisaris: Max Niode
Komisaris Independen: Muhammad Syakir Sula

2. Pengurusan *Fit & Proper Test* Direksi dan Dewan Komisaris
   Telah berkoordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan *fit and proper test* terhadap 3 calon Direksi dan 4 calon Dewan Komisaris. 2 calon Direksi dan 2 calon Dewan Komisaris yang telah mengikuti *fit and proper test* tahun 2016 dinyatakan lulus ujian *fit and proper test* OJK dan telah dituangkan dalam Akta Perubahan Susunan Pengurus yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.

d. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; Notulen Radisi dan Radikom telah didokumentasikan dengan sistem *filing* yang tertib dan sesuai urutan tanggal untuk mempermudah administrasi. Selain itu peminjam notulen menggunakan tanda terima untuk menghindari kehilangan dokumen.

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Pelaksanaan program orientasi telah dilakukan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 25 Februari 2016 melalui kegiatan *strategic session* tanggal 12 April 2016.

Program orientasi diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Program orientasi meliputi:

1. Pengetahuan mengenai BNI Syariah, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BNI Syariah .
2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.

Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi dapat:

a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai
b. Aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
c. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan
d. Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BNI Syariah atau informasi lain yang dibutuhkan.
e. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BNI Syariah/ cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/ Manajemen.

Program Orientasi Komisaris Baru
Program orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh Perseroan karena latar belakang Anggota

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program orientasi adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Secara garis besar, ketentuan tentang program orientasi meliputi hal-hal, sebagai berikut:

1. Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan program orientasi mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program orientasi adalah Sekretaris Perseroan.
3. Program orientasi Dewan Komisaris meliputi:
   - Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
   - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
   - Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
   - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
   - Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, unjungan ke Kantor Cabang/ Kantor Wilayah/Divisi, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pada periode 2016, telah dilaksanakan program orientasi kepada Komisaris Baru yang dilaksanakan pada forum Rapat Dewan Komisaris dan Forum Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
   a. Pembuatan *Annual Report* dan *Sustainable Report* sebagai informasi kepada publik khususnya *stakeholder* terkait kondisi dan prospek Bank serta untuk memenuhi kewajiban perundang-undangan.
   b. Keikutsertaan dalam *Annual Report Award* dan *Sustainable Finance Award* (BNI Syariah mendapatkan award dalam *Sustainable Finance Award* dari OJK kategori Bank Buku 1 dan 2).
   c. *Counterpart* dengan Pefindo dalam kegiatan pemantauan tahunan untuk penerbitan rating sukuk dan ***rating*** Perusahaan tahunan (***Rating*** Perusahaan tahun 2016 adalah idAA+ (*Double Plus; Stavle Outlook*) ***rating*** sukuk *Mudharabah* 1 tahun 2015 adalah idAA+(sy) (Double A Plus Syariah).
5. Fungsi Pengawasan Implementasi GCG Perusahaan
   a. Pembuatan Laporan GCG Tahunan untuk disampaikan kepada OJK dan instansi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan, serta sebagai bagian dari *Annual Report.*
   b. Pembuatan laporan *self assessment* GCG sebagai bagian dari penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester.
   c. Penilaian penerapan GCG Perusahaan melalui lembaga eksternal/independen keikutsertaan dalam CGPI Award

yang diselenggarakan oleh IICG. BNI Syariah mendapatkan award CGPI kategori *Trusted Company*.

d. Penyampaian himbauan tidak menerima dan memberikan hadiah kepada seluruh pegawai dan mitra kerja di masa lebaran.
e. Update Kebijakan-kebijakan GCG:
   - Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman GCG No.PP/S02/002-00/2016 tanggal 26 Juli 2016.
   - Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Direksi dan Dewan Komisaris No.PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016.
   - Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No.PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember 2016.

6. Fungsi Kesekretariatan
   a. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pengurusan akta notaris berita acara rapat, akta Pernyataan Keputusan Rapat terkait pengangkatan pengurus-pengurus baru, akta susunan pengurus baru efektif, serta surat-surat pengesahan akta notaris dimaksud dari Kementerian Hukum dan HAM.
   b. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   c. Menatalaksanakan keanggotaan Direksi pada lembaga profesional atau lembaga pendukung industri.
   d. Dokumentasi dokumen legalitas Perusahaan serta *updating* dan perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya atau wajib dilakukan perubahan seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
   e. Melayani permintaan asli dan copy dokumen legalitas bagi divisi-divisi lain atau cabang yang membutuhkan

Tugas-tugas lain Sekretaris Perusahaan

Selain tugas-tugas sebagaimana ditetapkan dalam POJK No.35/POJK/2014 Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas Komunikasi Perusahaan yang meliputi Komunikasi Korporat dan Komunikasi pemasaran produk dan jasa Perusahaan serta pelaksanaan CSR.

Komunikasi Pemasaran

Sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan komunikasi pemasaran terkait keterlibatan BNI Syariah pada event-event:

1. KSF (Keuangan Syariah Fair) di 5 kota
2. iB Vaganza di 4 kota
3. Inna Craft
4. Garuda Indonesia Umrah and Travel Fair Hasanah (GUTFH)
5. IPPO Santosa "bertema 7 Keajaiban Rezeki" di 24 kota
6. BNI Subsidiaries Expo
7. Real Estate Indonesia (REI Expo)
8. *Islamic Finance News Forum* 2016
9. Olimpiade Sains Nasional
10. *World Islamic Economic Forum* 2016
11. *International Islamic Expo* 2016

Kegiatan Edukasi dan Literasi

1. Menyelenggarakan *Board of Director* (BOD) *Teaching* yang merupakan program mandatori dari OJK untuk mencerdaskan Anak Bangsa setingkat SMA, dimana dalam program tersebut BNI Syariah hadir memberikan edukasi ilmu perbankan syariah kepada siswa–siswi Sekolah Menengah Atas.
2. Mengarahkan pelaksanaan BM *Teaching* yaitu program mengajar yang dilakukan oleh Branch Manager di sekolah-sekolah yang sudah menjadi mitra
3. Pembentukan Jurnalis Ekonomi Syariah, wadah komunitas peminat berita-berita ekonomi syariah.

Kegiatan CSR

Menyelenggarakan berbagai acara terkait dengan program *Corporate Social Responibility* (CSR) antara lain:

1. Hasanah *Society* (*make over* fasilitas umum yang tidak mendapatkan perhatian dari pihak ketiga),
2. Hasanah *Empowerment* (Target program pemberdayaan ekonomi adalah mendukung keterampilan lokal masyarakat setempat di daerah masing-masing),
3. Qurban Party Hasanah (Kegiatan menyambut Hari Raya Idul Adha yang diselenggarakan BNI Syariah di seluruh Kantor Cabang baik reguler maupun mikro, kegiatan pengumpulan hewan kurban yang diberikan oleh nasabah,masyarakat, maupun pegawa melalui Kantor Cabang BNI Syariah).
4. Santunan anak Yatim
5. Bagi – bagi Takjil Hasanah di bulan Ramadhan
6. Kegiatan khatam Al qur'an di bulan Ramadhan
7. Program Duta Hasanah

Peraturan Baru yang telah disosialisasikan oleh Sekretaris Perusahaan

No	Keterangan	Perihal
1.	Surat Bank Indonesia No.18/54/GBI-DMSI/Srt/B, tgl. 30 Oktober 2016	Perizinan/persetujuan kepesertaan Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta makro prudensial
2.	Surat Elektronik Internal keseluruh Divisi & Cabang (SHECO) tgl 17 Juni 2016	Sosialisasi Himbauan untuk tidak menerima hadiah di masa lebaran
3	SHECO CCD/21707 tgl. 14 juni 2016	Kajian Hukum terhadap kewajiban *Investor Relationship* kepada Badan Regulator dan pihak terkait lainnya,
4	Sosialisasi melalui E*lectronic Corporate Guidance* (ECG)	Petunjuk Pelaksanaan Pedoman GCG No.PP/S02/002.00/2016 tgl.26 Juli 2016 Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Direksi dan Dewan Komisaris No.PP/S02/003.00/2016 tgl. 1 September 2016 Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No.PP/S02/004-00/2016, tgl. 27 Desember 2016

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Klasifikasi dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sesuai klasifikasi Sekretaris Perusahaan yang tertuang dalam Panduan Sekretaris Perusahaan BNI Syariah bahwa Sekretaris Perusahaan memiliki pengetahuan terkait lainnya yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu kriteria berpengalaman luas, andal dan mampu mempertahankan kerahasiaan, dapat berperan sebagai komunikator yang baik, seorang pendengar yang baik, dan mampu berperan sebagai "gerbang penghubung" pertama untuk memberi saran bagi Dewan Komisaris, Direksi serta eksekutif senior lainnya di BNI Syariah.

Agar dapat terus mengikuti perkembangan terkini mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan yang efektif, BNI Syariah telah memfasilitasi pegawai di lingkungan Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan maupun *training*, selama tahun 2016 Sekretaris Perusahaan BNI Syariah telah mengikuti:

No.	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tahun
1	Pembekalan Manajemen Risiko Level 5 (Bacht 2)	PT Leadership Nasional	Agustus 2016
2	GRI G4 Certified Training on Sustainability Reporting	NCSR	Oktober 2016
3	Uji Kompetensi Manajemen Risiko	BSMR	November 2016

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Penilaian kerja Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Sektor yaitu Direktur Risk and Compliance dengan berdasarkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan ketercapaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Berikut penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan mencakup sebagai berikut:

1. Mengendalikan *cost effectiveness*
2. Meningkatkan Reputasi dan *Awareness* terhadap BNI Syariah sebagai Bank yang bercitra positif
3. Memastikan terselenggaranya *Corporate action* Perseroan dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
4. Meningkatkan kepuasan *internal customer*
5. Mengelola program komunikasi internal secara terpadu
6. Memastikan Pelaksanaan Implementasi Brand sesuai *Brand Guidelines*
7. Meningkatkan skill pegawai *Corporate Secretary & Communication*

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan dilakukan antara lain melalui kegiatan temu analis, paparan publik, penerbitan brosur kinerja keuangan bulanan, penerbitan laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan. Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai Bank dan kegiatannya di situs web: www.bnisyariahi.co.id.

Selain itu, mengingat pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam penciptaan citra Perusahaan, *Corporate Secretary Bank* juga memiliki tugas menyebarluaskan informasi mengenai BNI Syariah kepada segenap pegawai, termasuk menyampaikan program dan kebijakan manajemen. Informasi tersebut disampaikan melalui media internal antara lain Forum Hasanah, Hasanah *Lifestyle* (News Letter BNI Syariah), *BOD Messages, Morning Briefing* setiap Divisi/*Desk*/Kantor Cabang, Pengajian Rabu Siang, Kajian Jumat pagi, serta sosialisasi ke Kantor Wilayah dan Cabang.

Program Komunikasi Perusahaan 2016

Dimulai tahun 2014 yang lalu BNI Syariah telah mendeklarasikan Hasanah Titik sebagai kampanye Perusahaan yaitu sikap nilai (*value*) BNI Syariah sebagai bank Syariah yang bertujuan menjadi "*rahmatan lil alamin*" dengan mengantarkan nilai-nilai kebaikan (Hasanah). Hal ini sejalan dengan visi BNI Syariah untuk menjadi "Bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja".

Arti dari "Hasanah Titik" adalah tidak ada pilihan lain kita harus berHasanah untuk mewujudkan bangsa Indonesia Maju dan Bermartabat. Hasanah diambil dari intisari do'a sapu jagad yang artinya adalah kebaikan dalam bentuk luas yang senantiasa dimintakan baik di dunia maupun di akhirat. Hasanah Titik yang digambarkan dengan palu melambangkan satu keputusan mutlak untuk senantiasa berHasanah.

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh gelombang karena adanya pemilihan umum dan pemilihan presiden. BNI Syariah 'memanfaatkan' momentum tersebut dengan menyampaikan pesan Hasanah dengan tagline seperti: 'Percuma tegakkan hukum tanpa hadirkan kebaikan', 'Kalah menang Hasanah Titik!', 'Malu bikin susah, Hasanah Titik!' baik melalui *website*, sosial media, media cetak, elektronik maupun *online*.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Visualisasi dari makna Hasanah Titik diimplementasikan melalui program Mutiara Bangsa BerHasanah (MBB) yakni dengan penokohan insan biasa yang berbuat luar biasa yang diusulkan oleh masyarakat. Telah dipilih 14 tokoh yang mewakili berbagai usia dan bidang kompetensi sehingga diharapkan mereka dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan khususnya bagi insan BNI Syariah untuk konsisten menjalankan nilai hasanah dengan sumber daya yang dimiliki sendiri.

Pada tahun 2015 dilakukan *workshop* yang dihadiri oleh 13 Mutiara Bangsa yang selanjutnya disebut sebagai Duta Hasanah yang berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BNI Syariah untuk membangkitkan inspirasi berbuat kebaikan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok binaan.

Kiprah ke 13 Duta Hasanah ini diabadikan dalam kalender BNI Syariah 2016 yang diproduksi sebanyak 30.000 eksemplar untuk dibagikan kepada nasabah. Respon masyarakat sangat baik terhadap penerbitan kalender dengan tokoh Duta Hasanah ini, terbukti dengan permintaan terhadap beberapa Duta Hasanah untuk menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pada tahun 2016, Duta Hasanah menjalankan program Hasanah *Empowerment* berupa pemberdayaan masyarakat atau kelompok binaannya bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik dan Kantor-kantor Cabang BNI Syariah. Di akhir tahun dilakukan kunjungan oleh jurnalis mitra media untuk melihat langsung aktivitas para Duta Hasanah. Dari kunjungan ini diperoleh liputan dengan tone positif dimana jelas terlihat semangat BNI Syariah untuk menumbuhkan UMKM melalui program Hasanah Empowerment ini.

Pada tahun 2015 telah diadakan *workshop* tentang bagaimana sebaiknya program Umrah dan Haji dilaksanakan agar dapat mendatangkan manfaat/kebaikan baik bagi jamaah maupun masyarakat luas. *Workshop* ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Imam Prasodjo yang mewakili ahli di bidang sosial, Syafei Antonio sebagai tokoh akademis sekaligus ulama, Ippho Santosa yang mewakili *entrepreneur*, *motivator* dari kalangan muda serta Abdul Djamil dari Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama. Hasil *workshop* ini menyimpulkan perlunya persiapan yang baik termasuk di dalamnya niat yang hasanah, pembekalan sebelum keberangkatan, pendampingan dan pembentukan alumni

jamaah untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama ibadah umrah atau haji.

Program Komunikasi Perusahaan 2016 disampaikan melalui program Umrah Keluarga Hasanah. Yaitu program pemberangkatan 300 jamaah umrah dalam satu pesawat, yang mengangkat tema "Masuk Surga Sekeluarga". Program ini menekankan bahwa sekembalinya jamaah dari tanah suci seyogyanya jamaah membawa perubahan berupa kebaikan yang dirasakan bagi keluarga dan masyarakat lingkungannya. Pesan ini disampaikan melalui tagline "Pulang Umrah bawa apa?"

Sejak digulirkan tahun 2014, BNI Syariah senantiasa menjaga konsistensi pesan hasanah antara lain selama tahun 2015 BNI Syariah dalam komunikasinya mengangkat *tagline* seperti 'Kubekali Hasanah, agar kelak menjadi pemimpin amanah' pesan ini disampaikan bagi keluarga muda perlunya mempersiapkan masa depan anak, 'Sudahi kantuk ekonomi' memberikan semangat Hasanah pada saat kondisi ekonomi yang stagnan, 'Abadi wewangi Haji' adalah ucapan turut berduka cita kepada korban dan keluarga yang tertimpa jatuhnya *crane* dengan pemberian santunan kepada keluarga korban melalui Yayasan Hasanah Titik, 'Tujuh kemenangan berkurban' dengan melempar sifat buruk layaknya melempar jumrah dan menjalankan sifat kebaikan seperti tauladan nabi Ibrahim AS.

Tahun 2016 *corporate campaign* BNI Syariah dilanjutkan dengan tema Hasanah *is Me*, yakni masing-masing insan BNI Syariah telah dapat menjadikan dirinya sebagai contoh dari wujud perilaku insan Hasanah itu sendiri, yang diantaranya ditunjukkan dalam program Milad 6 "Hasanah A Six" BNI Syariah diantaranya Hasanah *for Society*, yaitu memberikan sentuhan kebaikan berupa renovasi sarana umum seperti mushola terminal, renovasi taman bacaan, membersihkan rumah singgah, menyerahkan solar plat kepada desa yang belum memiliki listrik dan lain sebagainya. Tarhib Ramadhan berupa *long march* mengajak masyarakat menyiapkan diri menghadapi Ramadhan dengan meningkatkan sikap takwa, sabar dan jujur, program Insan Hasanah Khatam Qur'an, dan program Hasanah lainnya.

Tahun 2017 pesan Hasanah Titik diteruskan dalam bentuk Hasanah *is my Identity* dimana Hasanah telah menjadi sebuah identitas. Disamping makna kontekstual, Hasanah *is my Identity* juga memiliki makna hakekatnya identitas yang berarti pengakuan diri, cita-cita dan pengukuhan sehingga insan Hasanah memiliki nilai pembeda (*distinctive value*) serta daya saing (*competitiveness*) dalam kehidupan sehari–hari. Selanjutnya keberadaan BNI Syariah akan memainkan peran sebagai Hasanah *Lifestyle Banking*, bank yang melayani gaya hidup berhasanah.

Keterbukaan Informasi kepada Publik

BNI Syariah sebagai Perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* senantiasa memberikan keterbukaan informasi Perusahaan kepada nasabah dan *stakeholders* sesuai dengan POJK No.31/POJK.04/2015 tentang KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU Perusahaan PUBLIK dan SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016 TENTANG BENTUK dan ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU Perusahaan PUBLIK, salah satu bentuk keterbukaan selain laporan keuangan yang rutin sebagaimana ketentuan yang berlaku, BNI Syariah juga menyampaikan informasi-informasi terkini terkait antara lain perkembangan Perusahaan, kinerja Perusahaan serta penjelasan produk berserta fiturnya melalui website www.bnisyariah.co.id serta *social media* yaitu facebook PT Bank BNI Syariah, dan twitter @BNISyariah. Selain *social media* di atas masyarakat juga memanfaatkan email Perusahaan info@bnisyariah.co.id untuk menyampaikan keluhan ataupun pertanyaan seputar produk dan layanan BNI Syariah.

Pengaduan juga dapat disalurkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang terbuka bagi masyarakat melalui ***website*** www.bnisyariah.co.id di kanal *whistleblowing system* dan *e-mail* clean@bnisyariah.co.id yang keseluruhan informasi tersebut telah dicantumkan pada *website* BNI Syariah. Informasi selalu dilakukan *update* setiap hari oleh Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi, dan *complain* yang disampaikan diselesaikan dalam waktu maksimal 1x24 jam sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang dituangkan dalam kebijakan internal BNI Syariah.

Selain itu, terhadap pemberitaan media baik cetak maupun ***online*** selalu dilakukan pemantauan setiap saat oleh Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan, dimana hasil ***resume*** pemberitaan disampaikan setiap hari kepada jajaran Manajemen (*Board of Management*), pemimpin Divisi dan pemimpin Cabang melalui *intra-mail*. Pelaporan hasil pemantauan disampaikan secara berkala baik bulanan dan tahunan disampaikan kepada Jajaran Manajemen dan pelaporan berkala setiap 3 bulan ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Divisi Perencanaan dan Strategis (SPD) untuk pemberitaan negatif di media.

Hubungan dengan Media dan Akses Informasi

BNI Syariah berupaya untuk membangun hubungan baik dengan media dengan membangun Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) sejak tahun 2010. JES merupakan forum wartawan tulis dan foto dari desk ekonomi yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada wartawan mengenai perbankan Syariah sehingga jurnalis dapat menulis pemberitaan ataupun fitur keuangan Syariah lebih akurat dan pada akhirnya dapat tersampaikan kepada masyarakat keunggulan dari keuangan Syariah. Sampai dengan Desember 2017 telah dibentuk JES di 10 kota yaitu Jakarta, Jogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Aceh, Padang, Makassar, dan Palu dimana rata-rata anggota JES di setiap kota diikuti sekitar 20 media.

Kegiatan JES di setiap kota diantaranya workshop perbankan syariah, audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan lain-lain, serta kegiatan olahraga. Salah satu peranan JES yang dirasakan oleh perbankan syariah dengan dikeluarkannya kebijakan perpindahan dana Haji dari bank konvensional ke bank syariah.

Selain itu, BNI Syariah senantiasa berhubungan baik dengan media dengan melakukan kunjungan (*media visit*) khususnya kepada *media mainstream*, media junket dengan mengunjungi Duta Hasanah dan mitra-mitra BNI Syariah, mengadakan lomba foto dan penulisan bagi wartawan, mendukung kegiatan dalam bentuk *sponsorship workshop* dan kegiatan olahraga JES.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan dapat diidentifikasi sebagai situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan BNI Syariah memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Perusahaan merupakan salah satu aspek GCG yang wajib dilaksanakan dalam Perusahaan sebagaimana diatur dalam regulasi OJK ataupun Bank Indonesia terkait GCG dan Tingkat Kesehatan Bank. Untuk itu BNI Syariah berusaha meningkatkan praktik penanganan Benturan Kepentingan dari waktu ke waktu. BNI Syariah meyakini bahwa usaha menangani Benturan Kepentingan yang konsisten akan bermanfaat dalam mengurangi potensi *fraud* dan tindakan KKN.

Usaha BNI Syariah dalam penanganan Benturan Kepentingan Perusahaan baik yang sudah diselenggarakan ataupun di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. BNI Syariah sejak pendiriannya telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertuang dalam Kode Etik Insani termasuk larangan untuk menerima hadiah dari vendor atau mitra bisnis jika hal tersebut akan menciptakan situasi benturan kepentingan. Pada tahun 2016 BNI Syariah menerbitkan kebijakan berupa Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No.PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember 2016. Tujuannya adalah agar insan BNI Syariah termasuk pengurus dan pegawai memahami situasi-situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan, serta mekanisme yang wajib dilakukan ketika mengalami situasi benturan kepentingan.
2. Selain itu kebijakan tersebut menegaskan sanksi dapat dikenakan kepada setiap pegawai yang melanggar situasi benturan kepentingan yang dialaminya yaitu ketika insan BNI Syariah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangannya dalam situasi benturan kepentingan (baik sengaja maupun tidak sengaja), demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
3. Untuk menyampaikan situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan, insan BNI Syariah dapat melakukan pengaduan internal melalui mekanisme *Whistle Blowing System* (WBS) yaitu melalui *website* www.clean@bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id, email: clean@bnisyariah.co.id, telepon 0851-0044-4600, atau surat BOX BSC, PT Bank BNI Syariah, Gedung Tempo Pavilion I Lt 4, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10.11, Jakarta Selatan 12950.
4. Tahun 2017 setiap Divisi/Unit/Wilayah/Cabang wajib melaporkan situasi benturan kepentingan yang dialami oleh pegawainya kepada Unit Kerja Pengelola Kesekretariatan kantor Pusat BNI Syariah baik secara insidentil dan laporan berkala semesteran, walaupun sebelumnya pelaporan internal ini sebelumnya juga sudah dilakukan melalui pelaporan internal terkait transaksi pihak terkait/terafiliasi kepada Divisi yang membawahi manajemen risiko..

Transaksi Benturan Kepentingan 2016

Berdasarkan Laporan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait PT Bank BNI Syariah posisi 31 Desember 2016, terdapat 150 Individu/Kelompok yang merupakan pihak terkait yang melakukan peminjaman fasilitas penyediaan dana dari BNI Syariah.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit Division (IAD) berupaya untuk dapat lebih banyak memberikan rekomendasi pada issue-issue yang lebih spesifik dan strategis, dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan audit sbb:

- Audit Tematik, yang mengakomodasi masukan dan kebutuhan manajemen.
- Audit Tindak Lanjut Laporan *Whistleblowing System* (WBS)
- Audit investigasi

Selain melaksanakan pendekatan audit tersebut, *Internal Audit Division* juga melaksanakan audit yang bersifat rutin, yaitu audit umum kantor Cabang Reguler, Kantor Cabang Mikro dan Kantor Pusat, audit IT, serta audit SKNBI RTGS yang bersifat mandatory dalam rangka memenuhi ketentuan regulator.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit

Fungsi Audit Internal dijalankan oleh *Internal Audit Division* (IAD), sebuah unit setingkat divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Untuk mendukung peran IAD agar dapat memberikan data/informasi yang independen untuk menilai dan mengevaluasi berbagai kegiatan bisnis dan operasional serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan secara cepat, IAD juga membawahi *Internal Controller* yang ditugaskan di Divisi dan kantor Cabang Reguler dan Mikro.

Berdasarkan Ketetapan Organisasi No.ORG/11/III No.2013 tanggal 4 April 2013, struktur dan kedudukan *Internal Audit Division* PT Bank BNI Syariah sbb:

Struktur Organisasi *Internal Audit Division*

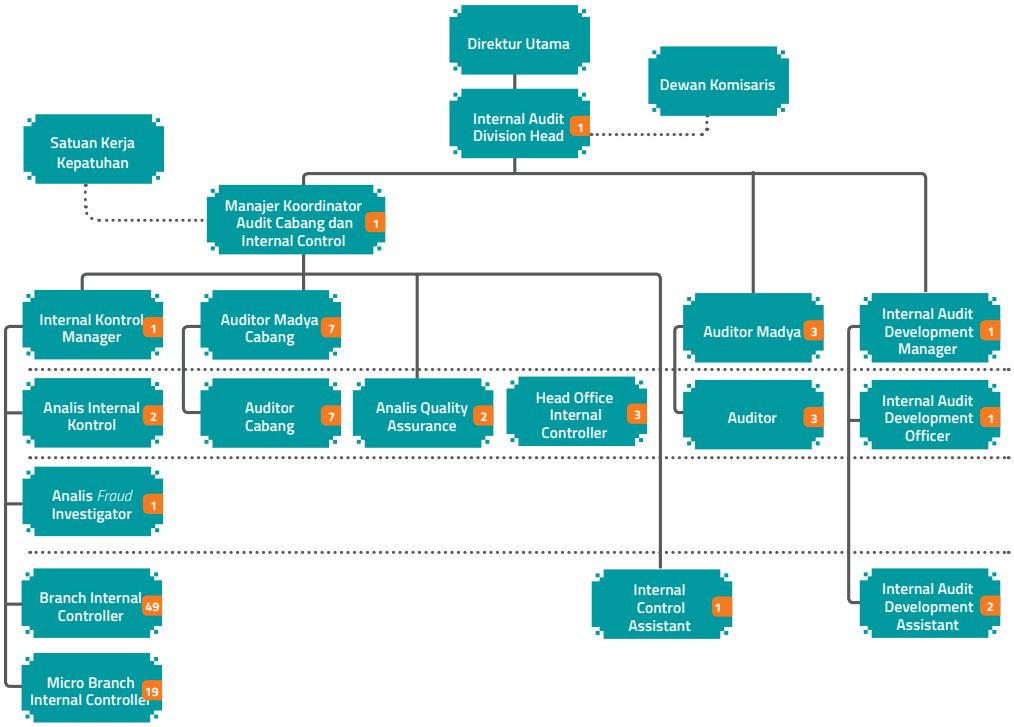

Total Formasi 140 Pegawai

Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Divisi Internal Audit

IAD dipimpin oleh seorang *Division Head*, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pegawai IAD bertanggung jawab kepada IAD *Head* sesuai dengan struktur organisasi IAD. IAD memiliki garis komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan Komite Audit untuk melakukan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit.

Profil Pemimpin Divisi Internal Audit

Zefri Ananta, CIA, CFE.

Beliau ditunjuk sebagai IAD Head sejak 08-10-2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank BNI Syariah No.KP/51/DIR/R Tentang Pengukuhan, dan telah dilaporkan ke otoritas terkait. Beliau berpengalaman sebagai auditor di Satuan Pengawasan Internal sebagai auditor Kantor Cabang dalam maupun luar negeri, Kantor Pusat, Anak Perusahaan, investigasi, serta *counter part* dan Pengembangan Sistem Audit. Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994) dan Magister Profesional Program Studi Industri Kecil Menengah di Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (2003).

Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IAD berpedoman pada *Internal Audit Charter* yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris No.KP/207/DIR tanggal 10 Agustus 2010 dan diperbaharui dalam Surat Keputusan Direksi No.KP/002/DIR/R Tanggal 2 Juni 2014. *Internal Audit Charter* dibuat sebagai pedoman mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan IAD. *Internal Audit Charter* terdiri dari Visi dan Misi IAD, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan IAD, Struktur dan Kedudukan IAD, Tugas dan Tanggung Jawab IAD, Wewenang IAD, Kode Etik Internal Audit, Pelaporan dan Dokumentasi, Perlindungan Hukum, Larangan, dan Sanksi.

Profil SDM IAD dan Kualifikasi Internal Auditor di Tahun 2016

Hingga akhir tahun 2016, IAD dipimpin oleh Sdr. Zefri Ananta, CIA, CFE sebagai Pemimpin Divisi. Pada tahun 2016 IAD memiliki komposisi pegawai dengan rincian dan kualifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Posisi 31 Des 2016	Sertifikasi
INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD	1	CIA, CFE
MANAGER KOORDINATOR INTERNAL CONTROL & BRANCH AUDIT	1	Sertifikasi Auditor LSPP
BRANCH SENIOR AUDITOR	7	
INTERNAL AUDIT DEVELOPMENT MANAGER	1	CA IAI, Sertifikasi Auditor LSPP
HEAD OFFICE SENIOR AUDITOR	3	CA IAI, Sertifikasi Auditor LSPP (2 orang)
INTERNAL CONTROL MANAGER	1	
HEAD OFFICE AUDITOR	3	Sertifikasi Auditor LSPP (4 orang)

Jabatan	Jumlah Posisi 31 Des 2016	Sertifikasi
BRANCH AUDITOR	7	
INTERNAL CONTROL OFFICER	1	
QUALITY ASSURANCE OFFICER	2	
Fraud INVESTIGATOR OFFICER	1	
HEAD OFFICE INTERNAL CONTROLLER	3	
INTERNAL AUDIT DEVELOPMENT OFFICER	1	
INTERNAL CONTROL ASSISTANT	2	
INTERNAL AUDIT DEVELOPMENT ASSISTANT	1	
QUALITY CONTROL OFFICER	1	
BRANCH INTERNAL CONTROLLER	49	
MICRO BRANCH INTERNAL CONTROLLER	19	

Kualifikasi pendidikan formal berdasarkan level jabatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	S2	S1	D3
INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD	1		
MANAGER KOORDINATOR INTERNAL CONTROL & BRANCH AUDIT		1	
BRANCH & HEAD OFFICE SENIOR AUDITOR	1	9	
INTERNAL AUDIT DEVELOPMENT MANAGER	1		
INTERNAL CONTROL MANAGER		1	
BRANCH & HEAD OFFICE AUDITOR	1	9	
INTERNAL CONTROL OFFICER		1	
QUALITY ASSURANCE OFFICER		2	
Fraud INVESTIGATOR OFFICER		1	
HEAD OFFICE INTERNAL CONTROLLER		3	
INTERNAL AUDIT DEVELOPMENT OFFICER		1	
QUALITY CONTROL OFFICER		1	
BRANCH INTERNAL CONTROLLER	1	45	3
MICRO BRANCH INTERNAL CONTROLLER		18	1
ASISTEN		3	
Total	**5**	**95**	**4**

Branch Internal Controller dan *Head Office Internal Controller*

Branch Internal Controller dan *Head Office Internal Controller* memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan harian sesuai prosedur yang berlaku atas kesesuaian pelaksanaan proses bisnis dan operasional di kantor cabang dan kantor pusat. Hasil pemeriksaan *Internal Controller* selanjutnya menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan audit dan perbaikan oleh unit terkait baik bisnis maupun operasional. Selain itu *Internal Controller* juga dilibatkan dalam proses investigasi kejadian *fraud* dan tindak lanjut penyelesaian temuan audit.

Independensi dan Objektivitas

IAD dan masing-masing anggotanya memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi dengan mengungkapkan pandangan atau pemikirannya sesuai profesi dan

standar audit yang berlaku. Independensi dan objektivitas IAD dan masing-masing anggotanya telah diatur dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama serta disosialisasikan ke segenap unit di BNI Syariah.

Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Kegiatan yang dilakukan *Internal Audit Division* bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kecukupan dan efektivitas *internal control* dan *governance process* serta kualitas dan efektivitas *risk management* Bank BNI Syariah.

Ruang lingkup kegiatan *Internal Audit Division* mencakup pelaksanaan *assurance* dan konsultasi terhadap seluruh aktivitas perbankan dan semua tingkatan manajemen dan operasional BNI Syariah.

Tugas Pokok IAD:

1. Melakukan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang telah direview oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama atas aktivitas/unit/sumber daya BNI Syariah, termasuk Perusahaan/organisasi lain yang terafiliasi secara langsung/tidak langsung dengan BNI Syariah berdasarkan persetujuan/permintaan pihak Perusahaan/organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur Utama.
2. Melaksanakan audit sesuai permintaan Direksi, Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya *fraud*.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan, risiko dan tata kelola Perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi indepedensi dan objektivitas Satuan Pengawasan Intern serta tersedia sumber daya yang memadai.

Berdasarkan Piagam Audit IAD, tugas dan tanggung jawab IAD antara lain mencakup:

1. Menyusun Rencana Audit dan Konsultasi periodik.
2. Melaksanakan kegiatan audit dan konsultasi sesuai dengan Rencana Audit dan Konsultasi.
3. Melaporkan realisasi Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan.
5. Menyampaikan laporan hasil audit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
6. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap internal kontrol, *governance process* dan *risk management*.
7. Melakukan audit investigasi dan/atau *audit forensic* apabila diperlukan atau jika terjadi dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.
8. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan.
9. Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
10. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi.
11. Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang berikutnya dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan.
12. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi pegawai IAD dalam melaksanakan tugasnya.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan audit yang dilakukan.
14. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan bagi segenap pegawai IAD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pegawai IAD.
15. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi audit internal dan pelaksanaan audit eksternal.

Rencana Kerja dan Realisasi Audit Internal

IAD melaksanakan audit terhadap ruang lingkup yang tercantum dalam Rencana Audit Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris, yang meliputi:

1. Audit Umum Kantor Cabang Reguler
2. Audit Umum Kantor Cabang Mikro
3. Audit Umum Kantor Pusat
4. Audit Tindak Lanjut
5. Audit Tindak Lanjut *Whistleblowing System*
6. Audit Tematik
7. Audit Lainnya

Penetapan rencana audit berdasarkan pada:

1. Ketersediaan hari audit (mandays) berdasarkan formasi auditor IAD.
2. Faktor-faktor lain:
   a. Masukan dari Dewan Komisaris, Direksi, divisi yang membawahi Kantor Cabang atau pihak lain.
   b. Cabang atau Divisi yang memiliki risiko tinggi
   c. Asset dan kualitas pembiayaan
   d. Periode masa pemeriksaan
3. Rencana pelaksanaan Audit Tindak Lanjut, Audit Tindak Lanjut WBS dan Audit Tematik ditetapkan berdasarkan pelaksanaan audit tahun-tahun sebelumnya.

Selama 2016, Internal Audit BNI Syariah mempunyai rencana kerja dan realisasi hasil audit sebagai berikut:

No.	Jenis Audit	Rencana Audit	Realisasi Desember	Persentase
1	Audit Umum Kantor Cabang Reguler	26	26	100.00%
2	Audit Umum Kantor Cabang Mikro	9	9	100.00%
3	Audit Umum Kantor Pusat	13	14	107.69%
4	Audit Tematik	4	3	75.00%
5	Audit Tindaklanjut/investigasi	20	35	175.00%
6	Audit TL WBS	15	5	33.33%

Hasil Audit Tahun 2016

IAD BNI Syariah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan baik audit internal maupun audit eksternal. Berikut tabel pemantauan tindak lanjut audit internal:

Keterangan	Jumlah Temuan (a)	Jumlah Penyelesaian (b)	Jumlah Pending (b)		% Penyelesaian e= b/(a-d)
			Sudah JT (c)	Belum JT (d)	
Internal					
RHA & LHA 2015	4084	4084	0	0	100.00%
RHA & LHA 2016	3545	2804	548	193	83.65%
Rata-rata (%) penyelesaian					**91.83%**

Berikut tabel pemantauan tindak lanjut audit eksternal:

Keterangan	Jumlah Temuan (a)	Jumlah Penyelesaian (b)	Jumlah Pending (b)		% Penyelesaian e= b/(a-d)
			Sudah JT (c)	Belum JT (d)	
External					
OJK 2015	101	101	0	0	100.00%
PWC 2015	19	19	0	0	100.00%
SPI UMUM 2015	42	42	0	0	100.00%
SPI BNI IT 2015	43	43	0	0	100.00%

Keterangan	Jumlah Temuan (a)	Jumlah Penyelesaian (b)	Jumlah Pending (b)		% Penyelesaian e= b/(a-d)
			Sudah JT (c)	Belum JT (d)	
SPI BNI PEMBIAYAAN 2015 (RHA & LHA)	49	49	0	0	100.00%
SPI BNI AUDIT PRODUK 2015	1	1	0	0	100.00%
OJK 2016	123	91	0	32	100.00%
Rata-rata (%) penyelesaian					**100.00%**

Transformasi Pendekatan Audit di Tahun 2016

1. Implementasi *Offsite* Audit
   Internal Audit Division menerapkan dua jenis metode pemeriksaan terhadap kantor cabang, yaitu dengan metode *offsite audit* (pemeriksaan di kantor pusat) dan *onsite audit* (pemeriksaan di lokasi kantor cabang).

   Melalui modifikasi *Exception Report* dan kemampuan akses langsung terhadap *core banking* serta aplikasi proses pembiayaan, memungkinkan tim audit untuk melakukan pemeriksaan Kantor Cabang dengan mengakses data dari Kantor Pusat. Hal ini akan berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit pada saat *on site audit* dan mampu mengurangi biaya pelaksaan audit. Saat *onsite audit*, Tim audit lebih fokus pada pelaksanaan verifikasi dan identifikasi permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan *offsite audit*.

2. Impementasi Rating Audit Kantor Cabang
   Internal Audit Division menerapkan metode rating terhadap hasil audit Kantor cabang, sehingga memudahkan manajemen untuk mengukur tingkat risiko terhadap hasil audit di semua kantor cabang. Rating audit dihasilkan melalui pengukuran terhadap signifikansi dan jumlah kelemahan yang terjadi selama pemeriksaan.

3. *Risk Assesment* yang Berbasis Risiko
   Internal Audit Division menerapkan rating terhadap *risk assessment* yang dibedakan antara Cabang Reguler dan Cabang Mikro. Semakin besar nilai akan menunjukan semakin besar risiko masing-masing cabang, dan mempengaruhi rencana pelaksanaan audit di tahun berjalan. Rating *risk assesment* selain mempertimbangkan tingkat risiko dari masing-masing cabang juga mempertimbangkan masukan dari manajemen dan ketersediaan sumber daya Internal Audit Division.

Konsistensi Menjaga Kualitas

Untuk senantiasa menjaga kualitas pemeriksaan auditor dan internal controller, IAD secara berkala melakukan review atas metodologi dan prosedur kerja, serta hasil kerja auditor dan internal controller. Review senantiasa dilakukan untuk mengimbangi perkembangan kebutuhan teknis pemeriksaan dengan menerapkan konsep *best practice* dalam pemeriksaan.

Sementara control atas pemantauan hasil kerja auditor dan *internal controller* dilakukan melalui lembar evaluasi kinerja auditor dan *internal controller* yang diisi oleh *auditee*. Selain itu, setiap ketua tim juga bertugas untuk mengisi lembar review atas anggotanya setelah penugasan selesai.

Untuk memastikan bahwa hasil audit IAD telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi auditor, IAD melakukan pemantauan melalui aplikasi Enterprise Audit Syariah (EASY) agar hasil audit tidak terabaikan dan menjadi issue sesaat, melainkan menjadi salah satu konsentrasi auditee dalam mempertahankan *performance* tanpa mengabaikan kualitas, sekaligus sarana bagi auditor untuk memantau tindak lanjut cabang.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Fungsi Audit Eksternal

External Auditor memiliki fungsi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Bank serta menguji pengendalian internal (*internal control review*), termasuk pengujian kembali item yang telah diuji oleh *Internal Audit* dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Penunjukan Akuntan Publik

Sesuai keputusan RUPS tertanggal 25 Februari 2016, BNI Syariah berdasarkan surat keputusan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Dewan Komisaris BNI Syariah N0 DK/76 tanggal 21 Juli 2016, dan Surat Dewan Komisaris BNI Syariah kepada Direksi BNI Syariah No.KDM/40 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penetapan KAP *General Audit* Laporan Keuangan BNI Syariah telah menunjuk KAP Purwantono, Suherman dan Surja-Enrst and Young (PSS-EY), Sesuai dengan Keputusan RUPS yang memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Penunjukan ini dilakukan setelah memperhatikan hasil evaluasi KAP yang dilakukan oleh manajemen dan rekomendasi oleh Komite Audit.

Akuntan Publik	
Kantor Akuntan Publik	KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Global) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lt. 7 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta

Penunjukan KAP tersebut telah berpedoman pada regulasi yang berlaku dan dipilih melalui tahapan proses seleksi dengan pelelangan terbatas/*tender* berdasarkan pemenuhannya terhadap kriteria:

1. Berpengalaman sebagai auditor perbankan
2. Memahami regulasi perbankan di Indonesia, Perusahaan masuk bursa serta peraturan lainnya yang relevan.
3. Berpengalaman dan memahami sistem aplikasi dan teknologi perbankan.
4. Memahami produk perbankan.
5. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko.

Ketentuan internal lain yang dijadikan acuan adalah tidak melakukan penunjukan KAP yang sama untuk periode audit 5 (lima) tahun berturut-turut dan dengan sama selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

BNI Syariah menerapkan prinsip-prinsip profesi dalam melakukan penetapan *Auditor Eksternal* yang independen yaitu:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Obyektifitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku professional;
8. Standar teknis.

Daftar Nama KAP yang Melakukan Audit Laporan Keuangan BNI Syariah

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nama KAP yang mengaudit Laporan Keuangan BNI Syariah sebagai berikut:

Tahun	Nama KAP	Opini
2016	EY	Tanpa Modifikasi
2015	PWC	Wajar Tanpa Pengecualian
2014	PWC	Wajar Tanpa Pengecualian
2013	PWC	Wajar Tanpa Pengecualian
2012	PWC	Wajar Tanpa Pengecualian

Imbalan Jasa dan Lingkup Pekerjaan

Imbalan Jasa dan Lingkup Pekerjaan KAP 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Nama KAP	Besaran Fee (dalam Rp)	Lingkup Pekerjaan
2016	EY	Rp349.450.105	Audit RK + Renew dan Validatif
2015	PWC	Rp373.943.398	Audit RK + Renew dan Validatif
2014	PWC	Rp610.087.500	Audit RK + Renew dan Validatif
2013	PWC	Rp525.937.500	Audit RK + Renew dan Validatif
2012	PWC	Rp467.500.000	Audit RK + Renew dan Validatif

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Pada Periode 2016, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik BNI Syariah tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan pada tahun buku 2016 (fee NIHIL).

Pelaksanaan Audit

Dalam pelaksanaan audit, BNI Syariah selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan KAP (*External Auditor*). Unit ***Accounting*** bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan *External Auditor* dibantu oleh Internal Audit. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Koordinasi Dengan *External Auditor* & *Internal Audit*

Pemeriksaan terhadap akurasi data keuangan dan operasional BNI Syariah dilakukan pula oleh eksternal auditor yakni Bank Indonesia (BI), dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kegiatan perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor.pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, Audit Intern berperan sebagai *liaison officer* untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut audit.

External Auditor (KAP) menyampaikan rencana Audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit pada awal penugasan sebelum audit lapangan dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan progres audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait internal control. *External Auditor* menyampaikan hasil auditnya kepada Komite Audit dalam pertemuan bersama dengan Internal Audit dan Direksi terkait. Sebelum pertemuan dengan Komite Audit, materi pertemuan tersebut dibahas terlebih dahulu dengan Internal Audit dan unit kerja terkait. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

MANAJEMEN RISIKO

MAQASHID (LANDASAN) SYARIAH MANAJEMEN RISIKO

Cara pengelolaan risiko sudah diterapkan sejak zaman nabi Yusuf AS yang dicerminkan dalam surat Yusuf ayat 67 yang berbunyi:

وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ وَٱدۡخُلُواْ
مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖۖ وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍۖ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا
لِلَّهِۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَعَلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ٦٧

Artinya: "Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri."

Ayat tersebut menunjukkan bagaimana cara mengelola risiko. Berdasarkan ayat tersebut dalam sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus menunjukan bahwa hanya keputusan Allah yang akan menentukan hasilnya. Uraian tersebut menunjukan bahwa risiko tidak dapat dihindarkan, namun diminimalisir agar tidak terjadi risiko-risiko yang signifikan, serta setiap aktivitas kehidupan manusia harus menggunakan manajemen. Proses Manajemen akan memperkecil potensi terjadinya risiko. .

Selain ayat diatas, QS. Yusuf ayat 46 – 49 juga menjelaskan pentingnya mempersiapkan proses manajemen risiko.

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ
وَسَبۡعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ لَّعَلِّيٓ أَرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ
يَعۡلَمُونَ ٤٦

Artinya: (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا
مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧

Artinya: (47). Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

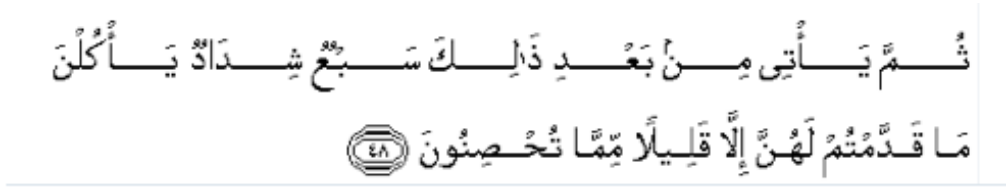

Artinya: (48). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

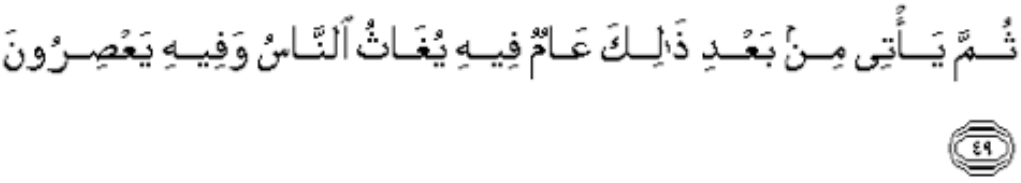

Artinya: (49). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harus mempersiapkan masa sulit atau masa paceklik. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada 7 tahun masa panen diikuti 7 tahun masa paceklik, hendaknya menyimpan hasil panen tetap dalam bulirnya sebagai cadangan saat paceklik tiba. Hal tersebut membuktikan bahwa harus mempersiapkan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO DI BNI SYARIAH

BNI Syariah terus berupaya dalam meningkatkan efektifitas manajemen risiko, mengingat perkembangan perbankan di Indonesia yang semakin pesat yang diiringi dengan peningkatan eksposur risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perbankan.

Manajemen risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka BNI Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Penerapan Manajemen Risiko BNI Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BNI Syariah telah menerapkan prinsip 4 pilar manajemen risiko sesuai yang diamanatkan oleh PBI tersebut.

Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, BNI Syariah membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha BNI Syariah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Manajemen Risiko di BNI Syariah, didasarkan oleh Unit manajemen risiko di BNI Syariah merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap unit bisnis maupun terhadap unit satuan audit internal. Namun ketiga unit tersebut saling berkaitan dan berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line*, *second line,* dan *third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses

pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu atau mengabaikan unit operasional kerja lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko BNI Syariah terdiri dari Dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko *(risk oversight)* melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko *(risk policy)* dibantu oleh Komite-komite dibawah Direksi, yaitu Komite Kebijakan dan Risiko serta Komite Asset dan Liabilitasi. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis, internal audit dan unit kerja kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko dan pengendalian risiko.

Mengingat dalam kelangsungan usaha bisnis bank dipengaruhi oleh eksposur risiko baik yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, maka BNI Syariah memastikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bagi setiap kegiatan operasional dan bisnisnya.
Manajemen risiko BNI Syariah ditujukan untuk menjaga modal Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan profit *risk-return*, meningkatkan nilai Perusahaan serta melindungi reputasi Bank.

Komite Pemantau Risiko

Komite pemantau risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris dengan melakukan evaluasi atas kebijakan umum manajemen risiko, melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaanya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi peenerapan Manajemen Risiko oleh Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan (ERD).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite pemantau risiko mengadakan rapat secara berkala dengan divisi manajemen risiko dan kebijakan Perusahaan (ERD), Membahas isu-isu terkini, profil risiko, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan manajemen risiko di BNI Syariah serta hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko

BNI Syariah telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang disebut Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), dimana komite ini beranggotakan mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif terkait.

Board of Management di bantu oleh Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) sebagai komite tertinggi dalam sistem Manajemen Risiko BNI Syariah. KKR bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional. KKR bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, menetapkan limit dan kewenangan. Rapat KKR dilaksanakan secara insidentil namun sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu tiga bulan.

Salah satu wewenang dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada *Board of Management* yang berkaitan dengan hal –hal antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan, strategi, pengelolaan dan pedoman manajemen risiko
b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko
c. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*).
d. Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio Pembiayaan yang sehat dan *profitable*.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

BNI Syariah telah memiliki satuan kerja manajemen risiko yang biasa disebut dengan divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan (ERD). Struktur organisasi divisi manajemen risiko dan kebijakan Perusahaan (ERD) sesuai dengan ketetapan direksi No.ORG/24/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014. Berikut struktur organisasi ERD antara lain:

Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan (ERD) dipimpin oleh seorang kepala divisi yang bertanggung jawab langsung kepada direktur risiko dan kepatuhan. Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan (ERD) dibawah pemimpin divisi terdiri atas pengelolaan risiko pembiayaan, pengelolaan risiko pasar, operasional & lainnya, pengelolaan integrasi risiko & anti *fraud* dan pengelolaan kebijakan & prosedur.

Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan bersifat independen dari satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan struktur organisasi manajemen risiko yang dibawahi oleh direktur risiko dan kepatuhan . Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur Risiko dan Kepatuhan. Berikut adalah wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko, antara lain:

a. Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui direksi
b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*.
c. Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
d. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru.
e. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model).
f. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada Komite Kebijakan & Risiko sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
g. Mengevaluasi independensi dan efektifitas infrastruktur pengelolaan risiko Bank secara rutin.
h. Fungsi *oversight* bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio Bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.
i. Mendukung Komite Kebijakan & Risiko untuk menyiapkan usul-usul strategi dan kebijakan manajemen risiko Bank dan bersifat independen serta bebas dari unsur kegiatan bisnis secara langsung.
j. Mendukung Komite Kebijakan & Risiko terhadap pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan limit eksposur dan risiko.
k. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara individu, laporan profil risiko terintegrasi, Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB-RBBR) dan Laporan Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko secara berkala kepada Direktur Utama atau Direktur Risiko dan Kepatuhan dan Komite Kebijakan & Risiko yang selanjutnya akan disampaikan ke regulator, BNI dan Dewan Komisaris.
l. Membuat dan melakukan pemantauan limit risiko untuk masing-masing unit bisnis.
m. Melakukan validasi dan sertifikasi terhadap *Standard Operating Procedure*. Buku Pedoman Perusahan (BPP) atau SOP lainnya.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko BNI Syariah secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Bank secara menyeluruh, meningkatkan kinerja, meminimalisir kerugian yang akan terjadi dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko paling kurang mencakup 4 pilar, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
   Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan penerapan manajemen risiko di BNI Syariah dan menetapkan struktur organisasi manajemen risiko, Selain itu, Dewan Pengawas Syariah berfungsi melakukan evaluasi atas kebijakan Umum Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan Pemenuhan Prinsip Syariah.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
   Salah satu Penerapan Manajemen risiko di BNI Syariah didukung oleh ketersediaan dan kecukupan kebijakan, prosedur dan penerapan limit yang ada dalam mendukung aktivitas bisnis. Proses tersebut ditetapkan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan umum manajemen risiko disusun sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Dalam hal pengendalian risiko, penerapan manajemen risiko didukung dengan penetapan limit risiko yang sesuai dengan *Risk appetite* dan *risk tolerance* di BNI Syariah.

3. Kecukupan Proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Salah satu cakupan pilar manajemen risiko adalah kecukupan terhadap proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko. Proses tersebut sudah terintegrasi dengan baik dan merupakan proses yang tidak dapat terpisahkan. BNI Syariah telah menerapkan proses tersebut pada 10 risiko yang terpapar di bank syariah. Selain itu, BNI Syariah telah didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang berfungsi menginformasikan seluruh proses manajemen risiko kepada manajemen.

4. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh
   Sistem pengendalian internal yang dimiliki BNI Syariah dilakukan secara berlapis, artinya semua pihak turut melakukan fungsi internal yang melekat di BNI Syariah, antara lain:
   - Pengendalian Internal yang bersifat Preventif
     BNI Syariah telah melakukan pengendalian internal tersebut, salah satunya dengan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang berfungsi untuk mengawasi fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, PBI atau Peraturan Perundang-undangan.
   - Pengendalian Internal yang bersifat Kuratif
     Dalam hal pengendalian yang bersifat kuratif, BNI Syariah memiliki Satuan pengawasan *Intern* (SPI) yang bertanggung jawab untuk memastikan segenap unit telah mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko.
   - Penerbitan *Standard Operating Procedure* (SOP)
     BNI Syariah telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai landasan dalam operasional Bank. Setiap penerbitan SOP atau ***review*** SOP harus melalui mekanisme sertifikasi dan persetujuan. Sertifikasi SOP dilakukan oleh divisi ERD manajemen risiko dan kebijakan Perusahaan, namun sebelum melakukan sertifikasi, SOP harus di validasi terlebih dahulu oleh unit-unit terkait.
   - Pengendalian Internal oleh Dewan Pengawas Syariah
     Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa produk dan jasa bank yang dikeluarkan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

JENIS RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Fokus pengelolaan risiko BNI Syariah terutama jenis-jenis risiko yang ditetapkan oleh regulator sebanyak 10 risiko yang terdiri dari risiko

kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Sejalan dengan bisnis bank yang semakin kompleks yang diiringi dengan eksposure risiko yang semakin meningkat, BNI Syariah terus berupaya melakukan pengelolaan risiko secara proaktif dan antisipatif, antara lain melalui *stress testing* dan penyusunan *contingency plan*.

Manajemen risiko pada aktivitas fungsional BNI Syariah meliputi atas 10 (sepuluh) jenis risiko sebagaimana penjelasan berikut:

1. Risiko Kredit
   Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko kredit memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati" (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014)

   Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di BNI Syariah dilakukan secara terintegrasi oleh unit bisnis, unit operasional, dan unit risiko kredit. Dalam pelaksanaan, didukung oleh sistem yang terintegrasi dan dilakukan secara *end to end*. Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko kredit adalah sebagai berikut:
   - Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi
   - Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan
   - Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
   - Faktor eksternal

2. Risiko Pasar
   Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko pasar memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan." (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014). Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko pasar adalah sebagai berikut:
   - penilaian volume dan komposisi portofolio
   - potensial kerugian (potensial loss) dari risiko *Benchmark* Suku Bunga dalam *Banking Book* (RBBR)
   - Strategi dan kebijakan bisnis

3. Risiko Likuiditas
   Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko likuiditas memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank." (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014) Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas adalah sebagai berikut:
   - Komposisi dari Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif
   - Konsentrasi dari aset dan kewajiban
   - Kerentanan pada kebutuhan pendanaan
   - Akses pada sumber-sumber pendanaan

4. Risiko Operasional
   Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko operasional memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank." (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014). Kerangka kerja risiko operasional mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia yang sejalan dengan ketentuan internasional (Bassel) serta ketentuan internal Bank. Saat ini, BNI Syariah telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) dan kebijakan yang mencakup risiko operasional, yaitu Kebijakan *Bussiness Continuity Management* (BCM), Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko khusunya bab Risiko Operasional, Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembukuan Beban Risiko Operasional (BRO) dan lain-lain.

   BNI Syariah pun menyusun langkah-langkah mitigasi untuk produk dan aktivitas baru yang berisi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan Sistem

MANAJEMEN RISIKO

Informasi Manajemen Risiko terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko. Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko operasional adalah sebagai berikut:

- Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
- Sumber Daya Manusia
- Teknologi Informasi dan Infrastruktur pendukung
- Kejadian *Fraud*, baik internal maupun eksternal
- Kejadian Eksternal

5. Risiko Hukum

Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko hukum memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis." (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014).

Risiko hukum dapat terjadi di seluruh aspek transaksi dan operasional yang ada di BNI Syariah, termasuk pula perjanjian yang dilakukan nasabah maupun pihak lain yang dapat berdampak terhadap risiko-risiko lain antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko reputasi maupun risiko likuiditas. Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko hukum adalah sebagai berikut:

- Faktor Litigasi
- Faktor Kelemahan perikatan
- Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan

6. Risiko Stratejik

Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko stratejik memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis." (SEOJK No.10/ SEOJK.03/2014).

Manajemen Risiko Stratejik dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan strategis (*planning and budgeting*) yang mencakup penyelarasan strategi Perusahaan. Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko stratejik adalah sebagai berikut:

- Kesesuaian Strategi dengan kondisi Lingkungan Bisnis
- Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi berisiko rendah
- Posisi Bisnis Bank
- Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)

7. Risiko Kepatuhan

Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko kepatuhan memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah." (SEOJK No.10/ SEOJK.03/2014).

Pada prakteknya, aktivitas bisnis Bank terkait dengan banyak Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN) dan lain-lain.

Mengingat banyaknya ketentuan terkait, maka manajemen risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan budaya kepatuhan di setiap aktivitas bisnis dan jenjang organisasi bank sekaligus memitigasi munculnya kejadian risiko kepatuhan. Parameter/ Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- Frekuensi pelanggaran yang dilakukan
- Pelanggaran terhadap ketentuan atau standard bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu

8. Risiko Reputasi

Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko reputasi memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.." (SEOJK No.10/ SEOJK.03/2014).

Cakupan risiko reputasi cukup luas dan tidak

terbatas hanya pada reputasi dari sebuah bank saja, namun dapat memicu risiko lainnya bahkan risiko reputasi dapat berdampak pada munculnya risiko lainnya. Risiko reputasi pun dapat mempengaruhi kinerja sektor industri perbankan secara menyeluruh.

Kejadian risiko mungkin terjadi hanya pada satu bank yang pengendalian risikonya tidak memadai, selanjutnya reputasi dari masing-masing produk atau sektor dapat mempengaruhi keseluruhan industri perbankan. Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko reputasi adalah sebagai berikut:

- Pengaruh reputasi negative dari pemilik Bank dan Perusahaan terkait
- Pelanggaran etika bisnis termasuk etika bisnis syariah
- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank
- Frekuensi materialitas dan eksposur pemberitaan *negative*
- Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

9. Risiko Imbal Hasil

Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, risiko imbal hasil memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.." (SEOJK No.10/ SEOJK.03/2014). Parameter/Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko imbal hasil adalah sebagai berikut:

- Komposisi dana pihak ketiga
- Strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan
- Perilaku nasabah dana pihak ketiga

10. Risiko Investasi

Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, risiko investasi memiliki definisi sebagai berikut: "Risiko Investasi *(Equity Investment Risk)* adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang di biayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*." (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014). Parameter/ Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko investasi adalah sebagai berikut:

- Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil
- Kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil
- Faktor eksternal

PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

Budaya Risiko

Untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien diperlukan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan budaya risiko manajemen dan pegawai BNI Syariah wajib:

1. Memelihara kredibilitas Perusahaan melalui praktik bisnis yang sehat, menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan nasabah, Pemegang Saham serta masyarakat.
2. Bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan prinsip syariah
3. Berperilaku sesuai dengan budaya Perusahaan dan sesuai dengan Kode Etik Insan BNI Syariah.
4. Memegang teguh prinsip rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan
5. Mengembangkan budaya kepatuhan dan budaya anti *fraud*
6. Menjalankan aktivitas dan kegiatan usaha berlandaskan pada visi dan misi BNI Syariah serta mengacu pada rencana usaha (*business plan*) yang telah ditetapkan.
7. Mengacu pada risiko BNI Syariah sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung terciptanya kinerja Perusahaan yang optimal sehingga terbentuknya reputasi Perusahaan yang baik.
8. Menjunjung tinggi keterbukaan yang bertanggung jawab sesuai dengan praktik GCG.
9. Peka terhadap lingkungan dan tanggap terhadap kebutuhan seluruh *stakeholder*.

Penerapan budaya risiko ini telah dilaksanakan dan diimplementasikan oleh pihak manajemen dan seluruh pegawai BNI Syariah agar terciptanya penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko

Peranan penting dalam mengelola risiko adalah meningkatkan kompetensi pegawainya. Salah satu kunci sukses pelaksanaan fungsi manajemen risiko adalah *risk awareness*. BNI Syariah senantiasa melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran (*risk awareness*) kepada seluruh unit kerja dan karyawan. Beberapa metode yang telah ditempuh BNI Syariah untuk meningkatkan *risk awareness* adalah dengan melakukan ***workshop*** dan pelatihan-pelatihan manajemen risiko dari ***level*** analis hingga Top Manajemen, secara *in house* maupun bekerjasama dengan penyedia jasa lain.

Demi terciptanya sumber daya manusia yang memadai dan untuk memenuhi ketentuan regulator, BNI Syariah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko. Kewajiban Sertifikasi Manajemen risiko bagi pegawai BNI Syariah masih mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia untuk aset di atas Rp10 triliun.

Level	Jumlah Pegawai yang Wajib Memiliki SMR	Jumlah Pegawai yang Telah Memiliki SMR	%
Level 1	734	430	59%
Level 2	338	230	68%
Level 3	152	61	40%
Level 4	26	12	46%
Level 5	5	5	100%
Total	**1258**	**746**	**59.30%**

Jumlah pegawai yang wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 1.258 pegawai. Dari 1.258 pegawai, sebanyak 59.30% telah memenuhi syarat dan sisanya masih terus diikutsertakan dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko. BNI Syariah terus mengembangkan pencapaian sertifikasi manajemen risiko sebagai salah satu bentuk budaya risiko di BNI Syariah.

Selain itu, untuk meningkatkan *awareness* pegawai khususnya pegawai baru, BNI Syariah menumbuhkan budaya risiko dengan cara memberikan pemahaman melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan dan bekerjasama dengan divisi sumber daya manusia.

RENCANA PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

Selain yang telah disebutkan pada bab 4, dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko, BNI Syariah berupaya antara lain untuk memperkuat Sistem Informasi Manajemen Risiko meliputi pengembangan-pengembangan pada sistem informasi yang telah dimiliki BNI Syariah khususnya pengembangan pada aplikasi penyusunan profil risiko untuk risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Pada tahun 2017, akan dikembangkan budaya risiko dan budaya anti *fraud* untuk seluruh level organisasi di BNI Syariah melalui program-program tertentu yang dapat mengembangkan budaya risiko oleh pegawai.

Pada tahun 2016, secara parallel BNI Syariah telah mengambangkan basel III yaitu terkait dengan penerapan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang disampaikan untuk kepentingan konsolidasi ke BNI.

Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Dimana risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank, sedangkan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko

mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip.

Gabungan antara penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut menghasilkan risiko komposit per risiko. Selanjutnya risiko komposit per risiko diberikan pembobotan kembali untuk selanjutnya menghasilkan risiko komposit BNI Syariah.

Penilaian profil risiko menjadi sesuatu hal yang penting, mengingat penilaian profil risiko berpengaruh terhadap peringkat tingkat kesehatan bank berbasis risiko (TKB RBBR) dan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Semakin tinggi penilaian profil risiko, maka semakin tinggi pula peringkat tingkat kesehatan bank berbasis risiko dan semakin tinggi pula modal minimum yang harus disediakan oleh BNI Syariah.

BNI Syariah telah melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk secara konsolidasi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BNI Syariah menghitung dan melaporkan 10 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Hasil penilaian Profil Risiko BNI Syariah per Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Bobot	Penilaian Profil Risiko BNI Syariah Posisi D 2016		
			Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko Komposit
1	Kredit	25,00%	Moderate	Satisfactory	2 (Low to Moderate)
2	Pasar	10,00%	Low to Moderate	Satisfactory	2 (Low to Moderate)
3	Likuiditas	12,50%	Low	Satisfactory	1 (Low)
4	Operasional	12,50%	Low	Satisfactory	1 (Low)
5	Hukum	7,50%	Low	Satisfactory	1 (Low)
6	Stratejik	7,50%	Low to Moderate	Satisfactory	2 (Low to Moderate)
7	Kepatuhan	5,00%	Low	Satisfactory	1 (Low)
8	Reputasi	5,00%	Low	Satisfactory	1 (Low)
9	Imbal Hasil	7,50%	Low to Moderate	Satisfactory	2 (Low to Moderate)
10	Investasi	7,50%	Moderate	Satisfactory	2 (Low to Moderate)

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pendahuluan

Menindaklanjuti POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi keuangan tersebut di atas, BNI Syariah merupakan salah satu lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan BNI bersama anak Perusahaan lainnya (BNI Life, BNI Multifinance, BNI Securities, dan BNI Asset Management) dan BNI sebagai entitas utama.

Pada bulan Februari 2015, BNI telah melakukan pertemuan *Risk Management Committee* (RMC) dengan hasil sebagai berikut:

1. Menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Entitas Utama.
2. Konglomerasi Keuangan BNI meliputi BNI, BNI Multifinance, BNI Securities, BNI Life, BNI Syariah, BNI Asset Management.
3. Menetapkan Divisi ERM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

(SKMRT) serta menunjuk Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Sesuai dengan hal tersebut di atas, berikut struktur konglomerasi keuangan BNI sebagai berikut:

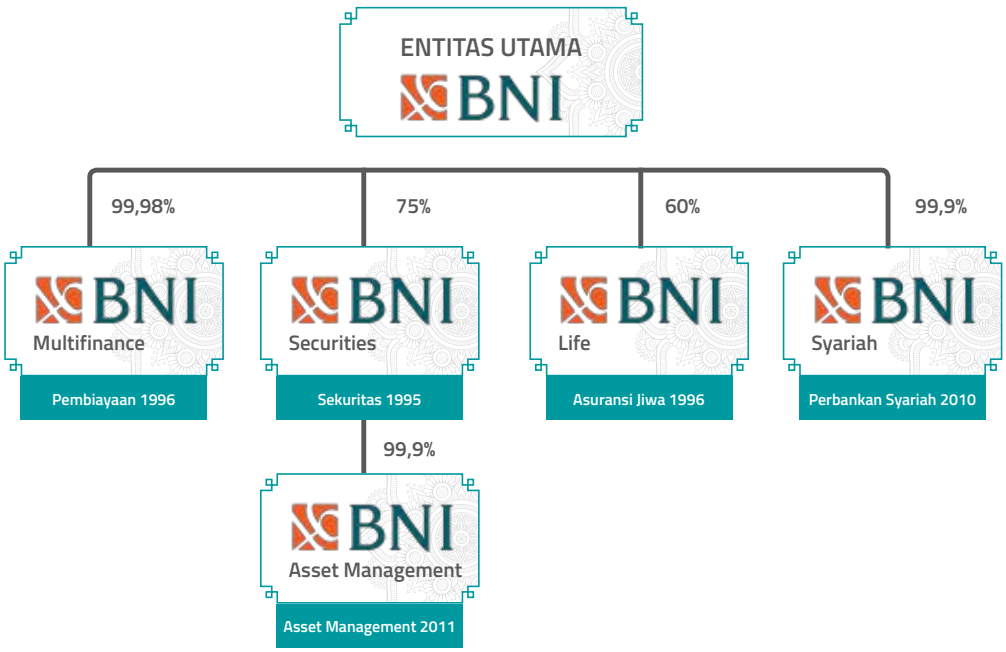

Catatan:
1. Telah sesuai dengan Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 perihal Konglomerasi Keuangan.
2. Telah diputus oleh *Risk Management Committee* (RMC) BNI pada bulan Februari tahun 2015.
3. Telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cfm. Surat Dir/102 tanggal 13 Maret 2015.

Jenis Risiko Terintegrasi yang dikelola oleh BNI Syariah

BNI Syariah mengelola 9 dari 10 risiko yang wajib dikelola oleh konglomerasi keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
   Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi keuangan. Dalam hal ini, risiko kredit yang dikelola oleh BNI Syariah mencakup pula risiko investasi.

2. Risiko Pasar
   Risiko pasar adalah risiko akibat adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki konglomerasi keuangan. Dalam hal ini, risiko pasar yang dikelola oleh BNI Syariah mencakup pula risiko imbal hasil.

3. Risiko Likuiditas
   Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan konglomerasi keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan konglomerasi keuangan tersebut.

4. Risiko Operasional
   Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses interal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional konglomerasi Keuangan.

5. Risiko Hukum
   Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi
   Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK dalam konglomerasi keuangan maupun terhadap konglomerasi keuangan maupun terhadap konglomerasi keuangan secara keseluruhan.

7. Risiko Stratejik
   Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan
   Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup
   Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

BNI Syariah tidak memiliki lini bisnis Asuransi, sehingga BNI Syariah tidak mengelola risiko asuransi.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Laporan profil risiko terintegrasi BNI Syariah terdiri dari 9 risiko yang disampaikan setiap semester kepada BNI Sebagai entitas utama. Selama tahun 2016, BNI Syariah telah 2 kali menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi yaitu periode Juni 2016 dan periode Desember 2016, dengan predikat sebagai berikut:

Periode	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Risiko Komposit
Juni 2016	Low to Moderate	Satisfactory	2 (Low to Moderate)
Desember 2016	Low to Moderate	Satisfactory	2 (Low to Moderate)

Secara keseluruhan, laporan profil risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI periode Juni 2016 dan Desember 2016 berpredikat "***Low to Moderate***".

Kewajiban Penyediaan Modal Terintegrasi

Pada akhir tahun 2015, OJK mengeluarkan peraturan baru No.26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Sesuai dengan peraturan tersebut, konglomerasi keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari Total modal minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan yang dilakukan dengan menghitung Rasio KPMM Terintegrasi.

Secara rutin, BNI Syariah telah melaporkan kewajiban penyediaan modal terintegrasi kepada BNI setiap semester, dengan rasio modal minimum terintegrasi BNI Syariah melebihi yang dipersyaratkan oleh regulator yaitu 100%.

Selama tahun 2016, BNI Syariah, BNI dan Perusahaan anak BNI Lainnya secara rutin mengadakan rapat yang bertujuan untuk menyelaraskan fungsi manajemen risiko terintegrasi. rapat tersebut antara lain membahas tentang penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang didalamnya mencakup penyusunan profil risiko terintegrasi, penyusunan limit risiko terintegrasi dan lain hal yang dipersyaratkan oleh regulator.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Untuk mengetahui efektivitas Sistem Manajemen Risiko dan penerapannya, dilakukan evaluasi dan *review* secara berkala. Secara internal, Dewan komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan kaji ulang atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada unit manajemen risiko Bank. Selain itu, Direksi secara berkala memantau penerapan manajemen risiko di BNI Syariah secara berkala melalui unit manajemen risiko. Secara eksternal, evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh audit eksternal maupun auditor Otoritas Jasa Keuangan. BNI Syariah memandang bahwa efektivitas dari sistem manajemen risiko di tahun 2016 termasuk dalam kategori "*Low to Moderate*" dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berpredikat "*Satisfactory*".

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berkelanjutan dan prinsip kehati-hatian dalam pengurusan dan pengelolaan Bank diperkuat dengan komitmen BNI Syaria untuk meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya yang menekankan kepada pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif membantu Bank dalam menjaga aset, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Sistem Pengendalian Internal Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank. BNI Syariah telah memitigasi risiko kegiatan usaha tersebut dengan berbagai upaya pengendalian internal baik yang bersifat preventif maupun kuratif agar mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

a. Pengendalian Internal yang bersifat Preventif BNI Syariah telah melakukan pengendalian internal tersebut, salah satunya dengan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang berfungsi untuk mengawasi fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, PBI/ POJK atau Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu, WBS merupakan sarana pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi di BNI Syariah melalui pelaporan yang bersifat rahasia. BNI Syariah juga telah memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sekaligus membawahi Divisi Manajemen Risiko & Prosedur Perusahaan (ERD).

b. Pengendalian Internal yang bersifat Kuratif Dalam hal pengendalian yang bersifat kuratif, BNI Syariah memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertanggung jawab untuk memastikan segenap unit telah mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko. Untuk mendukung pengendalian yang bersifat menyeluruh, setiap cabang memiliki *Branch Internal Control* (BIC) yang salah satunya berfungsi untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku atas kesesuaian pelaksanaan operasional, dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh BIC dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan maupun triwulan).

c. Penerbitan *Standard Operating Procedure* (SOP) BNI Syariah telah memiliki *Standard perating Procedure* (SOP) sebagai landasan dalam operasional Bank. Setiap penerbitan SOP atau *review* SOP harus melalui mekanisme sertifikasi dan persetujuan. Sertifikasi SOP dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko & Prosedur Perusahaan, namun sebelum melakukan sertifikasi, SOP harus divalidasi terlebih dahulu oleh unit-unit terkait.

d. Pengendalian Internal oleh Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa produk dan jasa bank yang dikeluarkan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Secara umum, sistem pengendalian internal di BNI Syariah, digambarkan sebagai berikut:

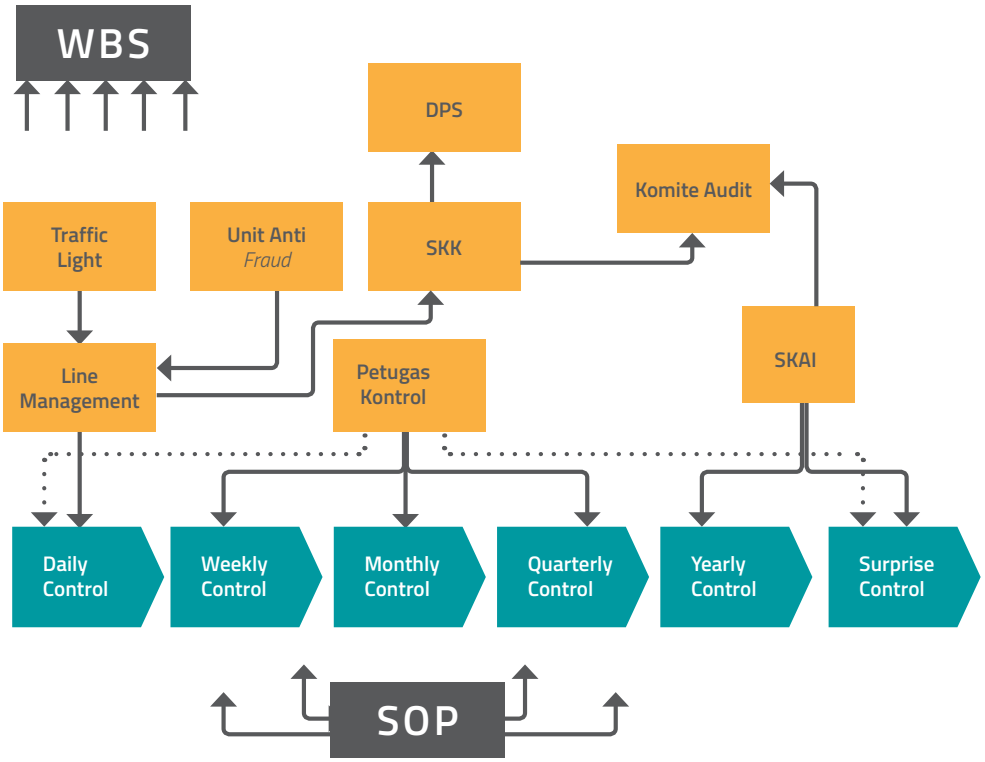

Mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal BNI Syariah adalah:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis.
3. Penerapan *four eyes principle* atau komite dalam proses keputusan pembiayaan.
4. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) dan komunikasi aktif di setiap *level* manajemen.
5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.

Sistem pengendalian internal BNI Syariah menjalankan upaya-upaya mitigasi risiko kegiatan usaha bank dalam rangka menghadapi kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank. Upaya pengendalian internal yang dilakukan bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) agar mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

Pengendalian internal yang bersifat preventif dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank. Lembaga yang terkait serta dengan pengendalian yang bersifat preventif adalah Unit Bisnis sebagai *risk owner* dan Lini Manajemen, Satuan Kerja Kepatuhan (CD), serta Divisi Audit Internal dan unit pendukung lainnya. Pengendalian internal yang bersifat kuratif menjadi tanggung jawab Divisi Audit Internal yang membawahi Auditor Internal dan *Internal Controller* di Kantor Cabang, bersama unit bisnis dan operasional.

Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugas Divisi Audit Internal, Bank berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) serta ketentuan terkait lainnya. Sistem pengendalian

intern dimaksud wajib memastikan:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
4. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh. dasar acuan References Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, BNI Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan praktik terbaik di industri perbankan khususnya perbankan syariah. Secara garis besar, sistem ini juga mengacu pada kerangka internasional yang diterbitkan *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) *of the TreadwayCommission*.

Dasar acuan

Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, BNI Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan praktik terbaik di industri perbankan khususnya perbankan syariah. Secara garis besar, sistem ini juga mengacu pada kerangka internasional yang diterbitkan *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) *of the Treadway Commission*. Mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal BNI Syariah adalah:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis.
3. Penerapan *four eyes principle* atau komite dalam proses keputusan pembiayaan.
4. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) dan komunikasi aktif di setiap level manajemen.
5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.

Pelaksanaan Pengawasan internal

Pelaksanaan Pengawasan Internal Control dan Internal Audit fungsi pengawasan internal BNI Syariah dijalankan oleh Divisi Audit Internal dan Komite Audit. Peran Divisi Audit Internal adalah bertanggung jawab untuk memastikan segenap unit telah mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko dan *governance process*, serta melaporkan setiap penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur dalam audit tahunan. Komite Audit sebagai organ dari Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern. Evaluasi terhadap efektivitas Pengendalian internal *Evaluation on the Effectiveness of Internal Control* Berdasarkan hasil audit/*review* terhadap kegiatan operasional BNI Syariah dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BNI Syariah secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan seperti yang telah dijabarkan dalam laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal selama tahun 2016.

Evaluasi terhadap efektivitas Pengendalian internal

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif dan berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif serta wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Internal Audit bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank.

Internal Audit melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan *fraud*, BNI Syariah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan integralistik sebagai bagian dari kebijakan strategis.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BNI Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank BNI Syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam hal ini Direktur Risiko dan Kepatuhan. Direktur Risiko dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan pelaporan kepada regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama;
8. Melakukan pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris minimal setiap triwulan; serta
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan unit kerja independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risiko & Kepatuhan serta membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Risiko & Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan di BNI Syariah.

Independensi Jajaran Kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan mengacu pada PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BNI Syariah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan maupun Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Kepatuhan telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang disebut dengan *Compliance Charter* yang berlaku dan disahkan sejak tanggal 16 September 2015. *Compliance Charter* adalah dokumen tertulis yang memuat pedoman prinsip dalam mekanisme dan pengelolaan risiko dan fungsi kepatuhan di BNI Syariah yang berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan staf BNI Syariah pada segenap divisi/satuan/unit dan seluruh kantor cabang BNI Syariah. *Compliance Charter* merupakan dasar dari Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan di BNI Syariah. Tujuan dari dibuatnya *Compliance Charter* adalah untuk mematuhi kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha serta mematuhi sepenuhnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kebijakan dasar *Compliance Charter* meliputi:

1. Fungsi Kepatuhan
2. Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Risiko & Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan serta Manajemen dan Pegawai BNI Syariah

4. Independensi dan Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan
5. Hubungan Satuan Kerja Kepatuhan dengan unit dan instansi terkait

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama melalui Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dibawah ini merupakan tabel kegiatan kepatuhan selama tahun 2016:

No	Aktivitas/Program Kepatuhan	2016
1	Pelatihan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	230 peserta
2	Validasi Ketentuan Internal	142 SOP
3	Opini Kepatuhan	17 Opini
4	Pesan Kepatuhan	16 pesan
5	Sosialisasi Peraturan Eksternal	76 peraturan
6	Checklist Uji Kepatuhan Pembiayaan	89 CUK
7	Checklist Uji Kepatuhan penempatan dana (Financing Line)	27 CUK
8	Checklist Uji Kepatuhan pengadaan barang & jasa yang diputus kewenangannya oleh Direksi	8 CUK
9	Checklist Uji Kepatuhan pembukaan/pemindahan jaringan kantor	19 CUK
10	Opini Dewan Pengawas Syariah	24 Opini

Berikut adalah penjelasan atas tabel kegiatan kepatuhan di atas:

1. Budaya Kepatuhan
   Seluruh Pegawai BNI Syariah bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Pada tahun 2016 Satuan Kerja Kepatuhan BNI Syariah telah mengadakan:
   a. Pelatihan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang bertujuan untuk memperkuat Budaya Kepatuhan di BNI Syariah.
   b. Dalam rangka menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan baru yang terkait dengan aktivitas operasional Bank BNI Syariah secara langsung maupun tidak langsung. Selama tahun 2016 telah disosialisasikan 76 (tujuh puluh enam)* ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah

FUNGSI KEPATUHAN

Nasional pada segenap divisi/satuan/ unit yang terkait maupun kepada seluruh kantor cabang BNI Syariah. *(data s.d tgl 20 Desember 2016).

2. Pemantauan Risiko Kepatuhan
   Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku serta prinsip syariah. Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan mitigasi dalam bentuk kegiatan antara lain mencakup:
   a. Melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat pada bank terkait aspek pembiayaan, aspek likuiditas, dan aspek operasional lainnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   b. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan dengan menjaga akurasi dan ketepatan waktu pelaporan yang terkait kepada pihak otoritas pengawas maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Melakukan Uji Kepatuhan melalui media *checklist sheet* dalam proses pembiayaan, pengadaan barang dan jasa dan penempatan dana yang diputus kewenangannya oleh Direksi, pembukaan jaringan kantor dan perijinan produk.
   d. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap divisi/unit/satuan/ cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-undangan dari otoritas pengawas lain yang berwenang dengan tindak lanjut berupa pengkinian kebijakan dan prosedur yang terkait.
   e. Bekerja sama dengan Unit Manajemen Risiko BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan, kecukupan dan pengkinian ketentuan internal yang menjadi acuan pada masing-masing unit Organisasi.
   f. Pemantauan Risiko Kepatuhan melalui Laporan Profil Risiko yang disampaikan secara triwulanan melalui Divisi Manajemen Risiko & Prosedur Perusahaan untuk kemudian dilaporkan kepada otoritas pengawas yang terkait.

   Berikut adalah profil risiko kepatuhan (*inheren*) selama periode tahun 2016:

Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai Risiko	1,08	1,08	1,08	(1,03)
Keterangan	Low	Low	Low	Low

   Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa profil risiko kepatuhan BNI Syariah selama Periode Tahun 2016 dengan kategori "rendah (*low*)".

3. Pemantauan Prinsip kehati-hatian Bank
   Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BNI Syariah terhadap kebijakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Selama periode tahun 2016, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: *(data s.d tgl 20 Desember 2016)
   a. 89 (delapan puluh sembilan) *Checklist* Uji Kepatuhan usulan pembiayaan
   b. 27 (dua puluh tujuh) *Checklist* Uji Kepatuhan penempatan dana (*financing line*)
   c. 8 (delapan) *Checklist* Uji Kepatuhan pengadaan barang & jasa yang diputus kewenangannya oleh Direksi
   d. 19 (sembilan belas) *Checklist* Uji Kepatuhan pembukaan/pemindahan jaringan kantor
   e. 24 (dua puluh empat) opini kepatuhan syariah

4. Pemantauan komitmen Bank dengan Otoritas Berwenang
   Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BNI Syariah terhadap pemenuhan komitmen kepada pihak otoritas pengawas yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 terdapat beberapa komitmen BNI Syariah terhadap Otoritas Jasa Keuangan yang harus dipenuhi di tahun 2016 sesuai dengan batas waktu pemenuhannya.

Berikut adalah tabel informasi pemenuhan komitmen BNI Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi bulan Desember 2016:

No	Keterangan	Jumlah Temuan	Jumlah Penyelesaian	Sudah JT	Belum JT	Penyelesaian komitmen yang telah jatuh tempo
1	OJK 2015	101	101	0	0	100%
2	OJK 2016	123	91	0	32	100%

5. Penyempurnaan Sistem, Infrastruktur dan Kebijakan Kepatuhan
   Dalam memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan di BNI Syariah, Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa menyusun dan melakukan evaluasi terhadap *compliance tools* yang digunakan oleh unit bisnis maupun operasional. Selama tahun 2016 telah dilakukan pembuatan dan/ atau revisi terhadap *checklist sheet* yang digunakan untuk uji kepatuhan terhadap pembiayaan maupun non pembiayaan. Untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan di BNI Syariah, telah dilakukan penyempurnaan terhadap sistem manajemen risiko kepatuhan yaitu *Compliance Information System* yang dapat diakses oleh segenap pegawai BNI Syariah dan berisi informasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Fatwa DSN-MUI beserta pemantauan kewajiban yang harus dipenuhi. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kegiatan uji kepatuhan terhadap setiap rancangan kebijakan dan prosedur dalam rangka penyesuaian menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2016 telah dibuat 142 (seratus empat puluh dua) opini kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan prosedur. *(data s.d tgl 20 Des 2016)

6. Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan
   Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder*. Sumber evaluasi terhadap efektivitas fungsi kepatuhan antara lain evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan sesuai arahannya untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, hasil evaluasi internal dari Divisi Sumber Daya Manusia maupun Divisi Audit Internal, khususnya yang terkait dengan struktur organisasi dan peningkatan kompetensi maupun jumlah SDM, menjadi perhatian dalam pengembangan organisasi Satuan Kerja Kepatuhan dalam memaksimalkan efektifitas penerapan fungsi kepatuhan.

7. Upaya Peningkatan Kualitas Fungsi Kepatuhan Bank
   Dalam proses pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan tugas secara efektif, dilakukan melalui proses pengembangan kompetensi dan kualitas SDM dengan prinsip pengembangan SDM yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Mitigasi Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah timbulnya potensi risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan yang ditujukan untuk memitigasi timbulnya ketidakpatuhan dalam bentuk kegiatan antara lain melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat (*inherent risk*) pada bank yaitu terkait:

Aspek Pembiayaan

1. Kualitas Aktiva Produktif yang terdapat pada kategori *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan ketentuan yang berlaku diharuskan di bawah 5% (lima persen) agar tidak termasuk dalam kategori Bank dalam pengawasan intensif cfm. Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2015 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

FUNGSI KEPATUHAN

NPF BNIS

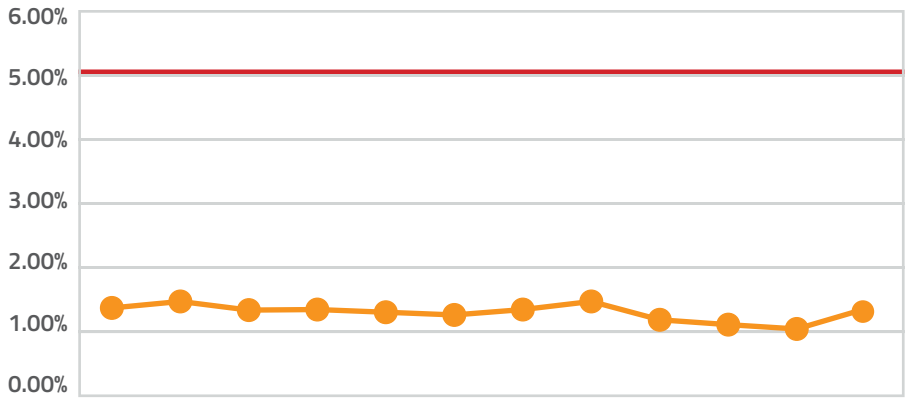

	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16
NPF BNIS	1.63%	1.75%	1.59%	1.60%	1.55%	1.50%	1.60%	1.75%	1.41%	1.32%	1.24%	1.64%

Berdasarkan data NPF di atas, selama tahun 2016 BNI Syariah selalu menjaga kualitas pembiayaan yang bermasalah di bawah 5% (lima persen).

2. Penyisihan Pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) memenuhi ketentuan minimum 100% (seratus persen) cfm. Peraturan OJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait di bawah 10% (sepuluh persen) dan kepada pihak tidak terkait di bawah (individu) 20% (dua puluh persen) serta pihak tidak terkait (Group) 25% cfm. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang BMPK untuk Bank Umum. Selama periode tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK

Aspek Likuiditas

1. Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) BNI Syariah telah memenuhi ketentuan minimum 9% (sembilanpersen) sampai dengan kurang dari 10% di mana bank memiliki profil risiko pada peringkat 2 cfm. POJK No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

KPMM BNIS

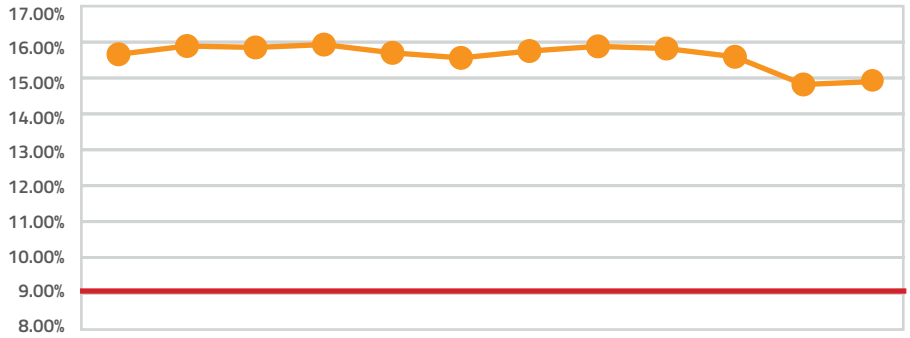

	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Des-16
KPMM BNIS	15.66%	15.89%	15.85%	15.93%	15.70%	15.56%	15.75%	15.88%	15.82%	15.59%	14.82%	14.92

2. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah minimum 5% (lima persen) dan Valas minimum 1% (satu persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia No.15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan ketentuan minimum untuk FDR adalah 80% (delapan puluh persen)

GWM Rupiah BNIS

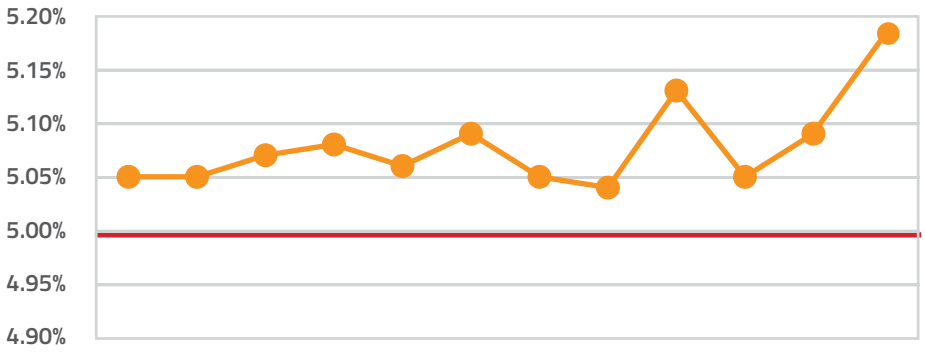

	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16
GWM VALAS BNIS	5.05%	5.05%	5.07%	5.08%	5.06%	5.09%	5.05%	5.04%	5.13%	5.05%	5.09%	5.19%

GWM VALAS BNIS

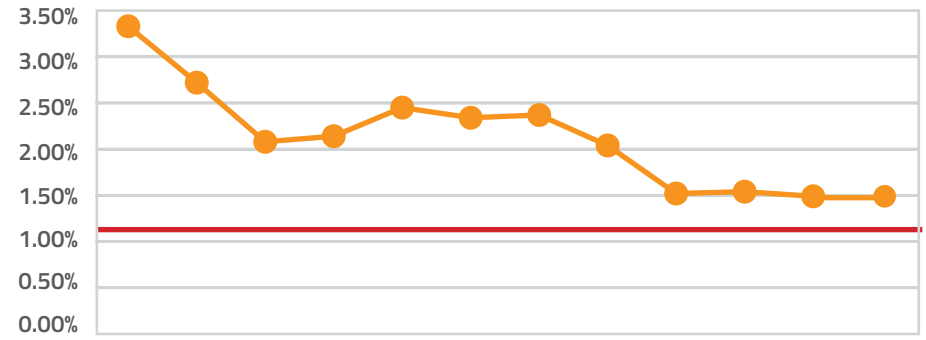

	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16
GWM VALAS BNIS	3.33%	2.72%	2.08%	2.14%	2.45%	2.34%	2.37%	2.04%	1.52%	1.54%	1.49%	1.46%

FDR BNIS

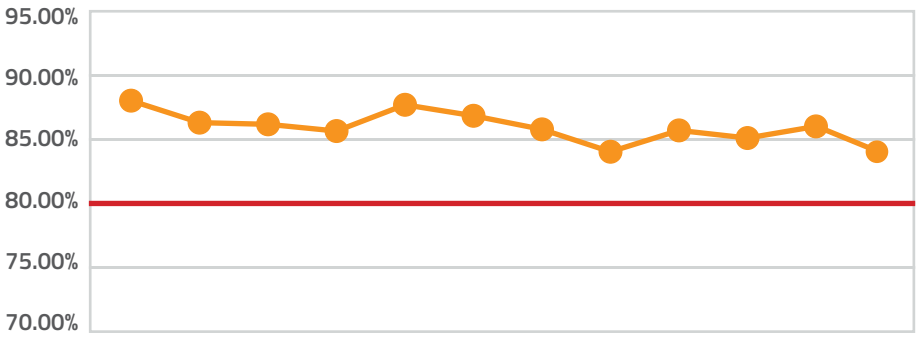

	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16
FDR BNIS	88.09%	86.39%	86.26%	85.74%	87.77%	86.92%	85.87%	84.14%	85.79%	85.20%	86.10%	84.57%

FUNGSI KEPATUHAN

Aspek Pasar

Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan yang berlaku maksimum tertinggi *net open position* 20% (dua puluh persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum.

PDN BNIS

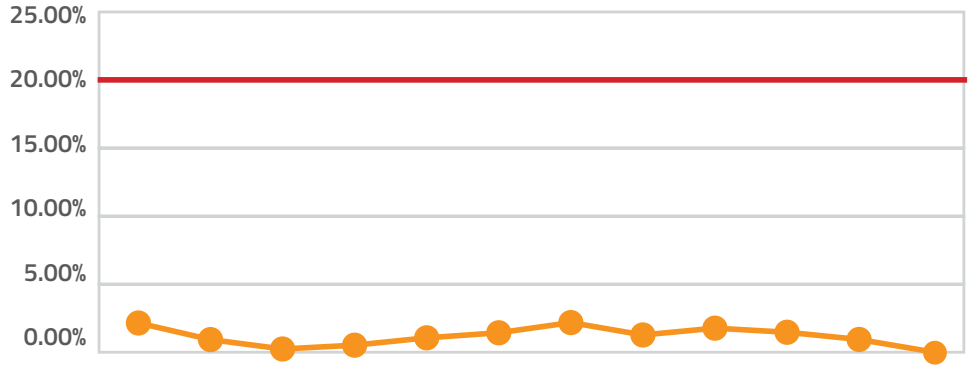

	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16
PDN BNIS	2.15%	0.93%	0.24%	0.52%	1.06%	1.43%	2.18%	1.27%	1.77%	1.47%	0.94%	0.28%

Aspek Lainnya

1. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan dengan menjaga kualitas pelaporan serta memenuhi kelengkapan materi, akurasi dan tepat waktu antara lain terkait pelaporan ke Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan yang bersifat publikasi.
2. Melakukan Uji Kepatuhan melalui media *checklist sheet* dalam proses pemberian pembiayaan dan pengadaan barang dan jasa maupun proses penempatan dana (*financing line*) yang diputus kewenangannya di tingkat Direksi serta pembukaan jaringan kantor dan perizinan produk .
3. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap Divisi/Unit/Satuan/Cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tindak lanjut pengkinian Standar Operasional Prosedur yang terkait dengan ketentuan baru tersebut.
4. Bekerja sama dengan Unit Manajemen Risiko BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan dan pengkinian SOP yang menjadi acuan di masing-masing unit organisasi.

Rencana Kerja Kepatuhan di Tahun 2017

Untuk meningkatkan penerapan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2017, strategi Fungsi Kepatuhan untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Membangun budaya kepatuhan melalui program pelatihan dan sosialisasi *"Compliance Awareness"* serta program pelatihan dan sosialisasi mengenai ketentuan/peraturan baru dan *refreshment* terhadap peraturan eksisting serta penyampaian pesan kepatuhan yang rutin dilakukan dua kali dalam sebulan.

2. Mengelola risiko kepatuhan dengan cara melakukan analisa terhadap peraturan baru serta menyusun dampak dari berlakunya peraturan baru tersebut sehingga setiap unit/pegawai memahami dampak dan pihak yang bertanggung jawab terhadap peraturan tersebut

3. Melakukan evaluasi aktif terhadap kecukupan peraturan internal terkait SOP Pembiayaan Besar

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Demi memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BNI Syariah menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik dalam rangka. Laporan keuangan dan non keuangan BNI Syariah telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.

Selama tahun 2016, transparansi kondisi keuangan BNI Syariah diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terdiri dari:

1. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdapat pada laporan publikasi triwulanan kepada Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) serta dalam laporan tahunan secara tepat waktu.
2. Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan di surat kabar nasional.
3. Mengirimkan laporan *Consolidated Financial Statement* (CFS) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kemudian dimuat dalam *homepage* Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan transparansi kondisi non keuangan yang telah diwujudkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transparansi informasi produk BNI Syariah dilakukan melalui media cetak seperti *leaflet*/brosur/ spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di stasiun TV, radio dan *internet*, serta didukung dengan kemudahan akses *website* BNI Syariah.
2. Pengaduan nasabah BNI Syariah dapat dilakukan dengan menghubungi *call center* 1500046, atau melalui kantor cabang/ kantor pusat BNI Syariah serta melalui *WhistleBlowing System* (WBS). Atas pengaduan nasabah yang dilakukan baik melalui *call center* 1500046 maupun melalui kantor cabang/kantor pusat BNI Syariah akan dikelola oleh divisi operasional, sedangkan pengaduan melalui WBS akan dikelola oleh divisi *Enterprise Risk Management* untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara dan prosedur mengenai pengaduan nasabah.
3. Kepatuhan kecukupan pelaporan internal BNI Syariah sangat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BNI Syariah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang andal.
4. Pengelolaan sistem manajemen informasi BNI Syariah telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

PENDAPATAN DANA NON ZAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Sesuai dengan Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BNI Syariah wajib mengungkapkan pendapatan dana non zakat dan penggunaannya dalam bank syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan dana non zakat yang menjadi sumber dana sosial BNI Syariah antara lain terdiri dari:

1. Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.
2. Dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional.
3. Dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.

Pendapatan dana non zakat, zakat dan infaq selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

	2015	2016	
Saldo Awal 2016			
Infaq	Rp98.219.169.00		
Kewajiban	Rp268.910.915.00		
		Rp367.130.084.00	
Pendapatan selama 2016			
Infaq		Rp593.499.097.00	
Denda		Rp29.443.743.00	
Kebajikan		Rp11.932.532.00	
		Rp634.875.372.00	
			Rp1.002.005.456.00
Pengeluaran	**Infaq**	**Kebajikan**	
Penyaluran untuk bidang Ekonomi	Rp-	Rp6.000.000.00	Rp6.000.000.00
Penyaluran untuk bidang Pendidikan	Rp56.005.000.00	Rp26.000.000.00	Rp82.005.000.00
Penyaluran untuk bidang Sosial	Rp58.500.000.00	Rp97.077.500.00	Rp155.577.500.00
Penyaluran untuk bidang Dakwah	Rp51.775.000.00	Rp141.700.000.00	Rp193.475.000.00
Penyaluran untuk bidang Kesehatan	Rp27.134.000.00	Rp10.000.000.00	Rp37.134.000.00
	Rp193.414.000.00	**Rp280.777.500.00**	**Rp474.191.500.00**
Penyaluran Dana Titipan	Rp493.650.000.00		Rp493.650.000.00
Biaya Administrasi Bank	Rp470.214.00	Rp518.512.00	Rp988.726.00
	Rp494.120.214.00	Rp518.512.00	Rp494.638.726.00
Sisa Dana 2016			**Rp33.175.230.00**

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Layanan serta kompleksitas produk perbankan sangat terbuka terhadap terjadinya peningkatan peluang dalam penyalahgunaan jasa perbankan sebagai salah satu sarana pencucian uang serta pendanaan terorisme, karena pada jasa perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatan. BNI Syariah berkomitmen untuk meminimalisasi penggunaan produk dan layanan sebagai media pencucian uang & pendanaan terorisme. Dalam hal memitigasi adanya penyalahgunaan pada jasa perbankan, BNI Syariah secara berkelanjutan mengoptimalkan implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (PBI APU & PPT), serta prinsip umum yang mengacu secara internasional.

Struktur Organisasi APU PPT

Sebagai bentuk implementasi terhadap ketentuan PBI APU & PPT, BNI Syariah telah membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang melaksanakan program APU & PPT dan menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU & PPT di Kantor Pusat, dalam hal ini UKK BNI Syariah yang menangani Penerapan Program APU & PPT adalah Unit APU & PPT, sebagaimana struktur organisasi berikut:

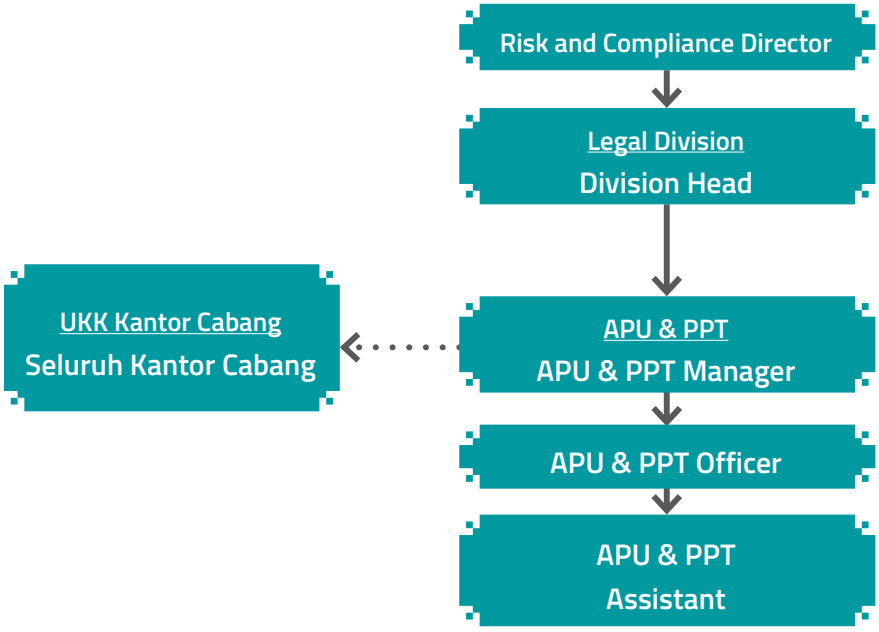

Program APU & PPT Tahun 2016

Dalam rangka memenuhi komitmen untuk meminimalisasi penggunaan produk dan layanan sebagai media pencucian uang & pendanaan terorisme. BNI Syariah secara berkelanjutan mengoptimalkan implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang di dalamnya memuat antara lain:

a. Pelaporan kepada PPATK;
b. Realisasi dan target pengkinian data;
c. Pelatihan APU & PPT;
d. Perubahan/ penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur APU & PPT;
e. Supervisi Kantor Cabang;
f. Penyempurnaan sistem; dan
g. Kajian/ advis terhadap penerapan program APU & PPT pada produk baru.

Realisasi Program APU & PPT Tahun 2016

BNI Syariah telah memiliki dan menerapkan program APU & PPT yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Kegiatan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) yang telah dilakukan selama tahun 2016 yakni sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi penerapan Program APU & PPT kepada segenap pegawai, termasuk refreshment pelatihan/sosialisasi bagi petugas yang berhubungan langsung dengan nasabah, antara lain:
   - Pelatihan Program *Assistant Development Program* (ADP);
   - Pelatihan Program *Officer Development Program* (ODP);
   - Pelatihan Sertifikasi Layanan;
   - Pelatihan kepada Audit Internal terkait APU & PPT;
   - Pelatihan *Refreshment* APU & PPT.
b. Mengikuti program pelatihan/*training*/ sosialisasi APU & PPT, yakni sebagai berikut:
   - Pelatihan mengenai Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
   - Pelaksanaan Pembekalan Materi & Uji Sertifikasi Kepatuhan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
   - *Sharing Knowledge* APU & PPT oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
   - Pelatihan APU & PPT oleh BNI Induk
c. Revisi prosedur pelaksanaan APU & PPT sesuai dengan ketentuan regulator guna memberikan panduan bagi unit kerja terkait;
d. Menindaklanjuti permintaan dari pihak eksternal antara lain PPATK, KPK, BNN, Kepolisian, OJK, dan pihak eksternal lainnya berupa informasi/ data, pemblokiran, pembukaan blokir, penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi;
e. *Monitoring* kegiatan pengkinian data dan proses *splitting* CIF nasabah;
f. Melaksanakan supervisi penerapan program APU & PPT di 12 (dua belas) Kantor Cabang;
g. Melakukan sosialisasi *Branch Sharing Session* ke seluruh cabang;
h. Melaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi

Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT/SIPJT);

i. Menyediakan data nasabah kepada regulator dan aparat penegak hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Program APU & PPT Tahun 2017

a. Pengkinian data *Politically Exposed Person* (PEP) yang terdapat pada aplikasi *Risk Based Approach* (RBA);
b. Pelatihan/sosialisasi penerapan Program APU & PPT kepada pegawai baru dan/ atau *refreshment frontliners*;
c. Pengembangan sistem identifikasi *watch list management* dan transaksi *Walk in Customer* (WIC);
d. Pelaksanaan pembangunan ***single*** *Customer Identification File* (CIF) nasabah;
e. Penyesuaian kebijakan dan prosedur APU & PPT terhadap kebijakan terbaru;
f. Pelaksanaan ***Screening database*** nasabah terhadap *Sanction List* dan *Terrorist List*;
g. Program *Branch Sharing Session* (BSS) kepada segenap cabang secara berkala;dan
h. Supervisi penerapan program APU & PPT kepada 5 (lima) Kantor Cabang dengan kriteria kompleksitas usaha tinggi.

KEBIJAKAN *BUY BACK SHARES & BUY BACK OBLIGATION*

Buy back shares atau *buy back obligation* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2016 BNI Syariah tidak melakukan transaksi *buy back shares* atau *buy back obligation*.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Website

Akses informasi yang komperhensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh Pemegang Saham dan pihak – pihak yang berkepentingan dapat diakses melalui situs http://www.bnisyariah.co.id/ Melalui situs tersebut, para *stakeholder* dapat menemukan banyak konten yang memuat berbagai informasi terkini Perusahaan, seperti *profile* BNI Syariah, produk, dan jasa bank, informasi tata kelola Perusahaan, termasuk laporan keuangan, struktur organisasi, tim manajemen, berita terupdate mengenai BNI Syariah dan sebagainya. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada publik, BNI Syariah senantiasa memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.

News Letter

BNI Syariah memberikan informasi kepada manajemen dan seluruh karyawan mengenai kegiatan internal Perusahaan melalui *news letter* yang bernama "Hasanah Lifestyle" konten *newsletter* merupakan kontribusi dari para insan Hasanah BNI Syariah sehingga menjadikan *newsletter* ini media dari dan untuk insan Hasanah.

Media Elektronik

BNI Syariah menggunakan media elektronik seperti email yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau berkomunikasi seperti mengirimkan/menerima surat dan data yang disampaikan oleh segenap insan Hasanah. Selain itu BNI Syariah selalu menayangkan iklan Perusahaan yang dimilikinya melalui televisi.

Sharia Email Corespondence (SHECO)

BNI Syariah menggunakan SHECO untuk berkomunikasi antar internal BNI Syariah baik kantor cabang maupun kantor pusat. Email ini lebih bersifat formal dan dengan sistem disposisi dari pimpinan ke *staff*.

Forum komunikasi Internal

BNI Syariah menyediakan sarana komunikasi forum komunikasi internal dengan nama Hasanah Forum menjadi sarana berbagi informasi bagi sesama Insan Hasanah. Hasanah Forum dirancang untuk komunikasi 2 arah sehingga antara satu dan yang lain dapat saling berinteraksi.

Annual Report

BNI Syariah menyediakan sarana informasi yang transparan dan akuntable melalui *Annual Report* yang disusun setiap tahunnya. *Annual Report* ini akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi/forum perbankan, asosiasi perbankan, media massa, dan masyarakat.

Sustainability Report

Selain itu, BNI Syariah juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara menyeluruh melalui *sustainability report* yang diterbitkan bersamaan dengan *Annual Report*. *Sustainability Report* akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, dan masyarakat.

Company Profile

BNI Syariah menyediakan profil Perusahaan singkat sebagai media untuk memperkenalkan BNI Syariah kepada *stakeholder* maupun masyarakat. *Company profile* ini berisi tentang struktur manajemen, SDM, kinerja, produk, layanan, dan jaringan BNI Syariah.

Media Engagement Program

Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan relasi dengan *stakeholders*, selama tahun 2016, BNI Syariah melakukan kegiatan *Media Engagement Program* dengan berbagai pihak dengan uraian sebagai berikut:

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bulan	Kegiatan	Target Media	Informasi yang Disampaikan
Februari	1. *Launching* JES Surabaya & Malang	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pembentukan organisasi Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Surabaya-Malang, penyampaian *highlight* perbankan syariah
	2. *Gathering* JES	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Update kegiatan BNI Syariah dan pengumuman lomba penulisan wartawan
April	1. *Press Conference* Kinerja Tw I Tahun 2016	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pemaparan Kinerja BNI Syariah periode Triwulan I Tahun 2016
	2. *Launching* JES Joglo Semar	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pembentukan organisasi Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Jogyakarta, Solo, Semarang, penyampaian *highlight* perbankan syariah
	3. *Launching* JES Makassar	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pembentukan organisasi Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Makassar, penyampaian *highlight* perbankan syariah
Juni	1. *Press Conference*	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	*Launching* Kartu Tap *Cash* edisi Ramadhan
	2. Buka Puasa bersama Jurnalis	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Silaturahmi dengan rekan-rekan media
Juli	*Press Conference* Kinerja Tw II Tahun 2016	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pemaparan Kinerja BNI Syariah periode Triwulan II Tahun 2016
Agustus	*Launching* JES Aceh	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pembentukan organisasi Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Padang, penyampaian *highlight* perbankan syariah
Oktober	Press Conference	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	*Launching* Co-Brand iB Hasanah Card bersama Aerohajj
November	1. *Launching* JES Padang	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pembentukan organisasi Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Padang, penyampaian *highlight* perbankan syariah

Bulan	Kegiatan	Target Media	Informasi yang Disampaikan
	2. *Launching* JES Palu	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pembentukan organisasi Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Palu, penyampaian highlight perbankan syariah
	3. Kunjungan ke Kantor Redaksi Republika	Kunjungan ke Kantor Redaksi Republika	Membina hubungan baik antara BNI Syariah dan media nasional oleh Direksi BNI Syariah
	4. *Press Conference*	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	*Launching Website* Wakaf Hasanah
Desember	1. *Press Conference*	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Program BNI Syariah untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan ibadah umroh
	2. *Press Conference*	Rekan – rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Realisasi Program Duta Hasanah BNI Syariah Tahun 2016

Liputan Media

No	Tanggal	Media	Judul Berita
1	Kamis, 10 Maret 2016	www.cnnindonesia.com	BNI Bakal Suntik BNI Syariah Rp500 Miliar
2	Jumat, 11 Maret 2016	www.kompas.com	OJK Optimistis Kinerja Perbankan Syariah Lebih Baik
3	Rabu, 20 April 2016	www.kompas.com	BNI Syariah Catat Laba Rp75,18 Miliar di Kuartal I 2016
4	Rabu, 20 April 2016	www.antaranews.com	BNI Syariah bidik pembiayaan komersial nasabah induk
5	Rabu, 20 April 2016	www.tempo.co	Triwulan I 2016 BNI Syariah Raup Laba Bersih Rp75,18 Miliar
6	30 Juni 2016	www.mlife.id	BI Komit Perbesar Ekonomi Syariah, Targetkan RI Jadi Kiblat Regional pada 2024
7	30 Juni 2016	www.liputan6.com	Pertamina Jalin Kerja Sama dengan BNI Syariah
8	Rabu, 10 Agustus 2016	www.beritasatu.com	BNI Syariah Sabet "Investor *Best* Syariah *Awards* 2016"
9	Minggu, 28 Agustus 2016	www.sindonews.com	BNI Syariah Hadirkan *Tapcash* Khusus di Keuangan Syariah *Fair* Aceh
10	7 September 2016	www.tempo.co	BNI Syariah Inginkan Skema Baru Pembiayaan KPR
11	28 September 2016	www.beritasatu.com	OJK Dorong Kontribusi Bank Syariah 10% ke Induk Usaha
12	Jumat, 30 September 2016	www.bisnis.com	Begini Langkah BNI Syariah Turunkan Beban Operasional
13	5 Oktober 2016	www.swa.co.id	Gerakan Riba *Amnesty* Versi BNI Syariah

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No	Tanggal	Media	Judul Berita
14	20 Oktober, 2016	www.pikiran-rakyat.com	Ekonomi Global Melambat, BNI Syariah Tetap Catat Laba
15	21 Oktober, 2016	www.swa.co.id	Triwulan III/2016 Laba Bersih BNI Syariah Rp215,23 Miliar
16	Sabtu, 22 Oktober 2016	www.sindonews.com	Kuartal III 2016, Laba BNI Syariah Lebih 37%
17	26 Oktober 2016	www.bisnis.com	Segmen Pembiayaan Properti BNI Syariah Bergeser
18	Kamis, 30 Oktober 2016	www.metrotvnews.com	Laba BNI Syariah Terkerek 37,4%
19	Sabtu, 19 November 2016	www.tribunnews.com	Targetkan Dana Wakaf Rp50 Miliar, BNI Syariah Luncurkan Wakaf Hasanah
20	Selasa, 29 November 2016	www.tribunnews.com	Perbankan Syariah Tak Sabar Tunggu BI Terbitkan Regulasi Baru Giro Wajib Minimum
21	9 Desember 2016	www.bisnis.com	OJK Izinkan BNI Syariah Rilis Produk Griya Swa Karya
22	Jumat, 23 Desember 2016	www.kontan.co.id	Gadai emas BNI Syariah tembus Rp4,1 triliun
23	Jumat, 23 Desember 2016	www.kontan.co.id	Genjot nasabah, BNI Syariah gaet Pegadaian
24	Jumat, 23 Desember 2016	www.bisnis.com	BNI Syariah & Pegadaian Syariah Permudah Transaksi
25	Selasa, 27 Desember 2016	www.swa.co.id	Sinergi BNI Syariah dan Pegadaian Untuk Kemudahan Transaksi

Siaran Pers

No	Tanggal	Judul Siaran Pers
1	13 Januari 2016	BNI Syariah Jalin Kerjasama dengan Kementerian Agama
2	13 Januari 2016	BNI Syariah Mendukung Pembentukan Bank Umum Syariah Masyarakat Aceh
3	25 Januari 2016	BNI Syariah Gelar Syukuran atas Kinerja 2015 yang Gemilang
4	10 Februari 2016	Laba BNI Syariah Tumbuh di Atas 39%
5	15 Februari 2016	Wujud Syukur, BNI Syariah Berikan Bantuan Mobil Jenazah Untuk Masyarakat Palembang
6	20 Februari 2016	Tidak Berhenti Pada Laba Di Atas 39% Bni Syariah Terus Gencarkan Inovasi di Tahun 2016
7	26 Februari 2016	RUPS BNI Syariah Tetapkan Susunan Dewan Komisaris & Direksi Baru
8	29 Februari 2016	BNI Syariah Dorong Pembangunan Usaha Mikro di Wilayah Timur Indonesia
9	4 Maret 2016	BNI Syariah Berikan Hadiah Umrah Kepada Nasabah

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No	Tanggal	Judul Siaran Pers
10	15 Maret 2016	BNI Syariah Dipilih Sebagai Penyedia Jasa Layanan Pendaftaran Porsi Haji Nasabah Pegadaian
11	24 Maret 2016	BNI Syariah Dukung Industri Pariwisata Indonesia
12	4 April 2016	Dukung Kemajuan UKM, BNI Syariah Resmikan Agromart
13	5 April 2016	BNI Syariah Meraih The Best Digital Brand Institusi Keuangan Kategori KPR Syariah Versi InfoBank
14	7 April 2016	BNI Syariah Tingkatkan Kualitas Layanan dengan Relokasi Cabang Cilegon
15	7 April 2016	Upaya BNI Syariah dalam Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah Nasional
16	19 April 2016	Laba BNI Syariah Triwulan I 2016 Tumbuh Lebih Dari 64%
17	11 Mei 2016	Terus Berinovasi, BNI Syariah Hadirkan Tunas *Card* Desain Bebas
18	12 Mei 2016	BNI Syariah Gelar Gerakan Hasanah for Society
19	16 Mei 2016	Sinergi Bisnis BNI Syariah, Gencarkan Pembiayaan dari Berbagai Sektor
20	20 Mei 2016	BNI Syariah Gelar Pelepasan Jemaah Umrah Keluarga Hasanah
21	25 Mei 2016	BNI Syariah Raih Penghargaan Sebagai *The Biggest Contributor Financing Islamic* Bank Versi Karim Consulting
22	30 Mei 2016	Polda Metro Jaya bersama BNI Syariah Selenggarakan Pawai Himbauan Kebaikan Menjelang Ramadhan
23	3 Juni 2016	BNI Syariah Raih *The Best* Indonesia Digital Popular Brand Kategori Tabungan Syariah
24	17 Juni 2016	BNI Syariah Berhasil Mempertahankan Predikat *The Best Service Quality* 2016
25	24 Juni 2016	BNI Syariah Peringati Puncak Milad ke – 6 dengan Muhasabah Hasanah
26	27 Juli 2016	Semester 1 tahun 2016, Laba BNI Syariah Tumbuh 45,73%
27	29 Juli 2016	CSR BNI Syariah Peduli Guru dan Korban Bencana Banjir
28	29 Juli 2016	Pulang Umrah Bawa Hasanah Bagi Masyarakat
29	5 Agustus 2016	BNI Syariah Tawarkan Kemudahan Bagi Nasabah untuk Berqurban
30	11 Agustus 2016	BNI Syariah Pertahankan Predikat Syariah terbaik Versi Majalah Investor
31	26 Agustus 2016	BNI Syariah Berhasil Pertahankan Predikat Kinerja Sangat Bagus 5 Tahun Berturut-Turut Versi Majalah Infobank
32	28 Agustus 2016	BNI Syariah Hadirkan *Tapcash* Edisi Khusus di Keuangan Syariah Fair Aceh
33	8 September 2016	BNI Syariah Tiga Tahun Berturut-turut Raih The Most Reliable Bank dalam Indonesia Banking Award 2016
34	3 Oktober 2016	Menyambut Tahun Baru Islam, BNI Syariah Berikan Bantuan kepada 10.000 Buta Aksara Al-Quran
35	3 Oktober 2016	BNI Syariah Raih *The Most Improved Islamic* Bank 2016 dalam *Global Islamic Finance Awards* 2016
36	7 Oktober 2016	Hasanah Lifestyle BNI Syariah dalam Garuda Travel Fair 2016
37	20 Oktober 2016	Alhamdulillah, Laba BNI Syariah Tumbuh di Atas 37%
38	27 Oktober 2016	BNI Syariah Menambah Tiga Penghargaan di Bulan Oktober
39	14 November 2016	BNI Syariah Jalin Kerjasama dengan Lima Lembaga Penyalur Wakaf
40	24 November 2016	BNI Syariah Dukung UMKM Berbasis Syariah
41	23 Desember 2016	Penandatangan Kerjasama BNI Syariah dan PT Pegadaian (Persero) Dalam Layanan Transaksi Pencairan Non Tunai

PERKARA HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Perkara Penting yang sedang dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat

Selama periode tahun 2016, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

Perkara Hukum

Perkara hukum yang dihadapi BNI Syariah baik perdata maupun pidana selama periode 2016 yaitu 29 perkara:

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (berkekuatan hukum tetap)	7	1
Perkara Aktif	19	2
Total	26	3
Total Perkara	**29 Perkara**	

Dari total 29 perkara yang dihadapi BNI Syariah, perkara perdata yang masih berjalan sejumlah 19 perkara dan perkara pidana sejumlah 2 perkara, sedangkan perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* sejumlah 8 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak terdapat perkara yang signifikan.

Pokok Perkara

No	Jenis Perkara	Pokok Perkara
1.	Perdata	▪ 89% dari perkara aktif tahun 2016 merupakan gugatan yang diajukan oleh Nasabah karena keberatan terhadap upaya penyelesaian melalui eksekusi jaminan yang dilakukan BNI Syariah; ▪ 11% sisanya merupakan fiat eksekusi yang diajukan BNI Syariah melalui pengadilan agama
2.	Pidana	▪ Nasabah melaporkan BNI Syariah ke Instansi Kepolisian terkait dengan perbedaan pemahaman mengenai proses lelang; ▪ BNI Syariah melaporkan pegawai non aktif ke kepolisian atas tindakan yang merugikan nasabah (*fraud*)

Dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh BNI Syariah di tahun 2016, tidak terdapat putusan pengadilan yang menghukum BNI Syariah untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril. Sampai dengan Maret 2017 tidak terdapat perkara hukum yang material yang berdampak pada keuangan perusahaan.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal yang terjadi di BNI Syariah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Internal *Fraud* dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)
Total *Fraud*	-	-	2	6	1	-
Telah Diselesaikan	-	-	2	6	1	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	1	1	-	-

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT

Seluruh perkara yang ditangani oleh BNI Syariah di tahun 2016 tidak terdapat sanksi administratif yang diberikan oleh otoritas terkait terhadap BNI Syariah.

Anti Gratifikasi

Sebagai salah satu upaya pencegahan gratifikasi, BNI Syariah menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya (hal ini khususnya dilakukan antara lain pada saat menjelang Milad BNI Syariah atau pada hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha).

Sosialisasi internal budaya anti gratifikasi dilakukan melalui *e-mail blast*, *Sharia E-mail Correspondence* (SHECO), *newsletter*, serta pembagian stiker anti gratifikasi kepada seluruh insan BNI Syariah. Sosialisari eksternal dilakukan melalui surat pemberitahuan tertulis langsung kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan BNI Syariah.

Pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dapat melaporkan melalui:

Website	: www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id
E-mail	: clean@bnisyariah.co.id
Telepon & SMS	: 085-10044-4600
Surat	: Box BSC

PT Bank BNI Syariah
Gedung Tempo Pavilion I Lt.4
Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11
Jakarta Selatan 12950

Kebijakan Anti Gratifikasi

Pengaturan terkait Gratifikasi di BNI Syariah tertuang dalam Kode Etik BNI Syariah serta Pedoman Benturan Kepentingan yang disosialisasikan melalui *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).

Dalam kebijakan anti Gratifikasi BNI Syariah secara tegas diatur bahwa pegawai:

1. Dilarang menerima, memberikan, menjanjikan imbalan/hadiah/cinderamata secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan jabatan/posisinya di Perusahaan;
2. Dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Dilarang memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instansi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah.
4. Pengecualian terhadap pelarangan gratifikasi adalah:
   - Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah;
   - Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar.

Sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perusahaan BNI Syariah lainnya.

ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

Kode etik merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam Kode Etik *(Code of Conduct)*, menjadikan salah satu komitmen Bank terhadap prinsip-prinsip GCG, yang selama ini mendukung Bank untuk mancapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keputusan Direksi No.BNISy/DIR/403, Tanggal 23 Desember 2010, BNI Syariah memiliki Kode Etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja Perusahaan. Kode Etik dan Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun pegawai BNI Syariah.

Kode Etik BNI Syariah

No	Kode Etik	Uraian
1	Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara *kaffah* dan *istiqomah*	Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas & pekerjaannya harus menghindari unsur: a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah *(batil)* b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. d. *Haram*, yaitu transaksi yang dilarang dalam syariah. e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
2	Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (*maslahah*) dan berlaku Universal	Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas/pekerjaannya harus: a. Memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan *kemudharatan* b. Dilakukan dengan semangat *rahmatan lil alamin* yaitu dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3	Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar.	Segenap Insan BNI Syariah mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat yakni: a. Mencatat setiap data transaksi, akuntansi, keuangan BNI Syariah, kekayaan BNI Syariah , kepegawaian dan data lainnya; b. Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya BNI Syariah, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; c. Menyusun laporan serta bertanggungjawab atas isi laporan tersebut.
4	Larangan penyalahgunaan jabatan	Insan BNI Syariah dilarang: a. Untuk menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk: ▪ Keuntungan pribadi ▪ Keuntungan anggota keluarganya ▪ Keuntungan pihak-pihak lainnya b. Menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang serta meminjam fasilitas/sarana kepada nasabah, rekanan atau mitra kerja. c. Memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain yang sejenis yang tergolong atau mengarah kepada tindakan korporasi yang merugikan; d. Untuk bertindak tidak jujur, mengutamakan subyektivitas dalam setiap kebijakan penilaian, misalnya terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan atau penetapan konsultan, pemilihan atau penetapan rekanan, perawatan aset BNI Syariah, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

No	Kode Etik	Uraian
5	Menghindari benturan kepentingan	Insan BNI Syariah dilarang a. Melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi Insan BNI Syariah dan atau merugikan kepentingan BNI Syariah dan atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan jabatannya. b. Memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah. c. Mengambil keuntungan dengan menggunakan aset BNI Syariah, jabatan dan informasi yang seharusnya merupakan keuntungan BNI Syariah; d. Bertindak selaku perantara bagi pihak lain mendapatkan pekerjaan, proyek atau fasilitas dari BNI Syariah yang merugikan BNI Syariah, e. merangkap jabatan sebagai: ▪ Pengurus & Fungsionaris Partai Politik; ▪ Pejabat Umum meliputi Notaris/PPAT; ▪ Pejabat Eksekutif meliputi Kepala Daerah, Kepala Desa; ▪ Pejabat Legistatif meliputi DPD, DPR atau DPRD; ▪ Pejabat Yudikatif meliputi Hakim Ad Hoc; ▪ Pejabat pada jabatan lain yang mensyaratkan tidak adanya rangkap jabatan. ▪ Pengurus Organisasi Masa f. Bekerja untuk kepentingan mitra kerja atau nasabah yang akan atau sedang melakukan kontrak dengan BNI Syariah antara lain sebagai konsultan kecuali mendapat penugasan dari BNI. g. Memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajibannya di BNI Syariah kecuali telah mendapat persetujuan dari Direksi.
6	Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan Cindera mata (*Risywah*)	Insan BNI Syariah dilarang: a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab; b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; c. Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instasi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah; d. Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah diluar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah Kecuali: a. Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah; b. Penerimaan jamuan dan/atau *entertainment* dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar; sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana Korupsi
7	Menjaga nama baik BNI Syariah	Insan BNI Syariah bersikap amanah, berahlak baik, jujur, profesional, cerdas, bertanggung jawab, terbuka dan selalu berpijak kepada nilai Amanah dan Jamah, setia mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan Perusahaan, perundang-undangan yang berlaku, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kode Etik Bankir Indonesia. Insan BNI Syariah tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan nama baik BNI Syariah.

No	Kode Etik	Uraian
8	Menjaga Kerahasiaan Bank	Guna menjaga kerahasiaan data bisnis, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang termasuk rahasia Bank, Insan BNI Syariah tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan; b. Memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan, baik yang menyangkut keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan BNI Syariah; c. Menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak ketiga lainnya
9	Penggunaan *Corporate Identity*	Insan BNI Syariah dilarang untuk menggunakan *Corporate Identity* baik berupa logo, kop surat maupun lainnya untuk kepentingan diluar kedinasan, kecuali yang secara jelas diperbolehkan oleh BNI Syariah.
10	Kompetensi	Insan SNI Syariah dslam bekerja, selalu ingin maju dan mengembangkan diri, antara lain dengan memperhatikan kompetesi a. Melaksanakan tugas sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki b. Meningkatkan kornpetensi dan pengembangan diri secara berkelanjutan
11	Menjadi panutan	Insan BNI Syariah agar menjadi panutan (suri tauladan) bagi bawahan, rekan dan partner kerja.
12	Adil	Insan BNI Syariah harus bersikap adil, dengan menempatkan sesuatu sesuai haknya serta memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinva.
13	Pengungkapan informasi	Informasi hanya boleh diberikan oleh pihak yang berwenang dan untuk kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal BNI Syariah. Insan BNI Syariah dilarang: a. Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan; b. Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan; c. Memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai BNI Syariah kepada mitra kerja, nasabah maupun kepada publik; d. Untuk mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan informasi yang tidak menunjukkan perilaku profesional.
14	Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar Insan BNI Syariah	Agar tercipta suasana kerja yang positif, Insan BNI Syariah agar menjauhkan diri dan mencegah serta tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Penekanan Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap bawahan, sesama rekan kerja, untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku. b. Penghinaan Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan tindakan dan atau menggunakan kata kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya. c. Pelecehan Tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.

ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

No	Kode Etik	Uraian
		d. Provokasi Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan politik atau faham tertentu atau kepentingan lain seienis vanq daoat divakini dan dianggap akan dapat membahayakan BNI Syariah e. Persaingan tidak sehat Insan BNI Syariah dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat f. Bertindak apriori Menilai seorang atau lebih Insan BNI Syariah, tanpa didukung fakta, dan menyebarluaskan informasi tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif sehingga produktivitas menurun. g. Menghindari interaksi tidak sesuai ketentuan syariah Dalam berinteraksi dengan atasan, bawahan, dengan sesama rekan kerja agar menghindari interaksi diluar ketentuan syariah
15	Pekerjaan menjadi pembicara	Insan BNI Syariah diperbolehkan untuk menjadi narasumber atau pembicara suatu acara yang terkait bisnis BNI Syariah pada saat jam kerja sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari atasannya.
16	Sumbangan dan keikutseraan dalam partai politik	Insan BNI Syariah dilarang: a. Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan Pemilu maupun kegiatan paftai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik. b. Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon/anggota legislatif. c. Ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.
17	Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja	Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih, dan kondusif sangat berpengaruh terhadap Kinerja Insan BNI Syariah, untuk itu Insan BNI Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah; b. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkotika, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya. c. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan etika kesusilaan; d. Menjaga kebersihan lingkungan kerja tetap bersih, rapi, dan nyaman. e. Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah;
18	Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab	Insan BNI Syariah: a. Tidak diperbolehkan memanfaatkan aset dan fasilitas BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya; b. Tidak menggunakan aset BNI Syariah untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya; c. Wajib menyerahkan seluruh aset yang dibeli dengan mempergunakan dana atau dibeli untuk kepentingan BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama bekerja di BNI Syariah sebelum pegawai berhenti; d. Wajib menyerahkan seluruh aset yang dibeli dengan mempergunakan dana atau dibeli untuk kepentingan BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama bekerja di BNI Syariah sebelum pegawai berhenti;

No	Kode Etik	Uraian
19	Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial	Insan BNI Syariah mempunyai komitmen untuk melaksanakan bisnis yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. BNI Syariah mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, selalu peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat dan berperan aktif membantu penanggulangan masalah-masalah sosial tersebut dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SOSIALISASI KODE ETIK

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. *Website* Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perusahaan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perusahaan dan manajemen Perusahaan.
4. *Standing banner*, Buku Saku, Poster, *flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perusahaan.

IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *whistleblowing system* (WBS). Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2016 pengaduan atas pelanggaran kode etik terdokumentasi secara terintegrasi pada mekanisme WBS.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik BNI Syariah dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen serta ketentuan, dilakukan antara lain dengan:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BNI Syariah untuk menerapkan Kode Etik yang efektif, Jajaran Bank diharuskan membaca, dan memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Surat Tuntunan dan Perilaku Insan BNI Syariah", kode etik dan budaya Perusahaan.
2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai BNI Syariah Komitmen manajemen serta seluruh pegawai BNI Syariah untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya. Komitmen

dipublikasikan melalui *website* Perusahaan.

3. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan
   Setiap Jajaran Bank diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan, hal ini sejalan dengan disusunnya kebijakan turunan Kode Etik BNI Syariah berupa Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan BNI Syariah
4. Pakta Integritas
   Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra BNI Syariah yang yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu terdapat penandatanganan Pakta Integritas Tahunan juga dilakukan oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Pejabat Eksekutif BNI Syariah serta seluruh pegawai BNI Syariah dalam rangka implementasi pengendalian Gratifikasi.
5. Program *Awareness*
   Untuk pegawai baru BNI Syariah akan diadakan program induksi Kode Etik BNI Syariah melalui program *jump start* pendidikan BNI Syariah serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja BNI Syariah terkait kode etik antara lain strategi anti *fraud* BNI Syariah, budaya Kepatuhan, serta budaya layanan.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

BNI Syariah memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Code of Conduct, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, maka sanksi pelanggaran berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Jenis Sanksi

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut.

a. Pengenaan sanksi administratif atas perbuatan pelanggaran Kategori Ringan
   - Teguran Lisan
   - Teguran Tertulis
   - Pernyataan Tidak Puas

b. Sanksi Kategori Berat
   - Surat Peringatan Pembinaan (SPP)/ SP1
   - Surat Peringatan Teguran keras (SPTK)/SP2
   - Surat Peringatan Terakhir (SPT)/SP3
   - Pemutusan Hubungan Kerja/PHK

c. Sanksi Finansial
   Sanksi finansial yaitu mengganti kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang periode 2016, jumlah pelanggaran kode etik sebanyak 120 (seratus dua puluh) kasus dan pengenaan sanksi, yaitu: pemutusan hubungan kerja sebanyak 10 (sepuluh tiga) kasus, sanksi Surat Peringatan Pembinaan (SPP) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus dan 27 (satu) kasus masih dalam proses pengenaan sanksi, SPT 6 (enam), Surat Teguran 40 (empat puluh) kasus.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam mengelola pengadaan barang dan jasa, BNI Syariah mengedepankan kaidah *Good Corporate Governace* (GCG) dengan didukung aplikasi teknologi yang memadai. Dengan proses pengelolaan dan pengadaan yang lebih cepat, fleksibel, efektif, efisien serta akuntabel maka diharapkan dapat menghindarkan Perusahaan dari kehilangan momentum pertumbuhan bisnis.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan aktiva tetap dan logistik yang optimal, maka unit kerja yang melakukan fungsi pengadaan barang, senantiasa melakukan koordinasi secara maksimal dengan unit kerja perencanaan atau permintaan kebutuhan logistik dengan didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai.

PRINSIP DASAR *PROCUREMENT* BNI SYARIAH

Dalam melaksanakan proses *procurement*, perseroan mengacu pada prinsip–prinsip dasar pelaksanaan *procurement*:

1. Efisien
   Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

2. Efektif
   Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar–besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Bersaing atau kompetitif
   Kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan

4. Transparan
   Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan atau jasa yang berminat.

5. Adil/Tidak diskrimatif
   Adil dan Wajar berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.

6. Akuntabel
   Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapta dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

7. Kualitas dan Harga
   Pengadaan barang dan atau jasa harus memenuhi kualitas menurut persyaratan teknis yang ditentukan dan harga yang paling menguntungkan dengan hasil yang optimal.

PAKTA INTEGRITAS

Setiap penyelenggara pengadaan barang dan atau jasa dilingkungan BNI Syariah harus mematuhi etika pada Kode Etik Tuntutan dan Perilaku Insan BNI Syariah yaitu:

1. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara *kaffah* dan *istiqomah*
2. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan dan berlaku universal.
3. Melakukan pencatatan data dan penyusunan Laporan BNI Syariah dengan baik dan benar
4. Larangan penyalahgunaan jabatan
5. Menghindari benturan kepentingan
6. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan Cindera mata (*Riswah*).
7. Menjaga nama baik BNI Syariah
8. Menjaga kerahasiaan Bank
9. Penggunaan *Corporate Identity*
10. Kompetensi
11. Menjadi Panutan
12. Adil
13. Pengungkapan Informasi
14. Menjaga Hubungan Baik (*Ukhuwah*) antar Insan BNI Syariah
15. Pekerjaan menjadi pembicara
16. Sumbangan keikusertaan dalam partai politik
17. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja
18. Menjaga dan menggunakan asset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab
19. Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian lingkungan sosial

KEBIJAKAN *PROCUREMENT*

1. Fungsi–fungsi pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya mengacu pada *azas Good Coporate Governance* dan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.
2. Pengadaan harus didukung tersedianya anggaran yang cukup.
3. Pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh unit–unit organisasi yang memiliki fungsi dan kewenangan pengadaan
4. Setiap pelaksanaan fungsi–fungsi pengadaan barang dan atau jasa dimungkinkan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi melalui sistem *E – Procurement*
5. Meningkatkan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri bagi usaha kecil. Koperasi sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan, dengan tetap mengindahkan ketentuan dan perundang–undangan yang berlaku. Namun demikian, apabila dianggap tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan/disyaratkan dan atau belum diproduksi didalam negeri, maka dimungkinkan menggunakan produk bukan dalam negeri.
6. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pejabat yang berwenang dilingkungan BNI Syariah dalam upaya peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan atau jasa.

PROSES PENGADAAN

1. Alur Proses Pembelian Langsung

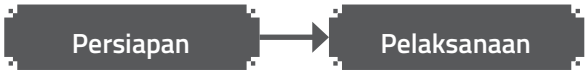

2. Alur Proses Penunjukkan Langsung

3. Alur Prosedur Pemilihan Langsung

4. Alur Proses Pelelangan

PROSES PENGADAAN

5. Skema Proses, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengadaan

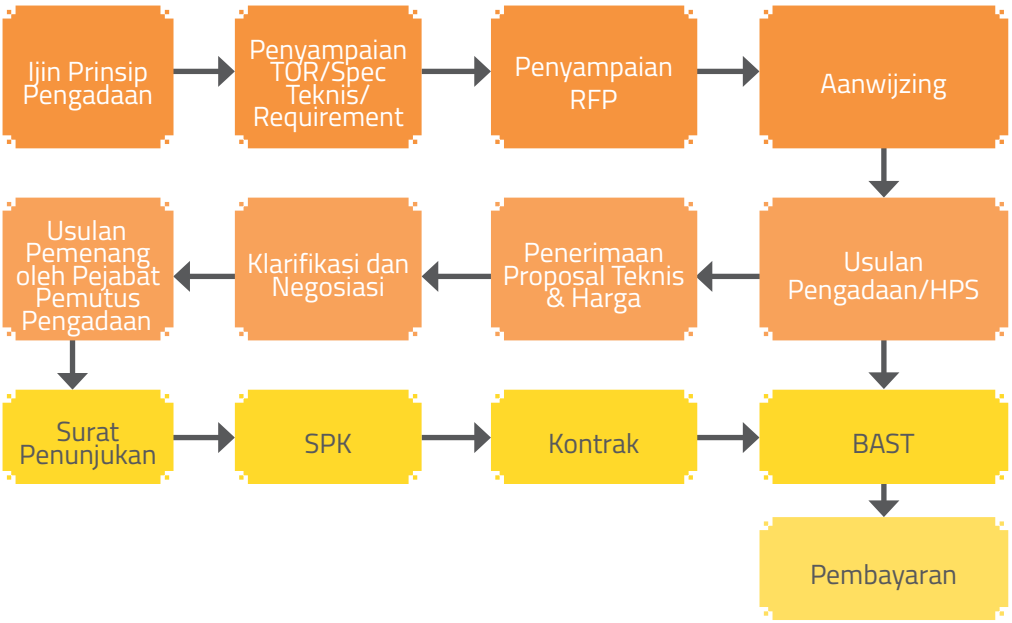

Proses, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengadaan

	Pengguna/User	Unit PFA	Panitia
Budget/Ijin Prinsip	√		√
Policy Product		√	√
Policy Pengadaan		√	√
User Requirement/Spec Teknis	√		√
Penyusunan RFP/Dokumen Pengadaan	√		√
Kualifikasi Vendor(Daftar Rekanan Terseleksi)	√		√
OE/HPS	√		√
Pengiriman RFP/Dokumen Pengadaan	√		√
Penerimaan Proposal		√	√
Evaluasi Teknis	√		√
Sign Off SOW (Pengadaan IT)	+IT		√
Evaluasi Administrasi		√	√
Evaluasi Teknis dan Harga		√	√
Negosiasi		√	√
Nota Usulan		√	√
Kontrak		√	√
Implementasi (BAST)	√	*Legal (Optional)*	√
Payment		*+Accounting*	√

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa dilarang memecah pekerjaan pada lokasi dan bidang pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket pekerjaan pada lokasi dan bidang pekerjaan yang sama menjadi terbuka/pemilihan langsung. Pemecahan paket pekerjaan yang berlainan bidang, diperbolehkan.
2. Dengan mempertimbangan jenis, sifat, nilai barang dan atau jasa, kondisi lokasi dan jumlah penyedia barang dan atau jasa, setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa terlebih dahulu harus menetapkan sistem pengadaan yang paling tepat atau cocok.
3. Setiap pengadaan barang dan atau jasa harus dijamin ketersediaan anggaran sesuai dengan jenis pengadaan (anggaran investasi atau anggaran biaya).
4. Untuk pengadaan dengan batasan nilai di atas 1 miliar atau melalui proses lelang sebelum pengadaan barang/jasa terlaksana setiap unit yang berwenang agar menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas ditandatangani seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa (*User*, panitia/Pejabat, Penyedia Barang), kemudian dilaporkan kepada pejabat pemutus.
5. Pengecualian dalam pengadaan barang dan atau jasa yang menyimpang dari ketentuan pengadaan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari atasan pemutus atau rapat Direksi.
6. Direksi/EVP/Pemimpin Divisi sesuai kewenangannya berwenang untuk memutus pemenang pelelangan terbuka atau pemilihan langsung atau tender generik atau penunjukan langsung yang berbeda dengan yang diusulkan oleh unit yang dibawahnya. Pertimbangan dalam keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Direksi/EVP yang memutus.
7. Setiap pengadaan barang dan jasa dimintakan persetujuan pejabat pemutus sesuai kewenangan.
8. Hasil pengadaan barang dan jasa dilaporkan secara periodik (setiap semester) kepada atasan pemutus.

Pelaksanaan Pengadaan

1. Melalui penyediaan barang dan jasa
   Pengadaan ini dapat dilaksanakan apabila spesifikasi barang yang akan diadakan jelas, lebih efisien, waktu yang tepat.
   Swakelola: kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dilakukan dengan cara direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Bank dengan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

2. Unsur-unsur Pengadaan barang dan jasa
   - Pelaksanaan pengadaan
     * Unit pelaksana pengadaan
     * Panitia pengadaan
     * Tim pengadaan
   - Dokumen pengadaan
   - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
   - Daftar rekanan
   - Pejabat pelaksana klarifikasi dan negosiasi
   - Pejabat pemutus

3. Persiapan Pengadaan
   Pihak yang berwenang melaksanakan proses pengadaan wajib menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang objektif dan tidak memihak kepada salah satu penyedia barang dan jasa.

4. Serah terima Pekerjaan
   Setiap unit kerja pengguna barang dan jasa wajib meyakini kesesuaian barang dan jasa yang diserahkan dengan jumlah dan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian, yang dinyatakan dengan penadatanganan BAST barang atau pekerjaan oleh pejabat berwenang.

5. Jaminan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
   Dalam rangka pengendalian risiko yang mungkin akan timbul atas pengadaan barang dan jasa disebabkan wan prestasi, maka kepada penyedia barang dan jasa dipersyaratkan untuk memberikan jaminan.

6. Perubahan Kegiatan Pengadaan (hanya untuk pekerjaan tambah/kurang untuk bidang konstruksi)

Penambahan pekerjaan tidak boleh lebih dari 20% dari harga kontrak awal. Perintah perubahan pekerjaan harus tertulis, ditindaklanjuti klarifikasi/negosiasi.
Kewenangan memutus adalah pejabat pemutus yang telah disetujui pengadaan tersebut, bila nilai HPS terdapat perubahan maka kewenangan sesuai SK kewenangan memutus.

7. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Untuk Mengatasi Kondisi-kondisi tertentu
   Dalam kondisi memerlukan penanganan yang cepat karena bencana alam dan keadaan kondisi lainnya, sehingga penanganannya harus segera dilakukan, dapat menunjuk langsung, tanpa menerbitkan HPS/ Pemasukan penawaran/penerbitan SPK, biaya *ril cost* bersifat *reimbursable* tanpa menambah *margin*, *Fee* untuk penyedia barang dan jasa berdasarkan kesepakatan dan kewajaran. Apabila terdapat harga yang tidak wajar berdasarkan hasil *review* tersebut, maka unit pelaksana pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan penyedia barang dan jasa yang melaksanakan pekerjaan yang dicantumkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.

   Kepala unit pelaksana pengadaan harus memonitor pelaksana pekerjaan dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pejabat satu tingkat diatasnya dan tim bencana alam.

8. Dokumen dan Proses Pembayaran
   Proses pembayaran meliputi:
   * Penelitian dokumen pembayaran,
   * Persetujuan pembayaran oleh pejabat berwenang,
   * Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah atau mata uang lain sesuai nilai atau harga yang dicantumkan salam SPK,
   * Pencatatan rilisasi biaya setiap pembayaran sesuai dengan mata anggarannya.

Pengadaaan Barang dan Jasa Tahun 2016

Unit Kerja	Nilai Total (Eq.Rp)	Jumlah Pengadaan
Procurement Fix Aset Unit	197.796.970.497	229

Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Bank BNI Syariah melakukan audit secara berkala maupun sewaktu-waktu, melalui Audit Internal dan Eksternal untuk memastikan proses pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR KONSULTAN YANG DIGUNAKAN

Konsultan/Vendor Informasi Teknologi

Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
PT Global Ekanusa	Aplikasi *E-Procurement*	Jasa IT
PT Sangkar Sari Teknologi	*Maintenance* Aplikasi Sistem Integrasi Kliring (SIK) dan Aplikasi	Jasa IT
PT Sentra Paramitra	*Maintenance Renewal Database Monitoring*	Jasa IT
PT Multipolar Technology Tbk	SAN SWITCH Hasanah Payment	Barang IT
PT Madani Intelsysdata	*Maintenance* LSMK XBRL	Jasa IT
PT Sangkar Sari Teknologi	Jasa *Enhancement* Aplikasi SIK & *Bulk Payment*	Jasa IT
PT Xynesis International	*Penetration Test* Katalog Hasanah Online	Jasa IT
PT Mitra Integrasi Informatika	*Renewal Maintenance* HRIS 2016	Jasa IT
PT Ecomindo Saranacipta	Jasa Pembuatan *Mobile Apps*	Jasa IT
PT Hutama Raharja Dellada	*Printer* Fargo	Barang IT
PT Pasifik Satelit Nusantara	VSAT BLG	Barang IT
PT Kreasi Online Indonesia	Jasa *Maintenance Social Media*	Jasa IT
PT Multipolar Technology Tbk	Pengadaan *Renewal* ATS Oracle & *Double Take*	Barang IT
PT Innofast Total Solusi	Pengadaan PC *Staff* 2016	Barang IT
PT Multipolar Technology Tbk	*Database Oracle Standart Edition 2 License*	Barang IT
PT Multipolar Technology Tbk	Jasa VM *Ware License* 2016	Jasa IT
PT Praweda Ciptakarsa Informatika	*Service* Aplikasi *interface* RTGS Gen 2	Jasa IT
PT Mastersystem Infotama	*Upgrade Storage* DC dan DC *Cloud*	Jasa IT
PT Mitra Integrasi Informatika	*Switch* dan *Router*	Barang IT
PT Multipolar Technology Tbk	*Renewal* ATS *Oracle* DBEEE	Jasa IT
PT Karlin Mastrindo	Pengadaan Printer Dot Matrix 30 Unit	Barang IT
PT Multipolar Technology Tbk	*Renewal License* WAS SKNBI-NG	Jasa IT
PT Multipolar Technology Tbk	*Renewal Maintenance Oracle* DBSE 1 RTGS Gen 2	Jasa IT
PT Rekavisitama	Antrian *Digital*	Barang IT
PT Karlin Mastrindo	Laptop dan Otomasi Kantor	Barang IT
PT Hasanah Mitra Teknologi	Pembuatan aplikasi hasanah lifestyle	Jasa IT
PT Multipolar Technology Tbk	*Renewal Maintenance commvault* 2017	Jasa IT
PT Sentra Paramitra	*Renewal maintenance DB Monitoring* BNIS 2017	Jasa IT
PT Sentra Paramitra	*Upgrade Memory Server*	Barang IT
PT Telkom Indonesia	Jaringan Komunikasi *Outlet* BNI Syariah	Jaringan Komunikasi
PT Panca Putra Solusindo	Perangkat Komputer	Barang IT
PT Banyupenta Maskom	Mesin Encoder	Barang IT
PT Gemma Paramitra	Mesin Hitung Uang	Barang IT
PT Pasifi Agung Trijaya	Mesin Hitung Uang	Barang IT

DAFTAR KONSULTAN YANG DIGUNAKAN

Konsultan/Vendor Sumber Daya Insani

Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
PT Global Top Career	Pelatihan *Selling and Negotiation Skill*	Pelatihan Divisi Mikro
PT Duta Transformasi Insani	Pelatihan Pendidikan Dasar	Pelatihan Divisi Mikro
PT Duta Transformasi Insani	Pelatihan Samapta	Pelatihan ODP
PT Sarana Exhirindo	Pegawai BNI Syariah	*Recruitment*
PT Sarana Exhirindo	Asesmen Pegawai BNI Syariah	*Talent Management*
PT BNI Life	Asuransi Kesehatan Pegawai BNI Syariah	*Benefit*

Konsultan/Vendor Layanan Nasabah

Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
PT NRA Tour & Travel	Travel Umrah	Travel Umrah
PT AEROHAJJ	Travel Umrah	Program Travel Umrah Hasanah

Konsultan/Vendor Kendaraan Operasional

Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
PT Agung Solusi Trans	Sewa Kendaraan Operasional	Kantor Pusat dan Kantor Cabang Mikro
PT Adi Sarana Armada Tbk	Sewa Kendaraan Operasional	Kantor Pusat
KOPKAR (Koperasi Karyawan)	Sewa Kendaraan Operasional	Kantor Pusat dan Kantor Cabang Mikro

Konsultan/Vendor Premisis

Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
PT Swadharma Propertindo	Renovasi Ruang Kantor Pusat	Kontraktor
PT Swadharma Propertindo	Renovasi Relokasi *Outlet*	Kontraktor
PT Exitama	Renovasi dan *Relayout* Kantor Pusat	Kontraktor
PT Tirai Kencana Indah	Renovasi *Outlet*	Kontraktor
PT Exitama	Pemasangan Instalasi dan Penarikan *Backbone* Kantor Pusat	Kontraktor
PT Swadharma Propertindo	Renovasi Kantor Wilayah Jabodetabek	Kontraktor
PT Swadharma Propertindo	Penggantian Fascia *Sign Outlet* Mikro	Kontraktor
Sdr. Yohan Kartisa	Pemasangan daya Listrik Baru Kantor Wilayah Jabodetabek	Kontraktor
PT Swadharma Propertindo	Pembongkaran *Fascia & Pole Sign Outlet*	Kontraktor
Sdr. Yohan Kartisa	Pemasangan Daya Listrik Baru di *Outlet*	Kontraktor
PT Tri Asri Desindotama	Renovasi dan *Relayout* Kantor Pusat	Kontraktor
PT Tigaraksa Putrapratama	Renovasi Perluasan *Outlet*	Kontraktor
PT Exitama	Renovasi Relokasi *Outlet*	Kontraktor
PT Exitama	Renovasi dan Perluasan *Outlet*	Kontraktor
PT Ace Quality	Renovasi Relokasi *Outlet*	Kontraktor
PT Swadharma Propertindo	Renovasi Gedung BNI Syariah Makassar	Kontraktor
PT Metta Sumber Abadi	Renovasi Relokasi *Outlet*	Kontraktor
PT Swadharma Propertindo	Pemasangan FASIA dan SAS Kanwil Jabodebatek	Kontraktor

Konsultan/Vendor Lainnya

Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
PT Kraftig Advertising	Penyedia Jasa Kreatif, Produktif dan Penempatan Iklan	Periklanan
CV Nindya Usaha Sejahtera	Sewa Tanaman Hias	Tanaman
PT Datascrip	Workstation Kantor Pusat	*Workstation*
PT Selecta Grage Jaya	Pemasangan ATM	Karoseri
PT Pradipto Multi Sentosa	Genset Kantor Wilayah Jabodetabek	Genset
PT Alexis Cipta Furnitama	Kursi Kerja Kantor Pusat	*Workstation*
PT Agra Jaya	*Workstation* Kantor Pusat	*Workstation*
PT Pradipto Multi Sentosa	Genset	Genset
PT Alexis Cipta Furnitama	*Workstation* Kantor Pusat	*Workstation*
PT Pradipto Multi Sentosa	Genset *Outlet*	Genset
Sully Ayu Wardhani	Konsultan Renovasi dan *Relayout Outlet*	Konsultan Renovasi
Danny Eko Sulistyo	Konsultan Perencana Perorangan Renovasi dan *Relayout Outlet*	Konsultan Perencana
Sonny Widianto	Konsultan Perencana Perorangan Renovasi dan *Relayout Outlet*	Konsultan Perencana
PT Swadharma Propertindo	Konsultan Perencana Perorangan Renovasi *Relokasi Outlet*	Konsultan Perencana
PT Decodia Mitra Selaras	Perencanaan Gedung Makassar	Konsultan Perencana
PT Mitratex Konsultan	Konsultan *Trade Finance* 2016	Konsultan IT
Sdr. Nanang Hermawan	Konsultan Perencana Relokasi *Outlet*	Konsultan Perencana
Sdr. Susilo	Konsultan Perencana Relokasi *Outlet*	Konsultan Perencana
IR. Susilo	Konsultan Relokasi *Outlet*	Konsultan Perencana
PT Garmindotama Mitrasejati	*Souvenir* Haji Paket Pria 2016	*Souvenir* Haji
UD Batik Kresna	*Souvenir* Haji Paket Wanita 2016	*Souvenir* Haji

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

STRATEGI ANTI *FRAUD* (SAF)

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau ppembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BNI Syariah, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BNI Syariah dan/atau menggunakan sarana BNI Syariah sehingga mengakibatkan BNI Syariah, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung*).

Fraud yang terjadi di sektor perbankan dapat menimbulkan risiko kerugian finansial maupun *non* finansial bagi nasabah, bank dan pihak lainnya. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus *fraud* maka diperlukan efektifitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *fraud.*

Agar penerapannya menjadi lebih efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *fraud* sehingga tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di BNI Syariah pada seluruh aspek organisasi, baik oleh Manajemen, maupun pegawai, maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan BNI Syariah.

Efektifitas pengendalian *fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh manajemen. Tujuan strategi anti *fraud* adalah untuk agar dapat memberikan arahan bagi segenap insan BNI Syariah dalam melakukan pengendalian *fraud* dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* di BNI Syariah. Melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud.* Efektifitas pengendalian *fraud* dalam bisnis merupakan tanggung jawab segenap insan BNI Syariah, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh segenap insan BNI Syariah.

LANDASAN HUKUM

1. PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
2. PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. SEBI No.13/ 28 /DPNP, tanggal 09-12-2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.
4. SEBI No.15/15/DPNP tanggal 29-04-2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
5. Keputusan Direksi No.KP/DIR/386 tanggal 14-12-2010 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) BNI Syariah, dan perubahan-perubahannya.

JENIS-JENIS *FRAUD*

1. Kecurangan
2. Penggelapan Aset
3. Pembocoran Informasi
4. Tindak Pidana Perbankan

Bentuk sistem pengendalian *fraud* yang tertuang dalam Strategi Anti *Fraud* dibagi menjadi 4 pilar, yaitu:

1. Pencegahan
   Strategi pencegahan *fraud* merupakan tindakan-tindakan dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan yang dapat merugikan BNI Syariah, nasabah, atau pihak lain melalui:
   a. Membangun Anti *Fraud Awareness*
   b. Identifikasi Kerawanan
   c. *Know Your Employee*

2. Deteksi
   Tahapan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* yang bersumber dari:
   a. *Whistleblowing System*
   b. Pengawasan *Line Management*
   c. Pengawasan oleh Audit Internal
   d. *Surveillance System*
   e. Audit umum dan *suprise* audit

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
   a. Investigasi
      Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud* atau pelanggaran lainnya. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Pelaporan
      Pelaporan terkait kejadian *fraud* ditetapkan sebagai berikut:
      - Pelaporan Kejadian *fraud* Kantor Cabang dan Divisi
      - Pelaporan pelaksanaan Investigasi
      - Mekanisme Rapat Komite Kebijakan Risiko sub Anti *Fraud* (KKR-AF)
      - Pelaporan-pelaporan kejadian *fraud*
   c. Sanksi
      Kebijakan pengenaan sanksi secara internal dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi bertujuan menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*. Kebijakan pengenaan sanksi atas *fraud* mengacu pada pedoman Perusahaan mengenai ketentuan Sanksi Administratif.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
   a. Pemantauan
      Aktivitas pemantauan penanganan kejadian *fraud* dimulai sejak proses investigasi sampai dengan pasca penanganan.
   b. Evaluasi
      Data kejadian *fraud* dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan evaluasi, yaitu dengan melakukan identifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta melakukan langkah-langkah perbaikan.
   c. Tindaklanjut
      Tindaklanjut ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada seluruh unit untuk membuat perbaikan-perbaikan akibat terjadinya *fraud* yang diperlukan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mencegah terulangnya kejadian *fraud* yang diakibatkan oleh kelemahan serupa.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Merupakan pelaksanaan tata nilai dan budaya kerja BNI Syariah serta penerapan strategi anti *fraud* dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI Syariah dan seluruh *stakeholder* untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

Dalam mengelola WBS, Manajemen menerapkan 3 (tiga) *azas* yaitu *azas* kerahasiaan, *azas* tidak diskriminatif, dan *azas* perlindungan. Dengan 3 (tiga) *azas* tersebut, Manajemen berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor, seperti pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Untuk memastikan bahwa seluruh Insan BNI Syariah dan *stakeholder* mengetahui keberadaan WBS, maka BNI Syariah telah melakukan sosialisasi WBS melalui pemasangan poster dan peraga di seluruh cabang BNI Syariah, serta melalui media sosial Twitter (@BNISyariah) dan Facebook (PT Bank BNI Syariah).

Perkembangan dan Revitalisasi WBS

Pentingnya ada WBS dimaksudkan untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah untuk mempermudah manajemen menangani secara cepat dan efektif. Hal tersebut dilakukan mengingat kejadian *fraud* yang dapat menimbulkan dampak kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi BNI Syariah dalam rangka menjaga serta melindungi *asset*/kepentingan BNI Syariah.

Untuk itu, perlunya kepedulian dari segenap Insan BNI Syariah dan seluruh *stakeholder* untuk memanfaatkan WBS sebagai sarana pelaporan pelanggaran untuk kemaslahatan bersama.

Ruang Lingkup Kebijakan WBS

Ruang lingkup kebijakan sistem pelaporan WBS mengatur banyak aspek yang mencakup landasan hukum, unit pengelola, azas-azas WBS, sarana penyampaian laporan, mekanisme laporan, perlindungan pelapor, penanganan laporan, dan tindakan terhadap pelapor yang terindikasi memfitnah.

Sistem pelaporan pelanggaran Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau disebut juga *Whistleblowing System* (WBS) BNI Syariah merupakan sarana untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah. WBS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Sarana yang disediakan untuk menyampaikan laporan melalui WBS BNI Syariah meliputi:

Website	: https://clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id
E-mail	: clean@bnisyariah.co.id
Telepon/SMS	: 085-10044-4600
Surat	: Box BSC

PT Bank BNI Syariah
Gedung Tempo Pavilion I Lt.4
Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11,
Jakarta Selatan 12950

Dalam mengelola WBS, Manajemen menerapkan 3 (tiga) *azas* yaitu *azas* kerahasiaan, *azas* tidak diskriminatif, dan *azas* perlindungan. Dengan 3 (tiga) *azas* tersebut, Manajemen berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor, seperti pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan.

Mekanisme pelaporan WBS

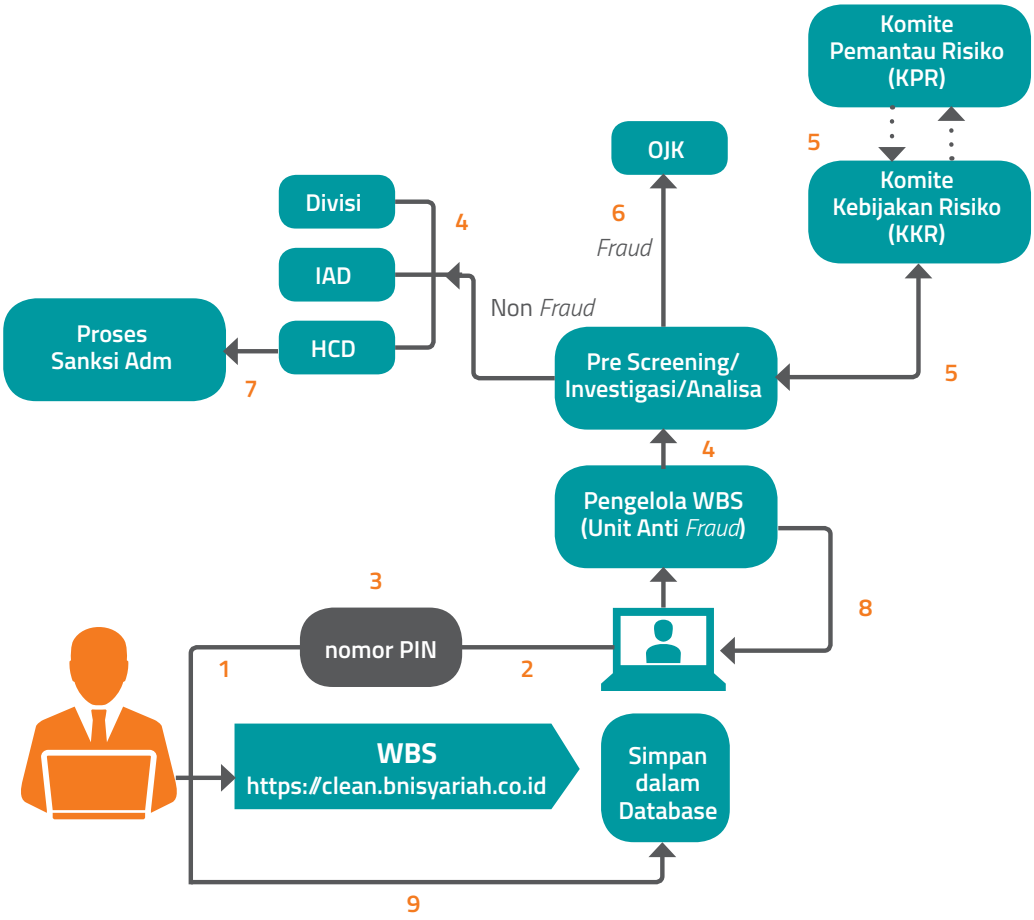

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Keterangan:
1. Laporan dari pelapor melalui *website* WBS https://clean.bnisyariah.co.id. (untuk laporan yang dikirimkan melalui *email*, telepon, sms dan surat akan di-*input* ke *website* oleh pengelola WBS).
2. Laporan akan tersimpan didalam *database* WBS
3. Pelapor akan langsung menerima kode nomor PIN dari sistem melalui *email* yang diinput oleh pelapor.
4. Pengelola WBS akan membuka *database* dan melakukan *pre-screening*, merekomendasikan ke Direksi dan proses investigasi oleh SPI/ Divisi terkait.
5. Pengelola WBS menyampaikan usulan keputusan penetapan pelanggaran *fraud/ non fraud* kepada Komite Kebijakan Risiko atau Komite Pemantau Risiko.
6. Pengelola WBS melaporkan kejadian *fraud* untuk disampaikan kepada OJK paling lambat 3 hari kerja atau semesteran.
7. Proses Sanksi Administratif oleh SDI.
8. Pengelola WBS melakukan *updating* penanganan Laporan WBS pada sistem/ Aplikasi WBS.
9. Pelapor melakukan cek status laporannya dengan menggunakan nomor PIN.

Perlindungan Pelapor

Pada prinsipnya merupakan hak dari pelapor guna memberikan rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran yang disampaikan. Bentuk perlindungan kepada pelapor sebagai berikut:
1. Perlindungan hanya dapat diberikan kepada pelapor dengan kategori *Partial anonymity* dan *Full disclosure*.
2. Pelapor dapat meminta perlindungan dengan menyampaikan melalui surat/ *e-mail*.
3. Bentuk perlindungan terhadap Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/ tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan *azas* kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI Syariah
4. Dengan pertimbangan tertentu, BNI Syariah juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor.
5. Pemberian perlindungan kepada Pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa Pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.
6. Perlindungan tidak akan diberikan atau dihentikan pemberiannya apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor kepada BNI Syariah ternyata palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan Kebijakan WBS.

Penanganan pengaduan

1. Untuk menjaga kerahasiaan, maka identitas pelapor dan laporan yang disampaikannya hanya diketahui oleh Tim WBS BNI Syariah.
2. Untuk memperlancar proses tindaklanjut atas tindak pelanggaran yang dilaporkannya, Tim WBS BNI Syariah dapat meminta tambahan informasi kepada pelapor yang mengungkapkan identitasnya secara *full disclosure*.
3. Kepada pelapor diberikan hak untuk memantau perkembangan status tindaklanjut tindakan pelanggaran dengan cara *login* melalui *website* https://clean.bnisyariah.co.id dengan menggunakan tiket (PIN) yang telah diberikan.

Pihak yang mengelola pengaduan

Setiap laporan yang masuk melalui sarana-sarana pelaporan dikelola oleh pengelola WBS (dhi. Unit Anti *Fraud* Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan). Dalam melaksanakan fungsinya, pengelola WBS mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS.

Laporan WBS

Sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 telah diterima **19 (belas)** laporan melalui WBS BNI Syariah dengan rincian sebagai berikut:

- Melalui *website* : 14 laporan
- Melalui *e-mail* : 5 laporan
- Melalui Telp./SMS : -
- Melalui surat : -

Berdasarkan jenis laporannya, ada 4 (empat) kategori laporan selama tahun 2016, yang mencakup:

No	Jenis Laporan	Jumlah	
		Laporan	Sudah Ditindaklanjuti
1.	Kecurangan	1	1
2.	Kelakuan tidak etis	6	6
3.	Pelanggaran Kepatuhan Syariah	4	4
4.	Lainnya*	8	8
Total		**19**	**19**

*) Keluhan nasabah, komplain pegawai, dan lain-lain.
Keterangan: Lain-lain (*) = Di luar ruang lingkup WBS

BNI Syariah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui WBS sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal itu, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi sebagai berikut:

a. Menyampaikan materi WBS melalui i*n-class training* kepada pegawai baru dan pegawai *existing*.
b. Memasang poster WBS di setiap kantor cabang dan kantor pusat.
c. Mensosialisasikan WBS antara lain melalui media sosial BNI Syariah antara lain facebook (PT.Bank BNI Syariah) dan twitter (@BNISyariah).
d. Mensosalisasikan WBS melalui program *Monday reminder* yang dikirimkan setiap Senin melalui email ke seluruh pegawai, Anti *Fraud Sharing Session* yang dikirimkan ke setiap cabang , dan *Alert System* Anti *Fraud* yang dikirimkan ke setiap cabang mengenai modus kejahatan terbaru/yang sedang marak terjadi.

08 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

"BNI Syariah berupaya untuk terus meningkatkan kontribusinya pada pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengedepankan keseimbangan antara "Profit", "People", dan "Planet".

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	406
Dasar Acuan Pelaksanaan	407
Pengelolaan CSR	407
Prinsip Dasar Pelaksanaan	409
Pilar Program CSR	410
Tanggung Jawab Terhadap Kelestarian Lingkungan	412
Tanggung Jawab Terhadap Sosial Kemasyarakatan	415
Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	422
Tanggung Jawab Terhadap Nasabah	430
Jaringan Kantor	436

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

"Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan". Itulah bunyi butir pertama dari misi PT Bank BNI Syariah. Misi tersebut menegaskan bahwa BNI Syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, melainkan juga memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Berlandaskan pada kesadaran tersebut, dalam menjalankan aktivitas usahanya, BNI Syariah tidak semata mengejar keuntungan finansial, BNI Syariah juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara holistik dan berkelanjutan.

Wujud nyata dari komitmen BNI Syariah untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi secara holistik dan berkelanjutan adalah dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).

DASAR ACUAN PELAKSANAAN

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tepatnya pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Sebagai warga korporasi yang taat aturan, BNI Syariah menjadikan Undang-undang tersebut sebagai salah satu landasan dalam menyelenggarakan program CSR di lingkungan Perusahaan. BNI Syariah menyadari, pelaksanaan program CSR secara normatif merupakan kewajiban moral bagi Perusahaan, tapi lebih dari itu, BNI Syariah juga berharap agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran Perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

PENGELOLAAN CSR

BNI Syariah menganut konsep tanggung jawab sosial Perusahaan adalah dengan menjadikan zakat Perusahaan dan zakat pegawai sebagai anggaran kegiatan sosial. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, selain rambu-rambu Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, juga diperketat dengan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011. Hal fundamental yang menjadi perhatian dalam pengelolaan dana zakat adalah spesifikasi penerima program (sosial) dibatasi dengan kaidah-kaidah syariat Islam seperti tertuang dalam Al Quran (At Taubah : 60).

Yayasan Hasanah Titik

Dalam menjalankan program CSR, BNI Syariah bekerjasama dengan Yayasan Hasanah Titik (YHT), yaitu sebuah lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang mempunyai afiliasi dengan pengelolaan *infaq* dan *shodaqoh* PT Bank BNI Syariah. YHT dibentuk pada Mei 2014. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat berdampak secara ganda (*multiplier effect*) dan berkelanjutan (*sustain*).

Selain menjadi mitra pengelolaan CSR, YHT memiliki nilai strategis lain, yakni menjadi wadah bagi BNI Syariah untuk menyebarkan nilai-nilai hasanah agar lebih dikenal masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan kemandirian masyakarat itu sendiri.

Kemandirian yang berasal dari masyarakat (*people sentry development*) yang ingin dicapai kemudian dituangkan melalui program-program CSR BNI Syariah, terutama melalui program besar Hasanah *Empowerment*.

Salah satu program besar Hasanah *Empowerment* adalah pengembangan program-program ekonomi melalui Duta Hasanah BNI Syariah. Tujuan program ini adalah mencari orang-orang biasa, tapi dapat berbuat luar biasa bagi lingkungannya. Semula program pemberdayaan ini berasal dari program Mutiara Bangsa Berhasanah (MBB), yang merupakan kerjasama antara BNI Syariah dengan Kraftig Agency. Setelah terpilih, ke 13 Duta Hasanah masuk ke dalam program Hasanah Empowerment yang merupakan kerjasama antara YHT dan BNI Syariah.

Di antara Duta Hasanah yakni Nezatullah Ramadhan adalah sosok pemberdaya dibidang lingkungan dan ekonomi kecil bagi anak-anak jalanan di Jakarta dan sekitarnya. Dr. Gamal Albinsaid adalah seorang dokter dari Kota Malang yang memprakarsai pengobatan gratis untuk kaum dhuafa melalui program asuransi sampah. Inovasi beliau bahkan telah mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Inggris. Dibidang ekonomi kecil ada Bapak Budiono, yang mengembangkan produk industri alat rumah tangga di Kota Sragen. Saat telah membina puluhan wirausaha kecil di sekitar tempat tinggalnya. Sementara untuk bidang pertanian, BNI Syariah memiliki Duta Hasanah yang menjadi innovator alat-alat pertanian dan pengelolaannya. Beliau adalah Bapak Yudik Prianto yang berasal dari Kota Wonosobo. Saat ini

inovasinya bahkan telah mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi. Selain mereka masih terdapat 9 sosok Duta Hasanah yang menginspirasi bagi sesama.

Sementara BNI Syariah dan Yayasan Hasanah Titik sendiri mengambil peran melakukan pendampingan dan pengetahuan mengenai wirausaha. Terutama tentang literasi keuangan (syariah), yang masih minim dimiliki oleh masyarakat kebanyakan.

Pengelolaan Dana

Pengelolaan zakat Perusahaan yang digunakan sebagai dana CSR diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dan selanjutnya melalui Surat BNI Syariah No. SFD/6/015 tanggal 31 Mei 2016, BNI Syariah melimpahkan Dana Zakat Perusahaan tahun 2015 kepada Dompet Dhuafa melalui Yayasan Hasanah Titik untuk mengelola Dana Zakat Perseroan ke dalam program – program pemberdayaan yang bersifat langsung maupun jangka panjang, dan bersinergi dengan Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan yang membawahi unit CSR.

Untuk memenuhi kaidah hukum pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang, Yayasan Hasanah Titik (YHT) menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa (DD) sebagai Mitra Pengelola Zakat (MPZ). Kerja sama Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik dengan Dompet Dhuafa telah dilakukan sejak tahun 2015. Hal ini yang menegaskan bahwa secara hukum pengelolaan zakat keluarga besar BNI Syariah oleh Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik sah secara hukum.

Berikut gambaran pola kerja sama pengelolaan zakat Perusahaan dan zakat pegawai oleh Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik.

Penyaluran Dana Sosial BNI Syariah

Aspek Legal Pengelolaan Zakat

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

BNI Syariah berkomitmen untuk berkontribusi optimal dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial lingkungan. Secara prinsip penyaluran zakat juga sangat mempengaruhi perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan, pelestarian lingkungan melalui pengembangan program-program pertanian ramah lingkungan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pendidikan serta yang paling utama adalah penanggulangan kemiskinan melalui program-program karikatif/*charity*.

1. Konstruksi Program

2. Prinsip Pelaksanaan Program

PILAR PROGRAM CSR

Agar lebih fokus dalam menjalankan program CSR, BNI Syariah telah menetapkan 4 (empat) pilar yang menjadi lingkup/landasan pokok kegiatan CSR Perseroan, yaitu :

1. Bidang Pendidikan
   Sasaran utama bidang pendidikan adalah area-area pendidikan Islam, baik berupa program fisik, bantuan pendidikan, maupun peningkatan keahlian dan manajerial. Pesantren, madrasah, institusi-institusi pendidikan lain yang banyak diisi oleh masyarakat kelas bawah/*dhuafa* di kota dan desa menjadi sasaran calon penerima program pendidikan ini.

2. Bidang Ekonomi
   Selain selaran dengan area bisnis BNI Syariah, program pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Program ini dikembangkan untuk membangun usaha-usaha kecil dan menengah di kelompok atau komunitas Islam seperti pesantren, kelompok remaja putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. Target program pemberdayaan ekonomi adalah mendukung keterampilan lokal masyarakat setempat di daerah masing-masing.

3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan
   Program CSR di bidang kesehatan dan lingkungan dikembangkan dengan landasan pertimbangan untuk mengutamakan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan daerah sasaran. Implementasi dari program ini sangat didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menggelontorkan program kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.

4. Bidang Sosial dan Dakwah
   Bidang sosial dan dakwah adalah ruang terluas untuk menyusun program penyaluran CSR. Salah satu fokusnya adalah untuk memberikan dukungan program dakwah para da'i untuk wilayah-wilayah pedalaman nusantara yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Di bidang sosial dan dakwah, BNI Syariah melalui Yayasan Hasanah Titik juga ikut serta dalam membantu saudara-saudara muslim yang sedang mengalami krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Program sosial dan dakwah yang berdampak luas dan langsung kepada kebutuhan dasar adalah Program *One Day One Liter One Family* (ODOLOF).

Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi Biaya CSR

Dana pelaksanaan program CSR BNI Syariah berasal dari zakat Perusahaan, zakat pegawai dan zakat pihak lainnya yang dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik. Pada tahun 2016, jumlah zakat Perusahaan mencapai Rp8,41 miliar, sedangkan zakat pegawai mencapai Rp8,04 miliar, sehingga secara keseluruhan dana dana zakat yang dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik mencapai Rp16,45 miliar. Ditambah dengan saldo dari dana zakat tahun sebelumnya sebesar Rp5,4 miliar, maka total dana yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan program CSR adalah sebesar Rp21,9 miliar.

Adapun realisasi penggunaan dan zakat tersebut untuk program CSR adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nominal
Saldo Awal Dana Zakat 2015	Rp5.371.904.153
Dana Zakat Perusahaan 2016	Rp8.410.330.978
Dana Zakat Pegawai 2016	Rp8.203.575.562
Penyaluran Dana Zakat 2016	Rp18.621.614.421
Saldo Akhir Dana Zakat 2016	Rp3.364.196.272

YAYASAN HASANAH TITIK
LAPORAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
Periode 01 Januari s/d 31 DESEMBER 2016

(Dalam Satuan Rupiah)

Catatan	31 Des 2015	31 Des 2016	Posisi Keuangan 2016
Dana Zakat			
Saldo 2015			5.371.904.153
Penerimaan			
Zakat pegawai & Zakat Perusahaan Bank BNI Syariah		15.741.314.883	
Pengembalian Dana Penyaluran		722.199.476	
Jumlah Penerimaan dan Dana Zakat	5.371.904.153	16.463.514.359,00	
Saldo 2016			**21.835.418.512,25**
Penggunaan Penyaluran Dana untuk Program			
Penyaluran untuk bidang Ekonomi		792.380.143,00	
Penyaluran untuk bidang Pendidikan		2.796.223.700,00	
Penyaluran untuk bidang Sosial		6.750.149.368,00	
Penyaluran untuk bidang Dakwah		1.042.010.000,00	
Penyaluran untuk bidang Kesehatan		495.762.840,00	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		11.876.526.051,00	
Kerjasama Dompet Dhuafa		1.347.707.019,00	
Pemberian Pinjaman Qardh			
Kerjasama Dompet Dhuafa		3.501.334.785,00	
Hak Amil		(1.352.117.211)	
Dana Talangan Kegiatan		(519.146.125)	
Biaya Administrasi Bank		(24.733.230)	
Jumlah Penggunaan Dana Lainnya		(6.745.088.370)	
Saldo Akhir			**3.213.804.091**

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

Kelestarian lingkungan merupakan salah satu misi BNI Syariah. Bahkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup ditempatkan sebagai butir pertama dari misi Perseroan. Hal ini menegaskan bahwa BNI Syariah memiliki komitmen yang sangat besar untuk berperan aktif dalam program pelestarian lingkungan.

Sekalipun kegiatan usaha BNI Syariah memiliki dampak langsung yang relatif kecil terhadap lingkungan hidup, namun BNI Syariah ingin ikut terlibat pada upaya memelihara kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BNI Syariah percaya, lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberlangsungan bisnis Perseroan. Karena itu, dalam setiap kegiatan bisnis Perseroan senantiasa memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sasaran dan Rencana Kegiatan

BNI Syariah ingin memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankannya tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam setiap aspek operasional Perusahaan, BNI Syariah menjadikan lingkungan hidup sebagai faktor pertimbangan. Selain itu, BNI Syariah juga ingin memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup melalui kebijakan yang dikeluarkan Perusahaan, baik yang terkait dengan pihak internal maupun eksternal.

Tahun 2016, BNI Syariah merencanakan untuk menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan program pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Yayasan Hasanah Titik yang menjadi kepenajangan tangan BNI Syariah dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Pelaksanaan Program

- Penanaman 1000 pohon di lingkungan yang berada di daerah terpencil di Dusun Parung Ponteng Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor, BNI Syariah KC Mikro Bogor Kedung Badak bersama dengan Yayasan Hasanah Titik mengadakan Penanaman 1000 pohon. Kegiatan tersebut mengusung tema "Insan Hasanah Peduli Lingkungan. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank BNI Syariah , yaitu Bpk. Imam Teguh Saptono, beserta jajaran General Manager Bank BNI Syariah serta karyawan BNI Syariah Bogor (Reguler dan Mikro), adapun biaya yang dikeluarkan untuk penanaman 1000 pohon sebesar Rp75.000.000.

Upaya Pengurangan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan Peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup, BNI Syariah menerapkan program GEN – Xtra sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan, salah satu upaya tersebut mengurangi

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

penggunaan kertas dan penghematan energi. GEN – Xtra merupakan gerakan efisiensi bersama menuju Hasanah yang pada praktiknya, implementasi GEN – Xtra dimulai dari diri sendiri dan dari hal – hal yang mendasar. Adapun salah satu targetnya adalah untuk meningkatkan *cost efficiency* dengan cara meneliti kembali apa saja yang dilakukan agar lebih terukur dan termonitor dalam bekerja serta dilakukan evaluasi setiap bulannya. Pada praktiknya, hal ini diterapkan melalui efisiensi penggunaan kertas, penghematan listrik, dan efisiensi beban operasional lainnya. antara lain :

GEN-XTRA
Gerakan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja

EMISI
Kendaraan operasional yang ramah lingkungan, penggunaan kendaraan operasional bersamaan

HCIS
Sistem pengelolaan SDM berbasis IT

DAUR ULANG
Menggunakan kertas *two-sided* untuk print

E-BILLING
Pengiriman tagihan paperless melalui email

HEMAT AIR
Penggunaan air yang bertanggung jawab

SHECO
Sistem persuratan berbasis IT

HEMAT ENERGI
Mematikn komputer saat istirahat siang

Dalam menjalankan usahanya, BNI Syariah berupaya untuk terus meningkatkan kontribusinya pada pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip *yang* mengedepankan keseimbangan antara pencapaian Bank di bidang '*Profit*' (profitabilitas), '*People*' (sumber daya manusia) dan '*Planet*' (bumi).

Salah satu bentuk kontribusi pada aspek keberlanjutan, untuk pembiayaan Griya Konstruksi dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengembang Properti, BNI Syariah mencantumkan persyaratan terkait pelestarian lingkungan dengan mewajibkan tersedianya dokumen-dokumen berikut:

1. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
2. Izin Lingkungan
3. Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)
4. Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir
5. Surat Rekomendasi Proteksi Kebakaran
6. Izin Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan
7. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan
8. Rekomendasi Teknis Bangunan
9. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak
10. Rekomendasi Dokumen UKL & UPL
11. Pertimbangan Teknis Pertanahan
12. Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA)
13. Ijin Pemanfaatan Ruang
14. Surat Ijin Pengeboran.

Lebih lanjut, sejak semester ke 2 tahun 2016, Bank menambah persyaratan-persyaratan pelestarian lingkungan berikut bagi setiap Perjanjian Kerja Sama dan Pembiayaan Griya Konstruksi:

1. Pengembang Properti wajib berkomitmen untuk menjaga lingkungan perumahan yang dikembangkan dengan menanam / memberikan 1 pohon / bibit pohon kepada konsumen saat serah terima unit rumah.
2. Penerangan rumah yang dikembangkan para Pengembang Properti diupayakan menggunakan lampu LED.

BNI Syariah senantiasa berkomitmen untuk melestarikan lingkungan , dan bentuk komitmen – komitment tersebut selain di realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ramah lingkungan, mempersyaratkan ke mitra bisnis (nasabah) dalam usaha pengembangan bisnis yang ramah lingkungan, dalam penyaluran pembiayaan (dana), BNI Syariah juga ikut menyalurkan ke sektor usaha hijau seperti pembiayan kepada pengusaha daur ulang plastik, kain perca di segmen Mikro, dan pengelolaan limbah plastik, beras organik, pengelolaan air bersih, pupuk organik. Pembiayaan perkebunan kelapa sawit yang memenuhi RSPO & ISPO di segmen Usaha Kecil dan Menengah.

AMDAL Sebagai Pertimbangan Pembiayaan

BNI Syariah mempersyaratkan adanya dokumen AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dari proyek yang dibiayai. Selain itu penilaian kelayakan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada aspek profitabilitas (*cash flow*) dan ketersediaan jaminan (*collateral*) namun BNI Syariah melakukan identifikasi program yang dilakukan oleh debitur untuk mengantisipasi dampak negatif dari operasional Perusahaan atau proyek.

Walaupun belum sepenuhnya mencantumkan faktor pembangunan berkelanjutan sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan, Bank mendorong para nasabah untuk memperhatikan faktor keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Selama periode 2016, BNI Syariah belum memiliki sertifikasi terkait dengan lingkungan hidup.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP SOSIAL KEMASYARAKATAN

BNI Syariah sangat menyadari membangun program yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkelanjutan tidak seperti membalikkan dua sisi telapak dan punggung tangan. Berkelanjutan adalah memberi, mendampingi dan menjadi mitra. Bagi BNI Syariah tetap melangkah walau hanya satu langkah adalah lebih penting, karena itu artinya setiap hari BNI Syariah selalu menjadi bagian dari kebaikan yang terus meningkat atau bertambah di masyarakat.

Sasaran dan Rencana Kegiatan

Sebagai institusi keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, BNI Syariah ingin agar kegiatan usaha yang dijalankannya tidak hanya memberikan manfaat bagi Pemegang Saham dan internal Perusahaan semata. Tapi, lebih dari itu, BNI Syariah ingin agar kegiatan usahanya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BNI Syariah menjalankan program pengembangan masyarakat secara berkesinambungan yang bukan hanya bersifat phylanthrophi. Hal tersebut dilandasi atas keyakinan BNI Syariah akan dampak yang ditimbulkan dari program tersebut akan lebih besar dibandingkan program yang pemberian bantuan semata.

Pelaksanaan Program

Sebagai sebuah Perusahaan yang ingin terus bertumbuh bersama masyarakat, dalam merancang dan menjalankan program-program pemberdayaan (*empowering program*), setiap aspeknya sangat dipengaruhi oleh nilai, kebutuhan, dan pelibatan elemen lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sehingga diharapkan akan tercipta *people sentry development* atau pembangunan/pengembangan yang berpusat pada masyarakat, yang akhirnya akan menjaga dan menjamin keberlanjutan program yang kami gulirkan.

People Sentry Development (pembangunan yang berpusat pada rakyat)

Untuk menciptakan *people sentry development* BNI Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut; pertama adalah dengan menggulirkan program-program karikatif atau bantuan langsung, yang berfungsi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Program-program seperti ini lebih diutamakan untuk kelompok masyarakat zona merah (fakir/miskin/korban bencana). Sedangkan untuk kelompok masyarakat yang sudah masuk pada level zona kuning miskin, program-program bantuan langsung secara perlahan akan dikurangi, dan mulai didorong program-program peningkatan kapasitas dan edukasi. Selanjutnya saat masyarakat mencapai level zona hijau (keluar dan kategori fakir/miskin namun tetap rentan masuk dalam kategori miskin/fakir), mulailah kami kembangkan program-program ekonomi kelompok dan program penguatan kapasitas lanjutan.

Salah satu contoh yang mudah dan dekat untuk dapat dilihat adalah pemberdayaan ibu-ibu di Ciledug, Tangerang. Sebagai gambaran, ibu-ibu peserta program mempunyai latar belakang yang mirip secara ekonomi, hidup dengan berkeliling di pasar untuk menjajakan dagangan kecilnya, serta Hidup dalam rumah-rumah sewa yang sangat sederhana.

Rata-rata usia peserta program adalah di atas 55 tahun, namun kegigihan mereka mencari penghidupan dunia berbanding lurus dengan semangat memperkaya ilmu akhirat. Faktor-faktor seperti inilah yang menambah semangat kami untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dalam mendampingi peserta binaan. Keseimbangan dalam pencapaian dunia serta nilai-nilai spiritualitas ini juga yang menjadi target *sustainability* program-program pemberdayaan kami.

Program satu liter beras satu hari untuk satu keluarga miskin (*One Day One Litre One Family*/ ODOLOF) plus pemberian layanan kesehatan menjadi *trigger program* yang digulirkan di wilayah perbatasan Jakarta ini. Sampai dengan hari ini, komunitas program ini tetap berjalan dengan salah satu programnya adalah pembelajaran buta aksara arab. Namun, hal yang mengagumkan dan menjadi bukti bahwa *people sentry development* dapat tercipta adalah, saat ini ibu-ibu peserta program telah menciptakan sendiri program ekonomi kecil berbasis kelompok, yaitu pengelolaan keuangan kelompok. Rencananya dalam jangka panjang akan menjadi bibit program pengembangan usaha kelompok berbentuk koperasi.

Program yang difasilitasi BNI Syariah Cabang Pembantu Ciledug ini membuktikan bahwa keberlanjutan dapat tercipta saat masyarakat diberikan program yang tepat (sesuai kebutuhan), merasa dekat (dengan pendampingan oleh sdm lokal yang memahami) dan merasa dihargai sebagai mitra (dengan memberikan layanan terbaik dari BNI Syariah tanpa mengecilkan kondisi ibu-ibu peserta program). Prinsip mendampingi dengan sepenuh hati untuk menemukan solusi telah terbukti dalam peserta program di Ciledug, Tangerang ini.

Pendidikan (*Education Empowering Program*)

Pengembangan program pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan BNI Syariah meliputi seluruh zona kelompok masyarakat. Fungsi program pendidikan pada zona merah kelompok dalam masyarakat adalah dalam upaya membantu pemerintah terpenuhinya standar pendidikan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa.

Untuk zona kuning, program pendidikan yang lebih ditekankan adalah pemberian program edukasi. Seperti membangun kesadaran memperkaya literasi dengan program perpustakaan keliling dan pembangunan sarana perpustakaan di sekolah-sekolah.

Sementara untuk kelompok masyarakat zona hijau lebih kepada memberikan *support*/dukungan pencapaian tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti biaya kuliah. Tentu dengan persyaratan yang lebih untuk memperoleh fasilitasi ini. Seperti syarat prestasi dan arah keilmuan pendidikan yang akan ditempuh, karena dengan status zakat, maka keilmuan yang lebih urgen adalah ilmu-ilmu ke-Islaman.

Program	Deskripsi	Realisasi
Beasiswa Pegawai Dasar (Beasiswa PGD)	Program Beasiswa/Pemberian bantuan keuangan (biaya pendidikan) kepada Anak Pegawai Dasar *Outsource* BNI Syariah diseluruh Indonesia mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA ataupun Perguruan Tinggi yang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang tengah ditempuh nya. Melalui mekanisme penyaluran sebanyak 2 semester yang disalurkan melalui unit Umum KC BNI Syariah setempat. Program ini sudah dilaksanakan dari tahun 2014.	Ditahun 2016 program Beasiswa Pegawai Dasar (Beasiswa PGD) tersalurkan di 52 cabang BNI Syariah diseluruh wilayah Indonesia. Ditahun 2015 yang lalu program beasiswa ini tersalurkan di 35 cabang BNI Syariah diseluruh wilayah Indonesia. Dan ditahun 2017 akan ditargetkan untuk seluruh cabang diwilayah Indonesia. Total anggaran tahun 2016 untuk program ini sebesar Rp958.045.000

Program	Deskripsi	Realisasi
Taman Pustaka Hasanah	Taman Pustaka Hasanah adalah program bedah perpustakaan sekolah yang mana digunakan sebagai sarana pendidikan yang sangat penting dan yang harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Yang bertujuan untuk menciptakan minat baca bagi setiap siswa/i, disamping itu tujuan didirikan perpustakaan adalah untuk menanamkan kebiasaaan belajar mandiri siswa/i serta memperkaya pengalaman siswa/i dalam belajar.	Sampai dengan tahun 2016 program Taman Pustaka Hasanah sudah terlaksana di 10 cabang dan 6 yayasan diantaranya : Tangerang, Sukabumi, Yogyakarta, Mataram, Tasikmalaya, Palu, Bekasi, Pare-Pare, Depok dan Bandung. Serta yayasan Al-Amanah, PPPA (Naryo), DDII, At-Taqwa, Kuttab Alfatih dan Dongeng Ceria Management (DCM). Anggaran di tahun 2016 yang sudah direalisasikan sebesar Rp219.094.000
Upgrading Guru Madrasah	Program Upgarading Guru Madrasah adalah program meningkatkan kemampuan guru madrasah dalam menyampaikan pelajaran/ ilmu dengan metode tertentu yang dapat mempermudah peserta didik memahami materi/ilmu/ pelajaran yang disampaikannya. Dalam program ini bertujuan agar guru madrasah bisa inovatif dan kreatif dalam menyampaikan ilmu yang diterapkannya.	Ini adalah Program lanjutan dari tahun 2015 dimana ditahun 2016 ini lebih fokus pada menciptaan karakter seorang anak didik agar lebih berakhlak, berilmu dan pempunyai jiwa *leadership* yang baik. Total Anggaran di 2016 sebesar Rp146.445.750
Mobil Cerdas Hasanah (operasional)	Program Mobil Cerdas Hasanah adalah program mobil perpustakaan keliling yang dilengkapi oleh audio visual multimedia guna untuk mempermudah miningkatkan literasi peserta didik. Mobil ini bertujuan agar bisa membantu sekolah – sekolah madrasah yang berada didaerah marginal.	Program mobil ini diadakan sejak tahun 2016 dan akan dilanjutkan ditahun 2017 guna untuk memberikan akses terhadap sekolah madrasah yang masih terbatas dalam meningkatkan literasi pendidikan serta sebagai pelengkap perpustakaan bagi sekolah tersebut. Total anggaran ditahun 2016 sebesar Rp100.000.000,-
TOTAL		Rp1.323.584.750

Ekonomi (*Economic Empowering Program*)

Ada dua isu utama yang diusung BNI Syariah dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi di kelompok masyarakat. Pertama, adalah tentang upaya menaikkan derajat kemanusiaan peserta program melalui peningkatan kapasitas dan kesejahteraan. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha-usaha yang bernilai ekonomis diupayakan beriringan dengan peningkatan kapasitas spiritualitas. Sehingga diharapkan, jika tercipta usahawan-usahawati baru atau tercapainya kesejahteraan, para peserta program menjadi duta-duta kebaikan baru dengan menularkan kemampuannya kepada anggota masyarakat sekitar yang membutuhkan. Inilah dampak dari *sustainability* yang menjadi salah satu target, yaitu tercipta lingkaran perubahan kearah kebaikan di berbagai tempat. Kedua, adalah isu optimalisasi potensi sumber daya alam. Sudah menjadi informasi umum bahwa Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat baik dan besar, sehingga sering kita dengar bahwa tanam apapun akan tumbuh subur di tanah kita. Namun, suka atau tidak, budaya konsumerisme yang dibangun melalui informasi global semakin menggerus keyakinan anak bangsa akan keunggulan yang dimiliki, terutama keunggulan potensi pertaniannya. Bukti tersahih adalah hasil riset BPS yang dirilis tahun 2013 lalu, bahwa terjadinya pengurangan profesi pertanian sebanyak 5 juta orang dalam satu dekade.

Melalui program Duta Hasanah, BNI Syariah berupaya mengangkat kembali potensi yang dimiliki oleh sdm-sdm potensial bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Di Bengkulu kami memberdayakan kelompok ibu-ibu yang difasilitasi Duta Hasanah Ibu Suminah. Seorang ibu dengan gelombang rayuan industrialisasi sawit bertahan dengan mengelola pelepah pisang yang terbuang menjadi berbagai macam kerajinan tangan, yang secara ekonomis sangat membantu penambahan penghasilan keluarga. dan sejak pertengahan

TANGGUNG JAWAB TERHADAP SOSIAL KEMASYARAKATAN

tahun 2016 mencoba mengembangkan potensi jeruk kalamansi yang banyal berkembang di daerahnya. Masih di Bengkulu, BNI Syariah juga mencoba mengangkat potensi sumber daya manusia pesantren dengan mengembangkan ternak burung puyuh melalui program Santri Hasanah.

Seorang innovator pertanian asal Wonosobo menjadi salah satu Duta Hasanah yang banyak mengembangkan perlengkapan dan cara pertanian yang sangat cocok untuk pertanian perkotaan. Bapak Yudik yang tergabung dalam komunitas keluarga migran (mantan TKI) salah satunya mengembangkan media tanam pertanian tanpa lahan dengan biaya sangat rendah.

Program	Deskripsi	Realisasi
Santri Hasanah (*Islamic Entrepreneurship*)	Program pengembangan ekonomi di pesantren-pesantren, terutama pesantren berbasis siswa dhuafa. Program ini , selain bertujuan agar dapat tercipta usaha yang mampu mendukung operasional pesantren, juga diharapkan menjadi sarana belajar santri untuk menjadi seorang *santripreneur*. Pogram dilaksanakan sejak tahun 2014.	Sampai dengan tahun 2016 telah tercipta 15 program Santri Hasanah. Diantaranya di Bengkulu, Bukit Tinggi, Cirebon, Pandeglang, Serang, Purwokerto, Bogor, dan Jakarta. Program Santri Hasanah tahun 2016 lebih banyak fokus pada pendampingan sebagai bagian dari upaya memperbesar keberhasilan program. Setidaknya untuk tahun 2017 akan kami lakukan riset untuk mengukur keberhasilan. Total anggaran tahun 2016 untuk program ini sebesar Rp375.074.375.
Duta Hasanah	Program pengembangan ekonomi kecil dan kreatif berbasis komunitas melalui Duta Hasanah BNI Syariah. Duta Hasanah adalah sosok masyarakat biasa yang telah berbuat luar biasa untuk mengubah masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Duta Hasanah lahir dari ajang pencarian sosok-sosok luar biasa di masyarakat oleh BNI Syariah bernama Mutiara Bangsa Berhasanah yang dilaksanakan tahun 2014 lalu. Program-program yang dikembangkan Duta Hasanah berupaya mengintegrasikan potensi-potensi di berbagai bidang menjadi sebuah aktivitas yang bernilai ekonomis. Kemampuan dan karakter Duta Hasanah inilah yang kemudian berusaha berusaha ditularkan kepada anggota masyarakat lain.	BNI Syariah mempunyai 12 Duta Hasanah yang telah bermitra untuk memberdayakan masyarakat disekitar mereka dan telah bekerjasama sejak tahun 2015 lalu. masing-masing Duta Hasanah diberikan amanah untuk memberikan pelatihan, pemberian modal kerja untuk usahawan/ti baru serta pendampingannya. Tahun 2016, telah dilakukan riset kaji dampak program oleh divisi riset Dompet Dhuafa untuk melihat perubahan signifikan perubahan yang dilakukan oleh Duta Hasanah. Hasilnya menunjukkan bahwa program-program yang didampingi mempunyai dampak secara ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan sampai dengan 70-80% dari jumlah binaan. Total anggaran yang terealisasi dan menjadi komitmen untuk program ini pada tahun 2016 sebesar Rp700.000.000.
	Total Anggaran Ekonomi	Rp1.075.074.375

Kesehatan dan Lingkungan (*Health and Environment Empowering Program*)

Program	Deskripsi	Realisasi
Program Kampung Sehat	Program Kampung Sehat adalah program edukasi kesehatan lingkungan guna untuk menciptakan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Program ini juga memberikan sarana MCK dan pipanisasi air kebutuhan vital masyarakat kepada warga masyarakat marginal yang belum mengerti arti dari menjaga kebersihan dan kesehatan.	Sampai dengan tahun 2016 ini program tersebut sudah berjalan di 4 daerah yaitu, Mentawai, Nusa Tenggara Timur, bogor, dan tangerang. Total Anggaran ditahun 2016 sebesar Rp100.000.000.
HASANAH CARE MOBILE (PHBS+Laykes umum+ Gigi+MCK)	Bantuan layanan kesehatan umum/ khusus kepada dhuafa atau korban bencana (bersifat insidental), bantuan diberikan berupa pelayanan kesehatan umum, gigi dan lainnya layanan kesehatan yang diawali dengan penyuluhan dan tidakan oleh tim dokter, YHT berupaya untuk memaksimalkan fungsi mobil Laykes YHT untuk membantu pemerataan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara langsung dan gratis sebagai wujud kepedulian kepada kaum dhuafa dan korban bencana, pelaksanaan ini bekerjasama dengan mitra YHT atau mitra KC BNI Syariah setempat,	Program telah berjalan dengan baik dibeberapa tempat dengan prioritas daerah marginal dan pasca bencana. Daintara nya wilayah; Pasca bencana gempa klaten Pasca benacana longsor Purworejo Pasca bencana Banjir Muara Gembong, Bekasi. Dan beberapa wilayah marginal di Jabodetabek. Dengan rata2 penerima manfaat 200-300 jiwa/lokasi. Dengan nominal. Total penyaluran Rp236.758.240.
Total		Rp336.758.240

Sosial Dakwah (*Social and Spiritual Empowering Program*)

Program-program sosial dan dakwah dirancang oleh BNI Syariah mempunyai 2 tujuan penting dan saling mempunyai keterikatan kuat. Program sosial peruntukkannya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama pangan. Kelompok penerima program hampir sepenuhnya berasal dari kelompok masyarakat zona merah dan kuning (fakir/miskin). Keterikatan dengan pengembangan program dakwah adalah pada aspek pembangunan lingkungan sosial. Program yang kami susun memegang salah satu prinsip bahwa perbaikan lingkungan (sosial) harus dimulai dari perbaikan dari individu-individu yang ada di dalamnya. Karena itu, selain memberikan program dalam bentuk bantuan langsung, BNI Syariah juga *concern* terhadap program dakwah yang akan berdampak pada perubahan kesholehan/kebaikan pribadi dan masyarakat.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP SOSIAL KEMASYARAKATAN

Program	Deskripsi	Realisasi
ODOLOF	Program pemenuhan kebutuhan dasar untuk dhuafa melalui komunitas majlis taklim, sebagai integrase antara program sosial dan dakwah. Kelompok-kelompok penerima bantuan program ini juga selanjutnya akan diinisiasi untuk mendapatkan program pengembangan ekonomi kecil. Program ODOLOF dalam prakteknya juga berupaya menaikkan kesejahteraan petani, dengan cara memutus rantai distribusi yang panjang, yaitu dengan cara membeli beras langsung dari kelompok tani.	Total di tahun 2016 sebanyak 26 majlis taklim mendapatkan program pemberian beras untuk dhuafa. Total penerima program sebanyak 1.950 keluarga dhuafa selama 16 minggu. Total anggaran yang direalisasikan untuk program ini sebesar Rp772.000.000
Santunan Yatim/tidak mampu	Program kepedulian kepada anak-anak yatim tidak mampu sebagai bentuk rasa syukur keluarga besar BNI Syariah. Selain dilakasanakan secara rutin setiap bulan di kantor pusat, pelaksanaan santunan yatim dhuafa juga dilaksanakan pada moment-moment tertentu, seperti bulan Ramadhan dan hari raya lainnya.	Jumlah yatim dhuafa yang disantuni mencapai 5.000 lebih. Total anggaran yang direalisasikan tahun 2016 untuk program ini sebesar Rp1.695.282.500
Tadarus Anak Hasanah	Tadarus Anak Hasanah adalah salah satu kontribusi BNI Syariah dalam menciptakan anak-anak Indonesia agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik, terutama dalam pembelajaran ilmu agama. Dalam program ini, anak-anak jalanan sebagai penerima manfaat diajarkan cara membaca Al Qur'an selama 2 minggu dan diberikan motivasi untuk terus melaksanakannya setelah program selesai dilaksanakan. Selanjutnya diharapkan mereka akan secara mandiri untuk memperdalam keilmuannya di lingkungan tempat tinggalnya.	Pelaksanaan Tadarus Anak Hasanah dilaksanakan di 69 kantor cabang BNI Syariah, dengan total peserta program adalah 1.380 anak. Total anggaran yang direalisasikan tahun 2016 untuk program ini sebesar Rp775.200.000
Layanan Pengurusan Jenazah	Pengurusan jenazah seringkali jadi masalah tersendiri, terutama untuk masyarakat dhuafa. Selain menyediakan layanan antar gratis untuk pengantaran jenazah, BNI Syariah juga menyediakan pengurusan jenazah gratis untuk masyarat dhuafa. program ini dimaksudkan membangun kepercayaan masyarakat bahwa BNI Syariah selalu ada mendampingi masyarakat.	Selama tahun 2016, BNI Syariah menambah layanan 2 mobil jenazah gratis. Total mobil layanan gratis pengantaran jenazah menjadi 5 mobil, yaitu di Jakarta 2 mobil, Jogja 1 mobil yang bekerjasama dengan RS Muhammadiyah, Palembang 1 mobil dan Padang 1 mobil. Total anggaran yang direalisasikan tahun 2016 untuk program ini sebesar Rp369.000.000

TANGGUNG JAWAB TERHADAP SOSIAL KEMASYARAKATAN

Program	Deskripsi	Realisasi
Hasanah for Society	Salah satu rangkaian kegiatan milad BNI Syariah yang jatuh tanggal 19 Juni. Pada milad keenaam ini, BNI Syariah mengangkat tema Hasanah A Six, Sinergi Hasanah Membangun Negeri. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Hasanah For Society (HFS) yakni perubahan/"*makeover*" terhadap fasilitas umum (MCK, jembatan, jalan, pos ronda dan musholla) di sekitar cabang BNI Syariah seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan manfaat ***public area*** yang ada di masyarakat dan meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai implementasi Hasanah.	Hasanah For Society dilaksanakan di 64 cabang BNI Syariah Seluruh Indonesia sejak tanggal 1 - 31 Mei 2016, dengan melibatkan seluruh pegawai cabang, stakeholders dan rekan-rekan media. Total anggaran yang direalisasikan untuk program ini sebesar Rp389.708.202
Qurban Party Hasanah	Kegiatan menyambut Hari Raya Idul Adha yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan menjadi event ikonik BNI Syariah. Konsep acara Qurban Party Hasanah yaitu kegiatan pengumpulan, penyembelihan dan penyaluran hewan qurban yang dirangkai dengan lomba memasak yang diikuti oleh nasabah, kaum dhuafa, dan karyawan BNI Syariah.	Dalam kegiatan Qurban Party Hasanah tahun 2016 telah berhasil terkumpul 88 ekor sapi dan 442 ekor kambing yang disalurkan kepada masyarakat dan berbagai yayasan / lembaga sosial. Total anggaran yang direalisasikan untuk program ini sebesar Rp1.254.511.137
Jurnalis Keuangan Syariah (JES)	Program apresiasi kepada rekan-rekan media jurnalis syariah dengan memberikan edukasi perbankan syariah melalui *workshop* dan *sharing session* dari para stakeholders seperti OJK sebagai regulator dan Pemimpin dan nasabah BNI Syariah setempat, diharapkan dengan adanya komunitas JES ini dapat meningkatkan engagement BNI Syariah dan rekan-rekan media dan wadah bertukar informasi mengenai informasi/ isu perbankan yang saat ini marak di masyarakat luas.	Selama tahun 2016, BNI Syariah telah me*launching* JES di 9 kota yakni Yogyakarta, Solo,Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Aceh, Padang dan Palu. Dari masing-masing kota telah terbentuk pengurus JES yang terdiri dari Ketua, Wk Ketua dan Sekretaris yang dapat saling berkomunikasi dengan para rekan-rekan anggotanya melalui grup JES di kota masing-masing. Program sosialisasi perbankan syariah di setiap kota bersama OJK dan institusi pemerintah daerah. Kegiatan bersama JES BNI Syariah dalam program Hasanah For Society di daerah dan sosialisasi perbankan syariah melalui komunitas JES seperti *workshop* dan *sharing session*. Total anggaran yang direalisasikan untuk program ini sebesar Rp332.563.481
	Total Anggaran Sosial Dakwah	Rp5.588.265.320

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang tak ternilai bagi BNI Syariah. Karena itu, sebagai Perusahaan yang taat azas dan taat aturan, BNI Syariah berusaha untuk mematuhi semua aturan dan perundangan yang berlaku, termasuk di bidang ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Ketenagakerjaan

Kebijakan BNI Syariah terkait aspek ketenagakerjaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Perseroan juga memiliki berberapa aturan tambahan dalam bentuk Peraturan Perusahaan dan Keputusan Manajemen untuk memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan aturan ketenagakerjaan yang benar.

BNI Syariah juga senantiasa memastikan terciptanya wahana kerja yang kondusif, sebagai tempat kebanggaan bagi setiap insan BNI Syariah untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan dari ibadah. Dalam mengelola sumber daya manusianya, BNI Syariah berpegang pada prinsip-prinsip persamaan dan kesetaraan dalam kesempatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawannya.

Sasaran dan Rencana Kegiatan

Terciptanya hubungan industrial yang sehat dan harmonis antara Perusahaan dan pekerja merupakan tujuan utama BNI Syariah. Sejalan dengan hubungan yang sehat tersebut, BNI Syariah juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui berbagai *benefit* yang diberikan kepada pegawai.

BNI Syariah tidak hanya memberikan *benefit* yang bersifat normatif, tapi lebih dari itu, BNI Syariah juga berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang holistik, dalam hal ini dengan juga memperhatikan keluarga pegawai.

Tahun 2016, BNI Syariah berencana untuk memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak tenaga kerja alih daya yang berprestasi, memberikan bantuan dana kesehatan bagi keluarga tenaga kerja yang membutuhkan, memberikan ruang menyusui khusus bagi pegawai BNI Syariah di lingkungan kerja

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Yang Sama

Kepatuhan pada prinsip persamaan dan kesetaraan dalam kesempatan kerja dimanisfestasikan dalam pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga Indonesia untuk bergabung dengan BNI Syariah, tanpa memandang latar belakang gender, kelas dan status sosial. Kebijakan ini juga dilaksanakan dalam praktik promosi, pengembangan kompetensi, penugasan, serta pemberian kompensasi dan tunjangan Bank.

Hal ini dapat dilihat dari komposisi jumlah karyawan BNI Syariah dengan perimbangan karyawan pria dan wanita yang cukup baik. Hingga akhir tahun 2016, jumlah karyawan adalah 4.450 orang dengan komposisi 2.579 pria dan 1.871 wanita.

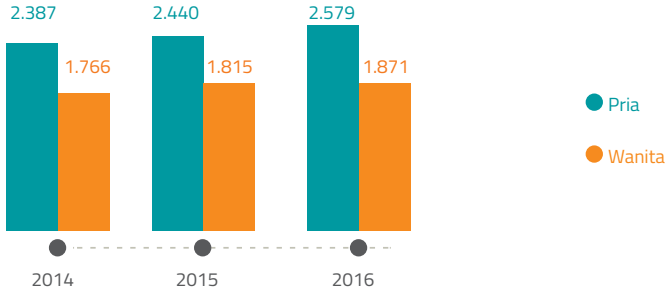

Jenjang Karir

BNI Syariah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan untuk membuat perencanaan terkait pengembangan karir mereka. Hal ini salah satunya dilakukan dengan memberlakukan sistem *job level* sehingga karyawan termotivasi untuk terus meningkatkan skill dan kinerja agar layak dipromosikan oleh manajemen ke posisi dengan *job level* yang lebih tinggi.

Untuk mengisi posisi yang lowong, BNI Syariah berupaya untuk mendahulukan *talent internal* dengan melaksanakan Internal *Talent Recruitment*. Selain itu, terdapat mekanisme usulan promosi bagi karyawan-karyawan yang memiliki potensi untuk dipromosikan, baik secara struktural maupun non struktural. Kemudian, terdapat mekanisme *talent pool* yang ditujukan untuk mendeteksi para talent yang ada dan potensial untuk menempati posisi-posisi strategis kedepannya.

Secara berkala BNI Syariah melaksanakan pemetaan kompetensi baik untuk tujuan mapping, promosi, ataupun *talent pool* dengan harapan seluruh karyawan dapat mengetahui profil kompetensi masing-masing.

Manajemen karir merupakan salah satu strategi Perusahaan untuk mengembangkan potensi pegawai dan untuk mewujudkan visi dan misi perusahan. Proses pengembangan pegawai mempertimbangkan pemenuhan gap kompetensi dan peta karir. BNI Syariah telah memiliki desain sistem karir Perusahaan dalam bentuk job *family matrix*. Penggunaan *job family matrix* adalah sebagai acuan dalam melakukan perpindahan pegawai dengan tujuan memetakan karir pegawai tersebut.

1. Pola Karir
   BNI Syariah saat ini, menggunakan prinsip *Competency Based Human Resource Management* (CBHRM), sehingga dalam melakukan pengelolaan karir berdasarkan kompetensi. Dalam pelaksanaannya pola karir Perusahaan didasari oleh kompetensi dan *capacity plan*. Saat ini BNI Syariah memiliki metode *dual career path* yaitu *specialist* dan generalis. Proses pola karir BNI Syariah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui *Lateral Movement* (rotasi) dan *Job Enrichment* (promosi).
2. Jalur Karir
   Jalur karir yang diterapkan di Perusahaan merupakan suatu perpindahan karyawan terhadap suatu posisi jabatan ke jabatan lain atau yang biasa disebut mutasi. Pelaksanaan mutasi terhadap karyawan terbagi kedalam 3 (tiga) jenis perpindahan diantaranya :
   a. Rotasi
      Rotasi merupakan perpindahan posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang berada pada satu *band* atau jenjang. Mekanisme rotasi dilaksanakan kepada pegawai sebagai bentuk *refreshment* posisi jabatan ke posisi jabatan lain untuk mengembangkan kemampuan pegawai dengan harapan dapat memperluas pengetahuan terhadap suatu tugas atau pekerjaan sehingga dapat menunjukkan potensi pegawai.

      Rotasi posisi jabatan dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan dalam suatu posisi jabatan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu atau dapat terjadi karena perubahan organisasi untuk menunjang pengembangan Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

b. Promosi
Promosi merupakan perpindahan posisi suatu jabatan ke posisi jabatan lain yang memiliki nilai jabatan lebih tinggi dari posisi jabatan sebelumnya. Promosi pada pegawai bertujuan untuk mengembangkan potensi, karier, kreativitas, dan inovasi pegawai yang lebih baik sehingga produktifitas meningkat. Periode promosi dilaksanakan sesuai dengan masa penilaian kinerja Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan promosi adalah masa kerja pegawai, yudisium penilaian dan tidak sedang dalam proses sanksi.

c. Demosi
Demosi merupakan perpindahan posisi suatu jabatan ke posisi jabatan lain yang memiliki nilai jabatan lebih rendah dari posisi jabatan sebelumnya. Penurunan posisi jabatan disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.

Program Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan *skill* dan kapasitas karyawan untuk menunjang operasional Perusahaan, BNI Syariah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan. Pembahasan lebih rinci terkait program Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia pada laporan ini.

Kesejahteraan Karyawan

Dalam rangka mempertahankan SDI yang berkualitas dan pemberian penghargaan bagi pegawai sebagai apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi dalam mendukung pencapaian target bisnis, maka BNI Syariah memberikan remunerasi dengan menganut asas *pay for position* dan *pay for performance*. Hal ini berarti dalam implementasi sistem remunerasinya, Perusahaan memberikan fasilitas pada pegawai dengan mempertimbangkan nilai jabatan, kondisi industri, serta kinerja pegawai .

Untuk mengimplementasikan pengelolaan manajemen SDI berbasis kompetensi, maka dalam hal pemberian *reward*, BNI Syariah menerapkan prinsip pemberian *reward* berdasarkan hasil kinerja serta pengukuran atas kompetensi kerja pegawai atau dengan kata lain menerapkan pengelolaan SDI berbasis manajemen kinerja.

Penetapan remunerasi senantiasa mempertimbangkan paket remunerasi yang berlaku pada industri perbankan, ketentuan Perundang-undangan dan kemampuan Perusahaan. Adapun strategi remunerasi disusun dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku tanpa membedakan *gender*. Struktur remunerasi BNI Syariah terdiri dari komponen tetap (*fixed pay*) dan komponen tidak tetap (*variable pay*). Untuk pemberian *variable pay* turut disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai. Selain itu sebagai bentuk retensi pegawai, dari sisi fasilitas pegawai, BNI Syariah juga memberikan beberapa fasilitas seperti fasilitas untuk pegawai agar paket remunerasi pegawai tetap kompetitif di market, BNI Syariah juga turut serta dalam *remuneration survey*.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Berikut ini adalah komposisi remunerasi yang berlaku di Perusahaan

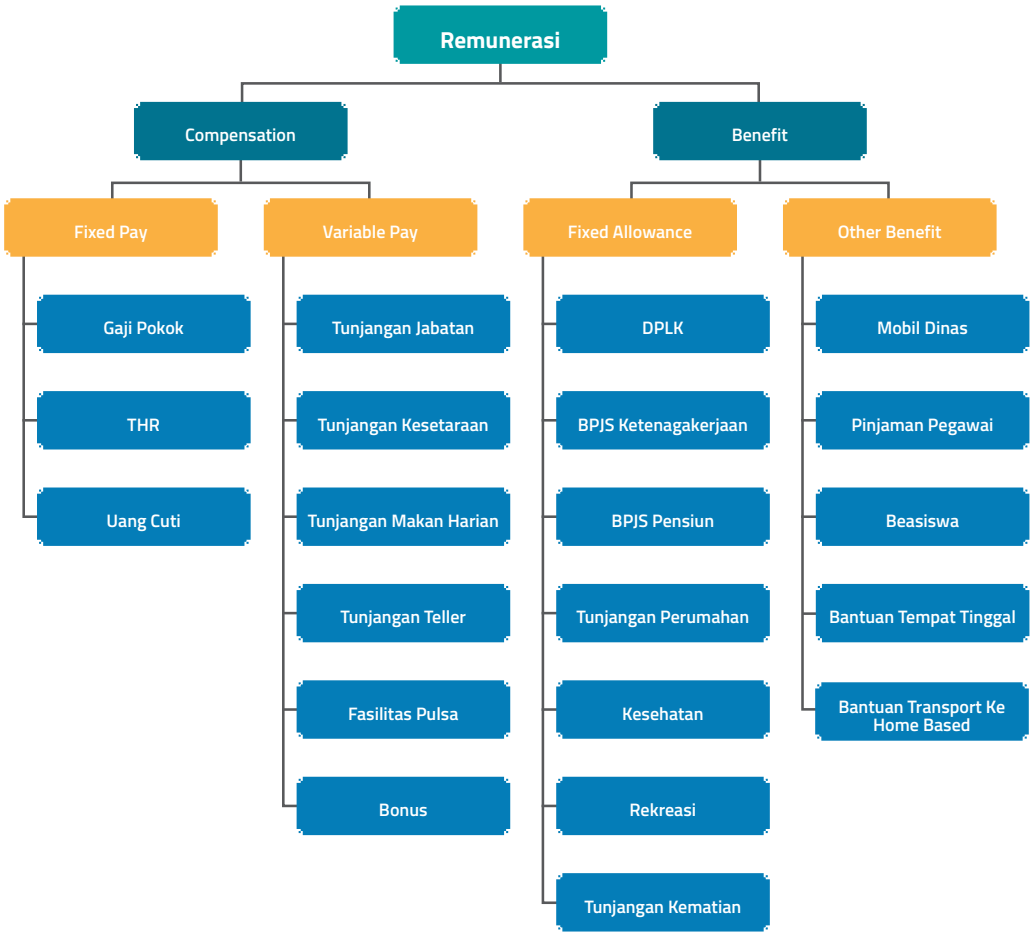

Selain *compensation* yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya BNI Syariah memberikan *benefit* kepada pegawai. *Benefit* tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu manfaat pasti dan manfaat lainnya. Manfaat pasti merupakan tunjangan dasar pegawai, tunjangan dasar tersebut diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai sesuai dengan peraturan regulasi atau pemerintah. Besar manfaaat pasti ditetapkan di dalam peraturan Perusahaan. Selain manfaat pasti, terdapat manfaat lainnya yang didapatkan oleh pegawai yang memenuhi kriteria tertentu. Beberapa manfaat lainnya yang berhak diterima oleh pegawai adalah sebagai berikut :

1. *Car Ownership Program* (COP), diberikan kepada pegawai dengan jenjang jabatan tertentu, yang menjabat sebagai pimpinan unit organisasi tertinggi (*Division Head).* Kendaraan ini dapat dimiliki oleh pegawai setelah pegawai tersebut menjabat pada posisi tersebut dengan rentang waktu tertentu.
2. Mobil Dinas, diberikan kepada pegawai dengan jenjang jabatan tertentu, umumnya adalah pimpinan unit organisasi (*Branch Manager, Operational Manager, Consumer Bisnis Manager, Sub Branch Manager*, dll)
3. Pinjaman Pegawai, diberikan kepada pegawai yang memiliki kinerja "baik" dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
4. Beasiswa, diberikan kepada pegawai yang memiliki masa kerja tertentu dan memiliki kinerja yang tergolong "Baik"
5. Bantuan Tempat Tinggal, diberikan kepada pegawai yang ditempatkan di luar *home base* atau memiliki jarak yang relatif jauh antara tempat penempatan dengan *home base* yang bersangkutan, serta dalam kurun waktu tertentu.
6. Penghargaan Masa Bakti, diberikan pada saat pegawai memiliki masa kerja 20 tahun dan kelipatan 5 tahun (25th, 30th, 35th).

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Hubungan Industrial

Dalam mencapai visi BNI Syariah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, BNI Syariah menyadari pentingnya menjalankan usaha yang sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan mematuhi prinsip syariah dan patuh terhadap Peraturan/hukum yang berlaku.

Untuk mendukung tercapainya Visi BNI Syariah dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen BNI Syariah telah menyusun kode etik insan BNI Syariah (*code of conduct*) yang merupakan tuntunan dan prilaku bagi Insan BNI Syariah yang islami dengan berpedoman pada ahlakul kharimah (budi pekerti yang mulia), sebagai tuntunan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bersikap dan berprilaku baik terhadap mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya.

Kode etik insan BNI Syariah ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh segenap insan BNI Syariah secara konsisten dan penuh tanggungjawab. Selanjutnya dengan semangat Amanah dan Jamaah marilah kita patuhi Kode Etik Insan BNI Syariah dengan istiqomah, demi mewujudkan cita-cita BNI Syariah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Dalam rangka untuk mencapai terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara Pegawai dengan Manajemen, BNI Syariah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut serta menjadi anggota Serikat Pekerja (SP) PT Bank BNI Syariah yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan bukti pencatatan No.549/I/P/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

Hal ini dilakukan agar BNI Syariah menjamin kepada pegawai nya untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dibuktikan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank BNI Syariah dengan Nomor: PKS/DIR/002/2015 dan Nomor: PKB-12/DPP-SP/2015 tanggal 23 Januari 2015.

Hubungan Industrial selaku sarana yang menjembatani permasalahan antara pegawai dengan Manajemen menjadi sangat penting keberadaanya sehingga pegawai dapat dengan mudah mengemukakan permasalahan yang terjadi di lapangan dan memberikan *feed back* yang baik kepada pegawai . Dengan terciptanya hubungan yang baik antara pegawai dan manajemen diharapkan pegawai dapat mencapai target manajemen sehingga Perusahaan dapat memberikan kesejahteraan seperti apa yang diharapkan oleh pegawai.

Kebebasan Berserikat

BNI Syariah menjamin hak setiap karyawan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Untuk itu, telah dibentuk Serikat Pekerja BNI Syariah (SP-BNIS) sejak 10 Maret 2011 sebagai perwakilan karyawan dalam hubungannya dengan BNI Syariah.

SP-BNIS telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 549/I/P/III/2011. SP-BNIS dan BNI Syariah telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai landasan hubungan industrial di BNI Syariah dengan mengacu pada kode etik BNI Syariah yang mulai resmi berlaku sejak tahun 2010.

Turn Over Karyawan

Pengelolaan Sumber Daya Insani dilakukan secara adil dan transparan sejalan dengan budaya Perusahaan BNI Syariah, Amanah dan Jamaah. BNI Syariah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi segenap pegawai. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat *turnover* pegawai.

Pada tahun 2016 tercatat 337 pegawai Perseroan yang berhenti, atau sebesar 7,6% dari total karyawan akhir tahun yang mencapai 4.450 pegawai.

Kenaikan angka *turnover* tahun 2016 sebesar 0,6% dibanding tahun 2015 masih terbilang wajar. Sebab, merujuk hasil survei PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia pada Januari-Februari 2014, *turnover* di industri perbankan Indonesia mencapai angka 15%.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Turnover Rate	Prosentase
2015	7 %
2016	7.6%

Survei Kepuasan Karyawan

Untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap Bank, sejak tahun 2016 BNI Syariah mengadakan *Employee Opinion Survey* (EOS). Survei tersebut mengukur kinerja Bank di aspek-aspek *self-development, rewards and punishment, leadership* serta *procedure*.

Tujuan dari survei tersebut adalah guna mendapatkan masukan dari karyawan tentang kinerja pengelolaan sumber daya insani di BNI Syariah, tingkat kepuasan karyawan dibandingkan dengan karyawan di Perusahaan lainnya.

Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank yang senantiasa memandang sumber daya insani sebagai aset berharga bagi kemajuan BNI Syariah.

Aspek yang diukur dalam EOS :
1. Fasilitas dan Lingkungan Kerja
2. Tunjangan & Sanksi
3. Rekan Kerja
4. Pengembangan
5. Pemimpin

Berikut ini grafik survei kepuasan pegawai 4 (empat) tahun terakhir :

EOS 2013 – 2016

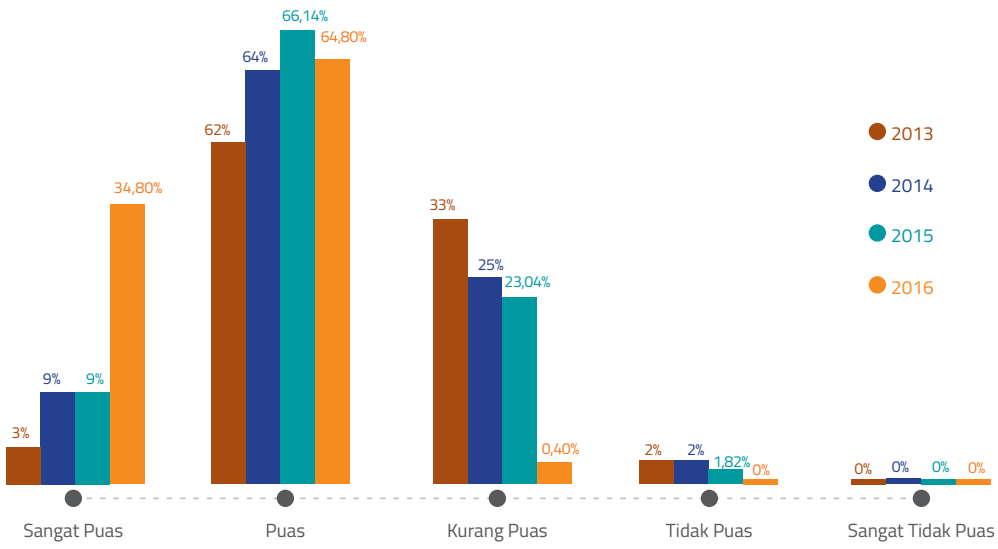

1. 99,6% Pegawai merasa Puas bekerja di BNI Syariah
   Area Pengembangan 2016:
   - Pengembangan Diri
   - Pemimpin
   - Tunjangan & Sanksi
2. > 95 % Pegawai merasa Puas atas Lingkungan dan Rekan Kerja
3. 77% Pegawai BNI Syariah memiliki persepsi positif atas nilai budaya kerja BNI Syariah (*engage*)

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Hingga 31 Desember 2016, BNI Syariah belum memiliki divisi khusus terkait K3. Namun demikian, BNI Syariah telah mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja beserta cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas.

Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank BNI Syariah Periode 2015 – 2017 Bab VI pasal 38 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan demikian kepatuhan pada pelaksanaan K3 menjadi tanggung jawab bersama manajemen dan setiap pegawai.

Jaminan tersebut meliputi perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pegawai, penyediaan perlengkapan kerja, sertajaminan kecelakaan kerja sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran dan Rencana Kegiatan

Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bebas cidera adalah salah satu sasaran BNI Syariah. Untuk itu, BNI syariah telah menyiapkan berbagai fasilitas kerja yang ergonomis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya cidera saat melaksanakan pekerjaan.

BNI Syariah juga menyiapkan kebijakan terkait dengan keadaan darurat yang bertujuan untuk melindungi pegawai dan juga layanan kepada nasabah

Pengelolaan Risiko Kesehatan Kerja

Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama agar karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja BNI Syariah. Untuk itu, BNI Syariah merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan karyawannya disamping karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, BNI Syariah memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing.

Selain itu, BNI Syariah juga memberikan fasilitas kesehatan bagi keluarga pegawai, dengan ketentuan fasilitas kesehatan bagi anak adalah sampai 21 tahun bagi yang belum bekerja dan belum menikah. Khusus bagi anak masih sekolah, belum bekerja dan belum menikah adalah sampai dengan usia 25 tahun. Terkait dengan kesehatan kerja telah tercantum dalam PKB PT Bank BNI Syariah Periode 2015-2017 Tentang Fasilitas Kesehatan.

Berikut kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang telah dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2016, di antaranya :

1. *Medical check up* dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahun dan diikuti oleh pegawai.
2. Pengobatan non rutin, rawat inap, gigi & mata, pengobatan pekerja kantor pusat ke daerah, dan tunjangan pengobatan non rutin untuk keperluan rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan.

Terkait dengan kesehatan karyawan, BNI Syariah memberikan fasilitas dan benefit kepada karyawan dan keluarganya, antara lain :

1. Fasilitas kesehatan berkala meliputi fasilitas
2. *Medical Check Up*
3. Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kacamata, alat bantu dengar, pemeriksaan *lab* dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap.

Pengelolaan Risiko Kecelakaan Kerja

BNI Syariah mengadakan pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala. Kegiatan pelatihan kebakaran dilaksanakan di setiap gedung di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang bekerja sama dengan kesatuan pemadam kebakaran setempat. Kegiatan tersebut antara lain mencakup pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran serta pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.

BNI Syariah juga senantiasa melengkapi fasilitas kantor dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung oksigen (O2), kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), serta tangga luncur darurat pada jendela keluar (*exit window*). Sedangkan untuk pelatihan penanggulangan bencana alam BNI Syariah bekerja sama dengan Pusdiklat BNPB di setiap kantor cabang.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja akibat kerja dilakukan melaui pengelolaan risiko kerja dengan mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja beserta cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas.

Dalam pengelolaan risiko kecelakaan kerja, BNI Syariah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, antara lain :

a. Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala.
b. Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
c. Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.
d. Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung oksigen (O2), kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (*exit window*).
e. Penyediaan mobil ambulan di kantor pusat (bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik)
f. Simulasi evakuasi kebakaran/ bencana/ gempa diadakan minimal sekali dalam setahun baik di Kantor Pusat maupun Kanto Cabang dan pemeliharaan tabung gas kebakaran/ Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alarm Gedung, Detektor Asap.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP NASABAH

Visi BNI Syariah untuk menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja merupakan komitmen BNI Syariah untuk senantiasa melayani seluruh kebutuhan nasabah sebagai mitra keuangan sepanjang usia, dengan memberikan solusi keuangan yang menyelruh. Kepuasan nasabah merupakan tolak ukur dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan produk jasa BNI Syariah. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan secara berkala melalui penilaian dari pihak eksternal maupun internal serta membangun budaya layanan kepada seluruh insan hasanah BNI Syariah.

Sasaran dan Rencana Kegiatan

Memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dan calon nasabah adalah sasaran utama BNI Syariah. Untuk itu, BNI Syariah telah melakukan berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan nasabah.

Peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur TI dan penyempurnaan produk yang secara terus menerus dilakukan merupakan bagian dari strategi BNI Syariah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Sasaran tanggung jawab terhadap Nasabah

Perlindungan terhadap hak – hak nasabah terhadap produk / jasa serta layanan senantiasa dilakukan BNI Syariah sebagai salah satu upaya melebihi kepuasan nasabah dan mendukung kebijakan regukator dalam penerapan perlindungan konsumen.

Rencana Kegiatan terkait pelindungan konsumen/ pelanggan

Sebagai komitmen dalam memberikan perlindungan hak hak nasabah BNI Syariah menyusun dan menetapkan kebijakan dan SOP (standar operational prosedur) terkait penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan nasabah dan pembentukan Service Desk pada awal tahun sebagai pengelola pengaduan nasabah. Selain it, BNI Syariah menyediakan Pusat Pengaduan Konsumen melalui BNI *Call Center* 1500046 atau nasabah dapat langsung menyampaikan pengaduan melalui seluruh *outlet* BNI Syariah dan melalui *website* BNI Syariah serta *facebook* dan *twitter* BNI Syariah.

Dikembangkannya sistem pengaduan yg terintegrasi (*handling complaint system aplication*) sebagi bentuk upaya percepatan penyelesaian pengaduan nasabah yang ditetapkan BNI Syariah dengan target lebih cepat dibandingkan ketentuan regulator dan sebagai bentuk penerapan GCG

Pelaksanaan Program

Jaringan distribusi luas serta produk dan layanan BNI Syariah yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk dapat menghadirkan layanan prima di seluruh *contact point* bagi seluruh nasabah. Layanan Prima atau *Service Excellence* merupakan salah satu dari 3 (tiga) Pilar Kinerja BNI Syariah selain *Financial Performance* dan *Good Corporate Governance*. Hal ini menunjukkan pentingnya *Service Excellence* bagi Bank BNI Syariah, dan juga nasabahnya. Pada tahun 2016, komitmen dan kerja keras kami untuk senantiasa menghadirkan layanan prima kepada nasabah telah membuahkan hasil dengan kembali diraihnya penghargaan tertinggi di bidang *Service Excellence* sebagai :

- "Bronze Champion of JABODETABEK WOW Service Excellen Award 2016" kategori Bank Syariah oleh Mark Plus
- "Bronze Champion of JABODETABEK WOW Service Excellen Award 2016" kategori Bank Syariah oleh Mark Plus
- "Gold Chapion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016" kategori Islamic Region Sumatera oleh ark Plus
- "The Best Quality Diamond Award 2016" kategori Bank Syariah oleh Carre (Center Costumer Satisfaction & Loyalty)

Seluruh jajaran BNI Syariah memiliki kontribusi dalam mewujudkan *service excellence* sesuai posisi dan peranannya masing-masing dengan mengacu standar layanan yang dikenal dengan nama GREAT (*Greeting*, *Relationship*, *Empathy*, *Attention*, dan *Trust*). Standar layanan ini berlaku bagi semua insan BNI Syariah untuk diaplikasikan di setiap program dan acara layanan nasabah Bank. Dalam rangka menjaga kualitas layanan prima di seluruh *contact point* BNI Syariah menyelenggarakan Program Survei Kepuasan Nasabah. Survei tersebut bertujuan mengukur kualitas layanan Bank untuk kemudian digunakan sebagai tolok ukur bagi inisiatif-inisiatif peningkatan layanan. Lingkup survei mencakup pengukuran atas aspek-aspek petugas, fisik, fasilitas & layanan, serta produk BNI Syariah.

Disamping itu BNI Syariah juga mengukur layanan di Kantor Pusat serta Cabang (*Unit Front Office* dan *Back Office*) agar tercipta *service excellence* secara *end to end*. BNI Syariah melakukan pengukuran standar layanan secara *Suprising Call* dan mengukur tingkat kepuasan nasabah (*Customer Satisfaction Index*) di Cabang Reguler, Cabang Mikro yang dilakukan secara bertahap dan diterapkan juga di unit lainnya.

Kebijakan

Dalam pelaksanaannya acuan kebijakan dalam pengelolaan hubungan dengan Pelanggan mengacu pada Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.

Kegiatan Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, BNI Syariah memberikan komitmen kepada seluruh nasabah untuk memberikan informasi produk secara transparan, baik lisan maupun tulisan yang meliputi karakteristik produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk serta program penjaminan khusus untuk produk penghimpunan dana.

Wujud komitmen BNI Syariah dalam menyampaikan transparansi produk kepada seluruh nasabah, antara lain :

1. Menyampaikan informasi terhadap setiap perubahan nisbah, penambahan dan pengurangan pada karakteristik produk, baik secara lisan yang dilakukan maupun tulisan berupa pengumuman di setiap *outlet*.
2. Menyediakan *Sales Kit Online* (SKO) sebagai panduan bagi *frontliner* dalam menyampaikan informasi produk yang transparan, lengkap dan jelas.

Pelayanan informasi produk

Dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, BNI Syariah melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan pelanggan yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai produk kepada nasabah guna mempermudah pelayanan dan akses kepada nasabah.Sosialisasi produk melalui:

1. Website www.bnisyariah.co.id
2. *On site* pada kantor cabang terdekat

BNI Syariah tidak hanya melakukan peningkatan kualitas layanan produk, namun juga setia dalam menjamin kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan. BNI Syariah berkomitmen untuk menjaga dan melindungi data/dokumen nasabah dari kehilangan, kerusakan dan kebocoran informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan melalui peningkatan kapabilitas keamanan Teknologi dan Informasi (TI). Implementasi peningkatan kapabilitas keamana TI antara lain: *Threat Intelligence* yang melindungi sistem TI BNI Syariah dari serangan *cyberattack* dan *phising*, serta *Security Awareness* dan Data *Leakage Protection* yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data di internal BNI Syariah, serta peningkatan keamanan *e-channel*. Penyempurnaan keamanan juga dilakukan pada kartu BNI Syariah debit dan mesin ATM BNI yaitu dengan bekerjasama dengan BNI Induk untuk Implementasi standar *National Standard IndonesiaChip Card Specification* (NSICCS) untuk menjamin keamanan nasabah BNI Induk maupun BNI Syariah dalam bertransaksi.

menggunakan kartu BNI debit dan BNI Syariah debit. Pengamanan fisik mesin ATM BNI juga ditingkatkan dengan melengkapi PIN Bezel dan CCTV ATM di seluruh mesin ATM BNI demi kenyamanan dan keamanan nasabah bank BNI dan BNI Syariah dalam bertransaksi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada keluhan ataupun insiden signifikan terkait kerahasiaan data dan privasi pelanggan. Perusahaan juga dapat melaporkan bahwa sepanjang tahun pelaporan Perusahaan tidak dikenakan denda atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terait penyediaan produk dan layanan jasa sekaligus terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP NASABAH

Kerahasiaan Nasabah

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 pasal 41 tentang Cakupan Rahasia Bank, BNI Syariah memiliki kebijakan internal yang berkomitmen dalam menjaga dan menjamin kerahasiaan data nasabah serta melakukan pengembangan teknologi dalam meningkatkan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui *e channel.*

Mekanisme dan Proses Pengaduan dan Penanganan Nasabah

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, BNI Syariah selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam penanganan penyelesaian pengaduan nasabah melalui Unit Kerja Khusus yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Terkait *performance* penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang berpotensi kerugian finansial terhadap nasabah secara rutin dilakukan pelaporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penanganan penyelesaian pengaduan nasabah BNI Syariah dipaparkan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berikut data jumlah pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah BNI Syariah sampai dengan 31 Desember 2016:

Periode Period	Pengaduan Masuk	Pengaduan Ditindaklanjuti	Pengaduan Dinyatakan Selesai	Pengaduan dalam Proses
Tahun 2013	1.159	1.159	1.159	0
Tahun 2014	1.542	1.542	1.323	219
Tahun 2015	3.452	3.452	3.187	265
Tahun 2016	4.455	4.455	4295	160.

Berdasarkan data tersebut di atas, penyebab pengaduan nasabah didominasi oleh adanya gangguan jaringan pada sistem perbankan terutama pada saat libur panjang dengan peningkatan jumlah transaksi yang cukup signifikan.

2. Melalui *voice of customer*, *voice of employee* dan *voice of business*, BNI Syariah secara berkesinambungan melakukan perbaikan terhadap pelayanan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, salah satu inisiasi yang dilakukan adalah rencana pengembangan BNI *Call Center* layanan syariah yang dapat memberikan solusi dan penanganan pengaduan nasabah sesuai waktu ***service level agreement*** (SLA) yang telah ditetapkan oleh regulator.
Berikut alur penyelesaian pengaduan nasabah :

Alur Penyelesaian Pengaduan Nasabah

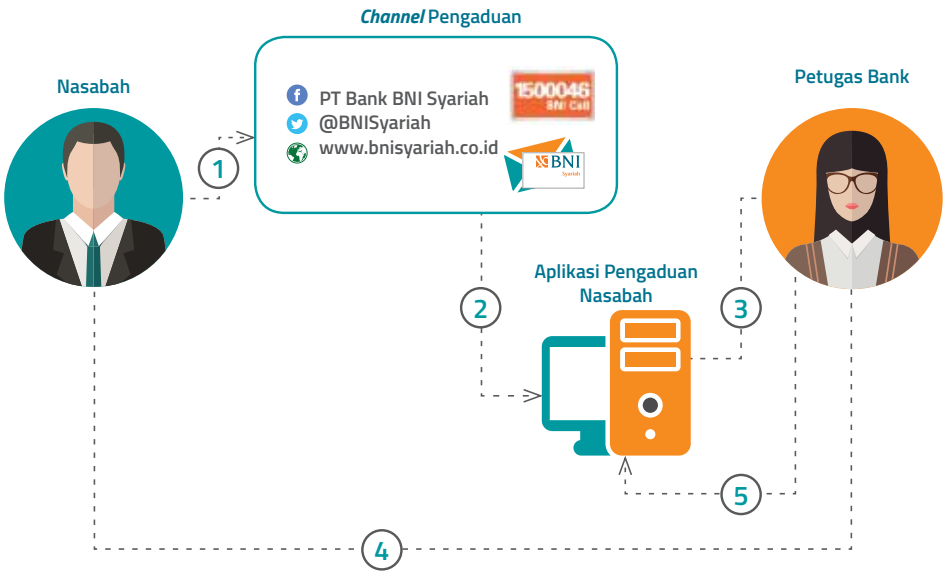

Keterangan :

a. Nasabah menyampaikan pengaduan melalui *channel* pengaduan yang disediakan oleh BNI Syariah antara lain:
   - BNI Syariah *Call Center* 1500046
   - Twitter @ BNI Syariah
   - Facebook PT. Bank BNI Syariah
   - Website www.bnisyariah.co.id
   - Surat ditujukan ke BNI Syariah melalui Kantor Cabang BNI Syariah baik reguler dan mikro yang tersebar di seluruh Indonesia

b. Petugas yang menerima pengaduan dari *channel* pengaduan melakukan verifikasi data *mandatory* dan identifikasi permasalahan.

c. Petugas melakukan input data pengaduan nasabah melalui Aplikasi Pengaduan Nasabah untuk diteruskan ke Divisi/Unit terkait pengaduan nasabah.

d. Petugas Bank menyampaikan solusi pengaduan kepada nasabah yang bersangkutan pada kesempatan pertama setelah menerima penyelesaian pengaduan nasabah.

e. Petugas Bank melakukan *update status* selesai pada Aplikasi Pengaduan Nasabah.

Survei Kepuasan Nasabah

Kepuasan nasabah merupakan kunci penting untuk keberlanjutan usaha BNI Syariah. Untuk itu, Perseroan secara rutin mengadakan pengukuran kualitas layanan nasabah melalui "Program Survei Kepuasan Nasabah." Apapun hasilnya, survei tersebut sangat penting bagi BNI Syariah: apabila tingkat kepuasan nasabah meningkat, selain patut disyukuri, hal itu sekaligus menjadi tantangan agar bisa terus mempertahankan, bahkan meningkatkannya. Jika hasil survei sebaliknya, menurun dibanding tahun sebelumnya, hal itu menjadi pengingat awal bahwa ada "sesuatu" dalam layanan yang diberikan oleh BNI Syariah. Untuk itu, upaya mencari akar masalah, menemukan dan mencari solusi untuk perbaikan menjadi prioritas. Pada tahun 2016, pelaksanaan survei dilakukan di setiap KC/KCP/KK pada bulan Desember 2016 dengan jumlah responden sebanyak 5036 orang. Hasil survei menggambarkan penerimaan nasabah terhadap layanan BNI Syariah adalah 94,69 % pada interval baik sampai dengan sangat baik sekali untuk aspek petugas, fisik, fasilitas & layanan, serta produk. Hasil survei tersebut naik dibanding tahun 2015 yang mencapai 96,56%.

Hasil survei kepuasan pelanggan pada tahun 2016 dapat digambarkan pada grafik berikut:

Petugas

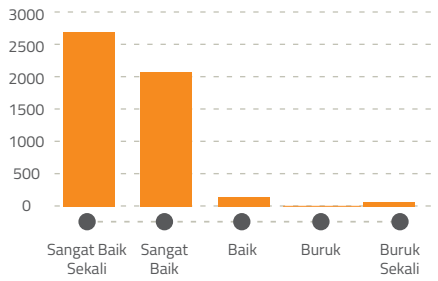

Fasilitas dan Layanan

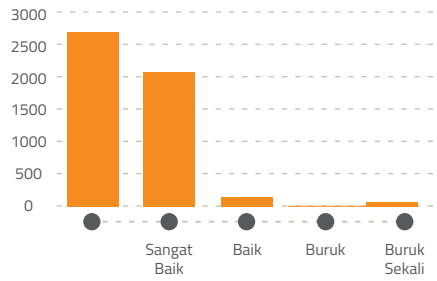

Indek Kepuasan

Salah satu bentuk komitmen BNI Syariah dalam meningkatkan kualitas layanan adalah dengan membentuk *Service Desk* pada awal tahun 2016, yang diharapkan dapat memberikan inovasi dan perbaikan pada pengelolaan kualitas layanan. Sepanjang tahun 2016, kinerja *Service Desk* adalah sebagai berikut:

Program Kerja	Pencapaian
▪ Peringkat 3 Survei Industri ▪ Indek Kualitas Pelayanan Cabang Pada score 87 ▪ Penyelesaian Pengaduan minimum 855 dari total pengaduan Masuk ▪ Program Pengembangan dan Kebijakan Layanan	▪ Service Quality Award kategori Diamond, Service Excellence Award kategori Gold Champion region Sumatera dan Bank Service Excellent Monitoring Peringkat 5 ▪ Kualitas layanan cabang dengan score 82,10 dari target 87 ▪ 96,4% pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2016 dari target 85% ▪ Penambahan 10 mesin Antrian Digital, Enhancement video standar layanan dan Updating kebijakan layanan serta draft buku pedoman CS dan Teller

Selain menghadirkan *Service Desk*, upaya BNI Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dilakukan secara komprehensif dalam memenuhi dan melayani kebutuhan nasabah seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Peningkatan Kualitas Layanan

Petugas	Sistem dan *Support*	Strategi
▪ Melakukan sertifikasi terhadap Supervisor Layanan ▪ Membekali *frontliner* dengan *English conversation for business* ▪ Melatih keterampilan teknis dan pengetahuan *frontliner* terkait *service process* dan *service operation* ▪ Melakukan pengawasan melekat terhadap supervisor	▪ Peningkatan sistem pengaduan nasabah ▪ Jendela Hasanah dan Antrian Digital tahap 2 ▪ Otomasi kinerja layanan cabang ▪ Peningkatan *tools* layanan	▪ *Service differentiation* ▪ *Service talent pool* ▪ Hasanah *service agent* ▪ SCO BNI Syariah ▪ Pengelola layanan cabang ▪ *Benchmarking* ▪ Mengelola *voice of customer* ▪ *Reward and punisment* ▪ *Service to Create business*

JARINGAN KANTOR

Total Outlet Reguler
219

KC Reguler
49

KCP Reguler
101

Kantor Kas
17

Payment Point
29

Mobil Layanan Gerak
23

JARINGAN KANTOR

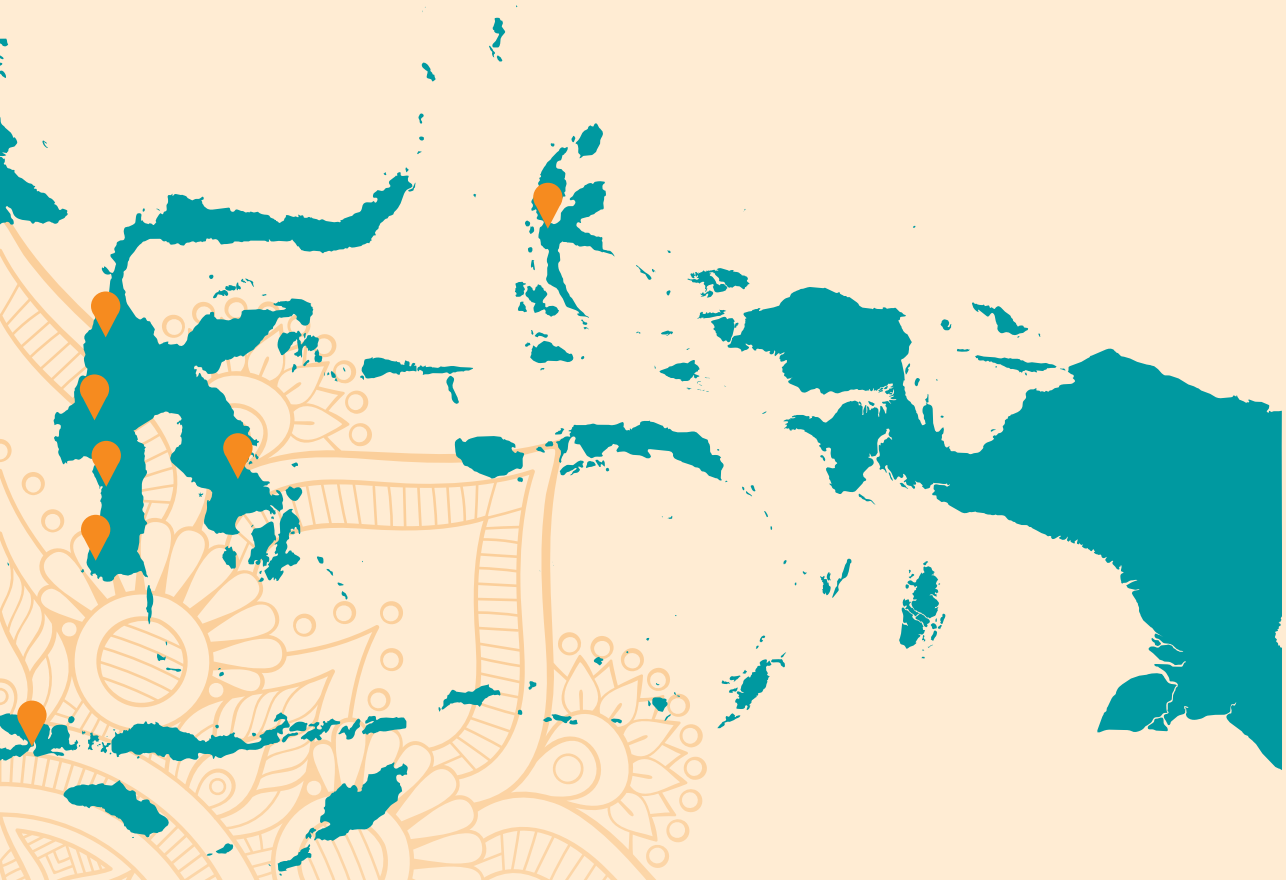

Total Outlet Mikro
106

ATM BNI
16.977

KC Mikro
19

KCP Mikro
70

Kantor fungsional
17

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
1	YOGYAKARTA	KC	Jl. Kusumanegara No. 112	55165	Yogyakarta	Umbulharjo	Muja-muju
2	BULAK SUMUR	KCP	Jl. Bulaksumur Blok H No. 4	55281	Kab. Sleman	Depok	Catur Tunggal
3	GODEAN	KCP	Ruko Pasar Tlogorejo, Jl. Godean Km 4,5 Modinan	55293	Kab. Sleman	Gamping	Banyuraden
4	KALIURANG	KCP	Jl. Kaliurang Km 5 No. 35	55281	Kab. Sleman	Depok	Catur Tunggal
5	BANTUL	KCP	Jl. Jend. Sudirman No.156	55711	Kab. Bantul	Bantul	Bantul
6	Dr. YAP	KK	RS Mata Dr. YAP, Jl. Cik Ditiro No. 5	55223	Yogyakarta	Gondokusuman	Terban
7	FE UII	KK	Jl Pawiro Kuat No. 146	55283	Kab. Sleman	Depok	Condong Catur
8	RS PKU MUHAMMADIYAH	KK	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.20	55122	Yogyakarta	Godomanan	Ngupasan
9	FK UII	PP	JL.Kaliurang KM 14,5 Sleman	55584	Kab. Sleman	Ngemplak	Umbulmartani
10	RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING	PP	JL.Wates KM 5,5	55294	Kab. Sleman	Gamping	Ambarketawang
11	BLG YOGYAKARTA	BLG		55165	Yogyakarta	Umbulharjo	Muja-muju
12	PEKALONGAN	KC	Masjid Syuhada, Jl.Pemuda No.52-54	51119	Pekalongan	Pekalongan Barat	Bendan
13	TEGAL	KCP	Jl. Mayjend. Sutoyo No. 22	52113	Tegal	Tegal Barat	Pekauman
14	RS ISLAM SITI KHODIJAH	PP	JL. Bandung No. 39-47	51125	Kota Pekalongan	Pekalongan Timur	Sugih Waras
15	SEMARANG	KC	Jl. Jend. Ahmad Yani No.152	50136	Semarang	Semarang Tengah	Karang Kidul
16	UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG	KCP	Komplek Kampus UNISSULA, Jl. Raya Kaligawe Km. 4	50112	Semarang	Genuk	Terboyo Wetan
17	UNGARAN	KCP	Jl. Diponegoro No.222A	50512	Kab. Semarang	Unggaran Barat	Genuk
18	TEACHING HOSPITAL	KK	Komplek RSI Unissula, Jl. Raya Kaligawe Km. 4	50112	Semarang	Genuk	Terboyo Wetan
19	HIDAYATULLAH	KK	Jl. Durian Selatan I No. 6,	50263	Semarang	Banyumanik	Srondol Wetan
20	MAGELANG	KCP	Jl. Jenderal Sudirman No.91 RT.01 RW.01 Magelang	56124	Kota Magelang	Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan
21	BLG SEMARANG	BLG		50136	Semarang	Semarang Tengah	Karang Kidul
22	MALANG	KC	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48	65111	Kota Malang	Klojen	Rampal Celaket
23	BATU	KCP	Jl. Agus Salim No.9	65314	Kota Batu	Batu	Sisir
24	PASURUAN	KCP	Jl. Panglima Sudirman No. 32 A-B	67115	Pasuruan	Purworejo	Purworejo
25	KEPANJEN	KCP	Jl. Jend. A. Yani No. 31	65163	Kab. Malang	Kepanjen	Kepanjen
26	PENGADILAN AGAMA KEPANJEN	PP	Jl. Raya Mojosari 77 Kepanjen	65163	Kab. Malang	Kepanjen	Mojosari
27	BANJARMASIN	KC	Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4 No. 385	70235	Banjarmasin	Banjarmasin Timur	Kebun Bunga
28	SUNGAI DANAU	KCP	Jl. Propinsi Km 166 No. 162	72275	Kab. Tanah Bumbu	Satui	Sungai Danau
29	BATULICIN	KCP	Jl. Raya Batulicin No. 160 RT 004 RW 01	72212	Kab. Tanah Bumbu	Simpang Empat	Kampung Baru

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
30	SMAN 7 BANJARMASIN	PP	SMAN 7 Banjarmasin, Komplek Dharma Praja V No. 47 RT. 012 Banjarmasin	70249	Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru
31	BLG BANJARMASIN	BLG		70235	Banjarmasin	Banjarmasin Timur	Kebun Bunga
32	JAKARTA TIMUR	KC	Komplek Graha Mas Pemuda, Blok AB1 dan AB2 Jl. Pemuda, Rawamangun	13220	Jakarta Timur	Pulogadung	Jati
33	KALIMALANG	KCP	Jl. Kalimalang Blok N No.12/H12	13440	Jakarta Timur	Duren Sawit	Duren Sawit
34	CIBUBUR	KCP	Jl. Lapangan Tembak No. 63	13720	Jakarta Timur	Ciracas	Cibubur
35	CILILITAN	KCP	Jl. Dewi Sartika No. 349	13630	Jakarta Timur	Kramat Jati	Cawang
36	OTISTA	KCP	Jl. Raya Otista No. 109, RT 015 RW 009	13330	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidaracina
37	BUARAN	KCP	Jl. Buaran Raya Blok A No. 99	13460	Jakarta Timur	Duren Sawit	Klender
38	RS HAJI JAKARTA	KK	Jl. Raya Pondok Gede No.4	13560	Jakarta Timur	Makasar	Pinang Ranti
39	BLG JAKARTA TIMUR	BLG		13220	Jakarta Timur	Pulogadung	Jati
40	FATMAWATI	KC	Jl. RS Fatmawati No. 30 C – 30 D	12430	Jakarta Selatan	Cilandak	Cilandak Barat
41	UIN SYARIF HIDAYATULLAH	KCP	Wisma Usaha UIN Lt.2 Jl. Ir. H. Juanda - Ciputat	15412	Tangerang Selatan	Ciputat Timur	Cempaka Putih
42	TEBET	KCP	Jl. Tebet Raya No. 7 RT 020/001 Blok A Persil 1 C	12810	Jakarta Selatan	Tebet	Tebet Barat
43	BINTARO VETERAN	KCP	Jl. RC Veteran No. 17 A RT 04/12	12330	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Bintaro
44	CILANDAK	KCP	Jl. Cilandak KKO No. 5 C RT 014 RW 008	12550	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Ragunan
45	PANGLIMA POLIM	KCP	Jl. Panglima Polim Raya No.71	12160	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Melawai
46	KALIBATA	KCP	Jl. Raya Pasar Minggu,RT 01 RW 07 Nomor 6B,	12740	Jakarta Selatan	Pancoran	Kalibata
47	JUANDA CIPUTAT	KK	Jl. Ir. H. Juanda RT 004 RW 08 No. 75 AA	15419	Tangerang Selatan	Ciputat Timur	Cireundeu
48	RS THT	PP	Jalan Proklamasi No.43 Menteng Jakarta Pusat	10320	Jakarta Pusat	Menteng	Pegangsaan
49	BLG FATMAWATI	BLG		12430	Jakarta Selatan	Cilandak	Cilandak Barat
50	BANDUNG	KC	Jl. Buah Batu No.157 C	40265	Bandung	Lengkong	Cijagra
51	CIGONDEWAH	KCP	Taman Kopo Indah II Ruko Blok 1B No.18	40218	Kab. Bandung	Marga Asih	Rahayu
52	DAGO	KCP	Jl. Ir. H. Djuanda No. 298	40116	Bandung	Bandung Wetan	Tamansari
53	SUROPATICORE	KCP	Komplek Perkantoran Suropaticore Blok B No. 8 Jl. PHH Mustofa No. 39	40192	Bandung	Cibeunying Kidul	Pasir Layung
54	CIMAHI	KCP	Jl. Raya Cibabat No. 444	40513	Cimahi	Cimahi Utara	Cibabat
55	GARUT	KCP	JL. Ciledug No.130 RT.02 RW.07	44112	Kab.Garut	Garut Kota	Kota Kulon
56	GEGER KALONG	KK	Jl. Gegerkalong Girang No. 27E, RT 05 RW 03,	40153	Bandung	Sukasari	Geger Kalong
57	JATINANGOR	KK	Jl. Raya Jatinangor No.100	45363	Kab. Sumedang	Jatinangor	Cibeusi

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
58	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PP	Univ. Pendidikan Indonesia, Gedung Prof. Garnadi Prawirosudirdjo Jl. Dr. Setiabudi No 229 Bandung	40154	Kota Bandung	Sukasari	Isola
59	BLG BANDUNG	BLG		40265	Bandung	Lengkong	Cijagra
60	PADANG	KC	Jl. Belakang Olo No. 45	25117	Padang	Padang Barat	Olo
61	BANDAR BUAT	KCP	Jl. Rimbo Datar RT 003 RW 02	25231	Padang	Lubuk Kilangan	Bandar Buek
62	GAJAH MADA	KCP	Jl. Gajah Mada No.21	25143	Padang	Nanggalo	Kampung Olo
63	DHARMASRAYA	KCP	Jl. Lintas Sumatera KM.1, Jorong Simpang Pogang Nagari IV Koto Pulau Punjung	27573	Dharmasraya	Pulau Punjung	IV Koto
64	RS YARSI	KK	Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun	25137	Padang	Padang Utara	Gunung Pangilun
65	RS BUNDA MEDICAL CENTER	PP	Jl. Proklamasi No.37	25211	Padang	Padang Selatan	Alang Laweh
66	MAKASSAR	KC	Jl. Andi Pangeran Pettarani Komp. Ruko Business Center Sardony No.1/2,	90231	Makassar	Panakkukang	Masale
67	GOWA	KCP	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 248B	92111	Kab. Gowa	Somba Opu	Sungguminasa
68	LATIMOJONG	KCP	Jl. Gunung Latimojong Komplek Ruko Metro Square Blok E No. 1	90141	Makassar	Makassar	Lariang Bangi
69	RS IBNU SINA	KK	Jl. Urip Sumoharjo KM. 5 No.264	90232	Makassar	Panakukkang	Karuwisi
70	UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR	KK	Jl. Abdul Kadir No.70	90223	Makassar	Tamalate	Jongaya
71	BLG MAKASSAR	BLG		90231	Makassar	Panakkukang	Masale
72	MEDAN	KC	Jl. Kapten Maulana Lubis No. 12	20112	Medan	Medan Petisah	Petisah Tengah
73	KATAMSO	KCP	Jl. Brigjend Katamso No. 672 A Kampung Baru	20158	Medan	Medan Maimun	Kampung Baru
74	BINJAI	KCP	Pertokoan Maju Bersama Blok A No.3, Jl. Sukarno-Hatta Binjai Timur.	20732	Medan	Binjai Timur	Timbang Langkat
75	PUSAT PASAR MEDAN	KCP	Jl. Pasar Pusat No. 160	20212	Medan	Medan Kota	Pusat Pasar
76	UNIV. ISLAM SUMATERA UTARA	PP	JL. Sisingamaraja Teladan	20217	Medan	Medan Kota	Teladan Barat
77	BLG MEDAN	BLG		20112	Medan	Medan Petisah	Petisah Tengah
78	PALEMBANG	KC	Jl. Jendral Sudirman KM 3,5	30127	Kota Palembang	Ilir Timur 1	20 Ilir
79	LUBUK LINGGAU	KCP	Jl. Yos Sudarso No. 18	31621	Linggau	Lubuk Linggau Timur (I)	Taba Jamekeh
80	DEMANG	KCP	Jl. Demang Lebar Daun No. 507 EF	30137	Kota Palembang	Ilir Barat I	Lorok Pakjo
81	BLG PALEMBANG	BLG		30127	Kota Palembang	Ilir Timur 1	20 Ilir
82	BENDUNGAN HILIR	KC	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A - B	10210	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Bendungan Hilir
83	KEMENTERIAN AGAMA RI	KCP	Gedung Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4	10710	Jakarta Pusat	Sawah Besar	Pasar Baru
84	MAHKAMAH AGUNG	KCP	Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13	10110	Jakarta Pusat	Gambir	Gambir

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
85	JAKARTA PUSAT	KCP	Bank BNI JPU Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav.1	10220	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Karet Tengsin
86	TEMPO PAVILION	KCP	Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11	12950	Jakarta Selatan	Setia Budi	Kuningan Timur
87	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG	KCP	Jl. Jend. A. Yani Kav. 58	10510	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur
88	KRAMAT	KCP	Jl. Salemba Raya No.19,	10440	Jakarta Pusat	Senen	Paseban
89	ROXY	KCP	Jl. KH. Hasyim Ashari No.56,	10140	Jakarta Pusat	Gambir	Duri Pulo
90	MAMPANG	KCP	Ruko Mampang Square, Jalan Warung Buncit No. 88 Blok A4,	12790	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	Tegal Parang
91	LIPIA	PP	JL. Buncit Raya No.5A Ragunan Pasar Minggu	12550	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Ragunan
92	BLG BENDUNGAN HILIR	BLG		10210	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Bendungan Hilir
93	SURABAYA	KC	Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A – 8B	60226	Surabaya	Dukuh Pakis	Prada Kali Kendal
94	RAJAWALI	KCP	Jl. Rajawali No.68	60175	Surabaya	Krembangan	Krembangan Selatan
95	DIPONEGORO	KCP	Jl. Raya Diponegoro No. 54 C	60241	Surabaya	Wonokromo	Darmo
96	SIDOARJO	KCP	Jl. Gajah Mada No. 179 RT 017/RW 03	61234	Kab. Sidoarjo	Sidoarjo	Bulu Sidokare
97	GRESIK	KCP	Jl. Panglima Sudirman No. 93-A Ruko Kavling 01	61111	Kab. Gresik	Gresik	Sidokumpul
98	MOJOKERTO	KCP	Jl. Mojopahit No. 428-430 RT001/ RW002	61321	Mojokerto	Prajurit Kulon	Kranggan
99	SUMENEP	KCP	JL.Diponegoro No.63 RT.001/RW.004 Kab.Sumenep	69416	Kab. Sumenep	Kota Sumenep	Bangselok
100	BLG SURABAYA	BLG		60226	Surabaya	Dukuh Pakis	Prada Kali Kendal
101	PEKANBARU	KC	Jl. Jend.Sudirman No. 484	28126	Pekanbaru	Sukajadi	Jadirejo
102	PANAM	KCP	Jl. HR Subrantas No. 5 C	28291	Pekanbaru	Tampan	Tuah Karya
103	PANGKALAN KERINCI	KCP	Jl. Maharaja Indra No.35, RT 001 RW 010	28381	Kab. Pelalawan	Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci Kota
104	UIN SUSKA	KK	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Gedung Fakultas Pertanian dan Peternakan Jl. HR Soebrantas no.155 KM 18,	28293	Pekanbaru	Tampan	Simpang Baru
105	BLG PEKANBARU	BLG		28126	Pekanbaru	Sukajadi	Jadirejo
106	CIREBON	KC	Jl. Sisingamangaraja No. 28	45112	Cirebon	Lemahwungkuk	Panjunan
107	PLERED	KCP	Jl. Ir. Juanda No.36,	45153	Cirebon	Cirebon Barat	Tengah Tani
108	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON	PP	Kampus UMC, Jalan Fatahillah	45611	Kab. Cirebon	Sumber	Watu Belah
109	BLG CIREBON	BLG		45112	Cirebon	Lemahwungkuk	Panjunan
110	SURAKARTA	KC	Jl. Slamet Riyadi No. 318	57141	Surakarta	Laweyan	Sriwedari
111	SRAGEN	KCP	Komplek Atrium Plaza Blok F Jl. Raya Sukowati No. 302-304	57213	Kab. Sragen	Sragen	Sragen
112	KLATEN	KCP	Jl. Pemuda No.11	57414	Kab. Klaten	Klaten Tengah	Bareng

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
113	STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN	PP	JL. Jombor Indah KM 1	57419	Kab. Klaten	Klaten Tengah	Buntalan
114	BLG SURAKARTA	BLG		57141	Surakarta	Laweyan	Sriwedari
115	BOGOR	KC	Jl. Pajajaran Raya No. 63 Kota Bogor	16153	Kota Bogor	Bogor Utara	Banjarjati
116	TAJUR	KCP	Jl. Raya Tajur No.88 D	16141	Kota Bogor	Bogor Timur	Tajur
117	CIBUBUR COUNTRY	KCP	Ruko Cibubur Country No. 6	16967	Kab. Bogor	Gunung Putri	Nagrag
118	CIBINONG	KCP	Perum Graha Kartika Pratama,Ruko F No.10,	16911	Kab. Bogor	Cibinong	Cibinong
119	SENTUL	KCP	Komplek Mall Bellanova Country Blok RK 1, Kavling No. 5,	16810	Bogor	Babakan Madang	Sentul
120	BALIKPAPAN	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 30	76113	Balikpapan	Balikpapan Selatan	Klandasan Ilir
121	BALIPAPAN BARU	KCP	Ruko Balikpapan Baru Blok D2 No. 3 RT 048	76114	Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai
122	BLG BALIKPAPAN	BLG		76113	Balikpapan	Balikpapan Selatan	Klandasan Ilir
123	JAKARTA UTARA	KC	Jl. Boulevard Raya QA.I/1 Kelapa Gading Barat	14240	Jakarta Utara	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat
124	PASAR KOJA	KCP	Jl. Kramat Jaya No. 20 Blok 3-4	14260	Jakarta Utara	Koja	Tugu Utara
125	ENGGANO	KCP	Jl. Enggano No. 40 A	14310	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Tanjung Priok
126	HARCO MANGGA DUA	KCP	Komplek Harco Agung Sedayu Blok D No. 5 Jl. Mangga Dua Raya	10730	Jakarta Utara	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan
127	CEMPAKA MAS	KCP	Rukan Graha Cempaka Mas, Jl. Yos Sudarso No. C/30	10640	Jakarta Pusat	Kemayoran	Sumur Batu
128	SUNTER	KCP	Rukan Komplek Griya Inti Sentosa Blok A-1, No. 31	14350	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Sunter Agung
129	KBN CAKUNG	KCP	Komplek Bisnis Centre KBN Cakung Jl. Jawa Blok A 14-1 dan A 14-2	14140	Jakarta Utara	Cilincing	Sukapura
130	RSIJ SUKAPURA	KK	RS. Islam Jakarta Sukapura, Jl. Tipar Cakung No. 5 Sukapura	14140	Jakarta Utara	Cilincing	Sukapura
131	RS PELABUHAN JAKARTA	KK	RS. Pelabuhan Jakarta, Jl. Kramat Jaya no 1 Tanjung Priok	14260	Jakarta Utara	Koja	Tugu Utara
132	BLG JAKARTA UTARA	BLG		14240	Jakarta Utara	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat
133	BUMI SERPONG DAMAI	KC	Jl. Pahlawan Seribu ITC BSD No. 21-23A	15322	Tangerang Selatan	Serpong	Lengkong Wetan
134	CIMONE	KCP	Jl.Merdeka Raya No.21 D	15116	Tangerang	Karawaci	Cimone Jaya
135	GADING SERPONG	KCP	Jl. Boulevard Gading Serpong Blok BA-2 No. 23 Ruko Financial Centre Gading Serpong	15810	Tangerang	Kelapa Dua	Pakulonan Barat
136	BINTARO KEBAYORAN ARCADE	KCP	Ruko Kebayoran Arcade Bintaro KA / C3 No. 50 Jln Boulevard Bintaro Jaya Sektor 7 Pusat Kawasan Niaga	15220	Tangerang Selatan	Pondok Aren	Pondok Jaya
137	PAMULANG	KCP	OGIE Plaza Jl. Siliwangi No. 8, RT 2 RW 2	15416	Tangerang Selatan	Pamulang	Benda Baru
138	PONDOK PINANG	KCP	JL. Ciputat Raya, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jaksel	12310	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Pondok Pinang

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
139	TANJUNGKARANG	KC	Jl. Jend.Sudirman No. 62	35118	Bandar Lampung	Tanjung Karang Pusat	Enggal
140	BANDAR JAYA	KCP	Jl. Proklamator No. 136	34163	Kab. Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Bandar Jaya Timur
141	KEDIRI	KC	Ruko Hayam Wuruk Trade Centre Blok A.5 - A.6, Jl. Hayam Wuruk	64121	Kediri	Kediri Kota	Baluwerti
142	MADIUN	KCP	Jl. Mastrip No. 56	63117	Madiun	Kartoharjo	Klegen
143	TULUNGAGUNG	KCP	Jl. Supriyadi No.41, Ruko Nirwana	66218	Tulungagung	Tulungagung	Jepun
144	GUDANG GARAM	KCP	Jl. Mataram No.180 Kopkar MEKAR Gudang Garam	64122	Kediri	Kediri Kota	Ngadirejo
145	UNISKA	KK	Kampus UNISKA Jl. Sersan Suharmaji No. 38	64128	Kediri	Kediri Kota	Manis Renggo
146	PG, TK & SD PLUS RAHMAT	PP	PG, TK dan SD Plus Rahmat, Jl. Slamet Riyadi No. 32 A	64124	Kota Kediri	Kota	Banjaran
147	STIKES SURYA MITRA HUSADA	PP	(STIKES) Surya Mitra Husada, Jl. Manila 37	64126	Kota Kediri	Tirtoudan	Sumberence
148	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI	PP	Jl. Ahmad Dahlan No. 76 RT.027 RW.009	64112	Kota Kediri	Mojoroto	Mojoroto
149	UNIVERSITAS KADIRI	PP	Kampus Universitas Kadiri JL. Selomangleng No.1 Kediri	64115	Kota Kediri	Mojoroto	Pojok
150	PONDOK PESANTREN AL-MAHRUSIYAH	PP	Yayasan Al Mahrusiyah, JL. KH Abdul Karim RT.001 RW.001	64177	Kota Kediri	Mojoroto	Lirboyo
151	JEMBER	KC	Jl. Ahmad Yani No. 39	68137	Jember	Kaliwates	Kepatihan
152	BANYUWANGI	KCP	Jl. PB Sudirman, Ruko Pesona Intan No. 5,	68415	Kab. Banyuwangi	Banyuwangi	Panderejo
153	BANDA ACEH	KC	Jl. Tengku.H.M. Daud Beureueh No.33c	23122	Banda Aceh	Kuta Alam	Laksana
154	UIN Ar-Rainry Banda Aceh	PP	Gedung Biro Akademik, JL. Syeikh Abdurrauf	23111	Banda Aceh	Syiah Kuala	Kopelma Darussalam
155	RS ZAINOEL ABIDIN	PP	Jl. Tgk. Daud Beureueh No.108	23126	Banda Aceh	Kuta Alam	Lampriet
156	BEKASI	KC	Komplek Sentra Niaga Jl. Jend. A. Yani Blok A6 No. 3-3A	17144	Bekasi	Bekasi Selatan	Kayuringin Jaya
157	JABABEKA CIKARANG	KCP	Ruko CBD Blok/Kavling AA3 Blok CD No. 1 Jl. Niaga Raya	17530	Kab. Bekasi	Cikarang Selatan	Pasir Sari
158	TAMBUN	KCP	Jl. Sultan Hasanudin No. 6A RT 003 RW 003	17510	Kab. Bekasi	Tambun Selatan	Mekarsari
159	PONDOK GEDE	KCP	Plaza Pondok Gede Ruko Blok A Nomor 01	17411	Bekasi	Pondok Gede	Jatiwaringin
160	HARAPAN INDAH	KCP	Jl. Bulevar Hijau Raya blok B8/17	17132	Bekasi	Medan Satria	Medan Satria
161	SEKOLAH PUTRADARAMA	PP	Putradarma Islamic School, Kampung Buwek Jaya RT 001 RW 002	17510	Kab. Bekasi	Tambun Selatan	Sumber Jaya
162	SEKOLAH TERATAI PUTIH GLOBAL BEKASI	PP	Sekolah Teratai Putih Global Bekasi, Jl. Kampus Teratai Putih No. 1, Cimuning Mustikajaya, Bekasi	17158	Bekasi	Mustika Jaya	Mustika Jaya
163	YAYASAN AL FIDA	PP	Sekolah Al Fida Cendekia, Jalan Dami No. 08 RT 005 RW 003	17510	Kab. Bekasi	Tambun Selatan	Setia Mekar
164	BLG BEKASI	BLG		17144	Bekasi	Bekasi Selatan	Kayuringin Jaya

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
165	BATAM	KC	Jl. Raden Patah No. 67, 69 dan 71	29432	Batam	Lubuk Baja	Baloi Indah
166	BATUAJI	KCP	Jl. Batuaji Komplek Sinar Jaya No. 8 (Depan Pasar Aviari)	29438	Batam	Batuaji	Buliang
167	TANJUNG BALAI KARIMUN	KCP	Komp. Pertokoan Karimun Centre Jl. A. Yani Blok A No. 6 (Kolong)	29661	Batam	Karimun	Sungai Lakam
168	POTEK NEGERI BATAM	PP	Parkway Street, Batam Center	29461	Batam	Batam Kota	Teluk Tering
169	BLG BATAM	BLG		29432	Batam	Lubuk Baja	Baloi Indah
170	JAKARTA BARAT	KC	Ruko Mediterania No. 1,Jl. Meruya Ilir Raya	11630	Jakarta Barat	Kembangan	Srengseng
171	UNIVERSITAS TRISAKTI	KCP	Universitas Trisakti Kampus A Gedung H Lantai Dasar Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol	11450	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	Grogol
172	CENGKARENG	KCP	Ruko Mutiara Taman Palem Blok A5 No.9 Jl. Kamal Raya Lingkar Luar Barat Cengkareng,	11730	Jakarta Barat	Cengkareng	Cengkareng Timur
173	CILEDUG	KCP	Jl. HOS Cokroaminoto, Ruko CBD Ciledug, Blok A2 no. 1	15157	Tangerang	Karang Tengah	Karang Timur
174	BLG JAKARTA BARAT	BLG		11630	Jakarta Barat	Kembangan	Srengseng
175	CILEGON	KC	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 A-C	42416	Cilegon	Jombang	Sukmajaya
176	SERANG	KCP	Jl. Ahmad Yani No.34	42117	Serang	Serang	Cipare
177	TANGERANG	KC	Ruko Premium Bisnis Park Tangerang City Blok A No. 9 Jl. Jend Sudirman	15118	Tangerang	Tangerang	Babakan
178	KARAWACI	KCP	Ruko Mutiara Karawaci Blok B No. 27	15810	Tangerang	Kelapa Dua	Bencongan Indah
179	SMP INSAN RABBANY	PP	BSD City Sektor 1-4 Blok A1 JL. Rawa Buntu Utara	15310	Tangerang Selatan	Serpong	Rawa Mekar Jaya
180	BLG TANGERANG	BLG		15118	Tangerang	Tangerang	Babakan
181	DEPOK	KC	Ruko Aarden Margonda No. 4-5 Jl. Margonda Raya	16423	Depok	Beji	Kemiri Muka
182	CINERE	KCP	Ruko Pasar Segar Cinere, Blok RA 3, Jl. Cinere Raya No. 145, RT 001 RW 008	16514	Depok	Cinere	Cinere
183	SAWANGAN	KK	Ruko Sari Plaza, Jl. Bojongsari No. 1,	16516	Depok	Sawangan	Bojongsari Baru
184	SAMARINDA	KC	Jl. Ir. Juanda No 216 B	75124	Samarinda	Samarinda Ulu	Air Hitam
185	TARAKAN	KCP	Jl. Yos Sudarso No. 9	77113	Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit
186	PONTIANAK	KC	Jl. Ir. H Juanda No. 65-66	78117	Pontianak	Pontianak Kota	Darat Sekip
187	SINTANG	KCP	Jl. MT. Haryono No.26 C, RT 10 RW 3	78614	Kab. Sintang	Sintang	Kapuas Kanan Hulu
188	PURWOKERTO	KC	Jl. Jendral Sudirman Timur No. 689	53111	Banyumas	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan
189	CILACAP	KCP	Jl. S. Parman Ruko Pelangi No.10E	53223	Kab. Cilacap	Cilacap Tengah	Sidanegara
190	SURABAYA DHARMAWANGSA	KC	Jl. Dharmawangsa No. 115 A	60282	Surabaya	Gubeng	Kertajaya
191	NGAGEL	KCP	Ruko RMI Blok J.16 Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya	60284	Surabaya	Gubeng	Baratajaya
192	JAMBI	KC	Jl. Hayam Wuruk No. 73 - 74	36136	Jambi	Jelutung	Jelutung

OUTLET REGULER

No.	Nama *Outlet*	Status *Outlet*	Alamat	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan
193	BLG JAMBI	BLG		36136	Jambi	Jelutung	Jelutung
194	DENPASAR	KC	Jl. Gatot Subroto No. 288 A - 288 B	80239	Denpasar	Denpasar Utara	Tonja
195	MATARAM	KC	Jl. Pejanggik No. 23 Cakranegara	83231	Mataram	Cakranegara	Cakranegara Barat
196	MASBAGIK	KCP	Jl. Raya Masbagik KM 15 Bagikbontong	83661	Lombok Timur	Masbagik	Paok Motong
197	BLG MATARAM	BLG		83231	Mataram	Cakranegara	Cakranegara Barat
198	BUKITTINGGI	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 16 B-C	26117	Bukittinggi	Guguk Panjang	Tarok Dipo
199	PAYAKUMBUH	KCP	Jl. Jend. A. Yani No.89	26221	Payakumbuh	Payakumbuh Barat	Nunang
200	BLG BUKITTINGGI	BLG		26117	Bukittinggi	Guguk Panjang	Tarok Dipo
201	BENGKULU	KC	Jl. Jenderal Sudirman No. 41-43, RT 09 RW 13,	38118	Bengkulu	Teluk Segara	Tengah Padang
202	UNIV. MUHAMMADIYAH BENGKULU	PP	Jl. Salak Raya Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu	38221	Bengkulu	Singaran Pati	Lingkar Timur
203	KARAWANG	KC	Jl. Panatayuda I No 68	41312	Karawang	Karawang Barat	Nagasari
204	TASIKMALAYA	KC	Jl. Mesjid Agung No. 26, Blok Kaum Kaler	46112	Tasikmalaya	Tawang	Tawangsari
205	YAYASAN AL MUTTAQIN (SMP & SMA)	PP	SMP Yayasan Almuttaqin Alamat Jl Sutisna Senjaya 233	46111	Kota Tasikmalaya	Tawang	Cikalang
206	YAYASAN AL FURQON	PP	Jl. Mekarsari	46412	Kab. Tasikmalaya	Singasari	Singaparna
207	KUDUS	KC	Jl. A.Yani No .23 A-B,	59317	Kab. Kudus	Kudus Kota	Panjunan
208	JEPARA	KCP	Jl. Pemuda No. 2 A	59412	Kab. Jepara	Jepara	Potroyudan
209	PALANGKARAYA	KC	Jl. A.Yani No. 59	73111	Palangkaraya	Pahandut	Pahandut
210	STAIN PALANGKARAYA	PP	STAIN Palangkaraya Jalan G.obos IX, Komplek Islamic Center	73111	Palangkaraya	Jekan Raya	Menteng
211	BANJARBARU	KC	Jl. A.Yani Km 35,5	70714	Banjarbaru	Banjarbaru Utara	Komet
212	BANJARBARU	KCP	Jl. Ahmad Yani Km.35	70714	Banjarbaru	Banjarbaru Utara	Kemuning
213	PALU	KC	Jl. Jenderal Sudirman No. 7	94111	Palu	Palu Timur	Besusu Tengah
214	UNIVERSITAS AL-KHAIRAAT PALU	PP	Univ. Al-Khairaat Palu, Jalan Diponegoro No 39	94221	Palu	Palu Barat	Lere
215	KENDARI	KC	Jl. MT Haryono No. 155	93118	Kendari	Kadia	Bende
216	SUKABUMI	KC	Jl. A.Yani no. 29	43113	Sukabumi	Cikole	Gunungparang
217	CIANJUR	KCP	Jl. Kyai Haji Abdullah bin Nuh Ruko No. 1-2	43211	Cianjur	Cianjur	Pamoyanan
218	LHOKSEUMAWE	KC	Jl. Merdeka 25E	24313	Lhokseumawe	Banda Sakti	Simpang Empat
219	BIREUEN	KCP	Jl.Sultan Iskandar Muda no.5	24251	Kab. Bireuen	Kota Juang	Bireun Meunasah Capa

OUTLET MIKRO

No.		Type	Nama *Outlet* Cabang Mikro	Area	Alamat
1.		KCM	BOGOR KEDUNG BADAK (MBS)-859	BOGOR	Komplek Ruko 10, Jalan K.H. Sholeh Iskandar, Km.6,6 Ruko E, RT 006/003
	a.	KCPM	Bogor Grosir	BOGOR	Jl. Perintis Kemerdekaan Komplek Pertokoan Merdeka Ruko Blok A No.10,
	b.	KCPM	Cileungsi	BOGOR	Jl. Raya Narogong Ruko Cileungsi Trade Centre Blok E/9
	c.	KCPM	Citeureup	BOGOR	Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 21 Ruko Citeureup Indah
	d.	KCPM	Depok	BOGOR	Jl. Raya Citayam Komplek Pertokoan Kartini Grande 46G
	e.	KCPM	Cibinong	BOGOR	Jl. Mayor Oking Jayaatmaja Ruko Erema No.158
2.		KCM	VETERAN MAKASSAR (MVM)-860	MAKASSAR	Jl. Veteran Selatan No. 284 A,
	a.	KCPM	Tamalanrea	MAKASSAR	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko Parumpa No.8 KM.14
	b.	KCPM	Pangkep	MAKASSAR	Jl. Kemakmuran Poros Makassar - Parepare KM.51
	c.	KCPM	Sungguminasa Gowa	MAKASSAR	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 248 B
	d.	KCPM	Bulukumba	MAKASSAR	Jl. SAM Ratulangi
	e.	KFOM	Takalar	MAKASSAR	Jl. Jend. Sudirman
3.		KCM	TELUK BETUNG (MTB)-861	LAMPUNG	Jl. Diponegoro No 6
	a.	KCPM	Pringsewu	LAMPUNG	Jl. Ahmad Yani No 196, Pringsewu
	b.	KCPM	Antasari	LAMPUNG	Jalan Pangeran Antasari RT001/RW01 No. 126 A Bandar Lampung
	c.	KCPM	Unit 2 Banjar Agung	LAMPUNG	Jl, Raya Lintas Timur Simpang 5 - Unit II, Banjar Agung
	d.	KCPM	Bandar Jaya	LAMPUNG	Jl. Proklamator
	e.	KFOM	Metro	LAMPUNG	Jalan Imam Bonjol RT 20/RW 04
4.		KCM	RUNGKUT (MRT)-862	SURABAYA	Jl. Raya Kali Rungkut No. 5, Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok A-1
	a.	KCPM	PS Gresik	SURABAYA	Ruko Kartini Megah Blok B 2, Jl. RA Kartini No.150-152
	b.	KCPM	Sunan Ampel	SURABAYA	Jl. Nyamplungan No. 189
	c.	KCPM	PS Sidoarjo	SURABAYA	Jl. Gajahmada No. 179
	d.	KCPM	PS Babat	SURABAYA	Jl. Raya Babat No 125, Babat Lamongan
	e.	KFOM	Mojokerto	SURABAYA	Jalan Surodinawan No. 6 G, RT 001/ RW 001

OUTLET MIKRO

	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan	Provinsi	Telp	Fax
	16164	Bogor	Tanah Sereal	Kedung Badak	Jawa Barat	0251-8377001, 8345211, 8345225	0251 - 8345211
	16125	Kab. Bogor	Bogor Tengah	Kebon Kelapa	Jawa Barat	0251-834 1477, 0251-8341400	0251 – 8341433
	16820	Kab. Bogor	Cileungsi	Cileungsi	Jawa Barat	021-82481235	021-82481233
	16810	Kab. Bogor	Citeureup	Citeureup	Jawa Barat	021-87940441	021-87909466
	16431	Kota Depok	Pancoran Mas	Depok	Jawa Barat	021-77204489	021 – 29503494
	16918	Kab. Bogor	Cibinong	Cirimekar	Jawa Barat	021-46243939	021 – 87907786
	90133	Makassar	Mamajang	Bonto Lebang	Sulawesi Selatan	0411-879132, 879518, 879365	0411-879518
	90241	Makassar	Biringkanaya	Daya	Sulawesi Selatan	0411-590540	0411-590540
	90617	Kab. Pangkep	Pangkajene	Mampasaile	Sulawesi Selatan	0410-22080	-
	92111	Kab. Gowa	Somba Opu	Sungguminasa	Sulawesi Selatan	0411-861791	-
	92561	Kab. Bulukumba	Gantarang	Polewali	Sulawesi Selatan	0413-83584	0413-83586
	92212	Kab. Takalar	Pattallassang	Kalabbirang	Sulawesi Selatan	0418-2310023, 2310024	0418-2310023
	35214	Kodya Bandar Lampung	Teluk Betung Utara	Sumur Batu	Lampung	0721- 472651/ 472644/ 472639/ 472642	0721 472644, 0721 472639
	35373	Kab. Pringsewu	Pringsewu	Pringsewu Timur	Lampung	0729 23532/ 0729 23534/ 0828 8009 0999/ 0828 8009 1999	0729-23532
	35134	Kota Bandar Lampung	Sukarame	Tanjung Baru	Lampung	0721 5600159/ 5600481	0721 250786
	34595	Kab. Tulang Bawang	Banjar Agung	Dwi Warga Tunggal Jaya	Lampung	0726 750 256/ 0726 750 257/ 082880091565/ 0828 8009 1566	0726-750256
	34162	Kab. Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Bandar Jaya Barat	Lampung	0725 528 556/ 0725 528 866/ 0828 8009 1557/ 0828 8009 1558	0725-528866
	34111	Kab. Lampung Tengah	Metro Pusat	Imopuro	Lampung	0725 785 2449	-
	60293	Surabaya	Rungkut	Kali Rungkut	Jawa Timur	031-8782609/031-8782608	031-8782609
	61111	Gresik	kebomas	Sidomor	Jawa Timur	031-3970083	031-3971639
	60151	Surabaya	Pabean Cantikan	Nyamplungan	Jawa Timur	031-3537338	031-3537338
	61213	Sidoarjo	Sidoarjo	Bulu Sidokare	Jawa Timur	031-8075710	031-8075711
	62217	Kab.Lamongan	Babat	Lamongan	Jawa Timur	0322-452260	0322-452262
		Kota Mojokerto	Prajuritkulon	Surodinawan	Jawa Timur	0321-326403, 082894066817	0321-326409

OUTLET MIKRO

No.		Type	Nama *Outlet* Cabang Mikro	Area	Alamat
5.		KCM	DINOYO (MDY)-863	MALANG	Jl. Raya Tlogomas No 54
	a.	KCPM	Implant Batu	MALANG	Jl. Agus Salim No.9
	b.	KCPM	Pakis	MALANG	Komplek Ruko Pakisjajar Kav. 6, Jl. Raya Pakis Tumpang
	c.	KCPM	Kepanjen	MALANG	Jl. Akhmad Yani No. 58
	d.	KCPM	Malang Kota	MALANG	Jl. Gatot Subroto No.116
	e.	KCPM	Lumajang	MALANG	Pasar Plaza A , Jalan. PB Sudirman No. 1A,
6.		KCM	TANJUNG JEMBER (MTJ)-864	JEMBER	Komplek Ruko Gajah Mada Square No. A10 - RT 01 RW 10, Jl. Gajah Mada No. 187
	a.	KCPM	Bondowoso	JEMBER	Jl. KH Wahid Hasim 208, Bondowoso
	b.	KCPM	Genteng	JEMBER	Jl. Diponogoro 22 A
	c.	KCPM	Ambulu	JEMBER	Jl. Ahmad Yani 59, Ambulu
	d.	KCPM	Kencong	JEMBER	Jl. Krakatau No.45 Dusun Krajan RT.005/RW.012 No.45 Kencong Jember
7.		KCM	PANAM ARENGKA (MPA)-865	PEKANBARU	Ruko Panam Raya Permai No. 83 Jalan HR Soebrantas KM 8,5 RT.005/002
	a.	KCPM	Flamboyan Bangkinang	PEKANBARU	Jl. Raya Flamboyan Kota Garo Blok B No.01
	b.	KCPM	Pekanbaru Kota	PEKANBARU	Jl. Jend. A. Yani No.21 B
	c.	KCPM	Gunung Raya Kandis	PEKANBARU	Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM 73 No.46
	d.	KCPM	Kota Duri	PEKANBARU	Jl. Jend. Sudirman No.32
	e.	KCPM	Ujung Batu	PEKANBARU	Jl. Jendral Sudirman No.1 RT.03/RW.10
8.		KCM	KOTA BATURAJA (MKB)-866	BATURAJA	Jl. Let. R Hamidi No. 30 RT 03 RW 01
	a.	KCPM	Martapura	BATURAJA	Jl. Pangeran Diponegoro, Tanjung Aman Martapura
	b.	KCPM	Gumawang Belitang	BATURAJA	Jl. Pasar Baru
	c.	KCPM	Prabumulih	BATURAJA	Jl. Jendral Sudirman No. 40
	d.	KCPM	Tugu Mulyo Kayu Agung	BATURAJA	Jl. Lintas Timur KM 130 RT.001 RW.002
	e.	KCPM	Batumarta	BATURAJA	Jl. Poros Psr. Gotong Royong Rt. 014 Rw. 006

	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan	Provinsi	Telp	Fax
	65144	Malang	Lowokaru	Tlogomas	Jawa Timur	0341-578589/0341-2991170/0341-579488	0341-578598
	65314	Malang	Batu	Sisir	Jawa Timur	0341-512540/0341-512537	0341-512537
	65154	Kab. Malang	Pakis	Pakis Jajar	Jawa Timur	0341-793731/0341-793732	0341-793732
	65163	Kab. Malang	Kepanjen	Ardirejo	Jawa Timur	0341-391901/0341-391889	0341-391889
	65118	Malang	Klojen	Sukoharjo	Jawa Timur	0341-344135/0341-344134	0341-344135
	67311	Kota Lumajang	Lumajang	Lumajang	Jawa Timur	0334-888065	0334-888065
	68133	Jember	Kaliwates	Kaliwates	Jawa Timur	0331-413426, 0331-413421, 0331-413428, 0331-413422	0331-413422
	68212	Jember	Bondowoso	Dabasah	Jawa Timur	0332-423660	0332-423650
	68465	Kota Banyuwangi	Genteng	Genteng Kulon	Jawa Timur	0333-844277	0333-844299
	68172	Jember	Ambulu	Ambulu	Jawa Timur	0336-883346	0336-882346
	68167	Kabupaten Jember	Kencong	Jl. Buaran Raya Blok A No. 99	Jawa Timur	0336-321942 / 0336-321930	0336-321942
	28294	Pekanbaru	Tampan	Delima	Riau	0761- 563804 /587556/563944	0761-587556
	28464	Kab. Kampar	Tapung	Tanjung Sawit	Riau	0762- 7320110/7320111	0762-7320111
	28151	Pekanbaru	Senapelan	Jl. RS Fatmawati No. 30 C – 30 D	Riau	0761- 23288	-
	28686	Kab. Siak	Kandis	Simpang Belutu	Riau	082883038213/ 082883038212	-
	28884	Kab. Bengkalis	Mandau	Air Jamban	Riau	0765- 560203	-
	28454	Kab. Rokan Hulu	Ujung Batu	Ujung Batu	Riau	(0762) 7363016 / (0762) 7363412	-
	32111	Kab. Ogan Komering Ulu	Baturaja Timur	Kemalraja	Sumatera Selatan	0735 324888/0735 323333/0735 325522/0735 325554	0735-324888
	32181	Kab. Martapura	Tanjungaman	Pasar Martapura	Sumatera Selatan	0735 481688/0735 481128	-
	32362	Kab. Oku Timur	Gumawang Belitang	Gumawang Belitang	Sumatera Selatan	0735 451151 / 0735 451152	-
	31114	Kota Prabumulih	Prabumulih Timur	Kel. Muaradua	Sumatera Selatan	0713 3300002/0713 3300003	-
	30657	Kab. OKI	Lempuing	Tugumulyo	Sumatera Selatan	0712 3312337	-
	32152	Kab. Ogan Komering Ulu	Lubuk Raja	Batumarta II	Sumatera Selatan	0735-7328345/ 0735-7328321	-

OUTLET MIKRO

No.		Type	Nama *Outlet* Cabang Mikro	Area	Alamat
9.		KCM	LUBUK LINGGAU (MLL)-867	LUBUK LINGGAU	Jl. Yos Sudarso RT 03
	a.	KCPM	Tebing Tinggi	LUBUK LINGGAU	Jl. Letda Abubakardin
	b.	KCPM	Tugu Mulyo Linggau	LUBUK LINGGAU	Jl. Jenderal Sudirman
	c.	KCPM	Muara Beliti	LUBUK LINGGAU	Jl. Lintas Sumatera Komp. Green Residence
	d.	KCPM	Pagar Alam	LUBUK LINGGAU	Jalan Kapten Sanaf
	e.	KCPM	Muara Enim	LUBUK LINGGAU	Jl. Jend Sudirman Kel. Pasar III Talang Jawa
10.		KCM	ASTANA ANYAR (MAA)-868	BANDUNG	Jl. Kopo No.61 A
	a.	KCPM	Sumedang	BANDUNG	Jl. Raya Bandung-Sumedang No.98,
	b.	KCPM	Kopo Sayati	BANDUNG	Jl. Raya Kopo Bihbul No.24A RT.02/RW.02
	c.	KCPM	Pagaden Subang	BANDUNG	Jl. Raya Ahmad Yani Kampung Kaum RT 16 RW 05
	d.	KCPM	Antri Cimahi	BANDUNG	Jl. Raya Cibabat Nomor 106 RT.02 RW.12
11.		KCM	KM.12 PALEMBANG (MKP)-869	PALEMBANG	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Km.12 RT 14/03 Simpang Kades
	a.	KCPM	Sungai Lilin	PALEMBANG	Jl. Palembang Jambi Km.111 RT.017/RW.04
	b.	KCPM	Betung	PALEMBANG	Jl. Raya Palembang-Betung RT.29 RW.07 LK IV
	c.	KCPM	Babat Toman	PALEMBANG	Jl. Palembang Linggau Dusun II
	d.	KCPM	Palembang Kota	PALEMBANG	Jl. Merdeka No.02 Rt.10 Rw.01
	e.	KCPM	Pangkalan Balai	PALEMBANG	Jl. Merdeka Ruko No.2 RT.22/RW.05 Pangkalan Balai
12.		KCM	MATARAM (MMR)-870	MATARAM	Jl. Panca Usaha No. 08 Cakranegara
	a.	KCPM	Praya	MATARAM	Jl. Jend Sudirman No 10B Praya
	b.	KCPM	Masbagik	MATARAM	Jl. Masbagik KM.15 Bagikbontong (Bengkel Las Budi Suci)
	c.	KCPM	Tanjung	MATARAM	Jl. Raya Sokong Tanjung (sebelah dealer Honda)
	d.	KCPM	Selong	MATARAM	Jl. TGH M.Zainuddin Abdul Majid No.34
	e.	KFOM	Bertais	MATARAM	Jalan Sandubaya No. 25

OUTLET MIKRO

	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan	Provinsi	Telp	Fax
	31627	Kab. Musi Rawas	Lubuk Linggau	Watervang	Sumatera Selatan	0733-7329623 / 14 / 16 / 082881131705 / 082881131704	-
	31453	Kab. Empat Lawang	Tebing Tinggi	Pasar Tebing Tinggi	Sumatera Selatan	0702-21897 / 0702-21685	-
	31662	Kab. Musi Rawas	Tugu Mulyo	F Trikoyo	Sumatera Selatan	0733-371772 /082881131710	-
	31661	Kab.Musi Rawas	Muara Beliti	Pasar Muara Beliti	Sumatera Selatan	082881131713 / 082881131714	-
	31512	Kodya Pagar Alam	Tebing Tinggi	Pasar Tebing Tinggi	Sumatera Selatan	0730-622610 / 07	-
	31314	Kab. Muara Enim	Muara Enim	Pasar Tiga	Sumatera Selatan	0734-423232 / 30	-
	40242	Bandung	Astana Anyar	Panjunan	Jawa Barat	022 5209654, 022 5209768	022-5220566
	45362	Kab. Sumedang	Tanjungsari	Desa Tanjungsari	Jawa Barat	022 7914763	022-7914760
	40225	Kab. Bandung	Margahayu	Margahayu Tengah	Jawa Barat	022 5419446	022-5419446
	41252	Kab Subang	Pagaden	Pagaden	Jawa Barat	0260 451460	0260-451461
	40513	Kota Cimahi	Cimahi Utara	Cibabat	Jawa Barat	022 6647852	022-6647892
	30154	Kota Palembang	Sukarami	Sukodadi	Sumatera Selatan	0711- 5645022/ 0711-5645021/0711-5645023	-
	30755	Kab. Musi Banyuasin	Sungai Lilin	Sungai Lilin	Sumatera Selatan	0714-331222 : 0714-321295	-
	30758	Kab. Banyuasin	Betung	Rimba Asam	Sumatera Selatan	0711-5893093; 0711-893087	-
	30752	Kab. Musi Banyuasin	Babat Toman	Toman	Sumatera Selatan	0714- 3311015/ 0714-331016	-
	30135	Palembang	Bukit Kecil	Talang Semut	Sumatera Selatan	0711-519521; 0711-511545	-
	30753	Kab. Banyuasin	Banyuasin III	Kedondong Raye	Sumatera Selatan	0711-891042 / 0711-891466	-
	83239	Kota Mataram	Cakranegara	Cakranegara Barat	Nusa Tenggara Barat	0370 643937 / 0370 643183, Area 0370 643271/ 0370 643721	0370-643721
	83511	Kab. Lombok Tengah	Praya	Praya	Nusa Tenggara Barat	0370 655025/ 0370 655287	0370-655287
	83661	Kab. Lombok Timur	Paok Motong	Desa Paok Motong	Nusa Tenggara Barat	0376 631026/ 0376 631068	0376-631068
	83352	Kab. Lombok Utara	Tanjung	Tanjung Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	0370 6131485 / 0370 6139583	0370-6139583
	83612	Kab. Lombok Timur	Selong	Pancor	Nusa Tenggara Barat	0376 2927005/ 0376 2927027	0376-2927027
		Kota Mataram	Sandubaya	Bertais	Nusa Tenggara Barat		-

OUTLET MIKRO

No.		Type	Nama *Outlet* Cabang Mikro	Area	Alamat
13.		KCM	KOTA JAMBI (MKJ)-871	JAMBI	Jl. Rd. Mataher No. 33 RT.10
	a.	KCPM	Rimbo Bujang	JAMBI	Jl. Pahlawan
	b.	KCPM	Singkut	JAMBI	Jl. Lintas Sumatera RT 011/RW 005,
	c.	KCPM	Pamenang	JAMBI	Jl. Lintas Sumatera KM. 32 komplek ruko baru
	d.	KCPM	Kuamang Kuning	JAMBI	Jl. Batanghari RT.08/RW.03
	e.	KFOM	Sipin	JAMBI	Jalan Kapten Pattimura RT 02
14.		KCM	KOTA BENGKULU (MBK)-872	BENGKULU	Jl. Semangka RT.15/RW.05
	a.	KCPM	Ipuh Mukomuko	BENGKULU	JL. Lintas Barat
	b.	KCPM	Giri Kencana Ketahun	BENGKULU	Jl. Flamboyan
	c.	KCPM	Seluma	BENGKULU	Jl. Merdeka Raya
	d.	KCPM	Ampera Manna	BENGKULU	Jl. Jend. Sudirman
	e.	KFOM	Pagar Dewa	BENGKULU	Jalan Depati Payung Negara Rt 025/ RW 005
15.		KCM	KOTA KENDARI (MKK)-873	KENDARI	Jl. Syech Yusuf No. 12
	a.	KCPM	Muna	KENDARI	Jl. Sukowati
	b.	KCPM	Kolaka	KENDARI	Jl. Dr. Sutomo No. 11
	c.	KCPM	Baubau	KENDARI	Jl. Bataraguru No. 40
	d.	KCPM	Lasusua	KENDARI	Jl. Protokol No. 1B Lasusua
16		KCM	TERNATE (MTT)-874	TERNATE	Jl. Hasan Esa No.79B
	a.	KFOM	Jailolo	TERNATE	Jl. Mohammad Hatta
	b.	KFOM	Tobelo	TERNATE	Jl. Bhayangkara Dusun IV RT 003
	c.	KCPM	Morotai	TERNATE	Jl. Kampung Cina
	d.	KFOM	Labuha	TERNATE	JL. Raya Labuha

OUTLET MIKRO

	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan	Provinsi	Telp	Fax
	31622	Kota Jambi	Pasar Jambi	Orang Kayo Hitam	Jambi	0741 - 7555174 / 0741 - 7555194 / 0741 - 7555274/ 0741 - 7554914	0741-7554914
	37553	Kab. Tebo	Rimbo Bujang	Wiroto Agung	Jambi	0747-31377/31366	0747-31366
	37482	Kab. Sarolangun	Singkut	Bukit Tigo	Jambi	82882087115	0745-9270198
	37352	Kab. Merangin	Pamenang	Simpang Pasar Pamenang	Jambi	0747-331040/331041	0746-331041
	37252	Kab. Bungo	Pelepat Ilir	Purwasari	Jambi	0747-7326026 / 7326027	0747-7326027
	38211	Kota Jambi	Kota Baru	Kenali Besar	Jambi	0736-5511108 / 0736-5511696	-
	38226	Kota Bengkulu	Singaran Pati	Panorama	Bengkulu	0736-347932/ 347963	0736-347935
	38364	Kab. Mukomuko	Ipuh	Pulai Payung	Bengkulu	0737-61170	0737-61170
	38361	Kab. Bengkulu Utara	Ketahun	Giri Kencana	Bengkulu	0737-7524211/12	0737-7524211
	38876	Kab. Seluma	Seluma	Lubuk Lintang	Bengkulu	0736-9125/91236	0736-91235
	38513	Kab.Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Pasar Mulia	Bengkulu	0739-22226	0739-22230
		Kota Bengkulu	Selebar	Pagar Dewa	Bengkulu		-
	93111	Kota Kendari	Mandonga	Korumba	Sulawesi Tenggara	0401-3131317 / 0401-3131318 fax / 0401-3131319	0401-3131318
	93612	Kab. Muna	Katobu	Butung-butung	Sulawesi Tenggara	0403-2523479 / 0403-2523480	-
	93516	Kab. Kolaka	Kolaka	Lamokato	Sulawesi Tenggara	0405-2323152	-
	93726	Kota Baubau	Murhum	Wajo	Sulawesi Tenggara	0402-2823129/0402-2822263	-
	93911	Kab. Kolaka Utara	Lasusua	Lasusua	Sulawesi Tenggara	0821 8902 5196 / 0819 3530 0796	-
	97714	Kota Ternate	Ternate Tengah	Takoma	Maluku Utara	0921-3122162 / 0921-3122141 / 0921-3122169 / 0921 3128574	-
	97752	Kab. Halmahera Barat	Jailolo	Hetabicara	Maluku Utara	0922-2221314/0922-2221340	-
	97762	Kab. Halmahera Utara	Tobelo	Desa Gamsungi	Maluku Utara	0924-262217	-
	97771	Kab. Morotai	Morotai Selatan	Desa Daruba	Maluku Utara	0923-2221092 / 0923-2221167	-
	97719	Kab.Halmahera Selatan	Kec. Bacan	Kel. Labuha	Maluku Utara	0927-2321746 / 0927-2321846	-

OUTLET MIKRO

No.		Type	Nama *Outlet* Cabang Mikro	Area	Alamat
17		KCM	BIMA (MBM)-875	BIMA	Jl. Soekarno Hatta No 53 - 55
	a.	KFOM	Dompu	BIMA	Jl. Mawaadi No 3
	b.	KCPM	Sumbawa Besar	BIMA	Jl. Udang No 10a
	c.	KFOM	Sape	BIMA	Jl. Raya Pelabuhan Sape
18		KCM	PALOPO (MPO)-876	PALOPO	Jl. Andi Jemma No.150
	a.	KFOM	Belopa	PALOPO	Jl. Topoka No. 4
	b.	KFOM	Masamba	PALOPO	Komp. Ruko Pasar Sentral Masamba No.A13-A14
	c.	KCPM	Tomoni	PALOPO	Jl. Trans Sulawesi
	d.	KCPM	Sengkang	PALOPO	Jl. Bau Mahmud No. 18
19		KCM	PAREPARE (MPP)-877	PAREPARE	JL. Lahalede No.15
	a.	KFOM	Wonomulyo	PAREPARE	Jl. Jenderal Sudirman No. 100
	b.	KFOM	Sidrap	PAREPARE	JL. Ahmad Yani, No.72C RT,001/002
	c.	KFOM	Enrekang	PAREPARE	JL. Poros Enrekang RT.02 RW.01
	d.	KFOM	Watansoppeng	PAREPARE	JL. Kemakmuran No. 13

OUTLET MIKRO

	Kode Pos	Dati Ii	Kecamatan	Kelurahan	Provinsi	Telp	Fax
	84119	Kota Bima	Rasanae Barat	Kel. Pane	Nusa Tenggara Barat	(0374) 44447, (0374) 44443, (0374) 44433, (0374) 44461	0374-44447
	84211	Kab. Dompu	Kec. Dompu	Kel. Potu	Nusa Tenggara Barat	(0373) 22322, (0373) 22112	0373-22112
	84311	Kab. Sumbawa	Sumbawa Besar	Seketeng	Nusa Tenggara Barat	(0371) 625078, (0371) 625073	0371-625078
	84182	Kab. Bima	Sape	Desa Naru	Nusa Tenggara Barat	(0374) 71070, (0374) 71058	0374-71058
	91911	Kota Palopo	Wara	Tompotikka	Sulawesi Selatan	(0471) 327432, (0471) 327225, (0471) 327360	-
	91994	Kab. Luwu	Belopa	Tampumia Radda	Sulawesi Selatan	(0471) 3314405	-
	92936	Kab. Luwu Utara	Masamba	Baliase	Sulawesi Selatan	(0473) 21247	-
	92972	Kab. Luwu Timur	Kec. Tomoni	Beringin Jaya	Sulawesi Selatan	(0473) 25044	-
	90912	Kota Sengkang	Tempe	Kelurahan Teddaopu	Sulawesi Selatan	0485 324234	-
	91133	Kota Pare Pare	Soreang	Ujung Baru	Sulawesi Selatan	(0421) 22456, 26534, 24624	-
	91352	Kab. Polewali Mandar	Wonomulyo	Sidodadi	Sulawesi Selatan	(0428) 51408	-
	90111	Kab. Sidenreng Rappang	Maritengae	Lautang Benteng	Sulawesi Selatan	(0421) 3580229, 3580414	-
	91751	Kab.Enrekang	Alla	Buntu Sugi	Sulawesi Selatan	(0420) 2312449	-
	90851	Kab. Soppeng	Lalabata	Botto	Sulawesi Selatan	(0484) 23515	-

09 LAPORAN KEUANGAN

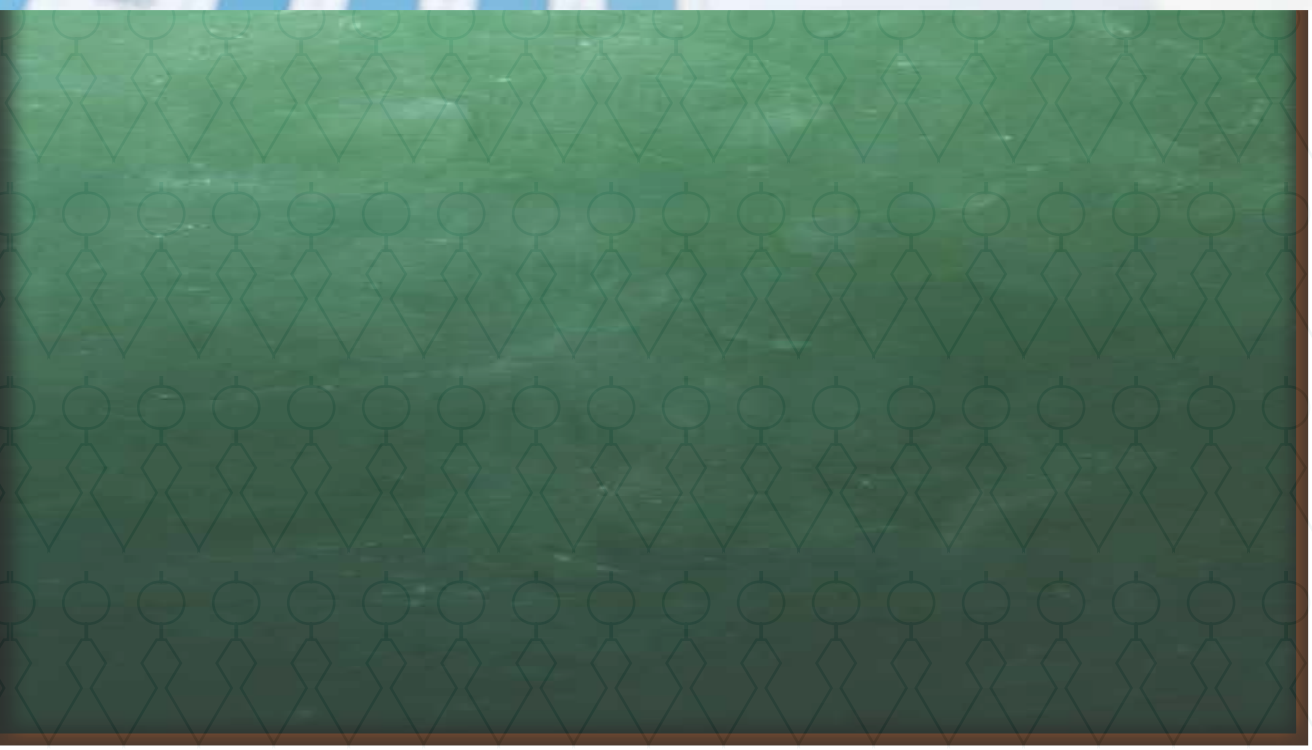

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO	POS - POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 DES 2016	31 DES 2015	31 DES 2016	31 DES 2015
		(Diaudit)	(Diaudit)	(Diaudit)	(Diaudit)
ASET					
1.	Kas	10,991,946	12,743,510	11,167,643	12,890,427
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	54,511,144	53,594,535	57,570,940	56,178,271
3.	Penempatan pada bank lain	10,991,847	14,785,223	12,537,848	17,170,413
4.	Tagihan spot dan derivatif	249,864	440,701	249,864	440,701
5.	Surat berharga				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	497,484	462,378	5,424,652	4,160,970
	b. Tersedia untuk dijual	59,678,248	39,768,143	61,911,433	39,691,862
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,540,655	5,910,964	16,420,068	10,301,584
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,826,099	1,536,713	1,826,099	1,536,713
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,277,326	3,666,938	4,277,326	3,666,938
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,325,260	376,215	1,664,750	376,215
8.	Tagihan akseptasi	14,804,373	10,899,801	14,809,228	10,899,801
9.	Kredit				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-	-
	b. Tersedia untuk dijual	-	-	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	372,621,478	308,307,475	372,781,782	308,337,559
10.	Pembiayaan syariah	-	-	19,936,630	17,410,036
11.	Penyertaan	2,356,994	2,153,994	57,169	60,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-				
	a. Surat berharga	(86,717)	(34,144)	(91,107)	(36,309)
	b. Kredit	(16,121,974)	(11,677,580)	(16,123,886)	(11,681,064)
	c. Lainnya	(116,102)	(127,217)	(118,350)	(131,180)
13.	Aset tidak berwujud	-	-	-	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	27,623,336	25,645,918	28,425,728	26,348,670
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,130,240)	(5,308,552)	(6,453,505)	(5,592,076)
15.	Aset non produktif				
	a. Properti terbengkalai	29,112	29,674	29,112	29,674
	b. Aset yang diambil alih	507,433	511,883	526,707	524,590
	c. Rekening tunda	15,881	11,973	23,803	7,046
	d. Aset antarkantor				
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	9,016	-	9,016
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	(236,139)	(187,197)	(236,139)	(187,197)
17.	Sewa pembiayaan	-	-	-	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,249,473	1,381,402	1,331,508	1,465,453
19.	Aset lainnya	13,438,570	13,814,603	15,082,577	14,716,675
	TOTAL ASET	564,845,351	478,716,369	603,031,880	508,595,288

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

LIABILITAS DAN EKUITAS

	LIABILITAS				
1.	Giro	120,626,354	89,750,903	122,076,228	90,763,359
2.	Tabungan	149,239,035	127,654,473	151,784,973	129,364,312
3.	Simpanan berjangka	142,282,178	133,876,282	141,591,883	133,809,209
4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	20,091,829	16,483,905
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	696,094	464,997	696,094	464,997
6.	Pinjaman dari bank lain	9,876,890	4,329,379	10,224,108	4,697,542
7.	Liabilitas spot dan derivatif	410,870	1,161,557	410,870	1,161,557
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,764,961	3,163,142	3,764,961	3,163,142
9.	Utang akseptasi	4,353,682	6,188,258	4,358,537	6,188,258
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,731,115	6,870,667	7,227,115	7,366,667
11.	Pinjaman yang diterima	32,169,328	22,008,584	32,269,328	22,058,584
12.	Setoran jaminan	1,310,895	1,187,080	1,310,895	1,212,653
13.	Liabilitas antarkantor				
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	70,662	-	70,662	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan				
15.	Liabilitas lainnya	9,764,058	8,610,817	17,900,397	13,422,881
16.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
	TOTAL LIABILITAS	481,296,122	405,266,139	513,777,880	430,157,066
	EKUITAS				
17.	Modal disetor	9,054,807	8,304,828	9,054,807	8,304,828
	a. Modal dasar	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(5,945,193)	(5,945,193)	(5,945,193)	(5,945,193)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	(749,979)	-	(749,979)
18.	Tambahan modal disetor				
	a. Agio	14,568,468	14,568,468	14,568,468	14,568,468
	b. Disagio -/-	-	-	-	-
	c. Modal sumbangan	-	-	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-
19.	Penghasilan komprehensif lain				
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	81,715	75,502	81,715	75,502
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,247,448)	(1,880,545)	(1,888,467)	(2,518,968)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	-	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,189,957	12,189,957	12,285,490	12,189,957
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	-	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
	h. Lainnya	-	-	-	-

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

20.	Selisih kuasi reorganisasi		-	-	-	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-	-	-	
22.	Ekuitas lainnya		-	-	-	-
23.	Cadangan					
	a.	Cadangan umum	2,778,412	2,778,412	2,778,412	2,778,412
	b.	Cadangan tujuan	-	5,705,376	-	5,705,376
24.	Laba/rugi					
	a.	Tahun-tahun lalu	35,347,018	23,079,936	36,681,162	23,987,581
	b.	Tahun berjalan	10,776,300	8,628,296	11,338,748	9,066,581
		TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	83,549,229	73,450,230	84,900,335	74,157,737
25.	Transaksi dengan non pengendali				2,256,999	2,256,999
26.	Kepentingan non pengendali				2,096,666	2,023,486
		TOTAL EKUITAS	83,549,229	73,450,230	89,254,000	78,438,222
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		564,845,351	478,716,369	603,031,880	508,595,288

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO	POS - POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		1 JAN 2016 s/d 31 DES 2016 (Diaudit)	1 JAN 2015 s/d 31 DES 2015 (Diaudit)	1 JAN 2016 s/d 31 DES 2016 (Diaudit)	1 JAN 2015 s/d 31 DES 2015 (Diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
A.	Pendapatan dan Beban Bunga				
1.	Pendapatan bunga				
	a. Rupiah	36,164,459	31,271,145	39,194,444	33,826,104
	b. Valuta asing	4,549,116	3,017,800	4,573,995	3,068,977
	Beban bunga				
	a. Rupiah	11,092,597	9,474,139	12,010,681	10,299,415
	b. Valuta asing	1,757,780	1,028,111	1,762,696	1,035,470
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	27,863,198	23,786,695	29,995,062	25,560,196
	Pendapatan Premi	-	-	5,596,823	3,618,148
	Beban Klaim	-	-	4,255,262	2,485,134
	Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	-	-	1,341,561	1,133,014
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih serta Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	27,863,198	23,786,695	31,336,623	26,693,210
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga				
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga				
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan				
	i. Surat Berharga	-	-	-	21,904
	ii. Kredit	-	-	-	-
	iii. Spot dan derivatif	560,515	-	560,515	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan				
	i. Surat Berharga	637,701	285,050	646,026	279,273
	ii. Kredit	-	-	-	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	366,807	-	371,368
	e. Dividen	-	-	-	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-
	g. Komisi/propisi/ fee dan administrasi	6,531,431	5,600,372	6,472,654	5,539,509
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	318,649	68,178	318,649	68,178
	i. Pendapatan lainnya	1,783,891	1,987,122	2,202,403	2,209,260
2.	Beban Operasional Selain Bunga				
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan				
	i. Surat Berharga	12,213	25,957	43,417	-
	ii. Kredit	-	-	-	-
	iii. Spot dan derivatif	-	211,390	-	211,390
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

c.	Kerugian penjualan aset keuangan				
	i. Surat Berharga	-	-	-	-
	ii. Kredit	-	-	-	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	6,552	-	636	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)				
	i. Surat Berharga	250,890	111,467	250,890	111,467
	ii. Kredit	7,304,519	7,017,097	7,304,626	7,021,710
	iii. Pembiayaan syariah	-	-	322,481	194,363
	iv. Aset keuangan lainnya	105,771	73,193	106,271	73,193
f.	Kerugian terkait risiko operasional	16,466	14,377	16,466	14,377
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-
h.	Komisi/propisi/ fee dan administrasi	59,499	30,989	1,032,724	744,783
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	187,512	3,703	187,512	3,703
j.	Beban tenaga kerja	7,719,917	6,359,233	8,833,954	7,365,834
k.	Beban promosi	777,034	692,415	945,652	884,631
l.	Beban lainnya	7,907,175	7,109,490	8,388,046	7,500,273
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(14,515,361)	(13,341,782)	(17,232,428)	(15,636,232)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	13,347,837	10,444,913	14,104,195	11,056,978
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL					
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,554	18,700	2,856	19,058
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	125,421	355,128	125,006	357,913
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	42,522	(5,786)	70,848	32,199
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	169,497	368,042	198,710	409,170
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	13,517,334	10,812,955	14,302,905	11,466,148
	Pajak penghasilan				
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(2,790,515)	(2,886,135)	(2,959,750)	(3,033,413)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	49,481	701,477	67,041	707,797
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	10,776,300	8,628,297	11,410,196	9,140,532

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	12,380,091	120,136	12,380,091
	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	250,369	101,002	231,693	101,002
	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
	d.	Lainnya	-	-	-	-
	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(50,074)	(202,272)	(47,125)	(202,272)
2	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam				
		mata uang asing	6,213	17,464	6,213	17,464
	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan				
		dalam kelompok tersedia untuk dijual	791,371	(433,142)	733,885	(693,742)
	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	-	-
	d.	Lainnya	-	-	-	-
	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(158,274)	93,127	(122,314)	119,472
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN					
	SETELAH PAJAK		839,605	11,956,270	922,488	11,722,015
		TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	11,615,905	20,584,567	12,332,684	20,862,547
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					
		- PEMILIK	10,776,300	8,628,297	11,338,748	9,066,581
		- KEPENTINGAN NON PENGENDALI			71,448	73,951
		TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	10,776,300	8,628,297	11,410,196	9,140,532
	Total Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :					
		- PEMILIK	11,615,905	20,584,567	12,259,504	20,788,596
		- KEPENTINGAN NON PENGENDALI			73,180	73,951
		TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	11,615,905	20,584,567	12,332,684	20,862,547
	DIVIDEN					
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)				610	487

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 DES 2016	31 DES 2015	31 DES 2016	31 DES 2015
		(Diaudit)	(Diaudit)	(Diaudit)	(Diaudit)
I.	TAGIHAN KOMITMEN				
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	56,936,424	26,818,865	56,936,424	26,818,865
3.	Lainnya	458,782	332,085	458,782	332,085
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN				
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik				
	a. BUMN				
	i. Committed				
	- Rupiah	-	-	-	-
	- Valuta asing	-	-	-	-
	ii. Uncommitted				
	- Rupiah	5,616,489	553,987	5,616,489	553,987
	- Valuta asing	-	137,850	-	137,850
	b. Lainnya				
	i. Committed	833,415	604,239	1,800,037	1,640,062
	ii. Uncommitted	46,797,781	35,932,338	46,797,781	35,932,338
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik				
	a. Committed				
	- Rupiah	-	-	-	-
	- Valuta asing	-	-	-	-
	b. Uncommitted				
	- Rupiah	30,099	997	30,099	997
	- Valuta asing	303,242	-	303,242	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan				
	a. L/C luar negeri	8,391,133	7,615,332	8,391,133	7,615,332
	b. L/C dalam negeri	2,121,519	1,532,314	2,123,557	1,532,314
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	57,065,398	27,528,054	57,065,398	27,528,054
5.	Lainnya	-	-	-	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

III.	TAGIHAN KONTINJENSI				
	1. Garansi yang diterima				
	a. Rupiah	3,564,442	2,795,590	3,569,669	2,799,357
	b. Valuta asing	15,127,117	13,606,509	15,127,117	13,606,509
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian				
	a. Bunga kredit yang diberikan	4,405,264	3,801,994	4,405,264	3,801,994
	b. Bunga lainnya	-	-	70,578	49,665
	3. Lainnya	133,588	122,119	142,224	128,071
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI				
	1. Garansi yang diberikan				
	a. Rupiah	28,493,108	21,302,743	28,565,634	21,387,502
	b. Valuta asing	25,729,609	24,336,986	25,729,609	24,336,986
	2. Lainnya	-	-	-	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Per 1 Januari s/d 31 Desember 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	*POS-POS*	*Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh*	*Tambahan Modal Disetor*	*Transaksi dengan kepentingan non pengendali*
1	Laba bersih per 31 Desember 2015	9,054,807	14,568,468	2,256,999
2	Total laba komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	-
3	Modal saham diperoleh kembali	-	-	-
4	Pembentukan cadangan umum dan wajib	-	-	-
5	Pembentukan / (pembalikan) cadangan khusus	-	-	-
6	Pembentukan / (pembalikan) cadangan cabang luar negeri	-	-	-
7	Deviden tunai	-	-	-
8	Pembalikan Deviden	-	-	-
9	Dana program bina lingkungan	-	-	-
10	Dana program kemitraan BUMN dengan usaha kecil	-	-	-
11	Transaksi dengan kepentingan non pengendali	-	-	-
12	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-	-
13	Pendapatan dari Entitas Anak yang dapat diatribusikan untuk kepentingan non pengendali	-	-	-
14	Saldo per 31 Desember 2016	9,054,807	14,568,468	2,256,999

Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tangguhan	*Selisih Penjabaran Keuangan*	*Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap*	*Saldo Laba Dicadangkan*		*Tidak Dicadangkan*	*Modal Saham Diperoleh Kembali*	*Jumlah Ekuitas Pemilik Entitas Induk*	*Kepentingan Non Pengendali*	*Jumlah Ekuitas*
			Cadangan Umum dan Wajib	*Cadangan Khusus*					
(2,518,968)	75,502	12,189,957	2,778,412	5,705,376	33,054,162	(749,979)	76,414,736	2,023,486	78,438,222
630,501	6,213	95,533	-	-	11,527,257	-	12,259,504	73,180	12,332,684
-	-	-	-	-	-	749,979	749,979	-	749,979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(5,613,100)	5,613,100	-	-	-	-
-	-	-	-	(92,276)	92,276	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(2,266,885)	-	(2,266,885)	-	(2,266,885)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1,888,467)	81,715	12,285,490	2,778,412	-	48,019,910	-	87,157,334	2,096,666	89,254,000

PT Bank BNI Syariah

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
as of December 31, 2016 and
for the year then ended
with independent auditors' report

BNI Syariah

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT BANK BNI SYARIAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Imam Teguh Saptono
   Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950
   Nomor Telepon : (021) 29701646
   Jabatan : Direktur Utama (Direktur yang juga membawahi bidang akuntansi & keuangan)

2. Nama : Junaidi Hisom
   Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950
   Nomor Telepon : (021) 29701626
   Jabatan : Direktur Operasional

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank BNI Syariah ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS PT BANK BNI SYARIAH AS OF 31 DECEMBER 2016 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

We, the undersigned:

1. *Name* : *Imam Teguh Saptono*
   Office address : *Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950*
   Telephone : *(021) 29701646*
   Title : *President Director (Who also in charge in accounting & finance area)*

2. *Name* : *Junaidi Hisom*
   Office address : *Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950*
   Telephone : *(021) 29701626*
   Title : *Operation Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Bank BNI Syariah's (the "Bank") financial statements;*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Bank's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

We certify the accurary of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of Board of Directors*

Jakarta, 30 Januari / *January* 2017

METERAI TEMPEL DA92CAEF446898520 6000

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama/*President Director*

Junaidi Hisom
Direktur Operasional/*Operation Director*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK BNI SYARIAH
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-5	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	6-7	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	8	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	9-10	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	11	*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	12	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	13	*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan Atas Laporan Keuangan	14-132	*Notes to the Financial Statements*

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-2917/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank BNI Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank BNI Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-2917/PSS/2017

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors PT Bank BNI Syariah

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank BNI Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2917/PSS/2017 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BNI Syariah tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-2917/PSS/2017 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank BNI Syariah as of December 31, 2016, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2917/PSS/2017 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan keuangan PT Bank BNI Syariah tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan report No. A160129003/DC2/MJW/2016 tanggal 29 Januari 2016 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-2917/PSS/2017 (continued)

Other matters

The financial statements of PT Bank BNI Syariah as of December 31, 2015 and for the year then ended, were audited by other independent auditors whose report No. A160129003/DC2/MJW/2016 dated January 29, 2016 expressed an unmodified opinion on such financial statements.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Yasir

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703/*Public Accountant Registration No. AP.0703*

30 Januari 2017/*January 30, 2017*

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ ***December 31, 2016***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2015/** ***December 31, 2015***	
ASET				***ASSETS***
Kas	159.912	2,4,50	145.965	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.059.796	2,5,50	2.583.736	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	174.820		90.650	*Current accounts with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.748)	2,6,	(907)	*Less: Allowance for possible losses*
Giro pada bank lain - neto	173.072	42,48,50	89.743	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada bank lain	51.000		-	*Placements with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(500)		-	*Less: Allowance for possible losses*
Penempatan pada bank lain - neto	50.500	2,42,50	-	*Placements with other banks - net*
Investasi pada surat berharga	3.928.455		2.301.687	*Investments in marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	2,7,	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
Investasi pada surat berharga - neto	3.924.065	42,48,50	2.299.101	*Investments in marketable securities - net*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	339.490	2,8, 42,50	-	*Securirties purchased under agreements to resell*
Piutang *murabahah* setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp10.056.454 dan Rp8.505.434 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015				*Murabahah receivables net of deferred margin income of Rp10,056,454 and Rp8,505,434 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Pihak ketiga	15.190.851		13.454.423	*Third parties*
Pihak berelasi	39.516		32.048	*Related parties*
Total piutang *murabahah* yang diberikan	15.230.367		13.486.471	*Total murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(409.203)	2,3,9,42	(268.171)	*Less: Allowance for for possible losses*
Piutang *murabahah* - neto	14.821.164	48,50,51	13.218.300	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman *qardh* yang diberikan				*Funds of qardh*
Pihak ketiga	641.561		568.637	*Third parties*
Pihak berelasi	288.446		11.703	*Related parties*
Total pinjaman *qardh* yang diberikan	930.007		580.340	*Total funds of qardh*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.355)	2,10,42,	(21.134)	*Less: Allowance for possible losses*
Pinjaman *qardh* yang diberikan - neto	906.652	48,50	559.206	*Funds of qardh - net*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
Pembiayaan *mudharabah*				*Mudharabah financing*
Pihak ketiga	1.198.408		1.279.950	*Third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.801)		(21.268)	*Less: Allowance for possible losses*
Pembiayaan *mudharabah* - neto	1.181.607	2,11,42,50	1.258.682	*Mudharabah financing - net*
Pembiayaan *musyarakah*				*Musyarakah financing*
Pihak ketiga	3.010.033		2.075.715	*Third parties*
Pihak berelasi	2.715		93.089	*Related parties*
Total pembiayaan *musyarakah* yang diberikan	3.012.748		2.168.804	*Total musyarakah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.285)	2,12,42,	(68.679)	*Less: Allowance for possible losses*
Pembiayaan *musyarakah* - neto	2.907.463	48,50	2.100.125	*Musyarakah financing - net*
Tagihan akseptasi	4.855		-	*Acceptances receivable*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(49)	2,13,	-	*Less: Allowance for possible losses*
Tagihan akseptasi - neto	4.806	42,48,50	-	*Acceptances receivable - net*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto				*Assets acquired for ijarah - net*
Pihak ketiga	115.568		247.502	*Third parties*
Pihak berelasi	177		173	*Related parties*
Total aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	115.745	2,14,17, 42,48,50	247.675	*Total assets acquired for ijarah - net*
Biaya dibayar dimuka	161.305	2,16,50	120.660	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar dimuka	-	26a,26e,50	7.901	*Prepaid taxes*
Aset tetap	384.482		298.877	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(169.897)	2,3,15,	(139.118)	*Less: Accumulated depreciation*
Aset tetap - neto	214.585	41,50	159.759	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	51.857	2,3,26d,50	34.538	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	242.156	2,17, 42,48,50	192.276	*Other assets*
TOTAL ASET	**28.314.175**		**23.017.667**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ ***December 31, 2016***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2015/** ***December 31, 2015***	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS				
Liabilitas segera	33.109	2,18,50	18.942	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	39.688	19,50	46.258	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan				*Deposits*
Giro *wadiah*				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga	1.488.122		1.023.422	*Third parties*
Pihak berelasi	45.025	2,20,	47.475	*Related parties*
	1.533.147	48,50	1.070.897	
Tabungan *wadiah*				*Wadiah saving deposits*
Pihak ketiga	2.544.546		1.709.309	*Third parties*
Pihak berelasi	1.391	2,21,	530	*Related parties*
	2.545.937	48,50	1.709.839	
Total simpanan	4.079.084		2.780.736	*Total deposits*
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
Pihak ketiga	31.364		33.713	*Third parties*
Pihak berelasi	-	2,22,	19.286	*Related parties*
	31.364	48,50	52.999	
		2,23		
Kewajiban akseptasi	4.855	48,50	-	*Acceptances payable*
Biaya yang masih harus dibayar	42.122	24,50	30.780	*Accrued expenses*
Cadangan	2.225	2,25,42,50	4.620	*Provisions*
Utang pajak	33.584	2,26b,50	23.005	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	100.122	2,27,48,50	71.155	*Other liabilities*
Imbalan kerja	318.605	2,44,50	282.010	*Employee benefits*
TOTAL LIABILITAS	**4.684.758**		**3.310.505**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY (continued)***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank				*Non-bank*
Giro *mudharabah*				*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga	434.854		429.824	*Third parties*
Pihak berelasi	150.443		6.472	*Related parties*
	585.297	2,29,48,50	436.296	
Tabungan *mudharabah*				*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga	6.863.593		5.692.052	*Third parties*
Pihak berelasi	13.849		8.778	*Related parties*
	6.877.442	2,30,48,50	5.700.830	
Deposito *mudharabah*				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga	5.099.827		10.017.986	*Third parties*
Pihak berelasi	7.591.359		386.908	*Related parties*
	12.691.186	2,31,48,50	10.404.894	
Total dana *syirkah* temporer dari bukan bank	20.153.925		16.542.020	*Total non-bank temporary syirkah funds*
Bank				*Bank*
Giro *mudharabah*				*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga	15.470		11.938	*Third parties*
	15.470	2,29,50	11.938	
Tabungan *mudharabah*				*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga	187.088		138.660	*Third parties*
	187.088	2,30,50	138.660	
Deposito *mudharabah*				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga	286.368		298.886	*Third parties*
	286.368	2,31,50	298.886	
Total dana *syirkah* temporer dari bank	488.926		449.484	*Total bank temporary syirkah funds*
Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan	500.000	2,28, 48,50	500.000	*Mudharabah Sukuk Issued*
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**21.142.851**		**17.491.504**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ ***December 31, 2016***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2015/** ***December 31, 2015***	
EKUITAS				***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal Saham Nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham, Modal dasar - 4.004.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.501.500 saham	1.501.500	32,52	1.501.500	*Capital Stock* *Nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share, Authorized - 4,004,000 shares, Issued and fully paid capital - 1,501,500 shares*
Keuntungan revaluasi aset tetap	43.838	2,3,15	43.838	*Gain on revaluation of fixed assets*
Kerugian aktuarial program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	(2.014)	2,3,44	(6.705)	*Actuarial losses from defined benefit plan net of deferred tax*
Cadangan umum dan wajib	92.853	33	70.000	*General and legal reserves*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	(11.158)	2,3	-	*Unrealized loss on secutiries available-for-sale net of deferred tax*
Saldo laba	861.547		607.025	*Retained earnings*
TOTAL EKUITAS	**2.486.566**		**2.215.658**	***EQUITY***
TOTAL LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS	**28.314.175**		**23.017.667**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*				***INCOME FROM FUND MANAGEMENT BY THE BANK AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	1.891.261	2,34	1.753.944	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	418.551	2,35	308.392	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - neto	64.239	2,14,36	66.177	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	427.524	2,37,48	300.730	*Other main operating income*
	2.801.575		2.429.243	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**(905.032)**	2,38	**(846.069)**	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	**1.896.543**	49	**1.583.174**	***BANK'S SHARE IN PROFIT SHARING***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	**101.718**	2,39,49	**118.814**	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	(750.910)	40	(669.585)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	(419.693)	41	(397.039)	*General and administrative*
Beban bonus *wadiah*	-		(610)	*Wadiah bonus expense*
Lain-lain	(135.760)	2,48	(125.902)	*Others*
Total beban operasional	(1.306.363)	49	(1.193.136)	*Total operating expenses*
Cadangan kerugian aset produktif	(324.237)	49	(221.253)	*Provision for possible losses on earning assets*
LABA OPERASIONAL	**367.661**		**287.599**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	**5.536**	43,49	**20.169**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**373.197**	49	**307.768**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK				***TAX EXPENSE***
Kini	(110.985)		(89.283)	*Current*
Tangguhan	15.163		10.040	*Deferred*
	(95.822)	2,26c,26d	(79.243)	
LABA TAHUN BERJALAN	**277.375**		**228.525**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME(continued)
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keutungan/(kerugian) aktuarial program manfaat pasti	6.255	2,3,26,44	(8.940)	*Gain/(loss) on defined benefit actuarial program*
Selisih penilaian kembali aset tetap	-	2,3,15	43.838	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(1.564)	2,3,26	2.235	*Income tax relating to components of other comprehensive income*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Kerugian atas perubahan nilai wajar investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual	(14.878)	2,7	-	*Losses on changes in fair value of available-for-sale investment in marketable securities*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	3.720	2,3,26	-	*Income tax relating to components of other comprehensive income*
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	**(6.467)**		**37.133**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX***
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF	**270.908**		**265.658**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**184.732**	46	**152.198**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full Rupiah amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Note*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully-paid capital*	Keuntungan penilaian kembali aset tetap/ *Gain on revaluation of assets*	(Kerugian)/ keuntungan aktuarial program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan *(Loss)/ gain on defined benefit actuarial program net of deferred tax*	Kerugian yang belum direalisasi dari investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan/ *Unrealised holding loss on investments in securities available-for-sale net of deferred tax*	Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserve*	Saldo laba/ *Retained Earnings*	Ekuitas bersih/ *Shareholders' equity - net*	
Saldo per 31 Desember 2014		**1.501.500**	**-**	**-**	**-**	**40.000**	**408.500**	**1.950.000**	***Balance as of December 31, 2014***
Total pendapatan komprehensif pada tahun berjalan		-	-	-	-	-	228.525	228.525	*Impact of transitional total comprehensive income for the year*
Pembentukan cadangan umum dan wajib	2,33	-	-	-	-	30.000	(30.000)	-	*Approriation for general and legal reserves*
Kerugian aktuarial program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	2,3,26,44	-	-	(6.705)	-	-	-	(6.705)	*(Loss) on defined benefit actuarial program net of deferred tax*
Selisih penilaian kembali aset tetap	2,3,15	-	43.838	-	-	-	-	43.838	*Gain on revaluation assets*
Saldo per 31 Desember 2015		**1.501.500**	**43.838**	**(6.705)**	**-**	**70.000**	**607.025**	**2.215.658**	***Balance as of December 31, 2015***
Total pendapatan komprehensif pada tahun berjalan		-	-	-	-	-	277.375	277.375	*Impact of transitional total comprehensive income for the year*
Pembentukan cadangan umum dan wajib	2,33	-	-	-	-	22.853	(22.853)	-	*Approriation for general and legal reserves*
Keuntungan aktuarial program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	2,3,26,44	-	-	4.691	-	-	-	4.691	*Gain on defined benefit actuarial program net of deferred tax*
Kerugian investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual yang belum direalisasi setelah dikurangi pajak tangguhan	2	-	-	-	(11.158)	-	-	(11.158)	*Unrealized holding loss on available-for-sale marketable securities net of deferred tax*
Saldo per 31 Desember 2016		**1.501.500**	**43.838**	**(2.014)**	**(11.158)**	**92.853**	**861.547**	**2.486.566**	***Balance as of December 31, 2016***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana	2.737.628		2.405.972	*Receipt of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer	(911.602)		(851.468)	*Payment of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan administrasi	109.057		90.711	*Receipt of administrative income*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	26.824		35.746	*Receipts from recovery of financing and receivable written off*
Pembayaran beban operasional lainnya	(1.254.187)		(1.091.562)	*Payment of operating expenses*
Pembayaran pajak - neto	(97.222)		(109.795)	*Payments of tax - net*
Pembayaran zakat	(15.741)		(12.786)	*Payments of zakat*
Pembayaran dana kebajikan	(695)		(608)	*Distribution of qardhul hasan funds*
(Pembayaran)/penerimaan (beban)/pendapatan non-operasional - neto	5.457		(4.777)	*(Payments)/receipt of non-operating (expense)/income - net*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	599.519		461.433	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				*Decrease/(increase) in operating assets:*
Penempatan pada bank lain	-		10.936	*Placements with other banks*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(339.490)		-	*Securities purchased under agreements to resell*
Piutang *murabahah*	(1.766.154)		(2.053.399)	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	(396.462)		39.231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	30.908		(264.903)	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	(897.615)		(759.237)	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	131.930		186.795	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain	(11.044)		(9.593)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	30.603		16.682	*Obligation due immediately*
Simpanan	1.298.348		216.771	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	(21.635)		(13.789)	*Deposits from other banks*
Liabilitas lain-lain	22.316		10.134	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer	3.651.347		2.533.939	*Increase in temporary syirkah funds*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**2.332.571**		**375.000**	***Net cash provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan dan pembelian Sukuk diukur pada biaya perolehan dan tersedia untuk dijual				*Sale and purchase of Sukuk measured at cost and available-for-sale*
Penerimaan dari penjualan	1.334.285		97.000	*Receipt from sale*
Pembelian	(2.944.118)		(498.128)	*Purchases*
	(1.609.833)		(401.128)	
Penjualan aset tetap	1.995	15	16	*Sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap	(92.217)	15	(42.208)	*Acquisition of fixed assets*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.700.055)**		**(443.320)**	***Net cash used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerbitan *Sukuk*	-		500.000	*Sukuk issued*
Biaya penerbitan *Sukuk*	-		(2.864)	*Sukuk issuance cost*
Kas bersih diperoleh Dari aktivitas pendanaan	**-**		**497.136**	***Net cash provided from financing Activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**632.516**		**428.816**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(7.339)		28.103	*Effect of foreign currencies exchange differences*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.820.351		2.363.432	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**3.445.528**		**2.820.351**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at end of the year consist of:*
Kas	159.912	2,4,50	145.965	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan	3.059.796	2,5,50	2.583.736	*Current accounts and placements with Bank Indonesia - mature within three months or less since placement date*
Giro pada bank lain	174.820	2, 6, 42,48,50	90.650	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan	51.000	2,7, 42,48,50	-	*Placements with other banks - mature within three months or less since placement date*
Total	**3.445.528**		**2.820.351**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
Pendapatan usaha utama				***Main operating income***
Pendapatan dari jual beli	1.891.261	2,34	1.753.944	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	418.551	2,35	308.392	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - neto	64.239	2,36	66.177	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	427.524	2,37	300.730	*Other main operating income*
	2.801.575		2.429.243	
Pengurang				***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:		17		*Current year income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan *ijarah*	70.554		79.657	*Ijarah income*
Pendapatan keuntungan *murabahah*	7.297		7.471	*Murabahah margin income*
Pendapatan bagi hasil - *Musyarakah*	92		137	*Profit sharing income - Musyarakah*
Pendapatan bagi hasil - *Mudharabah*	6		3	*Profit sharing income - Mudharabah*
Pendapatan usaha utama lainnya	73.702		436	*Other main operating income*
	151.651		87.704	
Penambah				***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:		17		*Prior year income in which the cash were received during the current year:*
Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan *murabahah*	7.471		7.848	*Receipt of settlement from murabahah margin income*
Penerimaan pendapatan *ijarah*	79.657		76.464	*Receipt of ijarah income*
Pendapatan bagi hasil	140		642	*Profit sharing income*
Pendapatan usaha utama lainnya	436		974	*Other main operating income*
	87.704		85.928	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	**2.737.628**		**2.427.467**	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	1.832.596		1.581.398	*Bank's share from revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	905.032	38	846.069	*Fund owners' share from revenue sharing*
Dirinci atas:				***Details of:***
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah dibagikan	865.344		799.811	*Fund owners' share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum dibagikan	39.688	19	46.258	*Fund owners' share on undistributed revenue sharing*
	905.032		**846.069**	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
Sumber dana zakat pada awal tahun	7.701	2	5.524	***Sources of zakat funds at beginning of the year***
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Zakat dari Bank	9.329	18	7.701	*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank	8.040		7.262	*Zakat from non-bank parties*
	17.369		14.963	
Penyaluran dana zakat				***Distribution of zakat funds***
Disalurkan melalui Yayasan *Hasanah* Titik BNI Syariah	15.741	2	12.786	*Distributed through Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah*
	15.741		12.786	
Kenaikan dana zakat	1.628		2.177	*Increase in zakat funds*
Sumber dana zakat pada akhir tahun	**9.329**	**2,18**	**7.701**	***Sources of zakat funds at end of the year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
Sumber dana kebajikan pada awal tahun	-	2	3	***Source of qardhul hasan funds at beginning of the year***
Sumber dana kebajikan				***Source of qardhul hasan sunds***
Pendapatan *non-halal*	30	2	274	*Non-halal income*
Infak dan *shadaqah*	665		143	*Infaq and shadaqah*
Denda	-		188	*Penalty*
Total	**695**		**605**	***Total***
Penggunaan dana kebajikan				***Use of qardhul hasan funds***
Disalurkan melalui Yayasan *Hasanah* Titik BNI Syariah	695	2	608	*Distributed through Yayasan Unit Pengelola Zakat*
Total	**695**		**608**	***Total***
(Penurunan) sumber dana kebajikan	-		(3)	*(Decrease) in qardhul hasan funds*
Sumber dana kebajikan pada akhir tahun	**-**	**2**	**-**	***Source of qardhul hasan funds at end of the year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian bank dan informasi umum

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah" atau "Bank") didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 226 tanggal 29 Juni 2010 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 41 tanggal 25 September 2013 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58699.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 14 November 2013, kemudian diubah dengan Akta No. 53 tanggal 29 September 2014 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-068781.40.21 tahun 2014 tanggal 29 September 2014, yang telah diubah dengan Akta No. 4 tanggal 9 September 2015 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0001121 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016. Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (*spin-off*) yang efektif dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

1. GENERAL INFORMATION

a. Bank establishment and general information

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah" or "the Bank") was established based on Establishment Deed No. 160 dated March 22, 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H. as the substitute of Sutjipto S.H., notary in Jakarta. The establishment deed has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01 year 2010 dated March 25, 2010 that was further amended by Deed No. 226 dated June 29, 2010, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 year 2010 dated August 6, 2010, that was further amended by Deed No. 41 dated September 25, 2013, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58699.AH.01.02 year 2013 dated November 14, 2013, then it was amended by Deed No. 53 dated September 29, 2014, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-068781.40.21 year 2014 dated September 29, 2014, that was further amended by Deed No. 4 dated September 9, 2015, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0001121 year 2016 dated January 7, 2016. The capital contribution as stated on the establishment deed was conducted by the founders as a result of the spin-off on June 19, 2010.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Bank merupakan bank umum syariah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009, yang diaktakan dengan Akta No. 37 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/ 41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Bank establishment and general information (continued)

The Bank is a commercial sharia bank created from the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). The establishment process has been approved at the Shareholders' Extraordinary General Meeting of Bank BNI on October 5, 2009 and was notarized by notarial deed No. 37 of Notary Fathiah Helmi, S.H. The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No. 11/10/PBI/2009 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the permit principle and the business license. On February 8, 2010, BNI Syariah has received its permit principle from Bank Indonesia to conduct the separation of UUS BNI based on the letter No. 12/2/DpG/Dpbs. The spin-off of UUS BNI was made under Spin-off Deed No. 159 dated March 22, 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta.

On May 21, 2010, the Bank has received its business license from Bank Indonesia based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Furthermore the spin-off became effective on June 19, 2010 and started its operational activity, as reported to Bank Indonesia through letter No. Dir/1/03 dated June 19, 2010, regarding the Report on the Implementation of the Opening of Commercial Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.

The Bank started its operational activities as a foreign exchange bank on July 9, 2010, based on the copy of the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 dated July 9, 2010.

Based on Article 3 of the Bank's Deed of Establishment, the aims and objectives of the Bank as a commercial sharia bank resulting from spin-off is to conduct the banking business based on sharia principles in accordance with the prevailing laws.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2016, Bank memiliki 68 (enam puluh delapan) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 171 (seratus tujuh puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), yang seluruhnya berlokasi di Indonesia (tidak diaudit).

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Fero Poerbonegoro	Subarjo Joyosumarto	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Rizqullah	Harisman	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Muhammad Syakir Sula*)	Fero Poerbonegoro	*Independent Commissioner*
Komisaris	Max Niode*)	-	*Commissioner*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Imam Teguh Saptono	Dinno Indiano	*President Director*
Direktur Bisnis	Kukuh Rahardjo	Imam Teguh Saptono	*Business Director*
Direktur Operasional	Junaidi Hisom**)	Junaidi Hisom	*Operation Director*
		Acep Riana Jayaprawira	*Risk and Compliance Director*

*) Sesuai pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan terbatas PT Bank BNI Syariah Nomor 29 tanggal 25 Februari, diangkat sebagai komisaris independen Bank BNI Syariah, dimana pengangkatan komisaris independen tersebut akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

**) Merangkap sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

1. *GENERAL INFORMATION (continued)*

a. *Bank establishment and general information (continued)*

The Bank's head office is located in Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. As of Desember 31, 2016, BNI Syariah has 68 (sixty-eight) Sharia Branches (KCS) and 171 (one hundred and seventy one) Sharia Sub-Branches (KCPS) which are all located within Indonesia (unaudited).

b. *Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Committees and Employees*

The compositions of the Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

*) *According to the results of Bank BNI Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 25, 2016, was appointed as an Independent Commissioner of Bank BNI Syariah, where the appointment will be effective after the approval from OJK on Fit and Proper Test and meet prevailing regulations*

**) *Concurrently appointed as Risk and Compliance Director*

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	2016 dan/*and* 2015	
Dewan Pengawas Syariah		***Board of Sharia Supervisory***
Ketua	KH. Ma'ruf Amin	*Chairman*
Anggota	Dr. Hasanuddin, M.Ag.	*Member*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Committees and Employees (continued)

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2016*	**31 Desember/ *December 31, 2015***	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Muhammad Syakir Sula	Harisman	*Chairman*
Anggota	Max Niode	Subarjo Joyosumarto	*Member*
Anggota	Alexander Zulkarnain	Alexander Zulkarnain	*Member*
Anggota	Vivin Heryadi	Vivin Heryadi	*Member*
Komite Pemantau Risiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Rizqullah	Subarjo Joyosumarto	*Chairman*
Anggota	Fero Poerbonegoro	Harisman	*Member*
Anggota	Bambang Eko	Fero Poerbonegoro	*Member*
Anggota	Ibrahim Husain	Ibrahim Husain	*Member*
		Bambang Eko Priyantono	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi			***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Muhammad Syakir Sula	Subarjo Joyosumarto	*Chairman*
Anggota	Fero Poerbonegoro	Harisman	*Member*
Anggota	Rizqullah	Fero Poerbonegoro	*Member*
Anggota	Max Niode	Arief Adhie Sanjaya	*Member*
Anggota	Arief Adhie Sanjaya	Ida Ayu Nilawati	*Member*
Anggota	Ida Ayu Nilawati	Bambang Sutrisno	*Member*
Anggota	Bambang Sutrisno		
Anggota	Munifah Syanwani		

Total karyawan tetap Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing 4.450 (empat ribu empat ratus lima puluh) dan 4.255 (empat ribu dua ratus lima puluh lima) pegawai tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has 4,450 (four thousand four hundred and fifty) and 4,255 (four thousand two hundred and fifty five), respectively, permanent employees (unaudited).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Bank ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 30 Januari 2017.

2. ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on January 30, 2017.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2014) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2014), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan arus kas;
(iv) Laporan perubahan ekuitas;

(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statements preparation

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS No. 101 (Revised 2014), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2013), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013). The Bank also applied generally accepted accounting principles issued by The Indonesian Institute of Accountants (IAI) and BAPEPAM and LK regulation No. VIII.G.7 Attachment of the Chairman of BAPEPAM and LK's decree No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies".

Based on SFAS No. 101 (Revised 2014), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statements of financial position;
(ii) Statements of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statements of cash flows;
(iv) Statements of changes in shareholders' equity;
(v) Statements of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statements of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statements of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

Statement of financial positions, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada Yayasan *Hasanah Titik* PT Bank BNI Syariah.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statements preparation (continued)

The financial statements are presented on the historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Statement of reconciliation of income and revenue sharing represent the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Statement of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat is some of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq, shadaqah funds are from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds. All funds collected by the Bank have been transferred to Yayasan Hasanah Titik PT Bank BNI Syariah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Transaksi dalam Mata Uang Asing

Bank dan cabang-cabangnya menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang periode pelaporan dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Penjabaran Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statements preparation (continued)

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

Transaction in Foreign Currency

The Bank and its branches maintain their accounting records in Rupiah. Transactions in other currencies other than Rupiah that occurred during the reporting period were recorded at the rates prevailing at the time of the transaction.

Translation of Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah by using the currency exchange rate quoted from Reuters at 16:00 WIB on that date. Gains or losses arising from translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies are recorded in current year profit or loss.

As of December 31, 2016 and 2015, foreign currency exchange rates against the Rupiah were as follows (amounts in full Rupiah):

	31 Desember/ ***December 31, 2016***	**31 Desember/** ***December 31, 2015***	
1 Pound Sterling Inggris	16.555	20.439	*1 British Pound Sterling*
1 Euro Eropa	14.176	15.057	*1 European Euro*
1 Dolar Amerika Serikat	13.473	13.785	*1 United States Dollar*
1 Dolar Singapura	9.312	9.759	*1 Singapore Dollar*
1 Dolar Kanada	9.986	9.924	*1 Canadian Dollar*
1 Dolar Australia	9.723	10.084	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Singapura	9.312	9.759	*1 Singapore Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	3.592	3.672	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Ringgit Malaysia	3.003	-	*1 Malaysian Ringgit*
1 Yuan China	1.939	-	*1 Chinese Yuan*
1 Dolar Hong Kong	1.737	1.779	*1 Hong Kong Dollar*
1 Dollar Taiwan	417	-	*1 Taiwan Dollar*
1 Bhat Thailand	376	-	*1 Thailand Bath*
1 Yen Jepang	115	115	*1 Japan Yen*
1 Won Korea Selatan	11	-	*1 South Korean Won*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2016, Bank menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Bank dan memberikan dampak pada laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk"

Sesuai dengan perubahan pada PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", mengenai penambahan kategori "Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain" dalam klasifikasi akuntansi investasi Sukuk yang disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal Sukuk diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk.
- Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat dari investasi Sukuk diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lain.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK No. 65, Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

c. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan entitas anaknya yang merupakan entitas terstruktur. Entitas anak merupakan suatu entitas dimana Bank memiliki kepemilikan sebesar lebih dari setengah hak suara atau mampu menentukan kebijakan keuangan dan operasional entitas tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies

On January 1, 2016, the Bank adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Bank's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the new or revised standards and interpretations, which are relevant to the Bank's operations and resulted in an affect on the financial statements, are as follows:

SFAS No. 110 (Revised 2015), "Accounting for Sukuk"

According to changes on SFAS No. 110 (Revised 2015), "Accounting for Sukuk", regarding addition of "Fair Value through Other Comprehensive Income" (FVOCI) category in classification of Accounting for Sukuk Investment that is presented as:

- *Difference between acquisition cost and principal amortized on a straight line basis over the term of Sukuk*
- *Difference between fair value and carrying amount of FVOCI Sukuk recognized as Other Comprehensive Income*

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- *Amendments to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements regarding Disclosure Initiative*
- *Amendments to SFAS No. 65, Consolidated Financial Statements regarding Exception Application Consolidation for Investment Entities*

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and its Subsidiaries including structured entities, presented as a single economic unit. Subsidiaries are entities in which the Bank has an interest of more than half of the voting rights or to govern financial and operating policies.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Pengendalian didapat ketika Bank terekspos atau memiliki hal atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Bank mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Bank memiliki seluruh hal berikut ini :

- Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaanya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Bank memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Bank dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- Hak suara dan hak suara potensial Bank.

Bank menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas anak perusahaan dimulai ketika Bank memiliki pengendalian atas anak perusahaan dan berhenti ketika Bank kehilangan pengendalian atas anak perusahaan. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas anak perusahaan yang diakuisisi atau dilepas selama tahun tertentu termasuk dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Bank memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Bank menghentikan pengendalian atas anak perusahaan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

Control is achieved when the Bank is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Bank controls an investee if and only if the Group has:

- *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee) ;*
- *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Bank has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Bank considers all relevant facts and circumtances in assessing whether it has power over an investee, including :

- *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.*
- *Rights arising from other contractual arrangements.*
- *The Bank's voting rights and potential voting rights.*

The Bank re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumtances indicate that there are changes to one or more of the three elements of controls. Consolidation of a subsidiary begins when the Bank obtains control over the subsidiary and ceases when the Bank loses control of subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income from the date the Bank gains control until the date the Bank ceases to control the subsidiary.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Bank dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Bank akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

a. perusahaan di bawah pengendalian Bank;
b. perusahaan asosiasi;
c. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
d. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin c di atas;
e. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
f. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 48 atas laporan keuangan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are distributed to the equity holders of the parent of the Bank and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necesssary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Bank's accounting policies. All assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Bank are eliminated in full on consolidation.

d. Transactions with related parties

The Bank implemented the SFAS No. 7, "Related Party Disclosure" and Regulation of the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (BAPEPAM-LK) No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosures of Issuers or Public Companies" which requires the diclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

A party is considered as related party of Bank if:

a. entities under the control of the Bank;
b. associated companies;
c. investors with voting rights that gives them significant influence;
d. entities controlled by investors under point c above;
e. key employees and family members and;
f. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 48 to the financial statements.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif

Saldo aset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang ijarah dan aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit. Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letters of credit* dan *standby letters of credit*.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor dan *suspense accounts*. Rekening antar kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. *Suspense account* adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya.

Dalam PAPSI 2013, Bank wajib membentuk cadangan kerugian untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Dalam pembentukan cadangan tersebut, Bank menggunakan dasar pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tertanggal 18 November 2014.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts with Bank Indonesia, placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss, and among others consist of inter-office accounts and suspense accounts. Inter-office accounts are claims arising from inter-office transactions that have not been settled within a specified period. Suspense account are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account.

As mentioned on PAPSI 2013, the Bank is required to provide impairment allowance of principal portion of overdue lease income receivables in accordance with related SFAS. In providing such allowance, the Bank uses the basic guidelines for the establishment of a productive asset allowance based on Financial Service Authority regulations (POJK) No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as "Current" and "Special Mention", while non-performing earning assets are categorized into three categories: "Substandard", "Doubtful" and "Loss". Non-Earning assets are divided into "Current", "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" serta POJK No.12/POJK.3/2015 tertanggal 21 Agustus 2015.

Pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

b. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   1) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan
   2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan
   3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
   4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

c. Kewajiban untuk membentuk cadangan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by Financial Service Authority regulations (POJK) No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit" and POJK No.12/POJK.3/2015 dated August 21, 2015.

The guidelines in determining the allowance for possible losses on earning assets based on Bank Indonesia regulations are as follows:

a. General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on sharia principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.

b. Special reserve, shall be at least:
   1) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value; and
   2) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value; and
   3) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   4) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

c. The obligation to provide allowance for possible losses on earning assets is not applicable to assets for lease with ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik agreement. The Bank is required to establish depreciation/amortization for ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Lancar, apabila:

1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
2) Pembayaran bagi hasil/marjin/*fee* yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad;
3) Belum jatuh tempo.

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: (lanjutan)

b. Kurang Lancar, apabila:

1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/*fee* berkala atau kewajiban lain yang sejenis;
3) Belum jatuh tempo.

c. Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

Cadangan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.

Persentase cadangan penghapusan aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase cadangan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

a. Current, if:

1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and was published in the past one year;
2) Payment for profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations were made in the amount and the right time, in accordance with the contract;
3) Not yet mature.

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely: (continued)

b. Substandard, if:

1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and published in the past one year;
2) There is postponement on the payment of profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations;
3) Not yet mature.

c. Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Allowance for losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statements of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.

The above allowance percentages are applied to earning assets after deducting the collateral value, in accordance with Bank Indonesia Regulations, except for earning assets categorized as current and not secured by cash collateral, where the rate applies directly to the outstanding balance of earning assets and commitments and contingencies.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan cadangan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

Bank dalam melakukan perhitungan cadangan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan cadangan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan marjin.

Cadangan kerugian penghapusan untuk aset non-produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for possible losses is not applicable in the case of non-earning assets.

In computing the allowance for losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had exceeded the 24 (twenty-four) months period or the collateral value is already impaired.

The outstanding balances of earning assets classified as loss is written off against the respective allowance for losses when management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to allowance for losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognised as margin income.

Allowance for possible losses on non-earning assets based on Regulations of Financial Service Auothority (POJK) No. 16/POJK.03/2014 effective on January 1, 2015 is as follows:

Klasifikasi	**Persentase Cadangan Kerugian/ *Allowance for Possible Losses Percentage***	***Classification***
Agunan yang diambil alih		*Foreclosed assets*
≤ 1 tahun	1%	*≤ 1 year*
> 1 tahun	100%	*> 1 years*
Rekening antar kantor dan *suspense account*		*Inter-office accounts and suspense accounts*
≤ 6 bulan	1%	*≤ 6 months*
> 6 bulan	100%	*> 6 months*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang *murabahah* yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Piutang *murabahah* mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin;
c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

    1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
    2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables

At each date of the statement of financial position, the Bank assesses whether there is objective evidence that Murabahah receivables carried at fair value through profit or loss are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b) a breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;

d) it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:

    1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

    2) national or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah (lanjutan)*

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah piutang *murabahah* jumlahya signifikan secara individual. Apabila piutang *murabahah* jumlahya signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang *murabahah*. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara individual, terlepas piutang *murabahah* tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang *murabahah* yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang *murabahah* yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Piutang *murabahah* dengan nilai nominal lebih besar dari Rp15 miliar (nilai penuh) per nasabah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Piutang *murabahah* dengan nilai nominal lebih besar dari Rp15 miliar (nilai penuh) per nasabah yang pernah direstrukturisasi dengan tingkat imbal hasil efektif lebih kecil dari *Fund Pricing Model* (FPM).

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables (continued)

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the murabahah receivables are individually significant. If the murabahah receivables are considered individually significant, the Bank will determine whether objective evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, whether significant or not, it will be included in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if one of the following criteria is met:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value and objective evidence of impairment; or*
2. *Restructured murabahah receivables which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Murabahah receivables with nominal amount greater than Rp15 billion (full amount) for each customer with substandard, doubtful and loss collectibility; or (b) Murabahah receivables with nominal amount greater than Rp15 billion (full amount) for each customer that has been restructured with effective rate of return less than Fund Pricing Model (FPM).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individu (lanjutan)

Efektif sejak bulan Agustus 2016, Bank melakukan perubahan nilai nominal piutang murabahah yang dilakukan penilaian secara individual menjadi lebih besar dari Rp15 miliar (nilai penuh) per nesabah.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang *murabahah* dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang *murabahah* tersebut. Jika nilai tercatat sama dengan atau lebih kecil dari nilai kini dari estimasi arus kas masa datang, maka perhitungan jumlah kerugian penurunan nilai atas nasabah tersebut menggunakan metode kolektif. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang *murabahah* dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Individual impairment calculation (continued)

Effective from August, 2016, the Bank has changed the nominal amount of murabahah receivable to be assessed individually to Rp15 billion (full amount) for each customer.

The amount of impairment loss is measured at the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return.If the carrying amount of the murabahah receivables is less than or equal to the present value of estimated future cash flows then the assessment of impairment is to be done collectively. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. *Murabahah receivables which individually have insignificant value;*
2. *Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or*
3. *Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk (a) piutang *murabahah* dengan nilai nominal kurang dari atau sama dengan Rp15 miliar (nilai penuh) per nasabah; atau (b) piutang *murabahah* dengan nilai nominal lebih dari Rp15 miliar (nilai penuh) per nasabah yang tidak memenuhi kriteria penilaian secara individual.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang *murabahah* dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode analisis migrasi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank menerapkan *migration analysis method* dengan menggunakan data historis sejak Juni 2010 (saat pemisahan dari Bank BNI) dalam menghitung PD dan LGD.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:
1. Piutang *murabahah* bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan piutang hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Collective impairment calculation (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for (a) murabahah receivables with nominal amount less than or equal to Rp15 billion (full amount) for each customer; or (b) murabahah receivables with nominal amount above Rp15 billion (full amount) for each customer that do not meet the criteria for individual assessment.

Calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which is migration analysis methods, to assess the allowance for impairment losses.

The Bank applies migration analysis method using historical data since June 2010 (when spin-off from Bank BNI) to compute the PD and LGD.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:
1. *Murabahah receivables are collateral dependent, i.e. if the source of receivables repayment is only from the collateral; or*
2. *Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang *murabahah* yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang *murabahah* yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

f. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

g. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

h. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi cadangan kerugian.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Collective impairment calculation (continued)

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognized using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

f. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

g. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank's income but are used as part of the qardhul hasan funds.

h. Placements with other banks

Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Business Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing, Mudharabah Interbank Investment Certificate (SIMA) and/or other placements based on Sharia principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Investasi pada surat berharga

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Sejak tanggal 1 Januari 2016, Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo

Investasi dalam unit reksadana *syariah* dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai asset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Investments in marketable securities

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

Since January 1, 2016, the Bank defined the classification of Investment in marketable securities, specifically sukuk, based on busines model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2) At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

Investment in sharia mutual funds are stated at market value based on net asset value of mutual funds on statement of financial position dates.

Allowance for possible losses are recognised in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Efek efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan transaksi pembelian surat berharga syariah dengan janji dijual kembali dengan harga dan waktu yang telah disepakati, efek yang dibeli diakui sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan yang belum diamortisasi. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual.

k. Piutang *murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang *murabahah* diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK No. 55.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

l. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* meliputi *wakalah* dan *rahn*.

Wakalah merupakan akad pemindahan piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat *ujrah* (imbalan) yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Securities purchased under agreements to resell

Securities purchased under agreements to resell are purchase transactions of syariah-compliant securities with agreements to resell at a certain price and time, securities purchased are classified as assets in the statement of financial position.

Securities purchased under agreements to resell are presented at the resale price net of unamortised income. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold.

k. Murabahah receivables

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are classified as financial assets under category loan and receivables in accordance with SFAS No. 55.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less deferred murabahah margin and allowance for impairment losses.

l. Funds of qardh

Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh consists of wakalah and rahn.

Wakalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an ujrah (benefits) and the ujrah is recognised proportionately during the period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Pinjaman *qardh* (lanjutan)

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank, dimana nasabah meminjam uang dengan akad *qardh* dan menjaminkan aset/harta untuk pinjaman tersebut. Bank memperoleh *ujrah* karena menanggung beban penyimpanan jaminan dan risiko penyimpanan.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

m. Pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing)* atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*).

Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah.*

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Funds of qardh (continued)

Rahn is the pawn of goods or assets from customers to the Bank, at which the customers borrow money with qardh agreement and pledged their asset as collateral for the borrowings. The Bank obtains ujrah (benefits) from bearing the collateral custody expense and custody risk.

Funds of qardh is recognised at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognised as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on qardh based on the review quality of the individual outstanding balances.

m. Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Pembiayaan (lanjutan)

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

o. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual/beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financing (continued)

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

n. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable represent Letters of Credit and Domestic Documentary Letters of Credit transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated at net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable are classified as loans and receivables. Acceptances payable are classified as financial liabilities at amortized cost.

o. Assets acquired for ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial positions at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the lease object with the option of transferring the ownership right through sale/purchase or grant (hibah) at a certain time in accordance with the lease agreement.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah;
(ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

p. Aset tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain". Apabila aset tersebut memilki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Assets acquired for ijarah (continued)

The transfer of ownership right on the lease object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant;
(ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii) sale at the end of the contract at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and
(iv) installment sales at a specified price as agreed in the contract.

p. Fixed assets

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and bulidings are recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". If the asset does have balance on its "Gain of Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain of Revaluation of Fixed Assets" which presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

Fixed assets, besides land and buildings, are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	15	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	5	*Motor vehicles and office equipments*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

q. Biaya dibayar dimuka

Biaya-biaya yang dibayarkan dimuka kepada pihak lain diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Assets Under Construction". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed.

q. Prepaid expenses

Prepayments to other parties are amortised over the useful life of each expense using the straight-line method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari tagihan transaksi non-ATM kepada Bank BNI, piutang pendapatan bagi hasil, persediaan alat tulis kantor dan lain-lain.

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat.

t. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip *wadiah yadh dhamanah* dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yadh dhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan BNI Syariah. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar bank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

u. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah,* yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan *sukuk mudharabah* yang diterbitkan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Other assets

Other assets consist of non-ATM transaction bills to Bank BNI, revenue sharing receivables, office stationeries and others.

s. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.

t. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposit.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on BNI Syariah policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of ('Athaya) is voluntary on the part of banks.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of wadiah demand deposit and Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposit from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

u. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current accounts, mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits and mudharabah sukuk issued.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan merupakan sukuk yang menggunakan akad *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk *mudharabah*. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk *mudharabah* disajikan dalam aset sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang jangka waktu sukuk. Penerbitan sukuk dan perdagangan sukuk berdasarkan akad *syariah*, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari. Pemilik sertifikat sukuk *mudharabah* mendapatkan bagi hasil.

Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan mengacu ke PSAK No. 110 Akuntansi Sukuk, untuk Akuntansi Penerbit.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Temporary syirkah funds (continued)

Mudharabah current accounts and savings deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's balance in bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Mudharabah sukuk issued is a sukuk using the contract of mudharabah.Sukuk Mudharabah is recognized when the entity becomes party of issuance contract mudharabah sukuk. Sukuk mudharabah is recognized at nominal value. Transaction costs are recognized separately from the sukuk mudharabah. Transaction costs for the issuance of sukuk mudharabah presented in assets as deferred expenses and amortized over the term of sukuk. Sukuk issuance and trading of sukuk are based on the principles of sharia, including any underlying asset/activity. The holders of Mudharabah sukuk certificate receive shares of the revenue resulted.

Mudharabah sukuk issued refers to SFAS No. 110 Accounting for Sukuk, Accounting Sukuk for Publishers.

Temporary syirkah fund cannot be classified as a liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan dari sewa (*ijarah*) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima *non*-lancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pengakuan pendapatan atas piutang *murabahah* diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang *murabahah* untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang *murabahah* tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad menggunakan metode *flat* (*proporsional*).

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Income from fund management by the bank as mudharib

Income from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases of murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortization of deferred income at the time its financing is classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as non-current revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

The revenue recognition of murabahah receivables are recognized in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates cash flows in the future by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing revenue for mudharabah and musyarakah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Income from ijarah is recognised over the period of the contract with flat (proporsional) method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

x. Pendapatan administrasi

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui sekaligus pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang *murabahah* (Catatan 2j).

y. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

x. Administration income

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is recognised simultaneously at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables (Note 2j).

y. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

Pension benefits and other post-employment benefits

Bank has defined benefit and defined contribution pension plans.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perseroan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya Program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.* Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Law No. 13/2003 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Imbalan kerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

z. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajaktangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Bank also provides other post-employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

z. Income tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of proft or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in other comprehensive income or equity. In this case, the tax is also in other comprehensive income or recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Pajak penghasilan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income tax (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in Annual Corporate Income Tax Return (SPT) with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. If needed, management establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

aa. Sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan

Sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan, pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan *Hasanah Titik* (pada tahun 2013 bernama Unit Pengelola Zakat) BNI Syariah.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

ab. Pelaporan segmen

BNI Syariah menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

BNI Syariah mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

BNI Syariah mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi Komersial, Konsumer dan Ritel, Mikro, Tresuri dan Internasional dan Kantor Pusat.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Sources and distribution of zakat funds and uses of qardhul hasan funds

The management of sources and distribution of zakat funds and usesof qardhul hasan funds is delegated to Yayasan Hasanah Titik (at 2013 named Unit Pengelola Zakat) BNI Syariah.

Penalties/sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

ab. Segment reporting

BNI Syariah determine and present operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

BNI Syariah defines an operating segment as a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
c) for which discrete financial information is available.

BNI Syariah discloses its operating segments based on operating segments that consist of Commercial, Consumer and Retail, Micro, Treasury and International and Head Office.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah*

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang *murabahah* dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang *murabahah* dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan cadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Key sources of estimation uncertainty

Allowances for impairment losses of murabahah receivables

In the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Bank menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

1. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;

2. Tingkat 2: teknik valuasi darimana seluruh *input* yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung; dan

3. Tingkat 3: teknik valuasi darimana seluruh *input* yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible. But when observable market data are not available, management's judgment is required to establish fair values. The management's judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

The Bank present the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

1. *Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;*

2. *Level 2: valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable either directly or indirectly; and*

3. *Level 3: valuation techniques which use inputs that have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.*

Employee benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

Konsolidasian Entitas Terstruktur

Dalam menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki, Bank mempertimbangkan apakah entitas tersebut memenuhi definisi Entitas Terstruktur yang dijabarkan dalam Catatan 2c dan apakah Bank, secara substansi, mengendalikan entitas tersebut.

Ketika Bank, secara substansi, mengendalikan entitas terstruktur tersebut, entitas tersebut dikonsolidasikan oleh Bank.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Employee benefits (continued)

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for over the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

Fixed assets revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

Consolidation of Structured Entities

In determining the degree of control exercised, the Bank considers whether these entities meet the definition of Structured Entities as set out in Note 2c and whether the Bank, in substance, controls such entities.

When the Bank, in substance, controls the entity to which the financial assets have been transferred, the entity is consolidated by the Bank.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Rupiah	155.517	144.981	*Rupiah*
Mata Uang Asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat	3.716	638	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	679	346	*Saudi Arabian Riyal*
	4.395	984	
	159.912	**145.965**	

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Giro pada Bank Indonesia			*Current accounts with Bank Indonesia*
Rupiah	1.210.595	972.908	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	13.553	22.828	*United States Dollar*
	1.224.148	995.736	

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)			*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Rupiah	818.000	1.588.000	*Rupiah*
Term Deposit			*Term Deposits*
Dolar Amerika Serikat	417.648	-	*United States Dollar*
Sertifikat Bank Indonesia Syariah			*Bank Indonesia Sharia Certificate*
Rupiah	600.000	-	*Rupiah*
	1.835.648	1.588.000	
	3.059.796	**2.583.736**	

Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The ratio of the Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") for its Rupiah and foreign currencies as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Rupiah	5,19%	5,15%	*Rupiah*
Mata uang asing	1,46%	3,27%	*Foreign currencies*

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap Bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5,00% dan 1,00% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Bank menempatkan dana pada fasilitas Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dengan rata-rata tingkat bonus tahunan masing-masing sebesar 4,00% dan 5,50% untuk tahun 2016 dan 2015.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Based on Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 dated August 3, 2004 regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principle" as amended, by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated October 5,2006, No. 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008 and the latest amendement No. 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5.00% and 1.00% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of December 31, 2016 and 2015.

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia's Deposit Facility (FASBIS) with average annual bonus rate at 4.00% and 5.50% for years 2016 and 2015, respectively.

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak berelasi (Catatan 48)			*Related parties (Note 48)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Rupiah	100.444	3.040	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	70.455	83.957	*United States Dollar*
Poundsterling Inggris	1.448	37	*British Poundsterling*
Euro	914	97	*Euro*
Dolar Australia	419	7	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	343	996	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	287	1.759	*Japanese Yen*
Dolar Kanada	200	339	*Canadian Dollar*
Dolar Hong Kong	144	19	*Hong Kong Dollar*
Riyal Arab Saudi	108	230	*Saudi Arabian Riyal*
Franc Swiss	58	169	*Swiss Franc*
	174.820	90.650	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.748)	(907)	*Less: Allowance for possible losses*
	173.072	**89.743**	

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

Perubahan cadangan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for possible losses on current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	907	1.589	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 42)	858	(680)	*Provisions/(reversal) during the year (Note 42)*
Selisih kurs	(17)	(2)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**1.748**	**907**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian giro pada bank lain yang dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Management believes that the allowance for possible losses on current accounts with other banks as of December 31, 2016 and 2015 is adequate and in compliance with Bank Indonesia regulations.

Bank tidak memperoleh pendapatan jasa giro atas seluruh penempatan giro pada bank lain tersebut.

The Bank does not obtain income from all the current accounts with other banks.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

7. *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis

a. *By type*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Diukur pada biaya perolehan			***At cost***
Sukuk Berbasis Proyek (PBS) termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp51.777 dan Rp(64.928) pada tanggal tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	2.313.128	1.247.834	*Government Projected Base Sukuk (PBS) including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp51,777 and Rp(64,928) as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.234 dan Rp(7.071) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	400.742	342.930	*Sharia Treasury Bills (SPNS) including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp3,234 and Rp(7,071) as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Sukuk Korporasi termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp(821) and Rp4.562 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	364.179	258.562	*Corporate Sukuk including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp(821) and Rp4,562 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp(38.405) dan Rp41.008 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	186.285	188.888	*Sharia Based Government Securites (SBSN) including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp(38,405) and Rp41,008 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis (lanjutan) / *a. By type (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)			***At cost (continued)***
INDOIS termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing -masing sebesar Rp388 dan Rp463 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	135.113	138.313	*INDOIS including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp388 and Rp463 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Sukuk Ritel Negara (SR) termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp0,1 pada tanggal 31 Desember 2015	-	125.160	*Retail Government Securities (SR) including unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp0.1 as of December 31, 2015*
	3.399.447	2.301.687	
Tersedia untuk dijual			***Available-for-sale***
Sukuk Berbasis Proyek (PBS)	403.163	-	*Government Projected Base Sukuk (PBS)*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	50.993	-	*Sharia Based Government Securities (SBSN)*
Reksadana	40.058	-	*Mutual Funds*
Sukuk Korporasi	34.794	-	*Corporate Sukuk*
	529.008	-	
Total investasi Pada surat berharga	3.928.455	2.301.687	*Total investments in securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
	3.924.065	**2.299.101**	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Lancar	3.928.455	2.301.687	*Current*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
	3.924.065	**2.299.101**	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

c. Berdasarkan penerbit / *c. By issuer*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pemerintah Republik Indonesia	3.489.423	2.043.125	*Government of the Republic of Indonesia*
Korporasi	253.664	168.853	*Corporate*
Bank	185.368	89.709	*Bank*
	3.928.455	2.301.687	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
	3.924.065	**2.299.101**	

d. Berdasarkan peringkat / *d. By rating*

	31 Desember/*December 31, 2016*			
	Pemeringkat/ *Rating company*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	
Diukur pada biaya perolehan				***At cost***
Sukuk Korporasi				***Corporate Sukuk***
Sukuk ijarah berkelanjutan Indosat 2015	Pefindo	idAAA(sy)	50.000	*Sukuk ijarah berkelanjutan Indosat 2015*
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Maybank Tahap II	Pefindo	idAAA(sy)	50.000	*Continues Sukuk Mudharabah I Maybank step II*
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM 2016	Pefindo	idAA-(sy)	50.000	*Subordinated Sukuk Mudharabah BSM 2016*
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BRIS 2016	Fitch	idA+(sy)	46.000	*Subordinated Sukuk Mudharabah BRIS 2016*
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan Indosat Tahap IV 2016 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	30.000	*Continues Sukuk Ijarah Indosat II Step IV 2016 Seri B*
Adira Multifinance	Pefindo	idAAA(sy)	25.000	*Adira Multifinance*
Muamalat 2012	Pefindo	idA-(sy)	24.368	*Muamalat 2012*
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan Indosat Tahap IV 2016 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	20.000	*Continues Sukuk Ijarah Indosat II Step IV 2016 Seri A*
Indosat V/2012	Pefindo	idAAA(sy)	16.920	*Indosat V/2012*
PLN II/2007	Pefindo	idAAA(sy)	14.000	*PLN II/2007*
Muamalat 2013	Pefindo	idA-(sy)	10.000	*Muamalat 2013*
Sukuk *Mudharabah* II Mayora indah	Pefindo	idAA-(sy)	9.981	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah*
Sukuk *Ijarah* Aneka Gas Industri II tahun 2012	Fitch	A-(idn)	9.902	*Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II in 2012*
Sukuk *Mudharabah* II BPD Sulselbar	Pefindo	idA+(sy)	5.000	*Sukuk Mudharabah II BPD Sulselbar*
Sukuk *Mudharabah* II Mayora indah	Pefindo	idAA-(sy)	3.008	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah*
			364.179	
Surat berharga syariah negara				***Syariah government securities***
Sukuk Berbasis Proyek (PBS)	-	-	2.313.128	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	-	-	400.742	*Sharia Treasury Bills (SPNS)*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	-	-	186.285	*Sharia Based Government Securities (SBSN)*
INDOIS	-	-	135.113	*INDOIS*
			3.035.268	
Diukur pada biaya perolehan			3.399.447	*Measured at cost*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2016*			
	Pemeringkat/ *Rating company*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	
Tersedia untuk dijual				***Available-for-sale***
Sukuk Korporasi				***Corporate Sukuk***
Sukuk ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 seri B	Pefindo	idAAA(sy)	34.794	*Sukuk ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 seri B*
Reksadana				***Mutual funds***
Reksadana *I-money* Syariah	-	-	20.106	*I-money Syariah Mutual Funds*
Reksadana Bahana likuid Syariah	-	-	10.026	*Bahana likuid Syariah Mutual Funds*
Reksadana Bahana MES Syariah	-	-	9.926	*Reksadana Bahana MES Syariah Mutual Funds*
			40.058	
Surat berharga syariah negara				***Syariah government securities***
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	-	-	403.163	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Sukuk Ritel Negara - SR008			50.993	*Government Sukuk Retail SR - 008*
			454.156	
Tersedia untuk dijual			529.008	*Available-for-sale*
Total investasi pada surat berharga			3.928.455	*The amount of invesment in marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian Penurunan nilai			(4.390)	*Less: Allowance for possible losses*
			3.924.065	
Diukur pada biaya perolehan				***At cost***
Sukuk Korporasi				***Corporate Sukuk***
MTN BSM	Pefindo	idAA(sy)	55.452	*MTN BSM*
Indosat	Pefindo	idAAA(sy)	50.000	*Indosat*
XL Axiata	Fitch	AAA(idn)	50.000	*XL Axiata*
Adira Multifinance	Pefindo	idAAA(sy)	25.000	*Adira Multifinance*
Muamalat 2012	Pefindo	idA(sy)	24.256	*Muamalat 2012*
Indosat V/2012	Pefindo	idAAA(sy)	16.889	*Indosat V/2012*
PLN II/2007	Pefindo	idAAA(sy)	14.000	*PLN II/2007*
Muamalat 2013	Pefindo	idA(sy)	10.000	*Muamalat 2013*
Sukuk *Mudharabah* II Mayora Indah	Pefindo	idAA-(sy)	9.938	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah*
Sukuk *Mudharabah* II Mayora Indah	Pefindo	idAA-(sy)	3.027	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah*
			258.562	
Surat berharga syariah negara				*Syariah government securities*
Sukuk Berbasis Proyek (PBS)	-	-	1.247.834	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	-	-	342.930	*Sharia Treasury Bills (SPNS)*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	-	-	188.888	*Sharia Based Government Securities (SBSN)*
Sukuk Ritel Negara - SR 005	-	-	125.160	*Government Sukuk Retail SR - 005*
INDOIS	-	-	138.313	*INDOIS*
			2.043.125	
			2.301.687	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
			2.299.101	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

e. Berdasarkan jangka waktu / *e. By period*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Diukur pada biaya perolehan			***At cost***
< 1 tahun	420.742	342.930	*< 1 year*
1 - 5 tahun	1.353.430	372.113	*1 - 5 years*
> 5 - 10 tahun	358.535	320.447	*> 5 - 10 years*
> 10 tahun	1.266.740	1.266.197	*> 10 years*
	3.399.447	2.301.687	
Tersedia untuk dijual			***Available-for-sale***
< 1 tahun	40.058	-	*< 1 year*
1 - 5 tahun	488.950	-	*1 - 5 years*
	529.008	-	
	3.928.455	2.301.687	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
	3.924.065	**2.299.101**	

f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *f. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Diukur pada biaya perolehan			***At cost***
< 1 tahun	552.663	523.076	*< 1 year*
1 - 5 tahun	1.301.726	247.728	*1 - 5 years*
> 5 - 10 tahun	278.318	264.686	*> 5 - 10 years*
> 10 tahun	1.266.740	1.266.197	*> 10 years*
	3.399.447	2.301.687	
Tersedia untuk dijual			***Available-for-sale***
< 1 tahun	40.058	-	*< 1 year*
1 - 5 tahun	488.950	-	*1 - 5 years*
	529.008	-	
	3.928.455	2.301.687	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
	3.924.065	**2.299.101**	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

g. Berdasarkan hubungan

g. By relationship

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Tersedia untuk dijual	40.058	-	*Available-for-sale*
Diukur pada biaya perolehan	254.179	189.110	*At cost*
	294.237	189.110	
Pihak berelasi (Catatan 48)			*Related parties (Note 48)*
Tersedia untuk dijual	488.950	-	*Available-for-sale*
Diukur pada biaya perolehan	3.145.268	2.112.577	*At cost*
	3.634.218	2.112.577	
	3.928.455	2.301.687	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
	3.924.065	**2.299.101**	

h. Berdasarkan akad

h. By contract

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Ijarah	3.699.407	2.174.014	*Ijarah*
Mudharabah	188.990	127.673	*Mudharabah*
Wakalah	40.058	-	*Wakalah*
	3.928.455	2.301.687	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.390)	(2.586)	*Less: Allowance for possible losses*
	3.924.065	**2.299.101**	

Nilai wajar atas surat berharga yang diukur pada biaya perolehan dikurangi amortisasi sebesar Rp2.991.686.

Fair value of marketable securities measured at cost less amortization amounted to Rp2,991,686.

i. Pada tahun 2016 Bank membeli unit penyertaan reksadana yang dibentuk melalui Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi (RDT) yang dikelola oleh PT BNI Asset Management, pihak berelasi, yang berperan sebagai manajer investasi. Berdasarkan kontrak investasi kolektif RDT, RDT hanya dapat menempatkan investasinya pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk dan Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dengan menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan efek syariah secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

i. *In 2016, the Bank bought investment in mutual fund units which was established through Protected Mutual Funds (PMF) collective investment contracts which managed by PT BNI Asset Management, related party, who acts as the investment manager. Based on the PMF's collective investment contracts, the funds can only put its investment portfolio in Islamic Securities Fixed Income / Bonds and Money Market Instruments of Sharia in the country by reducing the level of risk through the selection of Islamic securities selective and do not conflict with Sharia Principles in Capital Market.*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan, Bank menyimpulkan bahwa RDT ini memenuhi definisi entitas terstruktur seperti diatur oleh standar akuntansi yang berlaku dan harus dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2016, dana yang diinvestasikan dalam Entitas Terstruktur ini sejumlah Rp190.355. Jumlah ini dieliminasi dengan nilai aset bersih investasi reksadana untuk tujuan konsolidasi. Dengan demikian, Bank mengkonsolidasi aset dan liabilitas dari dana tersebut, yang termasuk efek-efek sejumlah Rp184.814 sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan.

Selain RDT diatas, Bank memiliki investasi reksa dana lainnya yang tidak memenuhi definisi Entitas Terstruktur seperti diatur oleh standar akuntansi yang berlaku. Investasi tersebut dikelola oleh PT Bahana TCW Investment Management dan PT Insight Investments Management yang berperan sebagai manajer investasi untuk kontrak investasi kolektif reksa dana masing-masing sejumlah Rp19.952 dan Rp20.106 pada 31 Desember 2016.

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

Based on its assessment, the Bank has concluded that these PMF meet the definition of structured entities in accordance with prevailing accounting standards and should be consolidated to the Bank's financial statements.

As of December 31, 2016, funds invested in these Structured Entities amounted to Rp190,355. This amount was eliminated against the net assets of the funds for consolidation purposes. Accordingly, the Bank consolidated the funds assets and liabilities, which included marketable securities amounted to Rp184,814 classified as financial assets measured at cost.

Other than the above PMF, the Bank has other investment in mutual funds which do not meet the definition of structured entities in accordance with prevailing accounting standards. These investments are managed by PT Bahana TCW Investment Management and PT Insight Investments Management, who acts as the investment manager on the collective investment contract amounted to Rp19,952 and Rp20,106 as of December 31, 2016.

j. Perubahan cadangan kerugian investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

j. The changes of the allowance for possible losses on investment in marketable securities are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	2.586	1.656	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 42)	1.804	966	*Provisions during the year (Note 42)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	(36)	*Written-off during the year*
Saldo akhir	**4.390**	**2.586**	***Ending balance***

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

j. Perubahan cadangan kerugian investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Jumlah minimum cadangan kerugian investasi pada surat berharga yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian investasi pada surat berharga yang dibentuk telah memadai.

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

j. The changes of the allowance for possible losses on investment in marketable securities are as follows: (continued)

The amount of the minimum allowance for losses on marketable securities that should be provided as of December 31, 2016 and 2015 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulations.

Management believes that the allowance for possible losses on investments in marketable securities is adequate.

8. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2016, terdiri dari:

8. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2016, as follows:

Counterparty	Jenis sekuritas/ *type of securities*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal *mulai/ Start date*	Tanggal *jatuh tempo/ Maturity date*	Liabilitas penjualan kembali/ *resell liabilities*	Imbalan yang akan diterima/ *Benefit to be received*	Nilai tercatat/ *carrying value*
Bank Indonesia	SPSN	133.332	21/12/2016	18/01/2017	122.184	194	122.378
Bank Indonesia	SPSN	118.345	14/12/2016	11/01/2017	109.357	284	109.641
Bank Indonesia	SPSN	116.907	07/12/2016	04/01/2017	107.084	387	107.471
					338.625	865	339.490

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut diklasifikasikan sebagai lancar.

The securities purchased under agreement to resell are classified as current.

9. PIUTANG *MURABAHAH*

a. Berdasarkan hubungan

9. MURABAHAH RECEIVABLES

a. By relationship

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga	15.190.851	13.454.423	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	39.516	32.048	*Related parties (Note 48)*
	15.230.367	13.486.471	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(409.203)	(268.171)	*Less: Allowance for possible losses*
	14.821.164	**13.218.300**	

9. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / *MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *By economic sector*

	31 Desember/*December 31, 2016*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	***Total***	
Rupiah							***Rupiah***
Perdagangan, restoran dan hotel	1.309.765	109.959	96.762	8.419	52.380	1.577.285	*Trading, restaurant and hotel*
Sosial/masyarakat	658.820	17.814	255	753	1.117	678.759	*Social/public*
Jasa usaha	551.411	54.041	63.477	417	7.819	677.165	*Business services*
Industri	431.376	73.803	33.766	521	6.216	545.682	*Manufacturing*
Pertanian	202.790	17.692	3.485	2.394	25.879	252.240	*Agriculture*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	230.823	2.827	128	1.114	6.586	241.478	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertambangan	123.924	5.913	-	-	1.542	131.379	*Mining*
Konstruksi	88.483	3.838	787	599	1.863	95.570	*Construction*
Listrik, gas dan air	32.962	1.291	-	-	140	34.393	*Electricity, gas and water*
Lainnya	10.203.299	502.013	31.821	28.542	137.678	10.903.353	*Others*
	13.833.653	789.191	230.481	42.759	241.220	15.137.304	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Pertambangan	-	40.704	-	-	-	40.704	*Mining*
Industri	32.968	-	-	-	-	32.968	*Manufacturing*
Jasa usaha	12.016	-	-	-	-	12.016	*Business services*
Listrik, gas dan air	7.375	-	-	-	-	7.375	*Electricity, gas and water*
	52.359	40.704	-	-	-	93.063	
	13.886.012	829.895	230.481	42.759	241.220	15.230.367	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(99.890)	(91.791)	(116.330)	(15.373)	(85.819)	(409.203)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.786.122	**738.104**	**114.151**	**27.386**	**155.401**	**14.821.164**	

	31 Desember/*December 31, 2015*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	***Total***	
Rupiah							***Rupiah***
Perdagangan, restoran dan hotel	1.344.323	84.234	16.395	11.655	36.806	1.493.413	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa usaha	1.135.929	9.840	747	2.884	12.365	1.161.765	*Business services*
Sosial/masyarakat	563.045	11.461	1.120	410	2.096	578.132	*Social/public*
Pertanian	231.099	20.197	4.452	6.037	16.122	277.907	*Agriculture*
Industri	434.283	13.957	2.040	1.861	2.493	454.634	*Manufacturing*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	161.810	10.053	60	556	5.655	178.134	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertambangan	73.048	1.167	-	1.571	2.980	78.766	*Mining*
Konstruksi	66.227	6.177	1.022	1.560	3.204	78.190	*Construction*
Listrik, gas dan air	33.020	1.663	-	-	289	34.972	*Electricity, gas and water*
Lainnya	8.406.077	433.407	37.196	30.192	103.442	9.010.314	*Others*
	12.448.861	592.156	63.032	56.726	185.452	13.346.227	

9. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / *MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) / *By economic sector (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2015*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Jasa usaha	20.754	-	-	-	-	20.754	*Business services*
Industri	64.354	-	-	-	-	64.354	*Manufacturing*
Pertambangan	45.704	-	-	-	-	45.704	*Mining*
Listrik, gas dan air	9.432	-	-	-	-	9.432	*Electricity, gas and water*
	140.244	-	-	-	-	140.244	
	12.589.105	592.156	63.032	56.726	185.452	13.486.471	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.144)	(40.416)	(23.943)	(24.117)	(74.551)	(268.171)	*Less: Allowance for possible losses*
	12.483.961	**551.740**	**39.089**	**32.609**	**110.901**	**13.218.300**	

c. Berdasarkan jangka waktu / *By period*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	137.719	182.160	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	4.268.929	3.580.545	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	10.730.656	9.583.522	*> 5 years*
	15.137.304	13.346.227	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 tahun	-	-	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	93.063	130.813	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	-	9.431	*> 5 years*
	93.063	140.244	
	15.230.367	13.486.471	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(409.203)	(268.171)	*Less: Allowance for possible losses*
	14.821.164	**13.218.300**	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	64.277	18.078	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	22.416	55.260	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	321.340	401.022	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	4.906.639	4.630.632	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	9.822.632	8.241.235	*> 5 years*
	15.137.304	13.346.227	

9. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan)

9. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (lanjutan)

d. By remaining period to maturity (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	-	-	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	-	-	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	-	-	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	93.063	140.244	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	93.063	140.244	
	15.230.367	13.486.471	
Dikurangi: Cadangan kerugian Penurunan nilai	(409.203)	(268.171)	*Less: Allowance for possible losses*
	14.821.164	**13.218.300**	

e. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.604.844 dan Rp1.096.815. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

e. Restructured financing

Total amount of restructured financing as of December 31, 2016 and 2015 are Rp1,604,844 and Rp1,096,815, respectively. Restructured financing are performed by extension of loan maturity dates, reschedule and additional plafond of debtor's financing.

f. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Keikutsertaan BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp27.833 dan Rp35.228 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Persentase bagian BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi, dimana BNI Syariah bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

f. Syndicated loans

Syndicated financing represent financing provided to borrowers under syndication agreements with other banks.

BNI Syariah's participation in syndicated financing with other banks amounted to Rp27,833 and Rp35,228 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

BNI Syariah's percentage shares in syndicated financing, where BNI Syariah acts as the lead arranger, is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
% Partisipasi	5,18%	33,70%	*% Participation*

9. PIUTANG *MURABAHAH (lanjutan)* / *MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

f. Pembiayaan sindikasi (lanjutan) / *Syndicated loans (continued)*

Keikutsertaan BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi, dimana BNI Syariah bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

BNI Syariah's participation in syndicated financing, where BNI Syariah is the syndication member, is as follows:

	2016	2015	
% Partisipasi	12,98%	11,55%	*% Participation*

g. Informasi lainnya / *Other information*

1) Lihat Catatan 48 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

   Refer to Note 48 for details of related party transactions and balances.

2) Tingkat marjin keuntungan *murabahah* per tahun berkisar antara setara 13,30% sampai dengan 13,77% pada tahun 2016 dan 13,83% sampai dengan 14,15% pada tahun 2015.

   The equivalent annual profit margin rate of murabahah ranges from13.30% to 13.77% in 2016 and 13.83% to 14.15% in 2015.

3) Perubahan cadangan kerugian piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

   The movements of allowance for possible losses on murabahah receivables are as follows:

	31 Desember/*December 31, 2016*			
	Individu/ *Individual*	Kolektif/ *Collective*	*Total*	
Saldo awal	48.561	219.610	268.171	*Beginning balance*
Cadangan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 42)	161.618	(10.817)	150.801	*Provision/(reversal) during the year (Note 42)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	(22.258)	(22.258)	*Written off during the year*
Penerimaan kembali hapus buku	-	12.177	12.177	*Recovery of write-offs*
Hasil klaim	-	334	334	*claim results*
Selisih kurs	-	(22)	(22)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**210.179**	**199.024**	**409.203**	***Ending balance***

	31 Desember/*December 31, 2015*			
	Individu/ *Individual*	Kolektif/ *Collective*	*Total*	
Saldo awal	3.499	181.878	185.377	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 42)	45.062	66.432	111.494	*Provision during the year (Note 42)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	(44.427)	(44.427)	*Written off during the year*
Penerimaan kembali hapus buku	-	15.587	15.587	*Recovery of write-offs*
Selisih kurs	-	140	140	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**48.561**	**219.610**	**268.171**	***Ending balance***

9. PIUTANG *MURABAHAH (lanjutan)*

g. Informasi lainnya (lanjutan)

Piutang *murabahah* yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara *ekstra-comtabel* di dalam rekening administratif.

4) Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian piutang yang dibentuk telah memadai.

5) Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 31) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

6) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) piutang *murabahah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

9. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

g. Other information (continued)

Murabahah receivables which were written off by the Bank are recorded as extra-comtable in the administrative account.

4) Management believes that the allowance for possible losses is adequate.

5) Murabahah receivables are pledged by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 31) or by other guarantees acceptable to the Bank.

6) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
NPF - Bruto	514.460	305.210	*NPF - Gross*
Persentase	3,38%	2,26%	*Percentage*
NPF - Neto	296.938	182.599	*NPF - Net*
Persentase	1,95%	1,35%	*Percentange*

7) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat piutang *murabahah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

7) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2016 and 2015, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

8) Rasio pembiayaan *murabahah* usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 5,61% dan 6,68%.

8) The small scale murabahah financing to total murabahah financing ratio for BNI Syariah as of December 31, 2016 and 2015 was at 5.61% and 6.68% respectively.

9) Bank memiliki agunan atas piutang *murabahah* dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

9) The Bank holds collateral against murabahah receivables in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets.

10. PINJAMAN *QARDH* / *10. FUNDS OF QARDH*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak ketiga	641.561	568.637	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	288.446	11.703	*Related parties (Note 48)*
	930.007	580.340	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.355)	(21.134)	*Less: Allowance for possible losses*
	906.652	**559.206**	

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

31 Desember/*December 31, 2016*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Rahn	497.068	4.183	48	-	-	501.299	*Rahn*
Kartu *Hasanah*	323.644	25.958	4.544	6.815	6.638	367.599	*Hasanah card*
Qardh	57.850	786	-	3	2.470	61.109	*Qardh*
	878.562	30.927	4.592	6.818	9.108	930.007	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan nilai	(8.619)	(1.537)	(682)	(3.409)	(9.108)	(23.355)	*Less: Allowance for possible losses*
	869.943	29.390	3.910	3.409	-	906.652	

31 Desember/*December 31, 2015*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Kartu *Hasanah*	333.518	30.394	4.387	7.708	6.627	382.634	*Hasanah card*
Qardh	79.361	1.959	578	462	2.469	84.829	*Qardh*
Rahn	103.885	8.992	-	-	-	112.877	*Rahn*
	516.764	41.345	4.965	8.170	9.096	580.340	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan Nilai	(5.192)	(2.016)	(745)	(4.085)	(9.096)	(21.134)	*Less: Allowance for possible losses*
	511.572	**39.329**	**4.220**	**4.085**	**-**	**559.206**	

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

c. Berdasarkan sektor ekonomi / *c. By economic sectors*

	31 Desember/*December 31, 2016*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Industri	26.108	3.988	-	-	-	30.096	*Manufacturing*
Perdagangan, restoran dan hotel	74.533	-	-	-	-	74.533	*Trading, restaurant, and hotel*
Pertanian	-	-	-	-	-	-	*Agriculture*
Pertambangan	13.000	-	-	-	-	13.000	*Mining*
Listrik, gas dan air	4.977	-	-	-	-	4.977	*Electricity, gas and water*
Jasa usaha	7.524	-	-	-	-	7.524	*Bussiness services*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	15.779	-	-	-	-	15.779	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Konstruksi	326.002	-	-	-	-	326.002	*Construction*
Sosial/masyarakat	24.382	-	-	-	-	24.382	*Social/public*
Lainnya	386.257	26.939	4.592	6.818	9.108	433.714	*Others*
	878.562	30.927	4.592	6.818	9.108	930.007	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.619)	(1.537)	(682)	(3.409)	(9.108)	(23.355)	*Less: Allowance for possible losses*
	869.943	**29.390**	**3.910**	**3.409**	**-**	**906.652**	

	31 Desember/*December 31, 2015*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Industri	29.029	-	-	-	-	29.029	*Manufacturing*
Pertambangan	10.000	-	-	-	-	10.000	*Mining*
Listrik, gas dan air	10.000	3.238	-	-	-	13.238	*Electricity, gas and water*
Jasa usaha	11.811	5.696	-	-	-	17.507	*Bussiness services*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	1.350	-	-	-	-	1.350	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Konstruksi	24.135	-	-	-	-	24.135	*Construction*
Sosial/masyarakat	3.804	-	-	-	-	3.804	*Social/public*
Lainnya	426.634	32.412	4.965	8.170	9.096	481.277	*Others*
	516.763	41.346	4.965	8.170	9.096	580.340	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan nilai	(5.192)	(2.016)	(745)	(4.085)	(9.096)	(21.134)	*Less: Allowance for possible losses*
	511.571	**39.330**	**4.220**	**4.085**	**-**	**559.206**	

d. Berdasarkan jangka waktu / *d. By period*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
≤ 1 tahun	502.786	507.958	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	96.989	3.215	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	330.232	69.167	*> 5 years*
	930.007	580.340	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.355)	(21.134)	*Less: Allowance for possible losses*
	906.652	**559.206**	

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

e. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *e. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
≤ 1 bulan	64.976	421.950	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	133.607	65.582	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	374.533	22.969	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	307.068	5.787	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	49.823	64.052	*> 5 years*
	930.007	580.340	
Dikurangi: Cadangan kerugian Penurunan nilai	(23.355)	(21.134)	*Less: Allowance for possible losses*
	906.652	**559.206**	

f. Pembiayaan yang direstrukturisasi / *f. Restructured financing*

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp11.672 dan Rp9.422. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

Total amount of restructured financing as of December 31, 2016 and 2015 are Rp11,672 and Rp9,422, respectively. Restructured financing are perform by extension of maturity dates, reschedule and additional plafond of debtor's financing.

g. Informasi lainnya / *g. Other information*

1) Lihat Catatan 48 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

1) Refer to Note 48 for details of related party transactions and balances.

2) Perubahan cadangan kerugian pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

2) The changes in the allowance for possible losses of funds of qardh are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	21.134	18.769	*Beginning balance*
Penyisian selama tahun berjalan (Catatan 42)	43.447	34.133	*Provisions during the year (Note 42)*
Penerimaan kembali hapus buku	5.569	5.777	*Recovery of write offs*
Penghapusanbuku selama tahun berjalan	(46.795)	(37.545)	*Write-offs during the year*
Saldo akhir	**23.355**	**21.134**	***Ending balance***

3) Jumlah minimum cadangan kerugian yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai.

3) The minimum amount of allowance for possible losses that should be provided as of December 31, 2016 and 2015 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulation.

Management believes that the allowance for fund of qardh losses is adequate.

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan)

g. Informasi lainnya (lanjutan)

4) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pinjaman *qardh* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

10. FUNDS OF QARDH (continued)

g. Other information (continued)

4) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of funds of qardh as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
NPF - Bruto	20.518	22.231	*NPF - Gross*
Persentase	2,21%	3,83%	*Percentage*
NPF - Neto	7.319	8.305	*NPF - Net*
Persentase	0,79%	1,43%	*Percentage*

5) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat pinjaman *qardh* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

5) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2016 and 2015, there are no funds of qardh which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

6) Bank Indonesia menerbitkan SE BI No. 14/16/DPbS yang berlaku sejak 31 Mei 2012 mengenai "Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah". Untuk menjalankan produk PKE tersebut, Bank dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang dijadikan agunan. Jumlah PKE maksimum Rp150 juta per nasabah.

Nasabah dimungkinkan memperoleh PKE dan *Rahn* secara bersamaan dengan jumlah saldo secara keseluruhan Rp250 juta dan jumlah saldo PKE maksimum sebesar Rp150 juta.

Manajemen yakin bahwa efek dari permintaan Bank Indonesia ini tidak akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

6) Bank Indonesia issued SE BI No. 14/16/DPbS which, applied since May 31, 2012 related to Product financing of Gold Ownership (PKE) for Syariah Bank and Syariah Business Unit". To operate the PKE product, the Bank is not allowed to charge rental and maintenance costs of gold collateral pledged. Total PKE financing maximum at Rp150 million per debtor.

Debtor is allowed to have both PKE and Rahn's facilities with total outstanding below Rp250 million and total PKE balance maximum at Rp150 million.

Management believes that the effect of Bank Indonesia's request would not have any material impact to the financial statements for the year ended December 31, 2016 and 2015.

7) Rasio pembiayaan *qardh* usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *qardh* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 0,00% dan 0,08%.

7) The small scale funds of qardh to total funds of qardh ratio for BNI Syariah as of December 31, 2016 and 2015 was 0.00% and 0.08%, respectively.

8) Bank memiliki agunan atas pinjaman *qardh* dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

8) The Bank holds collateral against funds of qardh in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets.

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

g. Informasi lainnya (lanjutan) / *g. Other information (continued)*

9) Dana pinjaman *qardh* bersumber dari modal Bank dan simpanan pihak ketiga. Pinjaman *qardh* ini merupakan pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang digunakan untuk dana talangan haji, *Rahn* dan pembiayaan *Islamic card*.

9) Funds of qardh is derived from the Bank's capital and third party funds. Funds of qardh represent loans to customers who are used to such bailouts, Rahn and Islamic card financing.

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / *11. MUDHARABAH FINANCING*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak ketiga	1.198.408	1.279.950	*Third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.801)	(21.268)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.181.607	**1.258.682**	

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	31 Desember/*December 31, 2016*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	***Total***	
Rupiah							***Rupiah***
Jasa usaha	932.275	10.320	8.567	417	1.892	953.471	*Business services*
Sosial/masyarakat	162.351	-	-	1.994	637	164.982	*Social/public*
Perdagangan, restoran dan hotel	52.680	-	-	-	-	52.680	*Trading, restaurant and hotel*
Industri	10.558	-	-	-	-	10.558	*Manufacturing*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	9.556	-	-	-	-	9.556	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Listrik, gas dan air	5.375	1.080	-	-	-	6.455	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	40	-	-	-	666	706	*Construction*
	1.172.835	11.400	8.567	2.411	3.195	1.198.408	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.479)	(527)	(1.255)	(1.205)	(2.335)	(16.801)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.161.356	**10.873**	**7.312**	**1.206**	**860**	**1.181.607**	

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (lanjutan)* / *MUDHARABAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) / *b. By economic sector (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2015*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	***Total***	
Rupiah							***Rupiah***
Jasa usaha	999.845	18.685	-	-	8.237	1.026.767	*Business services*
Sosial/masyarakat	213.021	3.077	-	-	513	216.611	*Social/public*
Perdagangan, restoran dan hotel	12.632	624	-	-	-	13.256	*Trading, restaurant and hotel*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	2.639	-	-	-	-	2.639	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Industri	9.443	-	-	-	-	9.443	*Manufacturing*
Listrik, gas dan air	8.103	-	-	-	-	8.103	*Electricity, gas and water*
Pertambangan	-	805	-	-	-	805	*Mining*
Konstruksi	1.207	-	-	-	666	1.873	*Construction*
Pertanian	163	-	-	-	290	453	*Agriculture*
	1.247.053	23.191	-	-	9.706	1.279.950	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.471)	(1.124)	-	-	(7.673)	(21.268)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.234.582	**22.067**	**-**	**-**	**2.033**	**1.258.682**	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	60.576	74.866	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	784.699	932.443	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	353.133	272.641	*> 5 years*
	1.198.408	1.279.950	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.801)	(21.268)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.181.607	**1.258.682**	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	4.136	3.628	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	9.862	3.556	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	106.831	133.972	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	915.646	1.058.295	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	161.933	80.499	*> 5 years*
	1.198.408	1.279.950	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.801)	(21.268)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.181.607	**1.258.682**	

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

e. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp48.962 dan Rp12.484. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

f. Informasi lainnya

1) Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diberikan adalah modal kerja.

2) Tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

3) Tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterima berkisar antara setara 12,05% sampai dengan 12,51% pada tahun 2016 dan setara 11,18% sampai dengan 11,52% pada tahun 2015.

4) Perubahan cadangan kerugian pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

11. MUDHARABAH FINANCING

e. Restructured financing

Total amount of restructured financing as of December 31, 2016 and 2015 are Rp48,962 and Rp12,484, respectively. Restructured financing are performed by extension of maturity dates, reschedule and additional plafond of debtor's financing.

f. Other information

1) Type of mudharabah financing granted is working capital.

2) There is no mudharabah financing granted to related parties as of December 31, 2016 and 2015.

3) The equivalent annual profit sharing rate of mudharabah financing ranges from 12.05% to 12.51% in 2016 and 11.18% to 11.52% in 2015.

4) The movements of allowance for possible losses on mudharabah financing are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	21.268	24.549	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 42)	45.045	19.618	*Provisions during the year (Note 42)*
Penerimaan kembali hapus buku	1.122	3.203	*Recovery of write-offs*
Penghapusanbuku selama tahun berjalan	(50.634)	(26.198)	*Write-offs during the year*
Selisih kurs	-	96	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**16.801**	**21.268**	***Ending balance***

Pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara *ekstra-comtable* di dalam rekening administratif.

Mudharabah financing that has been written off by the Bank are recorded as extra-comtable in the administrative accounts.

5) Jumlah minimum cadangan kerugian pembiayaan *mudharabah* yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian pembiayaan mudharabah yang dibentuk telah memadai.

5) The minimum allowance for possible losses on mudharabah financing that should be provided as of December 31, 2016 and 2015 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulations.

Management believes that the allowance for possible losses on mudharabah financing is adequate.

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH FINANCING (continued)*

f. Informasi lainnya (lanjutan) / *Other information (continued)*

6) Pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 31) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

6) Mudharabah financing is collateralised by registered mortgage or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 31) or by other guarantees acceptable to the Bank.

7) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan *mudharabah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

7) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of mudharabah financing as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
NPF - Bruto	14.173	9.706	*NPF - Gross*
Persentase	1,18%	0,76%	*Percentage*
NPF - Neto	9.378	2.033	*NPF - Net*
Persentase	0,78%	0,16%	*Percentage*

8) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

8) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2016 and 2015, there are no mudharabah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

9) Rasio pembiayaan *mudharabah* usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 0,48% dan 0,51%.

9) The small scale mudharabah financing to total mudharabah financing ratio for BNI Syariah as of December 31, 2016 and 2015 was 0.48% and 0.51%, respectively.

10) Bank memiliki agunan atas pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

10) The Bank holds collateral against mudharabah financing in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga	3.010.033	2.075.715	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	2.715	93.089	*Related parties (Note 48)*
	3.012.748	2.168.804	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.285)	(68.679)	*Less: Allowance for possible losses*
	2.907.463	**2.100.125**	

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

31 Desember/*December 31, 2016*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Jasa usaha	741.292	4.012	-	1.518	8.764	755.586	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	499.902	144.401	705	3.021	12.062	660.091	*Trading, restaurant and hotel*
Industri	437.561	2.940	-	-	1.444	441.945	*Manufacturing*
Konstruksi	361.645	1.314	922	4.213	5.518	373.612	*Construction*
Sosial/masyarakat	238.268	7.988	-	35	1.225	247.516	*Social/public*
Listrik, gas dan air	134.734	476	-	4.833	-	140.043	*Electriciyt, gas and water*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	83.404	888	-	-	165	84.457	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertanian	13.854	736	-	-	3.308	17.898	*Agriculture*
Pertambangan	16.513	-	-	-	-	16.513	*Mining*
Lain-lain	67.419	-	-	-	125	67.544	*Others*
	2.594.592	162.755	1.627	13.620	32.611	2.805.205	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Pertambangan	40.797	49.362	-	-	-	90.159	*Mining*
Industri	10.350	-	-	-	-	10.350	*Manufacturing*
Jasa usaha dan lain-lain	107.034	-	-	-	-	107.034	*Business services and others*
	158.181	49.362	-	-	-	207.543	
	2.752.773	212.117	1.627	13.620	32.611	3.012.748	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.293)	(49.091)	(195)	(4.219)	(24.487)	(105.285)	*Less: Allowance for possible losses*
	2.725.480	**163.026**	**1.432**	**9.401**	**8.124**	**2.907.463**	

31 Desember/*December 31, 2015*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Perdagangan, restoran dan hotel	386.335	11.755	59.720	3.104	13.109	474.023	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa usaha	367.675	49.916	256	474	6.257	424.578	*Business services*
Konstruksi	301.401	6.922	1.035	1.620	6.579	317.557	*Construction*
Industri	307.526	5.879	-	-	2.291	315.696	*Manufacturing*
Sosial/masyarakat	150.696	1.037	-	1.178	382	153.293	*Social/public*
Listrik, gas dan air	105.764	3.988	4.893	-	-	114.645	*Electricit,. gas and water*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	60.480	1.652	-	-	473	62.605	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertanian	42.406	-	213	-	4.800	47.419	*Agriculture*
Pertambangan	19.023	-	-	-	-	19.023	*Mining*
Lain-lain	17.245	-	-	-	3.127	20.372	*Others*
	1.758.551	81.149	66.117	6.376	37.018	1.949.211	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Pertambangan	99.423	-	-	-	-	99.423	*Mining*
Industri	9.890	-	-	-	-	9.890	*Manufacturing*
Jasa usaha dan lain-lain	110.280	-	-	-	-	110.280	*Business services and others*
	219.593	-	-	-	-	219.593	
	1.978.144	81.149	66.117	6.376	37.018	2.168.804	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.781)	(3.108)	(27.702)	(1.112)	(16.976)	(68.679)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.958.363	**78.041**	**38.415**	**5.264**	**20.042**	**2.100.125**	

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	1.050.180	628.378	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	1.120.344	832.499	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	634.682	488.334	*> 5 years*
	2.805.206	1.949.211	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 tahun	57.642	16.736	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	42.866	92.577	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	107.034	110.280	*> 5 years*
	207.542	219.593	
	3.012.748	2.168.804	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.285)	(68.679)	*Less: Allowance of possible losses*
	2.907.463	**2.100.125**	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	316.176	93.642	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	347.052	243.707	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	688.258	470.046	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	1.087.152	828.019	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	366.568	313.797	*> 5 years*
	2.805.206	1.949.211	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	3.919	7.350	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	5.196	32.476	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	67.140	3.499	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	24.254	65.988	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	107.033	110.280	*> 1 - 5 years*
	207.542	219.593	
	3.012.748	2.168.804	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.285)	(68.679)	*Less: Allowance of possible losses*
	2.907.463	**2.100.125**	

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

e. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp337.456 dan Rp127.792. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

f. Pembiayaan sindikasi

Keikutsertaan BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp58.503 dan Rp58.522 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Keikutsertaan BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi, dimana BNI Syariah bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

e. Restructured financing

Total amount of restructured financing as of December 31, 2016 and 2015 are Rp337,456 and Rp127,792, respectively. Restructured financing are performed by extension of maturity dates, reschedule and additional plafond of debtor's financing.

Syndicated financing represent financing provided to borrowers under syndication agreements with other banks.

f. Syndicated financing

BNI Syariah's participation in syndicated financing with other banks amounted to Rp58,503 and Rp58,522 as of December 31, 2016 and 2015 respectively.

BNI Syariah's participation in syndicated financing, where BNI Syariah is the syndication member, is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
% Partisipasi	13,00%	17,64%	*% Participation*

g. Informasi lainnya

1) Lihat Catatan 48 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

2) Tingkat bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berkisar antara setara 9,96% sampai dengan 10,26% pada tahun 2016 dan setara 10,05% sampai dengan 11,33% pada tahun 2015.

3) Perubahan cadangan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

g. Other information

1) Refer to Note 48 for details of related party transactions and balances.

2) The equivalent annual profit sharing rate of musyarakah financing ranges from 9.96% to 10.26% in 2016 and 10.05% to 11.33% in 2015.

3) The movements of allowance for possible losses on musyarakah financing are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	68.679	25.587	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 42)	82.711	52.724	*Provisions during the year (Note 42)*
Penerimaan kembali hapus buku	7.622	11.178	*Recovery of write offs*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(53.671)	(21.023)	*Written off during the year*
Selisih kurs	(56)	213	*Exchange rate differences*
Saldo akhir	**105.285**	**68.679**	***Ending balance***

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi lainnya (lanjutan)

4) Jumlah minimum cadangan kerugian pembiayaan *musyarakah* yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai.

5) Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 31) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

6) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan *musyarakah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

g. Other information (continued)

4) The minimum allowance for possible losses on musyarakah financing that should be provided as of December 31, 2016 and 2015 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulation. Management believes that the allowance for possible losses on musyarakah financing is adequate.

5) Musyarakah financing are collateralised by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 31) or by other guarantees acceptable to the Bank.

6) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of musyarakah financing as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
NPF - Bruto	47.858	109.511	*NPF - Gross*
Persentase	1,59%	5,05%	*Percentage*
NPF - Neto	18.957	63.721	*NPF - Net*
Persentase	0,63%	2,94%	*Percentage*

7) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat pembiayaan *musyarakah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

8) Rasio pembiayaan *musyarakah* usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 0,38% dan 0,88%.

7) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2016 and 2015, there are no musyarakah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

8) The small scale musyarakah financing to total musyarakah financing ratio for BNI Syariah as of December 31, 2016 and 2015 was 0.38% and 0.88%, respectively.

13. TAGIHAN AKSEPTASI / *13. ACCEPTANCES RECEIVABLE*

a. Berdasarkan kolektibilitas / *a. By collectibility*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Lancar	4.855	-	*Current*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(49)	-	*Less: Allowance for possible losses*
	4.806	**-**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 48)	4.855	-	*Related parties (Note 48)*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(49)	-	*Less: Allowance for possible losses*
	4.806	**-**	

c. Informasi lainnya / *c. Other Information*

Perubahan cadangan kerugian tagihan lainnya adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for possible losses on other bills are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 42)	49	-	*Provisions during the year (Note 42)*
Saldo Akhir	**49**	**-**	***Ending Balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian tagihan akseptasi yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for possible losses on acceptances receivable is adequate.

14. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - NETO / *14. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Ijarah multijasa	561.345	729.323	*Ijarah multi services*
Akumulasi penyusutan	(445.600)	(481.648)	*Accumulated depreciation*
	115.745	**247.675**	

Sumber dana *Ijarah* multijasa adalah modal Bank dan simpanan dana pihak ketiga. *Ijarah* mutijasa sebagian besar terdiri dari pembiayaan *ijarah* untuk tujuan pendidikan, talangan haji, dan lain-lain.

Funds of ijarah multiservice is derived from the Bank's capital and third party funds. Ijarah multi services mostly represents ijarah financing for educational purpose, hajj bridging loan, etc.

14. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - NETO (lanjutan)

Jumlah *ijarah* yang akan jatuh tempo dalam dua tahun terakhir adalah masing-masing sebesar Rp89.019 dan Rp163.477 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi untuk tahun berjalan adalah masing-masing sebesar Rp36.048 dan Rp72.227 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Catatan 36).

14. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET (continued)

The amount of Ijarah that will be due in two years period amounts to Rp89,019 and Rp163,477 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

Depreciation charged to current year profit or loss amounted to Rp36,048 and Rp72,227 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively (Note 36).

15. ASET TETAP / *15. FIXED ASSETS*

31 Desember/*December 31, 2016*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Penilaian Kembali/ *Revaluation*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	65.213	54.196	-	-	119.409	*Land*
Bangunan	13.954	17.986	-	-	31.940	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	219.710	20.035	-	(6.612)	233.133	*Motor vehicles and office equipments*
	298.877	92.217	-	(6.612)	384.482	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	251	931	-	-	1.182	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	138.867	34.335	-	(4.487)	168.715	*Motor vehicles and office equipments*
	139.118	35.266	-	(4.487)	169.897	
Nilai buku neto	**159.759**	**56.951**	**-**	**(2.125)**	**214.585**	***Net book value***

31 Desember/*December 31, 2015*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Penilaian Kembali/ *Revaluation*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	8.028	15.708	41.477	-	65.213	*Land*
Bangunan	12.685	4.955	(3.670)	(16)	13.954	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	198.931	21.545	-	(766)	219.710	*Motor vehicles and office equipments*
	219.644	42.208	37.807	(782)	298.877	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	3.638	963	(4.344)	(6)	251	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	105.116	34.517	-	(766)	138.867	*Motor vehicles and office equipments*
	108.754	35.480	(4.344)	(772)	139.118	
Nilai buku bersih	**110.890**	**6.728**	**42.151**	**(10)**	**159.759**	***Net book value***

15. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian (kerugian)/keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

Details of (loss)/gain on sale of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Harga jual	1.995	16	*Proceeds*
Nilai buku	(2.125)	(10)	*Book value*
(Kerugian)/keuntungan	(130)	6	*(Loss)/gain*

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp35.266 dan Rp35.480 (Catatan 41) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The balances of depreciation amounting to Rp35,266 and Rp35,480 (Note 41) as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

Nilai bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp71.977 dan Rp44.917.

As of December 31, 2016 and 2015, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp71,977 and Rp44,917, respectively.

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) kepada PT Asuransi Tripakarta dan Asuransi Sinarmas Syariah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya pada tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp359.385 (2015: Rp198.784).

The Bank has insured its fixed assets (except for landrights) with PT Asuransi Tripakarta and Asuransi Sinarmas Syariah to cover possible losses against fire, theft and other risks on December 31, 2016 Rp359,385 (2015: Rp198,784).

Nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2016 tidak berbeda jauh dengan nilai tercatat karena Bank melakukan penilaian pada tanah dan bangunan pada tanggal 30 September 2015.

There is no significant difference between fair value and carrying value of land and building owned by the Bank as of December 31, 2016 because the Bank perform revaluation over land and buildings on September 30, 2015.

Pada tanggal 30 September 2015, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

On September 30, 2015, the Bank changed their accounting policy of land and buildings from cost model to revaluation model.

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut ini:

The valuations of land and buildings are performed by the following external independent appraisals:

a) KJPP Toha Okky Heru dan Rekan,
b) KJPP Antonius Setiady dan Rekan,
c) KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan,
d) KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan.

a) KJPP Toha Okky Heru dan Rekan,
b) KJPP Antonius Setiady dan Rekan,
c) KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan,
d) KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan.

15. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti,
b) Kondisi pasar,
c) Lokasi,
d) Karakteristik fisik,
e) Karakteristik tanah.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 30 September 2015 untuk kelompok aset tanah dan bangunan di Indonesia dan luar negeri yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards, based on reference to recent market transactions done on arm's length terms. The valuation method used are market data approach and cost approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

a) Type and right on property,
b) Market condition,
c) Location,
d) Physical characteristic,
e) Land characteristic.

Information on the revaluation of land and buildings as of September 30, 2015 located in Indonesia and overseas performed by the Bank are as follows:

	Nilai buku sebelum revaluasi/ *Carrying amount before revaluation*	**Nilai buku setelah revaluasi/ *Carrying amount after revaluation***	**Keuntungan revaluasi - neto/ *Gain revaluation - net***	
Tanah	23.736	65.213	41.477	*Land*
Bangunan	13.197	13.871	674	*Buildings*
	36.933	**79.084**	**42.151**	

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp41.477 yang dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain".

The revaluation of land resulting increase in the carrying amount of land amounting to Rp41,477 which recognised as "Other Comprehensive Income".

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dicatat sebesar Rp674. Kenaikan ini terdiri dari kenaikan nilai bangunan yang dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" sebesar Rp2.361 dan penurunan nilai bangunan yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp1.687.

The revaluation of building resulting increase in the carrying amount of bulding amounting to Rp674. The increase consist of the increase in the carrying amount of building recognised in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp2,361 and the decrease in the carrying amount of building recognised in the curent year expenses amounting to Rp1,687.

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp43.838. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan adalah sebesar Rp1.687.

In total, the increases in the carrying amount land and buildings resulting in the recognition of "Other Comprehensive Income" amounting to Rp43,838. The decrease of carrying amount from revaluation resulting in the recognition of current year expenses amounting to Rp1,687.

15. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen non-keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat 1
  Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2
  Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3
  Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

15. FIXED ASSETS (continued)

The table below analyses non-financial insrument carried at fair value, by level of valuation method. The different levels of valuation method define as follows:

- *Level 1*
  Quted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- *Level 2*
  Input other than quoted prices included within level 1 that are observable for asset and liabilities, either directly (that is, as a price) or indirectly (derived from price).
- *Level 3*
  Input for asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2016 menggunakan:/
Fair value measurement as of December 31, 2016 using:

	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2 *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	-	119.409	-	119.409	*Land*
Bangunan	-	31.940	-	31.940	*Building*
	-	**151.349**	**-**	**151.349**	

Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2015 menggunakan:/
Fair value measurement as of December 31, 2015 using:

	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2 *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	-	65.213	-	65.213	*Land*
Bangunan	-	13.871	-	13.871	*Building*
	-	**79.084**	**-**	**79.084**	

Tidak terdapat perpindahan antar tingkat selama tahun berjalan.

Nilai wajar tingkat 2 dari tanah dan bangunan dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar, estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Harga pasar dari tanah dan bangunan yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter.

There were no transfers between level during the year.

Level 2 fair values of land and buildings are calculated using the comparable market data approach and cost reproduction or cost replacement approach. The approximate market prices of comparable land and buildings are adjusted for differences in key attributes such as property size, location and use of an asset. The most significant input into this valuation approach is price per square meter assumptions.

15. ASET TETAP (lanjutan) / *15. FIXED ASSETS (continued)*

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar harga perolehan, maka per 31 Desember 2015 dicatat dalam jumlah sebagai berikut:

If land and buildings are presented on historical cost basis, as of December 31, 2015 the amount would be as follows:

	31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Tanah	23.736	23.736	*Land*
Bangunan			*Bulidings*
Harga perolehan	17.541	17.541	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(5.798)	(4.629)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku bangunan	11.743	12.912	*Net book amount*

Selain tanah dan bangunan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than land and buildings.

16. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *16. PREPAID EXPENSES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban dibayar dimuka			***Prepaid expenses***
Sewa	121.832	105.119	*Rent*
Uang muka			***Advances***
Pembelian Gedung	11.943	-	
Sewa Gedung	17.986	4.615	
Operasi	7.434	6.107	*Operating*
Lain-lain	2.110	4.819	*Others*
	39.473	15.541	
	161.305	**120.660**	

17. ASET LAIN-LAIN / *17. OTHER ASSETS*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan yang akan diterima dari surat berharga	89.081	35.872	*Accrued income of marketable securities*
Piutang pendapatan *ijarah* - bersih setelah dikurangi cadangan kerugian masing-masing sebesar Rp3.087 dan Rp1.691 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	70.554	79.657	*Ijarah income receivable - net after less allowance for losses as of Rp3,087 and Rp1,691 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Piutang pendapatan *murabahah*	7.297	7.471	*Murabahah income receivables*
Persediaan alat kantor	6.917	6.706	*Office supplies and stamps*
Uang jaminan	4.795	3.847	*Security deposit*
Piutang pendapatan *rahn*	188	436	*Rahn income receivables*
Piutang pendapatan *musyarakah*	92	137	*Musyarakah income receivables*
Piutang pendapatan *mudharabah*	6	3	*Mudharabah income receivables*
Talangan perawatan pegawai	-	4.307	*Employee medical reimbursement*
Lain-lain	17.439	9.264	*Others*

17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan) / *17. OTHER ASSETS (continued)*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak berelasi (Catatan 48)			***Related parties (Note 48)***
Tagihan transaksi non-ATM	45.537	44.576	*Non-ATM transaction receivables*
Tagihan transaksi ATM	250	-	*ATM transaction receivables*
	242.156	**192.276**	

Perubahan cadangan kerugian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for possible losses on other assets are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	1.691	606	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 42)	1.396	1.085	*Provisions during the year (Note 42)*
Saldo akhir	**3.087**	**1.691**	***Ending balance***

18. LIABILITAS SEGERA / *18. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Simpanan sementara	23.324	11.220	*Temporary deposit*
Dana zakat	9.329	7.701	*Zakat funds*
Kiriman uang	456	21	*Remittances*
	33.109	**18.942**	

Simpanan sementara merupakan simpanan untuk membukukan transaksi-transaksi yang berasal dari produk dan jasa yang disediakan Bank yang belum dapat diproses lebih lanjut menunggu berlakunya kondisi (syarat dan ketentuan) untuk masing-masing produk dan jasa tersebut.

Temporary deposit is a deposit to record the transactions that result from products and services provided by the Bank that can not be processed further waiting for the fulfilment of the conditions (terms and conditions) for each product and service.

19. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *19. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.*

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Undistributed revenue sharing which has not been distributed by the Bank as of December 31, 2016 and 2015 as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Deposito *mudharabah*	35.335	41.818	*Mudharabah time deposits*
Sukuk *mudharabah*	4.353	4.440	*Mudharabah sukuk issued*
	39.688	**46.258**	

20. GIRO *WADIAH* / *20. WADIAH DEMAND DEPOSITS*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga	1.488.122	1.023.422	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	45.025	47.475	*Related parties (Note 48)*
	1.533.147	**1.070.897**	

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah	1.482.746	992.235	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	50.401	78.662	*United States Dollar*
	1.533.147	**1.070.897**	

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yaddhamanah* yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Bonus untuk giro wadiah Rupiah adalah nihil untuk tahun 2016 dan berkisar antara 0,05% sampai dengan 0,47% untuk tahun 2015.

Wadiah demand deposits represent wadiah yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy. Annual bonuses for Rupiah wadiah demand deposits are nil for the year 2016 and ranged from 0.05% to 0.47% for the year 2015.

21. TABUNGAN *WADIAH* / *21. WADIAH SAVINGS DEPOSITS*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga	2.544.546	1.709.309	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	1.391	530	*Related parties (Note 48)*
	2.545.937	**1.709.839**	

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah	2.543.133	1.708.975	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2.804	864	*United States Dollar*
	2.545.937	**1.709.839**	

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah and United States Dollar currency which can be distributed with bonus with the Bank's policy.

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *22. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak ketiga	31.364	33.713	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	-	19.286	*Related parties (Note 48)*
	31.364	**52.999**	

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Rupiah	31.364	52.999	*Rupiah*

Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Bank merupakan simpanan giro *wadiah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA).

Deposits from other banks represents wadiah demand deposits and Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA).

Bonus untuk simpanan dari bank lain Rupiah adalah nihil untuk tahun 2016 dan berkisar antara 0,05% sampai dengan 0,71% untuk tahun 2015.

Annual bonuses for Rupiah deposits from other banks are nil for the year 2016 and ranged from 0.05% to 0.71% for the year 2015.

23. KEWAJIBAN AKSEPTASI / *23. ACCEPTANCES PAYABLE*

Berdasarkan pihak dan mata uang / ***By relationship and curency***

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 48)			*Related party (Note 48)*
Rupiah			*Rupiah*
Kreditur non-bank	4.855	-	*Non-bank creditors*
	4.855	-	

24. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *24. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Marketing	22.318	15.042	*Marketing*
Biaya kantor	19.769	15.733	*Office expenses*
Lain-lain	35	5	*Others*
	42.122	**30.780**	

25. CADANGAN / *25. PROVISION*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	1.770	4.520	*Estimated losses from commitments and contigencies*
Cadangan atas perkara hukum	455	100	*Provision for legal cases*
Total	**2.225**	**4.620**	***Total***

a. Perubahan cadangan atas perkara hukum adalah sebagai berikut:

a. The movements of the allowance for legal cases are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	100	100	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan	355	-	*Provision during the year*
Saldo akhir	**455**	**100**	***Ending balance***

b. Perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

b. Changes in estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	4.520	479	*Beginning balance*
(Pembalikan)/cadangan selama tahun berjalan (Catatan 42)	(2.374)	3.973	*(Reversal)/provision during the year (Note 42)*
Selisih kurs	(376)	68	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**1.770**	**4.520**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan atas perkara hukum di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for legal cases are adequate.

26. PERPAJAKAN / *26. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid tax*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
STP Pajak 2014 (Catatan 26e)	-	7.901	*Tax Collection Letter (STP) 2014 (Note 26e)*

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / *26. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pajak penghasilan badan			*Corporate Income Tax*
Pasal 29	6.727	865	*Article 29*
Pasal 25	7.735	5.613	*Article 25*
Pajak lainnya	19.122	16.527	*Other taxes*
	33.584	**23.005**	

c. Beban pajak / *c. Tax expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban pajak kini	(110.985)	(89.283)	*Current tax expenses*
Beban pajak tangguhan	15.163	10.040	*Deferred tax expenses*
	(95.822)	**(79.243)**	

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Bank's income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense and the prevailing tax rate is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Laba sebelum beban pajak	373.197	307.768	*Income before tax expense*
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(93.299)	(76.942)	*Tax calculated based on prevailing rate*
Beda tetap:			*Permanent difference:*
Kenikmatan karyawan	(1.461)	(1.636)	*Employee benefit in kind*
Lain-lain	(1.062)	(665)	*Others*
Beban pajak	**(95.822)**	**(79.243)**	***Tax expense***

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / *26. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak (lanjutan) / *c. Tax expense (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2016 and 2015 is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Laba sebelum pajak penghasilan	373.197	307.768	*Income before tax*
Dampak pajak penghasilan			*Impact to Income tax*
Beda temporer			*Temporary difference*
Cadangan penurunan nilai	17.099	4.507	*Provision for impairment losses*
Imbalan kerja	43.273	24.022	*Employee benefit*
Penyusutan aset tetap	(337)	(210)	*Depreciation of fixed asset*
Cadangan kerugian non pembiayaan	259	2.179	*Provision for possible losses on non financing*
Cadangan hukum, kecurangan dan lainnya	355	-	*Allowance for legal, fraud, and others*
Lainnya	-	9.663	*Others*
Beda tetap			*Permanent differences*
Kenikmatan karyawan	5.845	6.545	*Employee in-kind benefits*
Keuntungan atas reksadana	(6.576)	-	*Gain on mutual fund*
Lain-lain	10.823	2.658	*Others*
Penghasilan kena pajak	**443.938**	**357.132**	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku	110.985	89.283	*Income tax based on the applicable tax rates*
Beban pajak penghasilan	110.985	89.283	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar dimuka	(104.258)	(88.418)	*Prepaid tax*
Utang pajak penghasilan	**6.727**	**865**	***Taxable income***

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2015.

The calculation of income tax for the year ended December 31, 2016 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2015.

Pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah dihitung menggunakan tarif pajak 25%.

Bank's corporate income tax for the years ended December 31, 2016 and 2015 are calculated using the tax rate of 25%.

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / *26. TAXATION (continued)*

d. Aset pajak tangguhan - neto / *d. Deferred tax asset - net*

	31 Desember/*December 31, 2016*				
	1 Januari/ *January 1,*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ *Credit/ (charged) to profit/loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credit/ (charged) to equity*	31 Desember/ *December 31,*	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets/(liabilities)***
Imbalan kerja	29.598	10.818	(1.564)	38.852	*Employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dan pembiayaan	7.200	4.275	-	11.475	*Allowance for impairment losses on receivables and financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas non-pembiayaan dan piutang	2.049	65	-	2.114	*Allowance for impairment losses on non-financing and receivables*
Cadangan perkara hukum dan lainnya	25	89	-	114	*Allowance for legal cases and others*
Aset tetap	(4.334)	(84)	-	(4.418)	*Fixed assets*
kerugian yang belum direalisasi atas surat tersedia untuk dijual	-	-	3.720	3.720	*Unrealized loss on available for sale securities*
Aset pajak tangguhan - neto	**34.538**	**15.163**	**2.156**	**51.857**	***Deferred tax assets - net***

	31 Desember/*December 31, 2015*				
	1 Januari/ *January 1,*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ *Credit/ (charged) to profit/loss*	Dikreditkan ke ekuitas *Credit/ to equity*	31 Desember/ *December 31,*	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets/(liabilities)***
Imbalan kerja	21.358	6.005	2.235	29.598	*Employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dan pembiayaan	6.073	1.127	-	7.200	*Allowance for impairment losses on receivables and financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas non-pembiayaan dan piutang	1.504	545	-	2.049	*Allowance for possible losses on non-financing and receivables*
Cadangan perkara hukum dan lainnya	25	-	-	25	*Allowance for legal cases and others*
Aset tetap	(4.281)	(53)	-	(4.334)	*Fixed assets*
Lainnya	(2.416)	2.416	-	-	*Others*
Aset pajak tangguhan - neto	**22.263**	**10.040**	**2.235**	**34.538**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen Bank berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa pajak yang akan datang.

The Bank's management believes that deferred tax assets can be recovered in future taxable years.

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat Tagihan Pajak

Pada tanggal 29 Desember 2015, Bank menerima Surat Tagihan Pajak (STP) No. 90006/106/14/093/15 atas PPh badan Untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp9.165 Juta (termasuk denda). Bank menindaklanjuti STP tersebut dengan melakukan pembayaran sebesar Rp7.901 juta (pokok pajak) pada tanggal 30 Desember 2015. Bank telah mengajukan permohonan pembatalan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap STP PPh tersebut dengan surat No. BNISY/DIR/004 pada tanggal 15 Januari 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-01090/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas STP Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, diputuskan bahwa Direktur Jendral Pajak mengabulkan seluruh permohonan pengurangan atau pembatalan STP No. 90006/106/14/093/15 tanggal 29 Desember 2015 untuk tahun pajak 2014. Pada tanggal 17 Mei 2016, Bank telah menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp7.901 juta berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80254/093-0253-2016 tanggal 9 Mei 2016.

26. TAXATION (continued)

e. Tax Assessment Letter

On December 29, 2015, Bank received Tax Collection Letters (STP) No. 90006/106/14/ 093/15 of corporate income tax for the year 2014 amounting to Rp9,165 million (including penalties). The Bank followed up these STPs by making a payment of Rp7,901 million (principal tax) on December 30, 2015. The Bank has submitted a written request to the cancellation of the Directorate General of Taxes on the income tax STP by letter No. BNISY-DIR/004 dated January 15, 2016.

Based on the Decision Letter of the Directorate General of Taxes No. Kep-01090/NKEB/WPJ.19/2016 dated April 12, 2016 concerning cancellation of tax assessment on STPs Pursuant to Article 36 paragraph (1) letter C: Request for Taxpayer, it was decided that the Directorate General of Taxes grant the entire request for reduction or cancellation of STP No. 90006/106/14/093/15 dated December 29, 2015 for fiscal year 2014. On May 17, 2016, the Bank received a refund of an overpayment of income tax amounting to Rp7,901 million based on Excess Tax Payment Order (SPMKP) No. 80254/ 093-0253-2016 dated May 9, 2016.

27. LIABILITAS LAIN-LAIN / *27. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Setoran jaminan	33.285	25.574	*Guarantee deposits*
Pendapatan diterima dimuka	14.380	2.874	*Deferred income*
Nota kredit dalam penyelesaian	4.264	3.992	*Credit memo in process*
Lain-lain	6.876	925	*Others*
	58.805	33.365	
Pihak berelasi (Catatan 48)			*Related parties (Note 48)*
Liabilitas transaksi ATM	41.317	36.511	*ATM transaction liabilities*
Liabilitas transaksi non ATM	-	1.279	*Non ATM transactionliabilities*
	41.317	37.790	
	100.122	**71.155**	

28. SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITERBITKAN

Pada tanggal 26 Mei 2015, Bank menerbitkan sukuk *Mudharabah* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah nilai nominal Rp500 milliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2018. Indikasi tingkat bagi hasil sukuk *Mudharabah* adalah setara 9,25% per tahun. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulanan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *Mudharabah*. Pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *Mudharabah* pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *Mudharabah* terakhir sekaligus jatuh tempo sukuk *Mudharabah* adalah tanggal 26 Mei 2018. Tanggal 26 Mei 2018 juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan pembiayaan mikro yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank.

Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan diakui sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan sukuk dicatat secara terpisah sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk *Mudharabah*. Jumlah biaya yang diamortisasi pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.098 dan Rp758.

Prinsip pembagian hasil usaha menggunakan prinsip *revenue sharing* yaitu pendapatan yang diperoleh dari pendapatan kas seluruh portofolio yang dihitung berdasarkan alokasi portofolio sebesar 5 (lima) kali Dana Sukuk *Mudharabah* dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Bank.

Perhitungan bagi hasil berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk *Mudharabah* dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Bank kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan 3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan (tidak diaudit). Nisbah untuk pemegang sukuk *Mudharabah* adalah sebesar 15,35%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk *Mudharabah* ini. BRI adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Bank melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

28. MUDHARABAH SUKUK ISSUED

On May 26, 2015, Bank issued Mudharabah sukuk, listed on the Indonesian Stock Exchange, with a nominal value of Rp500 billion that will mature on May 26, 2018. The indicative level of the sukuk's yield is 9.25% per annum. The revenue from profit-sharing is paid on quarterly basis, in accordance with the payment date of Sukuk Mudharabah's profit-sharing. The first payment Mudharabah Sukuk revenue profit-sharing was distributed on August 26, 2015, while the last payment of the revenue will be distributed on May 26, 2018. On May 26, 2018 will also be the date of the repayment of Mudharabah sukuk fund. All of the funds generated from the issuance of the Mudharabah Sukuk, after being deducted by all of the emission costs, will be used entirely to support the sharia financing activities, such as consumer financing, productive financing, and micro financing, as a part of the Bank business activities.

The value of the issued Mudharabah Sukuk is recognized at its nominal value of it. All costs for the issuance process of the sukuk is separately recorded as deferred expenses and will be amortized using straight line method during the period of Mudharabah Sukuk. The total expenses that is amortized during 2016 and 2015 is Rp1,098 and Rp758, respectively.

The profit-sharing principle uses revenue-sharing principles from the revenue generated from cash-revenue from all portfolios based on the calculation of portfolios allocation as many as 5 (five) times of the Sukuk Mudharabah funds in Rupiah currency owned by the Bank.

The method used for the revenue sharing calculation is based on the multiplication of the revenue-sharing portion (or nisbah) of the Mudharabah Sukuk Holders with the whole revenue that can be shared - where the calculation is based on the information provided by the Bank to the Trustee about the explanation of the calculation of the Revenue Sharing calculation-method using three (3) period of financial positions (unaudited). The revenue-sharing portion (or nisbah) of the Sukuk Mudharabah holders is 15.35%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ('BRI') was appointed as the Trustee of the Mudharabah Sukuk issuance. BRI is indirectly-affiliated party of the Bank through the share ownership by the Republic of Indonesia.

28. SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITERBITKAN (lanjutan) / *28. MUDHARABAH SUKUK ISSUED (continued)*

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan jangka waktu / *a. By type, currency and period*

	31 Desember/*December 31,* 2016				
	Saldo/ *Balance*	**Peringkat/ *Rating***	**Pemeringkat/ *Rating Company***	**Jangkawaktu/ *Period***	
Rupiah Sukuk *Mudharabah*	500.000	id AA+(Sy)	Pefindo	3 tahun/*year*	*Rupiah* *Mudharabah Sukuk*

	31 Desember/*December 31,* 2015				
	Saldo/ *Balance*	**Peringkat/ *Rating***	**Pemeringkat/ *Rating Company***	**Jangka waktu/ *Period***	
Rupiah Sukuk *Mudharabah*	500.000	id AA+(Sy)	Pefindo	3 tahun/*year*	*Rupiah* *Mudharabah Sukuk*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	278.000	345.000	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	222.000	155.000	*Related parties (Note 48)*
	500.000	**500.000**	

29. GIRO *MUDHARABAH* / *29. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	434.854	429.824	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	150.443	6.472	*Related parties (Note 48)*
	585.297	436.296	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	15.470	11.938	*Third parties*
	600.767	**448.234**	

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rupiah	522.711	389.073	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	78.056	59.161	*United States Dollar*
	600.767	**448.234**	

29. GIRO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS (continued)*

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah demand deposits for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

31 Desember/*December 31, 2016*	
Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***
3 : 97	0,32

31 Desember/*December 31, 2015*	
Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***
3 : 97	0,32

c. Giro *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing sebesar Rp 393.866 dan Rp292.882 pada tanggal 31 Desember 2016, (2015 : Rp 54.231 dan Rp 61.098).

c. *Mudharabah demand deposits that were used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp393,866 and Rp292,882, respectively, as of 31 December 2016, (2015: Rp 54,231 and Rp 61,098).*

30. TABUNGAN *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

a. Berdasarkan jenis produk / *By product*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Tabungan iB Syariahplus Perorangan	3.999.129	3.430.158	*iB Savings Shariaplus Individual*
Tabungan iB Bisnis	1.184.782	993.895	*iB Savings Business*
Tabungan *Baitullah* iB *Hasanah*	766.769	597.008	*iB Savings Baitullah Hasanah*
Tabungan iB Bisnis Non-Perorangan	356.850	285.480	*iB Savings Business Non-Individual*
Tabungan Prima iB *Hasanah*	237.918	125.834	*iB Prima Savings Hasanah*
Tabungan iB Syariahplus Non-Perorangan	138.875	97.163	*iB Savings Shariaplus Non-Individual*
Tapenas iB *Hasanah*	133.452	105.290	*iB Tapenas Hasanah*
Tapma iB *Hasanah*	57.016	63.342	*iB Tapma Hasanah*
Tabungan iB *HasanahCard*	2.651	2.660	*iB Savings Hasanah Card*
	6.877.442	**5.700.830**	

30. TABUNGAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / *30. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)*

a. Berdasarkan jenis produk (lanjutan) / *a. By product (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Bank			*Bank*
Tabungan iB Bisnis			*iB Savings Business*
Non Perorangan	163.041	117.783	*non individual*
Tabungan iB Syariahplus			*iB Savings Shariaplus*
Non-Perorangan	24.047	20.877	*Non-Individual*
	187.088	**138.660**	
	7.064.530	**5.839.490**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	6.863.593	5.692.052	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	13.849	8.778	*Related parties (Note 48)*
	6.877.442	**5.700.830**	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	187.088	138.660	*Third parties*
	7.064.530	**5.839.490**	

c. Berdasarkan mata uang / *c. By currency*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Rupiah	7.031.050	5.825.184	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	33.480	14.306	*United States Dollar*
	7.064.530	**5.839.490**	

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

30. TABUNGAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 berkisar sebagai berikut:

30. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah savings deposits for the years ended December 31, 2016 and 2015 ranges as follows:

31 Desember/*December 31, 2016*	
Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***
1 : 99 - 28 : 72	0,10% - 4,81%

31 Desember/*December 31, 2015*	
Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***
1 : 99 - 28 : 72	0,11% - 5,26%

d. Tabungan *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing sebesar Rp267.249 dan Rp140.590 pada tanggal 31 Desember 2016, (2015 : Rp116.125 dan Rp37.555).

d. *Mudharabah saving deposits that were used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp267,249 and Rp140,590 as of December 31, 2016, (2015: Rp116,125 and Rp37,555).*

31. DEPOSITO *MUDHARABAH*

a. Berdasarkan hubungan

31. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

a. By relationship

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	5.099.827	10.017.986	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	7.591.359	386.908	*Related parties (Note 48)*
	12.691.186	**10.404.894**	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	286.368	298.886	*Third parties*
	286.368	**298.886**	
	12.977.554	**10.703.780**	

31. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *31. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Rupiah	12.197.453	10.227.197	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	780.101	476.583	*United States Dollar*
	12.977.554	**10.703.780**	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Bukan Bank			*Non-Bank*
1 bulan	8.093.816	6.675.491	*1 month*
3 bulan	748.981	644.943	*3 months*
6 bulan	351.386	207.396	*6 months*
12 bulan	3.497.003	2.877.064	*12 months*
	12.691.186	**10.404.894**	
Bank			*Bank*
1 bulan	110.185	138.235	*1 month*
3 bulan	141.500	103.000	*3 months*
6 bulan	3.832	43.300	*6 months*
12 bulan	30.851	14.351	*12 months*
	286.368	**298.886**	
	12.977.554	**10.703.780**	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Bukan Bank			*Non-Bank*
≤ 1 bulan	6.213.734	4.803.670	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	3.439.689	3.168.105	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	943.227	728.155	*> 3 - 12 months*
> 12 bulan	2.094.536	1.704.964	*> 12 months*
	12.691.186	**10.404.894**	
Bank			*Bank*
≤ 1 bulan	90.185	118.535	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	162.441	123.641	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	7.396	43.514	*> 3 - 12 months*
> 12 bulan	26.346	13.196	*> 12 months*
	286.368	**298.886**	
	12.977.554	**10.703.780**	

31. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan)

e. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing berjumlah Rp839.974 dan Rp1.127.880 pada tanggal 31 Desember 2016, (2015: Rp1.289.142 dan Rp1.849.746).

f. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

31. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)

e. *Mudharabah time deposits that were used as collateral for the Bank's receivables and financing respectively amounted to Rp839,974 and Rp1,127,880 as of December 31, 2016, (2015: Rp1,289,142 and Rp1,849,746).*

f. *Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.*

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the years ended December 31, 2016 and 2015, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2016*		**31 Desember/ *December 31, 2015***		
	Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	**Tingkat bagi hasil(%)/ *Profit sharing rate (%)***	**Nisbah (%)/ *Ratio (%)***	**Tingkat bagi hasil(%)/ *Profit sharing rate (%)***	
1 Bulan	46 : 54	4,99%	49 : 51	5,30%	*1 month*
3 Bulan	47 : 53	5,13%	51 : 49	5,52%	*3 months*
6 Bulan	49 : 51	5,35%	53 : 47	5,73%	*6 months*
12 Bulan	50 : 50	5,49%	55 : 45	5,95%	*12 months*

32. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Pendirian No.160 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 22 Maret 2010, modal dasar BNI Syariah adalah sebesar Rp4.004.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 4.004.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri atas 1.001.000 (nilai penuh) lembar saham dengan rincian sebesar Rp1.000.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT BNI Life Insurance dan sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) dalam bentuk transfer aset, liabilitas dan dana *syirkah* temporer yang berasal dari UUS BNI. Tidak terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar atas aset, liabilitas dan dana *syirkah* temporer yang ditransfer oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

32. CAPITAL STOCK

Based on the Deed of Establishment No. 160 dated March 22, 2010 of Notary Aulia Taufani, S.H, substitute of Notary Sutjipto, S.H., BNI Syariah's authorized capital amounted to Rp4,004,000,000,000 (full amount) consisting of 4,004,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital issued and fully paid consists of 1,001,000 (full amount) shares consisting of Rp1,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT BNI Life Insurance and Rp1,000,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of assets, liabilities, and temporary syirkah funds which were derived from UUS BNI. There is no difference between the book value and fair value of assets, liabillites and temporary syirkah funds which were transferred by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BNI Syariah pada tanggal 29 September 2014 sesuai dengan akta No. 53 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-06781.40.21 tahun 2014. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life menambah setoran modal saham masing-masing sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp500.000.000 (nilai penuh) secara tunai dengan mengeluarkan saham dalam simpanan sejumlah 500.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

32. CAPITAL STOCK (continued)

Based on Decision from Shareholders in replacement of Extraordinary Shareholder General Meeting of PT BNI Syariah dated September 29, 2014 in accordance with notarial deed No. 53 of Notary Fathiah Helmi, S.H. in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-06781.40.21 in 2014. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT BNI Life have additional paid in capital amounted to Rp500,000,000,000 (full amount) and Rp500,000,000 (full amount), respectively, in cash by issuing share in deposits amounted to 500,500 shares with nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share.

The composition of the Bank's shareholders as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 December 2016 dan 2015/ *December 31, 2016 and 2015*			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid stock***	**Persentase pemilikan/ *Ownership percentage***	**Jumlah modal/ *Amount of capital***	***Shareholders***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.500.000	99,9%	1.500.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT BNI Life Insurance	1.500	0,1%	1.500	*PT BNI Life Insurance*
	1.501.500	**100%**	**1.501.500**	

33. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 27 tanggal 23 Februari 2015 dari Notaris Fathiah Helmi, SH. pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp30.000 sebagai dana cadangan wajib Bank.

33. GENERAL AND LEGAL RESERVES

The general and legal reserves are originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseeded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 27 dated February 23, 2015 of Notary Fathiah Helmi, SH. the shareholders agreed to appropriate Rp30,000 into the Bank's statutory reserve.

33. CADANGAN UMUM DAN WAJIB (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 28 tanggal 25 Februari 2016 dari Notaris Fathiah Helmi, SH. pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp22.853 sebagai dana cadangan wajib Bank.

33. GENERAL AND LEGAL RESERVES (continued)

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 28 dated February 25, 2015 of Notary Fathiah Helmi, SH. the shareholders agreed to appropriate Rp22,853 into the Bank's statutory reserve.

34. PENDAPATAN DARI JUAL BELI / *34. INCOME FROM SALES AND PURCHASES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Pendapatan *murabahah*	1.891.261	1.753.944	*Income from murabahah*

35. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL / *35. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	266.771	169.090	*Musyarakah profit sharing income*
Pendapatan bagi hasil *mudharabah*	151.780	139.302	*Mudharabah profit sharing income*
	418.551	**308.392**	

36. PENDAPATAN DARI *IJARAH* - BERSIH / *36. INCOME FROM IJARAH - NET*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik*	36.047	74.504	*Income from ijarah muntahiyah bittamlik*
Pendapatan *ijarah* multijasa	64.240	63.900	*Income from ijarah multi-services*
Beban penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah (Catatan 14)	(36.048)	(72.227)	*Depreciation expense of assets acquired for ijarah (Note 14)*
	64.239	**66.177**	

37. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *37. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga	246.339	131.506	*Profit sharing income from investments in marketable securities*
Pendapatan operasional *hasanah card*	83.996	80.127	*Operational income from hasanah card*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	63.261	76.277	*Profit sharing income from placements with other banks*
Pendapatan kas bagi hasil *fee ujroh* anjak utang piutang	23.669	10.041	*Profit sharing income from factoring of ujroh cash fee*
Pendapatan *fee rahn*	1.541	2.779	*Income fee from rahn*
Pendapatan lain-lain	8.718	-	*Other income*
	427.524	**300.730**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga	214.545	177.277	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 48)	212.979	123.453	*Related parties (Note 48)*
	427.524	**300.730**	

38. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH* TEMPORER / *38. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Deposito *mudharabah*	718.812	684.281	*Mudharabah time deposits*
Tabungan *mudharabah*	135.713	130.399	*Mudharabah savings deposits*
Sukuk *mudharabah*	45.387	27.366	*Mudharabah sukuk issued*
Giro *mudharabah*	3.983	3.207	*Mudharabah demand deposits*
Giro *mudharabah* bank	95	48	*Demand deposits mudharabah bank*
Lain-lain	1.042	768	*Others*
	905.032	**846.069**	

39. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *39. OTHER OPERATING INCOME*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Jasa administrasi layanan bank	68.139	63.711	*Bank service administration fees*
Jasa administrasi pembiayaan	18.899	26.311	*Financing administration fees*
Laba selisih kurs - neto	7.499	23.749	*Foreign exchange - net*
Pendapatan administrasi lain-lain	7.181	5.043	*Other administration income*
	101.718	**118.814**	

40. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *40. SALARIES AND BENEFITS*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Tunjangan karyawan	396.809	350.760	*Employee allowances*
Gaji dan upah	324.565	293.287	*Salaries and wages*
Pendidikan dan pelatihan	29.536	25.538	*Education and training*
	750.910	**669.585**	

41. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *41. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Sewa	109.529	106.355	*Rent*
Outsourcing	91.984	80.711	*Outsourcing*
Promosi	79.459	76.357	*Promotion*
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	35.266	35.480	*Depreciation of fixed assets (Note 15)*
Pemeliharaan dan perbaikan	21.696	19.408	*Service and maintenance*
Listrik, air dan gas	18.881	19.918	*Electricity, water and gas*
Komunikasi	12.146	12.940	*Communication*
Perjalanan dinas	11.821	10.880	*Business travel*
Keperluan kantor	11.423	10.146	*Office supplies*
Transportasi	7.743	8.010	*Transportation*
Asuransi	3.970	3.966	*Insurance*
Honorarium tenaga ahli	515	734	*Expert fees*
Lain-lain	15.260	12.134	*Others*
	419.693	**397.039**	

Lain-lain terdiri dari biaya pekerjaan dan pelayanan kantor dan beban operasional.

Others consists of operating expenses, office services and operational expenses.

42. CADANGAN/(PEMBALIKAN) KERUGIAN ASET PRODUKTIF / *42. PROVISION/(REVERSAL) OF ALLOWANCE FOR POSSIBLE LOSSES ON EARNING ASSETS*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Giro pada bank lain (Catatan 6)	858	(680)	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Penempatan pada bank lain	500	(2.060)	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	1.804	966	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Piutang *murabahah* (Catatan 9)	150.801	111.494	*Murabahah receivables (Note 9)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)	43.447	34.133	*Funds of qardh (Note 10)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)	45.045	19.618	*Mudharabah financing (Note 11)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)	82.711	52.724	*Musyarakah financing (Note 12)*
Tagihan akseptasi (Catatan 13)	49	-	*Acceptances receivable (Note 13)*
Piutang pendapatan *Ijarah* (Catatan 17)	1.396	1.085	*Ijarah income receivables (Note 17)*
Estimasi kerugian komitmen dan Kontinjensi (Catatan 25)	(2.374)	3.973	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 25)*
	324.237	**221.253**	

43. PENDAPATAN/(BEBAN)NON-OPERASIONAL - NETO / *43. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Pendapatan non-operasional	26.623	33.910	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(11.758)	(6.040)	*Non-operating expenses*
Beban zakat	(9.329)	(7.701)	*Zakat expenses*
	5.536	**20.169**	

44. IMBALAN KERJA / *44. EMPLOYEE BENEFITS*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Imbalan kerja jangka pendek	163.195	163.776	*Short-term employee benefits*
Imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	85.143	74.500	*Pension benefits and other post-employment benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	70.267	43.734	*Other long-term benefits*
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan	**318.605**	**282.010**	***Liability recognised in the statement of financial position***

Imbalan kerja jangka pendek / ***Short-term employee benefits***

Bonus, tantiem dan insentif yang masih harus dibayar	163.195	163.776	*Accrued bonus, tantiem and incentive*

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit as of December 31, 2016 is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	*Total*	
Pensiun	3.841	38.300	360.003	402.144	*Pension*
Cuti besar	15.000	39.067	229.440	283.507	*Long leave*
Penghargaan masa kerja	1.240	7.687	154.296	163.223	*Gratuity*
	20.081	**85.054**	**743.739**	**848.874**	

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

Pension benefits and other post-employment benefits

Program pensiun manfaat pasti

Defined benefit pension plan

Penilaian aktuarial atas manfaat pensiun pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Towers Watson Purbajaga dan PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria) dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017 dan 18 Januari 2016.

The actuarial valuation of pension benefits for the year ended December 31, 2016 and 2015, was performed by registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga and PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), respectively, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated January 19, 2017 and January 18, 2016, respectively.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used underlying assumptions as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Tingkat diskonto per tahun	7,75%	8,75%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,50%	6,00%	*Annual salary increasing rate*
Tabel mortalita	Tabel Mortalita/ *Mortablity Table* Indonesia 2011 (TMI 2011)	Tabel Mortalita/ *Mortablity Table* Indonesia 2011 (TMI 2011)	*Mortality table*
Usia pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*

a. Liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja terdiri dari:

a. *Estimated employee benefits consists of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Nilai kini liabilitas manfaat	85.143	74.500	*Current employee benefits obligation*
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	**85.143**	**74.500**	***Liabilities recognised in statement of financial position***

44. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

b. Perubahan imbalan kerja yang diakui adalah sebagai berikut: / *b. The movement of employee benefits are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Liabilitas neto pada awal tahun	74.500	48.993	*Net liability at beginning of the year*
Beban bersih yang diakui dalam laporan laba rugi	21.886	18.371	*Net expense recognised in profit or loss*
(Laba)/beban bersih yang diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya	(6.255)	8.940	*Net (income)/expense recognised in other comprehensive income*
Pembayaran imbalan	(4.988)	(1.804)	*Actual benefit payment*
Liabilitas bersih yang diakui pada akhir tahun	**85.143**	**74.500**	***Net liability recognised at end of the year***

c. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi: / *c. Employee benefit expenses recognised in profit or loss:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Biaya jasa kini	15.542	15.912	*Current service cost*
Biaya bunga	6.344	4.398	*Interest cost*
Biaya jasa masa lalu	-	(1.424)	*Past service cost*
Penyesuaian liabilitas imbalan kerja karena PSAK 24 (Revisi 2013) pada laporan laba rugi di tahun berjalan	-	(515)	*Adjustment on employee benefit liability due to PSAK 24 (Revised 2013) in current year profit/loss*
Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi	**21.886**	**18.371**	***Net expense recognised in profit or loss***

d. Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *d. The movement in the present value of funded defined benefit obligations of the years are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pada awal tahun	74.500	54.981	*At beginning of the year*
Biaya jasa kini	15.542	15.912	*Current service cost*
Biaya bunga	6.344	4.398	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	-	(1.424)	*Past service cost*
	96.386	73.867	

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. The movement in the present value of funded defined benefit obligations of the years are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi kerja	(6.255)	2.437	*Actuarial losses from changes in experience assumption*
Pembayaran imbalan	(4.988)	(1.804)	*Actual benefit payment*
Pada akhir tahun	**85.143**	**74.500**	***At end of the year***

e. Mutasi (kerugian)/keuntungan aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

e. Movement in the balance of actuarial (loss)/ gain charged to other comprehensive income of the years are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pada awal tahun	(8.940)	-	*At beginning of the year*
Keuntungan/(kerugian) aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	6.255	(8.940)	*Actuarial (gain)/loss charged to other comprehensive income*
Pada akhir tahun	**(2.685)**	**(8.940)**	***At end of the year***

Semenjak *spin-off* dari Bank BNI, program pensiun karyawan BNI Syariah dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). Sebelumnya program pensiun karyawan dibedakan menjadi dua kriteria. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, program pensiun dikelola langsung oleh DPLK BNI dengan kontribusi iuran sebesar 11,50% dari gaji atas beban Bank dan 3,50% atas beban karyawan.

Since the spin-off from Bank BNI, BNI Syariah employee pension program is administered by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). Previously, pension plans are divided into two criteria. For permanent employees who were hired starting on September 1, 2005, the pension program is managed directly by DPLK BNI with contribution of 11.50% of salary represents the cost of the Bank and 3.50% borne by the employees.

Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005, program pensiun dikelola dengan dua cara, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti melalui Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan benefit tambahan program pensiun melalui DPLK BNI. Pada saat *spin-off*, program pensiun yang dikelola Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dialihkan ke DPLK BNI dan benefit tambahan program pensiun dihentikan. Besarnya iuran program pensiun selanjutnya disesuaikan dengan karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005 yaitu 11,50% atas beban Bank dan 3,50% atas beban karyawan.

For employees hired before September 1, 2005, pension plans are managed in two ways, through the Defined Benefit Pension Fund conducted by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dana Pensiun and additional pension benefits through DPLK BNI. At the time of the spin-off, pension funds which is managed by Dana Pensiun PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk were transferred to the DPLK BNI and the additional pension benefits were terminated. The amount of pension contributions was further adjusted for the permanent employees who work from September 1, 2005 at 11.50% representing the cost of the Bank and 3.50% borne by the employees.

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laba rugi adalah sebesar Rp19.023 dan Rp17.316 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp19,023 and Rp17,316 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

Penilaian aktuarial atas imbalan jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Towers Watson Purbajaga dan PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria) dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017 dan 18 Januari 2016.

The actuarial valuation of other long-term benefits for the year ended December 31, 2016 and 2015, was performed by registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga and PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), respectively, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated January 19, 2017 and January 18, 2016, respectively.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used underlying assumptions as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Tingkat diskonto per tahun	7,75%	8,75%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,50%	6,00%	*Annual salary increasing rate*
Tabel mortalita	Tabel Mortalita/ *Mortability Table* Indonesia 2011 (TMI 2011)	Tabel Mortalita/ *Mortablity Table* Indonesia 2011 (TMI 2011)	*Mortality table*
Usia pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*

a. Perubahan liabilitas yang diakui adalah sebagai berikut:

a. The movement of liability recognized are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Liabilitas neto pada awal tahun	43.734	36.438	*Net liability at beginning of the year*
Beban bersih yang diakui dalam laporan laba rugi	33.925	11.918	*Net expense recognised in profit or loss*
Pembayaran imbalan	(7.392)	(4.622)	*Actual benefit payment*
Liabilitas bersih yang diakui pada akhir tahun	**70.267**	**43.734**	***Net liability recognised at end of the year***

b. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi:

b. Employee benefit expenses recognised in profit or loss:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Biaya jasa kini	10.978	10.315	*Current service cost*
Biaya bunga	3.467	2.915	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria bersih yang diakui pada tahun berjalan	19.480	(1.156)	*Net actuarial loss/(gain) recognised in the current year*
Biaya jasa masa lalu	-	(156)	*Past service cost*
Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi	**33.925**	**11.918**	***Net expense recognised in profit or loss***

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sensivitas dari kewajiban imbalan pasti per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 terhadap perubahan asumsi aktuaria sebagai berikut:

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The sensitivity of defined benefit obligation as of December 31, 2016 and 2015 to changes in the actuarial assumption are as follows:

		31 Desember/*December 31, 2016* **Program iuran pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/*Defined contribution pension plan and other-long term employee benefit***		
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumption*	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation***	**Biaya jasa kini/ *Current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	146.463	25.037	*Discount rate*
	Penurunan/*derease* 1%	165.352	28.167	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	170.506	29.050	*Salary increase rate*
	Penurunan/*derease*1%	142.024	24.271	

		31 Desember/*December 31, 2015* **Program iuran pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/*Defined contribution pension plan and other-long term employee benefit***		
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumption*	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation***	**Biaya jasa kini/ *Current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	110.458	24.973	*Discount rate*
	Penurunan/*derease* 1%	127.105	27.649	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	127.456	27.742	*Salary increase rate*
	Penurunan/*derease*1%	110.048	24.271	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Bank memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. The Bank has receivables and liabilities on commitments and contingencies as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	966.621	1.035.823	*Unused financing facilities*
Pihak terkait			*Related parties*
Irrevocable L/C yang masih berjalan	2.037	-	*Existing Irrevocable L/C*
Kewajiban komitmen	**968.658**	**1.035.823**	***Commitment liabilities***
Pendapatan dari *non-performing receivables/financing*	70.579	49.665	*Income from non-performing receivables/financing*
Garansi (*kafalah*) bank yang diterima	5.227	3.767	*Bank guarantees (kafalah) received*
Lainnya	8.636	5.952	*Others*
Tagihan kontinjensi	**84.442**	**59.384**	***Contingencies receivables***

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			*Guarantees issued in the form of:*
Pihak ketiga			*Third parties*
Standby letters of credit	41.792	744	*Standby letters of credit*
Performance bonds	22.181	61.605	*Performance bonds*
Bid bonds	3.661	18.042	*Bid bonds*
Advance payment bonds	200	2.210	*Advance payment bonds*
Garansi bank lainnya	4.691	2.126	*Other bank guarantees*
	72.525	84.727	
Pihak terkait			*Related parties*
Performance bonds	-	32	*Performance bonds*
	-	32	
Kewajiban kontinjensi	**72.525**	**84.759**	***Contingencies liabilities***

b. Kewajiban kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

b. Contingent liabilities that have credit risk by collectibility were as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Lancar	46.912	58.062	*Current*
Dalam perhatian khusus	25.613	643	*Special Mention*
Kurang lancar	-	26.054	*Substandard*
	72.525	84.759	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(2.225)	(4.520)	*Estimated losses on commitment and contingencies*
	70.300	**80.239**	

46. LABA PER SAHAM DASAR / *46. BASIC EARNINGS PER SHARE*

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares of outstanding common stock during the related year.

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Laba tahun berjalan	277.375	228.525	*Income for the year*
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	1.501.500	1.501.500	*Weighted average number of ordinary shares outstanding*
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	**184.732**	**152.198**	***Basic earnings per share (in full Rupiah amount)***

47. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan No. 189/KMK.06/2004 tanggal 8 April 2004, Pemerintah menjamin kewajiban tertentu dari Bank berdasarkan program penjaminan yang berlaku bagi bank umum. Jaminan Pemerintah ini berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2005.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tahun 2010 tanggal 25 November 2010 tentang "Program Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

47. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Minister of Finance Decision No. 179/KMK.017/2000 dated May 26, 2000, as amended by Minister of Finance Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 and No. 189/KMK.06/2004 dated April 8, 2004, the Government guarantees certain liabilities from the Bank based on the prevailing guarantee program that is valid for commercial banks. This Government Guarantee is valid until September 21, 2005.

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective as of September 22, 2005, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated October 13, 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee certain liabilities from commercial banks based on the prevailing guarantee program, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on the Indonesia Deposit Insurance Institution (LPS) Regulation No. 2/LPS/2010 year 2010, dated November 25, 2010, regarding "The Saving Guaranteed Program", as of December 31, 2016 and 2015, the amount of savings guaranteed by LPS are up to Rp2,000,000,000 (full amount) for each customer for each bank.

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank is a participant of the guarant program.

48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan.

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaannya, dewan komisaris, direksi dan karyawan kunci berdasarkan PSAK No.7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan Bapepam LK.VIII.G7 (Revisi 2012).

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationships*
Manajemen Kunci/*Key Management*	Karyawan yang terdiri dari Direksi, Pejabat Eksekutif dan Komisaris/*Employees consist of Board of Directors, Executive Officers and Board of Commissioners*
Pemerintah Republik Indonesia/*The Government of the Republic of Indonesia*	Pemegang saham pengendali utama/*Ultimate Controlling shareholder*

48. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, BNI Syariah enters into certain transactions with parties which are related because of ownership and/or management.

Related parties consist of State-Owned Enterprises and their Subsidiaries, Commissioners, Directors, and management or key employees of the Bank based on SFAS No. 7 (Revised 2010) "Related Party Disclosures" and Bapepam LK.VIII.G7 (Revised 2012).

a. Type of relationships and related parties transactions

48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi (lanjutan)

48. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Type of relationships and related parties transactions (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationships*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Induk Perusahaan/*Immediate Parent*
Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP BNI)	Sesama anak perusahaan induk/*Subsidiary Under The Same Parent Company*
BNI Aset Management	Sesama anak perusahaan induk/*Subsidiary Under The Same Parent Company*
BNI Life Insurance	Sesama anak perusahaan induk/*Subsidiary Under The Same Parent Company*
PT DPLK BNI	Sesama anak perusahaan induk/*Subsidiary Under The Same Parent Company*
PT Jamsostek	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jasa Raharhja (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Asuransi Jasa Indonesia	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Asuransi Jiwa Bumiputera	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pegadaian (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Garuda Indonesia Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Istaka Karya	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Waskita Karya	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Bank BRI Syariah	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Danareksa	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Penjamin Infrastruktur Indonesia	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Bank Syariah Mandiri	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Asuransi Tripakarta	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Angkasa Pura	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
Perusahaan Umum Produksi Film Negara	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*

48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *48. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi / *b. Related party transaction*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts with other banks (Note 6)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	174.820	90.650	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	174.820	**90.650**	
Investasi pada Surat Berharga (Catatan 7)			*Investment in marketable securities (Note 7)*
Pemerintah Republik Indonesia	3.489.424	2.043.125	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Syariah Mandiri	50.000	55.452	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank BRI Syariah	46.000	-	*PT Bank BRI Syariah*
PT Angkasa Pura	34.794	-	*PT Angkasa Pura*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	14.000	14.000	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
	3.634.218	**2.112.577**	
Piutang *murabahah* (Catatan 9)			*Murabahah receivables (Note 9)*
Manajemen kunci	30.233	26.013	*Key management*
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	9.283	-	*Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia*
PT Elnusa Petrofin	-	6.035	*PT Elnusa Petrofin*
	39.516	**32.048**	
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)			*Funds of qardh (Note 10)*
PT Waskita Karya	277.055	-	*PT Waskita Karya*
Manajemen kunci	11.391	11.703	*Key management*
	288.446	**11.703**	
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)			*Financing musyarakah (Note 12)*
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	2.715	-	*Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia*
PT Krakatau Daya Listrik	-	93.089	*PT Krakatau Daya Listrik*
	2.715	**93.089**	
Tagihan akseptasi (Catatan 13)			*Aceptances receivable (Catatan 13)*
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	4.855	-	*Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia*
	4.855	**-**	
Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* - neto (Catatan 14)			*Asset acquired for Ijarah - net (Note 14)*
Manajemen kunci	177	173	*Key management*
	177	**173**	
Aset lain - lain (Catatan 17)			*Other Assets (Note 17)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	45.787	44.576	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	45.787	**44.576**	
Total aset dari pihak-pihak berelasi	**4.190.534**	**2.384.816**	***Total assets from related parties***
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset	**14,80%**	**10,36%**	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *48. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / *b. Related party transaction (continued)*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Liabilitas			***Liabilities***
Giro *wadiah* (Catatan 20)			*Wadiah demand deposits (Note 20)*
PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk	41.085	44.525	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	1.013	-	*Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia*
PT BNI Life Insurance	814	622	*PT BNI Life Insurance*
PT Askrindo Syariah	596	-	*PT Askrindo Syariah*
PT Asuransi Jiwa Bumiputera	477	-	*PT Asuransi Jiwa Bumiputera*
Pemerintah Republik Indonesia	409	-	*The Government of Republic Indonesia*
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko	220	-	*PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko*
PT Asuransi Jasindo Syariah	151	-	*PT Asuransi Jasindo Syariah*
PT Jaskrindo	106	-	*PT Jaskrindo*
Manajemen kunci	93	93	*Key management*
Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI (YKP BNI)	25	-	*Yayasan Kesehteraan Pegawai BNI (YKP BNI)*
PT PLN (Persero)	15	-	*PT PLN (Persero)*
PT Asuransi Jasa Indonesia	9	238	*PT Asuransi Jasa Indonesia*
PT Asuransi Tripakarta	8	-	*PT Asuransi Tripakarta*
PT Jasa Raharja (Persero)	2	-	*PT Jasa Raharja (Persero)*
PT DPLK BNI	1	-	*PT DPLK BNI*
PT Waskita Karya	1	-	*PT Waskita Karya*
PT Elnusa Petrofin	-	1.997	*PT Elnusa Petrofin*
	45.025	**47.475**	
Tabungan wadiah (Catatan 21)			*Wadiah savings deposits (Note 21)*
Manajemen kunci	1.390	530	*Key management*
Pemerintah Republik Indonesia	1	-	*The Government of Republic Indonesia*
	1.391	**530**	
Simpanan dari bank lain (Catatan 22)			*Deposits from other banks (Note 22)*
PT Bank Syariah Mandiri Indonesia	-	19.286	*PT Bank Syariah Mandiri Indonesia*
	-	**19.286**	
Kewajiban akseptasi (Catatan 23)			*Acceptances payable (Note 23)*
Pemerintah Republik Indonesia	4.855	-	*The Government of Republic Indonesia*
	4.855	-	
Liabilitas lain-lain (Catatan 27)			*Other Liabilities (Note 27)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	41.317	37.790	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	41.317	**37.790**	
Total liabilitas dari pihak-pihak berelasi	**92.588**	**105.081**	***Total liabilities from related parties***
Persentase total liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap Total liabilitas	**1,98%**	**3,17%**	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

48. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Related party transaction (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Dana Syirkah Temporer			***Temporary Syirkah Funds***
Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan (Catatan 28)			*Mudharabah sukuk issued (Note 28)*
PT Bank Syariah Mandiri	100.000	100.000	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT DPLK BNI	45.000	-	*PT DPLK BNI*
PT Danareksa	25.000	-	*PT Danareksa*
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	20.000	-	*PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia*
PT Asuransi Jasa Indonesia	10.000	-	*PT Asuransi jasa Indonesia*
PT Asuransi Jiwa Bumiputera	8.000	-	*PT Asuransi Jiwa Bumiputera*
Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI (YKP BNI)	8.000	-	*Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI (YKP BNI)*
PT BNI Life Insurance	4.000	4.000	*PT BNI Life Insurance*
BNI Aset Management	1.000	-	*BNI Aset Management*
PT Asuransi Tripakarta	1.000	-	*PT Asuransi Tripakarta*
PT Bank BRI Syariah	-	51.000	*PT Bank BRI Syariah*
	222.000	**155.000**	
Giro *mudharabah* (Catatan 29)			*Mudharabah demand deposits (Note 29)*
Pemerintah Republik Indonesia	126.634	-	*The Government of Republic Indonesia*
PT BNI Life Insurance	9.327	5.345	*PT BNI Life Insurance*
PT Asuransi Jiwa Bumiputera	7.710	-	*PT Asuransi Jiwa Bumiputera*
PT Pertamina (Persero)	5.913	-	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pegadaian (Persero)	752	-	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	90	61 -	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Waskita Karya	15	-	*PT Waskita Karya*
PT Asuransi Tripakarta	2	-	*PT Asuransi Tripakarta*
PT Krakatau Daya Listrik	-	1.066	*PT Krakatau Daya Listrik*
	150.443	**6.472**	
Tabungan *mudharabah* (Catatan 30)			*Mudharabah savings deposits (Note 30)*
Manajemen kunci	13.830	8.234	*Key management*
PT Jamsostek	12	-	*PT Jamsostek*
PT Asuransi Jiwa Bumiputera	7	-	*PT Asuransi Jiwa Bumiputera*
Komisaris	-	544	*Commissioners*
	13.849	**8.778**	
Deposito *mudharabah* (Catatan 31)			*Mudharabah time deposits (Note 31)*
Pemerintah Republik Indonesia	7.050.485	-	*The Government of Republic Indonesia*
PT Pertamina (Persero)	400.000	-	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bumi Putera	54.002	-	*PT Bumi Putera*
PT BNI Life Insurance	52.769	52.769	*PT BNI Life Insurance*
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	12.000	-	*PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung*
Manajemen kunci	10.103	3.859	*Key management*
PT DPLK BNI	6.000	-	*PT DPLK BNI*
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko	4.000	-	*PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko*
PT Asuransi Tripakarta	2.000	-	*PT Asuransi Tripakarta*
PT Pertamina Gas	-	179.205	*PT Pertamina Gas*
PT Pelabuhan Indonesia II	-	137.850	*PT Pelabuhan Indonesia II*
PT Elnusa Petrofin	-	10.000	*PT Elnusa Petrofin*
PT Asuransi Jasa Indonesia	-	2.525	*PT Asuransi Jasa Indonesia*
Komisaris	-	700	*Commissioners*
	7.591.359	**386.908**	
Total dana *syirkah* temporer dari pihak-pihak berelasi	**7.977.651**	**557.158**	***Total temporary syirkah funds from related parties***

48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

48. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Related party transaction (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Persentase total dana *syirkah* temporer dari pihak-pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer	**37,73%**	**3,19%**	***Percentage of total related parties temporary syirkah funds to total temporary syirkah funds***
Pendapatan usaha utama lainnya (Catatan 37)			***Other main operating income (Note 37)***
Pemerintah Republik Indonesia	207.834	117.423	*The Government of Republic of Indonesia*
PT Bank Syariah Mandiri	3.426	-	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.655	1.783	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Angkasa Pura	64	4.247	*PT Bank Syariah Mandiri*
Total pendapatan usaha utama lainnya	**212.979**	**123.453**	***Total other main operating income***
Persentase total pendapatan usaha utama lainnya dari pihak-pihak berelasi terhadap total pendapatan usaha utama lainnya	**49,82%**	**41,05%**	***Percentage of total related parties other main operating income to total other main operating income***
Beban operasional			***Operating expenses***
Lain-lain			*Others*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.210	23.210	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Persentase total beban penggunaan fasilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total beban lain-lain	**17,10%**	**18,43%**	***Percentage of total expense from utilization of facilities to related parties to total other expense***
Beban gaji dan tunjangan			***Salaries and benefits expense***
Dewan Komisaris			*The Board of Commissioners*
Gaji	1.164	1.231	*Salaries*
Tunjangan	432	641	*Allowances*
	1.596	**1.872**	
Direksi			*The Board of Directors*
Gaji	3.061	4.704	*Salaries*
Tunjangan	2.738	1.839	*Allowances*
	5.799	**6.543**	
Komite Audit			*Audit Committee*
Gaji	1.188	527	*Salaries*
Tunjangan	220	113	*Allowances*
	1.408	**640**	
Dewan Pengawas Syariah			*Sharia Supervisory Board*
Gaji	505	425	*Salaries*
Tunjangan	135	149	*Allowances*
	640	**574**	

48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

48. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Related party transaction (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban gaji dan tunjangan (lanjutan)			***Salaries and benefits expense (continued)***
Pejabat Eksekutif			*Executive Officers*
Gaji	25.002	18.806	*Salaries*
Tunjangan	10.944	4.329	*Allowances*
Manfaat pensiun	4.327	8.419	*Pension plans*
Lainnya	2.576	2.383	*Others*
	42.849	**33.937**	
Jumlah beban gaji dan tunjangan dari pihak-pihak berelasi	**52.292**	**43.566**	***Total salaries and benefits expanses expanses from related party***
Presentase total beban gaji dan tunjangan dari pihak-pihak berelasi	**6,96%**	**6,51%**	***Percentage of total salaries and benefits ecpanses from related party***

Bonus dan tantiem yang dibayarkan kepada manajemen kunci adalah sebesar Rp18.565 dan Rp20.568 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Bonus and tantiem that was paid to key management amounted to Rp18,565 and Rp20,568 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Kewajiban komitmen			***Commitment liability***
Standby letters of credit			*Standby letters of credit*
Perum Percetakan Negara	2.037	-	*The Government of Repucblic Indonesia*
Persentase kewajiban kontinjensi kepada pihak-pihak berelasi	**0,21%**	**-**	***Percentage of contingent liabilities to related parties to total contingencies***
Kewajiban kontinjensi			***Contingent liability***
Garansi bank			*Bank Guarantee*
PT BNI Life Insurance	-	32	*PT BNI Life Insurance*
Persentase kewajiban kontinjensi kepada pihak-pihak berelasi	**-**	**0,00%**	***Percentage of contingent liabilities to related parties to total contingencies***

Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif dari Bank.

Key management compensation

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Bank, directly or indirectly, are the Board of Directors, the Board of Commissioners, Audit Committee, Sharia Supervisory Board and Executive Officers of the Bank.

49. INFORMASI SEGMEN

Segmen operasi BNI Syariah dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, sebagai berikut: Komersial, Konsumer dan Ritel, Mikro, Tresuri dan Kantor Pusat. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas dan pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Transaksi antar segmen usaha diperlakukan seperti transaksi pihak ketiga yang dicatat ke dalam masing-masing segmen dan dieliminasi di tingkat Bank.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- **Komersial**: termasuk pembiayaan yang diberikan dan transaksi-transaksi perbankan lainnya atas nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala menengah/komersial.

- **Konsumer dan Ritel**: termasuk pembiayaan konsumsi antara lain pembiayaan kepemilikan rumah, kartu pembiayaan, serta termasuk pembiayaan yang diberikan kepada individu dengan skala usaha kecil dan menengah dan produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

- **Mikro**: termasuk pembiayaan konsumtif dan produktif kepada nasabah dengan skala mikro, termasuk pula produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

- **Tresuri dan Internasional**: terkait dengan kegiatan tresuri Bank termasuk transaksi valuta asing, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) dan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA), serta aktif dalam melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder termasuk antara lain bisnis perbankan internasional.

- **Kantor Pusat:** merupakan penyediaan jasa secara sentralisasi kepada segmen lainnya.

49. SEGMENT INFORMATION

BNI Syariah's operating segments represent the key customer and product groups, as follows: Commercial, Consumer and Retail, Micro, Treasury and Head Office. In determining the segment results, certain assets and liabilities items and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies. Transactions between business segments are recorded within the segment as if they are third party transactions and are eliminated at the Bank level.

The following summary describes the operations in each of the Bank's reportable segments:

- ***Commercial**: includes financing and other banking transactions with customer who have middle/commercial size of business.*

- ***Consumer and Retail**: includes consumer financing such as housing financing, cards, also financing given to individual small and medium business, deposits and other banking transaction with customers.*

- ***Micro**: includes consumer and productive financing to micro-sized customers, including deposits and other banking services.*

- ***Treasury and International**: related to treasury activities include foreign exchange, Sharia Interbank Money Market (PUAS) with Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) and do the transaction through Interbank Sharia based Commodity Trading Certificate (SIKA), also sukuk transaction through auctions done by government (as an auction participant sharia bank) including secondary market such as international banking.*

- ***Head Office:** represent centralized services for other segments.*

49. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari BNI Syariah disajikan dalam tabel di bawah ini:

49. SEGMENT INFORMATION (continued)

Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Bank's Management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

Information concerning the operating segments of BNI Syariah are set out in the table below:

	31 Desember/*December 31, 2016*						
	Komersial/ *Commercial*	**Konsumer dan Ritel/ *Consumer and Retail***	**Mikro/ *Micro***	**Tresuri dan Internasional/ *Treasury and International***	**Kantor Pusat/ *Head Office***	***Total***	
Pendapatan marjin neto	296.370	1.072.097	256.055	272.021	-	1.896.543	*Income from margin - net*
Pendapatan operasional lainnya	421	83.708	3.347	6.420	7.822	101.718	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian asset produktif	(250.069)	(62.855)	(7.868)	(3.163)	(282)	(324.237)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional	(8.502)	(505.472)	(174.742)	(10.773)	(606.874)	(1.306.363)	*Operating expense*
Laba operasional	38.220	587.478	76.792	264.505	(599.334)	367.661	*Operating income*
Pendapatan/(beban) non-operasional neto	(8)	(3.055)	(566)	-	9.165	5.536	*Non-operating income/ (expense)-net*
Laba sebelum pajak penghasilan	38.212	584.423	76.226	264.505	(590.169)	373.197	*Income before tax*
Total aset	3.124.252	16.151.153	1.211.689	7.637.490	189.591	28.314.175	*Total assets*
Total liabilitas dan Dana *syirkah t*emporer	8.094	15.522.892	1.135.462	7.384.222	1.776.939	25.827.609	*Total liabilities and Temporary syirkah funds*

	31 Desember/*December 31, 2015*						
	Komersial/ *Commercial*	**Konsumer dan Ritel/ *Consumer and Retail***	**Mikro/ *Micro***	**Tresuri dan Internasional/ *Treasury and International***	**Kantor Pusat/ *Head Office***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan marjin neto	284.916	858.410	256.370	183.278	-	1.583.174	*Income from margin - net*
Pendapatan operasional lainnya	649	82.752	1.707	24.150	9.556	118.814	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian asset produktif	(69.664)	(116.984)	(36.186)	1.774	(193)	(221.253)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional	(7.039)	(478.158)	(126.240)	(5.199)	(576.500)	(1.193.136)	*Operating expense*
Laba operasional	208.862	346.020	95.651	204.003	(567.137)	287.599	*Operating income*
Pendapatan/(beban) non-operasional neto	(15)	(797)	(788)	(840)	22.609	20.169	*Non-operating income/ (expense)-net*
Laba sebelum pajak penghasilan	208.847	345.423	94.863	203.163	(544.528)	307.768	*Income before tax*
Total aset	2.965.146	13.839.555	1.016.950	5.010.562	185.454	23.017.667	*Total assets*
Total liabilitas dan Dana s*yirkah* temporer	10.053	13.447.422	922.085	4.807.399	1.615.050	20.802.009	*Total liabilities and Temporary syirkah funds*

50. ANALISIS JATUH TEMPO / *50. MATURITY ANALYSIS*

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The maturity of assets and liabilities as of December 31, 2016 and 2015 based on the remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/*December 31, 2016*						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	*Total*	
Aset							***Assets***
Kas	159.912	-	-	-	-	159.912	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia	3.059.796	-	-	-	-	3.059.796	*Placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	174.820	-	-	-	-	174.820	*Current accounts with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(1.748)	(1.748)	*Allowance for possible losses*
Penempatan pada bank lain	51.000	-	-	-	-	51.000	*Placements with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(500)	(500)	*Allowance for possible losses*
Investasi pada surat berharga	359.985	373.048	90.616	3.104.806	-	3.928.455	*Investments in marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(4.390)	(4.390)	*Allowance for possible losses*
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali	339.490	-	-	-	-	339.490	*Securities purchased under agreement to resell*
Piutang *murabahah*	64.277	22.416	321.340	14.822.334	-	15.230.367	*Murabahah receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(409.203)	(409.203)	*Allowance for possible losses*
Pinjaman *qardh*	64.976	133.607	374.533	356.891	-	930.007	*Funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(23.355)	(23.355)	*Allowance for possible losses*
Pembiayaan *mudharabah*	4.136	9.862	106.831	1.077.579	-	1.198.408	*Mudharabah financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(16.801)	(16.801)	*Allowance for possible losses*
Pembiayaan *musyarakah*	320.095	352.248	755.398	1.585.007	-	3.012.748	*Musyarakah financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(105.285)	(105.285)	*Allowance for possible losses*
Tagihan akseptasi	-	-	4.855	-	-	4.855	*Acceptances receivable*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(49)	(49)	*Allowance for possible losses*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	181	1.330	47.131	67.103	-	115.745	*Assets acquired for ijarah - net*
Biaya dibayar dimuka	20.316	123.003	-	-	17.986	161.305	*Prepaid expenses*
Aset tetap - neto	-	-	-	-	214.585	214.585	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	51.857	51.857	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	85.591	29.609	45.240	84.802	(3.086)	242.156	*Other assets*
Total Aset	**4.704.575**	**1.045.123**	**1.745.944**	**21.098.522**	**(279.989)**	**28.314.175**	***Total Assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	33.109	-	-	-	-	33.109	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	39.688	-	-	-	-	39.688	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan	4.079.084	-	-	-	-	4.079.084	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	31.364	-	-	-	-	31.364	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	-	-	4.855	-	-	4.855	*Acceptances payable*
Biaya yang masih harus dibayar	42.122	-	-	-	-	42.122	*Accrued expenses*
Utang pajak	-	33.584	-	-	-	33.584	*Taxes payable*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	2.225	2.225	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Liabilitas lain-lain	99.260	-	-	-	862	100.122	*Other liabilities*
Imbalan kerja	-	-	-	-	318.605	318.605	*Employee benefits*
Total Liabilitas	**4.324.627**	**33.584**	**4.855**	**-**	**321.692**	**4.684.758**	***Total Liabilities***

50. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan)

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

50. MATURITY ANALYSIS (continued)

The maturity of assets and liabilities as of December 31, 2016 and 2015 based on the remaining period to maturity are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31, 2016*						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	*Total*	
Dana *Syirkah* Temporer							***Temporary Syirkah Funds***
Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan	-	-	-	500.000	-	500.000	*Mudharabah sukuk issued*
Giro *mudharabah*	585.297	-	-	-	-	585.297	*Mudharabah current account*
Tabungan *mudharabah*	6.877.442	-	-	-	-	6.877.442	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	6.213.734	3.439.689	943.227	2.094.536	-	12.691.186	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah* dari bank lain	15.470	-	-	-	-	15.470	*Mudharabah current account from other bank*
Tabungan *mudharabah* dari bank lain	187.088	-	-	-	-	187.088	*Mudharabah saving deposits from other banks*
Deposito *mudharabah* dari bank lain	90.185	162.441	28.992	4.750	-	286.368	*Mudharabah time deposits from other banks*
Total Dana *Syirkah* Temporer	**13.969.216**	**3.602.130**	**972.219**	**2.599.286**	**-**	**21.142.851**	***Total Temporary Syirkah Funds***
Perbedaan Jatuh Tempo	**(13.589.268)**	**(2.590.591)**	**768.870**	**18.499.236**	**(601.681)**	**2.486.566**	***Maturity Gap***

	31 Desember/*December 31, 2015*						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	*Total*	
Aset							***Assets***
Kas	145.965	-	-	-	-	145.965	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia	2.583.736	-	-	-	-	2.583.736	*Placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	90.650	-	-	-	-	90.650	*Current accounts with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(907)	(907)	*Allowance for possible losses*
Investasi pada surat berharga	-	223.550	299.526	1.778.611	-	2.301.687	*Investments in marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(2.586)	(2.586)	*Allowance for possible losses*
Piutang *murabahah*	18.078	55.260	401.022	13.012.111	-	13.486.471	*Murabahah receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(268.171)	(268.171)	*Allowance for possible losses*
Pinjaman *qardh*	421.950	65.582	22.969	69.839	-	580.340	*Funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(21.134)	(21.134)	*Allowance for possible losses*
Pembiayaan*mudharabah*	3.628	3.556	133.972	1.138.794	-	1.279.950	*Mudharabah financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(21.268)	(21.268)	*Allowance for possible losses*
Pembiayaan *musyarakah*	100.992	276.183	473.545	1.318.084	-	2.168.804	*Musyarakah financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(68.679)	(68.679)	*Allowance for possible losses*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	37	139	15.961	231.538	-	247.675	*Assets acquired for ijarah-net*
Biaya dibayar dimuka	10.343	1.754	11.646	92.301	4.616	120.660	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	-	7.901	7.901	*Prepaid taxes*
Aset tetap - neto	-	-	-	-	159.759	159.759	*Fixed assets-net*
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	34.538	34.538	*Deferred tax assets-net*
Aset lain-lain	82.734	27.983	26.498	56.752	(1.691)	192.276	*Other assets*
Total Aset	**3.458.114**	**654.007**	**1.385.138**	**17.698.030**	**(177.622)**	**23.017.667**	***Total Assets***

50. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan)

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

50. MATURITY ANALYSIS (continued)

The maturity of assets and liabilities as of December 31, 2016 and 2015 based on the remaining period to maturity are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31, 2015*						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	*Total*	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	18.942	-	-	-	-	18.942	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	46.258	-	-	-	-	46.258	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan	2.780.736	-	-	-	-	2.780.736	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	52.999	-	-	-	-	52.999	*Deposits from other banks*
Biaya yang masih harus dibayar	30.770	10	-	-	-	30.780	*Accrued expenses*
Utang pajak	-	23.005	-	-	-	23.005	*Taxes payable*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	4.620	4.620	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Liabilitas lain-lain	48.854	8.186	6.202	6.118	1.795	71.155	*Other liabilities*
Imbalan kerja	-	-	-	-	282.010	282.010	*Employee benefits*
Total Liabilitas	**2.978.559**	**31.201**	**6.202**	**6.118**	**288.425**	**3.310.505**	***Total Liabilities***
Dana *Syirkah* Temporer							***Temporary Syirkah Funds***
Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan	-	-	-	500.000	-	500.000	*Mudharabah sukuk issued*
Giro *mudharabah*	436.296	-	-	-	-	436.296	*Mudharabah current account*
Tabungan *mudharabah*	5.700.830	-	-	-	-	5.700.830	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	4.803.670	3.168.105	728.155	1.704.964	-	10.404.894	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah* dari bank lain	11.938	-	-	-	-	11.938	*Mudharabah current account from other bank*
Tabungan *mudharabah* dari bank lain	138.660	-	-	-	-	138.660	*Mudharabah saving deposits from other banks*
Deposito *mudharabah* dari bank lain	118.535	123.641	43.514	13.196	-	298.886	*Mudharabah time deposits from other banks*
Total Dana *Syirkah* Temporer	**11.209.929**	**3.291.746**	**771.669**	**2.218.160**	**-**	**17.491.504**	***Total Temporary Syirkah Funds***
Perbedaan Jatuh Tempo	**(10.730.374)**	**(2.668.940)**	**607.267**	**15.473.752**	**(466.047)**	**2.215.658**	***Maturity Gap***

51. MANAJEMEN RISIKO

Sistem pengelolaan manajemen risiko perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu keunikan perbankan syariah adalah memiliki dua resiko yang khas yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Namun demikian, secara umum pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional masih memiliki banyak kesamaan sebagai lembaga/instansi yang bergerak di bidang keuangan.

51. RISK MANAGEMENT

Risk management system of sharia banking is unique when compared to conventional banking. However, generally they have a lot in common as institutions/agencies engaged in the financial sector.One of the unique Islamic banking are two typical risks that are not owned by the conventional banks, namely the risk of returns and investment risk.

However, in general, risk management in Islamic banking with conventional banks still have a lot in common as institutions/agencies engaged in finance.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Penerapan manajemen risiko BNI Syariah tetap mengacu dan menyelaraskan dengan regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dan regulasi lain di luar ketentuan Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selain itu,penerapan manajemen risikomengacu kepada regulasi internasional yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta dokumen-dokumen regulasi lain yang dijadikan acuan.

Penerapan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) di tahun 2016 merupakan salah satu strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Konsep ERM disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank dengan tujuan memperoleh nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan stakeholders terutama jika diarahkan untuk persiapan penerapan penilaian kinerja bank berbasis risiko (*Risk Based Bank Performance*).

Dalam penerapan ERM, pengelolaan risiko menjadi bagian yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis Bank sehari-hari. Kerangka kerja pengelolaan risiko secara sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan permodalan dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Hal tersebut sejalan dengan penerapan ERM pada induk perusahaan (BNI).

Kerangka pengelolaan risiko BNI Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha syariah dan telah dituangkandalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Sesuai dengan PBI dan POJK tersebut diatas, BNI Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko terhadap 10 risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Kebijakan pengelolaan atas resiko tersebut telah selaras dengan laporan profil risiko yang disusun oleh Bank BNI selaku induk perusahaan.

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Implementation of risk management in BNI Syariah still refer to national and international regulations as stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI), Bank Indonesia Circular Letter (SEBI), Financial Service Authority Regulation (POJK), Financial Service Autority Circular Letter (SEOJK) and other regulations beyond regulation of Bank Indonesia (BI)/Financial Service Authority (OJK) related to risk management. In addition, the application of risk management refers to international regulations derived from the documents published by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and other regulatory documents referenced.

Implementation of the concept of Enterprise Risk Management (ERM) in 2016 is one of a comprehensive and integrated risk management strategy. ERM concepts customised to the business needs and Bank operation in order to obtain value added to the Bank and stakeholders, especially if it is directed to the preparation of the implementation of Risk Based Bank Performance.

In the implementation of ERM, risk management becomes an integral part in Bank decision making processes everyday. Framework of risk management systematically and thoroughly (credit risk, market risk and operational risk by connecting capital management and business processes with entire risk. This is consistent with the implementation of the ERM to the parent company (BNI).

Framework of risk management in BNI Syariah refers to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/23/PBI/2011 dated November 2, 2011 about Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units that have been outlined in the Risk Management General Policy (KUMR).

In accordance with PBI and POJK, BNI Syariah has implemented Risk Management for 10 risks include credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk,rate of return risk and equity investment risk.

On the risk management policy has been aligned with the risk profile report prepared by Bank BNI as the holding company.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Sistem Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap aktivitas manajemen risiko BNI Syariah diimplementasikan dengan pembentukan komite-komite meliputi:

a. Komite-komite pada level Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

b. Komite-Komite pada level Direksi meliputi Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Asset and Liabilities Manajemen (KALMA) yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko bagi hasil, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Komite Modal Investasi dan Teknologi (KMIT)Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) merupakan komite yang memiliki kewenangan dan fungsi antara lain:

   - Penetapan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko diseluruh unit organisasi.
   - Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.

Dalam kegiatan operasionalnya, Direktur Risiko dan Kepatuhan membawahi Divisi Manajemen Resiko dan Kebijakan Perusahaan (ERD) yang mengelola 4 (empat) jenis risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko investasi. Sedangkan risiko lainnya dikelola oleh *risk owner* namun tetap dalam koordinasi dari Divisi ERD.

Risiko Likuiditas dan risiko imbal hasil dikelola oleh Divisi Tresuri dan internasional (TID), Risiko Hukum dikelola oleh Divisi Hukum (LGD), Risiko reputasi dikelola oleh Divisi kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan (CCD), Risiko Stratejik di kelola oleh Divisi Perencanaan Strategis (SPD) dan Risiko Kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (CMD).

Metode yang digunakan dalam pengelolaan manajemen risiko BNI Syariah yang dihubungkan dengan pengelolaan modal bank adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit
   Metode pengukuran menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach)* mengacu pada ketentuan regulator yang telah menetapkan besaran bobot pada setiap tagihan bersih. Perhitungan ATMR merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko atas eksposure.

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Monitoring system of the Board of Directors and Board of Commissioners of the BNI Syariah risk management activities are implemented with the establishment of committees comprise of:

a. Committees at the level of the Board of Commissioners included the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination and Risk Oversight Committee.

b. Committees at the level of the Board of Directors include Policy and Risk Committee (KKR), Asset and Liability Management Committee (KALMA) that performed the risk control function for the profit sharing, exchange rate risk, and liquidity risk, the Human Resources Committee (KSDM) and Capital, Investment and Technology Committee (KMIT). Risk Policy Committee (KKR) is a committee that has the authority and functions include:
   - *Establishment of policies and risk management throughout the organisation unit.*
   - *Establishment of policies and risk management to create a healthy and favorable financing portfolio quality.*

In operational activities, Risk and Compliance director in charge of the ERD Division, manages four (4) types of risk such as credit risk, market risk, operational risk, and equity risk. While other risk are managed by the risk owner but still in the coordination of the ERD Division consist.

Liquidity Risk and risk yield is managed by the Treasury Division and international (TID), Legal Risk is managed by the Legal Division (LGD), Reputation risk is managed by the Corporate Communications and Secretarial Division (CCD), the risk of Strategic managed by the Strategic and Planning (SPD), and Compliance risk by the Compliance Desk (CMD).

The method used in risk management of BNI Syariah associated with the management of the bank's capital is as follows:

a. Credit Risk
   Measurement method uses Standardized Approach refers to the provision that the regulator has set the amount of weight on each charge net. RWA calculation is the multiplication of a clean bill with the risk weight on exposures.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Metode yang digunakan dalam pengelolaan manajemen risiko BNI Syariah yang dihubungkan dengan pengelolaan modal bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Risiko Pasar
Metode perhitungan ATMR pasar menggnakan metode standar *(Standard Method)*. Metode ini digunakan untuk menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko pasar dalam perhitungan rasio kecukupan modal sesuai ketentuan regulator. Dalam hal ini, Bank hanya menghitung risiko nilai tukar.

c. Risiko Operasional
Metode yang digunakan untuk menghitung ATMR Operasional adalah metode pendekatan indikaator dasar *(Basic Indicator Approach)*. Perhitungan ATMR Operasional tersebut menggunakan perkalian antara bobot dengan beban modal risiko operansional, yang dicerminkan dengan rata-rata gross income 3 tahun terakhir.

Kecukupan kebijakan dan prosedur diwujudkan dengan tersedianya beberapa kebijakan yang berbasis manajemen risiko antara lain:

a. Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)
b. Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB)
c. Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah
d. Kebijakan Strategi *Anti Fraud* (SAF)
e. Kebijakan, *Business Continuity Management* (BCM).

Selain tersedianya beberapa kebijakan, BNI Syariah memilikipetunjuk pelaksanaandan petunjuk teknis yang berisi peraturan pelaksanaan serta prosedur operasional bank yang telah melalui proses validiasi dan sertifikasi manajemen risiko.

Penetapan kebijakan-kebijakan limit risiko dilakukan melalui Komite-Komite yang ada dan disesuaikan dengan ketersediaan permodalan yang dimiliki Bank.

Penerapan budaya risiko merupakan langkah dalam penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Diharapkan manajemen dan pegawai memiliki nilai-nilai dan persepsi yang sama terhadap risiko, sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan Bank.

51. RISK MANAGEMENT (continued)

The method used in risk management of BNI Syariah associated with the management of the bank's capital is as follows: (continued)

b. Market Risk
Market RWA calculation method using the standard method (Standard Method). This method is used to calculate Risk Weighted Assets (RWA) market risk in the calculation of capital adequacy ratio in accordance with the regulator. In this case, the Bank only the risk of exchange rate.

c. Operational Risk
The method used to calculate RWA Operational indikaator basic approach is the method (Basic Indicator Approach). Operational RWA calculation using a multiplication of the weight of the load operansional risk capital, as reflected by the average gross income last 3 years.

Adequacy of policies and procedures embodied by the availability of several policy-risk management based, include:

a. Risk Management General Policy (KUMR)
b. Bank Financing Policy (KPB)
c. Money Market Productive Assets and Capital Market Sharia Policy
d. Anti-Fraud Strategy Policy (SAF)
e. Policy, BusinessContinuity Management (BCM)

In addition to the availability of some policies, BNI Syariah Implementation Guidelines and Technical Guidelines which contains the implementing regulations and operational procedures of banks that have gone through the certification process validiasi and risk management.

Establishment of risk limit policies conducted through the committees and adapted to the availability of capital held by the Bank.

The implementation of a risk culture is a step in the effective and efficient risk management implementation. Management and employees are expected to have the same values and same perceptions of the risks, as well as a power to unite the entire human resources to achieve the stated goals of the Bank.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Tujuan pengelolaan risiko kredit selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan risiko kredit diharapkan meminimalisir kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Pengelolaan pembiayaan Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan mengelola kualitas setiap pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi *Non-Performing Financing* (NPF). Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan bersih adalah sebagai berikut:

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk is the risk of the failure of customers or other parties to meet obligations to the Bank in accordance with the treaty agreed.

The objectives of the Bank's financing risk management, other than fulfilling requirements that have been stated in Bank Indonesia/Financial Services Authority regulation, also to manage risk financingso that the possibility of losses from unpaid financing facilities and other financial contracts is at a minimum level, either individual or collective financing portfolio.

The Bank's financing management is directed for the expansion of financing and quality management of its financing since grant date until paid date to prevent the financing become Non-Performing Financing (NPF). Effective financing management can minimize losses and optimize the use of capital allocated to credit risk.

As of December 31, 2016 and 2015, ratio of Non-Performing Financing (NPF) gross and net are as follows:

	2016	2015	
NPF - Bruto	2,94%	2,53%	*NPF - Gross*
NPF - Net	1,64%	1,46%	*NPF - Net*

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat piutang dan pembiayaan yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2016 and 2015, there are no receivables and financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis yang dituangkan petunjuk pelaksanaan dan Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko (KKR). Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

The Bank has written financing policies and procedures stated in the Company Standard Operating Procedures (BPP) and Policy and Risk Committee decision (KKR). These policies provide comprehensive and detailed guidance regarding financing management activities start from financing proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, control, and restructuring. In order to support the financing process more prudent, the Bank conducts the review and improvement of financing policies periodically in accordance with current business developments.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Pengendalian risiko kredit diterapkan pada tingkat pembiayaan perorangan dan tingkat portofolio. Pada tingkat transaksi diterapkan *four-eyes principles*, yaitu setiap keputusan pemberian pembiayaan melibatkan Unit Bisnis dan Unit Risiko yang independen untuk menjamin objektivitas. Mekanisme persetujuan pembiayaan dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu melalui sirkulasi dan melalui rapat Komite Pemutus Pembiayaan. Keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pemutus pembiayaan yang terdiri dari pejabat yang berwenang dari Unit Bisnis dan Unit Risiko yang memiliki integritas, kemampuan, dan kompetensi yang sesuai. Dengan demikian, proses pemberian pembiayaan menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Pengendalian pada tingkat portfolio dilakukan melalui *Early Warning System* yang dimonitor setiap bulan. *Early Warning System* tersebut selain memonitor portofolio secara *bank wide* juga mampu memonitor proyeksi kualitas pembiayaan setiap nasabah. Proyeksi kualitas pembiayaan tersebut menjadi dasar bagi unit pengelola nasabah untuk mengambil tindakan dini untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah.

Pembiayaan yang bermasalah dikelola oleh Unit Pembiayaan Khusus agar penyelamatan/ penyelesaian dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan unit bisnisuntuk dapat fokus pada pengelolaan nasabah lancar dan melakukan ekspansi pembiayaan.

Pengembangan manajemen risiko pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola waktu yang ditetapkan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Khusus untuk pengukuran risiko pembiayaan pada saat ini dilakukan dengan metodologi *standardized approach*. Sistem pengelolaan manajemen risiko pembiayaan Bank telah dibakukan dalam suatu Petunjuk Pelaksanaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, eksposur risiko pembiayaan atas piutang *murabahah* dengan metode anuitas terbagi atas:

51. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit Risk (continued)

Credit risk control is implemented at individual and portfolio level. At the transaction level implemented four-eyes principles; any financing grant decision involving the independent Business Unit and Risk Unit to ensure objectivity. Financing approval mechanism made with two (2) models, through circulation and Financing Approval Committee meeting. The decision to grant financing is done by decision maker of financing consisting of an authorized officer of the Business Unit and Risk Unit which has the appropriate integrity, ability, and competence. Therefore, the financing prosess is more comprehensive and prudent.

Control at the portfolio level is done through the Early Warning System, monitored monthly. Besides Early Warning System monitors the portfolio in bank wide, it also capable in monitoring the financing quality projection of each customer. Financing quality projection as the basis for the customer management unit to take early action in maintaining the financing quality of the customers.

Non-performing financing issues are managed by the Special Financing Unit in order to rescue/settlement can be performed in a better way and allow the business units to focus on managing the current customers and financing expansion.

The development of financing risk management is carried out gradually in accordance with the time set by Bank Indonesia/Financial Services Authority. The measurement of risk financing specifically done based on standardized approach methodology. The management system of Bank financing risk has been formalized in the Standards Operating Procedures (BPP).

As of December 31, 2016 and 2015, financing risk exposure relating to murabahah receivables using annuity method are divided as follows:

31 Desember/*December 31, 2016*

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impared*					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not Impared*	Mengalami penurunan nilai/ *Impared *)*	Total eksposur maksimum/ *Total maximum exposure*	
	Grup 1/ *Group 1*	Grup 2/ *Group 2*	Grup 3/ *Group 3*	Grup 4/ *Group 4*	Grup 5/ *Group 5*				
Piutang *murabahah* anuitas									*Murabahah receivables-annuity*
Ritel	2.667.647	8.555.035	997.898	33.659	658.476	644.953	346.554	13.904.222	*Retail*
Non-ritel	165.162	484.903	73.445	17.934	231.853	184.942	167.906	1.326.145	*Non-retail*
	2.832.809	**9.039.938**	**1.071.343**	**51.593**	**890.329**	**829.895**	**514.460**	**15.230.367**	
Cadangan kerugian penurunan nilai								(409.203)	*Allowance for Possible losses*
								14.821.164	

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *51. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

31 Desember/*December 31, 2015*

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impared*					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not Impared*	Mengalami penurunan nilai/ *Impared *)*	Jumlah eksposur maksimum/ *Total maximum exposure*	
	Grup 1/ *Group 1*	Grup 2/ *Group 2*	Grup 3/ *Group 3*	Grup 4/ *Group 4*	Grup 5/ *Group 5*				
Piutang *murabahah* anuitas									*Murabahah receivables-annuity*
Ritel	1.908.883	7.675.022	877.534	31.190	290.413	592.155	305.211	11.680.408	*Retail*
Non-ritel	436.118	728.852	72.868	-	568.225	-	-	1.806.063	*Non-retail*
	2.345.001	**8.403.874**	**950.402**	**31.190**	**858.638**	**592.155**	**305.211**	**13.486.471**	
Cadangan kerugian penurunan nilai								(268.171)	*Allowance for Possible losses*
								13.218.300	

*) debitur dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet

*customer with substandard, doubtful and loss category *)*

Grup 1 : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
Grup 2 : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
Grup 3 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak kurang dari 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
Grup 4 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak di atas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
Grup 5 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah/telah direstrukturisasi.

Group 1 : New customers (less than 6 months).
Group 2 : Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.
Group 3 : Existing customers with history of overdue less than 90 days in the past 3 years.
Group 4 : Existing customers with history of overdue more than 90 days in the past 3 years.
Group 5 : Existing customers with loans that was/has been restructured.

Analisa umur piutang *murabahah* dengan metode anuitas yang "telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai" pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah:

Aging analysis of murabahah receivables using annuity method that are "past due but not impaired" as of December 31, 2016 and 2015 is set out as follows:

31 Desember/*December 31, 2016*

	Ritel/ *Retail*	Non-ritel/ *Non-retail*	*Total*	
1 - 30 hari	363.278	184.942	548.220	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	150.970	-	150.970	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	130.705	-	130.705	*61 - 90 days*
	644.953	**184.942**	**829.895**	

31 Desember/*December 31, 2015*

	Ritel/ *Retail*	Non-ritel/ *Non-retail*	*Total*	
1 - 30 hari	320.687	-	320.687	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	135.057	-	135.057	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	136.412	-	136.412	*61 - 90 days*
	592.156	**-**	**592.156**	

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi, SBLC dan *irrevocable* L/C, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, SBLC dan *irrevocable* L/C tersebut terjadi.

Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

a) Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain piutang dan pembiayaan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.
b) Untuk piutang dan pembiayaan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan haarga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Bank memfokuskan pengelolaan risiko pasar pada risiko pergerakan nilai tukar.

Bank terus mengembangkan kerangka kerja, metodologi dan kebijakan pengelolaan risiko pasar secara kesinambungan agar pengelolaan risiko dan kepentingan bisnis dapat berjalan selaras.

Saat ini Bank sedang mengembangkan sasaran dan target manajemen risiko pasar sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem manajeman risiko pasar yang terintegrasi dengan manajemen treasuri untuk pengelolaan risiko nilai tukar, risiko imbal hasil dan risiko pergerakan harga.

2. Untuk keperluan internal, dalam rangka monitoring risiko pasar secara harian, Bank menggunakan metode *Value at Risk* dalam mengukur risiko pasar, sedangkan untuk menilai akurasi metodologi yang digunakan, dilakukan *back testing*.

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

For financial assets recognized on the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals with their carrying amount. For bank guarantees, SBLC and irrevocable L/C, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the bank guarantees, SBLC and irrevocable L/C issued are called upon.

Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collaterals and other credit risk mitigations are as follows:

a) The carrying amount of Bank's financial assets other than receivables and financing represent the maximum exposure of credit risk.
b) For financing and receivables, Bank uses collaterals to minimize the credit risk.

Market Risk

Market risk is the risk on the balance sheet and off-balance sheet positions due to changes in market haarga, among other risks such as changes in the value of assets that can be traded or leased.

The Bank focuses in market risk management on the movement of the exchange rate risk.

The Bank continues to developframeworks, methodology and market risk management policy continuously in order that management risk and business needs are consistent.

Currently, the Bank is developing strategy of market risk management as follows:

1. Developing market risk management system that is integrated with treasury management to manage exchange rate risk, rate of return risk and price risk movement.

2. For internal purposes, in order to monitor market risk on a daily basis, the Bank uses value at risk method in measuring market risk, while uses back testing to assess the accuracy of the method used.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Saat ini Bank sedang mengembangkan sasaran dan target manajemen risiko pasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Melakukan *stress testing* risiko pasar jika terdapat gejala kondisi abnormal di global market.

4. Menetapkan limit risiko pasar melalui hasil Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), yaitu antara lain limit *Value at Risk* (VaR), limit *Capital at Risk* (CaR) dan limit eksposur tresuri.

5. Bank telah melakukan perhitungan beban risiko pasar menggunakan metode standar (*Standardized Approach*) sebagai komponen penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang disyaratkan oleh regulator.

6. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pelaporan risiko pasar.

Risiko Nilai Tukar

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015, Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) setinggi-tingginya 20% dari modal *Tier* I dan *Tier* II. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

Currently, the Bank is developing strategy of market risk management as follows: (continued)

3. Perform stress testing of market risk when there is abnormal condition in the global market.

4. Determine market risk limit through the result from Policy and Risk Committee, that is Value at Risk, Capital at Risk and treasury exposure limit.

5. The Bank has calculated the load of market risk using the standard model as a component of the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) as required by the regulator.

6. Develop and enhance the market risk reporting system.

Foreign Exchange Risk

According to Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004, last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015, the Bank is required to manage and maintain the Net Open Position (NOP) at the maximum of 20% of Tier I and Tier II capital.The Aggregate NOP is a number that represents the sum of the absolute values for the amount of net difference of assets and liabilities on the statements of financial position for each foreign currency plus the net difference between receivables and liabilities of both commitments and contingencies, in administrative account for each foreign currency.

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has complied with Bank Indonesia Regulation on Net Open Position.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

Foreign Exchange Risk (continued)

The Bank's NOP as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Mata uang	31 Desember/*December 31, 2016* Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Dolar Amerika Serikat	933.847	938.719	4.872	*United States Dollar*
Poundsterling Inggris	1.434	-	1.434	*British Poundsterling*
Euro Eropa	905	-	905	*European Euro*
Riyal Arab Saudi	785	-	785	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Australia	415	-	415	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	340	-	340	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	284	-	284	*Japanese Yen*
Dolar Kanada	198	-	198	*Canadian Dollar*
Dolar Hongkong	143	-	143	*Hongkong Dollar*
Franc Swiss	57	-	57	*Swiss Franc*
Total			9.433	*Total*
Total modal 31 Desember 2016			2.486.598	*Total Capital as of December 31, 2016*
Rasio PDN (Keseluruhan)			0,38%	*NOP Ratio (Aggregate)*

Mata uang	31 Desember/*December 31, 2015* Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Dolar Amerika Serikat	602.531	677.757	75.226	*United States Dollar*
Yen Jepang	1.741	-	1.741	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	986	2	984	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	574	-	574	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Kanada	336	-	336	*Canadian Dollar*
Franc Swiss	167	-	167	*Swiss Franc*
Euro Eropa	96	1	95	*European Euro*
Poundsterling Inggris	37	-	37	*British Poundsterling*
Dolar Hongkong	19	-	19	*Hongkong Dollar*
Dolar Australia	7	-	7	*Australian Dollar*
Total			79.186	*Total*
Total modal 31 Desember 2015			2.247.476	*Total Capital as of December 31, 2015*
Rasio PDN (Keseluruhan)			3,52%	*NOP Ratio (Aggregate)*

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, failure of internal processes, human error, system failure, and / or the presence of external events affecting the operations of the Bank.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah. Bank telah menerapkan perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan metode tersebut dan telah dimasukkan menjadi salah satu komponen penilaian Kecukupan Penyediaan Modal minimum (KPMM) setiap bulan.

Proses pengelolaan risiko operasional BNI Syariah dilakukan oleh setiap unit kerja Bank (*risk owner*). Untuk membantu proses tersebut, BNI Syariah mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Sistem ini mengintegrasikan unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang dengan unit manajemen risiko sehingga proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

PERISKOP terdiri dari modul *Self Assesment (SA) dan Loss Event Database (LED).* PERISKOP modul SA digunakan sebagai proses identifikasi risiko yang dilakukan sendiri oleh masing-masing unit kerja dengan cara melakukan penilaian dampak dan frekuensi risiko serta mencari penyebab dan solusinya. PERISKOP modul LED digunakan sebagai pencatatan kerugian yang bersifat finansial baik yang telah terjadi maupun hampir terjadi (*near miss*).

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank, sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, BNI Syariah mengembangkan *Business Continuity Management* dan *Disaster Recovery Plan*.

Kesiapan dalam penerapan manajemen risiko operasional, di seluruh jenjang organisasi Bank akan mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja Bank sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para *stakeholder.*

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya *mismatch* jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

According to Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015 about Calculation of Risk Weighted Assets for operational risk using the basis indicator approach for islamic banks.Bank has implemented operational risk RWA calculations using these methods and has been incorporated into one of the components votes Capital Adequacy Minimum Requirement (CAR) every month.

Process of operationalrisk management in BNI Syariah was performedbyeachunit of the Bank(risk owner). In assisting this process, BNI Syariah develops operational risk management tools, namely PERISKOP (Operational Risk Tool). This system integrates units at head office and branch offices with risk management unit, thus the processof identification, assessment, measurement, monitoring and control of operational risk is more accurate and faster.

PERISKOP comprises of Self Assessment (SA) module and Loss Event Database (LED). SA module in PERISKOP used as risk identification process performed by units respectively by assess the impact and frequency of risk and find the cause and solution. PERISKOP LED module used as recording of financial loss that happened or nearly happened.

To anticipate events that can disrupt the operations of the Bank, as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots and fires, BNI Syariah has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

Readiness in the implementation of operational risk management, at all levels of the organization in the Bank will encourage business growth and improve the performance of the Bank, thus generating added value for stakeholders.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to inability of Bank to meet the maturity of obligations from cash flow funding sources and/ or high quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is caused by a mismatch between the period of funding source and disbursement of Bank funds.

51. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, BNI Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas dan *stress testing*.

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat risiko likuiditas, yang dilakukan dengan mengambil langkah alternatif strategi pada setiap *traffic light* SR (*Contigency Funding Plan*).

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan dan pengelolaan posisi likuiditas di bawah fungsi pengawasan dari Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (KALMA).

51. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In performing the liquidity risk management process, BNI Syariah has performed identification, measurement, monitoring, and control of liquidity risk factors, among others, liquidity ratio, cashflow projections, maturity profile and stress testing.

Liquidity risk management is done in order to prevent greater losses due to liquidity risk, which is done by taking steps in the strategy of each traffic light Contigency Funding Plan (SR).

Liquidity risk management is done through funding strategy and liquidity position under the management oversight function of Committee Asset Liability Management (KALMA).

52. MANAJEMEN MODAL

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

52. CAPITAL MANAGEMENT

As of December 31, 2016 dan 2015, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is calculated based on Financial Services Authority Circular Letter No. 18/SEOJK/2015 dated June 8, 2015. Such CAR is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Modal inti	**2.428.140**	**2.064.262**	***Core capital***
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	58.458	189.919	***Supplementary capital (maximum at 100% over core capital)***
Total modal	**2.486.598**	**2.254.181**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			*Risk Weighted Assets(RWA) for*
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	13.964.260	12.447.294	*Credit Risk and Market Risk*
Risiko Operasional	2.701.744	2.111.736	*Operational Risk*
Total Aset Tertimbang	16.666.004	14.559.030	*Risk Weighted Assets*
Rasio KPMM Bank	**14,92%**	**15,48%**	***Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR)***
Rasio KPMM yang diwajibkan	**9,39%**	**9,38%**	***Minimum CAR***

53. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.BNISy/DPS/OPINI/1/2017/001 tanggal 17 Januari 2017 dan No. BNISy/DPS/OPINI/I/2016/001 tanggal 19 Januari 2016 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional PT Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

53. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on Letter No. BNISy/DPS/OPINI/1/2017/001 *dated January 17, 2017 and No. BNISy/DPS/OPINI/I/2016/001 dated January 19, 2016 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively, the Sharia Supervisory Board (DPS) of BNI Syariah stated that in general the sharia aspects in the operation of PT Bank BNI Syariah have complied with sharia principles and values.*

54. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) telah menerbitkan standar baru dan revisi atas standar akuntansi pada tahun 2016. Standar ini belum berlaku efektif untuk tahun 2016. Perubahan tersebut antara lain:

- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan*
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi*
- Amandemen PSAK No. 3: Laporan Keuangan Interim (Penyesuaian 2016)**
- Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja (Penyesuaian 2016) **
- PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Penyesuaian 2016) **
- PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah 104: Akuntansi *Istishna* (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah 107: Akuntansi Ijarah (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah No. 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (Revisi 2016) **

* Berlaku efektif 1 Januari 2018
** Berlaku efektif 1 Januari 2017

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

54. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) and Sharia Financial Accounting Standard Board (DSAS-IAI) issued new standard and revised of current standard in 2016. The standard is not applied in 2016. Following are new and revised standard:

- *Amendment SFAS No. 2: Statement of Cash Flow on Disclosure Initiatives**
- *Amendement SFAS No. 46: Income Taxes on Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Loss**
- *SFAS No. 3: Interim Financial Reporting (Improvement 2016)***
- *SFAS No. 24: Employee Benefits (Improvement 2016)***
- *SFAS No. 60: Financial Instrument: Disclosure (Improvement 2016)***
- *Sharia SFAS No. 101: Presentation of Sharia Financial Statement (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS 102: Murabahah Accounting (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS 104: Istishna Accounting (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS 107: Ijarah Accounting (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS No. 108: Accounting for Sharia Insurance Transaction (Revised 2016)***

* *Effective at January 1, 2018*
** *Effective at January 1, 2017*

At issuance date of the financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised SFAS to the Bank's financial statements.

2016
Laporan Tahunan
Annual Report

BNI Syariah

Kantor Pusat BNI Syariah

Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6
Jakarta 12950, Indonesia
T.: +62-21 2970 1946
F.: +62-21 2966 7947

www.bnisyariah.co.id

PENJELASAN TEMA

Komitmen Mewujudkan Prinsip Hidup Berhasanah

Bank BNI Syariah ingin memperkuat *positioning*-nya sebagai perbankan yang benar-benar menerapkan Hasanah Lifestyle Banking di tahun 2017 mendatang. Karena itu selama tahun 2016, Bank BNI Syariah terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi dan prakondisi yang menunjukkan *positioning* BNI Syariah sebagai perbankan yang mengusung dan menerapkan hasanah sebagai *lifestyle*, baik secara internal maupun eksternal.

Dengan penuh komitmen, prinsip hidup berhasanah (hasanah lifestyle) diterapkan sebagai keunggulan utama BNI Syariah yang tidak dimiliki oleh bank lainnya sehingga menjadi bank pilihan konsumen yang mengedepankan nilai-nilai hasanah dalam kehidupannya. Kehidupan yang tidak hanya mengutamakan kehidupan duniawi semata tetapi juga memikirkan bekal bagi masa depan kehidupan setelah mati nanti dengan berbuat kebaikan (hasanah).

KESINAMBUNGAN TEMA

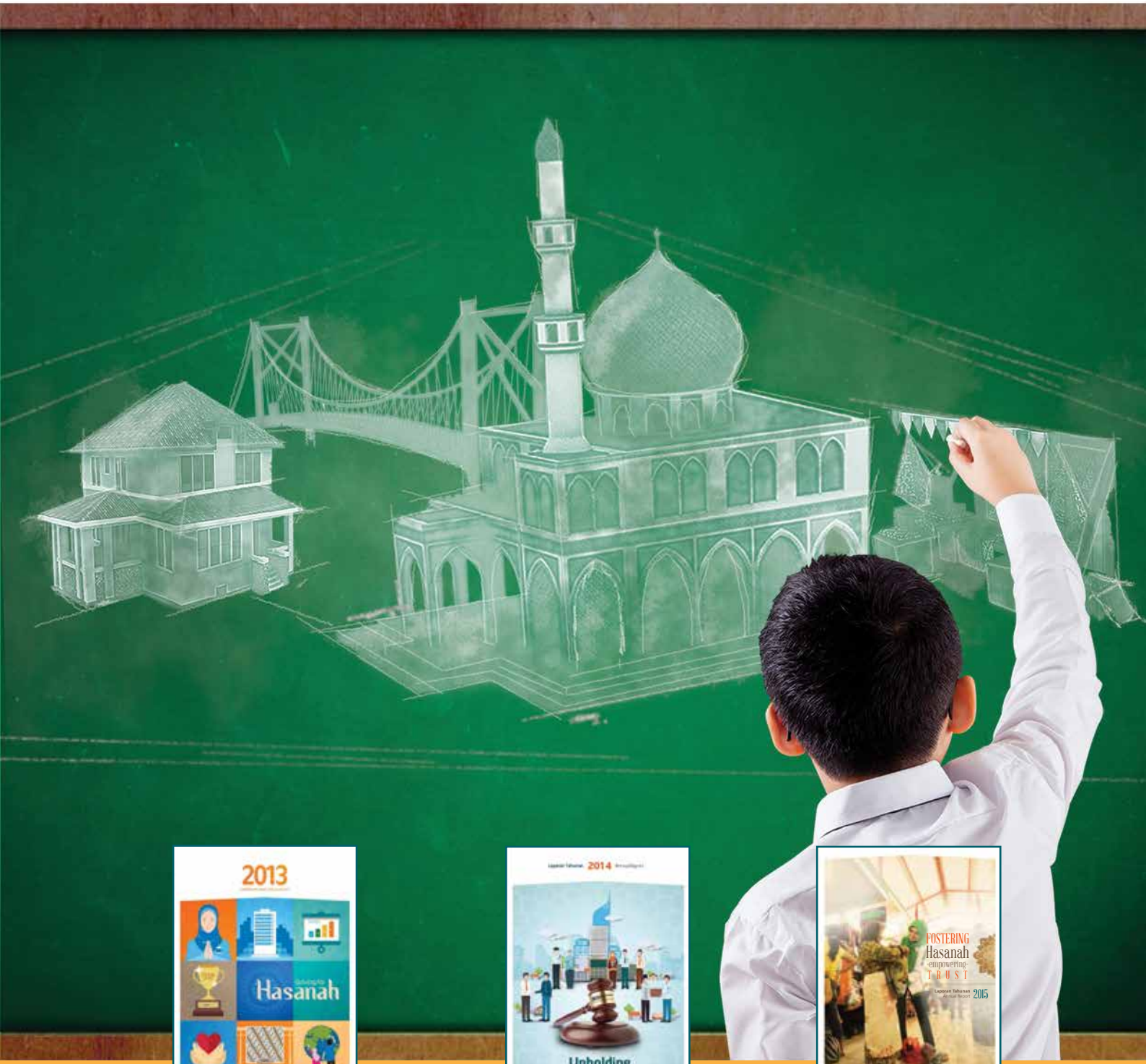

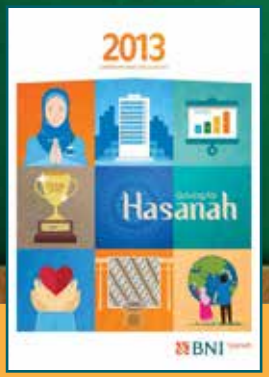

2013

Semangat untuk menjadi mitra perbankan yang dapat diandalkan mendorong BNI Syariah untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam hal kegiatan usaha maupun dalam pengertian yang lebih luas. Dari sisi kegiatan usaha, semangat ini telah mengantarkan BNI Syariah kepada sebuah pencapaian yang membanggakan di tahun 2013.

Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, semangat ini mendorong BNI Syariah untuk mengimplementasikan nilai-nilai hasanah pada lingkup yang lebih luas sekaligus sebagai manifestasi dari budaya kerja amanah dan jamaah. Atas dasar ini, tahun 2013 juga merupakan cerminan dari perjalanan BNI Syariah dalam berjuang untuk hasanah.

2014

Melalui seluruh fasilitas dan produk BNI Syariah, BNI Syariah mewujudkan pengabdian sejati yang sesuai kaidah syariah dengan semangat "Hasanah". Implementasi komitmen tersebut mengantarkan BNI Syariah pada peningkatan kapabilitas bisnis serta berbagai penghargaan di bidang syariah sebagai prestasi membanggakan di tahun 2014.

BNI Syariah bertekad untuk terus menegakkan semangat "Hasanah" pada seluruh produk, layanan, fasilitas, aktivitas, hingga perilaku karyawan BNI Syariah dalam rangka mewujudkan bisnis yang tak hanya berkomitmen pada kualitas yang bertumbuh, namun juga membawa kebaikan untuk dunia maupun akhirat.

2015

Tema ini mengangkat latar belakang bahwa tahun 2015 merupakan tahun yang sulit. Sulit bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan juga berimbas pada industri perbankan syariah pada khususnya. Namun demikian, usaha mikro tetap menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tema Laporan Tahunan 2015 ini berusaha mengangkat kekuatan dan perjuangan usaha mikro yang kemudian diadopsi oleh BNI Syariah sebagai tema untuk tetap berjuang menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang membawa esensi kebaikan (hasanah).

IKHTISAR KINERJA

Total Aset
dalam miliar Rupiah

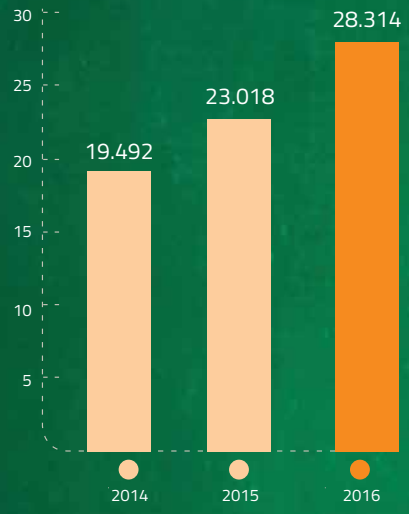

Total Pembiayaan
dalam miliar Rupiah

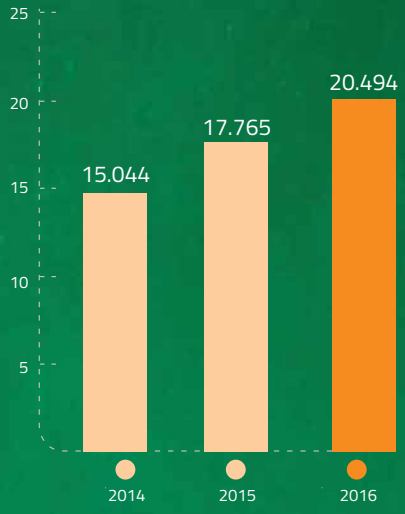

Dana Pihak Ketiga
dalam miliar Rupiah

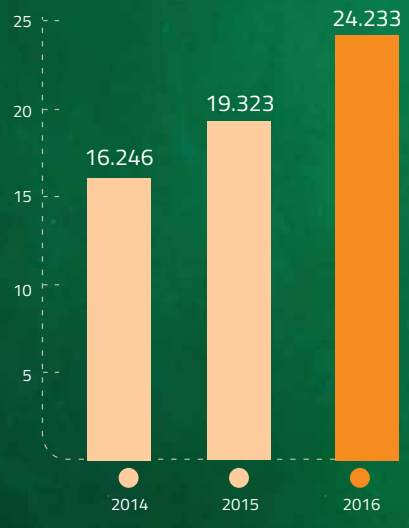

Komposisi Dana Pihak Ketiga
dalam miliar Rupiah

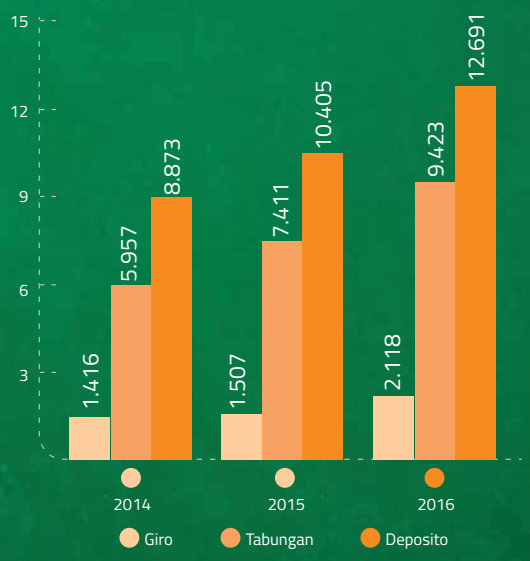

"Di tengah perlambatan pertumbuhan industri perbankan, BNI Syariah berhasil membukukan kinerja yang baik"

Laba bersih
NAIK
21,38%

Aset
NAIK
23,01%

DPK
NAIK
25,41%

Pembiayaan
NAIK
15,36%

DAFTAR ISI

Penjelasan Tema 2
Kesinambungan Tema 2
Ikhtisar Kinerja 4
Daftar Isi 6

PERFORMA 2016

Ikhtisar Keuangan 12
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015. 14
Rincian Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015 14
Penghargaan 15
Peristiwa Penting 26

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Pengawas Syariah 40
Laporan Dewan Komisaris 42
Laporan Direksi 48
Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank BNI Syariah 2016 56

PROFIL PERUSAHAAN

Data Perusahaan 60
Sekilas BNI Syariah 62
Jejak Langkah BNI Syariah 64
Bidang Usaha BNI Syariah 66
Segmen Usaha 67
Produk Dan Jasa 69
- Produk Simpanan 69
- Produk Pembiayaan Konsumer 70
- Produk Pembiayaan Komersial 71
- Jasa 72

Visi dan Misi 74
Tata Nilai BNI Syariah 75
Struktur Organisasi 76
Profil Dewan Pengawas Syariah 78
Profil Dewan Komisaris 80
Profil Direksi 86
Profil Senior Executive Vice President (SEVP) 92
Pejabat Senior 93
Struktur Dan Komposisi Pemegang Saham 94
Entitas Anak 94
Struktur Grup Perusahaan 95
Kronologis Pencatatan Saham 95
Kronologis Pencatatan Sukuk 95
Lembaga dan Profesi Penunjang 97
Wilayah Operasional BNI Syariah 98
- Maksud Dan Tujuan Pembentukan Kantor Wilayah 100
- Struktur Organisasi Kantor Wilayah 100
- Progress Pembentukan Kantor Wilayah 101
- Operasional Kantor Wilayah 101
- Profil Pemimpin Wilayah 101

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Teknologi Informasi 104
- Divisi Teknologi & Informasi 104
- Profil Pimpinan Divisi Teknologi Informasi 105
- Program Kerja Divisi Teknologi Informasi 2016 106
- Project Pemenuhan Kepatuhan Bank Indonesia - OJK 106
- Project Peningkatan Layanan 106
- Project Peningkatan Operasional 106
- Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi 107
- Sasaran Strategis Ti BNI Syariah Tahun 2017 107
- Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) 108

Pengembangan Operasional 110
- Profil Pimpinan Division Operasional 110
- Program Kerja Operasional Division 2016 110
- Implementasi Rencana Dan Strategi Operasional 110
- Pencapaian Divisi Operasional 2016 111
- Rencana Strategis 2017 112

Strategi, Keuangan dan Jaringan 114
- Perencanaan dan Pengembangan Jaringan 114
- Pemantauan Kinerja Jaringan 114
- Profil Pemimpin Kordinator Keuangan dan Jaringan 115
- Profil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 115
- Profil Pemimpin Satuan Kerja Keuangan 116
- Profil Pemimpin Jaringan dan Umum 116
- Fokus Utama Perencanaan Strategis 117

DAFTAR ISI

- Fokus Utama Satuan Kerja Keuangan 117
- Fokus Utama Jaringan 117
- Pencapaian 2016 Strategi dan Keuangan 118
- Prioritas 2017 119

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- Analisa Makro Dan Industri Perbankan Syariah 122
- Perekonomian Dunia 122
- Perekonomian Indonesia 122
- Industri Perbankan Nasional 124
- Perbankan Syariah 126
- Kinerja Perbankan Syariah 129
- Posisi BNI Syariah di Industri 130
- Pangsa Pasar BNI Syariah 130
- Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha 133
- Fokus Pengembangan Bisnis Perbankan Tahun 2016 133
  - Bisnis Komersial & Menengah 133
  - Bisnis Konsumer dan Ritel 135
  - Bisnis Mikro 146
  - Bisnis Treasuri dan Internasional 149
- Tinjauan Keuangan 154
- Laporan Posisi Keuangan 154
- Liabilitas 159
  - Dana Syirkah Temporer Non Bank 161
  - Dana Syirkah Temporer Bank 161
  - Analisa Mengenai Dana Pihak Ketiga 161
  - Surat Berharga Yang Diterbitkan 161
  - Ekuitas 161
- Laporan Laba Rugi 162
- Laporan Arus Kas 168
  - Komitmen dan Kontijensi 168
- Rasio Keuangan 169
- Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektibilitas Piutang 171
- Kemampuan Membayar Hutang 171
- Solvabilitas Bank 171
- Rentabilitas Bank 171
- Likuiditas Bank 171
- Kepatuhan Bank 173
- Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan 173
- Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko 178
- Struktur Modal 178
- Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal 182
- Kebijakan Deviden 182
- Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen dan/atau Karyawan 182
- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Sukuk) 182
- Informasi & Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Neraca 182
- Tingkat Kesehatan Bank 182
- Investasi, Ekspansi, Diverstasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang 182
- Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan 183
- Peningkatan/Penurunan yang Material dari Penjualan Bersih 183
- Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank 183
- Informasi dan Transaksi dengan Pihak Berelasi 183
- Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank 184
- Perbandingan Proyeksi dan Hasil Yang Dicapai 187
- Target 2017 187
- Rencana Produk dan Aktivitas Tahun 2017 187
- Aktivitas 188
- Prospek Pengembangan Usaha 189
- Strategi Bisnis 2017 191
- Aspek Pemasaran 193
- Komunikasi Pemasaran 194
- Penghargaan Marketing Communication 195
- Program Marketing Communication 2016 untuk Produk Dana dan Pembiayaan 195
- Rencana dan Strategi Marketing Communication Bnis Tahun 2017 196

SUMBER DAYA INSANI

- Kebijakan Pengelolaan SDI 200
- Roadmap Pengembangan SDI 201
- Struktur Pengelolaan SDI 202
  - Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Insani 202

DAFTAR ISI

- Profil Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani 203
- Fungsi & Ruang Lingkup Tugas Divisi SDI 203
- Program Pengembangan SDI Berkelanjutan 204
- Internalisasi Budaya Perusahaan 204
- Survey Penerapan Budaya Kerja 205
- Pengembangan Organisasi 2016 206
- Manajemen Karir 207
- Human Capital Engagement 2016 208
- Performance Management System 208
- Human Capital Information System (Hcis) 208
- Rekrutmen Pegawai 209
- Tahapan Rekrutmen Clerk 209
- Tahapan Rekrutmen "Officer Development Program" 209
- Tahapan Rekrutmen Professional Hire 210
- Data Rekrutmen 210
- Pelatihan dan Pengembangan 2016 212
- Talent Management 212
- Statistik Pegawai 218
- Komposisi Jumlah Karyawan Tetap (Pegawai Tetap) Berdasarkan Level Organisasi 218
- Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 219
- Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia 219
- Rencana Pengembangan Organisasi 220

TATA KELOLA PERUSAHAAN

- Latar Belakang Good Corporate Governance (GCG) 224
- Pencapaian GCG 2016 225
- Pefindo 226
- Rating Tingkat Kesehatan Bank 226
- Manfaat Penerapan GCG bagi BNI Syariah 227
- Landasan Penerapan GCG BNI Syariah 228
- Lima Prinsip GCG 228
- Landasan Regulasi dan Kebijakan 229
- Kebijakan Internal 230
- Komitmen Implementasi Prinsip GCG 232
- Roadmap Tata Kelola Perusahaan 234
- Sosialiasi GCG 236
- Rencana Penerapan GCG 2017 236
- Asesmen Penerapan GCG 237
- Struktur GCG 243
- Rapat Umum Pemegang Saham 244
- Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya 248
- Dewan Pengawas Syariah 250
- Dewan Komisaris 259
- Komisaris Independen 275
- Direksi 277
- Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali 290
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 291
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 291
- Prosedur Penilaian Kinerja 291
- Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris 291
- Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi 291
- Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris 291
- Penilaian Kinerja Direksi & Dewan Komisaris 292
- Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 293
- Komite-Komite dibawah Komisaris 294
- Komite Audit 294
- Komite Pemantau Risiko 299
- Komite Remunerasi & Nominasi 304
- Komite di Bawah Direksi 310
- Komite Kebijakan Risiko (KKR) 310
- Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) 314
- Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT) 316
- Komite Asset, Liabilities, Management (KALMA) 319
- Kebijakan Remunerasi 323
- Sekretaris Perusahaan 325
- Keterbukaan Informasi Kepada Publik 335
- Hubungan Dengan Media dan Akses Informasi 336
- Penanganan Benturan Kepentingan 337
- Internal Audit 338
- Kantor Akuntan Publik 344
- Fungsi Audit Eksternal 344

DAFTAR ISI

Manajemen Risiko	346
Sistem Pengendalian Intern	359
Fungsi Kepatuhan	362
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	369
Pendapatan Dana Non Zakat dan Penggunaannya	370
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	371
Kebijakan Buy Back Shares & Buy Back Obligation	374
Akses Informasi dan Data Perusahaan	374
Perkara Hukum dan Sanksi Administratif	380
Penyimpangan Internal	381
Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait	382
Anti Gratifikasi	382
Etika Bisnis dan Etika Kerja	383
Kode Etik BNI Syariah	383
Pengadaan Barang dan Jasa	389
Sistem Pelaporan Pelanggaran	398
Strategi Anti Fraud (SAF)	398
Whistleblowing System (WBS)	399
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	406
Dasar Acuan Pelaksanaan	407
Pengelolaan CSR	407
Yayasan Hasanah Titik	407
Pengelolaan Dana	408
Prinsip Dasar Pelaksanaan	409
Pilar Program CSR	410
Tanggung Jawab Terhadap Kelestarian Lingkungan	412
Tanggung Jawab Terhadap Sosial Kemasyarakatan	415
Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	422
Tanggung Jawab Terhadap Nasabah	430
Jaringan Kantor	436
Outlet Reguler	438
Outlet Mikro	446
LAPORAN KEUANGAN	

01 PERFORMA 2016

"Kinerja keuangan dan operasional BNI Syariah tahun 2016 secara umum berhasil mencapai target yang ditetapkan"

Ikhtisar Keuangan	12
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015	14
Rincian Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015	14
Penghargaan	15
Peristiwa Penting	26

IKHTISAR KEUANGAN

NERACA (dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	10.645	14.709	19.492	23.018	28.314
Jumlah Aset Produktif	9.769	13.648	17.389	20.287	24.773
Pembiayaan yang Diberikan	7.632	11.242	15.044	17.765	20.494
Surat Berharga yang Dimiliki	1.119	1.996	1.884	2.302	3.928
Penyertaan	-	-	-	-	-
Dana Pihak Ketiga	8.948	11.422	16.246	19.323	24.233
Giro	1.468	1.500	1.416	1.507	2.118
Tabungan	3.777	5.006	5.957	7.411	9.423
Deposito	3.702	4.917	8.873	10.405	12.691
Jumlah Liabilitas	2.186	3.839	3.085	3.311	4.685
Jumlah Ekuitas	1.187	1.305	1.950	2.216	2.487
Modal Saham	1.001	1.001	1.502	1.502	1.502

LABA RUGI (dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	936	1.333	2.026	2.429	2.802
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(291)	(418)	(691)	(846)	(905)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	645	915	1.335	1.583	1.897
Pendapatan Usaha Lainnya	84	147	100	119	102
Pendapatan Operasional	729	1.062	1.435	1.702	1.998
Beban Operasional	(674)	(878)	(1.119)	(1.193)	(1.306)
(Penyisihan)/pembalikan penyisihan kerugian aset produktif	86	8	(93)	(221)	(324)
Pendapatan/Beban Non Operasional – Bersih	(3)	(12)	(2)	20	6
Laba Sebelum Pajak	138	180	220	308	373
Laba Bersih	102	117	163	229	277
Jumlah Pendapatan Komprehensif	99	117	163	266	271
Laba Bersih per Saham Dasar	98	117	137	152	185

IKHTISAR KEUANGAN

RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
Coverage Ratio	76,88%	91,27%	90,73%	84,51%	92,57%
Tingkat Pengembalian Aset	1,48%	1,37%	1,27%	1,43%	1,44%
Tingkat Pengembalian Ekuitas	9,31%	9,65%	10,83%	11,39%	11,94%
Rasio Kecukupan Modal dengan Memperhitungkan Risiko Pembiayaan	19,29%	16,54%	18,76%	18,16%	17,81%
Rasio Kecukupan Modal dengan Memperhitungkan Risiko Kredit/Penyaluran Dana dan Risiko Pasar	19,07%	16,23%	18,43%	18,11%	17,81%
Rasio Kecukupan Modal dengan Memperhitungkan Risiko Kredit/Penyaluran Dana, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	-	-	16,26%	15,48%	14,92%
Aset Tetap Terhadap Modal	12,79%	13,46%	10,96%	13,26%	15,46%
Aset Produktif Bermasalah	1,58%	1,53%	1,61%	2,35%	2,43%
Pembiayaan Bermasalah Kotor	2,02%	1,86%	1,86%	2,53%	2,94%
Pembiayaan Bermasalah Bersih	1,42%	1,13%	1,04%	1,46%	1,64%
PPA Produktif terhadap Aset Produktif	1,33%	1,45%	1,50%	1,90%	2,28%
Pemenuhan PPA Produktif	100,46%	101,72%	110,35%	108,01%	108,83%
Margin Pendapatan Bersih	11,03%	9,51%	8,15%	8,25%	8,32%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	88,79%	88,11%	89,80%	89,63%	87,67%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	184,10%	294,22%	158,18%	149,41%	188,40%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	20,53%	26,10%	15,82%	14,38%	16,55%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	84,99%	97,86%	92,60%	91,94%	84,57%

IKHTISAR KEUANGAN

Penerbitan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015

Nama	Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015
Emisi	Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Tanggal Terbit	26 Mei 2015
Tanggal Jatuh Tempo	26 Mei 2018
Tingkat Bagi Hasil	9,25%
Nisbah Pemegang Sukuk	15,35% (lima belas koma tiga lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
Pencatatan	Kustodian Sentral Efek Indonesia
Peringkat	idAA+(sy) oleh PEFINDO
Penggunaan	Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah Rupiah

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015.

Rincian Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015

Pembayaran ke	Tanggal Pembayaran	Total Pembayaran bagi Hasil Sukuk	Eq.Rate
1	26 Agustus 2016	11.548.224.052	9,24%
2	26 November 2016	11.377.284.943	9,10%
3	26 Februari 2016	11.316.557.134	9,05%
4	26 Mei 2016	11.433.004.604	9,15%
5	26 Agustus 2016	11.470.211.757	9,18%
6	26 November 2016	11.254.042.720	9,00%

PENGHARGAAN

JANUARI

Top Property Award 2016

- Predikat
  Kategori KPR Sharia
- Pemberi
  Majalah Marketing

Top Brand Award 2016

- Predikat
  Kategori Tabungan Sharia
- Pemberi
  Majalah Marketing

FEBRUARI

Indonesia Corporate Secretary-Communication Award 2016

- Predikat
  The Best Quick Minded Corporate Secretary for Indonesia Syariah Bank Company untuk Endang Rosawati, Head of Corporte Sekretary & Communication Division PT Bank BNI Syariah
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Indonesia Corporate Secretary-Communication Award 2016

- Predikat
  The Best Website
- Pemberi
  Majalah Economic Review

PENGHARGAAN

APRIL

5th Infobank Digital Brand of the Year 2016

- Predikat
  Peringkat I Digital Brand KPR Bank Umum Syariah
- Pemberi
  Majalah Infobank

Indonesia My Home Award III 2016

- Predikat
  The Best Growth for Sharia Banking
- Pemberi
  Majalah My Home dan Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan

TOP Eksekutif Muslim 2016

- Predikat
  Top Eksekutif Muslim 2016 atas nama Imam Teguh Saptono, Direktur Utama BNI Syariah, kategori Korporasi Bisnis
- Pemberi
  Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) dan Majalah Ibadah

MEI

WOW Service Excellence Award 2016 Jabodetabek

- Predikat
  Bronze Champion, Category: Conventional Bank (Sharia Bank)
- Pemberi
  Markplus.Inc

MEI

The 12th Islamic Finance Award 2016

- Predikat
  1st Rank The Biggest Contributor Financing Islamic Full Fledge Bank
- Pemberi
  Islamic Finance Award

The 12th Islamic Finance Award 2016

- Predikat
  1st Rank The Most Expansive Financing Islamic Full Fledge Bank: Equity Idr 1-5 Tn (Buku 2)
- Pemberi
  Islamic Finance Award

The 12th Islamic Finance Award 2016

- Predikat
  Runner Up The Best Islamic Full Fledge Bank: Equity Idr 1-5 Tn (Buku 2)
- Pemberi
  Islamic Finance Award

Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia

- Predikat
  Pemrakarsa dan Penyelenggara Pawai Hasanah dengan Papan Orasi Mengajak Kebaikan Terbanyak
- Pemberi
  Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia

PENGHARGAAN

JUNI

Indonesia Digital Popular Brand Award 2016

- Predikat
  Digital Popular Brand Award 2016 Kategori Tabungan Syariah
- Pemberi
  TrasNCo, IMFocus dan BisnisUpdate.com

Indonesia Service Quality Award 2016

- Predikat
  The Best Service Quality Award 2016 Kategori Perbankan Syariah
- Pemberi
  Majalah Marketing dan Carre dan Keuangan

AGUSTUS

Best Syariah 2016

- Predikat
  Best Syariah Terbaik 2016 Kategori Bank Syariah Aset Lebih dari Rp10 Triliun
- Pemberi
  Majalah Investor, Berita Satu Media Holding

21th Infobank Awards 2016

- Predikat
  Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015
- Pemberi
  Majalah Infobank

AGUSTUS

Kompetisi Program PR Inspirasional The 5th Indonesia Public Relations Awards & Summit (IPRAS) 2016

- Predikat
  Pemenang Harapan, Kategori Korporasi Swasta Nasional dan Multinasional
- Pemberi
  Serika Pekerja Pers (SPS) Pusat

SEPTEMBER

Indonesia Banking Award 2016

- Predikat
  The Best Bank in Retail Banking Services Kategori Bank Syariah Aset di Atas 10T
- Pemberi
  Tempo Media Group dan Indonesia Banking School

Indonesia Banking Award 2016

- Predikat
  The Most Efficient Bank Kategori Bank Syariah Aset di Atas 10T
- Pemberi
  Tempo Media Group dan Indonesia Banking School

Indonesia Banking Award 2016

- Predikat
  The Most Reliable Bank Kategori Bank Syariah Aset di Atas 10T
- Pemberi
  Tempo Media Group dan Indonesia Banking School

PENGHARGAAN

SEPTEMBER

Indonesia *Human* Capital Study (IHCS) 2016

- Predikat
  Appreciation of *Human* Capital Management System Improvement
- Pemberi
  Indonesia *Human* Capital Study (IHCS)

Indonesia *Human* Capital Study (IHCS) 2016

- Predikat
  Best *Human* Capital Index Effectiveness
- Pemberi
  Indonesia *Human* Capital Study (IHCS)

Global Islamic Finance Awards

- Predikat
  The Most Improved Islamic Bank 2016
- Pemberi
  The Awards Committee of Global Islamic Awards

Infobank Sharia Finance Awards 2016

- Predikat
  Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2011-2015
- Pemberi
  Majalah Infobank

OKTOBER

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-1 Corporate Social Responsibility untuk Buku 2 Syariah (Aset > Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-2 Buku 2 Syariah (Aset > Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-2 *Human* Capital untuk Buku 2 Syariah (Aset >Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-3 Risk Management untuk Buku 2 Syariah (Aset >Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

PENGHARGAAN

OKTOBER

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-1 Good Corporate Governance untuk Buku 2 Syariah (Aset > Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-2 Corporate Communication untuk Buku 2 Syariah (Aset >Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-3 Information & Technology untuk Buku 2 Syariah (Aset >Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-3 Legal untuk Buku 2 Syariah (Aset >Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

OKTOBER

Anugerah Perbankan Indonesia-V-2016

- Predikat
  Peringkat-3 Risk Management untuk Buku 2 Syariah (Aset >Rp10T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Bisnis Indonesia Banking Award 2016

- Predikat
  Most Efficient Bank, Kategori Bank Syariah
- Pemberi
  Harian Bisnis Indonesia

Sosial Media Award 2016

- Predikat
  Great Perfoming in Social Media
  Kategori : Sharia Savings
- Pemberi
  Majalah Marketing

Digital Marketing Award 2016

- Predikat
  Great Perfoming Website
  Kategori : Sharia Banking
- Pemberi
  Majalah Marketing

PENGHARGAAN

NOVEMBER

Top Bank 2016

- Predikat
  Tabungan iB Hasanah sebagai TOP Tabungan Syariah 2016
- Pemberi
  Top Bank 2016

DESEMBER

Indonesia Good Corporate Governance Award II, 2016

- Predikat
  GCG Terbaik Bank Syariah di Indonesia dengan Predikat Sangat Baik (A) Sektor: Keuangan – Bank (Buku II-Aset Rp10T s/d Rp25T)
- Pemberi
  Majalah Economic Review

Indonesia Best Banking Brand Award 2016

- Predikat
  The Winner of Best Banking Brand 2016 for Consumer Choice, Best Reputation, Most Reliable, Most Efficient, and Best Performance Title
- Pemberi
  Majalah Warta Ekonomi

DESEMBER

Good Corporate Governance Award 2016, Indonesia Trusted Companies

- Predikat
  Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)
- Pemberi
  Majalah Swa

Sustainable Finance Award 2016

- Predikat
  Pemenang Kategori Perbankan Syariah
- Pemberi
  Otoritas Jasa Keuangan

PERISTIWA PENTING

12 Januari

Penandatanganan kerja sama antara BNI Syariah dengan Kementerian Agama dimana BNI Syariah ditunjuk sebagai salah satu Bank Operasional II (BO II) yaitu bank penyalur gaji Pegawai Negeri Sipil selain itu BNI Syariah juga ditunjuk sebagai salah satu Bank persepsi pengelola rekening Kementerian dan Lembaga (rekening pemerintah) serta *Treasury National Pooling*.

14 Januari

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BNI Syariah dengan Bank Aceh dalam rangka kerja sama pengembangan kapabilitas terkait rencana konversi Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah, sekaligus kerja sama pengembangan bisnis, khususnya di Wilayah Aceh. Terkait proses konversi, BNI Syariah menjadi bank *partner* yang memberikan asistensi teknis dan menyediakan narasumber selama proses konversi.

23 Januari

Apresiasi Layanan Cabang (ALC) Award 2016 BNI Syariah, apresiasi bagi segenap pejuang layanan yang senantiasa memberikan layanan Hasanah kepada nasabah BNI Syariah

26 Januari

The Journey of Hasanah, peresmian mobil cerdas Hasanah, apresiasi bagi pendiri dan tim insan Hasanah serta peresmian wall of fame BNI Syariah (Perjalanan BNI Syariah yang terangkum dalam prestasi & penghargaan)

15 Februari

BNI Syariah memberikan bantuan mobil jenazah untuk masyarakat Palembang oleh Direktur Operasional, Pemimpin Cabang BNI Syariah Palembang kepada Pengurus Masjid Darul Muttaqin Palembang

19 - 20 Februari

Gathering Jurnalis Ekonomi Syariah Jakarta, dihadiri oleh jajaran *management* dan jurnalis dari berbagai media guna membangun sinergi dan mengedukasi masyarakat tentang perbankan syariah

25 Februari

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahunan BNI Syariah yang dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris, Pemegang saham dan BNI Syariah

29 Februari

Peresmian Kantor Cabang Mikro Parepare, dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan dan pimpinan Cabang Mikro Parepare dengan penyerahan gerobak dagang "Kedai Hasanah" dan perpustakaan keliling kepada 10 pengusaha mikro Pare-Pare

PERISTIWA PENTING

4 Maret

BNI Syariah beri hadiah umrah kepada nasabah dalam program migrasi BNI Haji dan Hijrah Hasanah di acara Keuangan Syariah Fair (KSF) yang dihadiri 40 lembaga keuangan syariah

14 Maret

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNI Syariah dan PT Pegadaian dalam penyediaan jasa layanan pendaftaran porsi haji yang bertujuan untuk memudahkan nasabah pegadaian dalam proses pendaftaran porsi haji.

5 April

Relokasi Kantor BNI Syariah Cabang Cilegon diresmikan oleh Walikota Cilegon bersama Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah

6-7 April

BNI Syariah berpartisipasi dalam IFN (*Islamic Finance News*) ke 12 tahun 2016 dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan institusi perbankan asia dan lebih dari 300 delegasi dari berbagai negara Asia.

12 Mei

Peluncuran produk Tunas Card Desain Bebas dari Tabungan BNI iB Tunas Hasanah dalam Keuangan Syariah Fair yang dilaksanakan oleh OJK

15 Mei

Jajaran manajemen, karyawan dan mitra BNI Syariah melaksanakan Hasanah for Society merupakan kegiatan "make over" fasilitas umum yang sudah tidak layak dan kurang mendapat perhatian sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian perayaan milad ke-6 BNI Syariah, Hasanah A Six

19 Mei

Pelepasan 300 jemaah peserta Umrah Keluarga Hasanah BNI Syariah yang dihadiri oleh Direktur Utama BNI Syariah, dan Direktur Utama Aerohajj dengan tema "Pulang umrah bawa apa ?"

29 Mei

Tarhib Ramadhan sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian perayaan milad ke-6 BNI Syariah bersama dengan Polda Metro Jaya dan mitra BNI Syariah, yang dihadiri 4000 orang dan tercatat sebagai pawai dengan jumlah papan orasi kebaikan

PERISTIWA PENTING

10 Juni

BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik memberikan donasi kepada Palestina sebagai bagian kepedulian kepada warga Palestina

19 Juni

Sebagai bentuk dukungan BNI Syariah terhadap program pemerintah dalam peningkatan gerakan transaksi non tunai, dilakukan Peluncuran tap cash co-branding BNI Syariah dan BNI

19 Juni

Muhassabah Hasanah merupakan puncak perayaan milad ke-6 BNI Syariah, Hasanah A Six yang dihadiri jajaran manajemen, komisaris, Direksi BNI dan anak perusahaan BNI, seluruh karyawan Kantor Pusat dan Cabang. Sebelumnya telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan pra milad yaitu Umrah Ibu Guru Hasanah, Umrah Keluarga Hasanah, Hasanah Meme Contest, Hasanah Movie Festival, Hasanah for Society, Tarhib Ramadhan, Jemari Hasanah, Tadarus Anak Hasanah, Ta'jil Hasanah, dan Insan Hasanah Khatam Qur'an. Rangkaian kegiatan ini dilakukan serempak di 67cabang BNI Syariah.

30 Juni

BNI Syariah menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dalam hal pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah

15 Juli

BNI Syariah bermitra dengan Baznas Charity Store, mendukung pengumpulan dana zakat melalui sumbangan dari public figure dengan cara menyisihkan sebagian harta dan lelang barang dimana hasil penjualan disalurkan melalui rekening BAZNAS di BNI Syariah

25 Juli

Halal bi Halal Hasanah 1437 H dihadiri oleh jajaran manajemen, komisaris, pimpinan serta karyawan BNI Syariah. Acara dimeriahkan dengan lomba dengan tema keragaman nusantara, dimana setiap divisi menampilkan ciri khas dari masing-masing daerah yang tercermin dalam dekorasi dan sajian makanan.

25 Juli

Launching KCP Pondok Pinang yang dihadiri oleh Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono beserta pemimpin divisi dan cabang

28 Juli

Pemaparan Kinerja BNI Syariah Triwulan II tahun 2016 dihadiri oleh jajaran BOM, pemimpin Divisi, serta 50 wartawan cetak dan tulis dari berbagai media

PERISTIWA PENTING

29 Juli

BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik melaksanakan program *upgrading* bagi 50 guru Hasanah di desa terpencil serta pengiriman relawan bagi korban bencana di lokasi banjir Kabupaten Serang, Banten

2-4 Agustus

Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono menjadi salah satu pembicara dalam 12th World International Economic Forum yang dihadiri oleh Presiden RI, dan kepala negara anggota OKI, lebih dari 2500 delegasi dan tokoh penting dari 100 negara yang hadir dalam acara tersebut.

4 Agustus

Launching Program Tabungan Qurban BNI iB Hasanah kerja sama BNI Syariah dengan ACT untuk memudahkan nasabah BNI Syariah untuk berkurban dan *cashback* bagi pemegang iB Hasanah Card melalui program Superqurban kerja sama dengan Rumah Zakat di acara Keuangan Syariah Fair

17 Agustus

Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang dihadiri oleh jajaran BOM, pemimpin Divisi, pemimpin cabang Jabodetabek, seluruh karyawan kantor pusat dan perwakilan Jabodetabek

12 September

Pelaksanaan Qurban Party Hasanah, selain pemotongan dan pembagian hewan Qurban, santunan kepada yatim dan dhuafa juga perlombaan lomba memasak nasi goreng serempak di 67 kantor cabang BNI syariah dan dihadiri jajaran BOM. Melalui program ini di tahun 2016 disalurkan 88 ekor sapi dan 442 ekor kambing

26 September

BNI Syariah luncurkan *Tapcash* edisi khusus di Keuangan Syariah Fair Aceh disaksikan oleh Kepala OJK regional 5 Sumatera bagian Utara dan Kepala OJK Banda Aceh

2 Oktober

BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik dan Gerakan Cinta Quran menginisiasi gerakan masal Cinta Quran bertema Amazing Muharram, yakni gerakan pengentasan 10.000 orang buta aksara Al Qur'an di 15 kota di Indonesia

10 Oktober

Untuk memberikan kemudahan dan transaksi non tunai selama berada di tanah suci, BNI Syariah menjalin kerja sama dengan perusahaan travel Aerohajj (Garuda Indonesia Group) meluncurkan kartu *co branding* iB Hasanah Card dalam *event* Garuda Travel Fair (GATF)